PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**
**NOMOR 22 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026**

# RKPD
## KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2026



**BUPATI MUSI BANYUASIN**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987 );
8. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan kerja Pemerintah Kabupaten periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II
## KEDUDUKAN RKPD
### Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah; dan
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan RKPD provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## BAB III
## SISTEMATIKA
### Pasal 3

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029, serta program prioritas nasional dan provinsi.

(2) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN; |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; |
| BAB III | : | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; |
| BAB IV | : | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; |
| BAB VI | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan |
| BAB VII | : | PENUTUP. |

## BAB IV
## PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD
### Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi:
   a. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2026;
   b. pedoman penyempurnaan perangkat daerah; dan
   c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026, untuk memastikan APBD tahun 2026 telah disusun berlandaskan RKPD tahun 2026.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) RKPD Tahun 2026 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 22
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan. .....I-3
1.3 Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya. ..... I-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....I-21
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....I-22
1.6 Pendekatan .....I-24
1.7 Rujukan Kebijakan .....I-33
1.8 Inovasi Daerah.....I-33

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1 Kondisi Umum Daerah.....II-1
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Triwulan II .....II-298
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah.....II-325

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-24
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Kab. Muba .....III-50

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.....IV-66

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....V-1

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

6.1 Indikator Makro Pembangunan ..... IV-3

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IV-4

6.3 Indikator Kinerja Daerah(IKD) ..... IV-6

**BAB VII PENUTUP..... VII-1**

# BAB I
# PENDAHULUAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

***"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi" adalah tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.***

## 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Dengan letak geografisnya yang strategis, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan daya saingnya dalam berbagai sektor. Namun demikian, untuk dapat mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan upaya yang strategis dan terencana dari pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyadari pentingnya meningkatkan daya saing daerah dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fondasi pembangunan daerah, salah satunya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.

Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi hal yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing daerah. SDM yang berkualitas akan menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, pelayanan publik yang bersih dan berkualitas juga menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan memperkuat kualitas SDM dan pelayanan publik yang bersih, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga mampu bersaing dalam kancah regional, nasional, maupun internasional. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Maka dari itu RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 mengusung tema **"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi".** Penetapan tema tersebut mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, tema juga mempertimbangkan isu strategis serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 194);
8. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 7);

27. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daera. h Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 Nomor 1);

## 1.3 HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 merupakan RKPD tahun terakhir dalam pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terpadu Kabupaten Musi Banyuasin. Dokumen RKPD Tahun 2026 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan rangkaian proses penyusunan RKPD Tahun 2026 maka disusun surat edaran Bupati tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026, serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

### 1.3.1 RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas, strategi, dan program kerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. RKPD ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat (dalam hal ini pemerintah negara) yang mencakup visi, misi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. RKP bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan lain-lain.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKP 2026 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKPD Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun Tema RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.**

Penekanan prioritas Pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri dari 5 direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Kedaulatan Pangan dan Energi (Prioritas Nasional 2)
   - Pangan (optimalisasi BULOG, Pelaksanaan lumbung pangan/*food estate*).
   - Energi (peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan).
   - Air (pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir).
   - Pengelolaan sampah.
2. Ekonomi yang produktif dan Inklusif (Prioritas Nasional 1,3,4,5,6,7,8)
   - Pendidikan dan Kesehatan (ekosistem Makan Bergizi Gratis, Percepatan renovasi sekolah, sekolah unggulan, cek kesehatan, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi Pendidikan, Sekolah Rakyat);
   - Deregulasi dan Kepastian Hukum (reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, ketertarikan investasi);
   - Pertahanan Semesta (komponen Cadangan, pemenuhan alutsista, penguatan kemampuan territorial);
   - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia, optimalisasi potensi Danantara);
   - Adopsi Teknologi dan Inovasi (Transformasi digital, riset dan inovasi);

- Percepatan Pengentasan Kemiskinan (data Tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, 3 juta rumah, koperasi desa/kelurahan merah putih);
- Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi.

**Tabel 1.1**
**Keterkaitan Prioritas Nasional RKP, Prioritas Provinsi dan Prioritas RKPD Kab. Muba Tahun 2026**

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA) | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL |
|---|---|---|
| Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (PN 1) | | |
| Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta megembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3) | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA) | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL |
|---|---|---|
| Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4) | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas; |
| Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5) | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat; |
| Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.(PN 2) | | Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru |
| Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.(PN 6) | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA) | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL |
|---|---|---|
| | | Menurunkan Angka Kemiskinan; |
| Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. (PN 7) | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas |
| Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8) | | Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal. |

*Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Sumsel, Rancangan RKP Tahun 2026, diolah*

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional maka **isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2026** yang akan dicapai sebagai berikut :

(1) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia;

(2) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat;

(3) Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan dukungan infrastruktur untuk perekonomian;

(4) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

(5) Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;

(6) Degradasi kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya penanganan daerah risiko bencana.

RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mengakomodir **Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029**, dengan visi "**Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin**". Adapun **Misi Kepala Daerah** yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1) Tata Kelola pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani;
2) Penguatan SDM melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
3) Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera;
4) Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan;
5) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Konektivitas;
6) Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi;
7) Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

### 1.3.2 RKPD dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, RKPD memiliki hubungan yang erat dan strategis dengan RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan kepala daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana tahunan, termasuk RKPD, agar pembangunan yang dilaksanakan tetap konsisten dan terarah sesuai dengan mandat pembangunan jangka menengah.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD secara bertahap dan terukur. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan strategi dan kebijakan RPJMD ke

dalam rencana aksi tahunan yang konkrit dan dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah.

Secara substansial, keterkaitan antara RKPD dan RPJMD dapat dilihat dari konsistensi prioritas pembangunan tahunan dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, serta keselarasan indikator kinerja, program prioritas, dan alokasi anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD, dilakukan pemetaan dan analisis keterkaitan program dan kegiatan tahunan dengan dokumen RPJMD sebagai upaya untuk menjamin konsistensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berlangsung secara sistematis, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Pertama dan isu strategis aktual serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas;

2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3) Menurunkan Angka Kemiskinan;
4) Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah;
5) Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan;
6) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas;
7) Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing;
8) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, ada 22 (dua puluh dua) sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik;
2) Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
5) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
6) Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat;

7) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
8) Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan pangan masyarakat;
9) Meningkatnya pendapatan masyarakat;
10) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan;
11) Terjaganya tingkat inflasi;
12) Terciptanya kerukunan umat beragama;
13) Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat;
14) Meningkatnya usaha mikro/IKM yang menerapkan standar halal;
15) Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten);
16) Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman;
17) Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak;
18) Meningkatnya inovasi daerah;
19) Meningkatnya kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital;
20) Meningkatnya pembangunan desa;
21) Turunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK);Turunnya potensi risiko bencana.

Bedasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 telah ditetapkan tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan RKPD. Memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2026 serta Isu Strategis, maka tema pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah **"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi".**

### 1.3.3 RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar untuk menetapkan Lokasi program dan kegiatan Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 sebagai berikut:

- Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu;
- Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian;
- Pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi;
- Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang; dan
- Penguatan dan pemulihan fungsi Kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, Kawasan rawan bencana dan Kawasan lindung lainnya.

Struktur Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 sebagai berikut:

- Sekayu direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Sungai Lilin dan bayung Lencir direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Babat Toman direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)
- Adanya rencana pengembangan ruas jaringan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin
- Adanya rencana peningkatan terminal tipe B menjadi tipe A di Sekayu
- Adanya rencana Pembangunan terminal tipe B di Sungai Lilin dan adanya rencana Pembangunan terminal tipe C di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
- Adanya rencana Pembangunan stasiun kereta api barang dan penumpang dengan jalur lintas provinsi dan Tanjung Enim
- Adanya sistem jaringan transportasi udara yaitu pada Lapangan Terbang Skyline di Sekayu
- Adanya rencana Pembangunan pembangkit Listrik PLTU MURA/MUBA , PLTU Sumsel 5, PLTU Sumsel 7, Pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Sekayu dan Pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Sungai Lilin
- Adanya rencana pengembangan wilayah Sungai yaitu Sub DAS Musi, Sub DAS Batanghari Leko, Sub DAS Dawas dan Sub DAS Lalan

- Adanya rencana pengembangan air baku untuk air minum dengan sistem IPAM (Instalasi Pengolah Air Minum)
- Terdapat 5 TPA di Kabupaten Musi Banyuasin yang terletak di Sekayu (desa Muara Medak) dan Babat Toman (Desa Kasmaran). Terdapat juga TPA yang akan direncanakan sebagai TPST yaitu di Desa Muara Teladan (Sekayu), Sungai Lilin dan Bayung Lencir
- Sistem pengolahan limbah yang digunakan adalah Sanitary Landfill
- Adanya rencana SPAM di Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin

### 1.3.4 RKPD dan Dokumen RENJA Perangkat Daerah

RKPD mempunyai hubungan timbal balik dengan RENJA Perangkat Daerah. Disatu sisi rancangan awal RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan Program Prioritas setiap Perangkat Daerah dan disisi lain RENJA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi selanjutnya terintegrasi kedalam RKPD. Renja PD merupakan penjabaran teknis dari RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah dibawah koordinasi BAPPEDA.

### 1.3.5 RKPD dan R-APBD

RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disusun berdasarkan RKPD diajukan kepada pihak Legislatif (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun 2026.

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan arah pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

(1) Menyediakan suatu pedoman bagi eksekutif dan legislatif Kabupaten Musi Banyuasin dan seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan program prioritas serta kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan Kerjasama Pihak Swasta;

(2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2026;

(3) Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Pusat;

(4) Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

## 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN, yang terdiri dari :
   (1) Latar Belakang;
   (2) Dasar Hukum Penyusunan;
   (3) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
   (4) Maksud dan Tujuan;
   (5) Sistematika Dokumen RKPD;
   (6) Pendekatan;
   (7) Rujukan Kebijakan;

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, yang terdiri dari :

(1) Kondisi Umum Daerah;

(2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; dan

(3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, yang terdiri dari :

(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan

(2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, yang terdiri dari :

(1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan

(2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, dimana pada bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, dimana bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

VII. PENUTUP, bab ini menjelaskan kesimpulan.

## 1.6 PENDEKATAN

### 1.6.1 Pendekatan HITS

Pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial adalah pendekatan yang memperhatikan berbagai dimensi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing pendekatan tersebut dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam penyusunan rencana kerja:

- Holistik : Pendekatan holistik menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap berbagai aspek yang relevan dan saling terkait dalam suatu konteks. Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, pendekatan holistik memperhatikan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya secara serentak. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami implikasi dari kebijakan atau program yang diusulkan secara menyeluruh. Sebagai contoh Program

Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa. P3PD diharapkan dapat membawa perubahan pada sistem pembinaan dan pengawasan desa serta pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- Integratif: Pendekatan integratif mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan perspektif yang ada dalam proses penyusunan rencana kerja. Ini mencakup melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pihak, rencana kerja dapat dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi yang beragam dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi. Sebagai contoh dalam hal Pencapaian Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan serta dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Dinas Kesehatan melalukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hingga menyentuh masyarakat lapisan paling bawah mulai dari penyediaan sarana posyandu sampai ke puskesmas.

- Tematik : Pendekatan tematik fokus pada pemilihan tema-tema atau isu-isu tertentu yang menjadi prioritas dalam penyusunan rencana kerja. Tema-tema ini biasanya mencerminkan tantangan atau peluang utama yang dihadapi oleh daerah tersebut, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, atau perlindungan lingkungan. Dengan menetapkan tema-tema ini, rencana kerja dapat difokuskan untuk mengatasi isu-isu kunci yang relevan bagi masyarakat setempat. Sebagai contoh dalam upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan meluncurkan program Bantuan Sayang Anak (BASANAK).
- Spasial: Pendekatan spasial mempertimbangkan dimensi geografis dan spasial dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Ini mencakup pemetaan dan analisis terhadap karakteristik fisik dan geografis daerah tersebut, serta potensi dan tantangan yang terkait dengan struktur spasialnya. Dengan memahami karakteristik spasial daerah, rencana kerja dapat dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara spasial. Sebagai contoh pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dengan menggabungkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, pemerintah dapat memastikan bahwa rencana tersebut mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam konteks lokal, serta dapat menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

### 1.6.2 Pendekatan SIPD

Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akurasi dalam sistem perencanaan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan telah dilakukan melalui SIPD yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diturunkan menjadi Permendagri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Guna memenuhi amanat peraturan-peraturan diatas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai menggunakan aplikasi SIPD untuk perencanaan tahun 2026. Di dalam aplikasi SIPD terdapat 3 informasi pemerintah daerah yaitu :

(1) Informasi Pembangunan Daerah Kaitan dengan data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Informasi Keuangan Daerah Terdiri dari Informasi Perencanaan Anggaran Daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya.

(3) Informasi Pemerintah Daerah lainnya Terdiri dari informasi LPPD, EPPD, Perda, dan Binwas/Audit.

### 1.6.3 Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama dan menciptakan rasa memiliki, melalui berbagai kegiatan yaitu:

(1) Rapat dengan *stakeholders* Kabupaten; dan

(2) Musrenbang.

### 1.6.4 Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin dan pertemuan tematik yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengikutsertakan unsur akademisi, praktisi dan para ahli. Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada pendekatan ini, yaitu:

(1) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang bersumber dari APBD-APBN-DAK melalui Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP Kabupaten Musi Banyuasin). Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis terhadap permasalahan dari hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang bersumber melalui APBD-APBN-DAK dilaksanakan melalui sistem aplikasi online SIPP yang terdapat dalam menu pad http://sipp.mubakab.go.id melalui sistem aplikasi ini mempermudah Bappeda untuk mengawal pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien.

(2) Pusat Data dan Informasi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD Kab. Muba). Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis kinerja pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdapat dalam menu pada (*https://sipd-ri.kemendagri.go.id*).

### 1.6.5 Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*

Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down* dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas dokumen RKPD tahun 2026 serta proses perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin maka usulan kegiatan dapat disampaikan melalui sistem perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin yang berbasis elektronik dan online yaitu SIPD yang terus mengalami pengembangan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Musrenbang Sektoral (*Ratek Triateral Meeting*) yang dihadiri oleh *stakeholders* untuk menfokuskan dan mempermudah menindaklanjuti usulan dari Kabupaten/Kota yang akan diinput melalui SIPD. Usulan Kabupaten Musi Banyuasin untuk RKPD Tahun 2026 yang diinput oleh melalui SIPD. Selanjutnya usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan aplikasi SIPD dan

pemanfaatan teknologi informasi secara sistematis dan aplikatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam mempercepat terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas.

(2) Usulan Masyarakat

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pendekatan ini yaitu:

- Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial (Facebook dan Instagram).
- Masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui datang langsung (tatap muka), usulan/proposal.
- Usulan dapat dilakukan juga dengan proposal dan melalui reses DPRD yang nantinya diinput melaui SIPD.

### 1.6.6 Pendekatan Politik

Pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing Kepala Daerah. Selain itu, terdapat pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan hasil rapat dengan DPRD dan hasil reses.

Untuk perencanaan pembangunan tahun 2026 terdapat empat ribu seratus lima puluh empat (4154) usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang tersebar di delapan belas (18) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan usulan pokok-pokok pikiran DPRD terbanyak ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jumlah Usulan Pokok Pikiran DPRD terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**

**POKOK PIKIRAN DPRD PADA PERANGKAT DAERAH KAB.MUBA**

| No. | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH USULAN POKOK PIKIRAN PER PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 |
| 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 |
| 3 | DINAS KESEHATAN | 92 |
| 4 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4 |
| 5 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 |
| 6 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 196 |
| 7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 55 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 638 |
| 9 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 176 |
| 10 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 614 |

| No. | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH USULAN POKOK PIKIRAN PER PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 122 |
| 12 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 22 |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN | 16 |
| 14 | DINAS PERIKANAN | 88 |
| 15 | DINAS PERKEBUNAN | 133 |
| 16 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1740 |
| 17 | DINAS SOSIAL | 3 |
| 18 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 178 |
| 19 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1 |
| 20 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR | 1 |
| 21 | KECAMATAN SEKAYU | 1 |
| 22 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA | 5 |
| 23 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 |
| 24 | SEKRETARIAT DAERAH | 32 |
| **JUMLAH** | | **4125** |

*Sumber: SIPD, diolah*

## 1.7 RUJUKAN KEBIJAKAN

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026 merujuk kepada :

(1) Analisis masalah dan isu strategis tahun 2026;

(2) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029;

(3) Prioritas RPJPD Tahun 2025-2045;

(4) Prioritas Pembangunan Nasional pada Rancangan RKP Tahun 2026;

(5) Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026;

(6) Pencapaian SDG's;

(7) RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029.

## 1.8 INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan.

Peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

Kabupaten Musi Banyuasin, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari.

**Tabel 1.3**

**Daftar Inovasi pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026**

| NO | NAMA INOVASI | TAHAPAN INOVASI | URUSAN INOVASI DAERAH | INSTANSI / PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Muba Survei Solusi Validasi Data | Penerapan | Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. | 1. BAPER AYU ( Bidang Pelayanan keperawatan RSUD Sekayu) | Penerapan | Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu |
| | 2. SIAP DORR (Sistem Aplikasi Donor Darah) | Penerapan | | |
| 3. | MASS HYBRID (Permusnahan Sampah Secara Hydro Burner Incinetator Drum) | Penerapan | Permusnahan Sampah | Kecamatan Jirak Jaya |
| 4. | 1. MIKAK DIE (Melayani Konsultasi Tumbuh Kembang Gigi Anak) | Penerapan | Kesehatan | Puskesmas Lais |
| | 2. SEHARI SATU RAGA (Sehat Hari Ini Masa | Penerapan | Kesehatan | |

| NO | NAMA INOVASI | TAHAPAN INOVASI | URUSAN INOVASI DAERAH | INSTANSI / PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | Tua Ceria Bahagia) | | | |
| 5. | 1. AYU TING TING (Ayo Curhat Keposyandu Cegah Stunting Itu Penting | Penerapan | Kesehatan | Puskesmas Balai Agung |
| | 2. CIKINI KE BALAI AGUNG (Cek Skrining Tuberkulosis ke Balai agung | Penerapan | Kesehatan | |
| | 3. OSSIN (one Stop Service Immunization) | Penerapan | Kesehatan | |
| 6. | SULING MERDU ( Telusur, Konseling, Pemeriksaan dan Edukasi HIV/AIDS dan IMS pada Remaja di Sekolah | Penerapan | Kesehatan | Puskesmas Lumpatan |
| 7. | Pemanfaatan Limbah Fiber Kelapa Sawit Menjadi Wood Pelet Di Pabrik Mini Berondolan Sawit Bumdesma Baylen Keren | Penerapan | BUMD | Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Baylen Keren LKD Kecamatan Bayung Lencir |

| NO | NAMA INOVASI | TAHAPAN INOVASI | URUSAN INOVASI DAERAH | INSTANSI / PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | untuk Bahan Bakar Boiler | | | |
| 8. | Desa Digital | Penerapan | | Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal jaya |

*Sumber : Keputusan Bupati Muba Nmor 831/KPTS-BAPPEDA/2024, diolah*

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

*Gambaran Umum Kondisi Daerah menggambarkan Kondisi Umum Daerah serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD dan Berbagai Permasalahan Pembangunan Daerah sebagai landasan dalam upaya Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi"*

## 2.1 KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

#### A. Letak, Luas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Kabupaten terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan dengan total wilayah mencapai 14.265,96 Ha atau sekitar 15 persen dari total luas Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas 15 Kecamatan yang tersebar dengan karakteristik geografis dan luas yang bervariasi, serta memiliki pusat pemerintahan (ibu kota kecamatan) masing-masing yang berperan sebagai simpul pelayanan pemerintahan dan penggerak pembangunan lokal. Dengan posisinya yang strategis, Musi Banyuasin memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Bayung Lencir, dengan luas mencapai 450.741,33 hektar, dan ibu kotanya berada di Bayung Lencir. Disusul oleh Kecamatan Batanghari Leko seluas 239.332,32 hektar dengan pusat pemerintahan di Tanah Abang, serta Kecamatan Tungkal Jaya seluas 139.095,08 hektar yang beribukota di Peninggalan. Sementara itu,

kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Babat Toman yang memiliki luas 35.061,94 hektar, dengan pusat administrasi di Babat.

Kecamatan Sekayu, yang juga merupakan pusat pemerintahan kabupaten, memiliki luas 72.709,38 hektar dan beribukota di Serasan Jaya. Beberapa kecamatan lain seperti Lalan (Bandar Agung), Sanga Desa (Ngulak), dan Sungai Keruh (Tebing Bulang) juga memiliki cakupan wilayah yang cukup besar, dengan luas masing-masing di atas 48.000 hektar.

Secara keseluruhan, total luas wilayah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 1.467.938 hektar. Sebaran geografis yang luas dan heterogen ini menjadi tantangan sekaligus potensi bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun strategi pembangunan yang berbasis kewilayahan, mengutamakan pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di setiap kecamatan.Perbedaan jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan ini menunjukkan variasi dalam aspek geografis, demografi, serta aktivitas ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan pemerataan pembangunan dan infrastruktur yang baik, diharapkan seluruh kecamatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

**Tabel 2.1**

**Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin**

| No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1. | Sanga Desa | Ngulak | 58.894,25 |
| 2. | Babat Toman | Babat | 35.061,94 |
| 3. | Batanghari Leko | Tanah Abang | 239.332,32 |
| 4. | Plakat Tinggi | Sido Rahayu | 48.657,09 |
| 5. | Lawang Wetan | Ulak Paceh | 42.193,75 |

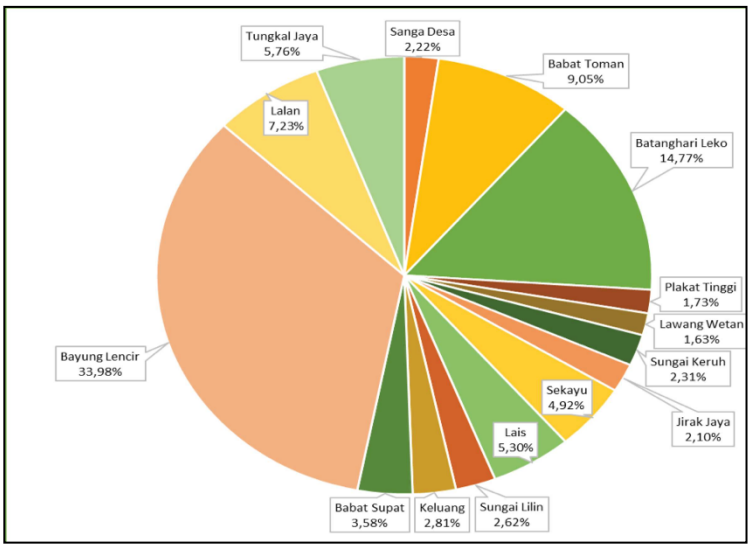
| No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|---|---|
| 6. | Sungai Keruh | Tebing Bulang | 48.958,90 |
| 7. | Jirak Jaya | Jirak | 42.238,58 |
| 8. | Sekayu | Serasan Jaya | 72.709,38 |
| 9. | Lais | Lais | 59.222,45 |
| 10. | Sungai Lilin | Sungai Lilin | 46.438,88 |
| 11. | Keluang | Keluang | 44.234,85 |
| 12. | Babat Supat | Babat Banyuasin | 56.668,00 |
| 13. | Bayung Lencir | Bayung Lencir | 459.741,33 |
| 14. | Lalan | Bandar Agung | 83.489,25 |
| 15. | Tungkal Jaya | Peninggalan | 139.095,08 |

*Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044*

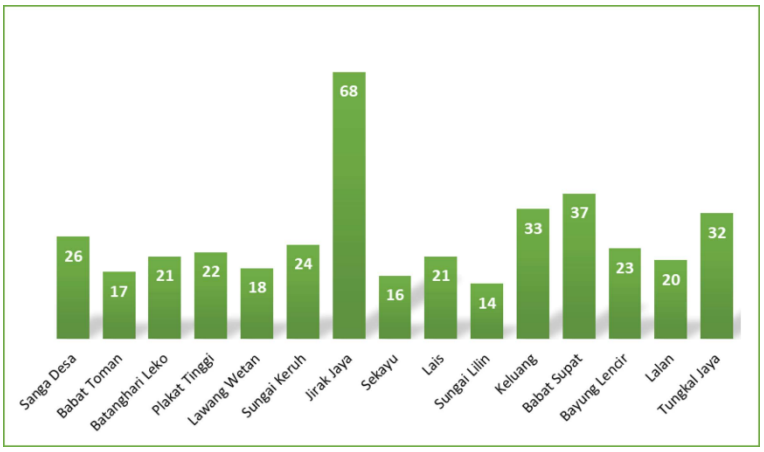
Kabupaten Musi Banyuasin, jika dilihat berdasarkan posisi astronominya, maka terletak di antara garis 1,3° - 4° Lintang Selatan dan 103° - 104°45' Bujur Timur. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin berada di wilayah bagian selatan Indonesia dengan iklim tropis yang cenderung panas dan lembap sepanjang tahun. Adapun secara administratif, letak wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

- Sebelah Utara : Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan : Kabupaten PALI
- Sebelah Barat : Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin

Dengan letak geografis yang sangat strategis, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran penting dalam konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam sektor ekonomi, transportasi, dan sumber daya alam.



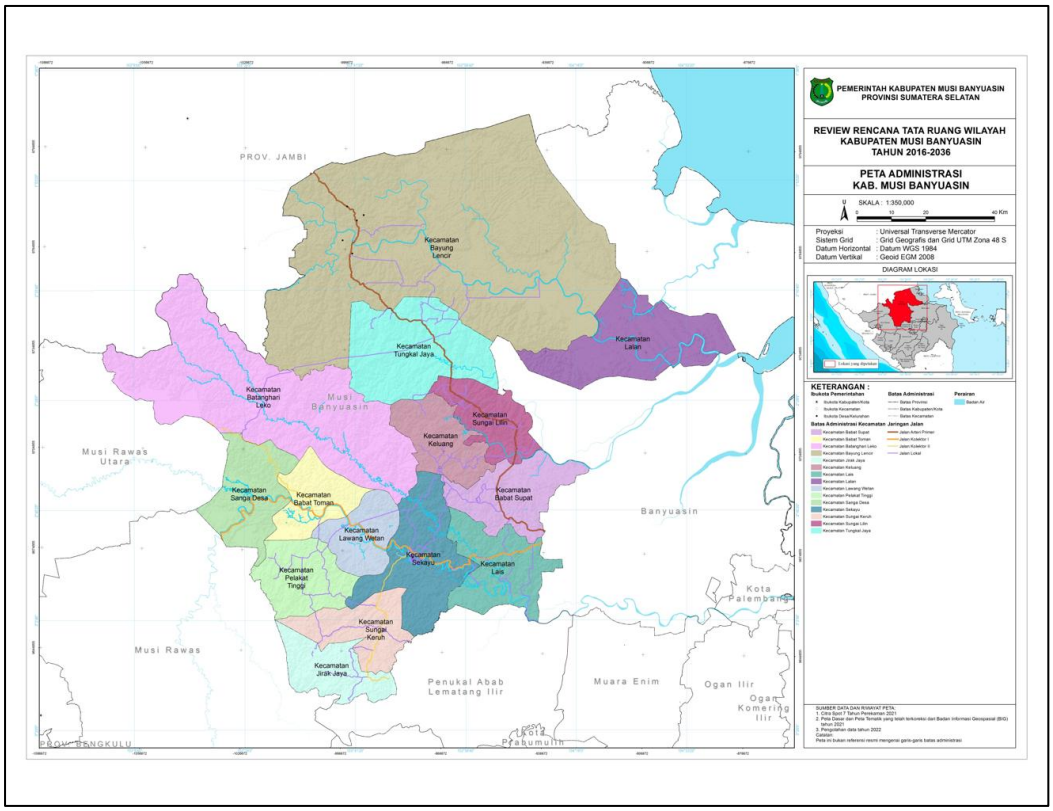

**Gambar 2.1.** Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2023
Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2024




**Gambar 2.2.** Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2023
Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2023, diolah 2024

Berdasarkan data luas dan ketinggian wilayah di setiap kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui bahwa Kecamatan Bayung Lencir memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 4.847 km² atau sekitar 34% dari keseluruhan luas kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Plakat Tinggi merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil, hanya seluas 247 km² atau sekitar 1,7%. Secara keseluruhan, luas Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 14.265,96 km², dengan sebaran wilayah yang berbeda-beda di tiap

kecamatan. Kondisi ini menegaskan perlunya perencanaan pembangunan yang adil dan merata agar setiap kecamatan dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Gambar 2.3 berikut memperlihatkan peta wilayah administratif Kabupaten Musi Banyuasin.




**Gambar 2.3.** Peta Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: *Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044*

## B. Topografi

Secara keseluruhan, topografi Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi tiga bagian yaitu dataran rendah, wilayah bergelombang, dan area perbukitan. Dataran rendah umumnya berada di bagian timur, khususnya di sekitar Kecamatan Sungai Lilin. Sementara itu, wilayah bergelombang hingga berbukit tersebar di sisi barat, seperti Kecamatan Bayung Lencir.

Di sepanjang aliran Sungai Musi hingga wilayah Kecamatan Babat Toman, lahan didominasi oleh rawa dan tanah payau yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut sungai. Wilayah ini memiliki kontur yang beragam dengan elevasi antara 14 hingga 37 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, di bagian lainnya ditemukan dataran tinggi dan perbukitan yang lebih menonjol dengan ketinggian yang bisa mencapai 37 meter. Variasi topografi ini berdampak pada perbedaan kondisi ekologi dan pemanfaatan lahan, termasuk dalam sektor pertanian, perkebunan, hingga kawasan konservasi.

Kabupaten Musi Banyuasin juga dikenal memiliki banyak rawa serta jaringan sungai yang tersebar luas di berbagai kecamatan. Sungai-sungai tersebut, mulai dari aliran kecil hingga sungai besar, memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan ekosistem lokal. Beberapa sungai utama di wilayah ini meliputi Sungai Musi, yang merupakan salah satu sungai terpanjang dan vital di Sumatera, Sungai Banyuasin yang bermuara ke laut, serta Sungai Batanghari Leko yang digunakan sebagai jalur transportasi air oleh warga setempat.

Selain itu, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil yang mendukung kegiatan irigasi dan memungkinkan perluasan lahan sawah dengan mempertimbangkan ketersediaan air dari sungai-sungai tersebut. Sungai-sungai ini juga menjadi sumber air baku untuk PDAM, yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dengan keberadaan rawa dan sungai yang melimpah, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar untuk

dikembangkan dalam sektor perikanan, perkebunan, serta ekowisata berbasis perairan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sangat beragam dan tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis tanah yang dominan di daerah ini:

1) Tanah Organosol

   Tanah ini umumnya ditemukan di dataran rendah atau daerah rawa-rawa. Ciri khasnya adalah kandungan bahan organik yang tinggi, sehingga sering dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tanah organosol banyak terdapat di wilayah Bayung Lencir, Lais, dan Lalan.

2) Tanah Glei Humus

   Jenis tanah ini juga berada di dataran rendah dan kawasan rawa-rawa. Tanah glei humus sering digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa, karena mampu menahan air dalam jangka waktu lama. Wilayah yang memiliki jenis tanah ini meliputi Bayung Lencir, Lais, dan Lalan.

3) Tanah Aluvial

   Tanah ini tersebar di sepanjang sungai dan terbentuk dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran air sungai. Tanah aluvial dikenal subur dan sangat cocok untuk pertanian, terutama tanaman pangan dan perkebunan. Beberapa wilayah yang memiliki tanah aluvial di

Kabupaten Musi Banyuasin antara lain Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang, dan Sanga Desa.

4) Tanah Podsolik

Tanah ini biasanya terdapat di daerah berbukit-bukit dengan struktur yang relatif berpasir dan kurang subur dibandingkan jenis tanah lainnya. Namun, tanah podsolik masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian tertentu dengan pengelolaan yang tepat. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tanah podsolik banyak ditemukan di daerah Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Babat Toman, Batanghari Leko, Lais, dan Sungai Lilin.

Keanekaragaman jenis tanah di Kabupaten Musi Banyuasin memberikan kontribusi besar terhadap potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan pengembangan wilayah, menjadikan daerah ini sebagai salah satu kawasan agraris yang cukup maju. Secara umum, tanah di wilayah ini memiliki ketahanan yang baik terhadap erosi serta karakteristik yang stabil, sehingga sangat mendukung untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

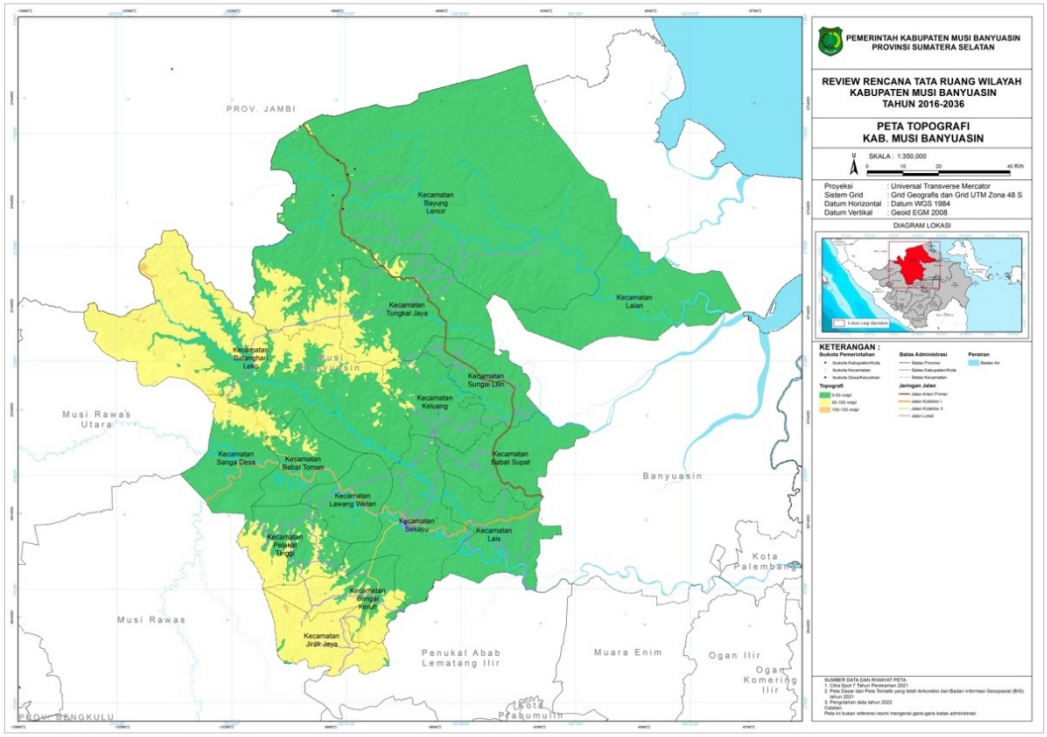
Rata-rata kedalaman efektif tanah di wilayah ini melebihi 90 cm, yang menjadi indikator awal bahwa kondisi lahan sangat cocok untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, terdapat juga area dengan kedalaman tanah antara 60 hingga 90 cm, yang tetap dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.

**Tabel 2.2**

**Topografi Kabupaten Musi Banyuasin**

| Kecamatan | Ketinggian | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0-50 mdpl | 50-100 mdpl | 100-150 mdpl | Total |
| Sanga Desa | 46.436,07 | 12.519,65 | | 58.955,73 |
| Babat Toman | 37.976,99 | 2.695,58 | | 40.672,56 |
| Batang Hari Leko | 100.589,57 | 127.026,65 | 1.300,19 | 228.916,51 |
| Plakat Tinggi | 29.249,96 | 20.497,96 | | 49.747,92 |
| Lawang Wetan | 38.906,73 | 116,68 | | 39.023,41 |
| Sungai Keruh | 17.299,38 | 29.216,78 | | 46.516,16 |
| Jirak Jaya | 663,49 | 41.239,56 | 233,91 | 42.136,95 |
| Sekayu | 76.330,68 | 1.468,13 | | 77.798,81 |
| Lais | | 59.647,89 | 2,35 | 59.750,24 |
| Sungai Lilin | 43.411,61 | 2,35 | | 43.443,96 |
| Keluang | 43.468,96 | 2.817,53 | | 46.286,50 |
| Babat Supat | 56.852,21 | | | 56.852,21 |
| Bayung Lencir | 457.450,58 | 26.348,85 | | 483.799,43 |
| Lalan | 95.516,04 | | | 95.516,04 |
| Tungkal Jaya | 82.902,75 | | 12.716,85 | 98.619,60 |
| **Total** | **1.186.733,02** | **279.668,92** | **1.534,10** | **1.467.936,04** |

*Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044*




**Gambar 2.4.** Peta Topografi Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044

## C. Geologi

Kondisi Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar dibentuk oleh batuan sedimen dan aluvium yang terdiri dari lumpur, lempung, pasir dan kerikil. Endapan aluvium umumnya bersifat lunak dan berdaya dukung untuk pondasi rendah. Sedangkan batuan sedimen bersifat agak keras sampai dengan keras dan berdaya dukung sedang sampai dengan tinggi. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara fisiografi termasuk daerah Cekungan Sumatera Selatan yang dibatasi oleh Dataran Sunda di sebelah timur laut, Tinggian Lampung di sebelah tenggara, Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat daya, serta Pegunungan Duabelas dan Pegunungan Tigapuluh di sebelah barat laut.

Secara fisiografi, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam wilayah Cekungan Sumatera Selatan, sebuah cekungan sedimen yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur geologi di kawasan ini. Cekungan ini dibatasi oleh beberapa formasi geografis utama, yaitu Dataran Sunda di sebelah timur laut, Tinggian Lampung di sebelah tenggara, Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat daya, serta Pegunungan Duabelas dan Pegunungan Tigapuluh di sebelah barat laut.

Keberadaan cekungan ini menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi geologi yang signifikan, terutama dalam sektor sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, serta bahan galian lainnya. Selain itu, karakteristik geologi wilayah ini juga memengaruhi pola penggunaan lahan, potensi pertanian, serta keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi geologi menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan peta Geologi Lembar Palembang (S. Gafoer, dkk., 1986), Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara geologi terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu sebagian termasuk dalam Sub Cekungan Palembang bagian utara dan sebagian lainnya berada dalam Sub Cekungan Jambi. Kedua sub cekungan ini merupakan bagian dari Cekungan Sumatera Selatan, yang terbentuk pada zaman Tersier dan memiliki peran penting dalam sejarah geologi kawasan ini. Pada awal pembentukan antara kedua sub cekungan tersebut terdapat Tinggian Tamiang dan Iliran serta Tinggian Melintang Bentayan. Struktur-struktur ini berperan sebagai batas alami yang

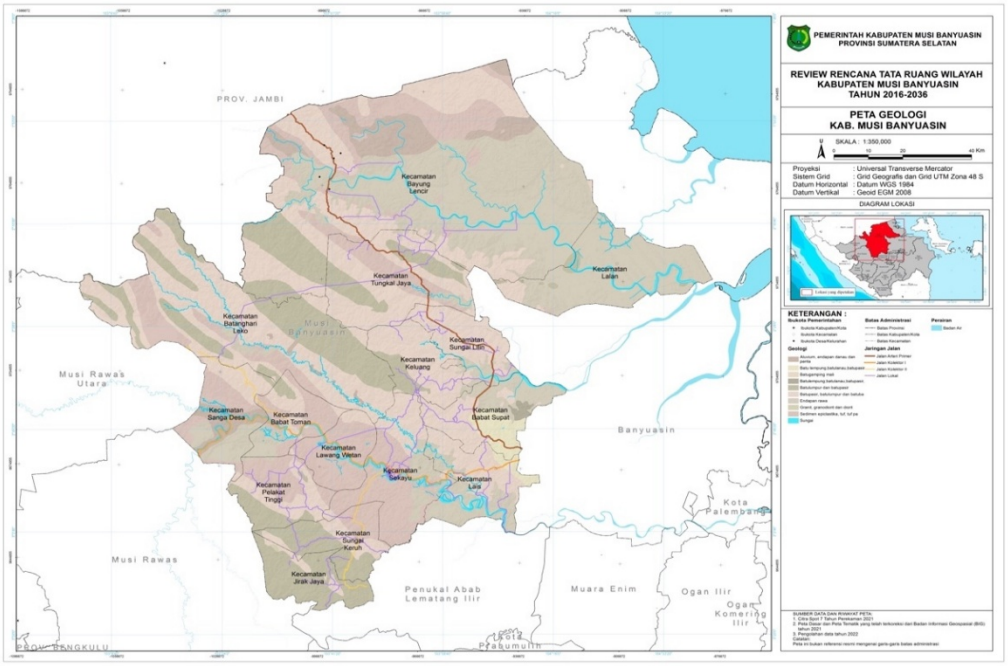
membedakan karakteristik endapan sedimen di masing-masing sub cekungan.

Seiring waktunya, aktivitas dari tektonik dan proses sedimentasi yang terus berlangsung menyebabkan perubahan pada cekungan ini, menciptakan lapisan-lapisan batuan yang beragam serta membentuk lingkungan geologi yang mendukung keberadaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi geologi Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk pembagian sub cekungan serta struktur geologi yang membatasinya, sangat penting dalam eksplorasi sumber daya, pengelolaan lingkungan, serta perencanaan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Di daerah ini terdapat dua satuan stratigrafi batuan yang diendapkan selama zaman tersier, yakni Kelompok Telisa dan Kelompok Palembang. Runtunan litologinya menunjukkan bahwa Kelompok Telisa merupakan satuan batuan yang terbentuk dalam fase genangan laut, terdiri dari Formasi Talang Akar (tak tersingkap) dan Formasi Gumai. Sebaliknya, Kelompok Palembang terbentuk dalam fase susut laut, terdiri dari Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan Formasi Kasai.

Formasi Talang Akar (tak tersingkap) merupakan satuan batuan tertua yang mendasari batuan di daerah ini, yang terbentuk pada kala Oligosen – Miosen Awal. Formasi ini tertindih selaras oleh serpih Formasi Gumai yang berumur Miosen Awal – Miosen Tengah. Setelah pengendapan Formasi Gumai yang merupakan tahap puncak genang laut, diendapkan Formasi Air Benakat sebagai hasil dari awal fase susut laut. Formasi ini terdiri dari batu lanau berkarbon dengan sisipan lanau kuarsa, umurnya Miosen Tengah –

Miosen Akhir. Paling atas adalah Formasi Kasai yang menindih selaras Formasi Muaraenim. Formasi ini terdiri dari tufa, batu lempung, dan batu pasir tufaan, diduga berumur Plio – Pleistosen.




**Gambar 2.4.** Peta Geologi Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044

## D. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam kategori daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang datangnya bersifat musiman, di mana pada saat musim hujan tiba, tanah menjadi lebih subur, sehingga pertumbuhan tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan, dapat berkembang dengan baik.

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sumber daya air yang melimpah, yang dapat dikategorikan menjadi sumber daya air permukaan dan sumber

daya air tanah. Sumber daya air permukaan meliputi berbagai badan air seperti sungai, danau, rawa-rawa, dan perairan laut, yang perannya sangat penting dalam menunjang berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, dan permukiman. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berfungsi sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, sedangkan rawa dan danau dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air untuk berbagai kebutuhan, termasuk perikanan dan ekowisata.

Selain itu, sumber daya air tanah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Dengan adanya cadangan air tanah yang cukup melimpah, daerah ini memiliki peluang besar dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang lebih baik. Secara keseluruhan, potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin memberikan peluang yang sangat besar bagi pembangunan di berbagai sektor, termasuk pemenuhan kebutuhan air minum, irigasi pertanian, industri, hingga pengembangan sektor pariwisata berbasis air. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang bijak dan berkelanjutan, Kabupaten Musi Banyuasin dapat terus berkembang sebagai daerah yang memiliki ketahanan air serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa. Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai pola aliran rectangular (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran

kering pola aliran sungainya dendritik (menjari atau bercabang). Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi, sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya langka yang disebabkan oleh menurunnya curah air hujan dan batuan penyusunnya yang umumnya kedap air sehingga kemunculan mata air langka di daerah ini.

Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 m3/detik, sedangkan DAS Air Lalan memiliki debit rata-rata 196,8 m3/detik. Sungai Dawas memiliki rata-rata debit air 1,6 m3/detik yang merupakan debit terkecil dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan sungai yang memiliki debit paling besar adalah sungai Lalan dengan debit 196,8 m3/detik.

**Tabel 2.3**

**Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Musi Banyuasin**

| Nama DAS | Panjang Sungai (KM) | Luas DAS (Ha) | Debit ($M^3$/detik) |
|---|---|---|---|
| Sungai Ibul ( Anak Sungai Musi ) | 35 | 14.500 | 3,3 |
| Sungai A. Calik ( Anak Sungai A.Banyuasin ) | 57 | 96.400 | 28 |
| Sungai Dawas ( Anak Sungai A. Calik ) | 50 | 6.500 | 1,6 |
| Sungai Supat ( Anak Sungai A. Calik ) | 32 | 22.600 | 5,1 |
| Sungai Keluang ( Anak Sungai A. Calik ) | 19 | 9.400 | 2,1 |
| Sungai Tungkal ( Anak Sungai A. Calik ) | 82 | 149.500 | 33,6 |
| Sungai Lalan ( Anak Sungai A.Banyuasin ) | 243 | 830.300 | 196,8 |

| Nama DAS | Panjang Sungai (KM) | Luas DAS (Ha) | Debit ($M^3$/detik) |
|---|---|---|---|
| Sungai Merang ( Anak Sungai Lalan ) | 66 | 83.900 | 24,4 |
| Sungai Bohar ( Anak Sungai Lalan ) | 20 | 10.000 | 2,2 |
| Sungai Medak ( Anak Sungai Lalan ) | 72 | 108.300 | 25,7 |
| Sungai Tungkal ( Anak Sungai Lalan ) | 25 | 5.900 | 1,9 |
| Sungai Serdang ( Anak Sungai Lalan ) | 34 | 8.300 | 2,4 |
| Sungai Meranti ( Anak Sungai Lalan ) | 28 | 15.100 | 4,4 |
| Sungai Kepahiang ( Anak Sungai Lalan ) | 16 | 13.300 | 3,9 |
| Sungai Mangsang ( Anak Sungai Lalan ) | 18 | 7.400 | 1,8 |
| Sungai Mendis ( Anak Sungai Lalan ) | 19 | 3.900 | 0,9 |
| Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi) | 176 | 374.600 | 103,9 |
| Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko) | 63 | 71.300 | 16,9 |
| Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko) | 38 | 26.400 | 8,8 |
| Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko) | 38 | 20.100 | 8,6 |
| Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko) | 19 | 12.700 | 5,4 |
| Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko) | 19 | 11.600 | 4,9 |
| Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko) | 13 | 5.300 | 2,3 |
| Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko) | 15 | 10.200 | 4,3 |
| Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko) | 25 | 21.900 | 5,2 |

*Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin*

## E. Klimatologi

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki iklim tropis basah, yang ditandai dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin, curah hujan di wilayah ini memiliki variasi jumlah yang berkisar antara 133,1 mm hingga 578,1 mm per bulan.

Curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Oktober, di mana intensitas hujan meningkat secara signifikan, menyebabkan kelembapan udara yang lebih tinggi serta meningkatkan ketersediaan air bagi sektor pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada

bulan Juni dan Juli, di mana intensitas hujan berkurang, yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dan sumber daya air di wilayah ini.

**Tabel 2.4**

**Jumlah Curah Hujan Tahun 2024**

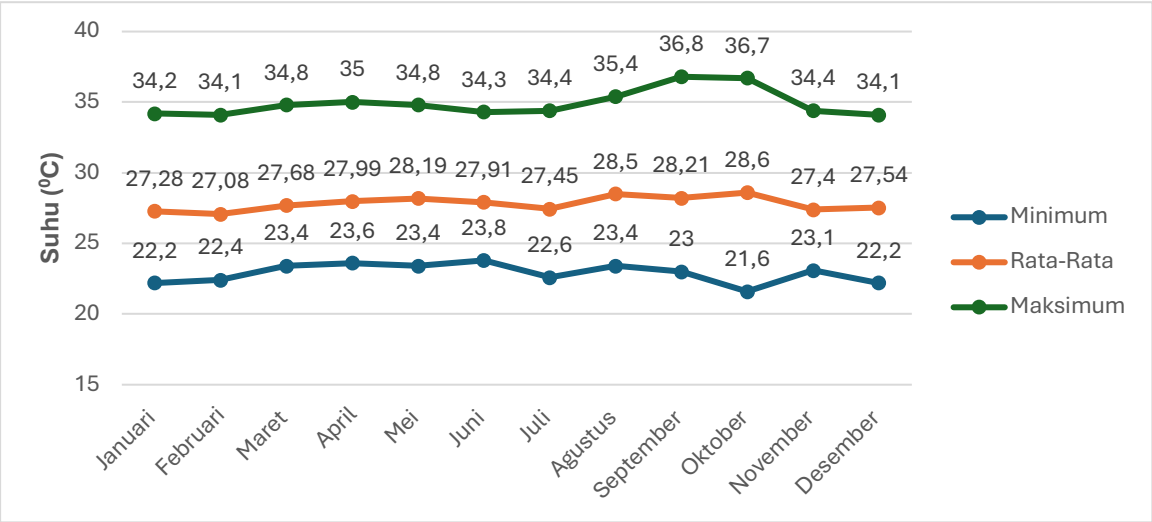
| Bulan | Jumlah Curah Hujan |
|---|---|
| Januari | 277,10 |
| Februari | 381,00 |
| Maret | 289,80 |
| April | 261,10 |
| Mei | 452,30 |
| Juni | 123,50 |
| Juli | 131,80 |
| Agustus | 16,60 |
| September | 196,20 |
| Oktober | 147,60 |
| November | 303,50 |
| Desember | 363,50 |

*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025*

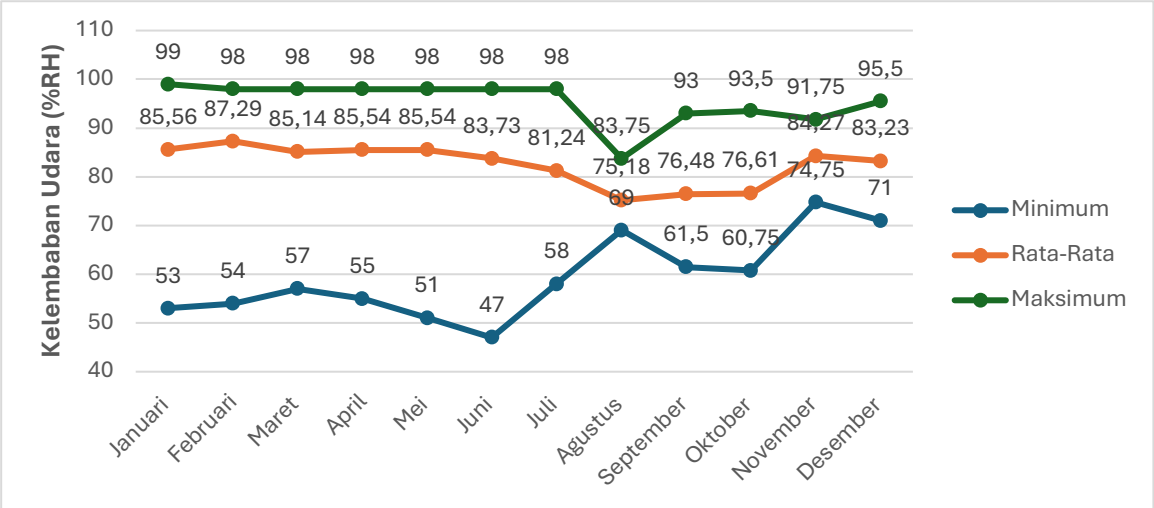
Suhu udara merupakan ukuran tingkat panas atau dinginnya atmosfer di suatu daerah. Ini adalah salah satu parameter cuaca utama yang paling sering diukur dan diamati dalam meteorologi. Suhu udara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas sinar matahari, ketinggian tempat, dan kondisi geografis suatu wilayah. Perubahan suhu udara juga berpengaruh terhadap pola cuaca dan iklim, serta dapat memengaruhi aktivitas manusia, pertumbuhan tanaman, dan keseimbangan ekosistem. Sementara itu, kelembaban udara mengacu pada jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kelembaban udara dapat bervariasi

tergantung pada kondisi suhu, tekanan udara, dan faktor lingkungan lainnya.

Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak dari pada kandungan uap air dalam udara dingin. Berdasarkan data dari BPS suhu udara tertinggi terjadi pada bulan November 2023 dengan suhu 37,4°C, sebaliknya suhu terendah berada di bulan Juli 2023 dengan suhu sebesar 22,4°C. Hal ini erat kaitannya dengan durasi dan sudut datangnya sinar matahari di wilayah tersebut. Durasi dan sudut datangnya sinar matahari di wilayah tersebut.




**Gambar 2.5** Suhu Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2024
*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025, diolah*




**Gambar 2.6** Kelembaban Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2024
*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025, diolah*

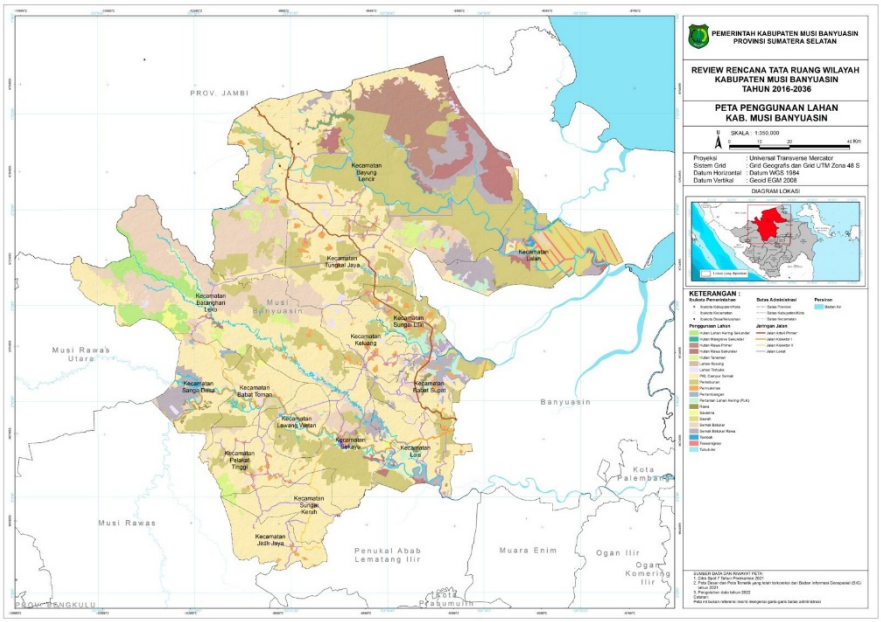
## F. Penggunaan Lahan

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beragam jenis penggunaan lahan, yang dikelompokkan ke dalam 20 jenis penggunaan tanah yang terdiri dari hutan lahan kering sekuder seluas 25.664,56 hektare, hutan mangrove sekunder seluas 249,68 ha, hutan rawa primer seluas 56.637,03 ha, hutan rawa sekunder seluas 39.409,56 ha, hutan tanaman seluas 21.913,21 ha, perkebunan seluas 643.529,54 ha, permukiman seluas 32.797,27 ha, pertambangan seluas 2.178,81 ha, pertanian lahan kering seluas 11.572,75 ha, PKL campur semak seluas 603.031,27 ha, rawa seluas 6.121,40 ha, savana seluas 4.902,41 ha, sawah seluas 31.581,7 ha, semak belukar seluas 189.888, 29 ha, semak belukar rawa seluas 85.860,59 ha, tambak seluas 572,28 ha, tubuh air seluas 11710,19 ha, lahan kosong seluas 52,18 ha, dan lahan terbuka seluas 15.432,45 ha.

Setiap jenis dari penggunaan lahan ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mendukung kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah. Selanjutnya, perkebunan besar juga menjadi salah satu jenis penggunaan lahan yang signifikan di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas mencapai 127.215,63 hektare atau 8,92% dari total wilayah kabupaten.

Sementara itu, jenis penggunaan lahan lainnya memiliki penyebaran yang relatif lebih kecil dibandingkan keempat kategori utama di atas. Namun, lahan-lahan ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah, baik dalam sektor pertanian, perumahan, infrastruktur, maupun industri. Beberapa di antaranya termasuk permukiman, lahan pertanian, lahan terbuka hijau, serta kawasan peruntukan lainnya yang menjadi bagian integral dari perencanaan tata ruang daerah.

Secara keseluruhan, dengan luasnya lahan yang didominasi oleh hutan primer dan kawasan budidaya perkebunan, Kabupaten Musi Banyuasin memilikipotensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta pengembangan sektor industri dan pariwisata berbasis lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.



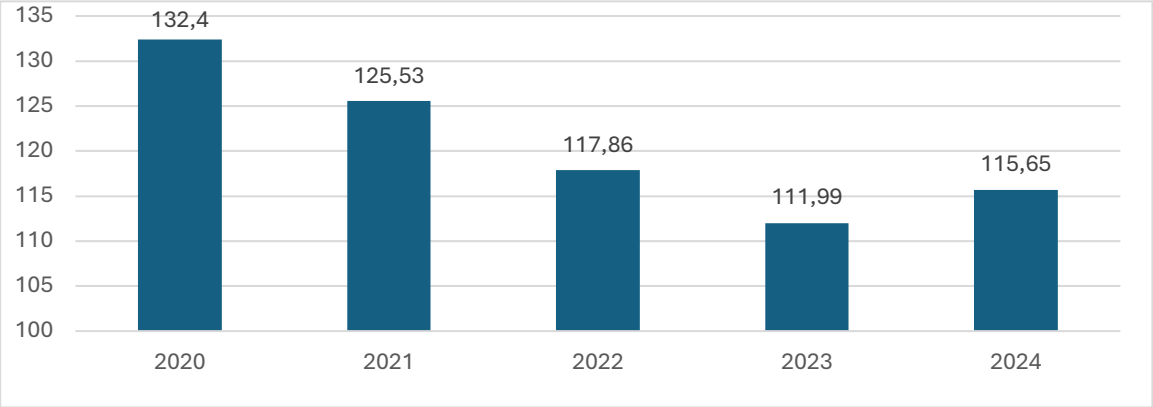

**Gambar 2.7** Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044

## G. Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Secara umum, untuk menilai tingkat kerawanan bencana di suatu daerah Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah indikator yakni Indeks Risiko Bencana. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan kerentanan, bahaya, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi kebencanaan. Berdasarkan publikasi Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia, trend Risiko Bencana Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari 2018 sampai

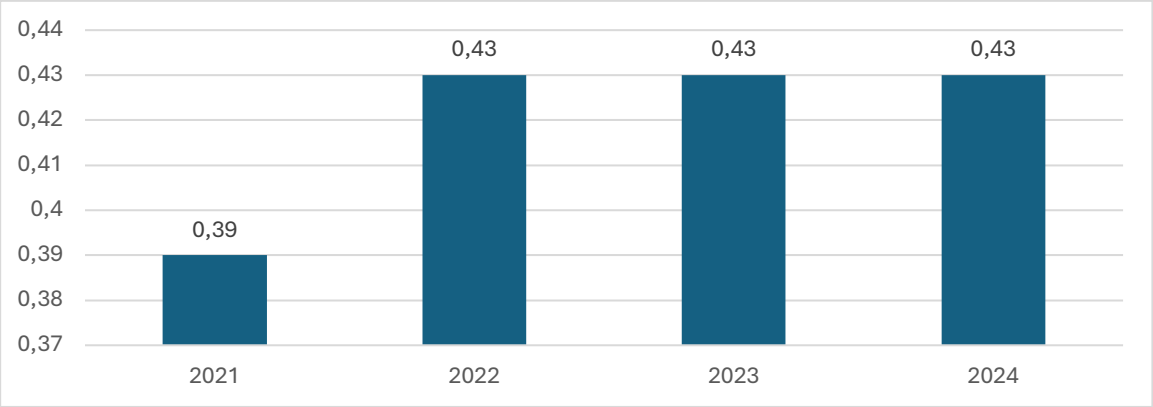
2023, namun kemudian meningkat di tahun 2024 sebesar 3.66 indeks menjadi 115.65. Artinya terjadi peningkatan kerentanan atau ancaman bencana di Kabupaten Musi Banyuasin. Bencana hidrometeorologi dominan seperti banjir dan kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrem dan kebakaran gambut sepanjang 2023-2024 mengakibatkan ancaman bencana meningkat.



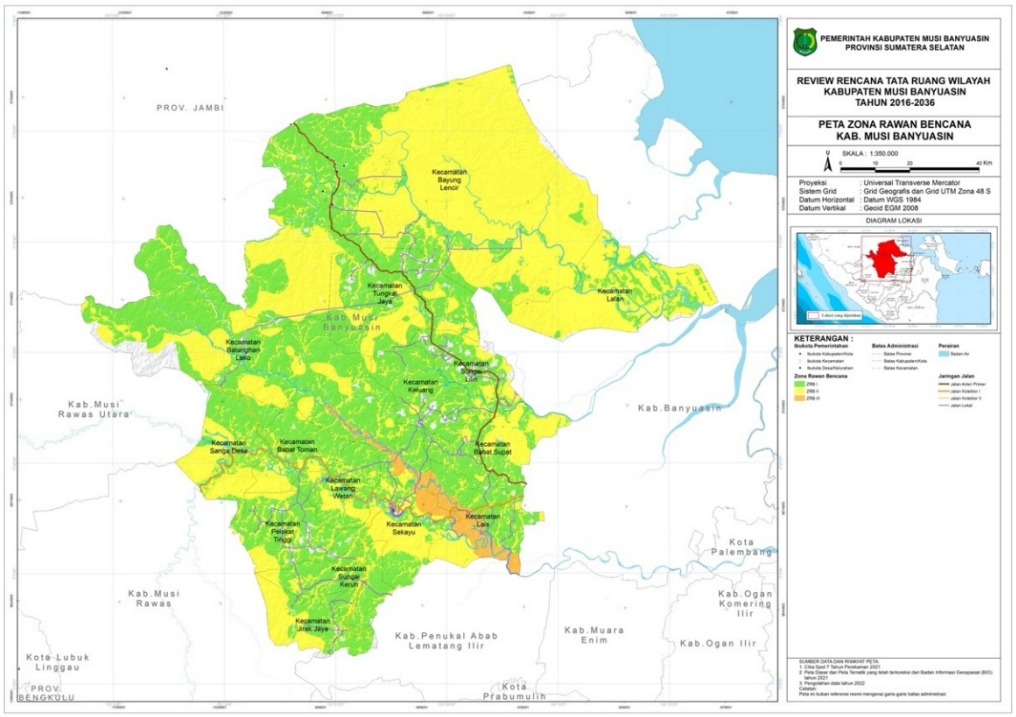

**Gambar 2.8** Indeks Risiko Bencana Kabupaten Musi Banyuasin

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen kapasitas penanggulangan bencana dan termasuk dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana. Dari tahun 2021 hingga tahun 2024 cenderung stagnan dengan kategori ketahanan daerah sedang, artinya diperlukan peningkatan terhadap fokus prioritas daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem

pemulihan bencana.




**Gambar 2.9** Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin




**Gambar 2.10.** Peta Resiko Bancana Banjir di Kabupaten
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Selanjutnya berdasarkan gambar 2.10, secara umum, terdapat variasi yang signifikan dalam distribusi luas banjir diseluru kecamatan. Berdasarkan dokumen Rencana Kontijensi Banjir yang disusun oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat potensi bahaya banjir per kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**
**Potensi Bahaya Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Kecamatan | Bahaya | | | | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| | Luas Bahaya (Ha) | | | Total Luas (Ha) | |
| | Rendah | Sedang | Tinggi | | |
| Babat Supat | 2.725 | 8.046 | 12.333 | 23.104 | Tinggi |
| Babat Toman | 1.742 | 4.778 | 8.841 | 15.360 | Tinggi |
| Batanghari Leko | 4.449 | 13.170 | 20.516 | 38.134 | Tinggi |
| Bayung Lencir | 27.550 | 91.016 | 102.324 | 220.890 | Tinggi |
| Jirak Jaya | 1.263 | 2.007 | 4.019 | 7.289 | Tinggi |
| Keluang | 1.511 | 3.200 | 3.803 | 8.514 | Tinggi |
| Lais | 3.675 | 15.017 | 16.728 | 35.420 | Tinggi |
| Lalan | 5.482 | 23.523 | 34.207 | 63.212 | Tinggi |
| Lawang Wetan | 2.780 | 7.023 | 9.989 | 19.791 | Tinggi |
| Plakat Tinggi | 1.603 | 3.648 | 5.850 | 11.102 | Tinggi |
| Sanga Desa | 2.834 | 9.460 | 14.755 | 27.049 | Tinggi |
| Sekayu | 4.077 | 11.387 | 18.310 | 33.774 | Tinggi |
| Sungai Keruh | 1.266 | 3.365 | 6.027 | 10.658 | Tinggi |
| Sungai Lilin | 1.922 | 6.791 | 5.499 | 14.212 | Tinggi |
| Tungkal Jaya | 2.881 | 7.189 | 11.394 | 21.463 | Tinggi |
| **Musi Banyuasin** | **65.757** | **209.621** | **274.594** | **549.972** | Tinggi |

Sumber : KRB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2027

Sementara itu, kecamatan seperti Bayung Lencir, Lalan, dan Batanghari Leko memiliki luas banjir tinggi yang dominan. Kecamatan dengan Luas Banjir Tertinggi antara lain, Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas banjir tertinggi dengan 220.890 Ha, yang terdiri dari banjir rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Lalan seluas 63.212 ha dan Kecamatan Batanghari Leko juga

memiliki luas banjir sebesar 38.134 ha. Kecamatan dengan luas banjir terendah antara lain Kecamatan Jirak Jaya memiliki luas banjir terendah dengan total 7.289 Ha. Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Keluang juga termasuk kecamatan dengan luas banjir yang lebih rendah dibanding yang lain.

**Tabel 2.5a**
**Jumlah Bencana Banjir Menurut Kecamatan**
**di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Kecamatan | Banjir | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2024 |
| Sanga Desa | 3 | 1 | - |
| Babat Toman | 2 | - | - |
| Batanghari Leko | - | - | - |
| Plakat Tinggi | - | - | 1 |
| Lawang Wetan | 3 | 3 | 1 |
| Sungai Keruh | 1 | 1 | 2 |
| Jirak Jaya | - | - | 1 |
| Sekayu | - | 1 | - |
| Lais | 11 | 7 | 8 |
| Sungai Lilin | - | - | 1 |
| Keluang | - | - | - |
| Babat Supat | 2 | 3 | - |
| Bayung Lencir | 1 | - | 1 |
| Lalan | - | 1 | - |
| Tungkal Jaya | - | - | 1 |
| **Musi Banyuasin** | **23** | **17** | **16** |

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

**Tabel 2.6**

**Jumlah Bencana Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Kecamatan | Banjir | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2024 |
| Sanga Desa | - | - | - |
| Babat Toman | - | - | - |
| Batanghari Leko | - | - | - |
| Plakat Tinggi | - | - | - |
| Lawang Wetan | - | - | - |
| Sungai Keruh | - | - | - |
| Jirak Jaya | - | - | - |
| Sekayu | - | - | - |
| Lais | - | - | - |
| Sungai Lilin | - | - | - |
| Keluang | - | - | - |
| Babat Supat | - | - | - |
| Bayung Lencir | - | - | - |
| Lalan | - | - | - |
| Tungkal Jaya | - | - | - |
| **Musi Banyuasin** | **-** | **-** | **-** |

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

**Tabel 2.7**

**Jumlah Bencana Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Kecamatan | Banjir | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2024 |
| Sanga Desa | 1 | - | - |
| Babat Toman | 1 | - | - |
| Batanghari Leko | - | - | - |
| Plakat Tinggi | - | - | - |
| Lawang Wetan | - | - | - |
| Sungai Keruh | - | - | - |
| Jirak Jaya | - | - | - |

| Kecamatan | Banjir | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2024 |
| Sekayu | 2 | 2 | 3 |
| Lais | - | 1 | - |
| Sungai Lilin | - | - | - |
| Keluang | - | - | - |
| Babat Supat | - | - | - |
| Bayung Lencir | - | - | - |
| Lalan | - | - | - |
| Tungkal Jaya | - | - | - |
| **Musi Banyuasin** | **4** | **3** | **3** |

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, banjir merupakan jenis bencana paling dominan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan tanah longsor maupun gempa bumi. Dalam periode tiga tahun (2020, 2021, 2024), tercatat 56 kasus banjir, jauh melampaui tanah longsor yang hanya terjadi sebanyak 10 kali, sementara gempa bumi tidak tercatat sama sekali. Puncak kasus banjir terjadi pada tahun 2020 dengan 23 kasus, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan Lais tercatat sebagai wilayah paling rentan, dengan 26 kasus banjir, termasuk 11 kasus yang terjadi pada tahun 2020. Selain itu, wilayah Lawang Wetan dan Babat Supat juga sering terdampak banjir.

Sementara itu, bencana tanah longsor menunjukkan tren penurunan. Pada 2020 terdapat 4 kasus, menurun menjadi 3 kasus pada 2021, dan 3 kasus pada 2024. Kecamatan Sekayu menjadi wilayah yang paling sering mengalami longsor sebanyak 7 kasus,

diikuti oleh Kecamatan Sanga Desa sebanyak 1 kasus, Kecamatan Babat Toman sebanyak 1 kasis. dan Kecamatan Lais sebanyak 1 kasus. Sebagian besar kecamatan lainnya tidak mengalami longsor, menandakan bahwa kejadian longsor cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Berbeda dengan kedua jenis bencana tersebut, tidak ada laporan mengenai gempa bumi di seluruh kecamatan, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin tergolong aman dari risiko gempa berdasarkan data tersebut.

## H. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat luas dan mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan infrastruktur. Kabupaten ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, dan hasil hutan yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet, menjadi salah satu andalan dalam menopang perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata juga cukup menjanjikan dengan adanya keindahan alam, sungai, dan budaya lokal yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan kawasan industri. Dengan strategi yang tepat,

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang maju di Provinsi Sumatera Selatan.

1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung merupakan bagian penting dalam upaya konservasi alam yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain berperan sebagai habitat alami bagi berbagai flora dan fauna, kawasan ini juga memiliki fungsi ekologis yang vital, seperti penyerap karbon, penyedia oksigen, serta pelindung tanah dari erosi dan bencana alam. Dalam konteks pengembangan wilayah, kawasan hutan lindung dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai tujuan, seperti ekowisata, penelitian ilmiah, serta sebagai daerah tangkapan air yang berperan dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang tepat, pemanfaatan ini dapat mendukung perekonomian lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Saat ini, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 16.233 hektare. Kawasan ini mencakup **Hutan Lindung Kademba** dan **Hutan Lindung Sungai Jernih,** yang terletak di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga Desa. Keberadaan kedua kawasan hutan ini menjadi aset berharga bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjaga kelangsungan ekosistem, mendukung keanekaragaman hayati, serta berpotensi menjadi destinasi ekowisata yang menarik. Dengan pengelolaan yang baik dan berbasis konservasi, kawasan hutan lindung ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

2) Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam merupakan area yang diatur dan dilindungi secara hukum untuk melestarikan keanekaragaman hayati, habitat, dan ekosistem tertentu (Castro et al., 2015). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi spesies-spesies langka, endemik, dan terancam punah, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai benteng alam dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan sumber daya air, serta perlindungan tanah dari degradasi.

Dalam konteks potensi pengembangan wilayah, kawasan suaka alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai pusat penelitian alam, edukasi lingkungan, dan destinasi wisata ekologi yang menarik bagi pengunjung. Pengelolaan yang tepat dapat membuka peluang bagi penelitian ilmiah, kegiatan konservasi berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian alam. Adapun kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a. Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa seluas 21.570,75 hektar yang terletak di Kecamatan Batanghari Leko, Bayung Lencir, Keluang, Lalan dan Tungkal Jaya.

b. Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional

Taman nasional yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Lalan dengan luas kurang lebih 2.683,67 Ha.

3) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan area yang diarahkan dan diatur untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan akuakultur dengan tujuan meningkatkan produksi pangan, komoditas pertanian, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (Undang et al., 2022). Kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor seperti ketersediaan air, kualitas tanah, topografi, dan kondisi iklim menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kawasan budidaya. Sistem pengelolaan yang baik, termasuk penerapan teknologi pertanian modern, diversifikasi tanaman, dan praktik budidaya berkelanjutan, sangat diperlukan untuk menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, kawasan budidaya juga berpotensi menjadi pusat inovasi dalam bidang agroindustri, ekowisata pertanian, serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dengan kebijakan yang mendukung dan pengelolaan yang tepat, kawasan budidaya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Adapun kawasan ini dapat dikembangkan potensinya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi produk pertanian, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Secara umum, Kawasan Budidaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang meliputi:
   a) Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 04.099,17 hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.
   b) Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 421.185,89 hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, dan Kecamatan Tungkal Jaya.
   c) Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas kurang lebih 59.259,40 hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang meliputi:
   a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 40.298,63 hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Lawang Wetan, kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Tungkal Jaya.
   b) Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura yang terdiri dari tanaman sayur-sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 hektar yang berada di

Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu terdapat tanaman buah-buahan dengan luas kurang lebih 3.262 hektar yang tersebar di beberapa Kecamatan.

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan yang mempunyai luas kurang lebih 643.529,54 hektar dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

d. Kawasan Peruntukan Peternakan adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin. Sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan yang meliputi:

   a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum yang meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.

   b) Kawasan peruntukan perikanan GG budidaya yang meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

   c) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan energi adalah kawasan pertambangan batubara yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 2.178,81 hektar.

g. Kawasan Peruntukan Industri adalah yang direncanakan dalam rencana tata ruang adalah kawasan peruntukan industry berupa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasaran penunjang yang dikelola oleh perusahaan kawasan industry yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. kawasan ini direncanakan berada di Kecamatan Sungai Lilin seluas 432,67 hektar.

h. Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:
   a) Danau Ulak Lia di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
   b) Danau Konger di Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
   c) Pulau Pandang dan Pulau Panjang di Kecamatan Sanga Desa;
   d) Sungai Kubu di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
   e) Agro Wisata Perkebunan Gambir di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman;
   f) Tambang Minyak Tradisional di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;
   g) Tambang Minyak Modern di Desa Bonot Kecamatan Lais;
   h) Kebudayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bayung Lencir;
   i) Goa Jepang di Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa; dan
   j) Candi Sereka di Desa Sereka, Kecamatan Babat Toman.

i. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa serta Pusat Pemerintahan

yang meliputi:

a) Kecamatan Sekayu;

b) Kecamatan Sungai Lilin;

c) Kecamatan Bayung Lencir; dan

d) Kecamatan Babat Toman.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman yang meliputi:

a) Permukiman Perkotaan, memiliki luas kurang lebih 9.304,27 hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Jirak Jaya, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, dan Tungkal Jaya.

b) Permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih lebih 23.493 hektar terletak di Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Jirak Jaya, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, dan Tungkal Jaya.

4) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan area yang diperuntukkan untuk menjaga berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Kawasan ini memiliki peran penting dalam konservasi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan sumber daya bagi kehidupan masyarakat sekitar. Di Kabupaten Musi Banyuasin, kawasan perlindungan setempat mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan sekitar danau atau

waduk dengan tujuan menjaga kelestarian fungsi waduk, embung dan sungai dari aktivitas manusia. Luas kawasan ini adalah 14.631,20 hektare.

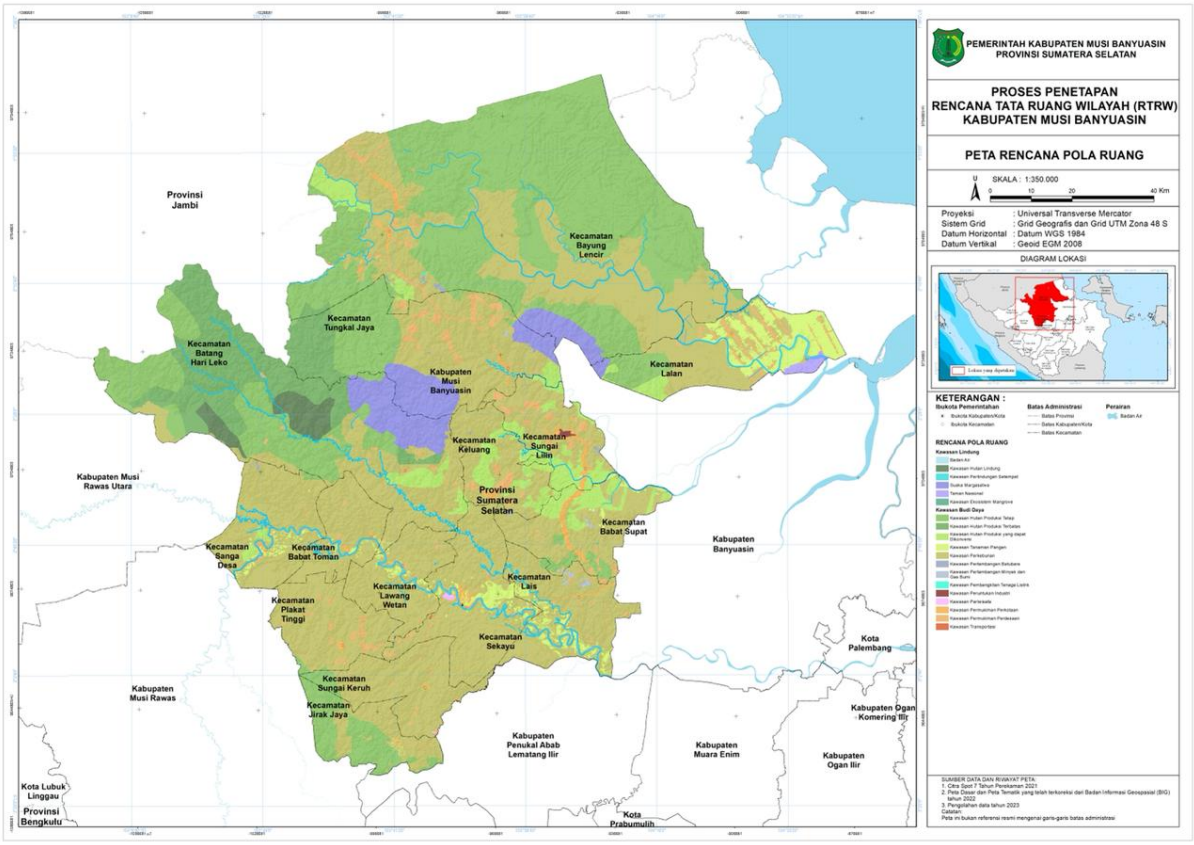
5) Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut merupakan ekosistem material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Kawasan lindung gambut dilakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kawasan lindung gambut tersebar di 7 kecamatan dengan luas 74.358,23 ha yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Sekayu.

6) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya

Selain kawasan perlindungan setempat, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki kawasan perlindungan setempat yang meliputi:

a. Kawasan Sempadan Sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 hektar.
b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 hektar.




**Gambar 2.11.** Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

## I. Demografi

Kondisi demografis adalah informasi kependudukan suatu wilayah yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut, serta orang yang secara hukum berhak tinggal di

daerah tersebut (Bidarti, 2020). Berdasarkan pandangan ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif, namun masih dalam kategori jumlah penduduk yang besar.

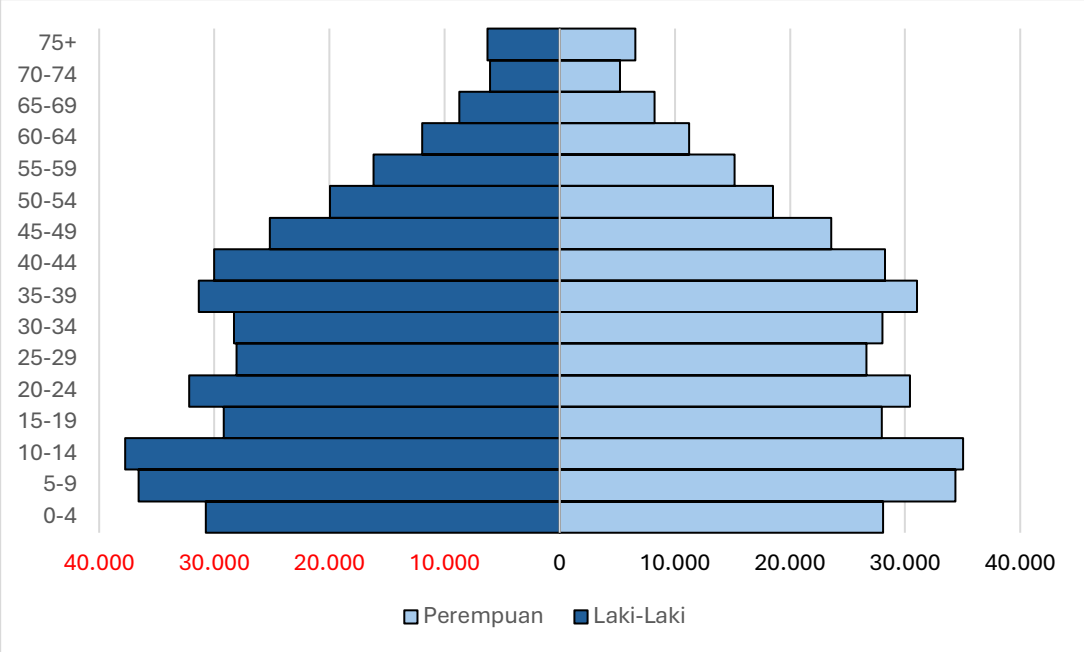
Dalam konteks kependudukan, karakteristik penduduk juga memiliki pengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk, rasio penduduk perempuan dan laki-laki Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 105,59 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Musi Banyuasin lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.8**
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| Tahun | Jenis Kelamin | | Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 0-4 | 30.764 | 28.060 | 58.824 |
| 5-9 | 36.572 | 34.361 | 70.933 |
| 10-14 | 37.764 | 35.029 | 72.793 |
| 15-19 | 29.195 | 27.967 | 57.162 |

| Tahun | Jenis Kelamin | | Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 20-24 | 32.159 | 30.427 | 62.586 |
| 25-29 | 28.095 | 26.655 | 54.750 |
| 30-34 | 28.281 | 28.045 | 56.326 |
| 35-39 | 31.331 | 31.032 | 62.363 |
| 40-44 | 30.017 | 28.235 | 58.252 |
| 45-49 | 25.195 | 23.600 | 48.795 |
| 50-54 | 19.974 | 18.516 | 38.490 |
| 55-59 | 16.154 | 15.167 | 31.321 |
| 60-64 | 11.953 | 11.233 | 23.186 |
| 65-69 | 8.712 | 8.259 | 16.971 |
| 70-74 | 6.056 | 5.248 | 11.304 |
| 75+ | 6.251 | 6.590 | 12.841 |
| **JUMLAH** | **378.473** | **358.424** | **736.897** |

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024




**Gambar 2.12.** Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024

Dapat dilihat dimana jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 27,49 persen dan penduduk 15-64 tahun sebesar 66,93 persen. Adapun jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun hanya sebesar 11,47 persen, yang mana persentasenya lebih kecil dari penduduk usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Musi Banyuasin lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Data persebaran penduduk memiliki peran penting dalam menilai tingkat pemerataan atau ketimpangan penyebaran penduduk antarwilayah, potensi sumber daya manusia di suatu daerah, serta kemampuan sumber daya alam dalam menopang jumlah penduduk yang ada. Ketidakseimbangan distribusi penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait kepadatan di wilayah tertentu. Beberapa daerah memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, sedangkan wilayah lainnya hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Di wilayah padat penduduk, muncul tekanan sosial dan lingkungan, seperti ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja, keterbatasan lahan permukiman, serta kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk yang minim cenderung menghadapi tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam secara maksimal karena keterbatasan tenaga kerja

**Tabel 2.9**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| Kecamatan | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022 s.d 2023 (Persen) | Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan (Persen) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|---|---|---|---|---|
| Sanga Desa | 37.711 | 14,00 | 5,12 | 119 |
| Babat Toman | 43.260 | 21,40 | 5,87 | 34 |
| Batanghari Leko | 25.773 | 27,18 | 3,50 | 12 |
| Plakat Tinggi | 30.588 | 13,89 | 4,15 | 124 |
| Lawang Wetan | 30.176 | 16,72 | 4,10 | 130 |
| Sungai Keruh | 26.811 | 14,27 | 3,64 | 81 |
| Jirak Jaya | 22.538 | 18,85 | 3,06 | 75 |
| Sekayu | 103.368 | 13,68 | 14,03 | 147 |
| Lais | 59.088 | 10,82 | 8,02 | 78 |
| Sungai Lilin | 70.479 | 12,78 | 9,56 | 188 |
| Keluang | 37.866 | 15,14 | 5,14 | 95 |
| Babat Supat | 41.332 | 17,89 | 5,61 | 81 |
| Bayung Lencir | 101.134 | 37,81 | 13,72 | 21 |
| Lalan | 46.229 | 18,08 | 6,27 | 45 |
| Tungkal Jaya | 60.544 | 23,85 | 8,22 | 74 |
| **Total** | **736.897** | **18,81** | **100,00** | **52** |

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menurut wilayah kecamatan belum merata. Berdasarkan data BPS, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sekayu (103.368) dan Kecamatan Bayung Lencir (101.134). Kedua kecamatan tersebut dihuni oleh sekitar 27,75 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah paling sedikit adalah Kecamatan Jirak Jaya (22.538), Kecamatan Batanghari Leko (25.773) dan Kecamatan Sungai Keruh (26.811). Tidak meratanya persebaran penduduk juga dapat dilihat dari

angka kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 52 jiwa per km$^2$. Menurut kecamatan, tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Sungai Lilin (sekitar 188 jiwa/km$^2$), disusul Kecamatan Sekayu (sekitar 147 jiwa/km$^2$), Kecamatan Lawang Wetan (sekitar 130 jiwa/km$^2$), Kecamatan Plakat Tinggi (sekitar 124 jiwa/km$^2$) dan Kecamatan Sanga Desa (sekitar 119 jiwa/km$^2$). Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Batanghari Leko (sekitar 12 jiwa/km$^2$), Kecamatan Bayung Lencir (sekitar 21 jiwa/km$^2$), Kecamatan Babat Toman (sekitar 34 jiwa/km$^2$), dan Kecamatan Lalan (sekitar 45 jiwa/km$^2$).

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun, termasuk dalam laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 2,66 persen di tahun 2023 menjadi 18,81 persen di tahun 2024.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus strategis yang mencakup berbagai sektor esensial, antara lain pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial. Melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang tepat, terarah, dan

berkesinambungan, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan secara optimal, guna mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

## A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### 1) Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu sektor primer. Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB masih dari sektor

Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 49,79 persen, dilanjutkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,09 persen, dan menempati urutan ketiga dengan kontribusi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 11,92 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,20 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,90 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,04 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.

**Tabel 2.10**
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)**

| Kode | Lapangan Usaha PDRB | PDRB ADHB (persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7.910,17 | 8.496,72 | 9.280,78 | 10.358,31 | 11.207,22 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 34.606,16 | 39.109,19 | 45.284,55 | 43.831,46 | 46.139,57 |
| C | Industri Pengolahan | 7.221,34 | 7.767,15 | 8.848,93 | 10.014,05 | 11.048,19 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 33,15 | 36,24 | 40,04 | 43,59 | 49,14 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13,26 | 13,79 | 14,34 | 15,11 | 15,17 |
| F | Konstruksi | 5.336,63 | 5.704,89 | 6.157,59 | 6.921,79 | 7.598,87 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.318,61 | 3.613,09 | 4.119,79 | 4.832,53 | 5.466,17 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 201,61 | 200,95 | 220,77 | 237,66 | 237,74 |

| Kode | Lapangan Usaha PDRB | PDRB ADHB (persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 122,68 | 131,37 | 151,10 | 177,38 | 215,89 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 202,29 | 221,44 | 253,24 | 294,00 | 318,91 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.284,94 | 1.335,06 | 1.395,25 | 1.468,33 | 1.587,98 |
| L | Real Estate | 1.432,02 | 1.474,72 | 1.711,19 | 2.054,69 | 2.321,39 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 28,55 | 28,87 | 30,54 | 33,00 | 40,43 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.264,15 | 2.409,79 | 2.600,43 | 2.860,93 | 3.722,97 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.290,31 | 1.384,73 | 1.527,43 | 1.675,84 | 1.816,25 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 259,73 | 283,13 | 316,12 | 326,45 | 354,80 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 418,28 | 432,58 | 479,44 | 525,95 | 526,20 |
| **PDRB** | | **65.943,88** | **72.643,72** | **82.431,54** | **85.671,07** | **92.666,87** |

*Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*

**Angka Sementara/Preliminary Figures*

***Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures*

**Tabel 2.11**

**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 (persen)**

| Kode | Lapangan Usaha PDRB | PDRB ADHB (persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12,00 | 11,70 | 11,26 | 12,09 | 12,09 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 52,48 | 53,84 | 54,94 | 51,16 | 49,79 |
| C | Industri Pengolahan | 10,95 | 10,69 | 10,73 | 11,69 | 11,92 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Kode | Lapangan Usaha PDRB | PDRB ADHB (persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| F | Konstruksi | 8,09 | 7,85 | 7,47 | 8,08 | 8,20 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,03 | 4,97 | 5,00 | 5,64 | 5,90 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,26 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,34 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,95 | 1,84 | 1,69 | 1,71 | 1,71 |
| L | Real Estate | 2,17 | 2,03 | 2,08 | 2,40 | 2,51 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,43 | 3,32 | 3,15 | 3,34 | 4,02 |
| P | Jasa Pendidikan | 1,96 | 1,91 | 1,85 | 1,96 | 1,96 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,57 |
| **PDRB** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025*

**Angka Sementara/Preliminary Figures*

***Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures*

Di antara kelima lapangan usaha tertinggi, lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan peranan pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian peranannya menurun pada tahun 2024. Beberapa penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah menurunnya jumlah

produksi dan harga produk pertambangan dan penggalian di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini berkebalikan dengan kondisi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang dimana peranannya cenderung sedikit menaik dalam lima tahun terakhir. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2.12**
**PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)**

| PDRB Pengeluaran | PDRB ADHB (miliar rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 46.515,45 | 48.869,84 | 54.812,53 | 60.759,60 | 65.517,59 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1.232,91 | 1.298,02 | 1.444,38 | 1.636,80 | 1.936,36 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 3.997,61 | 4.274,42 | 4.185,25 | 4.602,21 | 4.974,19 |

| PDRB Pengeluaran | PDRB ADHB (miliar rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 20.523,03 | 20.456,63 | 21.796,55 | 23.104,34 | 25.451,72 |
| Perubahan Inventori | -587,56 | 35,30 | -13,07 | 16,05 | 4,91 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -5.737,56 | -2.290,48 | 205,91 | -4.447,92 | -5.217,89 |
| **PDRB** | **65.943,88** | **72.643,72** | **82.431,54** | **85.671,07** | **92.666,87** |

*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025*

**Angka Sementara/Preliminary Figures*

***Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures*

**Tabel 2.13**

**PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin**

**Tahun 2020-2024 (dalam persen)**

| PDRB Pengeluaran | PDRB ADHB (persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 70,54 | 67,27 | 66,49 | 70,92 | 70,70 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,87 | 1,79 | 1,75 | 1,91 | 2,09 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 6,06 | 5,88 | 5,08 | 5,37 | 5,37 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 31,12 | 28,16 | 26,44 | 26,97 | 27,47 |
| Perubahan Inventori | -0,89 | 0,05 | -0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -8,70 | -3,15 | 0,25 | -5,19 | -5,63 |
| **PDRB** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025*

**Angka Sementara/Preliminary Figures*

***Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures*

Dapat dilihat bahwa selama periode 2020-2024 PDRB Musi Banyuasin sebagian besar masih bersumber dari konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 65 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu bernilai negatif

yang artinya peranan impor relatif lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 sampai dengan 60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten.

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 26 hingga 32 persen. Artinya kabupaten ini memiliki peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dari tingginya investasi yang ada. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentan 5 hingga 6 persen yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian tidak terlalu besar. Peran pengeluaran pemerintah yang relatif kecil sesungguhnya bukan menjadi masalah, ketika pengeluaran itu diarahkan pada pengeluaran yang akan menciptakan nilai tambah besar bagi perekonomian.

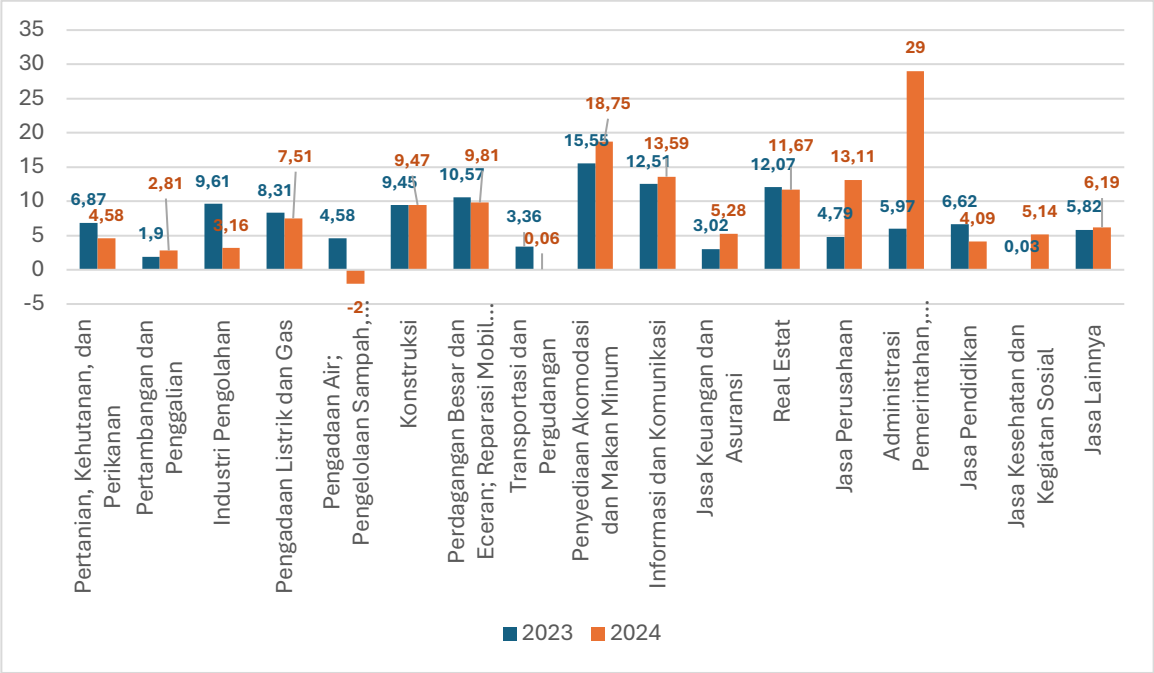
**2) Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku (ADHB) Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 92,67 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 52,75 triliun.

Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 (y-on-y), meningkat dibandingkan tahun 2023

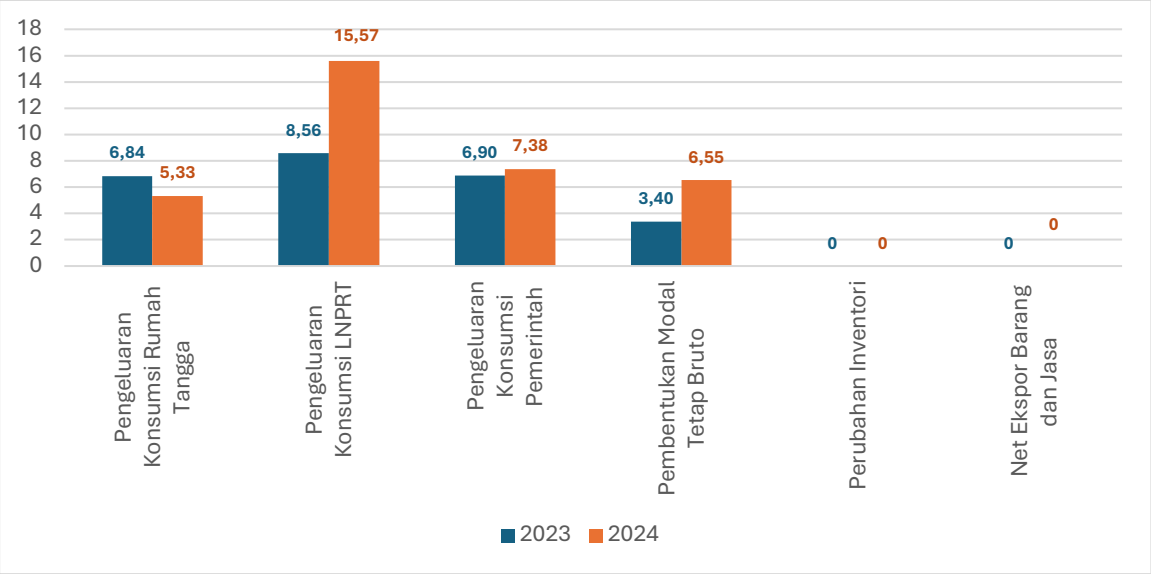
yang hanya sekitar 4,51 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 29,00 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 15,57 persen. Struktur perekonomian Musi Banyuasin pada tahun 2024 tidak banyak berubah. Kontribusi PDRB terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, sedangkan berdasarkan komponen pengeluaran, pengeluaran terbesar adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 Terhadap Tahun 2023 (y-on-y), dimana Ekonomi Musi Banyuasin tahun 2024 dibanding tahun 2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 29,00 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,75 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 13,59 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 13,11 persen. Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga tumbuh sebesar 2,81 persen, sedangkan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,58 persen. Sementara itu, satu Lapangan Usaha mengalami kontraksi yaitu Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 2,00 persen.




**Gambar 2.13.** Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (y-to-y) (persen)
Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 Terhadap Tahun 2023 (y-on-y), dimana ekonomi Musi Banyuasin tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (y-on-y). Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif, masing-masing yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 15,57 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK- RT) sebesar 5,33 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,38 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,55 persen




**Gambar 2.14.** Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (y-to-y) (persen)
Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

Struktur PDRB Kabupaten Musi Banyuasin menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Musi Banyuasin masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Musi Banyuasin yaitu sebesar 70,70 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,47 persen; Komponen PK-P sebesar 5,37 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 2,09 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,01 persen. Sementara itu, Komponen Net Ekspor bernilai negatif, yang artinya pada tahun 2024 nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, dimana pada PDRB Musi Banyuasin Net Ekspor memiliki peran sebesar 5,63 persen.

### 3) Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, dengan demikian angka ini merupakan indikator makro yang menunjukkan rata rata tingkat kesejahteraan per penduduk. Tabel berikut menyajikan PDRB per kapita Musi Banyuasin. Dari tabel dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita harga konstan sekitar 30 persen di bawah harga berlaku. Angka ini mengirimkan pesan bahwa terdapat angka inflasi yang cukup tinggi di Musi Banyuasin.

**Tabel 2.14**

**PDRB Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin (ribu rupiah)**

| PDRB Per Kapita | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) | 106.213,95 | 115.561,74 | 129.485,96 | 132.949,92 | 142.138,01 |
| Kabupaten Musi Banyuasin (ADHK 2010) | 71.843,46 | 73.382,06 | 75.553,26 | 78.009,69 | 80.917,39 |

*Sumber : PDRB Kab. Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024*

**Angka Sementara/ Preliminary Figures*

***Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures*

Tabel 2.14 memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data tersebut, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin relatif mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Hal ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan di daerah yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

**4) Laju Inflasi**

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dalam pembangunan daerah, inflasi memberikan dampak yang bervariasi bagi perekonomian lokal. Dampak tersebut bisa positif, seperti ketika inflasi yang terkendali mendorong investasi dan konsumsi, atau negatif, seperti ketika inflasi yang tinggi dan tidak stabil mengganggu stabilitas ekonomi, menyulitkan perencanaan, dan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga analisis terhadap inflasi menjadi penting untuk memahami dinamika ekonomi, merumuskan kebijakan moneter, dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Namun hingga saat ini, tidak terdapatnya data inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu, maka data inflasi daerah ini diproxy dengan menggunakan perhitungan angka deflator GDP. Berdasar angka deflator GDP maka perkiraan tingkat inflasi Musi Banyuasin dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.15**
**Laju Inflasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2023**

| Tahun | Inflasi*) |
|---|---|
| 2020 | 0,01 |
| 2021 | 6,8 |
| 2022 | 9,55 |
| 2023 | 7,69 |

**) Pendekatan Deflator GDP*

*Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka, 2024*

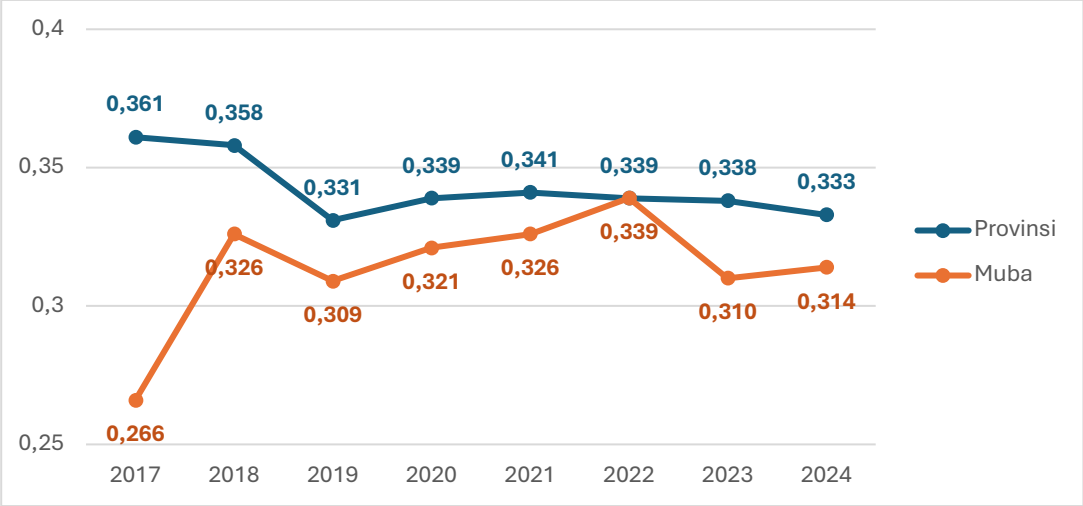
Jika dilihat dari tabel di atas, laju inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2023 angka ini naik menjadi 7,69.

Inflasi yang tinggi menggambarkan adanya permasalahan ekonomi di daerah tersebut. Peningkatan harga barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan inflasi tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan daya beli masyarakat.

Laju inflasi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, dengan puncaknya pada 2022 sebesar 5,95%, sebelum menurun sedikit menjadi 5,34% pada 2023. Kenaikan inflasi ini terutama disumbang oleh kelompok transportasi dan makanan, minuman, serta tembakau. Kelompok transportasi mengalami lonjakan signifikan, dari deflasi -1,09% pada 2020 menjadi inflasi 14,94% pada 2023, kemungkinan besar akibat kenaikan harga BBM dan tarif transportasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga konsisten naik, mencerminkan tekanan harga pada kebutuhan pokok. Sementara itu, kelompok seperti kesehatan dan informasi-komunikasi relatif stabil, bahkan sempat mengalami deflasi. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi terutama berasal dari sektor konsumsi utama, dan perlu direspons dengan kebijakan pengendalian harga serta stabilisasi distribusi barang pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

**5) Indeks Gini**

Indeks Gini (Gini *Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.




**Gambar 2.15.** Gini Ratio Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: BPS (diolah)

Gini *Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai Gini *Ratio* (maksimal 1), semakin tinggi tingkat ketimpangan; sebaliknya, semakin rendah nilainya (mendekati 0), semakin merata distribusi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2024, terlihat bahwa Gini *Ratio* Provinsi Sumatera Selatan cenderung stabil dengan fluktuasi yang relatif kecil. Pada tahun 2017, Gini *Ratio* tercatat sebesar 0,361 dan mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 0,333 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat di tingkat provinsi, meskipun lajunya cukup lambat.

Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan dinamika yang lebih fluktuatif. Gini *Ratio* tercatat cukup rendah pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,266, menandakan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Namun, angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi

0,326, kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 0,339 yang pada tahun tersebut menyamai tingkat ketimpangan di tingkat provinsi.

Meskipun demikian, dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Gini *Ratio* Kabupaten Musi Banyuasin menurun menjadi 0,310 pada tahun 2023 dan 0,314 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat, meskipun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2017–2019.

Gini *Ratio* Kabupaten Musi Banyuasin umumnya berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada tahun 2017 hingga 2021. Namun pada tahun 2022 tingkat ketimpangan di Kabupaten Musi Banyuasin sempat menyamai Provinsi Sumatera Selatan, mencerminkan terjadinya peningkatan ketimpangan. Kondisi ini mulai membaik dalam dua tahun terakhir, di mana nilainya kembali berada di bawah angka Provinsi Sumatera Selatan.

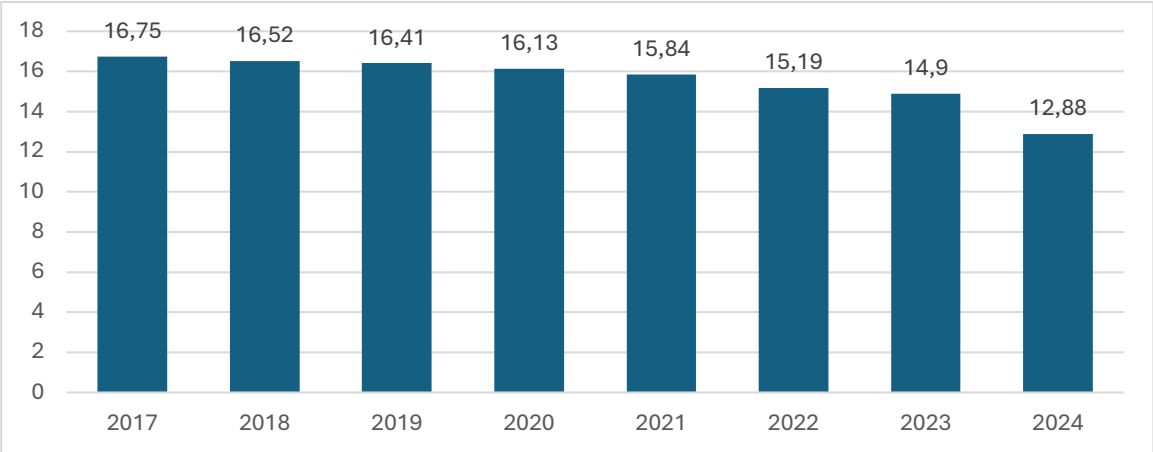
Secara keseluruhan, Kabupaten Musi Banyuasin cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini mencerminkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah ini relatif lebih merata dan menunjukkan arah yang positif dalam konteks pembangunan berkeadilan. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa upaya pemerataan perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar pencapaian yang telah diraih dapat berkelanjutan.

## B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dimaksud untuk menjelaskan karakteristik masyarakat dari perspektif sosial. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, maka pada bagian ini akan dijelaskan indikator-indikator yang kemudian akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

### 1) Kemiskinan

Tingkat keberhasilan pembangunan salah satunya tercermin dari jumlah penduduk miskin, yang diukur berdasarkan persentasenya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan, namun masih lebih tinggi dari angka nasional. Jika dilihat dari tren penurunan kemiskinan, pencapaian Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kemajuan yang relatif lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.

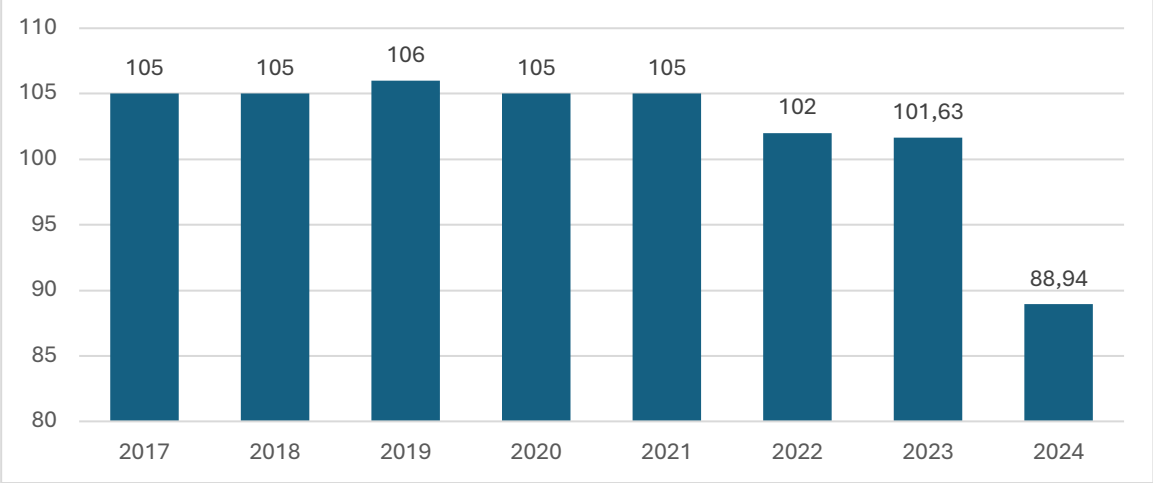



**Gambar 2.16.** Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2025

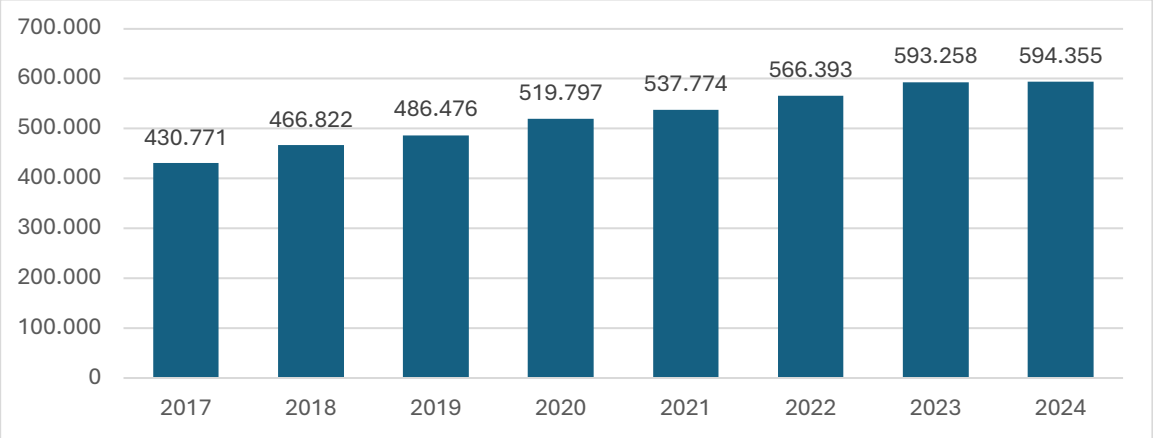
Pada tahun 2020 ketika persentase penduduk miskin nasional meningkat akibat pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin justru mengalami penurunan. Pada tahun tersebut, meskipun terjadi pandemi dan umumnya terjadi penurunan kondisi perekonomian, Kabupaten Musi Banyuasin dapat bertahan dengan lebih baik, terutama karena memiliki basis ekonomi yang didominasi sektor pertanian di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan fokus pada pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang mengandalkan sektor perdagangan atau industri.

Berdasarkan data BPS, selama tahun 2017-2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan relatif stabil pada awal periode, diikuti oleh tren penurunan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada rentang waktu 2017 hingga 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung stagnan, berkisar antara 105 ribu hingga 106 ribu jiwa. Selama lima tahun berturut-turut, tidak terlihat perubahan signifikan, yang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan pada masa tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Tahun 2022 menunjukkan awal dari perbaikan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 102 ribu jiwa, disusul penurunan lagi pada tahun 2023 menjadi 101,63 ribu jiwa dan pada tahun 2024 mencatat penurunan yang paling tajam, dengan jumlah penduduk miskin menurun drastis menjadi 88,94 ribu jiwa, atau berkurang sekitar Tahun 2024 mencatat penurunan yang paling tajam, dengan jumlah penduduk miskin menurun drastis menjadi 88,94 ribu jiwa, atau berkurang sekitar 12,69 ribu jiwa (sekitar 12,5%) dibandingkan tahun sebelumnya meskipun angkanya masih tinggi. Penurunan ini mencerminkan adanya intervensi kebijakan atau program pembangunan sosial yang mulai efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.




**Gambar 2.17.** Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu) Kab. Musi Banyuasin
Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2025




**Gambar 2.18.** Garis Kemiskinan (rupiah) Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2025

Berdasarkan data di atas yang membandingkan daya beli masyarakat dari segi pendapatan per kapita, seharusnya Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil mengatasi kemiskinan dengan baik. Namun, peningkatan terus-menerus dalam angka garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat miskin, yang berimplikasi pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak selarasnya jumlah pendapatan per kapita dengan garis kemiskinan secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Fenomena kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi unik karena meskipun daerah tersebut memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita yang tinggi, namun tingkat kemiskinan tetap tinggi. Meskipun demikian, Indeks Gini di Kabupaten Musi Banyuasin juga tidak menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan.

Fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin juga terkait dengan ketergantungan daerah ini pada sektor primer. Sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat dengan cepat bergeser dan memengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sektor primer tambahan selain kehutanan dan perikanan, yaitu pertanian. Kehadiran sektor pertanian memberikan ketahanan lebih bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi gejolak ekonomi, bahkan selama pandemi COVID-19.

Permasalahan Utama Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Kemiskinan turun, namun dalam laju yang melambat, hanya 2023 ke 2024 yang penurunan kemiskinannya besar.
2. Besarnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin, dan melambat penurunannya.
3. Fluktuatifnya perbaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).
4. Masih tingginya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin
5. Masih tingginya jumlah individu lanjut usia dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin

Permasalahan kemiskinan dalam bidang pendidikan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

Partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah (APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/MA) secara khusus anak-anak dari keluarga miskin

ekstrem, miskin, rentan miskin dan atau keluarga tidak mampu lainnya Masih adanya angka putus sekolah (APts SD/MI, APts SMP/MTs dan APts SMA/MA) secara khusus anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan atau keluarga tidak mampu lainnya, Angka melanjutkan pendidikan belum 100% khususnya dari keluarga miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan atau keluarga tidak mampu lainnya, Distribusi guru yang belum merata, secara khusus daerah-daerah prioritas sesuai analisis wilayah prioritas dan Belum maksimalnya kualitas tenaga kependidikan dan lulusan sekolah. serta masih adanya kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pendidikan yang belum layak.

Permasalahan kemiskinan dalam bidang kesehatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi dan balita, secara khusus keluarga miskin ekstrem dan miskin
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan distribusi merata tenaga kesehatan terutama lokasi prioritas intervensi kemiskinan
3. Meningkatnya kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih, secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin
4. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan distribusi sarana dan prasarana kesehatan sesuai distribusi keluarga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, Menurunnya prevalensi stunting, gizi buruk dan gizi kurang, khususnya bagi penduduk miskin ekstrem dan miskin dan Menurunnya penduduk dengan keluhan kesehatan, secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin.

Selanjutnya permasalahan kemiskinan dalam bidang infrastruktur dasar yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebagai berikut:

1. Terpenuhinya rumah layak huni secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin
2. Meningkatnya rumah tangga dengan sanitasi layak secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin
3. Meningkatnya rumah tangga dengan air minum layak secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin dan Terpenuhi akses listrik secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan untuk permasalahan kemiskinan dalam bidang ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

1. Masih tingginya penduduk 40% dengan tingkat kesejahteraan terendah tidak bekerja
2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin
3. Minimnya tenaga kerja terampil dan rendahnya pendidikan dan ketrampilan pencari kerja lokal khususnya penduduk miskin ekstrem dan miskin dan Terbatasnya lapangan kerja dengan tingginya angkatan kerja.

Berdasarkan pengelompokan kecamatan, jumlah kepala keluarga perempuan diatas 45 tahun miskin dan jumlah lansia miskin terbanyak

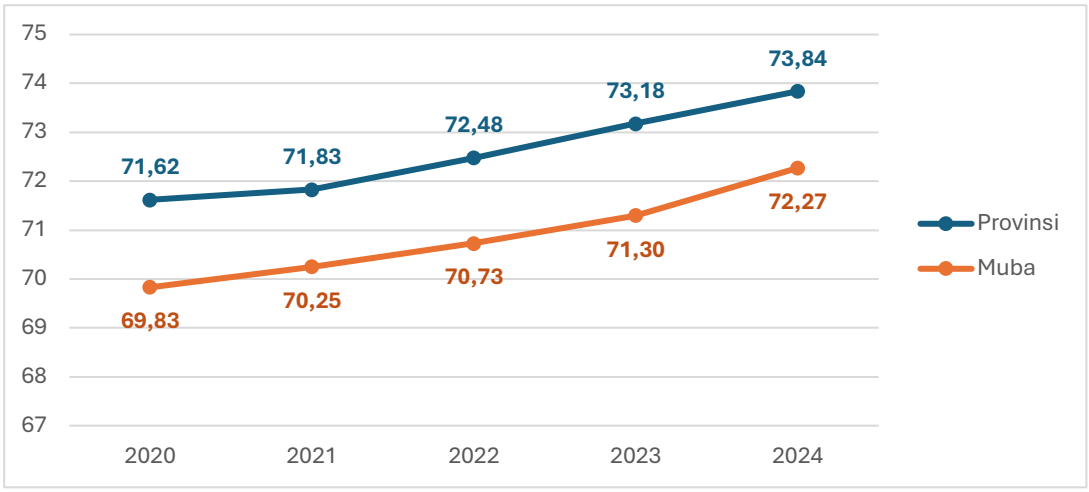
berada di Kecamatan Sekayu, Lais dan Bayung Lencir. Berdasarkan dimensi pendidikan, persentase ruang kelas belajar rusak berat SD terbanyak di Kecamatan Sekayu, Lais, Bayung Lencir dan Sungai Lilin. persentase ruang kelas belajar rusak berat SMP Lawang Wetan, Sekayu, Sanga Desa dan Lais. Berdasarkan dimensi kesehatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak di Kecamatan Lais, Sekayu, dan Bayung Lencir, jumlah balita stunting terbanyak di Kecamatan Bayung Lencir, Sekayu, dan Lais. Berdasarkan dimensi sarana prasarana dasar, kecamatan dengan bedah rumah terbanyak berada di Kecamatan Bayung Lencir dan Lais, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan terendah berada di Kecamatan Lalan. jumlah kecamatan dengan penerangan bukan listrik terbanyak berada di Kecamatan Bayung Lencir dan Sekayu. berdasarkan dimensi ketenagakerjaan, kecamatan dengan jumlah penduduk usia 15-49 tidak bekerja terbanyak berada di Kecamatan Sekayu, Bayung Lencir, Lais, dan Tungkal Jaya. jumlah penduduk desil 1-4 yang bekerja sebagai petani terbanyak berada di Kecamatan Lais, Bayung Lencir dan Sekayu.

**2) Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup Waktu Lahir. Selanjutnya untuk

mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per kapita Riil (adjusted). Seperti dikemukakan sebelumnya komponen IPM terdiri dari umur harapan hidup, angka harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran yang disesuaikan Purchasing Power Parity (PPP). Berdasarkan empat variabel tersebut, diperoleh indeks harapan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks standar hidup layak. Dari ketiga indeks ini dihasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin.

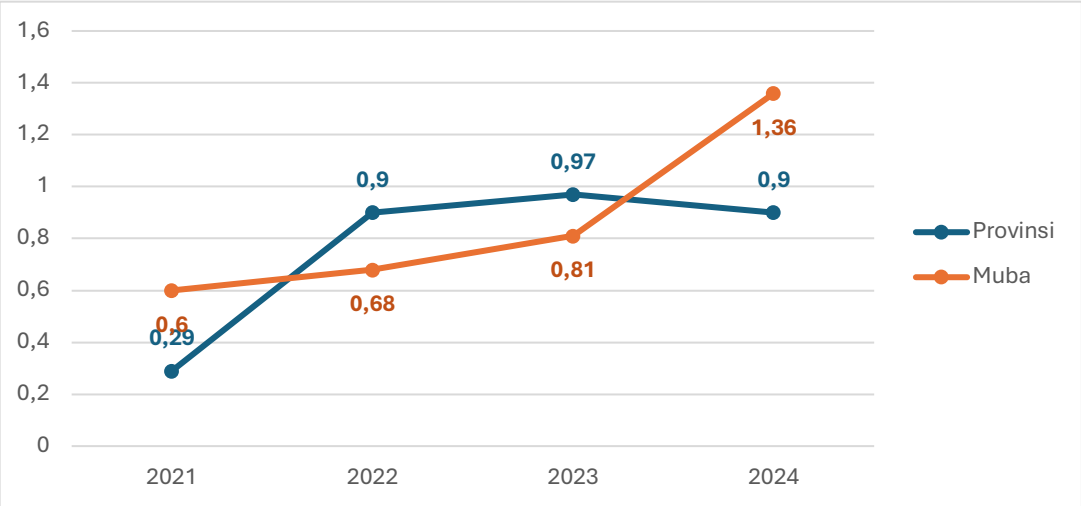



**Gambar 2.19.** Perkembangan IPM Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS

Pencapaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020-2024 terus menunjukkan peningkatan. Namun, nilainya berada di bawah nilai IPM Sumatera Selatan. Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat. Pencapaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan kategori dari kategori sedang menjadi kategori tinggi pada tahun 2021. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang dlilihat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikator yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Hal ini digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya

capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.




**Gambar 2.20.** Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 pertumbuhan IPM tercatat sebesar 0,6 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan yang hanya 0,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kinerja yang relatif baik dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada awal periode.

Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami sedikit perlambatan, masing-masing sebesar 0,68 persen dan 0,81 persen, sementara pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,90 persen dan 0,97 persen. Meskipun masih menunjukkan tren positif, kondisi ini mencerminkan perlunya

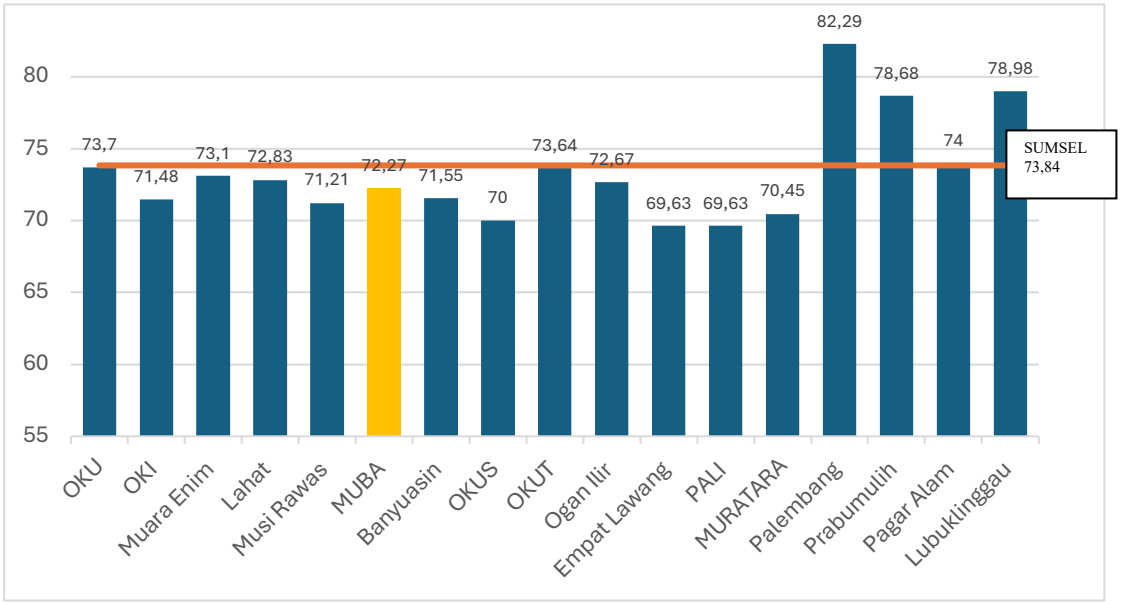
optimalisasi kembali program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tahun 2024 menjadi momentum penting, di mana pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin meningkat signifikan mencapai 1,36 persen, jauh melampaui pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 0,90 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pembangunan manusia secara lebih terintegrasi, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat.

Secara umum, kualitas pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat menurut Provinsi Sumatera Selatan. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan prestasinya (meskipun terdapat perubahan peringkat), sementara daerah yang masih lebih rendah semakin terpacu untuk meningkatkan kapabilitas manusia di masing-masing komponen pembentuknya.

Perubahan peringkat IPM yang terjadi bergantung pada pembangunan unsur-unsur penunjang IPM di masing-masing kabupaten/kota, yang tentu saja memiliki berbagai tingkat perubahan pembangunan yang berbeda-beda. Secara umum, pembangunan fasilitas penunjang biasanya lebih dahulu terjadi di perkotaan, sehingga pelayanan di non-perkotaan menjadi cenderung lebih lambat. Namun tidak jarang kabupaten dengan wilayah dominan non-perkotaan tetap dapat berhasil mempertahankan peringkatnya secara berkesinambungan.

Diantara 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih adalah kabupaten/kota yang peringkat IPM nya tertinggi pada tahun 2024 adalah Kota Palembang (82,29), Kota Lubuk Linggau (78,98), dan Kabupaten Prabumulih (78,68). Sementara IPM Kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi ke-10 yaitu (72,27). Sedangkan kabupaten/kota yang berada di urutan 17 di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten PALI dengan nilai IPM (69,63).




**Gambar 2.21.** IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2024
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS

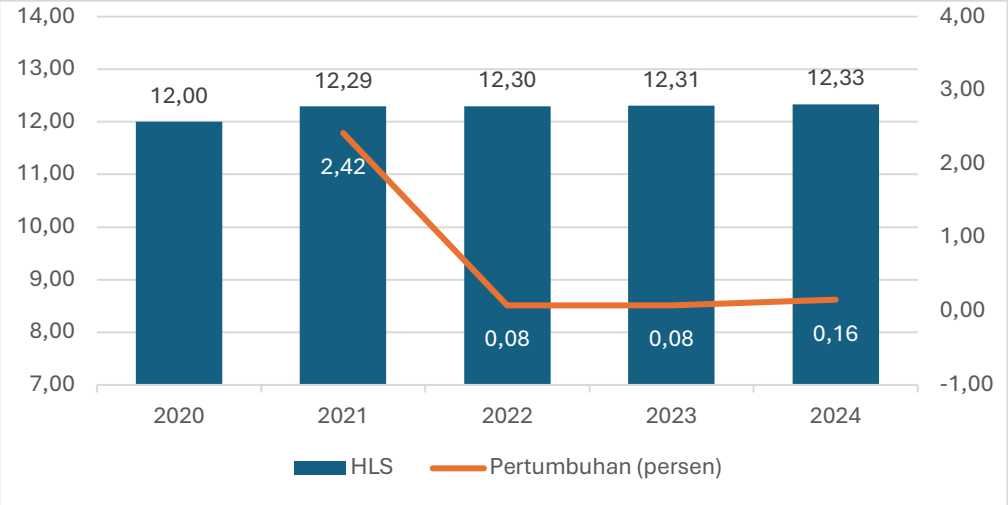
Secara lebih rinci, masing-masing dimensi pembentuk IPM di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengetahuan

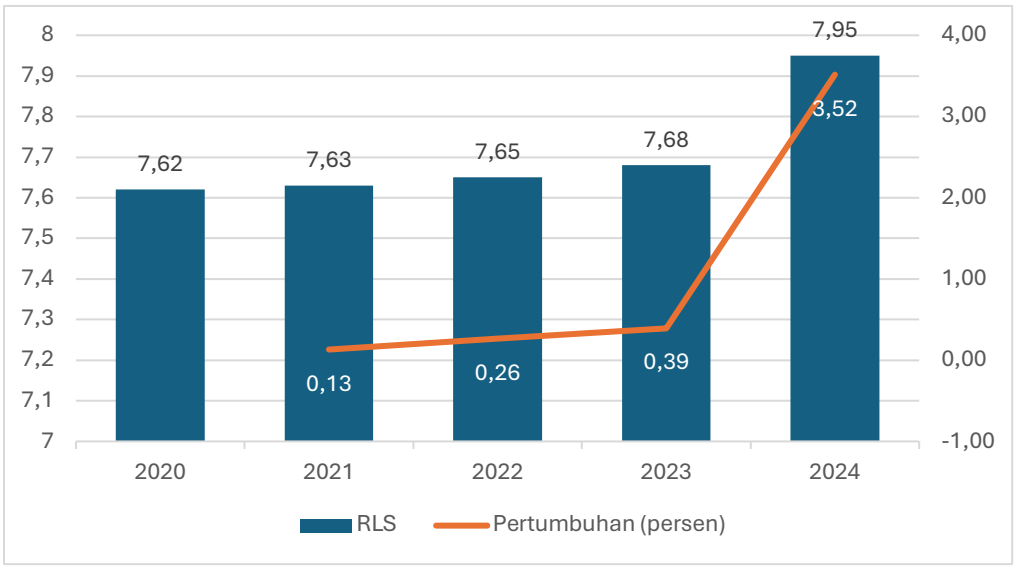
Dalam rangka menciptakan SDM berkualitas, salah satu faktor penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Tingkat Pendidikan yang tinggi

sangat penting bagi suatu negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada tingkat makro, ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar, sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera. Dengan demikian komponen yang termasuk dalam bidang pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjelaskan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia di atas 25 tahun dalam menempuh pendidikan formal. Selanjutnya komponen kedua dalam bidang pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjelaskan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS menjelaskan mengenai adanya peluang bagi anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas untuk merasakan seluruh jenis pendidikan dengan kurun waktu tertentu. Selain itu, angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas.




**Gambar 2.22.** Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS




**Gambar 2.23.** Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS

Selama periode 2020–2024, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. RLS mengalami kenaikan dari 7,62 pada tahun 2020 menjadi 7,95 pada tahun

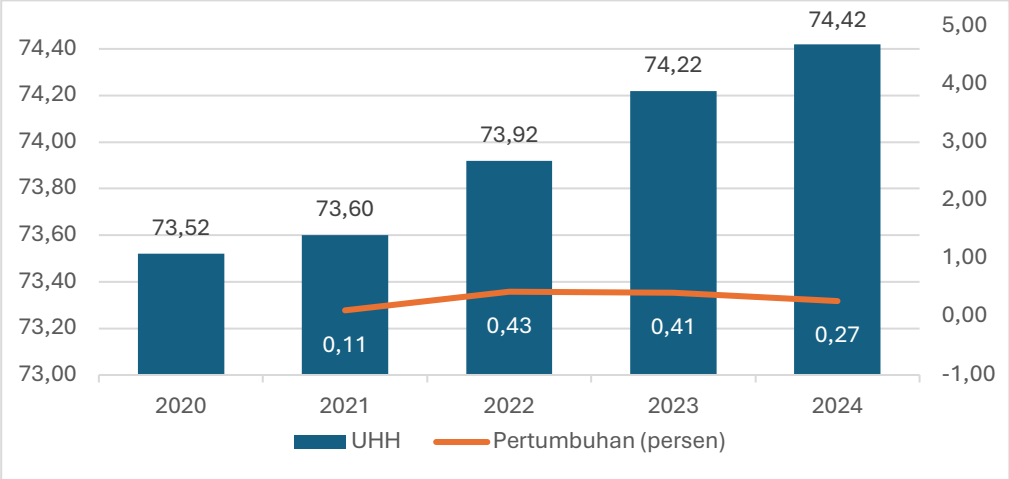
2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 3,52 persen, jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 0,13 persen hingga 0,39 persen. Peningkatan tajam pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya percepatan dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar dan menengah. Hal ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan pendidikan dan program intervensi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah juga cenderung mengalami peningkatan dari 12,00 pada tahun 2020 menjadi 12,33 pada tahun 2024. Namun, pertumbuhannya relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir, dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,01 persen pada tahun 2022 dan 2023, dan 0,02 persen pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,29 persen. Pertumbuhan HLS yang cenderung melambat menunjukkan bahwa ekspektasi lama bersekolah anak-anak usia sekolah belum mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi perhatian penting bagi perencanaan pembangunan pendidikan ke depan, terutama dalam mendorong pemerataan akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, seperti pendidikan menengah dan tinggi.

b) Kesehatan

Dimensi Kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir mengacu pada rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh

seseorang yang baru lahir di suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran umum tentang tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan juga merupakan salah satu komponen penting karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat dalam hal kesehatan dan umur panjang. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.




**Gambar 2.24.** Umur Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS

UHH penduduk Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2024 mencapai 74,42 tahun, artinya anak yang lahir pada tahun 2024 diharapkan untuk dapat hidup hingga berumur 74,42 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,2 tahun (tumbuh 0,27 persen) dibandingkan tahun 2023.

Terkait indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir, beberapa indikator statistik yang berkaitan dengan faktor lingkungan antara lain akses ke

sumber air minum bersih, akses ke air minum layak, dan fasilitas tempat buang air besar penduduk, yang menunjukkan perbaikan dalam tahun-tahun terakhir. Persentase rumah tangga dengan akses ke sumber air bersih di tahun 2024 mencapai 94,96 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 92,37 persen. Sementara persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (air limbah) yang layak juga mengalami peningkatan dari 82,45 persen di tahun 2023 menjadi 83,67 persen di tahun 2024.

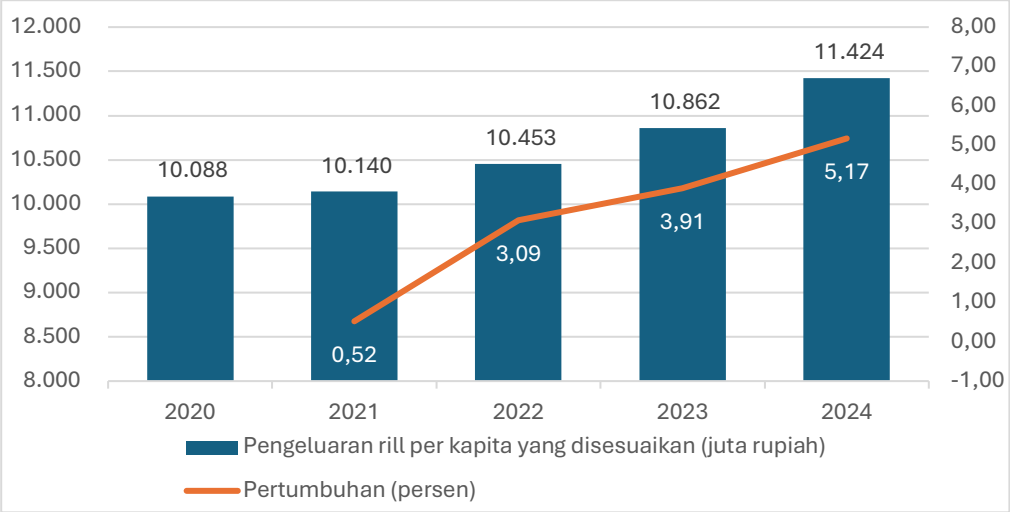
Indikator statistik yang terkait perilaku antara lain perkawinan usia dini (berumur 16 tahun ke bawah) dan indikator pemanfaatan fasilitas dan tenaga kesehatan saat persalinan. Perkawinan dini memiliki berbagai dampak buruk baik bagi sang ibu maupun bayi yang dilahirkan. Dengan kondisi fisik yang belum siap, anak perempuan yang mengalami perkawinan dini rentan mengalami komplikasi kehamilan sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Sementara anak yang dilahirkan juga berisiko mengalami kelahiran prematur, gizi buruk, dan akses pendidikan yang terbatas akibat mental dan pengetahuan ibu yang masih kurang. Di tahun 2024, sebanyak 15,83 persen perempuan yang pernah kawin di Kabupaten Musi Banyuasin berumur 16 tahun atau kurang di saat perkawinan pertamanya, dari sebelumnya 15,42 persen di tahun 2023. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar kejadian perkawinan dini tidak terus meningkat.

Sementara itu, dari total perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 98,75 persen melahirkan di fasilitas

kesehatan seperti rumah sakit, rumah/klinik bersalin, puskesmas, dan ditolong oleh tenaga kesehatan saat melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir. Pemanfaatan fasilitas kesehatan dan pertolongan dari tenaga kesehatan terampil saat melahirkan dapat meminimalkan komplikasi saat proses kelahiran sehingga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.

c) Standar Hidup Layak

Dimensi Standar Hidup Layak dalam Indeks Pembanguna Manusia (IPM) mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melihat perkembangan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,perumahan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap barang serta layanan lainnya. Indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan ini tidak sekadar menghitung ratarata pengeluaran masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga menyesuaikannya dengan daya beli serta faktor inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang standar hidup di wilayah tersebut.




**Gambar 2.25.** Pengeluaran Rill Per Kapita yang Disesuaikan (juta rupiah) Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024, BPS

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2024 mencapai 11.424 juta rupiah, naik 5,17 persen dibandingkan tahun 2023. Capaian indikator ini juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama setelah sempat mendapat pukulan di masa pandemi COVID-19. Hal ini berarti masyarakat memiliki daya beli yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Peningkatan ini biasanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana pendapatan per individu meningkat seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 5,03 persen sepanjang tahun 2024, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga semakin menurun, dari 2,58 persen di tahun 2023 menjadi 2,13 persen di tahun 2024. Selain itu,

peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan juga menunjukkan bahwa inflasi dan ketidakmerataan harga barang telah diimbangi dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2024 cukup terjaga stabil, tercatat sebesar 1,20 persen (*y-on-y*), menurun dibandingkan inflasi 2023 yang mencapai 3,17 persen (*y-on-y*).

Semakin tinggi standar hidup suatu wilayah, semakin baik kualitas kehidupan masyarakatnya, termasuk akses terhadap pekerjaan yang layak, fasilitas kesehatan, dan lingkungan yang nyaman. Untuk meningkatkan dimensi ini, pemerintah perlu terus berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, pengendalian inflasi, serta program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan standar hidup yang lebih baik, masyarakat dapat memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi dan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi dirinya.

## C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beragam warisan seni, adat, tradisi dan budaya yang mencerminkan identitas, kekayaan, dan keunikan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu warisan yang dimiliki oleh daerah ini yaitu warisan budaya tak benda dalam bentuk kesenian tari dan puisi. Di antara kesenian tersebut yang terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin yakni senjang, pantun, ungak-ungak, serambah dan jampi (mantera). Selain itu, terdapat beragam seni tari tradisional yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin seperti Tari Stabek, Senandung Sukma, Mare-

mare, Mantang parah, Begamboh, Burung Putih, Ribu-Ribu, Nasib, Besalek, Tri Sabung Ayam, Tari Ulang-Ulang, Tari Nyemat Atap, dan Jambu Merah. Potensi tersebut semakin lengkap dengan dukungan masyarakat yang terus mengembangkan budaya seni tari kreasi Andun Bajejak, Ginde Manindai, Beranjak Busik, Permata Muba, Tari Kipas, dan Serasan Sekate. Dari sejumlah kesenian dan tradisi lisan yang dimiliki Musi Banyuasin, senjang menjadi salah satu kesenian tradisi lisan yang masih eksis hingga saat ini. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen mengembangkan seni dan budaya, salah satunya melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana seni dan budaya.

**Tabel 2.16**
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2017-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah sanggar seni budaya yang aktif | 8 | 106 | 106 | 39 | 162 |
| 2. | Penyelenggaraan festival seni budaya (kali) sesuai kalender budaya | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 29 | 33 | 35 | 35 | 38 |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, 2025*

Berdasarkan data capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan mengalami dinamika yang cukup signifikan. Jumlah sanggar seni budaya yang aktif mengalami lonjakan tajam dari 8 sanggar pada tahun 2020 menjadi 106 sanggar di tahun 2021 dan 2022, namun kemudian menurun drastis menjadi hanya 39 sanggar di tahun 2023 kemudian meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 162 sanggar . Penyelenggaraan festival seni budaya yang mengikuti kalender budaya juga menunjukkan fluktuasi, yakni 4 kali pada tahun 2020, menurun menjadi 1 kali pada 2021, kemudian kembali meningkat menjadi 4 kali di tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 3 kali pada 2023 dan 2024. Sementara itu, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya tetap stagnan, yaitu hanya satu unit setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024, yang menunjukkan kurangnya pengembangan fasilitas fisik kebudayaan.

Persentase situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 29 persen pada 2020 menjadi 33 persen pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 35 persen di tahun 2022 dan 2023, selanjutnya di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 38 persen, keberlanjutan dan konsistensi program kebudayaan masih perlu diperkuat agar pelestarian seni, budaya, dan cagar budaya di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

**Tabel 2.17**
**Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2017-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | 35 | 35 | 34 | 39 | 23 |
| 2. | Jumlah organisasi olahraga yang aktif | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 4. | Jumlah kegiatan olahraga sesuai kalender kegiatan | 10 | 30 | 6 | 5 | 8 |
| 5. | Persentase penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi muda yang dibina | 41,98 | 91,48 | 98,98 | 120,55 | 97,44 |

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, 2025*

Capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Dari sisi kepemudaan, jumlah organisasi pemuda yang aktif cenderung stabil dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 39 organisasi Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya semangat partisipasi dan pembinaan generasi muda di daerah sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 23 organisasi dikarenakan katagori susunan kepengurusan bukan lagi OKP usia 16-30 tetapi sudah ke ormas, kepengurusan di tingkat pusat sudah tidak aktif lagi, dan pengurus OKP yang sudah di atas umur 16-

30 tahun. Sementara itu, kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sesuai kalender juga menunjukkan tren yang cukup konsisten. Jumlahnya meningkat dari 5 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 8 kegiatan pada 2021 dan 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 6 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kepemudaan tetap berlangsung secara aktif dan terstruktur.

Namun, di sisi lain, bidang olahraga jumlah organisasi olahraga yang aktif ada 2 organisasi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemudian bertambah menjadi 3 organisasi aktif pada tahun 2023 sampai 2024. Kondisi ini diperparah oleh menurunnya jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan sesuai kalender kegiatan, dari 30 kegiatan pada tahun 2021 menjadi hanya 6 dan 5 kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 8 kegiatan.

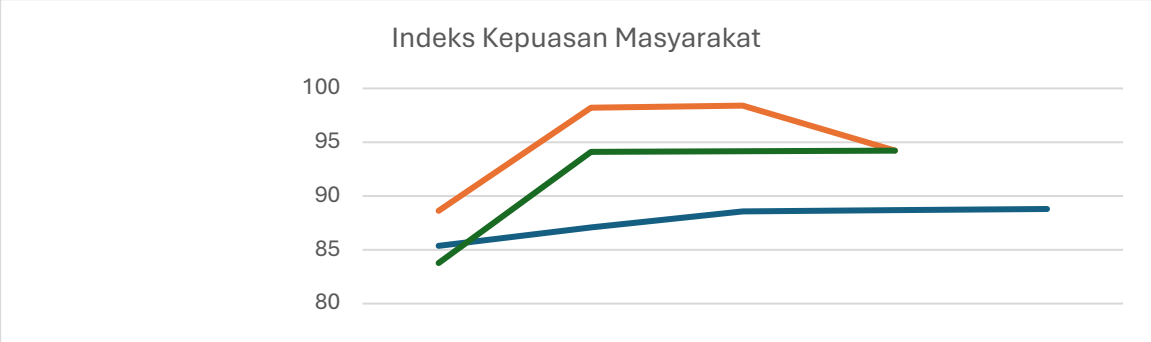
Meskipun demikian, capaian prestasi generasi muda menunjukkan peningkatan luar biasa. Persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat provinsi meningkat drastis dari 41,98 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,48 persen pada tahun 2021 kemudian berturut-turut meningkat menjadi 98,98 persen dan 120,55 persen di tahun 2022 dan 2023. Angka ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan motivasi generasi muda untuk berprestasi, sedangkan di tahun 2024 persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat provinsi menurun kembali menjadi 97,44 persen.

Secara umum, indikator di bidang kepemudaan menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam pembinaan organisasi dan prestasi

individu. Namun, bidang olahraga masih memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut dari pemerintah daerah agar kegiatan dan organisasi olahraga dapat tumbuh kembali secara optimal dan berkelanjutan.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan suatu jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Pelayanan publik memiliki indikator dalam pemenuhan pelayanannya, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pengukuran dalam indeks tersebut berupa data kuantitatif maupun data kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh fasilitas pelayanan yang diberikan dengan membandingkan harapan dan kebutuhanya.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| IKM Muba | 85,35 | 87,05 | 88,54 | 88,69 | 88,78 |
| IKM Perizinan | 88,61 | 98,23 | 98,4 | 94,23 | |
| IKM Kependudukan dan Catatan Sipil | 83,75 | 94,11 | 94,16 | 94,21 | |

**Gambar 2.26.** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan. Secara khusus pada pelayanan perizinan, terlihat peningkatan yang sangat signifikan khususnya dari tahun 2020 dengan nilai 88,61 ke 98,23 di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh adopsi sistem yang lebih baik dan langkah-langkah inovatif yang diambil oleh pemerintah Musi Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan perizinan.

**A. Fokus Layanan Urusan Wajib dengan Layanan Dasar**

**1) Urusan Pendidikan**

Pemenuhan atas hak pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi salah satu indikator keadilan dalam keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga sebuah investasi sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan pembangunan daerah. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) akan memperoleh keahlian dalam pembangunan SDM, baik berupa akses, pemerataan maupun peningkatan mutu pendidikan (Indikator Kesejahteraan, 2015). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pendidikan (usia dini serta non-formal), pendidikan dasar (SD, SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun urusan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pemenuhan pendidikan berdasarkan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kotor (APK). APS sebagai ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan penduduk usia muda. Data APS menunjukkan jumlah dari siswa berdasarkan kluster usia sekolah yakni usia 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), dan 15-18 tahun (SMA). Namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya siswa berusia 12 tahun duduk di bangku SMP, serta siswa berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Oleh karenanya, APS memberikan informasi terkait seberapa besar penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana diketahui APS menjadi data penting dalam mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun.

Kemudian APM menjadi salah satu indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap kelompok pendidikan berdasarkan usia standar pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK merupakan harapan penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikan. APK juga digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat melalui partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi nilai APK suatu daerah dapat diartikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang mengemban pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2022). Nilai APK, APM, dan APS Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

**Tabel 2.18**
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024**

| Indikator | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| APK | SD/MI/Paket A | 112,83 | 111,03 | 111,39 | 110,33 | 107,29 |
| | SMP/MTs/Paket B | 93,28 | 95,13 | 87,81 | 90,32 | 88,71 |
| | SMA/SMK/MA/Paket C | 79,94 | 78,59 | 79,57 | 83,21 | 82,17 |
| APM | SD/MI/Paket A | 99,67 | 99,43 | 97,58 | 98,06 | 96.96 |
| | SMP/MTs/Paket B | 85,06 | 84,28 | 76,04 | 80,84 | 81,37 |
| | SMA/SMK/MA/Paket C | 60,03 | 59,32 | 59,82 | 66,18 | 61,08 |
| APS | SD/MI/Paket A | 99,67 | 99,43 | 99,55 | 99,81 | 96,96 |
| | SMP/MTs/Paket B | 96,43 | 96,09 | 96,13 | 95,04 | 96,74 |
| | SMA/SMK/MA/Paket C | 67,41 | 67,22 | 73,92 | 75,16 | 69,82 |

*Sumber : Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumsel 2020-2024, BPS*

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai APK baik tingkat SD, SMP, mauipun SMA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 112,83 persen (2020) menjadi 107,29 persen (2024), meskipun masih berada di atas 100 persen yang menunjukkan bahwa terdapat murid di luar kelompok usia ideal yang mengikuti pendidikan dasar. Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK sempat mengalami peningkatan dari 93,28 persen (2020) menjadi 95,13 persen (2021), namun kembali menurun menjadi 88,71 persen (2024). Hal serupa terjadi pada SMA/SMK/MA/Paket C, di mana APK menurun dari 79,94 persen (2020) menjadi 82,17 persen (2024), setelah mengalami fluktuasi. Penurunan APK di semua jenjang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan, terutama di tingkat menengah, perlu diperkuat agar

dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk kelompok usia non-ideal.

Kemudian APM yang merupakan salah satu indikator pendorong pada aspek pendidikan juga mengalami fluktuasi. APM untuk jenjang SD/MI/Paket A relatif stabil dan tinggi, dengan angka di atas 96 persen selama lima tahun terakhir, mencerminkan ketercapaian yang baik dalam memastikan anak usia sekolah dasar mendapatkan akses pendidikan sesuai usianya. Namun, APM untuk jenjang SMP/MTs/Paket B terus menurun dari 85,06 persen (2020) menjadi 81,37 persen (2024). Penurunan yang lebih tajam terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, dari 60,03 persen (2020) menjadi hanya 61,08 persen (2024) meskipun sempat meningkat pada tahun 2023 (66,18 persen). Partisipasi murni di tingkat pendidikan menengah masih menjadi tantangan, terutama karena masih rendahnya angka untuk kelompok usia ideal, yang dapat disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, geografis, atau motivasi belajar.

Selain APK dan APM, indikator selanjutnya yakni APS. Semakin tinggi APS suatu darah maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A stabil di atas 96 persen, mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia 7–12 tahun masih mengenyam pendidikan. Untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, APS sedikit meningkat dari 96,43 persen (2020) menjadi 96,74 persen (2024), menunjukkan partisipasi yang cukup baik. Namun, APS untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan peningkatan yang tidak konsisten, dengan angka tertinggi pada 2023 (75,16 persen), lalu kembali menurun

menjadi 69,82 persen pada 2024. Walaupun partisipasi di tingkat pendidikan dasar cukup baik, partisipasi di tingkat pendidikan menengah atas masih perlu ditingkatkan, mengingat pentingnya jenjang ini sebagai fondasi untuk memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi. Kondisi fluktuatif dikarenakan masih terdapat beberapa penduduk usia sekolah jenjang SD, SMP dan SMA yang bersekolah di sekolah keagamaan atau pesantren, sehingga hal ini memengaruhi kondisi APS jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 2.19**
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan**
**di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SD/MI | 16,02 | 16,29 | 15,87 | 15,87 | 15,31 |
| SMP/MTs | 14,47 | 14,76 | 13,24 | 13,66 | 14,64 |
| SMA/SMK/MA | 16,51 | 16,69 | 13,44 | 13,03 | 14,18 |

*Sumber : Kemendikbud, Neraca Pendidikan (diolah)*

Secara umum, data menunjukkan tren penurunan rasio murid per guru di semua jenjang pendidikan selama periode 2020–2024. Penurunan ini merupakan indikator positif karena mengarah pada peningkatan kapasitas pelayanan pendidikan, di mana jumlah guru per siswa semakin ideal. Misalnya, di jenjang SD/MI, rasio menurun dari 18,42 pada 2019 menjadi 15,87 pada 2023. Artinya, setiap guru kini mengajar lebih sedikit murid dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang secara teoritis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Rasio murid per guru yang lebih rendah pada umumnya dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas interaksi belajar-mengajar. Dengan lebih sedikit siswa per guru, proses pembelajaran menjadi lebih personal, dan guru dapat memberikan perhatian lebih kepada setiap murid. Penurunan rasio ini juga bisa menunjukkan keberhasilan program rekrutmen guru atau perencanaan distribusi guru yang lebih merata antar wilayah.

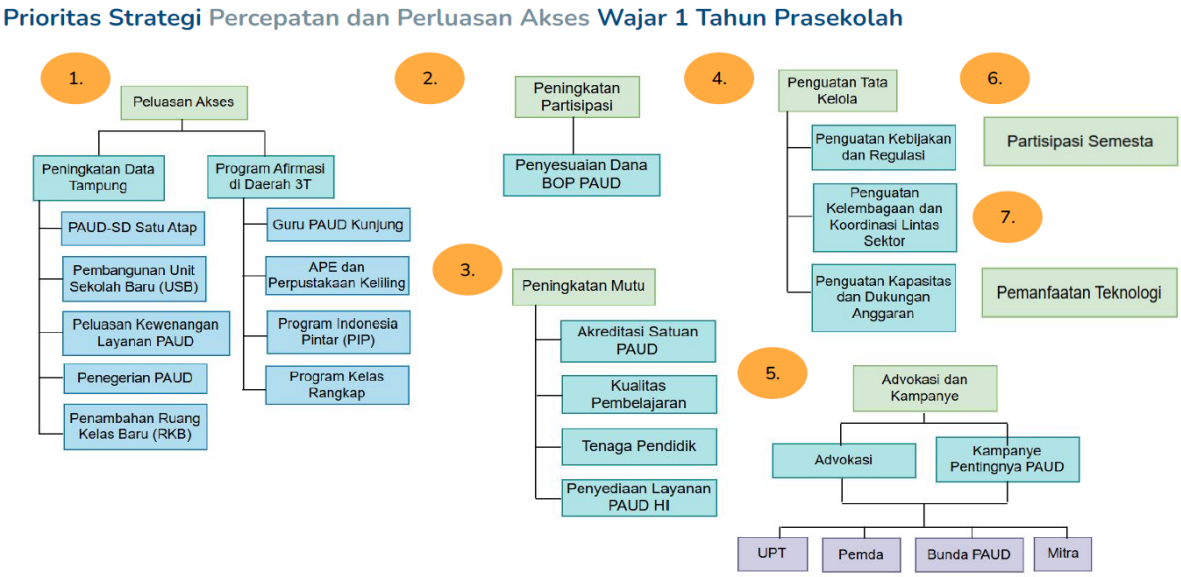
Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Kebijakan **Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun** sebagai program prioritas nasional dan juga telah tertuang pada RPJMN tahun 2025-2029. Program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang memperluas masa wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, yang meliputi satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Program Wajib Belajar 13 Tahun memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini (PAUD) atau TK. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dengan memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dari usia dini.

Urgensi kebijakan ini didasari oleh pentingnya pendidikan prasekolah dan menengah dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia. Fase usia 0-6 tahun merupakan fase periode emas atau *golden age*. Pada fase periode emas terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat dan menentukan perkembangan kognitif, sosial, emosional, serta keterampilan hidup di masa depan. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki

potensi anak (5-6 tahun) tidak tertampung pada tahun 2026 sebanyak 8.148. Kondisi ini berdampak pada kesiapan anak dalam memasuki jenjang sekolah dasar, serta berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di jenjang berikutnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi percepatan yang telah dirumuskan pemerintah antara lain pengembangan PAUD-SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), penegerian PAUD, penyediaan layanan PAUD keliling, serta perluasan program afirmasi seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah mendorong inovasi pembelajaran melalui digitalisasi sekolah, penguatan kurikulum, serta peningkatan kompetensi guru.

Bagi Kabupaten Musi Banyuasin, implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun memerlukan integrasi data APS, APM, dan APK sebagai dasar pemetaan kebutuhan layanan pendidikan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan akses PAUD, pemerataan pendidikan menengah, penjaminan mutu pembelajaran, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung perluasan akses dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, diharapkan generasi muda Musi Banyuasin dapat tumbuh sebagai sumber daya manusia yang cerdas, produktif, dan kompetitif.




**Gambar 2.26a.** Prioritas Strategi Percepatan dan Perluasan Akses Wajar 1 Tahun Prasekolah

### 2) Urusan Kesehatan

Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan memberikan dampak positif dan menjadi salah satu investasi daerah terhadap kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai masyarakat yang sehat tentu memerlukan berbagai upaya secara keseluruhan dengan menekankan pada pencegahan penyakit atau mengurangi risiko dampak buruk timbulnya penyakit dan menekankan pada upaya promotif. Hal ini tentunya memerlukan dukungan erat dari masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah selaku pemangku kepentingan untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

a) Prevalensi Stunting

Kabupaten Musi Banyuasin sudah melakukan percepatan penurunan stunting melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif. Tabel dibawah ini menunjukkan prevalensi stunting tahun 2020-2024.

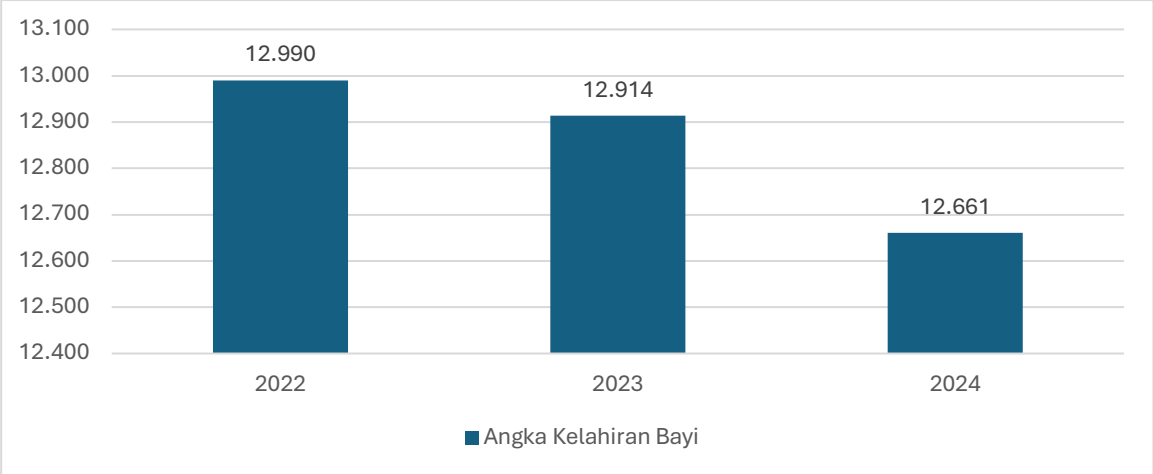
**Tabel 2.19a**
**Prevalensi Stunting di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| Tahun | Prevalensi Stunting | Keterangan |
|---|---|---|
| 2020 | 23,01 | Pengukuran Berdasarkan SSGI |
| 2021 | 23,00 | |
| 2022 | 17,7 | |
| 2023 | 16,5 | |
| 2024 | 14,8 | |

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2025*

b) Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kelahiran bayi merupakan keseluruhan jumlah bayi atau anak yang dilahirkan atau yang diperkirakan oleh wanita usia produktif. Indikator yang digunakan untuk menilai angka kelahiran bayi yaitu TFR. Indikator tersebut menunjukkan nilai rata-rata ibu melahirkan usia 3-4 anak pada masa produktif. Selain itu, TFR juga digunakan untuk melihat keberhasilan arah pembangunan sosial ekonomi di suatu daerah atau wilayah yang berhasil menerapkan program KIA maupun KB dalam membantu meningkatkan rata-rata usia menikah.

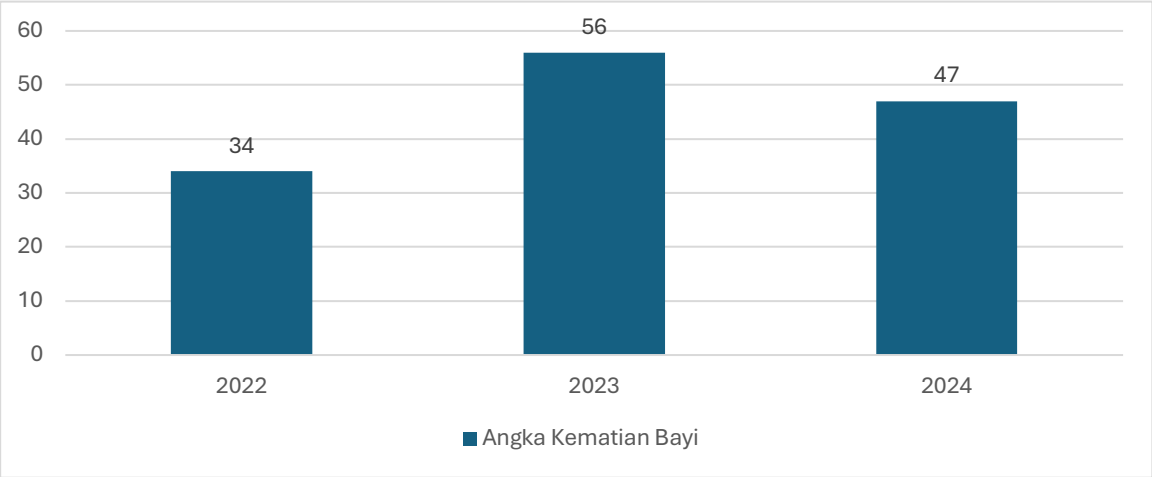



**Gambar 2.27.** Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Satudata Muba, 2025

Berdasarkan data angka kelahiran bayi di Kabupaten Musi Banyuasin dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah kelahiran secara konsisten. Penurunan angka kelahiran selama periode 2022–2024 menunjukkan tren demografis yang mengarah pada perlambatan pertumbuhan penduduk alami di Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah kelahiran menurun sekitar 2,5% dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 329 kelahiran lebih sedikit dari 2022 ke 2024. Beberapa kemungkinan faktor yang memengaruhi tren ini antara lain : peningkatan kesadaran keluarga berencana, perubahan pola pikir masyarakat terhadap jumlah anak ideal, kondisi ekonomi sosial, dan peningkatan pendidikan perempuan.

Selain itu, diketahui bahwa terdapat beberapa indikator untuk menunjukkan kesejahteraan di suatu negara maupun wilayah, yakni Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). AKB merupakan rasio jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan per 1.000 kelahiran bayi yang hidup

dalam kurun waktu satu tahun. AKB dapat menunjukkan tingkat permasalahan kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dimana kasus kematian bayi dapat dimungkinkan karena adanya beberapa faktor seperti status gizi ibu pada saat mengandung, tingkat keberhasilan ibu pada program KB dan KIA, faktor lingkungan baik ekonomi maupun sosial, serta tingkat pelayanan antenatal. Apabila nilai AKB dalam suatu wilayah cukup tinggi, maka dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut rendah.




**Gambar 2.28.** Angka Kematian Bayi Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Satudata Muba, 2025

**Tabel 2.20**
**Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita**
**di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Bayi Lahir | Kematian Bayi | Kematian Balita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babat Supat | 419 | 1 | 0 |
| 2 | Babat Toman | 782 | 3 | 0 |
| 3 | Batanghari Leko | 466 | 2 | 0 |
| 4 | Bayung Lencir | 1782 | 6 | 0 |
| 5 | Jirak Jaya | 483 | 3 | 0 |

| No | Kecamatan | Bayi Lahir | Kematian Bayi | Kematian Balita |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Keluang | 658 | 3 | 0 |
| 7 | Lais | 1015 | 0 | 0 |
| 8 | Lalan | 814 | 0 | 0 |
| 9 | Lawang Wetan | 468 | 4 | 0 |
| 10 | Plakat Tinggi | 638 | 2 | 0 |
| 11 | Sanga Desa | 708 | 2 | 0 |
| 12 | Sekayu | 1529 | 10 | 0 |
| 13 | Sungai Keruh | 371 | 2 | 0 |
| 14 | Sungai Lilin | 1416 | 3 | 0 |
| 15 | Tungkal Jaya | 1112 | 6 | 0 |
| Jumlah | | 12.661 | 47 | 0 |

*Sumber : Satudata Muba, 2025*

Data menunjukkan total 11.761 bayi yang lahir di 15 kecamatan. Bayung Lencir dan Sekayu menjadi kecamatan dengan angka kelahiran tertinggi, masing-masing mencapai 1.782 dan 1.529 bayi, menyumbang sekitar 28,2% dari total kelahiran. Tingginya angka kelahiran di kedua kecamatan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor demografis seperti kepadatan penduduk, tingkat fertilitas, atau migrasi. Di sisi lain, Sungai Keruh mencatat kelahiran terendah (371 bayi), yang bisa disebabkan oleh populasi yang lebih kecil atau urbanisasi. Perbedaan signifikan dalam angka kelahiran antar kecamatan menunjukkan ketidakseimbangan distribusi penduduk. Kecamatan seperti Lais dan Lalan juga memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi (masing-masing 1.015 dan 814 bayi), namun menariknya, keduanya tidak mencatat kematian bayi sama sekali. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah faktor layanan kesehatan, sanitasi, atau kesadaran masyarakat di dua kecamatan ini lebih baik dibandingkan daerah lain.

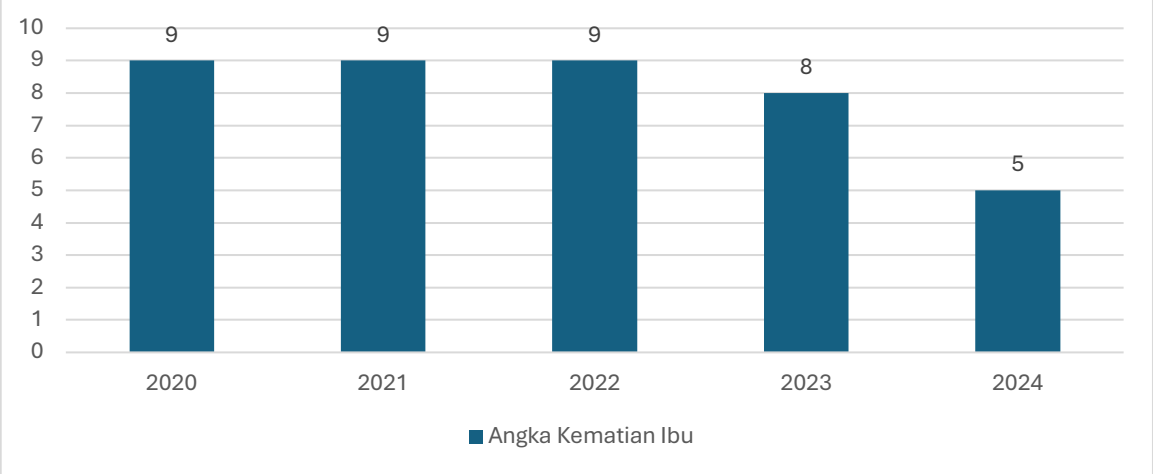
Secara keseluruhan, terdapat 47 kematian bayi dari 11.761 kelahiran, dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,4%. Angka ini relatif rendah, tetapi beberapa kecamatan menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Sekayu menjadi wilayah dengan kematian bayi tertinggi (10 kasus), disusul oleh Bayung Lencir dan Tungkal Jaya (masing-masing 6 kasus). Jika dilihat dari persentase, Lawang Wetan justru memiliki CFR tertinggi (0,85%) meski jumlah absolut kematiannya lebih kecil (4 dari 468 kelahiran). Fakta bahwa Lais dan Lalan tidak memiliki kasus kematian bayi sama sekali patut diapresiasi, dari tingginya kematian bayi di Sekayu dan Bayung Lencir bisa mengindikasikan masalah seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan neonatal, gizi buruk, atau infeksi pada bayi baru lahir. Kematian balita dan implikasi kebijakan yang menarik, tidak ada kasus kematian balita di beberapa kecamatan. Ini bisa menjadi indikator keberhasilan program imunisasi, pemberian makanan tambahan, atau sanitasi lingkungan untuk anak usia di bawah lima tahun.

c) Angka Kematian Ibu

Menurut Menurut World Health Organization (WHO), maternal death atau kematian ibu merujuk pada kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan atau 42 hari setelah kehamilan. Kematian ibu ini dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu memburuknya kondisi kesehatan ibu pada saat masa kehamilan. Pada konteks ini, kematian ibu bukan disebabkan karena kecelakaan maupun suatu kebetulan. Diperjelas oleh BPS yang menyatakan bahwa AKI

merupakan data yang menunjukkan jumlah banyaknya kematian perempuan pada saat mengandung atau 42 hari dari terminasi kehamilan tanpa melihat lama persalinan, tetapi disebabkan karena pengendalian kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup.

AKI merupakan salah satu indikator terpenting dalam aspek pembangunan kesehatan, bahkan menjadi salah satu isu global. Dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), fokus tersebut tercantum pada poin ketiga yaitu upaya dalam penurunan AKI. SDGs menyatakan bahwa komitmen global untuk menurunkan rasio AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030.




**Gambar 2.29.** Angka Kematian Ibu Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Satudata Muba, 2025

AKI merupakan salah satu indikator terpenting dalam aspek pembangunan kesehatan, bahkan menjadi salah satu isu global. Dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), fokus tersebut tercantum pada poin ketiga yaitu upaya dalam penurunan AKI. SDGs menyatakan bahwa komitmen global untuk menurunkan rasio AKI sebesar 70 per

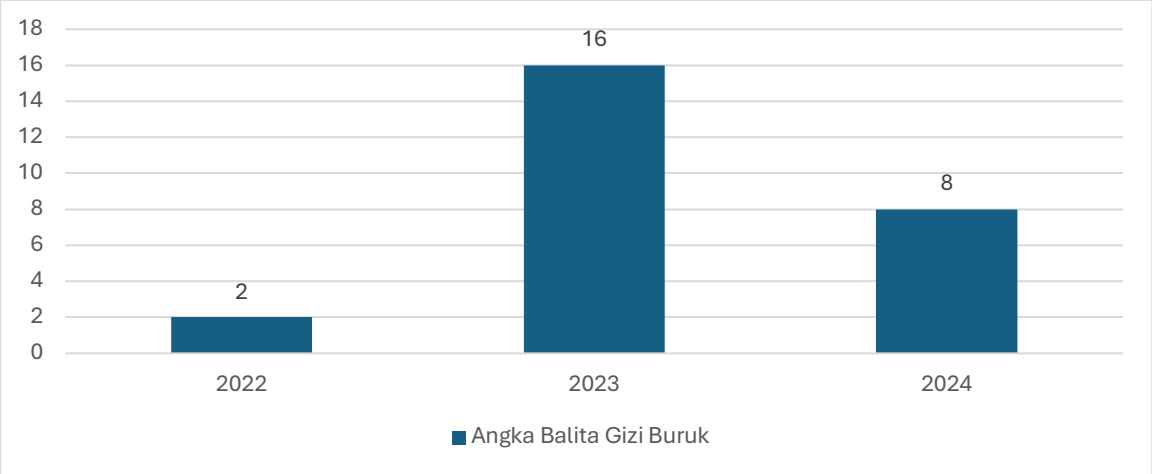
100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 terdata 13 kasus, kemudian pada tahun 2019 berkurang menjadi 12 kasus kematian ibu, dan tahun 2020 menurun kembali menjadi 9 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kasus kematian ibu tetap berjumlah 9 kasus. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Banyuasin memang dapat dikatakan menurun, namun masih tergolong banyak dengan masih adanya 9 kasus kematian dari tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang berjumlah 8 dan 5 kasus.

Kematian ibu disebabkan oleh multifaktor yang merupakan hasil interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non-kesehatan yang memengaruhi pemberian pelayanan klinis dan terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan secara optimal. Masih banyaknya kasus kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin, salah satunya berkaitan dengan tingginya kehamilan usia dini. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah persalinan usia dini di Kabupaten Musi Banyuasin yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Disini dapat angka kematian ibu telah maengalami penurunan dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

d) Status Gizi

Status gizi pada suatu daerah masih menjadi pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Aspek ini sangat berkaitan dengan kesehatan ibu karena gizi anak bermula dari apa yang dikonsumsi ibu pada masa

kehamilan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lainya yang menyebabkan status gizi anak menurun, diantaranya yaitu sanitasi yang tidak baik, pola asuh orang tua terhadap anak yang kurang menerapkan kesehatan, faktor ekonomi keluarga yang tergolong rendah, dan masih rendahnya kemampuan warga dalam mengolah pangan yang sehat.




**Gambar 2.30.** Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Satudata Muba, 2025

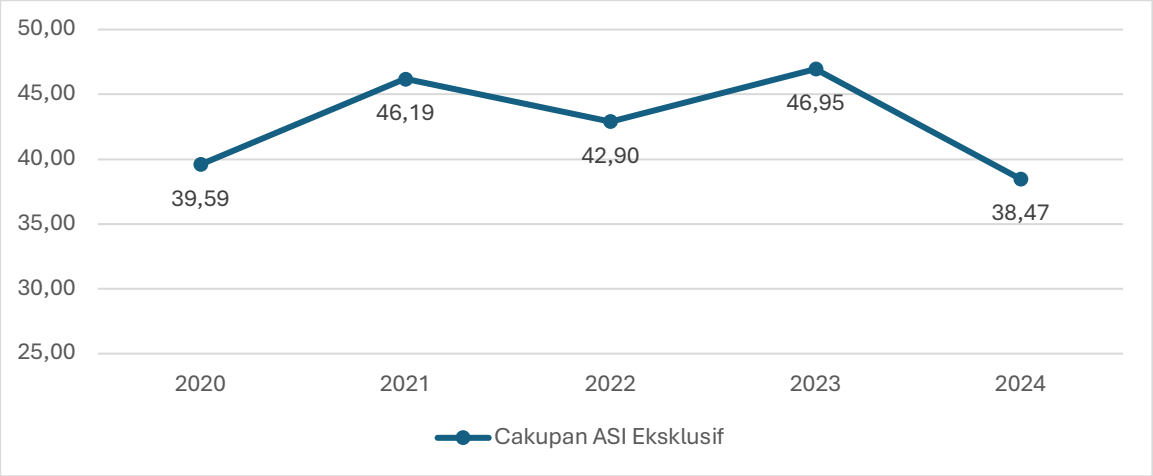
Angka balita dengan gizi buruk di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat hanya 2 kasus balita gizi buruk. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 16 kasus, yang mengindikasikan adanya penurunan kondisi kesehatan dan gizi balita pada tahun tersebut. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi, atau kurangnya edukasi mengenai pola makan sehat. Meski demikian, pada tahun 2024 jumlah balita gizi buruk kembali menurun menjadi 8 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan,

kemungkinan sebagai hasil dari intervensi pemerintah dalam program perbaikan gizi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi pada anak balita. Meskipun terjadi perbaikan, angka gizi buruk tetap harus menjadi perhatian dan pengawasan berkelanjutan agar prevalensinya dapat ditekan seminimal mungkin.

e) Cakupan ASI Eksklusif

Cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan tercatat sebesar 39,59%, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 46,19% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 42,90%, yang kemudian kembali meningkat ke titik tertinggi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2023, yaitu sebesar 46,95%.

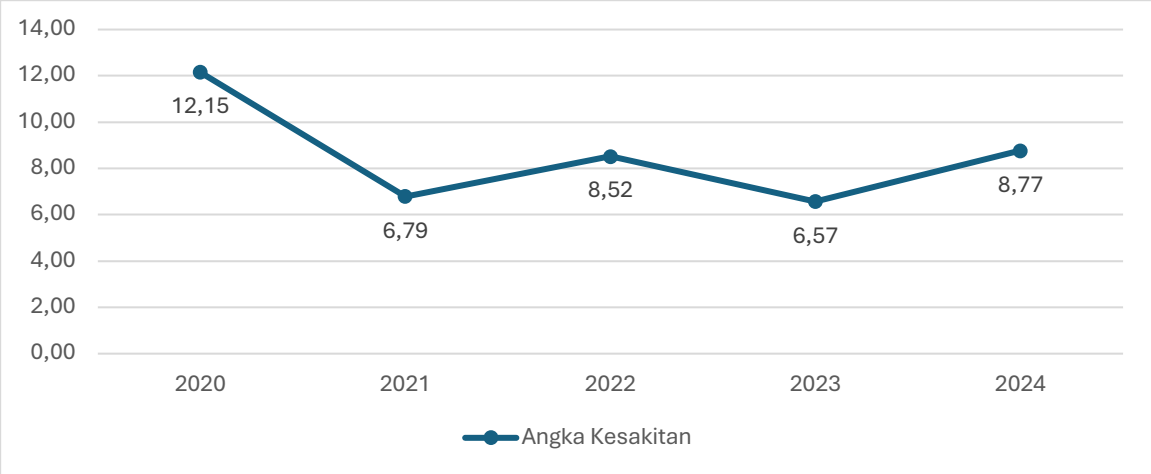
Sayangnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 38,47%, lebih rendah dari capaian tahun 2020. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi program promosi dan dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif, baik dari sisi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun kesadaran masyarakat.




**Gambar 2.31.** Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumsel 2020-2024

f) Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Status kesehatan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi kebugaran jasmani penduduk, terutama dinilai dari jumlah kasus penyakit. Ketidaknyamanan kesehatan yang dirasakan oleh warga dalam satu bulan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Tingkat kesehatan suatu wilayah dapat diukur dengan melihat seberapa banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, semakin tinggi jumlah keluhan, semakin rendah tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut, dan sebaliknya. Angka kesakitan merupakan indikator yang mencerminkan proporsi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta efektivitas layanan kesehatan dasar di daerah.




**Gambar 2.32.** Angka Kesakitan Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumsel 2020-2024

Selama periode 2020–2024, angka kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, angka kesakitan tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 12,15 persen, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah kasus penyakit di masyarakat.

Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 6,79 persen, yang dapat mencerminkan perbaikan respons kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Namun, angka ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 8,52 persen, sebelum kembali menurun ke titik terendah pada 2023 sebesar 6,57 persen. Tahun 2024 kembali mencatatkan kenaikan angka kesakitan menjadi 8,77 persen yang disebabkan peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular atau akses layanan kesehatan yang belum merata.

**Tabel 2.21**

**Kasus Penyakit di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Hipertensi | 113.440 | 121.153 | 38.976 | 130.386 |
| 2 | Diabetes Melitus ( kencing manis ) | 33.588 | 36.242 | 966 | 38.921 |
| 3 | Penyakit Jantung koroner | 672 | 875 | 531 | 1.004 |
| 4 | Stroke | 468 | 499 | 279 | 472 |
| 5 | PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) | 245 | 254 | 23 | 606 |
| 6 | Thalassemia | 31 | 26 | 107 | 100 |
| 7 | Ginjal kronik | 150 | 106 | 1.493 | 94 |
| 8 | Tuberkulosis (TBC) | 892 | 1.356 | 1530 | 1537 |
| 9 | HIV-AIDS | 27 | 22 | 44 | 40 |
| 10 | Malaria | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 11 | Diare (semua umur) | 6.753 | 6.769 | 7.742 | 7.115 |
| 12 | Demam Berdarah Dengue/DBD | 50 | 137 | 146 | 507 |
| 13 | ISPA dan pneumonia | 51.243 | 57.253 | 41.786 | 59.374 |
| 14 | Kusta | 29 | 29 | 18 | 35 |
| 15 | Sifilis/IMS (Infeksi Menular Seksual) Lainnya | 72 | 42 | 16 | 32 |
| 16 | Rabies | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Anemia | 1.049 | 0 | 0 | 0 |

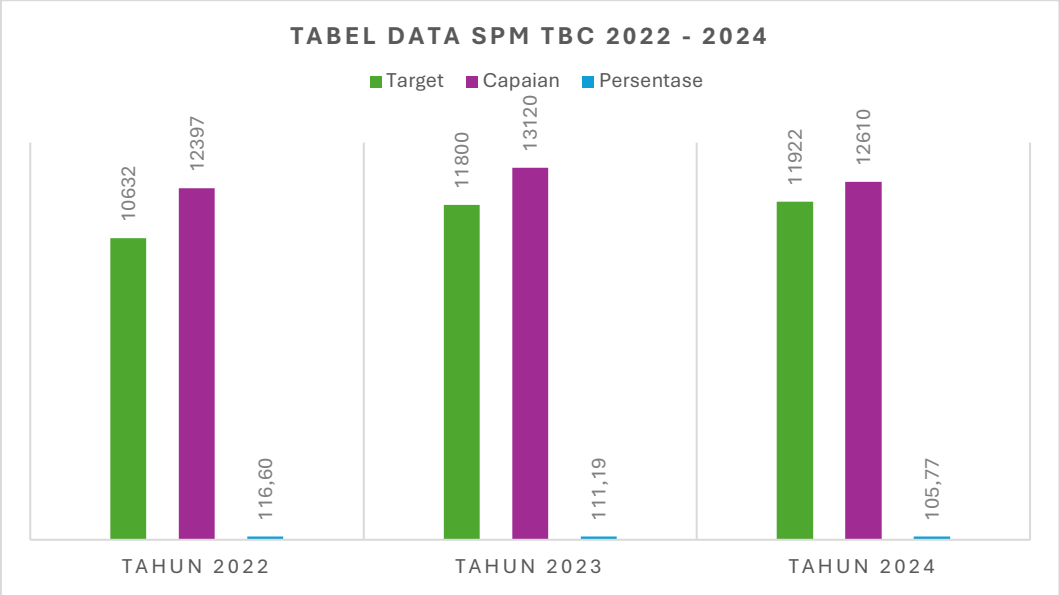
*Sumber : Dinas Kesehatan, 2025*

**TUBERKULOSIS**

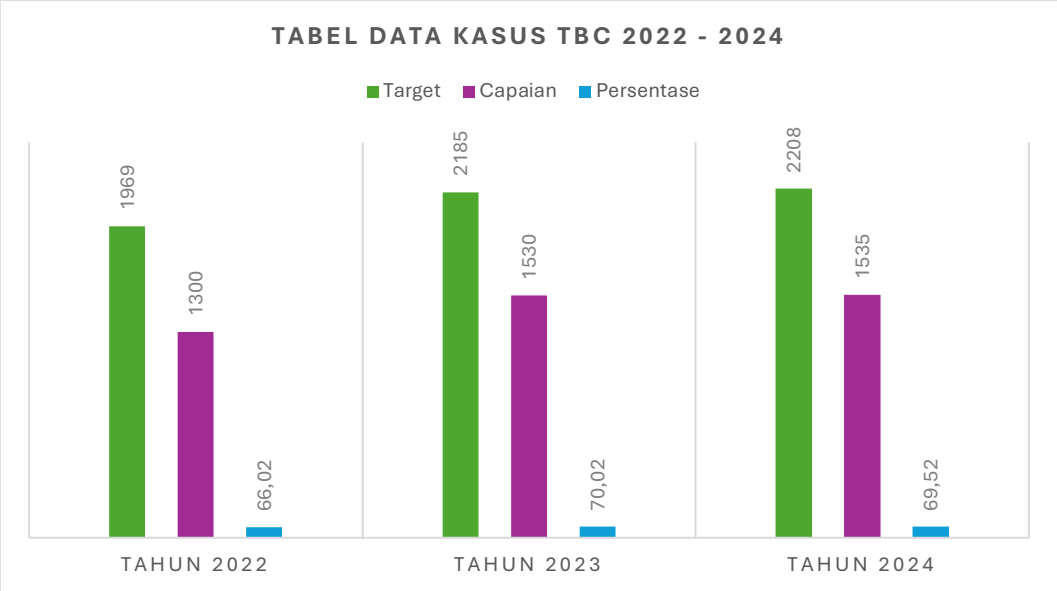
Berdasarkan Global TB Report 2023, estimasi kasus TBC meningkat menjadi 1.090.000 kasus dan angka kematian mencapai 125.000 per tahun. Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus tertinggi ke-2 di dunia

setelah India. Di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, pada tahun 2024 terdapat 1.535 (69,52%) kasus TBC yang tercatat dan terlaporkan dari target 2.208 kasus yang telah ditetapkan (Data ditarik dari SITB per tanggal 16 Januari 2025). Data ini masih akan bertambah karena penarikan data kasus Tuberkulosis terakhir dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2025.

Terjadi trend naik untuk temuan kasus seiring dengan semakin masifnya upaya penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) secara aktif melalui investigasi kontak dan skrining maksimal pada populasi berisiko seperti Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Penderita DM, Penderita HIV, Posyandu Balita dan lansia, Posbindu, dan lain - lain dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor di masyarakat yang tergambar lewat grafik Standar Pelayanan Minimal Orang Terduga Tuberkulosis yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain itu adanya kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak yang difokuskan di daerah terpencil dan sulit dijangkau yaitu di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Bintialo (Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo) Kecamatan Batanghari Leko di Tahun 2024, berhasil menemukan kasus TBC melalui kegiatan skrining aktif berupa kunjungan rumah ke rumah.



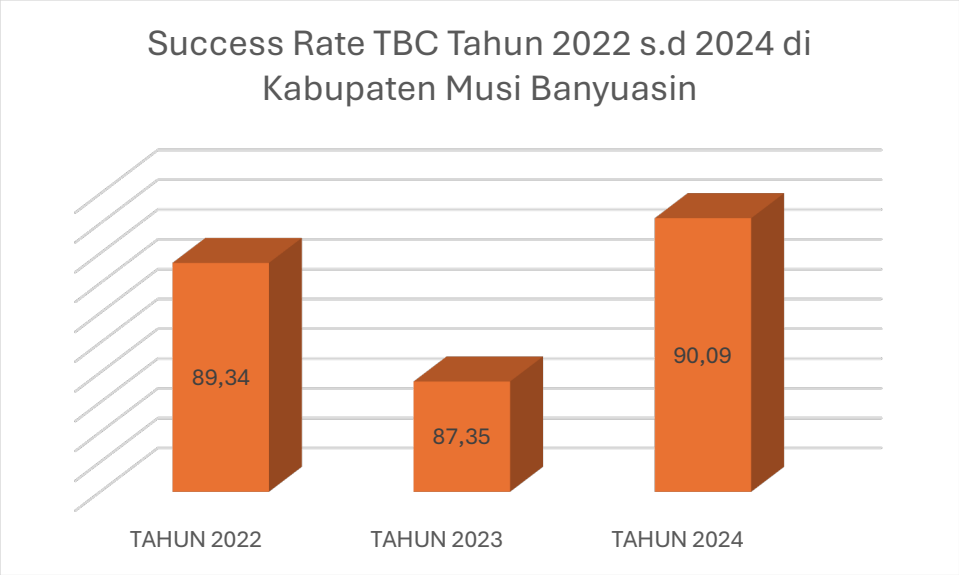

**Gambar 2.33.** SPM TBC Kabupaten Musi Banyuasin




**Gambar 2.34.** Treatment Coverage TBC di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 – 2024

Kasus TBC yang ditemukan baru mencapai 69,52% dari target penemuan kasus 90%, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah, dukungan dari lintas program dan lintas sektor serta kesadaran

masyarakat tentang kesehatan yang semakin meningkat maka penemuan kasus akan bisa mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan semakin tinggi penemuan kasus, penularan TBC di masyarakat dapat dicegah, tentunya setelah ditemukan agar dapat segera dilakukan pengobatan sesuai standar seiring dengan upaya pemberian obat pencegahan TBC pada kontak yang memenuhi syarat. Dalam penegakan diagnosis TBC telah didukung oleh 8 (delapan) layanan Tes Cepat Monokuler (TCM) sebagai sarana penegakan diagnosis utama. Data mengenai keberhasilan pengobatan adalah seperti yang terdapat dalam grafik di bawah ini, yaitu rata-rata sudah hampir mencapai 90% sesuai dengan yang ditargetkan.




**Gambar 2.35**. Grafik Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC (Success Rate Tuberculosis) di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022 – 2024

Tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi dari 2022 hingga 2024. Pada 2022 mencapai 89,34%, menurun menjadi 87,35% di 2023, lalu meningkat signifikan menjadi 90,09%

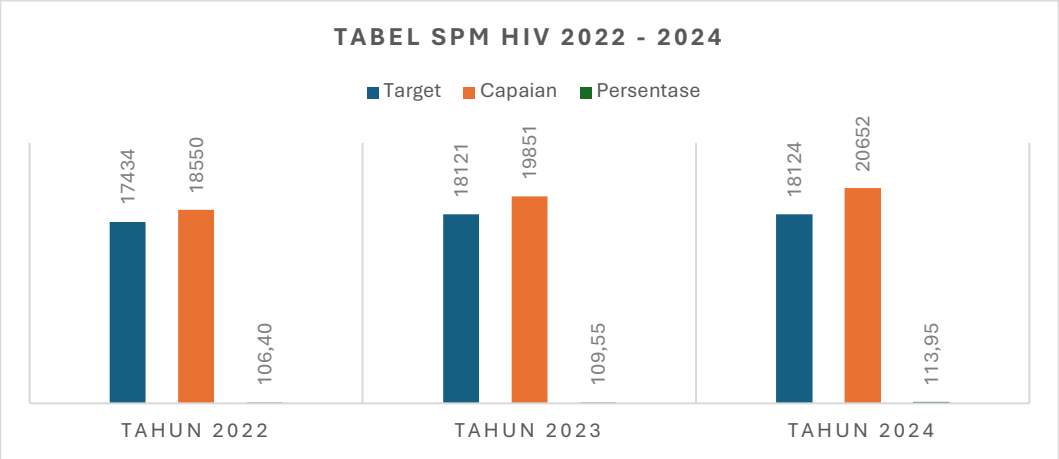
pada 2024. Penurunan 2023 mencerminkan tantangan program, sementara peningkatan 2024 menunjukkan keberhasilan intervensi dan perbaikan layanan. Tren ini perlu dijadikan bahan evaluasi dan dasar penguatan kebijakan eliminasi TBC di masa depan.

**HIV AIDS**

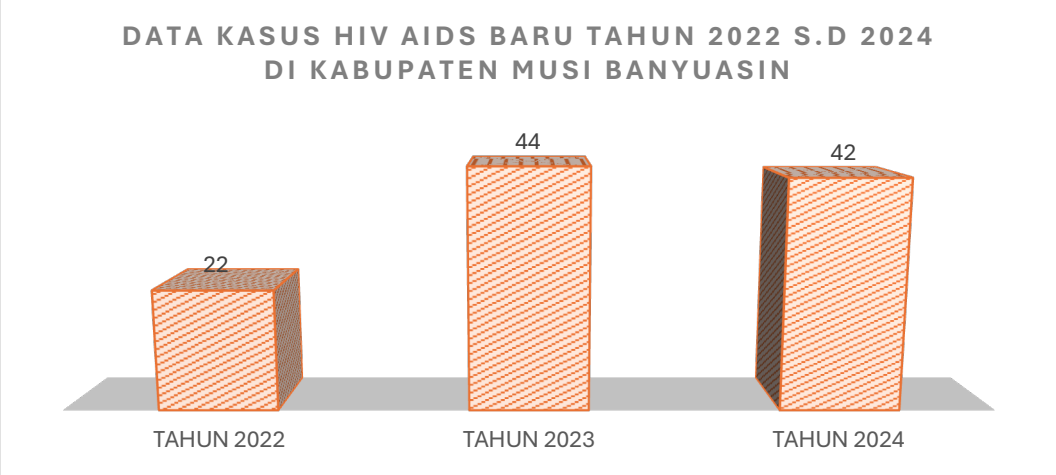
HIV masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia dan Indonesia dengan stigma negatif di masyarakat. Tercatat sampai dengan tahun 2024 sebanyak 206 Kasus ODHA di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan untuk temuan kasus baru Tahun 2022 yaitu 22 ODHA, sebanyak 2 ODHA meninggal dunia dan hanya 20 ODHA Masuk Perawatan dan mendapatkan Pengobatan (91%). Sedangkan di tahun 2023, ditemukan 44 kasus baru HIV AIDS. Untuk tahun 2024 tercatat 42 kasus HIV AIDS baru.

Penemuan kasus dilakukan secara aktif dan pasif melalui kegiatan skrining pada populasi berisiko, Mobile VCT HIV AIDS, penyisiran kasus pada Klinik Swasta/Dokter Praktik Mandiri terutama didaerah persinggahan dan kunjungan pasien ke layanan. Telah dilakukan berbagai upaya dengan bekerja sama lintas program, lintas sektor untuk menghapus stigma HIV di masyarakat dan memaksimalkan skrining aktif pada populasi kunci (Pekerja Seks, Pengguna Napza Suntik/Penasun, Waria dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki/LSL), Populasi Khusus (Pasien Tuberkulosis, pasien IMS, Ibu Hamil, Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan) serta Populasi Rentan (Anak jalanan, remaja, pelanggan pekerja seks, pekerja migran dan pasangan populasi kunci/ODHIV/Pasien IMS). Hal ini seperti tergambar

dalam grafik SPM Pelayanan Kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS.




**Gambar 2.36.** SPM Pelayanan Kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS tahun 2022 s.d 2024




**Gambar 2.37.** Temuan Kasus Baru HIV AIDS tahun 2022 s.d 2024

Capaian pelayanan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren positif dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun jumlah target menurun setiap tahun, persentase cakupan pelayanan meningkat, dari 86,70% di 2022 menjadi 89,87% di 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan efektivitas program pelayanan. Namun,

jumlah kasus baru HIV/AIDS justru mengalami peningkatan. Dari 27 kasus pada 2022, naik drastis menjadi 44 kasus di 2023, lalu sedikit turun menjadi 42 kasus di 2024. Tren ini menunjukkan bahwa penularan HIV masih terjadi dan perlu penanganan serius. Peningkatan pelayanan belum sepenuhnya diiringi oleh penurunan angka kasus baru. Ini menandakan perlunya penguatan upaya pencegahan dan edukasi, termasuk deteksi dini, promosi kesehatan, dan pengurangan stigma terhadap ODHA.

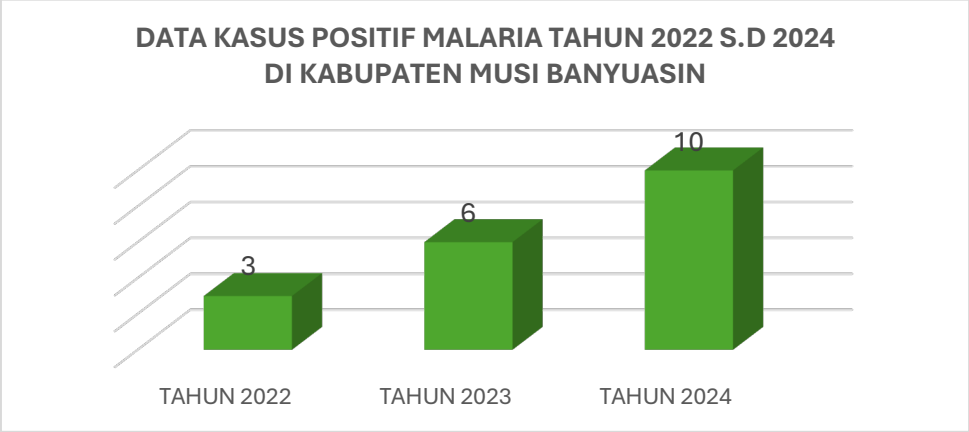
**MALARIA**

Sebagai upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria yang telah diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021, perlu dilaksanakan upaya berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penularan setempat/kasus indigenous. Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan mikroskopis pada pasien dengan gejala Malaria, MBS (mass blood survey), Surveilans migrasi serta pengendalian vektor Malaria.

Pada tahun 2022 terdapat 3 kasus positif Malaria, sedangkan di Tahun 2023 tercatat 6 kasus positif Malaria. Untuk tahun 2024 ditemukan 10 (sepuluh) kasus positif Malaria di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Teluk Kijing, 6 orang dari wilayah kerja Puskesmas Balai Agung, 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Lumpatan, 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Karya Maju dan 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Sukajaya. Seluruh pasien positif malaria telah dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan mengambil 25 sampel dari masing-masing keluarga, tetangga sekitar penderita. Hasilnya tidak

ditemukan kasus positif dan dari hasil penyelidikan epidemiologi tidak terjadi penularan setempat, sehingga termasuk kategori Kasus Malaria Impor. Pasien ada yang relaps (kambuh) dan ada juga yang memiliki riwayat kembali dari daerah endemis Malaria.

Salah satu indikator kinerja Program Malaria adalah *Positivity Rate* (PR) dengan target <5%. Sampai dengan Desember 2024, telah dilakukan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT pada masyarakat yang bergejala Malaria baik yang datang langsung ke fasyankes maupun pada warga setempat di sekitar kasus positif Malaria sehingga hasil yang didapat 0,26%.




**Gambar 2.38.** Temuan Kasus Malaria di Kabupaten Musi Banyuasin

Jumlah kasus malaria di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dari hanya 3 kasus pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 6 kasus pada 2023, dan kembali melonjak menjadi 10 kasus di tahun 2024. Ini berarti terjadi lebih dari tiga kali lipat peningkatan dalam kurun waktu dua tahun. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap pengendalian dan

pencegahan malaria. Kemungkinan penyebabnya bisa mencakup perubahan iklim mikro, peningkatan aktivitas manusia di daerah endemis, atau menurunnya upaya penyemprotan dan pembagian kelambu berinsektisida.

Faktor mobilitas penduduk dan urbanisasi juga dapat berkontribusi terhadap penularan. Meski angka kasus belum tergolong tinggi secara absolut, tren peningkatan patut diwaspadai. Hal ini karena malaria termasuk penyakit menular berpotensi fatal yang dapat menyebar cepat jika tidak ditangani sejak dini. Diperlukan intervensi berbasis komunitas, surveilans aktif, dan penguatan program deteksi dini serta respons cepat untuk mencegah kasus lebih lanjut.

g) Sarana Kesehatan dan Paramedis

Orientasi pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, cakupan, dan distribusi pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini, penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan menjadi penting. Seperti yang umumnya diketahui, praktik-praktik kesehatan hanya dapat dilaksanakan secara efektif melalui infrastruktur pelayanan kesehatan. Tempat atau fasilitas yang menyediakan platform untuk melaksanakan kegiatan kesehatan disebut pelayanan kesehatan. Untuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan, seperti Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa. Selain itu, terdapat jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melibatkan klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

**Tabel 2.22**
**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rumah Sakit Umum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Rumah Sakit Khusus | - | - | - | - | - |
| 3 | Rumah Sakit Ibu dan Anak | - | - | - | - | - |
| 4 | Puskesmas | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| 5 | Klinik/Balai Kesehatan | 7 | 40 | 40 | 34 | 33 |
| 6 | Posyandu | 542 | 547 | 524 | 514 | 514 |
| 7 | Polindes | - | - | 293 | - | NA |

*Sumber : BPS, 2025*

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pada pembangunan sektor kesehatan di suatu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan pengelolaanya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 yaitu 3 rumah sakit dengan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 736.897 jiwa.

Sedangkan untuk jumlah puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebanyak 31 unit. Berdasarkan standar nasional SNI 03-1733-2004 mengenai jumlah puskesmas yang semestinya tersedia dalam suatu

daerah, setiap 120.000 penduduk harus memiliki minimal satu puskesmas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dirasa tidak perlu menambah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peran posyandu di lingkungan masyarakat menjadi salah satu upaya penunjang kemudahan akses pelayanan kesehatan. Selain itu, Posyandu diselenggarakan oleh, dari, untuk, serta bersama masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Adanya posyandu ini diharapkan mampu mengontrol tingkat kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi dengan menekankan pada KIA, KB, Imunisasi, Gizi, ISPA, penanggulangan diare dan pencegahan penyakit menular dengan tujuan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBA). Jumlah posyandu di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebanyak 514 unit. Artinya, dari 1000 balita terdapat 514 posyandu yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Kementerian Kesehatan, idealnya rasio posyandu per satuan balita yakni 1:1000. Dengan demikian, capaian rasio posyandu di Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi batas ideal yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk polindes yang merupakan akronim dari pondok bersalin desa, adalah salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa. Pada tahun 2019 terdapat 276 unit polindes, namun pada 2020-2021 dikarenakan dampak Covid-19 polindes tidak

beroperasi. Pada tahun 2022 polindes yang kembali beroperasi berjumlah 293 unit.

Pembangunan kesehatan ditunjang oleh berbagai aspek, salah satunya sarana dan prasarana. Selain sarana prasarana, terpenuhinya tenaga medis dalam satuan penduduk juga menjadi faktor pendukung utama. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menjadi tolak ukur untuk melihat ketersediaan tenaga medis di suatu daerah. Untuk mengetahui seberapa banyak tenaga medis yang melayani per satuan penduduk, dapat digunakan akumulasi jumlah tenaga yang tersedia di rumah sakit dan puskesmas, mencakup dokter gigi, dokter umum maupun dokter spesialis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebanyak 80 tenaga medis.

Terpenuhinya jumlah dokter untuk melayani masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan kesehatan daerah terutama pada tingkat kepuasan masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 3.114 orang yang terdiri dari 22 dokter gigi, 182 dokter umum/spesialis.

Dengan demikian, peningkatan kualitas mutu dan akses pelayanan kesehatan anak, ibu, anak usia produktif dan lansia menjadi aspek penting. Pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin terkhusus pada akses pelayanan sudah cukup baik, namun demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengoptimalkan mutu

pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada membaiknya pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan tren demografi yang berjalan maksimal.

**Tabel 2.23**
**Jumlah Tenaga Kesehatan (orang) di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Dokter | 169 | 201 | 123 | 157 | 182 |
| 2 | Dokter Gigi | 18 | 26 | 22 | 24 | 22 |
| 3 | Perawat | 788 | 938 | 907 | 985 | 978 |
| 4 | Bidan | 739 | 973 | 839 | 1.945 | 873 |
| 5 | Tenaga Keafirmasian | 106 | 122 | 146 | 161 | 130 |
| 6 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 101 | 107 | 79 | 97 | 48 |
| 7 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 40 | 57 | 63 | 71 | 69 |
| 8 | Tenaga Gizi | 49 | 49 | 62 | 73 | 70 |
| 9 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 43 | 65 | 85 | 87 | 93 |

*Sumber : BPS, 2025*

**3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a) Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menargetkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman, dan nyaman guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan di seluruh bidang kebinamargaan secara terencana, berkesinambungan, dan berbasis kinerja. Selain fokus pada pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten, pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, termasuk rehabilitasi jalan antar desa dalam satu kecamatan.

Selain itu, peningkatan jalan juga difokuskan sebagai pendukung kawasan industri, guna memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan ini, diharapkan dapat tercipta konektivitas dan hubungan yang lebih baik antarwilayah, meningkatkan efisiensi transportasi, serta membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Kabupaten Musi Banyuasin Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut.

**Tabel 2.24**
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%) | 57,88 | 72,29 | 66,64 | 59,37 | 61,16 |
| 2 | Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) | 80 | 81,26 | 81,83 | 82,45 | 83,67 |

*Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa secara umum kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Hal ini terlihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024 masih rendah dan mengalami tren naik-turun. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Musi Banyuasin fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024 ini dipengaruhi berbagai oleh faktor geografis yang mana terdapat beberapa kawasan yang memang rawan banjir dan bencana lainnya yang menyebabkan rusaknya jalan. Selain itu juga proporsi jalan dalam kondisi baik yang belum 100 persen tersebut juga disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi berupa lalu lintas hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan sehingga sering menimbulkan kemacetan dan kabut asap tebal. Sementara, dalam periode tersebut memang terdapat beberapa persen peningkatan kualitas jalan pada tahun 2021 yang didorong oleh adanya program pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang secara langsung meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik.

Kemudian, rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin juga disebabkan oleh rendahnya kinerja urusan pekerjaan umum dalam menjamin sanitasi di masyarakat. Meski demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024 mengalami trend meningkat. Capaian realisasi indikator sampai tahun 2024 sebesar 83,67% belum tercapai sesuai target sebesar 100%, hal ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah penduduk/Rumah Tangga dan

ketidak sesuaian proporsi peningkatan jumlah alokasi anggaran dengan penyebaran dan peningkatan penduduk, walaupun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan upaya dan strategi.

Selain itu, rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin juga terlihat dari jumlah panjang jalan yang ada belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang sangat mumpuni untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lancar. Kondisi jalan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.25**

**Kondisi Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Baik | 495,39 | 483,02 | 521,20 | 570,60 | 659,23 |
| 2 | Sedang | 126,12 | 338,19 | 150,26 | 175,49 | 109,44 |
| 3 | Rusak | 115,80 | 221,64 | 215,57 | 244,13 | 41,34 |
| 4 | Rusak Berat | 339,37 | 75,92 | 373,66 | 266,56 | 446,77 |
| Total Jalan | | 1.076,68 | 1.073,77 | 1.260,68 | 1.256,78 | 1.246,78 |

*Sumber : Musi Banyuasin Dalam Angka, 2025*

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan pada tabel data berikut ini :

**Tabel 2.26**

**Persentase Kemantapan Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin (Berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 753 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten)**

| Tahun | Kondisi Mantap (Km) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 621,51 | 57,88 |
| 2021 | 776,21 | 71,28 |
| 2022 | 746,22 | 69,49 |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin*

**Tabel 2.27**
**Persentase Kemantapan Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin**
**(Berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 92/KPTS-DPU-PR/2023 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten)**

| Tahun | Kondisi Mantap (Km) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 746,01 | 59,37 |
| 2024 | 768,67 | 61,16 |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa kualitas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin belum baik dan merata. Hal ini terlihat dari penurunan kualitas yang terjadi meski panjang jalan terus meningkat. Dari hal ini dapat disimpulkan juga bahwa pihak terkait belum melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jalan secara optimal. Padahal, kualitas jalan yang buruk dapat mempengaruhi keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi pengguna jalan serta memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang harus berdasarkan pada karakteristik, daya dukung, dan daya tampung

lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai. Penataan ruang juga harus mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun sebuah dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang ditetapkan. Sehingga diketahui bahwa pada tahun 2021, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 1.320.332 Ha. Sedangkan luas wilayah perkotaan adalah sebesar 32.517,39 Ha dari keseluruhan kawasan. Selain itu, capaian pada urusan penataan ruang ini dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.28**
**Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Keberadaan Perda RTRW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Luas Wilayah Produktif | 68 % | 68 % | 68% | 68% | 68% |
| 4 | Luas Wilayah Perkotaan | 1,3 % | 1,3 % | 1,3% | 1,3% | 1,3% |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa secara umum kinerja dalam penataan ruang di Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengalami

perubahan yang signifikan. Sekalipun telah ada dokumen tata ruang, namun di lapangan masih dijumpai konflik pemanfaatan lahan maupun alih fungsi lahan. Data lengkap mengenail hal tersebut memang tidak ada, namum demikian terdapat data parsial mendukung fenomena ini.

Analisis permasalahan penataan ruang di Kabupaten Musi Banyuasin mengindikasikan beberapa masalah utama. Salah satunya adalah rendahnya penataan ruang yang disebabkan oleh luas lahan produktif yang belum dikelola secara optimal. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 68 persen dari luas wilayah produktif yang telah dikelola, sementara sisanya belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya ruang untuk pengembangan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat

Masalah lain yang menyebabkan rendahnya penataan ruang adalah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meskipun terdapat peraturan dan dokumen RTRW yang ada, namun di lapangan masih sering terjadi konRlik pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan. Sebagai contoh, pada bulan November 2023 dilaporkan terjadi konflik lahan dan alih fungsi lahan di Kecamatan Bayung Lencir dengan luas mencapai 7.250 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan RTRW masih belum optimal.

**4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk hidup masyarakat. Sehingga kinerja dari urusan

ini dijabarkan melalui beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi, rumah layak huni dan rumah tangga pengguna listrik. Selain itu, urusan ini juga memiliki tugas untuk menciptakan kawasan permukiman yang mumpuni sesuai standar yang ditetapkan WHO.

Secara umum, kualitas perumahan rakyat dan permukiman di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Hal ini tercermin dari data pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa masih terdapat 389,94 Ha permukiman kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin dan kawasan-kawasan kumuh tersebut juga berada pada lokasi rawan longsor. Data dari urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.29**
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rumah tangga pengguna air bersih | 67,93 | 87,51 | 90,33 | 92,37 | 94,96 |
| 2 | Rumah tinggal bersanitasi | 83,83 | 81,26 | 81,83 | 82,45 | 83,67 |
| 3 | Rumah layak huni | 84,45 | 84,37 | 88,16 | 8,52 | 13,52 |
| 4 | Rumah tangga pengguna listrik | 98,55 | 98,55 | N/A | 164,753 | 99,92 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Peremukiman Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa rendahnya kualitas permukiman di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama yakni belum berhasilnya pemerintah dalam menjamin air bersih masyarakat. Hal ini terlihat dari indikator rumah tangga pengguna air bersih hanya mencapai 94,96 persen pada tahun 2024, padahal standar nasional adalah 100 persen. Selain itu, nilai indikator persentase rumah tinggal bersanitasi hanya mencapai 83,67 persen pada tahun 2024, padahal standar nasional juga adalah 100 persen.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas pengelolaan air dan air limbah di Kabupaten Musi Banyuasin juga belum berjalan dengan baik selama periode tersebut. Masih banyak air limbah yang mencemari lingkungan, seperti sungai, tanah, dan udara. Hal ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, karena meningkatkan risiko penularan penyakit dan menurunkan kualitas hidup.

Kemudian, rendahnya kualitas permukiman rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin juga disebabkan oleh cakupan listrik yang belum mencapai 100 persen. Hal ini dapat mengganggu aktivitas dan kebutuhan masyarakat, seperti penerangan, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam melihat kualitas permukiman yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih jelas dapat diukur melalui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di daerah. Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengurangi kawasan kumuh pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.30**

**Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Luas Kawasan Kumuh Menurut SK | Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh | Sisa Luas Kawasan Kumuh |
|---|---|---|---|---|
| Babat Toman | Kelurahan Babat | 7,31 | 0,246 | 7,064 |
| | Kelurahan Mangun Jaya | 7,56 | 3,9441 | 3,6159 |
| Sekayu | Desa Bailangu Timur | 5,99 | 0,0324 | 5,9576 |
| | Kelurahan Balai Agung | 8,08 | 0,6244 | 7,4556 |
| | Kelurahan Kayuara I | 4,52 | 0,14305 | 4,377 |
| | Kelurahan Kayuara II | 4,75 | 0,0704 | 4,6796 |
| | Kelurahan Serasan Jaya | 9,25 | 0,0696 | 9,1804 |
| Bayung Lencir | Kelurahan Bayung Lencir Indah I | 3,50 | 0,0696 | 3,4304 |
| | Kelurahan Bayung Lencir Indah II | 1,79 | 0 | 1,79 |
| Batanghari Leko | Desa Talang Leban | 5,40 | 0,0612 | 5,3388 |
| | Desa Saud | 3,28 | 0,1723 | 3,1077 |
| Keluang | Desa Tanjung Dalam | 7,84 | 0,024 | 7,816 |

*Sumber : Satudata Musi Banyuasin, 2025*

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahami rendahnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin juga dipengaruhi oleh masih berkembangnya beberapa kawasan kumuh di 12 desa/kelurahan. Sehingga, diperlukan adanya perubahan untuk

meningkatkan kualitas infrastruktur masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

**5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Salah satu kewajiban pemerintah yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dapat dipahami sebagai kebutuhan masyarakat untuk terhindar dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial seperti penyakit sosial dan bencana alam. Urusan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwasanya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dikategorikan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat, dibutuhkan kerja sama yang harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian Daerah, dan perangkat daerah lainnya. Tabel berikut menyajikan informasi capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020 hingga 2024.

**Tabel 2.31**

**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Kriminalitas | 716 | 754 | 875 | 919 | NA |
| 2 | Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang telah diselesaikan | 84 | 951 | 41 | NA | NA |
| 3 | Penegakan Perda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 1 | 3 | 15 | 15 | 3 |
| 5 | Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada (%) | 75 | 82 | 82 | 82 | 80,03 |
| 7 | Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 |

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah meskipun capaian penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelesaian konflik telah mencapai 100%. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya angka kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan keamanan masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat capaian dalam penegakan hukum, tetapi masih terdapat tantangan yang

signifikan dalam menjaga keamanan publik, yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Masalah lainnya adalah tingginya jumlah kasus pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang perlu ditangani. Dampak dari hal ini adalah menurunnya kualitas lingkungan kerja, meningkatnya risiko kecelakaan kerja, dan berpotensi merugikan kesejahteraan pekerja serta produktivitas usaha.

Selain itu, meskipun terdapat penegakan Perda yang telah mencapai 100%, namun masih terjadi kasus pelanggaran K3 yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dan penertiban masih belum optimal. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur tata kelola dan tata tertib, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum dan penertiban serta upaya pencegahan pelanggaran agar dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**6) Urusan Sosial**

Berkaitan dengan urusan sosial, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menekankan pada pemenuhan pelayanan sosial yang baik dan merata pada setiap warga di suatu daerah.

Hal ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga supaya terjamin dalam segala aspek, baik jaminan sosial, inisiatif dalam meningkatkan kualitas SDM, perlindungan sosial dengan menerapkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta rehabilitasi sosial sebagai tindakan individu yang mengalami disfungsi sosial. Upaya menunjang pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan serta peningkatan profesionalitas lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan yang familiar dengan sebutan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk menangani permasalahan pada konteks kesejahteraan sosial.

Selain PPKS, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga perlu mengkaji dan menggali sumber kesejahteraan sosial guna mendukung pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui sinergi, advokasi, dan memaksimalkan program-program sosial. Hal ini didukung dengan data persentase PMKS Kabupaten Musi Banyuasin yang terus mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus terus meningkatkan segala aspek yang menunjang kesejahteraan sosial, baik dari jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial tanpa mengesampingkan intervensi dari PMKS/PPKS.

**Tabel 2.32**
**Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah PMKS | 340.178 | 199.435 | 167.127 | 157.606 | 48.716 |
| 2 | Jumlah PSKS | 4.369 | 4.369 | 1.304 | 1.581 | 19.175 |
| 3 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 71,41 | 72,34 | 69,03 | 99,6 | 78,00 |
| 4 | Persentase PMKS yang tertangani | 71,41 | 72,34 | 69,03 | 99,6 | 78,00 |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin*

## B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar

### 1) Tenaga Kerja

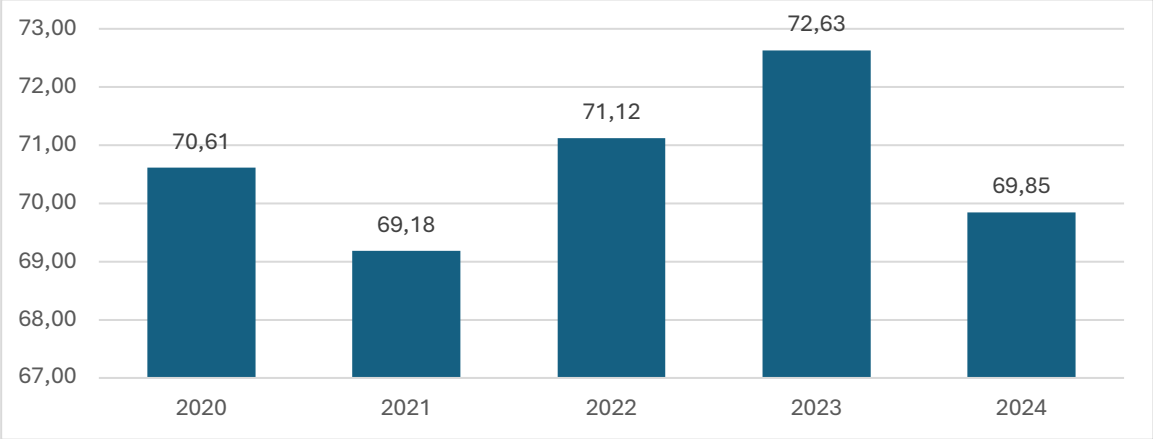
Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan yang baik akan mendukung keberhasilan perekonomian di setiap daerah sehingga berdampak lanjut bagi pembangunan daerah di berbagai aspek. Tenaga kerja yang berkualitas dapat memberikan dampak yang besar pada output yang dihasilkan. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan penciptaan kualitas SDM, terkhusus pada aspek human capital. Dengan demikian, keberhasilan pada aspek ini akan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu, data mengenai perkembangan

ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Terdapat beberapa indikator dalam aspek ketenagakerjaan salah satunya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Partisipasi kerja menunjukkan jumlah angkatan kerja yang bekerja, dimana apabila data menunjukkan nilai yang rendah maka dapat diartikan bahwa lebih sedikit kesempatan kerja penduduk usia kerja di suatu daerah, begitupun sebaliknya. Indikator tersebut menekankan pada poin perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja di suatu daerah dengan penduduk usia kerja. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan labor supply untuk menghasilkan atau memproduksi barang maupun jasa dalam perputaran perekonomian daerah, sehingga semakin tinggi nilai TPAK di suatu daerah, semakin besar daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, TPAK di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 70,61 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 69,18 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja. Pada tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan TPAK secara berturut-turut menjadi 71,12 persen dan 72,63 persen, mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Namun pada tahun 2024, TPAK kembali menurun menjadi 69,85 persen. Terjadinya penurunan tersebut kemungkinan besar terjadi karena kekeringan yang melanda pada akhir

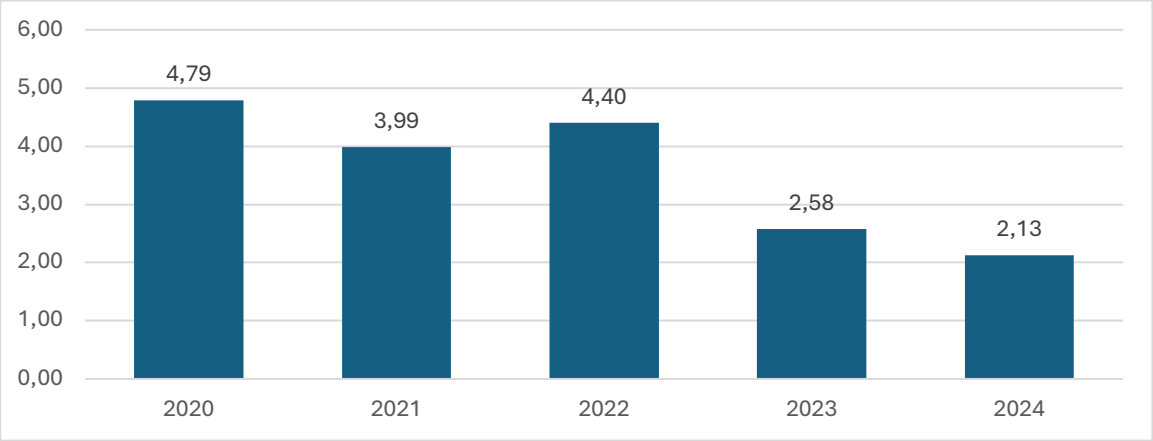
tahun 2024 yang membuat perempuan yang dulunya membantu pekerjaan di sektor pertanian menjadi tidak dibutuhkan dan beralih menjadi ibu rumah tangga. Terlihat dari menurunnya jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dan menurunnya jumlah penduduk bekerja yang berjenis kelamin perempuan.




**Gambar 2.39.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Musi Banyuasin
Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2025

Selanjutnya, angka TPAK juga berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Pengangguran terbuka menunjukkan jumlah usia produktif yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Dengan demikian, data besaran jumlah pengangguran terbuka di suatu daerah dapat digunakan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan. Aspek dasar dalam poin ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran dari tenaga kerja. Besaran jumlah angkatan kerja yang tidak terserap disebabkan karena adanya gap antara kompetensi dari pencari kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan atau pasar, sehingga hal ini menyebabkan pengangguran terbuka. Di sisi lain, keadaan menunggu bagi para pencari kerja yang baru

dan mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja juga dapat dinyatakan pengangguran terbuka.




**Gambar 2.40.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Musi Banyuasin
Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuatif selama periode tahun 2017 hingga 2024. Pada tahun 2017 TPT tercatat di angka 2,75 persen, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 4,79 persen. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan melemahnya pasar tenaga kerja. Setelah tahun 2020, TPT mulai menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, TPT turun menjadi 3,99 persen namun kembali naik di tahun 2022 menjadi 4,40 persen yang mungkin mencerminkan ketidakseimbangan pemulihan sektor ekonomi dan dinamika pasar kerja pasca pandemi.

Penurunan yang cukup signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 (2,58 persen) dan terus membaik di tahun 2024 dengan hanya 2,13 persen yang menjadi angka terendah dalam delapan tahun terakhir. Penurunan ini

mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi daerah, efektivitas program penyerapan tenaga kerja serta meningkatnya kesempatan kerja baik dari sektor formal maupun informal. Secara rinci, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.33**
**Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tenaga Kerja yang Ditempatkan | 191 | 805 | 928 | 967 | 679 |
| 2 | Tenaga Kerja Terdaftar Melalui Kartu Pencari Kerja | 494 | 1980 | 708 | 462 | 462 |
| 3 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan | 38,66% | 40,66% | 76,29% | 47,77% | 68,04% |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin*

Permasalahan ketenagakerjaan tentu berdampak pada berbagai aspek lainnya, salah satunya kasus perselisihan antara buruh dengan pengusaha. Di Kabupaten Musi Banyuasin, masih terdapat beberapa kasus perselisihan antara buruh dengan perusahaan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya laporan kasus perselisihan buruh dengan pengusaha setiap tahunnya. Terakhir di tahun 2024, terdapat 33 kasus perselisihan, 5 diantaranya diselesaikan melalui perjanjian bersama. Sisanya diselesaikan melalui surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, selama periode 2020 hingga 2024 dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, pandemi COVID-19, serta efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja daerah. Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan meningkat secara signifikan dari 191 orang pada tahun 2020 menjadi 805 orang pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan sektor ketenagakerjaan pascapandemi, yang kemudian berlanjut dengan peningkatan penempatan menjadi 928 orang (2022) dan mencapai puncaknya di angka 967 orang (2023). Namun demikian, pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan menurun menjadi 679 orang, yang dapat mengindikasikan penurunan kesempatan kerja atau terbatasnya kanal penempatan.

Data menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja yang mendaftar melalui kartu pencari kerja mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021 sebanyak 1.980 orang, meningkat hampir empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sangat mungkin dipicu oleh dampak pandemi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftar secara resmi sebagai pencari kerja. Setelah itu, terjadi penurunan drastis dan stabilisasi pada angka 462 orang pada tahun 2023 dan 2024.

Efektivitas penempatan tenaga kerja dapat dilihat dari persentase tenaga kerja yang ditempatkan dibanding jumlah pencari kerja. Angka ini menunjukkan tren yang beragam: dari 38,66 persen pada 2020, meningkat menjadi 40,66 persen (2021), dan melonjak signifikan menjadi 76,29 persen pada 2022. Persentase ini sempat menurun ke 47,77 persen (2023), namun kembali meningkat menjadi 68,04 persen pada 2024. Kenaikan persentase ini mencerminkan peningkatan efisiensi penyaluran tenaga kerja yang terdaftar ke lapangan kerja, meskipun penurunan di tahun 2023 menunjukkan bahwa tantangan dalam mencocokkan supply dan demand tenaga kerja masih terjadi.

**Tabel 2.34**
**Jumlah Kasus Buruh dengan Pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Tahun | Jumlah Kasus | Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama |
|---|---|---|
| 2020 | 50 Kasus | 10 Kasus |
| 2021 | 38 Kasus | 4 Kasus |
| 2022 | 24 Kasus | 6 Kasus |
| 2023 | 26 Kasus | 8 Kasus |
| 2024 | 33 Kasus | 5 Kasus |

*Sumber : Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, 2025*

Jumlah kasus buruh dengan pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami tren menurun selama periode 2020–2023. Dari 50 kasus pada tahun 2020, kasus turun bertahap menjadi 38 kasus (2021), 24 kasus (2022), dan 26 kasus (2023). Namun pada tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 33 kasus. Penurunan jumlah kasus pada awal periode

dapat mencerminkan membaiknya komunikasi dan manajemen hubungan industrial di lingkungan kerja. Sementara itu, peningkatan di tahun 2024 mengindikasikan adanya potensi gesekan hubungan kerja yang perlu direspons lebih dini, seperti perbedaan kepentingan terkait upah, pemutusan hubungan kerja, maupun kondisi kerja.

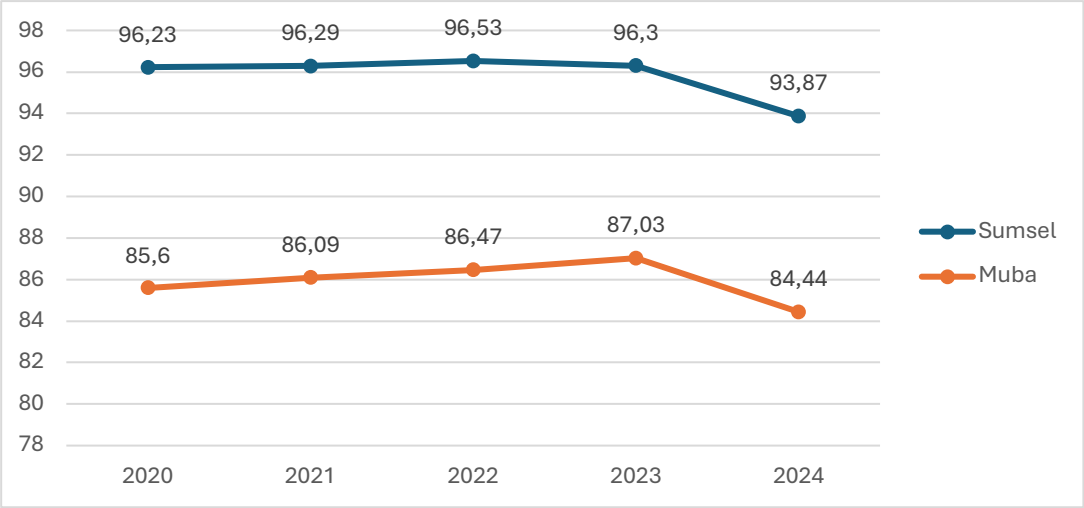
Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) juga menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, dari 50 kasus, hanya 10 kasus (20%) yang dapat diselesaikan melalui PB. Tahun 2021 mengalami penurunan drastis dengan hanya 4 kasus dari 38 kasus (10,5%) yang diselesaikan secara damai. Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2022 dan 2023, di mana 6 kasus dari 24 dan 8 kasus dari 26 diselesaikan melalui PB, masing-masing sekitar 25% dan 30,8%. Namun demikian, pada tahun 2024, meskipun jumlah kasus meningkat menjadi 33, hanya 5 kasus (15,15%) yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.

**2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mencapai keadilan gender, meningkatkan peran perempuan di segala bidang kehidupan, meningkatkan status dari penduduk perempuan, dan memperkuat peran perempuan dalam mengambil keputusan. Adapun perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan perannya. Oleh sebab itu untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di suatu daerah telah

terpenuhi, perlu mengukur ketercapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan dan menghitung perbedaan pencapaian laki-laki dan perempuan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG dapat mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah melalui berbagai indikator penunjang di dalamnya, seperti angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, serta perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.




**Gambar 2.41.** Indeks Pembangunan Gender Kab. Musi Banyuasin
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data BPS, selama lima tahun terakhir capaian IPG Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi dan masih berada di bawah angka IPG Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 85,60, jauh di bawah IPG Provinsi Sumatera Selatan sebesar 96,23. Meskipun demikian, Kabupaten Musi Banyuasin mencatat tren peningkatan selama tiga tahun berturut-turut : 86,09 (2021), 86,47 (2022), dan 87,03 (2023).

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam mempersempit kesenjangan gender, khususnya aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun pada tahun 2024, IPG Kabupaten Musi Banyuasin justru mengalami penurunan cukup tajam menjadi 84,44. Sementara IPG Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami penurunan menjadi 93,87. Penurunan IPG di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mengindikasikan adanya kesenjangan yang kembali melebar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan karena kekeringan yang melanda pada akhir tahun 2024 yang membuat perempuan yang dulunya membantu pekerjaan di sektor pertanian menjadi tidak dibutuhkan dan beralih menjadi ibu rumah tangga.

Masih rendahnya IPG di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan capaian provinsi dan nasional disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya faktor lingkungan sosial budaya yakni masih adanya kebiasaan masyarakat yang melekat dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, penyebab masih rendahnya IPG Musi Banyuasin juga dikarenakan masih adanya kasus kekerasan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya aduan masyarakat terkait dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan serta terdapat kasus KDRT yang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat menekan kasus KDRT dan aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan tindakan kekerasan.

**Tabel 2.35**

**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG | 32 | 35 | 36 | 47 | 47 |
| 2. | Rasio KDRT perempuan | 0,0041 | 0,006 | 0,0067 | 0,0100 | 0,017 |
| 3. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 60,06 | 59,84 | 60,35 | 61,78 | 65,65 |
| 4. | Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan | 26 | 29 | 23 | 27 | 79 |
| 5. | Persentase kecamatan layak anak | 40 | 54,34 | 60 | 66,66 | 73,33 |
| 6. | Indeks Ketimpangan Gender | 0,605 | 0,612 | 0,602 | 0,582 | 0,540 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin*

Aspek pemberdayaan perempuan dapat dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan. Diketahui bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun apabila dilihat berdasarkan gender, penduduk perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki.

### 3) Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang bisa dimakan dan memberikan energi, nutrisi, serta zat gizi penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, termasuk tumbuhan, hewan, dan hasil olahan. Sehingga, aspek pangan dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok manusia. Pengadaan mencakup seluruh tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Oleh sebab itu, pengukuran tingkat ketahanan pangan umumnya dilakukan melalui skor PPH yang mencerminkan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk juga ketersediaan bahan pangan.

Ketersediaan pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Dalam urusan pangan, Kabupaten Musi Banyuasin turut serta mendukung program Sumsel Lumbung Pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat langsung pangan masyarakat, secara umum Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat memenuhi beberapa kebutuhan pangan sendiri. hal ini dapat dilihat dari neraca pangan berikut.

**Tabel 2.36**
**Neraca Ketersediaan Pangan yang Diproduksi dan Dikonsumsi**

| No | Unit | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan/ bulan (ton) | Surplus/minus (ton) |
| 1. | Beras | 14.129,54 | 14.074,30 | 55,24 |
| 2. | Jagung | 107,190 | 31,55 | 75,64 |

| No | Unit | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan/ bulan (ton) | Surplus/minus (ton) |
| 3. | Cabe Merah Besar | 728,40 | 117,7 | 610,70 |
| 4. | Cabe Merah Rawit | 665,34 | 54,64 | 610,70 |
| 5. | Kedelai | 429,43 | 154,15 | 275,28 |
| 6. | Gula Pasir | 704,34 | 151,92 | 552,42 |
| 7. | Minyak Goreng/Sawit | 1.464,25 | 1.112,09 | 352,16 |
| 8. | Bawang Merah | 950,10 | 945,53 | 4,57 |
| 9. | Bawang Putih | 4.390,79 | 3.672,83 | 717,96 |
| 10 | Daging Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi | 1.118,48 | 400,52 | 717,96 |
| 11. | Daging Ayam | 727,88 | 440,82 | 287,06 |
| 12. | Telur Ayam Ras | 742,64 | 553,64 | 189,00 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin*

Skor PPH sebagai indikator terlengkap ketahanan pangan menunjukkan data yang cukup menarik. Pada skor PPH ketersediaan cenderung fluktuasi, dari 98,1 (2020) turun signifikan menjadi 88,6 (2021) dan hanya sedikit membaik menjadi 89,81 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya keberagaman ketersediaan pangan sumber zat gizi yang ideal. Sedangkan untuk skor PPH konsumsi menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 88 (2020) menjadi 92,9 (2023), meskipun sedikit menurun menjadi 92,8 pada tahun 2024. Ini mencerminkan perbaikan pola konsumsi masyarakat menuju komposisi yang lebih beragam dan bergizi.

Turunnya skor PPH produksi berkaitan secara langsung dengan tingkat ketersediaan pangan yang semakin hari semakin berkurang (turun). Persentase desa mandiri pangan di Kabupaten Musi Banyuasin relatif

rendah, berkebalikan dengan angka ketersediaan bahan pangan. Angka ini mengirimkan pesan bahwa secara makro Kabupaten Musi Banyuasin memang memiliki ketahanan pangan yang tinggi. Namun demikian, tingkat ketahanan pangan itu tidak merata di seluruh desa.

Meningkatnya skor PPH konsumsi menunjukkan kemampuan penduduk Musi Banyuasin yang lebih baik dalam mengelola diversifikasi makanan yang dikonsumsi. Hal ini berkaitan erat dengan semakin terbukanya wilayah, sehingga meningkatkan pengetahuan penduduk. Relatif bervariasinya konsumsi didukung oleh data pengeluaran per kapita yang semakin lama semakin meningkat.

**Tabel 2.37**
**Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan | 98,1 | 88,6 | 88,8 | 89,01 | 89,81 |
| 2. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan | 88 | 88,5 | 90,7 | 92,9 | 92,8 |
| 3. | Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk (Ton/1000 Penduduk/Tahun) | 312,2 | 281,9 | 198,35 | - | - |
| 4. | Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang) | 2059,8 | 2086,2 | 2150 | 2.154,00 | 2.127,00 |

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Persentase desa mandiri pangan | 23,45 | 23,45 | 24,00 | 4,35 | 0,41 |
| 6. | Persentase Pangan aman di konsumsi | 84,23 | 96,7 | 98,00 | 90,84 | 94,57 |
| 7. | Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman di konsumsi | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 8. | Jumlah lumbung dan sarana prasarana yang dibangun (unit) | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin*

Skor PPH Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 untuk Tingkat Ketersediaan Pangan sebesar 89,81 meningkat dibandingkan skor PPH di tahun sebelumnya, dengan kontribusi engergi total sebesar 2.205,04 kilokalori, atau 91,88% dari Angka Kecukupan Energi (AKE).

**Tabel 2.38**
**Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin**

| Kelompok Bahan Pangan | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Energi (kalori) | %AKE | Skor PPH |
| Padi-padian | 1.249,89 | 52,08 | 25 |
| Umbi-umbian | 55,2 | 2,3 | 1,15 |
| Pangan Hewani | 392,74 | 16,36 | 24 |
| Minyak dan Lemak | 186,18 | 7,76 | 3,88 |
| Buah/biji berminyak | 21,71 | 0,9 | 0,45 |
| Kacang-kacangan | 64,2 | 2,68 | 5,35 |
| Gula | 101,35 | 4,22 | 2,11 |

| Kelompok Bahan Pangan | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Energi (kalori) | %AKE | Skor PPH |
| Sayuran dan Buah | 133,76 | 5,57 | 27,87 |
| Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **2.205,04** | **91,88** | **89,81** |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin*

Kontribusi energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian, yaitu 1.249,89 kkal (52,08% AKE) dengan skor PPH 25. Ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat masih sangat bertumpu pada beras sebagai pangan pokok. Meskipun mencukupi dari sisi energi, dominasi ini menandakan ketidakseimbangan dalam keragaman pangan. Untuk pangan hewani menyumbang 392,74 kkal (16,36% AKE) dengan skor PPH 24, mendekati nilai ideal. Ini merupakan capaian positif karena pangan hewani merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan.

Kelompok sayur dan buah meskipun hanya menyumbang 133,76 kkal (5,57% AKE), tetapi menghasilkan skor PPH tertinggi sebesar 27,87. Hal ini mencerminkan peran penting kelompok ini dalam menentukan kualitas keberagaman pangan, meski kontribusinya terhadap energi relatif rendah. Sedangkan untuk kelompok kacang-kacangan hanya menyumbang 2,68% AKE namun skor PPH-nya cukup signifikan sebesar 5,35 yang menunjukkan potensi peningkatan konsumsi kelompok ini dapat berpengaruh positif terhadap kualitas pola makan. Sebaliknya, umbi-umbian menyumbang 2,3% AKE dengan skor PPH 1,15 (masih sangat rendah), padahal merupakan

panngan lokal alternatif yang penting sebagai diversifikasi sumber karbohidrat.

Kontribusi dari gula (4,22% AKE) dan minyak-minyak (7,76% AKE) cukup besar, yang perlu diwaspadai karena konsumsi berlebihan kelompok ini beresiko terhadap penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes. Skor PPH dari kelompok ini relatif kecil (2,11 dan 3,88) namun signifikan terhadap total energi.

**4) Pertanahan**

Urusan pertanahan memiliki peran penting dalam mengelola tanah yang berada dalam kewenangan daerah. Pengelolaan ini mencakup tata kelola yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perizinan, serta legalitas tanah di wilayah tersebut. Dengan adanya sistem pengelolaan pertanahan yang baik, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, mencegah konflik lahan, serta mendukung perencanaan tata ruang yang lebih efektif.

Capaian kinerja layanan umum dalam urusan pertanahan diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu persentase luas lahan yang telah bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, serta penyelesaian izin lokasi bagi kegiatan pembangunan dan investasi. Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur efektivitas kebijakan pertanahan yang diterapkan di daerah. Namun, secara umum, pengelolaan pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data berikut.

**Tabel 2.39**
**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase luas lahan bersertifikat (%) | 9,87 | 15,44 | 25,15 | 100 | 100 |
| 2. | Penyelesaian kasus tanah negara (%) | 6,25 | 81,25 | 96,62 | 100 | 100 |
| 3. | Penyelesaian izin lokasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh rendahnya luas lahan yang bersertifikat. Data menunjukkan bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 9,87 persen menjadi 100 persen pada tahun 2024. Jika tanah tidak memiliki legalitas, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam kepemilikan dan penggunaan lahan, yang dapat menghambat pengembangan wilayah dan investasi di daerah tersebut.

Kemudian, permasalahan kedua yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan adalah masih adanya kasus tanah negara yang dalam konflik. Data pada Tabel 2.36 di atas menggambarkan bahwa memang secara umum capaian penyelesaian kasus telah meningkat, namun peningkatan ini pun belum mencapai nilai 100 persen. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat beberapa kasus tanah negara yang dalam konflik, yang dapat menghambat proses penggunaan lahan secara

optimal. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

**5) Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup dalam urusan pemerintahan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kualitas lingkungan agar tetap nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat di suatu daerah. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan ekosistem, mendukung keberlanjutan sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Dalam aspek ini, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan secara makro. Indikator utama yang digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponen pendukungnya, yang mencakup kualitas dari udara, air, dan tutupan lahan. Selain itu, kondisi Indeks Kerentanan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim serta Indeks Risiko Bencana juga menjadi faktor penting dalam menilai kondisi lingkungan hidup masyarakat. Kedua indeks ini membantu dalam memahami tingkat ancaman terhadap lingkungan akibat faktor alami maupun aktivitas manusia.

Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat melalui data berikut.

**Tabel 2.40**
**Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%) | 72,78 | 73,11 | 68,5 | 66,05 | 68,17 |
| 2. | Indeks Kualitas Air (%) | 55,56 | 56,45 | 62,73 | 56,09 | 58,65 |
| 3. | Indeks Kualitas Udara (%) | 85,52 | 89,34 | 87,54 | 87,95 | 41,49 |
| 4. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Kualitas Lahan (%) | 78,82 | 42,41 | 42,41 | 42,67 | 41,80 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data pada tabel di atas, IKLH mengalami penurunan dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 68,17 pada tahun 2024, dengan titik terendah di tahun 2023 sebesar 66,05. Penurunan ini menunjukkan tekanan terhadap lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penurunan nilai pada dua dari tiga komponen utama IKLH, khususnya kualitas tutupan lahan dan kualitas udara.

Aspek lingkungan hidup juga mencakup pengelolaan sampah yang efektif dan pengendalian dampak industri terhadap lingkungan. Keberadaan industri yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan terhadap kualitas udara, air, dan tanah, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, kemampuan pengelolaan sampah per hari hanya sebesar 59,8 ton. Kemampuan

pengelolaan sampah yang rendah berkaitan dengan keberadaan sarana pengelolaan sampah yanng juga rendah. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Belum semua rumah tangga memiliki kesadaran tinggi untuk mengelola sampah rumah tangganya. Selain itu juga masih terdapat banyak praktek pengelolaan sampah dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai. Aspek-aspek ini jelas mnejadi faktor penyebab menurunkan kualitas udara dan air di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 2.41**

**Data Timbulan Sampah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah Kel/Desa yg dilayani | Jumlah Penduduk (Orang) | Timbulan Sampah Per Orang | Timbulan Sampah (Ton/hari) | Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | Berat Total Sampah Tertangani (Ton/hari) | Berat Total Sampah Tertangani (Ton/Tahun) | Persentase Sampah Tertangani (%) | Sampah TIDAK Tertangani (ton/Hari) | Sampah TIDAK Tertangani (ton/Tahun) | Total Sampah Masuk TPA Per (Ton/hari) | Total Sampah Masuk TPA (Ton/Per-bulan) | Nama/Lokasi TPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekayu | 10 | 88390 | 0.4 | 35.4 | 12904.9 | 29.5 | 10767.5 | 83% | 5.9 | 2137.4 | 31.9 | 11643.50 | TPA Sungai Medak Kec. |
| 2 | Sungai Keruh | 2 | 8091 | 0.4 | 3.2 | 1181.3 | 2.4 | 876.0 | 74% | 0.8 | 305.3 | | | |
| 3 | Keluang | 1 | 5688 | 0.4 | 2.3 | 830.4 | 2.0 | 730.0 | 88% | 0.3 | 100.4 | 2.0 | 730.00 | TPA Keluang |
| 4 | Sungai Lilin | 3 | 23263 | 0.4 | 9.3 | 3396.4 | 6.7 | 2445.5 | 72% | 2.6 | 950.9 | 6.7 | 2445.50 | TPA Sungai Lilin |
| 5 | Batang Hari Leko | 1 | 4190 | 0.4 | 1.7 | 611.7 | 1.5 | 547.5 | 89% | 0.2 | 64.2 | 1.5 | 547.50 | TPA Batang Hari Leko |
| 6 | Bayung Lencir | 2 | 14696 | 0.4 | 5.9 | 2145.6 | 3.8 | 1387.0 | 65% | 2.1 | 758.6 | 5.9 | 2153.50 | TPA Mendi Kec. Bayung |
| 7 | Tungkal Jaya | 1 | 5732 | 0.4 | 2.3 | 836.9 | 2.1 | 766.5 | 92% | 0.2 | 70.4 | | | |
| 8 | Lais | 2 | 10540 | 0.4 | 4.2 | 1538.8 | 2.8 | 1022.0 | 66% | 1.4 | 516.8 | 4.3 | 1569.50 | TPA Philip Kec. Lais |
| 9 | Babat Supat | 1 | 5689 | 0.4 | 2.3 | 830.6 | 1.5 | 547.5 | 66% | 0.8 | 283.1 | | | |
| 10 | Lawang Wetan | 6 | 14090 | 0.4 | 5.6 | 2057.1 | 2.8 | 1022.0 | 50% | 2.8 | 1035.1 | 2.8 | 1022.00 | TPA Kasmaran Kec. Lawang Wetan |
| 11 | Babat Toman | 4 | 23252 | 0.4 | 9.3 | 3394.8 | 3.6 | 1314.0 | 39% | 5.7 | 2080.8 | 4.7 | 1715.50 | TPA Mangun Jaya Kec. Babat |
| 12 | Sanga Desa | 3 | 7650 | 0.4 | 3.1 | 1116.9 | 1.1 | 401.5 | 36% | 2.0 | 715.4 | | | |
| 13 | Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | Jirak Jaya | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 15 | Lalan | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| **TOTAL** | | | | | **84.5** | **30845.6** | **59.8** | **21827.0** | **71%** | **24.7** | **9018.6** | **59.8** | **21827.00** | |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2025*

Di samping itu, penurunan kualitas udara dan air di Kabupaten Musi Banyuasin turut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi. Salah satu contohnya adalah limbah dari proses pengolahan kelapa sawit yang mencemari aliran sungai, serta praktik pengeboran ilegal (*illegal drilling*) yang

kian marak dan berdampak terhadap pencemaran udara, air, maupun tanah. Pada tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 10.000 lebih sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga hal ini menurunkan kualitas tutupan lahan sevara langsung di Kabupaten Musi Banyuasin dan akan berdampak secara ekonomi bagi negara.

Selain itu, dalam penjagaan kualitas lingkungan hidup dari bagaimana suatu daerah dapat menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai dan berkualitas. Hal ini menjadi penting karena ruang terbuka hijau memiliki berbagai manfaat dan fungsi bagi lingkungan masyarakat. Adapun data ruang terbuka hijau dari Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.42**
**Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2023**

| Kecamatan | Kota Kecamatan | Luas RTH Perkotaan (Km2) |
|---|---|---|
| Sungai Lilin | Sungai Lilin | 99.30 |
| | Sungai Lilin Jaya | 29.27 |
| Sekayu | Soak Baru | 105.70 |
| | Balai Agung | 85.60 |
| | Serasan Jaya | 40.30 |
| | Kayuara | 33.00 |
| Sanga Desa | Ngulak I | 14.00 |
| | Ngulak | 10.00 |
| Keluang | Keluang | 87,00 |
| Batanghari Leko | Lubuk Harjo | 108,70 |
| Bayung Lencir | Bayung Lencir | 106,10 |
| | Bayung Lencir Indah | 105,20 |
| | Senawar Jaya | 152,63 |
| | Mekar Jaya | 205,00 |

| Kecamatan | Kota Kecamatan | Luas RTH Perkotaan (Km2) |
|---|---|---|
| Babat Toman | Kasmaran | 20,00 |
| | Toman | 123,00 |
| | Mangun Jaya | 67,00 |
| | Beruga | 115,00 |
| | Babat | 117,00 |
| Babat Supat | Gajah Mati | 71,00 |
| | Tanjung Kerang | 46,87 |
| | Langkap | 60,00 |
| | Babat Banyuasin | 35,27 |
| | Seratus Delapan | 35,00 |
| | Letang | 65,00 |
| | Sukamaju | 64,00 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin*

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan luas RTH perkotaan terbesar adalah Bayung Lencir dengan 568,93 km2, diikuti oleh Batanghari Leko dengan 108,7 km2, dan Sekayu dengan 264,6 km2. Kecamatan dengan luas RTH perkotaan terkecil adalah Sanga Desa dengan 24 km2, diikuti oleh Babat Toman dengan 442 km2, dan Babat Supat dengan 377,14 km2. Sehingga dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan dan pemanfaatan RTH perkotaan. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, luas RTH perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. RTH perkotaan terdiri atas RTH publik paling sedikit 20 persen dan RTH privat paling sedikit 10

persen. RTH perkotaan memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Jika dilihat dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai 14.265 km, maka luas RTH perkotaan yang ideal adalah sekitar 4.279,5 km2.

**6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Data administrasi kependudukan memiliki peran yang penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam penyediaan layanan publik yang efektif dan inklusif bagi masyarakat.

Administrasi kependudukan mencakup serangkaian proses penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan yang dilakukan melalui mekanisme, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, hingga pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya. Keakuratan dan keterpaduan data kependudukan sangat krusial dalam berbagai aspek, mulai dari penyusunan program bantuan sosial, perencanaan infrastruktur, pemetaan demografi, hingga kebijakan terkait pemilu dan tata kelola pemerintahan.

Dengan sistem administrasi kependudukan yang tertata dengan baik, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akurat, dan efisien dalam melayani masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data kependudukan juga menjadi langkah

strategis untuk meningkatkan efisiensi serta mencegah berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih data atau administrasi kependudukan yang tidak akurat.

Capaian kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur salah satunya melalui lama pengurusan KTP. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan KTP di Kabupaten Musi Banyuasin terjaga konsisten selama lima tahun terakhir, yaitu hanya 1 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar administrasi kependudukan telah berlangsung dengan efisien, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk dalam pemanfaatan sistem layanan digital dan terintegrasi. Lama waktu pengurusan KTP yang konsisten selama lima tahun terakhir berdampak pada capaian kinerja pelayanan kependudukan lainnya yaitu rasio jumlah penduduk yang memiliki KTP mencapai 99,55.

Lebih lanjut, berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara *offline* dengan mendatangi dinas terkait ataupun kecamatan, maupun secara *online* melalui Sistem Informasi Pelayanan *Online* Kependudukan Musi Banyuasin (SIPOK MUBA). Pelayanan kependudukan yang dilakukan secara cepat dan terpadu tersebut menjadikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2024 nilai IKM sebesar 88,69.

**Tabel 2.43**
**Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Rasio Jumlah Penduduk ber-KTP (%) | 99,99 | 99,45 | 99,95 | 99,55 |
| 2. | Lama Pengurusan KTP (hari) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,35 | 87,05 | 89,92 | 88,69 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin*

**7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perencanaan wilayah. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat desa mampu mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan tiga aspek utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan. IDM menjadi alat ukur yang penting dalam mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah

dijalankan serta menentukan intervensi kebijakan yang lebih tepat guna dalam mendukung pengembangan desa.

Selain IDM, faktor lain seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, akses terhadap layanan dasar, serta keberlanjutan program pembangunan juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemberdayaan. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diwujudkan secara lebih optimal, sehingga mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

**Tabel 2.44**

**Indeks Desa Membangun Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| Status IDM | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| Mandiri | 2 | 0,88 | 8 | 3,52 | 13 | 5,73 | 53 | 23,14 | 103 | 44,98 |
| Maju | 48 | 21,15 | 58 | 25,55 | 89 | 39,21 | 111 | 48,47 | 91 | 39,74 |
| Berkembang | 134 | 59,03 | 137 | 60,35 | 115 | 50,66 | 64 | 27.95 | 34 | 14,85 |
| Tertinggal | 43 | 18,94 | 24 | 10,57 | 10 | 4,41 | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| Sangat Tertinggal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

*Sumber : https://idm.kemendes.go.id diolah, 2025*

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020–2024 terlihat adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pembangunan desa. Jumlah desa dengan status Mandiri mengalami peningkatan pesat, dari hanya 2 desa atau 0,88 persen pada tahun 2020 menjadi 103 desa atau 44,98 persen pada tahun 2024. Desa berstatus Maju juga menunjukkan tren positif, dari 48 desa (21,15 persen)

pada 2020 menjadi 91 desa (39,74 persen) pada 2024. Sebaliknya, desa dengan status Berkembang mengalami penurunan cukup tajam, dari 134 desa (59,03 persen) pada tahun 2020 turun menjadi 34 desa (14,85 persen) pada 2024. Hal yang menggembirakan, jumlah desa berstatus Tertinggal juga menurun drastis dari 43 desa (18,94 persen) pada 2020 hingga tersisa hanya 1 desa (0,44 persen) pada 2024. Sementara itu, tidak terdapat desa dengan status Sangat Tertinggal sepanjang periode lima tahun tersebut. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah yang positif, di mana sebagian besar desa berhasil meningkatkan statusnya menuju kategori Maju dan Mandiri, sekaligus menurunkan jumlah desa Berkembang dan Tertinggal secara konsisten.

**Tabel 2.45**
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 12 | 25 | 227 | 227 | 227 |
| 2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 10 | - | 227 | 227 | 227 |
| 3. | Jumlah PKK Aktif | - | 227 | 227 | 227 | 227 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin*

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi yaitu persoalan terbatasnya modal. Berdasarkan data Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024, peningkatan jumlah kelompok binaan LPM dan PKK secara signifikan sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kemajuan yang pesat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

**8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam proses pembangunan, penduduk memainkan peran ganda sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara dinamika kependudukan dan pembangunan bersifat saling memengaruhi. Perubahan dalam variabel kependudukan, seperti tingkat kelahiran dan pola usia perkawinan, sering kali dipicu oleh kemajuan dalam aspek sosial dan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan dinamika penduduk, yang pada akhirnya berdampak pada perencanaan kebijakan di berbagai sektor.

Dalam rangka mengontrol pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Musi Banyuasin terus mengintensifkan program pengendalian penduduk. Salah satu fokus utama adalah pasangan usia subur (PUS) dan tingkat penggunaan alat kontrasepsi yang diukur melalui Contraceptive Prevalence Rate (CPR). CPR merupakan indikator yang menunjukkan persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi pada saat survei dilakukan.

**Tabel 2.46**
**Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Prevalensi peserta KB aktif (CPR) | 84,96% | 82,94% | 62,22% | 70,20% | 72,47% |
| 2. | Rasio petugas KB/desa | 0,13% | 0,11% | 1 PLKB : 14 desa | 1 PLKB : 6 Desa | 1 PLKB : 4 desa |
| 3. | Prevalensi peserta KB Pria | 388 | 956 | 0,60% | 1,30% | 1,63% |
| 4. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 2,27 |
| 5. | Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera | 8,75% | 9% | 25,61% | 21,04% | 13,55% |

*Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin*

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) pada tahun 2023 61,27 dan pada tahun 2024 untuk capaian ini belum bisa disajikan karena masih menunggu rilis dari BPS. Selanjutnya untuk capaian peserta KB aktif (CPR) menurun cukup tajam dari 84,96 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 62,22 persen pada tahun 2022. Namun demikian, terjadi tren pemulihan pada dua tahun terakhir, yakni meningkat menjadi 70,20 persen

pada tahun 2023 dan 72,47 persen pada 2024. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transisi metode pencatatan, tantangan pandemi COVID-19, serta perubahan pola kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Ketersediaan tenaga lini lapangan mengalami perbaikan signifikan. Jika pada 2020 hanya tersedia 0,13 persen petugas KB per desa, maka pada 2024 telah meningkat menjadi 1 Petugas Lapangan KB (PLKB) untuk setiap 4 desa. Ini merupakan peningkatan kapasitas pelayanan yang sangat penting untuk mendukung sosialisasi, advokasi, dan pemantauan program KB secara langsung di masyarakat.

Cara untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi terus dikembangkan, seperti peningkatan edukasi tentang kesehatan reproduksi, akses lebih luas terhadap alat kontrasepsi, serta penguatan peran penyuluh KB dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan program pengendalian penduduk dapat berjalan lebih optimal, mendukung kesejahteraan keluarga, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang lebih seimbang dan berkualitas.

Disisi lain, peserta KB pria menunjukkan peningkatan partisipasi yang menggembirakan, dari hanya 388 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 956 orang pada 2021, dan terus naik dalam bentuk persentase hingga 1,63 persen pada tahun 2024. Walaupun angkanya masih relatif kecil dibanding peserta KB perempuan, hal ini menunjukkan adanya perubahan persepsi dan peran pria dalam pengendalian kelahiran.

Secara umum, program KB di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kemajuan bertahap setelah sempat mengalami penurunan, terutama pasca masa pandemi. Peningkatan rasio petugas KB dan partisipasi KB pria merupakan modal penting untuk memperkuat program ke depan. Namun demikian, konsistensi pencapaian CPR dan monitoring kualitas data tetap perlu menjadi perhatian utama.

**9) Perhubungan**

Urusan perhubungan memiliki peran strategis dalam menjamin konektivitas baik dalam satu daerah maupun antarwilayah. Konektivitas yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Agar dapat menilai kinerja sektor perhubungan, salah satu indikator makro yang dapat digunakan adalah Indeks Konektivitas. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu daerah. Pengukuran indeks konektivitas dilakukan dengan cara membandingkan jumlah jaringan jalan yang tersedia dengan jumlah desa yang ada dalam suatu daerah. Dari analisis ini, dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat keterhubungan antardesa, antarkecamatan, dan antarwilayah, yang pada akhirnya mencerminkan efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi di daerah tersebut.

Indeks dari konektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah

dan efisien. Sebaliknya, indeks yang rendah mengindikasikan adanya keterbatasan akses transportasi, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan indeks konektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut disajikan data mengenai ketersediaan jaringan jalan serta jumlah desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai dasar dalam menganalisis tingkat konektivitas wilayah.

**Tabel 2.47**
**Data Jaringan Jalan dan Jumlah Desa serta Indeks Konektivitas Antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin**

| No | Kecamatan | Jumlah Jaringan Jalan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah Desa yang Belum Terhubung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekayu | 10 | 14 | 4 |
| 2 | Babat Toman | 7 | 14 | 7 |
| 3 | Sungai Lilin | 7 | 15 | 8 |
| 4 | Keluang | 7 | 14 | 7 |
| 5 | Lais | 6 | 16 | 10 |
| 6 | Sanga Desa | 5 | 19 | 14 |
| 7 | Babat Supat | 5 | 16 | 11 |
| 8 | Bayung Lencir | 5 | 23 | 18 |
| 9 | Plakat Tinggi | 5 | 15 | 10 |
| 10 | Lawang Wetan | 4 | 15 | 11 |
| 11 | Sungai Keruh | 4 | 10 | 6 |
| 12 | Jirak Jaya | 4 | 12 | 8 |
| 13 | Batang Hari Leko | 4 | 16 | 12 |
| 14 | Tungkal Jaya | 3 | 16 | 13 |
| 15 | Lalan | 3 | 27 | 24 |
| **Jumlah** | | **79** | **242** | **163** |
| **Indeks Konektivitas** | | | | **0,326** |

*Sumber : Satudata Muba, 2025*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa indeks konektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya memiliki nilai 0,326. Serta dari jumlah desa yang ada, sejumlah 163 desa (67,3 persen) belum memiliki jaringan jalan yang mumpuni untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial. Sehingga dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, aksesibilitas dan mobilitas penduduknya, khususnya di daerah pedesaan.

**Tabel 2.48**
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api | 52 | 52 | 52 | 131 | 617 |
| 2. | Persentase Fasilitas LLAJ yang direhab | 38% | 43% | 43% | 43% | 11% |
| 3. | Jumlah Rute Pelayanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas | 3% | 31,70% | 3% | 31 | 4,8% |
| 5. | Persentase transportasi yang nyaman dan layak jalan | 61% | 53% | 60% | 85% | 77% |
| 6. | Persentase Prasarana Penunjang Fasilitas Perhubungan | 30% | 35% | 30% | 30% | NA |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7. | Persentase kecamatan yang terlayani angkutan | 30% | 33% | 30% | 30% | 6,67% |

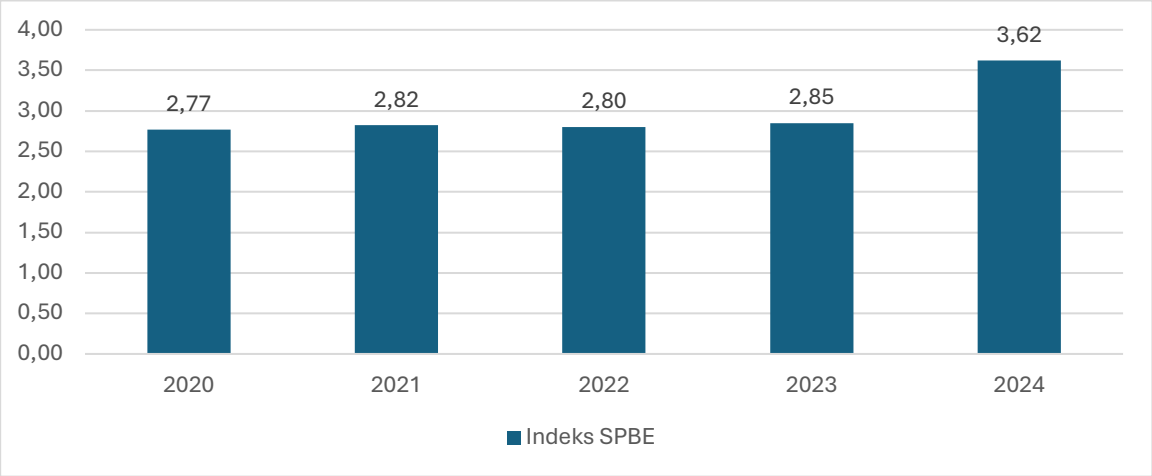
*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin*

**10) Komunikasi dan Informatika**

Dalam kegiatan komunikasi dan informatika memiliki peran krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan sektor ini semakin berorientasi pada digitalisasi layanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ruang lingkup urusan komunikasi dan informatika mencakup pengembangan, implementasi, dan pengawasan infrastruktur telekomunikasi digital, serta strategi komunikasi publik dan digital yang mendukung penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Pembangunan infrastruktur TIK yang optimal akan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga ekonomi digital.

Dalam mengukur capaian kinerja dalam urusan ini, digunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai indikator utama. Indeks ini menunjukkan sejauh mana penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keterbukaan layanan publik.




**Gambar 2.42.** Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Satudata Muba, 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks SPBE tercatat sebesar 2,77, dan terus meningkat menjadi 2,82 pada tahun 2021, serta 2,80 pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022, secara keseluruhan capaian tetap menunjukkan kecenderungan naik. Peningkatan lebih nyata terlihat pada tahun 2023, di mana nilai indeks naik menjadi 2,85, dan melonjak tajam pada tahun 2024 mencapai 3,62. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 ini mencerminkan adanya perbaikan besar dalam kualitas tata kelola digital pemerintahan, yang bisa berasal dari peningkatan layanan digital publik, integrasi sistem, maupun peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

Kinerja SPBE Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang positif, terutama dengan lonjakan capaian pada

tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital pemerintahan semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, diperlukan konsistensi peningkatan kualitas layanan berbasis digital, penguatan keamanan siber, serta peningkatan literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja SPBE yang berkelanjutan.

**Tabel 2.49**
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah (website, media cetak, radio, televisi, media sosial) | 104 | 106 | 102 | 64 | 79 |
| 2. | Rasio cakupan layanan telekomunikasi (persen) | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 76,86 |
| 3. | Jumlah wilayah blank spot | NA | 91 | 81 | 56 | 72 |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin*

### 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat ekonomi lokal di suatu daerah. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi,

serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Di Kabupaten Musi Banyuasin, koperasi dan UKM menjadi pilar utama dalam menggerakkan sektor ekonomi produktif, terutama di bidang perdagangan, pertanian, industri kreatif, dan jasa. Untuk mengukur perkembangan dan kontribusi sektor ini, dilakukan berbagai pemetaan dan evaluasi terkait jumlah koperasi aktif, jumlah pelaku UKM, akses terhadap pembiayaan, serta program pemberdayaan yang telah dijalankan.

Berikut disajikan data mengenai perkembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencerminkan kondisi dan capaian sektor ini dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 2.50**
**Koperasi/KUD dan Non KUD di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Jenis | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Koperasi/KUD | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2. | Non KUD | 239 | 258 | 294 | 303 | 316 |
| 3. | Koperasi aktif | 331 | 350 | 386 | 203 | 216 |
| **JUMLAH** | | **343** | **362** | **398** | **407** | **636** |

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin*

Jumlah koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024, meskipun disertai penurunan pada aspek koperasi aktif. Secara total, jumlah koperasi meningkat dari 343 unit pada tahun 2020 menjadi 636 unit pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya jumlah koperasi non-KUD, yang mengalami

peningkatan dari 239 unit pada 2020 menjadi 316 unit pada 2024. Sementara itu, jumlah koperasi/KUD tetap stagnan di angka 104 unit sepanjang lima tahun terakhir. Namun demikian, jumlah koperasi aktif justru mengalami penurunan signifikan. Setelah sempat meningkat dari 331 unit pada tahun 2020 menjadi 386 unit pada 2022, angkanya menurun drastis menjadi 203 unit di tahun 2023 dan hanya sedikit meningkat menjadi 216 unit pada 2024.

Meskipun jumlah koperasi secara total terus meningkat, proporsi koperasi aktif justru menurun, yang mengindikasikan bahwa banyak koperasi yang mungkin tidak menjalankan kegiatan usahanya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan koperasi, khususnya dalam aspek kelembagaan, akuntabilitas, serta pemberdayaan kapasitas pengurus agar koperasi yang ada dapat beroperasi secara aktif, sehat, dan berkelanjutan.

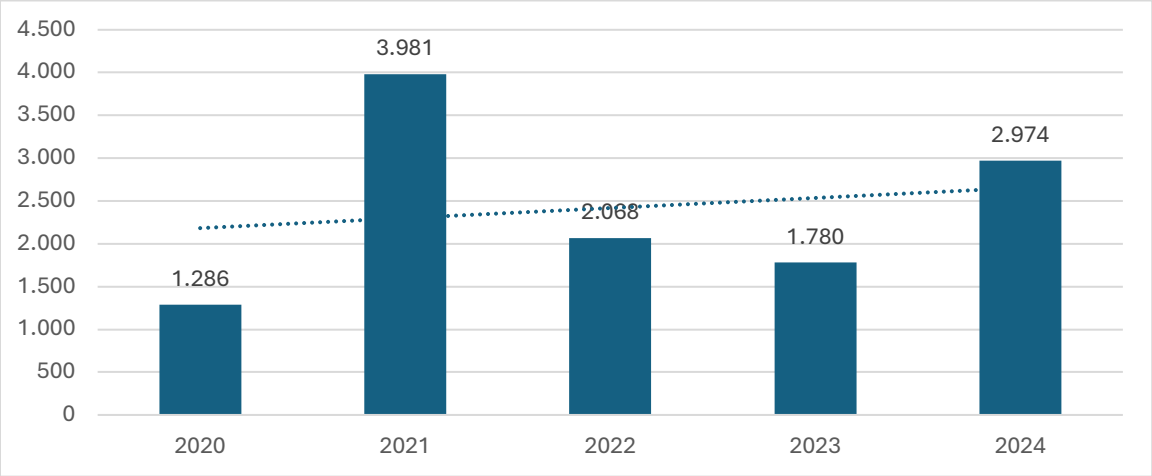
**12) Penanaman Modal**

Dalam kegiatan penanaman modal atau investasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Investasi yang masuk ke suatu wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong inovasi dan daya saing daerah. Tersedianya investor sangat diperlukan dalam membentuk modal daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam konteks penanaman modal, terdapat dua jenis investasi berdasarkan asal modal, yaitu:

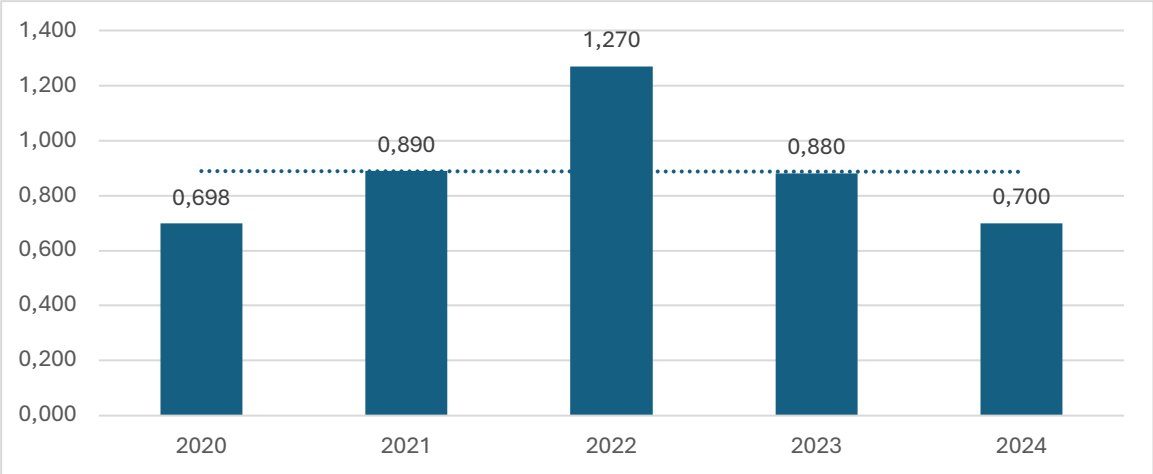
a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) – merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dari sumber dalam negeri untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia.
b. Penanaman Modal Asing (PMA) – merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing. Investasi ini dapat menggunakan modal asing secara penuh atau dalam bentuk kerja sama antara modal dalam negeri dengan modal asing untuk mendirikan dan mengembangkan usaha di Indonesia.

Untuk menilai kinerja sektor investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, dilakukan analisis terhadap nilai realisasi investasi dari PMDN dan PMA dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ini mencerminkan daya tarik daerah bagi investor serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong pertumbuhan investasi. Berikut disajikan data mengenai nilai realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Musi Banyuasin, yang menggambarkan tren perkembangan investasi di daerah ini.




**Gambar 2.43.** Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pergerakan fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2021 menjadi nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin tertinggi dibandingkan tahun lainnya, yakni sejumlah Rp 3.981 triliun.




**Gambar 2.44.** Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin

Selanjutnya berkaitan dengan nilai investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin, data di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi PMA sepanjang tahun 2020 hingga 2024 tidak sebesar PMDN. Nilai realisasi investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin terendah terjadi di tahun 2020 yakni sebesar Rp 0,698 triliun, sedangkan nilai investasi PMA tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp1,270 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi asing di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat sedikit. Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin pun dapat dikatakan masih didominasi oleh PMDN sehingga potensi daerah untuk meningkatkan investasi dari pihak asing perlu dikembangkan.

Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin pun dapat dikatakan masih didominasi oleh PMDN sehingga potensi daerah untuk meningkatkan investasi dari pihak asing perlu dikembangkan.

**Tabel 2.51**
**Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB)**
**Tahun 2020-2024**

| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20.523,03 | 20.456,63 | 21.796,55 | 23.104,34 | 25.451,72 |

*Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025*
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Tabel di atas menampilkan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan gambaran tentang investasi di sebuah kabupaten, baik yang tercatat di badan Penanaman Modal maupun investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Tabel di atas

PMTB Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang semakin meningkat. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan minat investasi baik swasta, nasional, maupun asing dan masyarakat cukup tinggi. Investasi yang merupakan motor penggerak perekonomian yang tinggi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk pengembangan ekonomi, baik ekonomi berbasis investasi besar maupun ekonomi lokal.

**13) Kepemudaan dan Olahraga**

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengidentifikasi dan mendefinisikan pemuda sebagai kelompok masyarakat yang terdiri dari individu berusia antara 16 hingga 30 tahun. Rentang usia ini dianggap sebagai fase kritis dalam kehidupan seseorang, di mana terjadi perkembangan fisik, intelektual, emosional, serta sosial yang signifikan. Pengakuan terhadap kelompok pemuda dalam undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan, aspirasi, serta potensi kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Pemuda diharapkan berperan aktif dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan, serta menjadi agen perubahan dalam pembangunan bangsa.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menyusun kebijakan dan program-program strategis yang mendukung pengembangan kapasitas pemuda, meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi

pertumbuhan dan inovasi pemuda. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemuda memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Tabel 2.52**
**Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | 35 | 35 | 34 | 39 | 23 |
| 2. | Jumlah organisasi olahraga yang aktif | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | Jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 4. | Jumlah kegiatan olahraga sesuai kalender kegiatan | 10 | 30 | 6 | 5 | 8 |
| 5. | Persentase penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi muda yang dibina | 41,98 | 91,48 | 98,98 | 120,55 | 97,44 |

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2020–2024, Capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Dari sisi kepemudaan, jumlah organisasi pemuda yang aktif cenderung stabil dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 39 organisasi Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya semangat partisipasi dan pembinaan generasi muda di daerah sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 23 organisasi dikarenakan katagori susunan kepengurusan bukan lagi OKP usia 16-30 tetapi sudah ke ormas, kepengurusan di tingkat pusat sudah tidak aktif lagi, dan pengurus OKP yang sudah di atas umur 16-30 tahun.

Jumlah organisasi olahraga yang aktif pada tahun 2020 sampai 2023 masih tercatat masing-masing sebanyak 2 organisasi aktif, namun pada tahun 2023 dan 2024 jumlahnya bertambah menjadi 3 organisasi. untuk organisasi cabang olahraga yang dibina mengalami peningkatan setiap tahunnya namun organisasi olahraga yang dibina hanya 3 yakni KONI, NPCI dan KORMI.

Dari segi kegiatan, jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan mengalami peningkatan dari 5 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 8 kegiatan pada tahun 2021 dan 2022, namun sedikit menurun menjadi 6 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024. Hal serupa juga terjadi pada kegiatan olahraga yang sempat mengalami peningkatan dari 10 kegiatan pada tahun 2020 meningkat mencapai 30 kegiatan pada tahun 2021, namun kemudian

menurun menjadi 6 kegiatan pada 2022 dan hanya 5 kegiatan pada tahun 2023 sedangkan patahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 8 kegiatan. Sementara itu, persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat provinsi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 41,98 persen pada tahun 2020 menjadi 91,48 persen di tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 98,98 persen dan 120,55 persen pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada tahun 2024 persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda di tingkat provinsi menurun menjadi 97,44, namun pencapaian sebelumnya mencerminkan efektivitas pembinaan generasi muda dalam meraih prestasi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan dalam beberapa aspek organisasi dan kegiatan olahraga, namun aspek pembinaan generasi muda menunjukkan hasil yang positif dalam hal prestasi yang diraih. Pemerintah daerah perlu terus mendorong penguatan kelembagaan serta memfasilitasi kegiatan pemuda dan olahraga agar iklim positif ini dapat berlanjut dan meningkat di tahun-tahun mendatang.

**14) Statistik**

Statistik merupakan salah satu elemen vital dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, karena berperan dalam pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang akurat dan sistematis. Data statistik memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebagai alat yang

menyajikan informasi numerik secara terstruktur, statistik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tren, mengukur dampak kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan statistik yang baik sangat penting dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota, urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang relevan dengan kebutuhan daerah, guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif.

**Tabel 2.53**
**Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Buku Statistik Daerah | 3 | 3 | N/A | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah Buku PDRB Kabupaten | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Jumlah Buku Kabupaten dalam Angka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral | - | 97% | 97,2% | 97,2 | 97,2 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6. | Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Skala Kabupaten | - | 1 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin*

**15) Persandian**

Urusan persandian telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa persandian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini menegaskan bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menjaga keamanan informasi yang bersifat sensitif atau strategis. Persandian merupakan suatu sistem pengelolaan dan pertukaran informasi yang dirancang untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas data yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam era digital saat ini, peran persandian menjadi semakin krusial, mengingat ancaman siber dan kebocoran data dapat berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan serta kepentingan nasional.

**Tabel 2.54**
**Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk | 32,26 | NA | NA | NA | NA |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan | | | | | |
| 2. | Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian | 100 | 100 | 100 | 100 | NA |
| 3. | Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | NA |
| 4. | Persentase Persandian Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah | - | 58,33 | 100 | 100 | NA |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin*

**NA : Indikator tidak digunakan lagi*

### 16) Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi tata kelola pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan berbagai langkah yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia dalam konteks peradaban global. Upaya tersebut mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap warisan budaya, pengembangan potensi budaya, pemanfaatan keberagaman budaya, dan pembinaan kegiatan kebudayaan. Setiap daerah memiliki ciri khas dan

karakteristik yang berbeda dan dipengaruhi oleh lingkungan sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Perubahan sosial di sebuah wilayah akan menghasilkan kesenian yang khas sesuai dengan bentuk masyarakat pada waktu itu, seperti halnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kesenian yang khas.

**Tabel 2.55**
**Jumlah Festival Seni Budaya di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah sanggar seni budaya yang aktif | 5 | 3 | 3 | 39 | 162 |
| 2. | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | 25 | 32 | 2 | 1 | 4 |
| 4. | Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diLestarikan (%) | 29 | 33 | 35 | 35 | 38 |

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin*

### 17) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan rekreasi intelektual bagi masyarakat. Sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan koleksi buku, sumber bacaan, serta pustaka lainnya, perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan literasi dan budaya membaca di tengah masyarakat. Pengelolaan perpustakaan yang

baik bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar lebih aktif mengakses berbagai sumber pengetahuan yang tersedia. Secara garis besar kegiatan urusan perpustakaan terdiri dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan sumber bacaan.

**Tabel 2.56**
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Persentase peningkatan bahan pustaka (%) | 7,37 | 18,19 | 16,58 | 33,66 |
| 2. | Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%) | 2,65 | 0,21 | 2,58 | 5,00 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin*

**18) Kearsipan**

Urusan kearsipan memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Arsip merupakan sumber informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administrasi, tetapi juga sebagai bukti autentik kinerja pemerintah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Dengan pengelolaan arsip yang sistematis, pemerintah dapat menjaga kontinuitas kebijakan, mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari urusan kearsipan adalah memastikan bahwa dokumen atau data yang dihasilkan

oleh berbagai instansi dapat tersimpan dengan baik, mudah ditemukan, dan tetap aman dalam jangka panjang.

**Tabel 2.57**
**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Indeks Pengelolaan Arsip | 91,87 | 68,92 | 63,38 | NA |
| 2. | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Peningkatan SDM pengelola Kearsipan (kegiatan) | - | 4 | 5 | 5 |
| 4. | Persentase arsip statis dan inaktif yang terdata dan tertata dengan baik | 53,84 | 54 | 54 | 56 |
| 5. | Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi | 3 | 4 | 4 | 4 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal. Indeks pengelolaan arsip dari tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2022. Di tahun 2020, indeks pengelolaan arsip mencapai angka 91,87, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 68,92 dan terus menurun di tahun 2022

menjadi 63,38. Indeks pengelolaan arsip yang belum maksimal juga sejalan dengan persentase arsip statis dan inaktif yang ter-data serta tertata dengan baik di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 53,84 persen di tahun 2020. Walaupun persentase layanan arsip berbasis teknologi dan informasi meningkat menjadi 3 persen di tahun 2020, namun hal tersebut belum menunjukkan layanan kearsipan yang maksimal.

## C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan yang tidak bersifat wajib, tetapi menjadi kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola aspek-aspek tertentu sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Fokus layanan pada urusan pemerintahan pilihan biasanya berkaitan dengan bidang-bidang yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa fokus utama dalam layanan urusan pemerintahan pilihan meliputi:

### 1) Perikanan

Urusan perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pemerintah daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi perairan, baik laut maupun perairan darat seperti Sungai, danau, atau rawa. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, menjaga kseseimbangan ekosistem serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

**Tabel 2.58**

**Produkasi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Musi Banyuasin**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Produksi Ikan Tangkap (ribu ton) | 25.101,89 | 23.023,59 | 23.772,81 | 24.032,55 | 24.511,28 |
| Produksi Ikan Budidaya (ribu ton) | 23.996,02 | 25.466,42 | 26.393,89 | 27.321,04 | 12.094,86 |
| Produk Olahan Perikanan (ribu ton) | 207,24 | 95,04 | 177 | 192,8 | 226,23 |
| Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) | 40,52 | 40,73 | 47,5 | 47,64 | 49,00 |

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin*

### 2) Pertanian

Secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB. Dalam kutun waktu 2020 hingga 2024, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB.

**Tabel 2.59**

**Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Tahun | Luas Pertanian Sawah (Ha) | Luas Pertanian Bukan Sawah (Ha) | | | | | | | | Jumlah Luas Pertanian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tegal / Kebun | Ladang / Huma | Perkebunan | Hutan Rakyat | Padang Rumput | Hutan Negara | Sementara tidak diusahkan | Lainnya | |
| **2020** | 47.704 | 43.368 | 19.908 | 449.157 | 100.797 | 543 | 410.815 | 58.416 | 17.983 | 1.192.691 |
| **2021** | 41.339 | 55.161 | 23.709 | 444.925 | 100.797 | 564 | 409.836 | 57.902 | 19.074 | 1.153.307 |
| **2022** | 36.019 | 55.014 | 23.739 | 445.888 | 91.952 | 563 | 409.836 | 57.298 | 19.081 | 1.139.390 |
| **2023** | 36.083 | 55.203 | 23.214 | 446.444 | 91.601 | 546 | 409.836 | 57.407 | 19.095 | 1.426.596 |
| **2024** | 35.015 | 55.200 | 23.307 | 415.715 | 107.789 | 15521 | 409.836 | 57.651 | 19.109 | 1.426.596 |

*Sumber : Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin*

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, luas lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi yang signifikan. Luas pertanian sawah terus menurun, dari 47.704 hektar pada tahun 2020 menjadi 35.015 hektar pada tahun 2024. Tren penurunan ini dapat mencerminkan adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian atau pergeseran pola budidaya pertanian. Sementara itu, sebagian besar kategori lahan pertanian bukan sawah seperti tegal/kebun, ladang/huma, dan terutama perkebunan masih menunjukkan angka yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Perkebunan tetap menjadi penggunaan lahan terbesar, meskipun mengalami penurunan tajam pada tahun 2024, dari 446.444 hektar (2023) menjadi 415.715 hektar (2024).

Sebaliknya, luas padang rumput meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 15.521 hektar dari hanya ratusan hektar pada tahun-tahun sebelumnya, yang berkontribusi besar terhadap lonjakan total luas lahan pertanian. Kategori sementara tidak diusahakan dan lainnya menunjukkan konsistensi relatif, sementara luas hutan negara juga stabil di angka 409.836 hektar sejak tahun 2021. Total luas lahan pertanian yang sebelumnya sempat menurun hingga 1.139.390 hektar pada tahun 2022, kembali meningkat drastis menjadi 1.426.596 hektar pada tahun 2023 dan bertahan pada angka yang sama di tahun 2024. Peningkatan ini diduga kuat dipengaruhi oleh bertambahnya luasan padang rumput dan hutan rakyat.

Secara umum, data ini menunjukkan dinamika penggunaan lahan pertanian yang perlu dicermati secara strategis, terutama terkait efisiensi,

produktivitas, dan upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan alih fungsi lahan dan perubahan iklim.

**Tabel 2.60**
**Produksi Pertanian Tahun 2020-2024**

| No | Produksi (Ton) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Padi | 48,78 | 50,90 | 52,01 | 53,02 | 54,01 |
| 2. | Jagung | 58,91 | 72,95 | 67,00 | 67,05 | 67,50 |

*Sumber : Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin*

Selama periode lima tahun terakhir, produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Produksi padi meningkat dari 48,78 ton pada tahun 2020 menjadi 54,01 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, khususnya komoditas padi, meskipun luas lahan sawah mengalami penurunan dalam periode yang sama. Hal ini dapat mencerminkan perbaikan dalam sistem budidaya, penggunaan varietas unggul, atau penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien. Sementera itu, produksi jagung mengalami fluktuasi. Setelah mengalami lonjakan signifikan dari 58,91 ton (2020) menjadi 72,95 ton (2021), produksinya menurun menjadi 67,00 ton di tahun 2022 dan cenderung stagnan pada 67,05 ton (2023) hingga 67,50 ton (2024). Meskipun tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seperti padi, produksi jagung tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan awal periode.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor tanaman pangan di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya komoditas padi dan jagung, tetap menunjukkan kinerja positif, meskipun terdapat tantangan dari sisi fluktuasi luas lahan dan kondisi iklim yang mungkin memengaruhi hasil produksi. Upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi lahan tetap menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

**3) Kehutanan**

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kehutanan juga merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satu daerah yang memiliki potensi kehutanan yang cukup besar adalah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.477 $km^2$, dengan luas kawasan hutan mencapai 9.378 $km^2$ atau 64,76 persen dari luas wilayah. Kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara, yang masing-masing memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda.

Hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kayu bakar, kayu bahan, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Hutan negara adalah hutan yang dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,

dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, seperti perlindungan, konservasi, produksi, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Hutan negara di Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan konservasi, dan hutan adat.

Data lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024 pada tabel 2.59 menunjukkan bahwa luas Hutan Negara di Kabupaten Musi Banyuasin relatif stabil, yaitu sebesar 409.836 hektar setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024, setelah mengalami sedikit penurunan dari 410.815 hektar pada tahun 2020. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kawasan hutan lindung dan konservasi masih dipertahankan secara konsisten.

Sementara itu, luas Hutan Rakyat mengalami fluktuasi, dari 100.797 hektar pada tahun 2020 dan 2021, luasnya menurun menjadi 91.952 hektar di tahun 2022 dan sedikit lagi ke 91.601 hektar pada 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan menjadi 107.789 hektar, yang kemungkinan besar merupakan hasil dari program rehabilitasi atau perluasan lahan milik masyarakat untuk kehutanan rakyat.

**4) Perkebunan**

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Wilayah ini dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa sawit dan karet, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komoditas unggulan

perkebunan seperti kelapa sawit dan karet mendominasi luas areal tanam dan volume produksi di Kabupaten Musi Banyuasin. Perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola oleh perusahaan besar maupun oleh masyarakat (perkebunan rakyat), terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan besar terdiri dari perkebunan swasta nasional dan swasta asing. Komoditi perkebunan rakyat meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, kopi, gambir, coklat, jambu mete dan lada.

**Tabel 2.61**
**Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2024 (Ha)**

| Luas Areal (Ha) | Jenis Tanaman | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Gambir |
| | 46.129,00 | 8.294,00 | 217.343,00 | 2,50 | 8,00 | 177,00 |

*Sumber : BPS*

Pada tahun 2024, luas areal tanaman perkebunan di daerah ini mencapai total yang sangat signifikan, didominasi oleh tiga komoditas utama: karet, kelapa sawit, dan kelapa. Komoditas karet menjadi tanaman perkebunan dengan luasan terbesar, yaitu mencapai 217.343 hektare, mencerminkan posisi strategis karet sebagai sumber penghidupan utama bagi sebagian besar petani rakyat. Di urutan kedua, kelapa sawit menempati luasan sekitar 46.129 hektare, yang tersebar di berbagai kecamatan dan menjadi komoditas unggulan ekspor dan penggerak ekonomi lokal, baik dari

sisi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, kelapa juga memberikan kontribusi dengan luasan mencapai 8.294 hektare, terutama di wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan kawasan perairan. Komoditas lainnya seperti gambir (177 ha), kakao (8 ha), dan kopi (2,5 ha) masih memiliki luasan terbatas, namun menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif diversifikasi usaha perkebunan. Pengembangan komoditas-komoditas ini dapat diarahkan untuk pasar khusus atau produk olahan bernilai tambah tinggi.

Melihat struktur luasan tersebut, fokus pembangunan sektor perkebunan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas utama, yaitu karet dan kelapa sawit, melalui program peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, serta penguatan kelembagaan petani. Selain itu, penting pula untuk mendorong hilirisasi produk perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil perkebunan.

**Tabel 2.61a**

**Produksi Perkebunan Tahun 2023-2024**

| No | Produksi (Ton) | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 |
| 1. | Kelapa Sawit | 455.067 | 455.066 |
| 2. | Kelapa | 6.350 | 6.348 |
| 3. | Karet | 211.416 | 203.084 |
| 4. | Kopi | 2,35 | 2,50 |
| 5. | Kakao | 2,80 | 2,80 |
| 6. | Gambir | 8,16 | 8,16 |

*Sumber : BPS*

**5) Energi dan Sumber Daya Mineral**

Urusan energi dan sumber daya mineral di tingkat pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan energi yang optimal guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek utama dalam urusan ini adalah pemanfaatan energi listrik yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Oleh karena itu, analisis dalam sektor ini berfokus pada capaian dalam penggunaan listrik di daerah, termasuk tingkat akses masyarakat terhadap listrik di setiap kecamatan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya untuk meningkatkan akses listrik dan memperbaiki infrastruktur listrik di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumber energi yang penting ini.

**Tabel 2.62**
**Banyaknya Keluarga Bukan Pengguna Listrik Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021**

| Kecamatan | Jumlah |
|---|---|
| Sekayu | 822 |
| Lais | 847 |
| Sanga Desa | 165 |
| Tungkal Jaya | 10 |
| Sungai Lilin | 0 |
| Jirak Raya | 16 |
| Babat Supat | 199 |
| Banyu Lencir | 1.035 |

| Kecamatan | Jumlah |
|---|---|
| Lalan | 1.442 |
| Lawang Wetan | 0 |
| Keluang | 60 |
| Plakat TInggi | 1 |
| Batang Hari Hari | 688 |
| Sungai Keruh | 224 |
| Babat Toman | 162 |
| **Total** | **5.671** |

*Sumber : Satudata Muba*

Data tersebut dapat memberikan gambaran tentang kondisi pemenuhan listrik di Kabupaten Musi Banyuasin dengan melihat jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik di setiap kecamatan. Jumlah keseluruhan keluarga bukan pengguna listrik di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 mecapai 5671 keluarga. Dari 15 kecamatan yang ditampilkan pada tabel, Kecamatan Lalan dan Banyu Lencir menjadi kecamatan dengan jumlah keluarga bukan pengguna listrik terbanyak. Jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik dapat mencerminkan tingkat aksesibilitas listrik di berbagai daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Data tersebut dapat mengungkap ketimpangan regional dalam akses listrik. Daerah dengan jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik yang tinggi mungkin mengindikasikan kondisi ekonomi yang kurang baik di wilayah tersebut.

### 6) Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan hasil yang positif dan terus

mengalami peningkatan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Selama lima tahun terakhir, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 4 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin, menjadikannya sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan sektor perdagangan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya aktivitas perdagangan barang dan jasa, perkembangan infrastruktur pasar, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung iklim usaha yang kondusif.

**Tabel 2.63**
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 5,03 | 4,97 | 5,00 | 5,64 | 5,90 |
| 2. | Net Ekspor Barang dan Jasa | -5737,56 Miliar | -2290,48 Miliar | 205,91 Miliar | -4447,92 Miliar | -5217,89 Miliar |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten/Kota, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 sektor ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan sebesar 5,03 persen dan sempat menurun

tipis di tahun 2021 menjadi 4,97 persen. Namun, sejak 2022 tren kontribusi kembali meningkat dari 5,00 persen menjadi 5,64 persen di tahun 2023, hingga mencapai 5,90 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan peran perdagangan yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kinerja net ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020 hingga 2021, posisi net ekspor berada di angka negatif, yaitu masing-masing sebesar -5.737,56 miliar dan -2.290,48 miliar. Kondisi ini sedikit membaik di tahun 2022 dengan mencatatkan nilai positif sebesar 205,91 miliar, yang berarti terjadi surplus ekspor. Namun demikian, capaian tersebut tidak berlanjut karena pada 2023 dan 2024 kembali mengalami defisit cukup besar, yaitu -4.447,92 miliar dan -5.217,89 miliar.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun sektor perdagangan terus tumbuh dalam kontribusinya terhadap PDRB, kinerja ekspor-impor masih menghadapi tantangan besar. Defisit neraca perdagangan menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap barang dan jasa dari luar, sementara peningkatan kontribusi perdagangan lebih banyak ditopang oleh aktivitas konsumsi dan distribusi di dalam negeri.

**Tabel 2.64**
**Jumlah Pasar Tradisional dan Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| Kecamatan | Pasar Inpres | Pasar Kalangan |
|---|---|---|
| Kecamatan Sekayu | 1 | 5 |
| Kecamatan Babat Toman | 0 | 3 |
| Kecamatan Sungai Lilin | 0 | 8 |
| Kecamatan Bayung Lencir | 0 | 3 |
| Kecamatan Tungkal Jaya | 0 | 9 |
| Kecamatan Babat Supat | 0 | 3 |
| Kecamatan Jirak Jaya | 0 | 2 |
| Kecamatan Batang Hari Leko | 0 | 2 |
| Kecamatan Lawang Wetan | 0 | 1 |
| Kecamatan Keluang | 1 | 3 |
| Kecamatan Plakat Tinggi | 0 | 8 |
| Kecamatan Sungai Keruh | 0 | 6 |
| Kecamatan Sanga Desa | 0 | 5 |
| Kecamatan Lais | 0 | 7 |
| Kecamatan Lalan | 0 | 7 |

*Sumber : Satudata Muba*

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sebanyak 74 pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, tidak seluruh pasar tersebut beroperasi setiap hari. Sebagian besar pasar merupakan pasar mingguan, yang hanya buka pada hari-hari tertentu sesuai jadwal yang ditentukan oleh masing-masing wilayah. Hal ini menyebabkan jumlah pasar yang beroperasi secara mingguan lebih banyak dibandingkan dengan pasar yang buka setiap hari. Kondisi ini mencerminkan pola aktivitas ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sistem pasar tradisional berbasis hari tertentu, dan sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah

untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur agar lebih banyak pasar dapat beroperasi secara harian dan mendukung perputaran ekonomi lokal yang lebih stabil.

**Tabel 2.65**
**Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting**
**di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Nama Barang | Daerah Pemasok |
|---|---|
| Sayur Mayur (Cabe, Bawang Merah, Bawang putih, dll) | Palembang, Curup (Bengkulu), dan Jambi |
| Minyak Goreng, Tepung Terigu, Gula dan Telur Ayam | Palembang dan Jambi |
| Beras | Palembang dan Hasil Panen Olahan |
| Daging Ayam | Peternak Lokal dan Palembang |
| Ikan Tawar | Peternak Lokal, Lubuk Linggau dan Palembang |
| Ikan Laut | Palembang |
| Pupuk dan Semen | Palembang |

*Sumber : BPS*

Menurut data hasil tim pemantauan barang kebutuhan pokok dan penting yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagian besar pasokan barang tersebut berasal dari wilayah luar Kabupaten Musi Banyuasin yakni Palembang, Curup (Bengkulu) dan Jambi. Selain itu ada barang kebutuhan pokok hasil produksi lokal, seperti daging sapi dan ayam broiler.

**7) Perindustrian**

Perindustrian memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, menjadikannya sebagai salah satu sektor utama dalam diversifikasi ekonomi lokal. Sektor ini tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Keberadaan industri pengolahan turut memberikan nilai tambah bagi produk lokal serta memperluas peluang ekspor ke pasar nasional maupun internasional.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong pengembangan sektor industri melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penyediaan infrastruktur pendukung, kemudahan perizinan usaha, serta fasilitasi akses terhadap permodalan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri.

**Tabel 2.66**
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 10,95 | 10,69 | 10,73 | 11,69 | 11,92 |
| 2. | Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%) | 0,71 | 0,89 | 3,09 | 2,6 | 3,04 |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin*

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, sektor industri di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kontribusi yang cukup stabil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri terhadap PDRB tercatat sebesar 10,95 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 10,69 persen di tahun 2021. Namun demikian, angka tersebut kembali mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai 11,92 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan peran sektor industri dalam struktur perekonomian daerah.

Dari sisi pertumbuhan, sektor industri juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan industri secara keseluruhan sempat berada di angka rendah yaitu 0,7 persen pada tahun 2020, namun meningkat tajam menjadi 3,09 persen pada tahun 2022. Meskipun sempat melambat ke 2,6 persen pada 2023, pertumbuhan industri kembali naik menjadi 3,04 persen di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong

aktivitas industri pasca-pandemi serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di sektor ini.

**Tabel 2.67**

**Industri yang Tumbuh dan Berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Level | Jenis Komoditi |
|---|---|
| Industri Kecil | Karet gelang, Sarung tangan, Sandal jepit, Cocopeat & Cocofiber, Lidi sawit, Kain jumputan, Pangan, dsb. |
| Idustri Menengah dan Besar | PalembaCPO, Pengolahan Kayu, Karet Mentah, Reparasi Mobil, dsb |

*Sumber : BPS*

Kondisi industri yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk industri kecil, menengah, dan besar, merupakan cerminan dari kondisi sektor perindustrian. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Musi Banyuasin memiliki beragam jenis Industri Kecil yang memproduksi berbagai jenis komoditas seperti karet gelang, sarung tangan, sandal jepit, dan sebagainya. Di samping itu, Industri Menengan dan Besar yang memproduksi komoditas seperti CPO, karet mentah, dan lainnya juga dimiliki oleh kabupaten ini. Pertumbuhan dan perkembangan industri ini juga mampu menggambarkan tingkat investasi, inovasi, dan daya saing ekonomi daerah. Dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi industri lokal, kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan inklusif, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin.

**8) Transmigrasi**

Transmigrasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan penduduk. Pola transmigrasi saat ini tidak lagi bersifat sentralistik atau top-down dari pemerintah pusat, melainkan lebih berbasis kerja sama antara daerah asal dengan daerah tujuan transmigrasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin, program transmigrasi telah memberikan dampak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah tujuan transmigrasi. Berdasarkan data dari Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah penduduk transmigran pada tahun 2023 tercatat sebanyak 185 KK atu 605 jiwa, yang seluruhnya menetap di Kecamatan Sanga Desa.

Jumlah transmigran ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang berkontribusi dalam peningkatan populasi dan dinamika sosial di Kecamatan Sanga Desa. Para transmigran umumnya berperan dalam sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil dan menengah, yang turut membantu mengembangkan perekonomian daerah.

**Tabel 2.68**
**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Transmigrasi Umum (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. | Persentase Pembinaan Warga Transmigran (%) | 100 | 100 | N/A | N/A | 100 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan data capaian kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024, terdapat dua indikator utama yang diukur, yaitu Persentase Transmigrasi Umum dan Persentase Pembinaan Warga Transmigran. Indikator Persentase Transmigrasi Umum menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan secara konsisten sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, indikator Persentase Pembinaan Warga Transmigran juga menunjukkan capaian 100% dari tahun 2020 hingga 2024.

**9) Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Sehingga, dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus

memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat lestari dan berkelanjutan.

**Tabel 2.69**

**Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin**

| No | Nama ODTW | Alamat | Jarak dari Pusat Kota | Jenis ODTW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danau Ufak Lia | Sekayu | ± 7,33 KM | Alam |
| 2 | Sungai Musi | Sekayu | 0 | Alam |
| 3 | Rumah Linmas | Sekayu | 0 | Buatan |
| 4 | Danau Sidoati | Ds. Bailangu, Sekayu | ± 28 KM | Alam |
| 5 | Taman Permata Muba | Sekayu | ± 2,75 KM | Buatan |
| 6 | Waterfront Sekayu | Sekayu | ± 3,94 KM | Buatan |
| 7 | Gelanggang Remaja Sekayu | Sekayu | 0 | Buatan |
| 8 | Stabel Berkuda Sekayu | Sekayu | ± 2 KM | Buatan |
| 9 | Kolam Renang Tina Randik Sekayu | Sekayu | ± 2 KM | Buatan |
| 10 | Water Fun Sekayu | Sekayu | ± 3 KM | Buatan |
| 11 | Taman Selarai Indah | Sekayu | ±7,43 KM | Buatan |
| 12 | Tugu Bintang Sekayu | Sekayu | 0 | Buatan |
| 13 | Taman Terbuka Hjau | Sekayu | ± 2,75 KM | Buatan |
| 14 | Taman Pertanian Terpadu | Jln. Praja Mukti Kel. Soak Baru | ± 3,61 KM | Buatan |
| 15 | Sircuit Sky Land | Jln. Sekayu - Pendopo, Kel. Soak Baru | ± 15.03 KM | Buatan |
| 16 | Taman Agro Inovasi | Jln. Sekayu - Pendopo, Kel. Soak Baru | ± 17,96 KM | Buatan |
| 17 | Masjid Raya Baitul Makmur | Jln. Lingkar Randik, Kel Kayuara | ± 2,74 KM | Buatan |
| 18 | Pantai Bongen | Jln. Merdeka, | ± 3,94 KM | Alam |

| No | Nama ODTW | Alamat | Jarak dari Pusat Kota | Jenis ODTW |
|---|---|---|---|---|
| | Tahunan | Kel. Balai Agung | | |
| 19 | Taman Adipura | Jln. Sekayu — Betung Kel. Kayuara | ± 2,52 KM | Buatan |
| 20 | Makam Dindi Muro Bayo | Sekayu | ± 28 KM | Budaya |
| 21 | Puyang Keramat Burung Jauh Sedekah Bumi | Kec. Sungai Keuh | ± 37 KM | Budaya |
| 22 | Danau Konger | Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh | ± 42 KM | Alam |
| 23 | Goa Bukit Benape | Dusun 4 Sungai Dua Kec. Sungai Keruh | ± 45 KM | Alam |
| 24 | Bukit Pendape | Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh | ± 70 KM | Alam |
| 25 | Tebat Indah Kertajaya | Desa KertaJaya Kec. Sungai Keruh | ± 42 KM | Buatan |
| 26 | Makam Puyang Pekik Nyaring | Desa Sumber Rejeki Kec. Plakat Tinggi | ± 49 KM | Budaya |
| 27 | Danau Cala | Desa Danau Salak Kec. Lais | ± 50 KM | A!am |
| 28 | Tanampo | Desa Teluk Kijing Kec. Lais | ± 32,9 KM | A!am |
| 29 | Danau Kajang | Desa Teluk Kec. Lais | ± 32,9 KM | Alam |
| 30 | Masjid Raya Abdul | Desa Epil Kec. | ± 28 KM | Buatan |

| No | Nama ODTW | Alamat | Jarak dari Pusat Kota | Jenis ODTW |
|---|---|---|---|---|
| | Kadim | Lais | | |
| 31 | Makam Bujang Ranggonang | Sekayu | ± 19 KM | Budaya |
| 32 | Industri Pembuatan Getah Gambir | Kec. Babat Toman | ± 37 KM | Minat Khusus |
| 33 | Taman Toga Mangun Jaya | Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman | ± 50 KM | Buatan |
| 34 | Perkebunan Gambir | Kec. Babat Toman | ± 38 KM | Agro |
| 35 | Embung Senja | Desa Gaja Mati Kec. Babat Supat | ± 15 KM | Buatan |
| 36 | Danau Ujan Mas | Ds. Kemang Kec. Sanga Desa | ± 47 KM | Buatan |
| 37 | Danau Ulak Libok | Ds. Kemang Kec. Sanga Desa | ± 47 KM | Alam |
| 38 | Kolam Renang Az-Zahra | Desa Biji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | ± 90 KM | Buatan |
| 39 | Danau Putih Ex Batu Bara | Kec. Tungkal Jaya | ± 95 KM | Alama |
| 40 | Pemancingan Rawa Kuning | Dusun 2 Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya | ± 51,4 KM | Buatan |
| 41 | Manau Kuning | Kec. Jirak Jaya | ± 53,4 KM | Buatan |
| 42 | Keramat Puyang Dukun | Dusun II Ds.Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko | ± 29 KM | Budaya |

| No | Nama ODTW | Alamat | Jarak dari Pusat Kota | Jenis ODTW |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Danau Siarak | Dusun I Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko | ± 29 KM | Alam |
| 44 | Puyang Janggut | Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko | ± 39 KM | Budaya |
| 45 | Danau Panjang | Dusun I Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko | ± 39 KM | Alam |
| 46 | Keramat Puyang Apul | Dusun I Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko | ± 39 KM | Budaya |
| 47 | Situs Ran Putri | Dusun I Desa Lubuk Buah Kec. Batang Hari Leko | ± 49 KM | Budaya |
| 48 | Keramat Selerang | Dusun I Desa Sungai Napal Kec. Batang Hari Leko | ± 60 KM | Budaya |
| 49 | Assalam Water Fun & Family Park | Sri Gunug Kec. Sungai Lilin | ± 75 KM | Buatan |
| 50 | Water Boom Gunung Sari Jos | Kec. Sungai Lilin | ± 80 KM | Buatan |
| 51 | Sungai BB | Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin | ± 83 KM | Alam |
| 52 | Objek Wisata Alam Rawa Hijau | Kec. Sungai Lilin | ± 78 KM | Buatan |
| 53 | Guci Purbakala | Kes. Bayung | ± 160 KM | Budaya |

| No | Nama ODTW | Alamat | Jarak dari Pusat Kota | Jenis ODTW |
|---|---|---|---|---|
| | Bayung Lencir | Lencir | | |
| 54 | Perkampungan Suku Anak Dalam | Bayung Lencir | ± 200 KM | Budaya |
| 55 | Rumah Rakit Bayung Lencir | Kes. Bayung Lencir | ± 312 KM | Budaya |
| 56 | Embung Desa Cinta Bumi | Desa Mendis Kec. Bayung Lencir | ± 312 KM | Buatan |
| 57 | Danau Kodok | Desa Sari Agung Kec. Lalan | ± 143,8 KM | A!am |
| 58 | Water Boom Lalan | Desa Sari Agung Kec. Lalan | ± 143,8 KM | Buatan |
| 59 | Raın Bow Garden | Karang Tırta Kec. Lalan | ± 143,4 KM | Buatan |
| 60 | Embung Tegal Mulyo | Kec. Keluang | ± 43 KM | Buatan |

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin*

**Tabel 2.70**

**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin**

**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) | 34.187 | 35.056 | 49.335 | 53.198 | 54.745 |
| 2. | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata | 22,59 | 2,54 | 40,73 | 7,88 | 1,03 |
| 3. | Peningkatan Jumlah Objek Wisata | 62 | 62 | 62 | 62 | 67 |

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin*

## D. Fokus Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintahan yang baik harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik pula. Kinerja yang dimaksud berkaitan dengan seberapa baik hasil dari program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah mampu memberikan dampak bagi masyarakat sehingga kepercayaan publik semakin meningkat. Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, upaya reformasi birokrasi menjadi penting untuk dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perbaikan pada berbagai aspek, mulai dari aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik.

Secara umum, kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasinya. Tahun 2024 indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh perdikat BB (Sangat Baik). Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa predikat BB menggambarkan bahwa memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Selain indeks reformasi birokrasi, terdapat berbagai indikator lain yang menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi

Banyuasin, diantaranya mencakup nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK), Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai LPPD).

Pada tahun 2024, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh nilai sebesar 69,07 dengan predikat B, yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara itu, untuk penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023, hingga saat ini hasil evaluasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum dirilis, sehingga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun tersebut.

**1) Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang matang, komprehensif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Langkah awal dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan yang terintegrasi, sinergis dan partisipatif. Artinya, setiap program yang dirancang harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, perencanaan pembangunan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**,** yang berperan sebagai koordinator dalam menyusun kebijakan pembangunan. Bappeda tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan, Bappeda juga menerapkan prinsip monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap berbagai program yang dijalankan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan agar pembangunan

dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Tabel 2.71**
**Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase kelarasan program RKPD dalam RPJMD | 92,78% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional | 91,56% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Program usulan Renja PD yang terakomodir di RKPD | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang mendukung program | 83,42% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | prioritas dan terakomodir di RKPD | | | | | |
| 7. | Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja | 21,53 | 21,68 | 22,28 | 22,81 | NA |

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan perencanaan khususnya dalam aspek keselarasan secara keseluruhan telah mencapai 100 persen. Hal tersebut mencakup keselarasan antara program dalam RKPD dengan RPJMD, keselarasan antara program kabupaten dengan program nasional, keselarasan antara program perangkat daerah dengan RKPD, keselarasan antara program prioritas tahunan dengan program lima tahunan, keselarasan antara program pada rencana strategis OPD dengan rencana kerja OPD, serta keselarasan antara usulan masyarakat dalam Musrenbang dengan program prioritas RKPD.

**2) Keuangan**

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan suatu daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerja keuangan ini tergambar dalam beberapa indikator utama, di antaranya indeks kemandirian Riskal, persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks kemandirian Riskal menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar,

termasuk dari Pemerintah Pusat. Indeks ini terbagi menjadi empat kategori, yakni kategori belum mandiri (0,00-0,24), menuju mandiri (0,25-0,49), mandiri (0,50-0,74), serta sangat mandiri (0,75-1,00). Tahun 2020 hingga 2021, indeks kemandirian Riskal Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat, berturut-turut pada angka 0,155, dan 0,122 dengan kategori belum mandiri. Adapun pada tahun 2022, indeks tersebut mengalami penurunan menjadi 0,113, masih pada kategori belum mandiri. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh rasio PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang relatif masih kecil. Pada tahun 2021, rasio PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 10,75 persen.

Selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja keuangan pula yang masih perlu ditingkatkan khususnya dalam mencapai Kabupaten Musi Banyuasin yang mandiri. Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari 79,75 di tahun 2021 menjadi 76,61 di tahun 2023 pada kategori baik. Selain itu dalam hal pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang tersertifikasi telah telaksanan 100 persen. Secara lebih rinci, capaian kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut**.**

**Tabel 2.72**
**Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Kemandirian Fiskal | 0,115 | 0,122 | 0,113 | 0,097 | 0,16 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 9,99% | 10,75% | NA | 9,70% | 10,48% |
| 3. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | 62.07 | 65.528 | NA | 68,78 | NA |
| 4. | Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Persentase Pencairan dana *on schedule* | 100% | 100% | 100% | 100% | NA |
| 7. | Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan) | 70 | 79,75 | 71,9 | 76,61 | NA |
| 8. | Persentase BMD yang Tersertifikasi | 0,27 | 4,85 | 13,46 | 100% | NA |

*Sumber : BPKAD dan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin*

Dari tabel yang disajikan, terdapat beberapa indikator utama terkait pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dari tahun 2020 hingga 2023. Secara umum, beberapa indikator menunjukkan tren positif, sementara yang lain mengalami fluktuasi atau tidak tersedia di beberapa tahun tertentu. Indeks Kemandirian Fiskal mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap Pendapatan Daerah juga menunjukkan pertumbuhan hingga 2021, meskipun data untuk tahun 2022 tidak tersedia. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengalami kenaikan menjadi 68,78 pada tahun 2023.

Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu kabupaten dengan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFP) berkategori "Sangat Tinggi" berdasarkan PMK Nomor 65 Tahun 2024. Namun disisi lain, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kondisi kemandirian fiskal yang belum mandiri yang artinya meskipun Kabupaten Muba memiliki kapasitas fiskal yang besar (karena banyak menerima dana dari pusat, khususnya dari sektor migas) tetapi secara struktur pendapatan, daerah ini belum mandiri karena belum mampu membiayai sebagian besar pengeluarannya dari sumber PAD sendiri. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Muba dalam 5 tahun terakhir sebesar 7,08%. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja yang bersifat rutin, sementara porsi belanja modal masih relatif rendah. Rata-rata proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah Kab. Muba (2019-2023) sebesar 61,20% dengan alokasi terbesar pada Belanja barang dan jasa sebesar 31,13%. Rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kab. Muba (2019-2023) sebesar 19,54%.

**Tabel 2.72a**
**Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan**
**Tahun 2024**

| PEMERINTAH DAERAH | IKF | KATEGORI |
|---|---|---|
| Provinsi Sumatera Selatan | 0,47 | Menuju Kemandirian |

| PEMERINTAH DAERAH | IKF | KATEGORI |
|---|---|---|
| ***Kab. Musi Banyuasin*** | ***0,16*** | ***Belum Mandiri*** |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 0,10 | Belum Mandiri |
| Kab. Muara Enim | 0,06 | Belum Mandiri |
| Kab. Lahat | 0,05 | Belum Mandiri |
| Kab. Musi Rawas | 0,04 | Belum Mandiri |
| Kab. Ogan Komering Ilir | 0,10 | Belum Mandiri |
| Kab. Banyuasin | 0,17 | Belum Mandiri |
| Kab. OKU Timur | 0,03 | Belum Mandiri |
| Kab. OKU Selatan | 0,02 | Belum Mandiri |
| Kab. Ogan Ilir | 0,11 | Belum Mandiri |
| Kab. Empat Lawang | 0,02 | Belum Mandiri |
| Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0,09 | Belum Mandiri |
| Kab. Musi Rawas Utara | 0,04 | Belum Mandiri |
| Kota Palembang | 0,35 | Menuju Kemandirian |
| Kota Prabumulih | 0,15 | Belum Mandiri |
| Kota Pagar Alam | 0,05 | Belum Mandiri |
| Kota Lubuk Linggau | 0,17 | Belum Mandiri |

*Sumber: Kajian Fiskal Regional Sumsel Tq I2025,KMK*

### 3) Inspektorat

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian

dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Adapun hasil penilaian atas tingkat kematangan atau kualitas penyelenggaraan SPIP itu sendiri tercermin dari nilai maturitas SPIP-nya.

**Tabel 2.73**
**Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Maturitas SPIP | 3,0602 | 2,910 | 2,961 | 2,00 |
| 2. | Kapabilitas APIP | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
| 3. | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | 77,37% | 78% | 90,02% | 90,73% |
| 4. | Persentase PD yang telah menerapkan SPIP | 87,24% | 88 % | 70 % | 48 |

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin*

Sepanjang tahun 2020, maturitas SPIP di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada level 3 (tiga) atau terdefinisi yang berarti instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, dan beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2023, maturitas SPIP menurun

menjadi level 2 atau berkembang yang berarti instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Selain itu, tindakan pimpinan dalam menangani kelemahan belum konsisten.

Selaras dengan maturitas SPIP, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Musi Banyuasin juga berada pada level 2. Kapabilitas APIP itu sendiri menggambarkan kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi dalam mewujudkan peran APIP secara efektif. Secara khusus pada level 2 (dua) atau infrastructure menunjukkan bahwa praktik dan prosedur APIP di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berulang, meskipun belum integrated (level 3), managed (level 4), dan optimizing (level 5).

Dengan demikian secara keseluruhan, kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin memang belum optimal. Namun demikian, upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan terus dilakukan. Hal ini misalnya ditandai dengan sebagian besar OPD telah menerapkan SPIP dan upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dilakukan dengan persentase sebesar 90,73 persen pada tahun 2023. Sementara itu, Persentase Perangkat Daerah (PD)

yang telah menerapkan SPIP menunjukkan lonjakan signifikan pada 2019 (85,13%) dan 2020 (87,24%). Namun, data untuk 2021 dan 2022 tidak tersedia, dan pada 2023 angka ini turun menjadi 48.

**4) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan salah satu urusan penting untuk mendorong SDM Aparatur yang berkualitas. SDM Aparatur yang berkualitas itu sendiri menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Salah satu indikator utama untuk menggambarkan capaian kinerja pada urusan ini yaitu indeks profesionalitas ASN. Indeks ini menggambarkan kualitas ASN pada suatu instansi pemerintah berdasarkan kesesuaian kualiRikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil penilaian dari indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dimulai dari 91-100 (sangat tinggi), 81- 90 (tinggi), 71-80 (sedang), 61-70 (rendah), dan kurang dari 60 (sangat rendah).

**Tabel 2.74**
**Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | NA | 49,76 | 50,8 | 60,93 |
| 2. | Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural | 72,05% | 76% | 76% | 78% |

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3. | Persentase pelanggaran disiplin aparatur | 0,2% | 0,4 % | 0,4 % | 0% |
| 4. | Persentase Penempatan ASN sesuai dengan standar Jabatan | 98,02% | 98,12% | 98,39% | 98,69% |
| 5. | Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan | 78,79% | 84,85% | 84,85% | 90,91% |
| 6. | Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik | 99,81% | 99,80% | 99,16% | 90,69% |
| 7. | Persentase Kasus-Kasus pelanggaran disiplin ASN | 1,07% | 1,52% | 0,91% | 0,59% |
| 8. | Survey Kepuasan ASN | 85,82% | 87,00% | 87,38% | 87,52% |

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin*

Pada tahun 2023, indeks profesionalitas ASN Kabupaten Musi Banyuasin mengalami sedikit kenaikan dari 50,8 di tahun 2022 menjadi 60,93. Perolehan nilai di dua tahun tersebut masih pada kategori sangat rendah yang berarti upaya perbaikan SDM Aparatur di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi isu penting untuk segera ditingkatkan. Kendati demikian dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional. Hal ini ditandai dengan beberapa capaian indikator diantaranya: 72,05 persen pejabat telah mengikuti diklat struktural (2020); persentase pelanggaran disiplin ASN yang

relatif rendah yakni 0,2 persen pada tahun 2020; 98,69 persen aparatur telah ditempatkan sesuai dengan standar jabatannya pada tahun 2023; 90,91 persen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatannya; 90,69 persen ASN memperoleh capaian kerja baik pada tahun 2023; serta hasil survey kepuasan ASN yang baik di angka 87,52 persen.

**5) Penelitian dan Pengembangan**

Fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Litbang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) guna meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian yang sistematis, pemerintah daerah dapat memahami isu-isu yang berkembang, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun program-program yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, fungsi pengembangan berperan dalam inovasi tata kelola pemerintahan dengan memperkenalkan pendekatan baru, teknologi, dan model kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi publik atau pengembangan model ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Di tingkat

daerah, hasil penelitian dan pengembangan ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Dengan pendekatan yang berbasis penelitian, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan mengurangi risiko kebijakan yang tidak efektif.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kapasitas penelitian dan pengembangan, baik melalui kolaborasi dengan akademisi, lembaga riset, maupun sektor swasta. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga proaktif dalam merancang solusi jangka panjang demi kesejahteraan.

**Tabel 2.75**
**Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan | 90 % | 90,3% | 90,2 % | 92 % |
| 2. | Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 3. | Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti | 75% | 90% | 90% | 90,73% |
| 4. | Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi | NA | NA | 0,47 | 1,40 |

*Sumber : Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin*

**6) Pelayanan Perizinan Terpadu**

Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus berbagai jenis izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha maupun kepentingan lainnya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses perizinan di daerah. Di Kabupaten Musi Banyuasin, pelayanan perizinan terpadu dikelola oleh instansi yang bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelayanan ini mencakup berbagai sektor, termasuk perizinan usaha, lingkungan, bangunan, serta izin lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

**7) Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kehidupan demokrasi di daerah. Urusan ini mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan harmonis. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tugas dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan target dan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

**Tabel 2.75a**
**Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | MUBA *zero conflict* | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2. | Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA | NA | NA | NA | 75% | 69% |

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin*

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

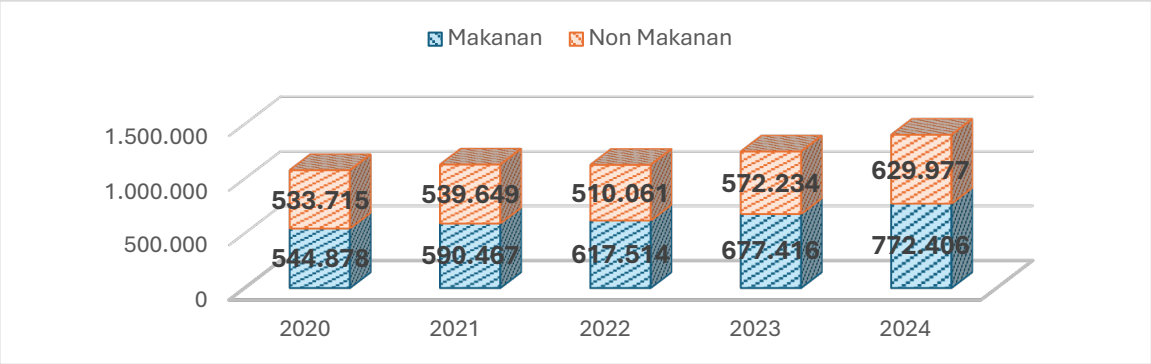
Daya saing daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta kemudahan berusaha.

## A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang kuat, didukung oleh berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, serta energi dan sumber daya mineral.

### 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 sebesar Rp 1.402.383 yang terdiri dari Rp 772.406 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp 629.977 pengeluaran non-makanan.




**Gambar 2.45.** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin

Selama periode 2020 hingga 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik pada komponen makanan maupun non-makanan. Pada tahun 2020, pengeluaran untuk makanan tercatat sebesar Rp544.878, dan meningkat signifikan menjadi Rp772.406 pada tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran untuk non-makanan juga mengalami kenaikan dari Rp533.715 pada tahun 2020 menjadi Rp629.977 pada tahun 2024.

Kecenderungan kenaikan pengeluaran ini juga dapat menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi rumah tangga, serta potensi positif terhadap kontribusi konsumsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

**Tabel 2.76**
**Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| **Total Konsumsi Rumah Tangga** | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 46.515,45 | 48.869,84 | 54.182,5 | 60.759.6 | 65.517,6 |
| b. ADHK (Miliar Rp) | 27.961,97 | 28.786,11 | 30.769,2 | 32.873,0 | 34.624,2 |
| **Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)** | **70,54** | **67,27** | **66,49** | **70,92** | **70,70** |
| **Rata-Rata Konsumsi per Rumah Tangga/Tahun (Ribu Rp)** | | | | | |
| a. ADHB | 307.393,83 | 284.401,47 | 315.003,69 | 345.777,95 | 381.864,22 |
| b. ADHK 2010 | 184.784,59 | 167.522,80 | 176.828,46 | 186.806,89 | 201.804,22 |
| **Rata-Rata Konsumsi per Kapita/Tahun (Ribu Rp)** | | | | | |
| a. ADHB | 74.921,12 | 77.742,21 | 86.101,19 | 94.290,68 | 100.494,81 |
| b. ADHK 2010 | 45.037,56 | 45.792,99 | 48.333,21 | 51.014,41 | 53.108,61 |
| **Pertumbuhan** | | | | | |
| a. Total Konsumsi RT | -1,52 | 2,95 | 5,83 | 7,42 | 5,33 |
| c. Per RT | 2,99 | 1,93 | 3,87 | 6,22 | 8,03 |
| d. Perkapita | 2,99 | 1,93 | 4,82 | 6,13 | 4,11 |

*Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin*
**Angka Sementara*
**Angka Sangat Sementara*

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2024 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan titik tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 70,92 persen. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga selalu meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2020, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin menghabiskan dana sekitar 307.393,83 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat hingga sebesar 381.864,22 ribu rupiah (2024). Pada perkiraan ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga pada tahun 2020 hingga 2024 tumbuh pada kisaran 2 persen sampai dengan 6 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan

kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai, termasuk juga daam hal ini peningkatan kualitas jenis makanan maupun non makanan. Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" berkisar antara 1,68 persen s.d. 5,55 persen pada tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 2,99 persen pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kontraksi sebesar -9,34 persen namun kembali tumbuh positif pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,55 persen, di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 5,64 persen, hingga di tahun 2024 mencapai 8,03 persen.

**2) Nilai Tukar Petani**

Data nilai tukar petani dan nelayan memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi mereka. Kenaikan nilai tukar dapat mengindikasikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, sementara penurunan nilai tukar bisa menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau masalah dalam sektor pertanian dan perikanan. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program-program pengembangan ekonomi yang tepat. Dengan melihat

perubahan nilai tukar seiring waktu, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mereka atau tidak, dan jika tidak, langkah apa yang perlu diambil untuk perbaikan.

**Tabel 2.77**
**NTP-Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100)**

| Bulan | It | Ib | NTP-TP |
|---|---|---|---|
| Januari | 99,78 | 100,97 | 98,83 |
| Februari | 103,01 | 99,73 | 103,29 |
| Maret | 98,4 | 99,64 | 98,75 |
| April | 99,34 | 100,42 | 98,93 |
| Mei | 100,09 | 100,46 | 99,63 |
| Juni | 99,78 | 103,15 | 96,74 |
| Juli | 96,2 | 99,94 | 96,25 |
| Agustus | 103,1 | 96,84 | 106,47 |
| September | 100,18 | 100,1 | 100,08 |
| Oktober | 100,32 | 99,33 | 100,99 |
| November | 100 | 99,58 | 100,42 |
| Desember | 100,11 | 100,63 | 99,48 |
| **Rata-rata** | **100,03** | **100,07** | **99,99** |

*Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin*

**Tabel 2.78**
**NTP-Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100)**

| Bulan | It | Ib | NTPR |
|---|---|---|---|
| Januari | 125,63 | 100,74 | 124,7 |
| Februari | 123,42 | 99,25 | 124,35 |
| Maret | 126,34 | 101,08 | 124,99 |
| April | 127,03 | 101,57 | 125,07 |
| Mei | 116,78 | 100,5 | 116,2 |
| Juni | 120,42 | 102,73 | 117,23 |
| Juli | 113,01 | 100,34 | 112,63 |
| Agustus | 111,22 | 97,35 | 114,24 |
| September | 104,38 | 100,66 | 103,69 |

| Bulan | It | Ib | NTPR |
|---|---|---|---|
| Oktober | 103,53 | 99,34 | 104,22 |
| November | 101,77 | 99,63 | 102,15 |
| Desember | 106,3 | 100,73 | 105,52 |
| **Rata-rata** | **114,99** | **100,33** | **114,58** |

*Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin*

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara harga yang diterima petani untuk produk pertanian yang dihasilkan dengan harga yang dibayarkan petani untuk input-input produksi pertanian. Kegunaannya dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai indikator penting untuk mengukur kesejahteraan petani, mengevaluasi efisiensi produksi pertanian, serta merencanakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Berdasarkan tabel di atas, tingkat kesejahteraan petani Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 berada dalam kondisi yang baik dengan rata-rata nilai 99,9 untuk NTP Tanaman Pangan dan 114,58 untuk NTP Perkebunan Rakyat.

## B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur akan membahas mengenai bagaimana gambaran kondisi fasilitas dalam wilayah atau kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melihat kinerja dalam fokus ini, pada bagian-bagian sebelumnya telah dijabarkan mengenai data-data secara spesifik dari masing-masing capaian kinerja per urusan yang relevan dengan pembahasan fokus ini. Sehingga dalam analisis hanya

akan disampaikan mengenai hasil temuan dan bagaimana dampak kondisi ini bagi daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**1) Infrastruktur**

Penjelasan detail mengenai kondisi infrastruktur secara riil di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari masing-masing indikator yang berkaitan dengan kinerja umum, perhubungan, dan penataan ruang sebelumnya. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi secara umum mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang mana hal ini merupakan modal yang sangat penting bagi pergerakan ekonomi, kehidupan masyarakat sosial, dan penyelenggaraan berbagai hal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertama, jika dilihat dari kondisi infrastruktur jalan, dalam data sebelumnya dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi jalan baik di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020-2024 adalah sebesar 59,62 persen, yang berarti kurang dari separuh dari total panjang jalan di daerah ini dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal dan merata, sehingga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Kedua, dilihat dari ketersediaan infrastruktur penunjang pengembangan potensi wilayah. Sebagai daerah tujuan transmigrasi, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin membutuhkan infrastruktur

penunjang moda pergerakan masyarakat yang memadai dan berkualitas, baik untuk mengangkut orang maupun barang, baik antar wilayah maupun antar daerah. Jumlah pelabuhan, bandara, terminal, dan dermaga yang terbatas dan tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.477 km2 dan jumlah penduduk 688.970 jiwa, namun hanya memiliki 2 pelabuhan laut, 1 bandara udara, dan 1 terminal bus. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki beberapa dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, yang mungkin tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencukupi dan merata, sehingga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Kemudian, kualitas pelabuhan, bandara, terminal, dan dermaga yang kurang memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, jumlah orang/barang melalui pelabuhan laut, bandara udara, dan terminal bus di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 62.265, yang berarti relatif rendah dibandingkan dengan potensi dan kebutuhan daerah ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fasilitas, layanan, dan keamanan yang kurang memadai, tarif yang tidak kompetitif, dan jadwal yang tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin

masih belum berkualitas dan memuaskan, sehingga dapat menghambat distribusi dan perdagangan barang dan jasa.

Salah satu indikator lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah infrastruktur, khususnya irigasi, jembatan, dan jalan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 56 daerah irigasi (DIR) yang tersebar di seluruh wilayahnya. Daerah irigasi ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki 3.227 km panjang jembatan yang menghubungkan berbagai desa dan kecamatan. Jembatan ini memudahkan akses transportasi dan mobilitas masyarakat, serta membuka peluang ekonomi dan sosial. Jembatan ini juga berperan penting dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di daerah aliran sungai.

Ketiga, dari infrastruktur sosial, jumlah sekolah, rumah sakit, dan sarana kebudayaan yang terbatas dan belum seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.477 km2 dan jumlah penduduk 688.970 jiwa, namun hanya memiliki 1.057 unit sekolah, 51 unit rumah sakit, dan 1.571 unit sarana kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur sosial di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencukupi dan merata, sehingga dapat menghambat akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kualitas sekolah, rumah sakit, dan sarana kebudayaan yang kurang memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat. Rasio tempat tidur rumah

sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 1,63, yang berarti lebih rendah dari rasio ideal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 2,54. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat.

Terakhir, hanya sekitar 13,86 persen (2023) rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah, yang berarti masih banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Selain itu, akses terhadap sanitasi layak juga belum merata, 83,67 persen (2024) rumah tangga menggunakan fasilitas jamban sendiri, bersama, atau umum, sementara sisanya masih memanfaatkan fasilitas yang tidak memenuhi standar kesehatan, seperti jamban di sungai, sawah, atau ladang. Dari sisi ketersediaan air bersih, sebesar 94,96 persen (2024) rumah tangga telah menggunakan sumber air bersih seperti PDAM, air kemasan, atau air ledeng. Namun, masih terdapat sebagian rumah tangga yang mengandalkan air dari sumber yang kurang higienis seperti sumur, sungai, atau air hujan. Ketimpangan dalam akses terhadap perumahan, sanitasi, dan air bersih ini mencerminkan bahwa infrastruktur sosial dasar di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjamin kualitas hidup, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat.

**2) Potensi Wilayah**

Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan beragam potensi wilayah yang terkait dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur, menciptakan peluang

ekonomi yang beragam. Pertama, sektor perkebunan menjadi potensi utama dengan fokus pada komoditas kelapa sawit dan karet. Musi Banyuasin terus mengembangkan sektor ini, tidak hanya untuk minyak goreng tetapi juga untuk industrial vegetable oil (IVO), menciptakan nilai tambah dan diversifikasi produk. Pada potensi sektor perkebunan ini, potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan dalam hal pembangunan pabrik pengolahan industrial vegetable oil (IVO) dengan teknologi modern dan peningkatan serta perbaikan jaringan jalan dan transportasi untuk memudahkan distribusi hasil perkebunan.

Kedua, sektor pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dengan lahan pertanian pangan seluas 81.059 hektar. Komoditas seperti padi, jagung, dan palawija lainnya menjadi andalan. Dengan program pengembangan lahan pertanian hingga tahun 2036, Musi Banyuasin menargetkan peningkatan lahan pertanian menjadi 125.062 hektar, menciptakan peluang untuk diversifikasi dan peningkatan produksi pangan. potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui pengembangan sistem irigasi modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Serta mendirikan pusat Penelitian Pertanian guna mendukung pembangunan penelitian pertanian untuk inovasi dan pengembangan teknologi pertanian

Ketiga, sektor peternakan di Musi Banyuasin didukung oleh keberadaan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peternak lokal dan daya saing hasil ternak. Peningkatan SDM di sektor ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan produksi peternakan. Melalui potensi wilayah ini dapat dikembangkan infrastruktur dalam pembangunan fasilitas pemrosesan ternak yang modern dan higienis. serta pusat pelatihan dengan upaya peningkatan fasilitas di Sekolah Peternakan Rakyat dan pembangunan pusat pelatihan peternakan.

Keempat, sektor perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dengan tujuh sungai besar dan enam danau yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Peningkatan teknologi dan pendidikan SDM di bidang perikanan dapat membuka peluang baru dan meningkatkan produksi perikanan di wilayah ini. Potensi infrastruktur wilayah yang dapat dikembangkan melalui pembangunan fasilitas pembenihan dan pusat penelitian ikan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan. Serta, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Kelima, ekonomi kreatif menjadi pendekatan inovatif untuk memperkenalkan Musi Banyuasin ke pasar luar. Produk unggulan seperti Gambo Muba dalam kategori eco-fashion menunjukkan potensi besar dalam menarik perhatian pasar. Penggunaan pewarna alami dari limbah getah gambir juga menciptakan keunikan dan nilai tambah pada produk. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur di bidang pembangunan pusat desain dan produksi eco-fashion dengan fasilitas manufaktur yang ramah lingkungan, dan pengembangan pusat kreativitas untuk mendukung inovasi dan kolaborasi dalam industri eco-fashion.

Keenam, sektor pariwisata di Musi Banyuasin memiliki potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Meskipun tidak memiliki pantai atau gunung, keberadaan tujuh sungai besar dan enam danau menciptakan potensi wisata alam yang menarik. Dengan pengelolaan yang baik, potensi pariwisata di Kabupaten ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkatkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan menuju destinasi wisata, serta pembangunan jalur setapak dan transportasi umum, serta pembangunan fasilitas akomodasi, restoran, dan tempat wisata. Secara keseluruhan, potensi wilayah ini menciptakan peluang besar bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk berkembang secara berkelanjutan, memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Perkembangan di berbagai sektor ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

**3) Jasa Pendukung**

Jasa pendukung merujuk pada sektor layanan yang memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi utama. Ini mencakup sektor seperti hotel, restoran, perbankan, dan sejenisnya. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah dan kualitas layanan dalam sektor ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian daerah. Jumlah hotel mencerminkan potensi pariwisata dan investasi di bidang akomodasi, sementara restoran menunjukkan permintaan akan layanan makanan dan minuman. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan menandakan kesehatan sektor keuangan dan tingkat investasi di daerah

tersebut. Dengan memantau dan memperbaiki kualitas layanan dalam sektor ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut tersaji data terkait jumlah hotel, rumah makan, dan perbankan yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 2.79**
**Jumlah Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Jumlah Penyedia Akomodasi | | | |
|---|---|---|---|
| **Akomodasi** | **Jumlah** | **Kamar** | **Tempat Tidur** |
| Hotel | 18 | 559 | 745 |
| Wisma | 4 | 96 | 98 |
| Home Stay | 4 | 44 | 44 |
| Penginapan | 20 | 266 | 286 |
| Losmen | - | - | - |
| Lainnya | 2 | 30 | 30 |
| **Total** | **48** | **995** | **1.203** |
| **Jumlah Hotel Tahun 2020-2024** | | | |
| 2020 | 41 | | |
| 2021 | 41 | | |
| 2022 | 48 | | |
| 2023 | 52 | | |
| 2024 | 48 | | |

*Sumber : BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka*

**Tabel 2.80**
**Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2020-2024**

| Jumlah Rumah Makan/Restoran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | 236 | 235 | 236 | 238 | 238 |

*Sumber : BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka*

Pentingnya jasa pendukung seperti jumlah hotel, restoran, dan perbankan dalam menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada indikasi aktivitas ekonomi sektor layanan.

Pertumbuhan jumlah hotel dan restoran mencerminkan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, jumlah akomodasi di Kabupaten Musi banyuasin sebanyak 48 hotel dan penginapan dengan total kamar 995 kamar. Akan tetapi, jumlah akomodasi yang ada masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan luas daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan jumlah restoran sebanyak 238 buah pada tahun 2024.

**Tabel 2.81**

**Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| Kelompok Bank | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PERSERO | 37 | 31 | 23 | 21 | 21 |
| BPD | - | 22 | 16 | 16 | 11 |
| Bank Swasta | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Bank Asing | - | - | - | - | - |
| Bank Umum Syariah | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| BUS-BPD | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **46** | **60** | **44** | **41** | **36** |

*Sumber : BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka*

Sementara itu, keberadaan institusi keuangan yang solid menunjukkan basis finansial yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, berdasarkan data di atas, jumlah kantor perbankan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup terbatas bahkan mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai 2023. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap perekonomian lokal daerah ini. Jumlah dan kualitas layanan di sektor-sektor ini juga dapat mencerminkan daya tarik investasi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap sektor-sektor ini dapat memberikan

wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Musi Banyuasin.

**4) Potensi Permintaan**

Potensi permintaan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dianalisis melalui berbagai faktor ekonomi yang mencakup pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran khususnya pada poin pengeluaran konsumsi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan indikator lainnya. Data yang tersedia menunjukkan tren positif dalam faktor-faktor ini, memberikan gambaran yang optimis tentang potensi permintaan di wilayah tersebut.

Pertama, pendapatan per kapita di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan, mencerminkan kemajuan ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2024 menjadi Rp142,14 juta. Selanjutnya, pengeluaran per kapita juga menunjukkan tren yang sama dengan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pengeluaran per individu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita pada tahun 2024 mencapai Rp 1.402.382 per kapita/bulan, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran, khususnya pada poin pengeluaran konsumsi, adalah indikator penting lainnya yang mencerminkan potensi

permintaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Peningkatan PDRB konsumsi menunjukkan adanya pertumbuhan dalam pengeluaran untuk barang dan jasa konsumsi. Data terbaru menunjukkan bahwa PDRB konsumsi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 mencapai nilai 92.666,87 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan potensi permintaan. Dengan populasi yang terus bertambah, terdapat peluang untuk pertumbuhan pasar yang lebih besar. Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 mencapai 736,9 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 18,81 persen (BPS, 2024) sehingga dapat menciptakan peluang permintaan baru untuk barang dan jasa. Dengan demikian, melalui analisis faktor-faktor ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi permintaan yang besar, menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peluang investasi yang menarik di berbagai sektor industri dan bisnis.

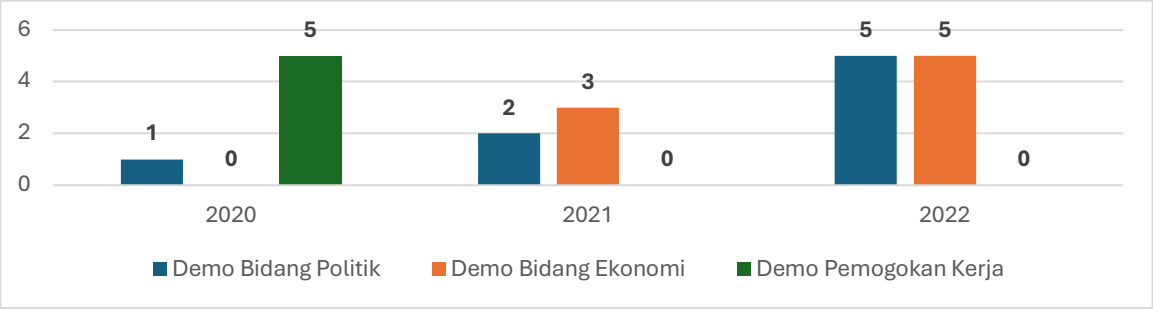
## C. Fokus Iklim Investasi

Pada bagian ini dipaparkan analisis kinerja atas iklim berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup jumlah demonstrasi, serta rata-rata lama perizinan dan jumlah peraturan daerah pendukung usaha.

### 1) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan bentuk kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau hasil keputusan yang ada cenderung tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada grafik di bawah

terlihat bahwa jumlah demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata terjadi lebih dari 5 (lima) kali setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat satu aksi demonstrasi di bidang politik dan lima kasus pemogokan kerja, sementara tidak ada demo di bidang ekonomi. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan aktivitas, dengan dua demonstrasi politik dan tiga demonstrasi ekonomi, namun tidak ada kasus pemogokan kerja. Tren ini terus meningkat di tahun 2022, di mana terjadi lonjakan signifikan demonstrasi di kedua bidang, yakni lima aksi di bidang politik dan lima di bidang ekonomi, meskipun pemogokan kerja tetap tidak terjadi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ketegangan di sektor ketenagakerjaan menurun, aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap isu-isu politik dan ekonomi mengalami peningkatan, mencerminkan partisipasi publik yang semakin aktif terhadap isu-isu strategis di daerah.




**Gambar 2.46.** Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin*

**2) Rata-Rata Lama Perizinan dan Perda Pendukung Iklim Usaha**

Analisis kinerja pada fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat juga dilihat dari indikator rata-rata lama proses

perizinan dan jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Pemberian izin terhadap suatu proses kegiatan atau proyek tertentu di suatu wilayah menjadi kegiatan administrasi yang mendukung tercapainya pelaksanaan investasi di suatu daerah. Kecepatan dan kemudahan dalam pemberian izin dapat mendukung iklim usaha dan investasi semakin meningkat.

Untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin, sejumlah indikator menunjukkan adanya perbaikan dan konsistensi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikator penting adalah lama proses perizinan usaha, yang sejak tahun 2022 hingga 2024 tercatat berlangsung selama tiga hari kerja, mencerminkan adanya efisiensi dalam pelayanan administrasi perizinan. Selain itu, sejak tahun 2022, telah ditetapkan satu Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha, dan jumlah ini tetap konsisten hingga tahun 2024. Keberadaan regulasi yang mendukung serta percepatan dalam proses perizinan menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah investasi, produktif, dan berdaya saing.

**Tabel 2.82**
**Indikator yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Lama Proses Perizinan | - | - | 3 Hari | 3 Hari | 3 Hari |
| 2. | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | - | - | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda |

*Sumber : DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin*

## D. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah penting untuk memahami kualitas tenaga kerja dan potensi pembangunan di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, analisis ini dapat dilakukan dengan melihat dua indikator utama: rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan.

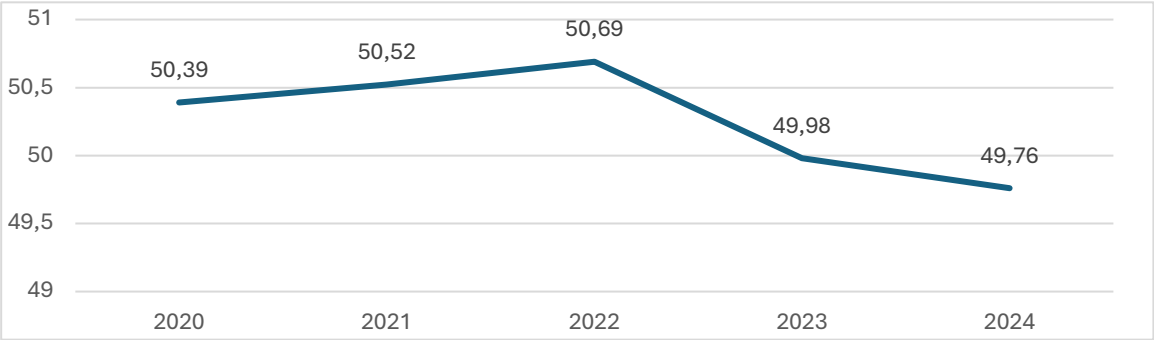
### 1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran signifikan dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menjadi indikator utama terkait lapangan pekerjaan yang menjadi fokus pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, status pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal mencakup berbagai status, seperti pekerja berusaha dengan dukungan buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sementara pekerjaan informal mencakup aspek lain. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2018 hingga 2024, sehingga bagian ini tidak memiliki penjelasan khusus

### 2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau yang dikenal sebagai rasio beban tanggungan adalah angka yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (yang terdiri dari penduduk di bawah 15 tahun atau yang disebut penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun ke atas yang merupakan penduduk tua) dengan jumlah penduduk usia

produktif (di kisaran usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan berfungsi sebagai indikator kasar yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, atau negara.




**Gambar 2.47.** Rasio Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024
Sumber: BPS

Rasio angka beban ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio beban ketergantungan tercatat sebesar 50,39, kemudian mengalami peningkatan tipis menjadi 50,52 pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya sebesar 50,69 pada tahun 2022. Namun, mulai tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 49,98 dan kembali turun menjadi 49,76 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) semakin besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Hal ini dapat menjadi peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah jika potensi tenaga kerja usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### 2.1.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/*SDG*)

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar tata kelola pelaksanaan.

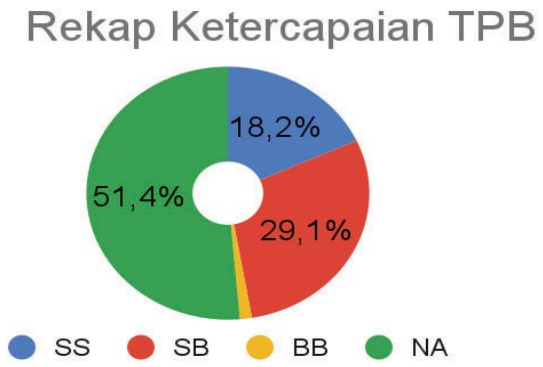
Berdasarkan data analisis pada Laporan KLHS RPJMD Kab. Musi Banyuasin, diperoleh dari analisis ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Musi Banyuasin menghasilkan 4 (lima) klasifikasi data. Klasifikasi pertama adalah indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SS), yang kedua adalah indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), Ketiga adalah indikator TPB belum terlaksana dan belum mencapai target nasional (BB), dan keempat adalah indikator TPB yang tidak atau belum tersedia datanya (NA). Indikator TPB yang telah mencapai target perlu dipertahankan kinerjanya, sedangkan untuk indikator TPB yang belum ada data perlu dilakukan pengelolaan data capaian agar dapat terukur capaiannya.

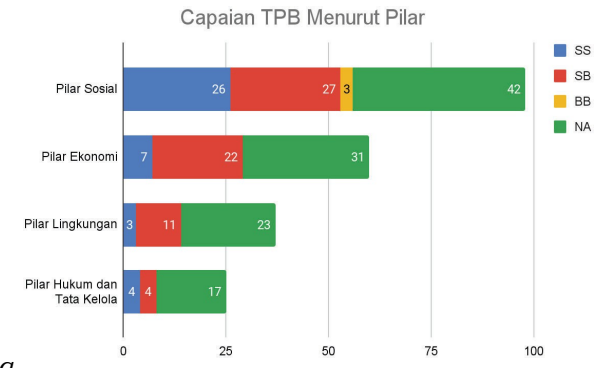
Penelaahan dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dengan data TPB Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga diperoleh klasifikasi data sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB);
4. Indikator TPB yang tidak atau belum ada data (NA).

Hasil analisis terhadap 220 indikator TPB menunjukan bahwa capaian indikator TPB Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 40 indikator atau 18,2%, selanjutnya untuk capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional terdapat 64 indikator atau 29,1%. Capaian paling sedikit merupakan indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 3 indikator atau 1,4%, berbanding terbalik dengan indikator TPB yang belum ada data (NA) terdapat 113 indikator atau 51,4%. Komposisi Capaian TPB Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




*Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

Tabel 2.83 berikut ini menjelaskan tentang capaian indikator TPB di Kabupaten Musi Banyuasin:

**Tabel 2.83**

**Capaian Indikator TPB Kabupaten Musi Banyuasin**

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 1 | TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN) | | |
| Target 1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | SB | Dinas Sosial |
| Target 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas | NA | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | SB | Dinas Sosial |
| Target 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | SS | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | SS | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | SB | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | SB | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1 (f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan | SB | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat | SS | Dinas Pendidikan |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat | SS | Dinas Pendidikan |
| 1.4.1 (i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat | SB | Dinas Pendidikan |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | SB | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | SB | Dinas Sosial |
| Target 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | SB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | NA | Dinas Sosial |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus | NA | Dinas Pendidikan |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | SS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Target 1.a | Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | | |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | NA | BAPELITBANGDA |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah | NA | BAPELITBANGDA |
| TPB 2 | TANPA KELAPARAN ( MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | | |
| Target 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | NA | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan | NA | Dinas Ketahanan Pangan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | SB | Dinas Kesehatan |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe | NA | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan | SB | Dinas Ketahanan Pangan |
| Target 2.4 | Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. | | |
| 2.4.2001 | Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | NA | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| TPB 3 | KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA) | | |
| Target 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) | SS | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | SB | Dinas Kesehatan |
| Terget 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2.(a) | Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1.000 orang | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun | SB | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi | SB | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri | NA | Dinas Kesehatan |
| Target 3.5 | Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | | |
| 3.5.1(b) | Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(c) | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(d) | Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir | NA | Kepolisian |
| Target 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern | NA | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR) | NA | Dinas Kesehatan |
| Target 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan | SB | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | SB | Dinas Kesehatan |
| Target 3.9 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah | | |
| 3.9.3 (a) | Proporsi kematian akibat keracunan | NA | Dinas Kesehatan |
| Target 3.a | Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun | SB | Dinas Kesehatan |
| Target 3.b | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 3.c | Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan | NA | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 4 | PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA) | | |
| Target 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika | NA | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | NA | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | NA | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat | SS | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat | SB | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. | SB | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1 (g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun | SB | Dinas Pendidikan |
| Target 4.2 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | BB | Dinas Pendidikan |
| Target 4.3 | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | | |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. | SB | Dinas Pendidikan |
| 4.3.1.(b) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi | BB | Dinas Pendidikan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 4.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan | | |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | NA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Target 4.5 | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | | |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi | NA | Dinas Pendidikan |
| Target 4.6 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | SS | Dinas Pendidikan |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | SS | Dinas Pendidikan |
| Target 4.a | Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak | | |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | NA | Dinas Pendidikan |
| Target 4.c | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas | | |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik | SS | Dinas Pendidikan |
| TPB 5 | KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN) | | |
| Target 5.1 | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | SS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.2 | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya | | |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | SS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | SB | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | BB | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.3.1.(c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | SS | Dinas Pendidikan |
| Target 5.5 | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | NA | Sekretariat Dewan |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | SB | Sekretariat Dewan |
| Target 5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | | |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Target 5.b | Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | | |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 6 | AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA) | | |
| Target 6.1 | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | SB | Dinas Permuk |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | SB | PDAM |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | SB | PDAM |
| Target 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | NA | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | SB | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | SB | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | NA | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | NA | Dinas Pekerjaan Umum |
| Target 6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | | |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja | NA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 6.3.2.(a) | Kualitas air danau | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 6.4 | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. 60 | | |
| 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri = cakupan pelayanan irigasi | NA | Dinas Pertanian |
| Target 6.5 | Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | | |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | NA | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air | NA | Dinas Pekerjaan Umum |
| TPB 7 | ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU | | |
| Target 7.1 | Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi | NA | PLN |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita | NA | PLN |
| TPB 8 | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA) | | |
| Target 8.1 | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | SS | Badan Pusat Statistik |
| Target 8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | NA | Badan Pusat Statistik |
| Target 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | NA | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Target 8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja | NA | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | SB | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.5.2.(a) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | SB | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Target 8.6 | Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | SB | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Target 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | SB | Dinas Pariwisata |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | SB | Dinas Pariwisata |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | SS | Dinas Pariwisata |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata | NA | Bappenda |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | NA | Badan Pusat Statistik |
| Target 8.10 | Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik | | |
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | NA | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) | NA | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| TPB 9 | TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI) | | |
| Target 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan nasional | SS | Dinas Perhubungan |
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol | SB | Dinas Perhubungan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api | SB | Dinas Perhubungan |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | SB | Dinas Perhubungan |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis | SB | Dinas Perhubungan |
| Target 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan | | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Target 9.3 | Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | | |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri | NA | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Target 9.5 | Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | | |
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | NA | Dinas Pendidikan |
| Target 9.c | Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | | |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet (pengakses) | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| TPB 10 | TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA) | | |
| Target 10.1 | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 40 | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini | SS | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | SB | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(c) | Jumlah Desa Tertinggal | SB | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri | SB | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | SB | BAPELITBANGDA |
| Target 10.2 | Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik | | |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas | NA | Dinas Sosial |
| Target 10.3 | Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | | |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil | SB | Dinas Sosial |
| 10.3.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). | NA | Kepolisian |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 10.3.1.(c) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | NA | Sekretariat Daerah |
| Target 10.4 | Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | SB | Dinas Sosial |
| TPB 11 | KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN) | | |
| Target 11.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | | |
| 11.1.1(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | NA | Dinas Sosial |
| Target 11.4 | Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | | |
| 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | NA | Disbudpora |
| Target 11.5 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | SB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | SB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Target 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani = sampah terangkut ke TPA | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 11.b | Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | | |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | SS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| TPB 12 | KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB | | |
| Target 12.4 | Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia | | |
| 12.4.1.(a) | Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU | SS | Bapelitbangda |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.5 | Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.6 | Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14 0 01 | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.7 | Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan | | |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.8 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan | | |
| 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister | NA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| TPB 13 | TUJUAN 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA) | | |
| Target 13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | SS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| TPB 15 | TUJUAN 15: EKOSISTEM DARATAN (MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI) | | |
| Target 15.1 | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan | SB | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 15.3 | Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | | |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.2 | Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global. | | |
| 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.6 | Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik | | |
| 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | | |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| TPB 16 | TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKAT) | | |
| Target 16.1 | Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | NA | Kepolisian |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | NA | Kepolisian |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir | NA | Dinas Sosial |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 16.2 | Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan | SS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 16.3 | Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | | |
| 16.3.1.(a) | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi | NA | Kepolisian |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi | NA | Kepolisian |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 16.5 | Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) | SS | Inspektorat Daerah |
| Target 16.6 | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui | SB | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | SB | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | SB | Inspektorat Daerah |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | NA | Sekretariat Daerah |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | NA | Inspektorat Daerah |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | NA | Sekretariat Daerah |
| Target 16.7 | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | SS | Sekretariat Dewan |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | SB | Sekretariat Dewan |
| Target 16.9 | Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | SS | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Target 16.10 | Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar | | |
| 16.10.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16.10.2.(b) | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | NA | Sekretariat Daerah |
| Target 16.b | Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan larangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | NA | Sekretariat Daerah |
| TPB 17 | KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 17.1 | Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | SS | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB | SS | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Target 17.6 | Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | | |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Target 17.8 | Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | | |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet | SS | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 17.11 | Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. | | |
| 17.11.1.(a) | Pertumbuhan ekspor produk non migas | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Target 17.17 | Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. | | |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) | NA | BAPELITBANGDA |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) | NA | BAPELITBANGDA |
| Target 17.18 | Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | | |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik | NA | Badan Pusat Statistik |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama | NA | Badan Pusat Statistik |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) | NA | Badan Pusat Statistik |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target | NA | Sekretariat Dewan |
| Target 17.19 | Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | NA | Badan Pusat Statistik |

*Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

**Tabel 2.84**

**Capaian Indikator TPB Kabupaten Musi Banyuasin (Pilar Sosial)**

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 1 | TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN) | | |
| Target 1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | SB | Dinas Sosial |
| Target 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas | NA | Dinas Sosial |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | SB | Dinas Sosial |
| Target 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | SS | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | SS | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | SB | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | SB | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1 (f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan | SB | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat | SS | Dinas Pendidikan |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat | SS | Dinas Pendidikan |
| 1.4.1 (i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat | SB | Dinas Pendidikan |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | SB | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | SB | Dinas Sosial |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | SB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | NA | Dinas Sosial |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus | NA | Dinas Pendidikan |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | SS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Target 1.a | Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | | |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | NA | BAPELITBANGDA |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah | NA | BAPELITBANGDA |
| TPB 2 | TANPA KELAPARAN ( MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | NA | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan | NA | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | SB | Dinas Kesehatan |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe | NA | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | SS | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan | SB | Dinas Ketahanan Pangan |
| Target 2.4 | Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 2.4.2001 | Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | NA | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| TPB 3 | KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA) | | |
| Target 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | SB | Dinas Kesehatan |
| Terget 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2.(a) | Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1.000 orang | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) | SS | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun | SB | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi | SB | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri | NA | Dinas Kesehatan |
| Target 3.5 | Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | | |
| 3.5.1(b) | Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(c) | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(d) | Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir | NA | Kepolisian |
| Target 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | NA | Dinas Kesehatan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR) | NA | Dinas Kesehatan |
| Target 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan | SB | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk | SS | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | SB | Dinas Kesehatan |
| Target 3.9 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah | | |
| 3.9.3 (a) | Proporsi kematian akibat keracunan | NA | Dinas Kesehatan |
| Target 3.a | Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun | SB | Dinas Kesehatan |
| Target 3.b | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | SS | Dinas Kesehatan |
| Target 3.c | Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan | NA | Dinas Kesehatan |
| TPB 4 | PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA) | | |
| Target 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika | NA | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI terakreditasi minimal B | NA | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B | NA | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat | SS | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat | SB | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1.(f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. | SB | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1 (g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun | SB | Dinas Pendidikan |
| Target 4.2 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | BB | Dinas Pendidikan |
| Target 4.3 | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | | |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. | SB | Dinas Pendidikan |
| 4.3.1.(b) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) | BB | Dinas Pendidikan |
| Target 4.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan | | |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | NA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Target 4.5 | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi | NA | Dinas Pendidikan |
| Target 4.6 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | SS | Dinas Pendidikan |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | SS | Dinas Pendidikan |
| Target 4.a | Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak | | |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | NA | Dinas Pendidikan |
| Target 4.c | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas | | |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik | SS | Dinas Pendidikan |
| TPB 5 | KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN) | | |
| Target 5.1 | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | SS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.2 | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | SS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | SB | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | BB | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.3.1.(c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | SS | Dinas Pendidikan |
| Target 5.5 | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | NA | Sekretariat Dewan |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | SB | Sekretariat Dewan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | | |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern | NA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Target 5.b | Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | | |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |

*Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

**Tabel 2.85**

**Capaian Indikator TPB Kabupaten Musi Banyuasin (Pilar Ekonomi)**

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 7 | ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU | | |
| Target 7.1 | Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi | NA | PLN |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita | NA | PLN |
| TPB 8 | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA) | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 8.1 | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | SS | Badan Pusat Statistik |
| Target 8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | NA | Badan Pusat Statistik |
| Target 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | NA | Badan Pusat Statistik |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | NA | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Target 8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja | NA | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | SB | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.5.2.(a) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | SB | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Target 8.6 | Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | SB | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Target 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | SB | Dinas Pariwisata |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | SB | Dinas Pariwisata |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | SS | Dinas Pariwisata |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata | NA | Bappenda |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | NA | Badan Pusat Statistik |
| Target 8.10 | Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik | | |
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | NA | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) | NA | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| TPB 9 | TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI) | | |
| Target 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan nasional | SS | Dinas Perhubungan |
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol | SB | Dinas Perhubungan |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api | SB | Dinas Perhubungan |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | SB | Dinas Perhubungan |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis | SB | Dinas Perhubungan |
| Target 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan | | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Target 9.3 | Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | | |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri | NA | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Target 9.5 | Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | | |
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | NA | Dinas Pendidikan |
| Target 9.c | Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | | |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet (pengakses) | SB | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| TPB 10 | TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA) | | |
| Target 10.1 | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 40 | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 10.1.1* | Koefisien Gini | SS | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | SB | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(c) | Jumlah Desa Tertinggal | SB | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri | SB | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | SB | BAPELITBANGDA |
| Target 10.2 | Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik | | |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas | NA | Dinas Sosial |
| Target 10.3 | Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | | |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil | SB | Dinas Sosial |
| 10.3.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). | NA | Kepolisian |
| 10.3.1.(c) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | NA | Sekretariat Daerah |
| Target 10.4 | Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | SB | Dinas Sosial |
| TPB 17 | KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 17.1 | Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | SS | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB | SS | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Target 17.6 | Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | | |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Target 17.8 | Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | | |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet | SS | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Target 17.11 | Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. | | |
| 17.11.1.(a) | Pertumbuhan ekspor produk non migas | SB | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Target 17.17 | Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) | NA | BAPELITBANGDA |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) | NA | BAPELITBANGDA |
| Target 17.18 | Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | | |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik | NA | Badan Pusat Statistik |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama | NA | Badan Pusat Statistik |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) | NA | Badan Pusat Statistik |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target | NA | Sekretariat Dewan |
| Target 17.19 | Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | | |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | NA | Badan Pusat Statistik |

*Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

**Tabel 2.86**

**Capaian Indikator TPB Kabupaten Musi Banyuasin (Pilar Lingkungan)**

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 6 | AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA) | | |
| Target 6.1 | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | SB | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | SB | PDAM |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | SB | PDAM |
| Target 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | NA | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | SB | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | SB | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | NA | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | NA | Dinas Pekerjaan Umum |
| Target 6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | | |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja | NA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 6.3.2.(a) | Kualitas air danau | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 6.4 | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. | | |
| 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri = cakupan pelayanan irigasi | NA | Dinas Pertanian |
| Target 6.5 | Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | | |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | NA | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air | NA | Dinas Pekerjaan Umum |
| TPB 11 | KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN) | | |
| Target 11.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | | |
| 11.1.1(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | NA | Dinas Sosial |
| Target 11.4 | Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | | |
| 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | NA | Disbudpora |
| Target 11.5 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | SB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | SB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Target 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani = sampah terangkut ke TPSA | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 11.b | Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | | |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | SS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| TPB 12 | KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB | | |
| Target 12.4 | Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia | | |
| 12.4.1.(a) | Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU | SS | Bapelitbangda |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.5 | Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.6 | Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional | | |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14 0 01 | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.7 | Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.8 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan | | |
| 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister | NA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| TPB 13 | TUJUAN 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA) | | |
| Target 13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | SS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| TPB 15 | TUJUAN 15: EKOSISTEM DARATAN (MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI) | | |
| Target 15.1 | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.3 | Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | | |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | SB | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.2 | Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global. | | |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.6 | Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik | | |
| 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika | NA | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | | |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | NA | Dinas Lingkungan Hidup |

*Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

**Tabel 2.87**

**Capaian Indikator TPB Kabupaten Musi Banyuasin**

**(Pilar Hukum dan Tata Kelola)**

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| TPB 16 | TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKAT) | | |
| Target 16.1 | Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | NA | Kepolisian |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | NA | Kepolisian |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir | NA | Dinas Sosial |

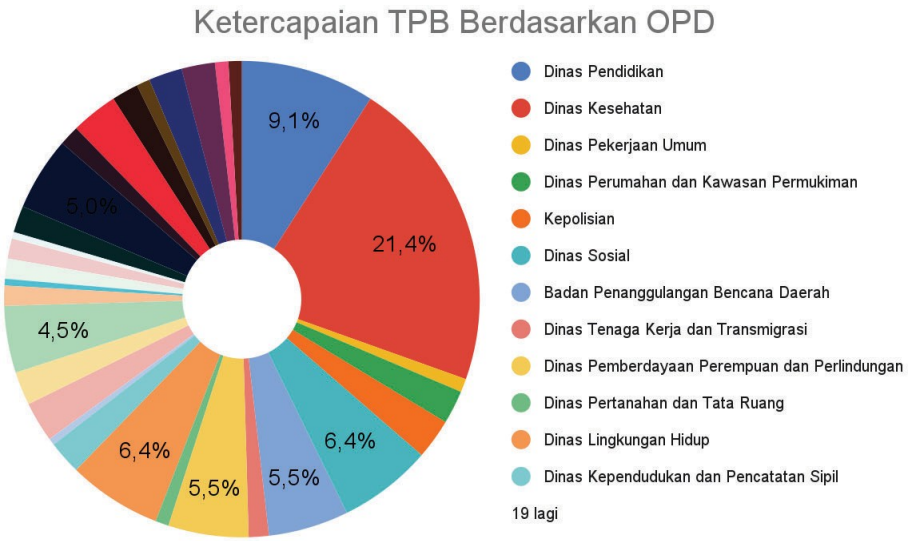
| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 16.2 | Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan | SS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 16.3 | Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | | |
| 16.3.1.(a) | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi | NA | Kepolisian |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi | NA | Kepolisian |
| Target 16.5 | Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) | SS | Inspektorat Daerah |
| Target 16.6 | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui | SB | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | SB | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | SB | Inspektorat Daerah |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | NA | Sekretariat Daerah |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | NA | Inspektorat Daerah |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | NA | Sekretariat Daerah |
| Target 16.7 | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | SS | Sekretariat Dewan |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | SB | Sekretariat Dewan |
| Target 16.9 | Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | SS | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| KODE | INDIKATOR | Status Ketercapaian | OPD/Dinas |
|---|---|---|---|
| Target 16.10 | Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar | | |
| 16.10.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | NA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16.10.2.(b) | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | NA | Sekretariat Daerah |
| Target 16.b | Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | NA | Sekretariat Daerah |

*Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

Berdasarkan hasil analisis pada 36 Perangkat Daerah pada laporan KLHS RPJMD Kab. Muba, terdapat 40 indikator yang sudah dilaksanakan



dan mencapai target, 64 Indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, 3 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 113 indikator tidak terdapat data. Capaian Indikator untuk tiap organisasi perangkat daerah digambarkan melalui diagram berikut:

*Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

Rincian ketercapaian TPB berdasarkan Perangkat Daerah tersebut disajikan pada Tabel 2.88 berikut ini:

**Tabel 2.88**

**Capaian TPB Per Perangkat Daerah**

| No | OPD | SS | SB | BB | NA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 7 | 5 | 2 | 6 | **20** |
| 2 | Dinas Kesehatan | 16 | 13 | 0 | 18 | **47** |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 3 | 0 | 2 | **5** |
| 5 | Kepolisian | 0 | 0 | 0 | 6 | **6** |
| 6 | Dinas Sosial | 1 | 8 | 0 | 5 | **14** |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 3 | 0 | 6 | **12** |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 2 | 0 | 1 | **3** |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | 1 | 0 | 8 | **12** |
| 10 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 4 | 0 | 10 | **14** |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 1 | 0 | 3 | **5** |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 1 | 5 | **6** |

| No | OPD | SS | SB | BB | NA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dinas Perhubungan | 1 | 4 | 0 | 0 | **5** |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | 4 | 0 | 5 | **10** |
| 17 | Dinas Koperasi dan UMKM | 0 | 1 | 0 | 2 | **3** |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 19 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 21 | Dinas Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 22 | Dinas Pariwisata | 1 | 2 | 0 | 0 | **3** |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 1 | 0 | 2 | **3** |
| 24 | Dinas Pertanian | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 25 | Dinas Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 4 | 0 | 0 | **4** |
| 27 | Badan Pusat Statistik | 1 | 0 | 0 | 10 | **11** |
| 28 | Inspektorat | 1 | 1 | 0 | 1 | **3** |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 0 | 5 | **7** |
| 30 | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah | 0 | 2 | 0 | 2 | **4** |
| 31 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| 32 | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 33 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 5 | **5** |
| 34 | Sekretariat DPRD | 1 | 2 | 0 | 2 | **5** |
| 35 | PDAM | 0 | 2 | 0 | 0 | **2** |
| 36 | PLN | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| **Jumlah** | | **40** | **64** | **3** | **113** | **220** |

*Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Muba*

## 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN II

Untuk melihat gambaran kinerja pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II 2025, dapat dilihat dari realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target, tidak memenuhi target maupun yang dibawah target yang telah direncanakan, sesuai sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Kesesuaian antara perencanaan dalam dokumen RKPD 2025 dengan pelaksanaan pembangunan merupakan kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Prioritas-prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan penyelenggaran urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebanyak 126 program. Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.89**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2 |
| 2. | Kesehatan | 1. Dinas Kesehatan<br>2. RSUD Sekayu | 4 |

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 |
| 4. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 9 |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja | 1<br>3 |
| 6. | Sosial | Dinas Sosial | 4 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** sebagai berikut :

**Tabel 2.90**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 2 |
| 2. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 6 |

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 3. | Perhubungan | 1. Dinas Perhubungan<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3<br>1 |
| 4. | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | 9 |
| 5. | Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 4 |
| 6. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 |
| 7. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3 |
| 8. | Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 |
| 9. | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 |
| 10. | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | 3 |
| 11. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3 |
| 12. | Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 |

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 13. | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | 3 |
| 14. | Pertanahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2 |
| 15. | Statistik | 1. Dinas Komunikasi dan Informatika<br>2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan<br>3. Dinas Perkebunan | 1 |
| 16. | Persandian | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 |
| 17. | Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Selanjutnya distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.91**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Pemerintah Pilihan**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian | 1. Dinas Tanaman Pangan, | 5 |

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| | | Holtikultura dan Peternakan<br>2. Dinas Perkebunan | |
| 2. | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan | 4 |
| 3. | Perdagangan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 6 |
| 4. | Perindustrian | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 3 |
| 5. | Pariwisata | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | 3 |
| 6. | Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.92**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | 2 |
| 2. | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 1 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.93**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Perencanaan | Bappeda | 2 |
| 2. | Keuangan | 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah<br>2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 2<br>1 |
| 3. | Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | 1 |
| 4. | Penelitian dan Pengembangan | Bappeda | 1 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.94**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 2 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Kewilayahan** adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.95**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Kewilayahan**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan | Kecamatan dalam Kab. Muba | 5 |

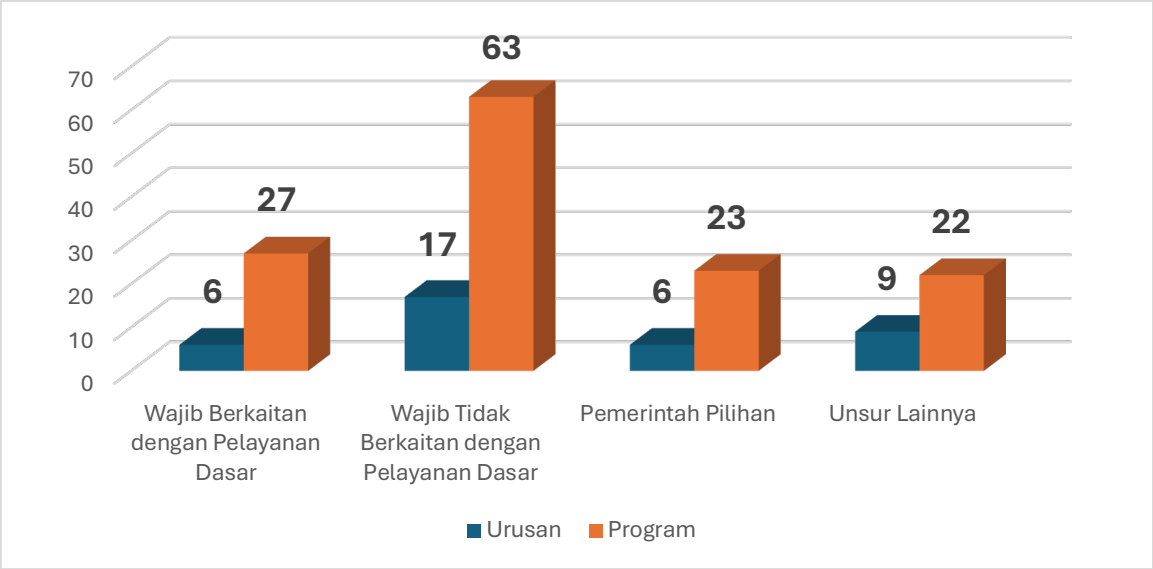
*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Pemerintahan Umum** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.96**
**Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum**

| No | Bidang Urusan | Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|---|
| 1. | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*




**Gambar 2.48.** Distribusi Program-Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan dan Program
Sumber: Evaluasi RKPD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mengukur predikat kinerja masing-masing program dengan metode gradiasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai dengan skala peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.97**

**Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

| No | Intervensi Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

*Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025*

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, dari 126 program yang dilaksanakan diperoleh peringkat kinerja fisik sebagai berikut :

- **0 (nol)** program berpredikat kinerja **sangat tinggi (0,00%)**
- **0 (nol)** program berpredikat kinerja **tinggi (0,00%)**

- **2 (dua)** program berpredikat kinerja **sedang (1,59%)**
- **11 (sebelas)** program berpredikat kinerja **rendah (8,73%)**
- **113 (seratus tiga belas)** program berpredikat kinerja **sangat rendah (89,68%).**

Dari 126 program tersebut, ada 6 program yang pencapaian kinerja dan penyerapan keuangannya masih 0,00%, yakni :

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

   Indikator Kinerja Program : Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani

   Anggaran : Rp. 1.386.001.800,00

   Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

   Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

   Indikator Kinerja Program : Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat

   Anggaran : Rp. 550.000.000,00

Sub Kegiatan : 1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis
2. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
4. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
5. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
6. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Kinerja Program : Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak

Anggaran : Rp. 99.387.200,00

Sub Kegiatan : Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Kinerja Program : Jumlah Koperasi sehat

Anggaran : Rp. 247.357.000,00

Sub Kegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator Kinerja Program : Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya

Anggaran : Rp. 173.292.250,00

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja Program : Jumlah Kemitraan Usaha

Anggaran : Rp. 64.473.300,00

Sub Kegiatan : Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Tahun Anggaran 2025 ada 8 (Delapan) program yang tidak lagi dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 yakni :

1. Program Pengembangan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

   Indikator Program: Persentase sarana dan prasarana permukiman yang ditangani.

   Hal ini dikarenakan Tidak adanya Program Pengembangan Permukiman Tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan karena adanya perubahan sub kegiatan pada program tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana sub kegiatan yang ada pada program tersebut tidak ada/dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Program Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

   Indikator: Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

   Indikator: Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak, Jumlah Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE)

   Dana program peningkatan kualitas keluarga di Tahun Anggaran 2025 : sesuai arahan dari DRPPA Provinsi Sumatera Selatan bahwa di tahun 2025 kegiatan DRPPA tidak dilanjutkan lagi sehingga anggaran kegiatan tersebut di tahun 2025 tidak di anggarkan. Tetapi untuk monev desa yang sudah terbentuk lakukan oleh melalui anggaran kegiatan lain, namun berdasarkan terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa kegiatan DRPPA masih dilanjutkan menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI) maka ditahun 2026 kegiatan

tersebut akan di anggarkan kembali untuk pendampingan dan pembinaan.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)

   Indikator Program: Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan

   Hal ini dikarenakan infrastruktur lantai jemur dan lumbung pangan telah terpenuhi secara merata di setiap kecamatan. Karena keterbatasan dana APBD untuk menganggarkan kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

   Indikator: Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh (Dinas Lingkungan Hidup)

   Indikator: Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH

   Karena SAD dalam wilayah kab.Muba belum termasuk MHA (masyarakat hukum adat) sebab syarat untuk menjadi MHA Ada 3 :

   1. Wilayah
   2. Kelembagaan
   3. Pengakuan berdasarkan simbol atau kekayaan dari masyarakat tersebut.

Untuk sad yg di Muba belum memiliki Kreteria tersebut dari segi wilayah tempat atau perkampungan karena sad ini berada dlm wilayah konsesi (PT. BPP) sad di Bayung Lincir. batanghari Leko (PT REki).

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup)

   Indikator: Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai

   Program ini tidak dilaksanakan lagi terkait dana tranfer desa, soalnya hasil dari penilaian ada dan diberi penghargaan berupa uang dana tranfer daerah tetapi belum bisa dilaksanakan, dulu sudah ada penjelasannya, termasuk juga di Tahun 2025 ada masuk KLHS sehingga dengan dana yg tetap ada beberapa program yg tidak diisi keuangannya atau tidak dilaksanakan tahun 2025.

8. Program Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika)

   Indikator: Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik

   Alasan: Hal ini dikarenakan Tidak adanya Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur pada program tersebut berubah menjadi Program Pengendalian Informasi dan Komunikasi Publik.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel **2.98** berikut ini :

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN**
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**
# TRIWULAN II

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD**<br>**Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah**<br>**Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi**<br>**Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO**<br>**Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba**<br>**Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**<br>**Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP**<br>**Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL** | **99,01** | | **98,33** | **1.565.637.730.052** | | **1.957.799.722.761** | **50,67** | **878.543.587.005** | **50,67** | **44,87** | | **2.443.544.185.367** | | | | |
| | *01.2.01* | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya laporan keuangan, Renja dan Tapkin | 97,48 | 1.190.047.079 | 98,93 | 1.429.137.463,00 | 47 OPD | 1.549.073.729,66 | 52,86 | 559.719.595,00 | 52,86 | 36,13 | | 1.988.857.058,00 | | 1,67 | | |
| | 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan LAKIP, LKPJ dll | 95,78 | 1.149.309.943 | 97,15 | 944.177.654,00 | 47 OPD | 574.658.589,30 | 52,02 | 225.767.771,00 | 52,02 | 39,29 | | 1.169.945.425,00 | | 1,02 | | |
| | 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen laporan BOK di Pkm | 100,00 | 34.947.700 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.01.08 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | 4 OPD | 75.778.100,00 | 36,76 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 01.2.01.09 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | | 25 OPD | 892.365.343,09 | 29,61 | 122.109.861,00 | 29,61 | 13,68 | | 122.109.861,00 | | 0,00 | | |
| | *01.2.02* | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | 100,00 | 856.828.904.746 | 100,00 | 909.686.608.705,00 | 47 OPD | 1.343.594.826.200,49 | 53,56 | 646.679.135.855,00 | 53,56 | 48,13 | | 1.556.365.744.560 | | 1,82 | | |
| | 01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan SPM | 100,00 | 72.608.066 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran | 100,00 | 103.743.882 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *01.2.03* | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya asuransi kendaraan roda 4 (empat) | 100,00 | 2.321.335.777 | 99,69 | 1.223.728.547,00 | 22 OPD | 2.484.107.942,00 | 17,93 | 315.828.372,00 | 17,93 | 12,71 | | 1.539.556.919,00 | | 0,66 | | |
| | 01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100,00 | 163.895.086 | 65,00 | 52.678.400,00 | 2 OPD | 90.873.500,00 | 27,01 | 14.239.035,00 | 27,01 | 15,67 | | 66.917.435,00 | | 0,41 | Dikbud dan Sekretariat Daerah | |
| | *01.2.05* | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | PSH; PSL ; PDH; PSR; batik; pakaian olahraga | 100,00 | 2.019.442.995 | 99,88 | 2.236.095.800,00 | 15 OPD | 450.480.000,00 | 56,03 | 184.863.000,00 | 56,03 | 41,04 | | 2.420.958.800,00 | | 1,20 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 100,00 | 92.921.529 | 100,00 | 49.022.800,00 | 2 OPD | 98.357.000,00 | 8,84 | 8.690.400,00 | 8,84 | 8,84 | | 57.713.200,00 | | 0,62 | Sekretariat Daerah dan Inspektorat | |
| | 01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai | 87,78 | 3.365.707.705 | 91,87 | 4.790.052.245,00 | 44 OPD | 4.235.218.000,00 | 42,74 | 1.423.762.145,00 | 42,74 | 33,62 | | 6.213.814.390,00 | | 1,85 | | |
| | 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Muba | 100,00 | 89.083.738 | | | 1 OPD | 100.493.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100,00 | 1.237.593.826 | | | 1 OPD | 209.640.000,00 | 45,74 | 95.891.340,00 | 45,74 | 45,74 | | 95.891.340,00 | | 0,08 | Disbun dan Sekwan | |
| | *01.2.06* | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan elektronik | 100,00 | 2.697.332.306 | 99,80 | 1.872.708.860,00 | 47 OPD | 1.525.135.687,00 | 33,33 | 370.550.427,00 | 33,33 | 24,30 | | 2.243.259.287,00 | | 0,83 | | |
| | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100,00 | 17.175.948.189 | 98,20 | 20.742.986.121,00 | 45 OPD | 12.887.538.662,94 | 45,03 | 5.492.805.644,84 | 45,03 | 42,62 | | 26.235.791.765,84 | | 1,53 | | |
| | 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya alat rumah tangga kantor dan kebersihan | 100,00 | 2.973.433.589 | 99,97 | 2.887.079.550,00 | 46 OPD | 4.107.444.648,67 | 48,19 | 1.631.247.500,00 | 48,19 | 39,71 | | 4.518.327.050,00 | | 1,52 | | |
| | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 100,00 | 9.259.496.958 | 99,91 | 9.828.984.351,00 | 47 OPD | 5.175.084.447,19 | 46,15 | 1.773.825.300,00 | 46,15 | 34,28 | | 11.602.809.651,00 | | 1,25 | | |
| | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya belanja cetak dan penggandaan | 100,00 | 6.728.264.729 | 98,34 | 6.159.278.298,00 | 48 OPD | 3.737.350.834,88 | 38,30 | 1.192.715.693,00 | 38,30 | 31,91 | | 7.351.993.991,00 | | 1,09 | | |
| | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan majalah | 100,00 | 1.663.226.129 | 99,74 | 1.192.108.850,00 | 46 OPD | 217.022.400,00 | 59,36 | 109.922.419,84 | 59,36 | 50,65 | | 1.302.031.269,84 | | 0,78 | | |
| | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/material | Tersedianya Bahan/Material | | | 100,00 | 40.000.000,00 | 45 OPD | 1.790.311.104,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | | 40.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan dan minum rapat | 98,79 | 14.746.762.255 | 100,00 | 13.932.102.769,09 | 47 OPD | 8.757.815.899,00 | 35,00 | 2.732.829.101,09 | 35,00 | 31,20 | | 16.664.931.870,18 | | 1,13 | | |
| | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah | 100,00 | 29.544.574.132 | 99,85 | 31.379.889.437,00 | 99,85 | 13.369.403.537,10 | 57,39 | 7.180.057.733,00 | 57,39 | 53,71 | | 38.559.947.170,00 | | 1,31 | | |
| | 01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Arsip dinasmis OPD | 100,00 | 37.708.606 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Pengembangan website OPD | 100,00 | 1.039.544.700 | 100,00 | 178.637.000,00 | 100,00 | 134.659.700,00 | 62,87 | 84.659.700,00 | 62,87 | 62,87 | | 263.296.700,00 | | 0,25 | | |
| | *01.2.07* | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (4 Unit) | 100,00 | 851.019.376 | 100,00 | 1.610.595.800,00 | 1 OPD | 2.507.600.000,00 | 100,00 | 2.507.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 4.118.195.800,00 | | 4,84 | | |
| | 01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan | 96,43 | 12.188.063.713 | 100,00 | 13.868.973.504,00 | 6 OPD | 4.955.264.380,00 | 51,43 | 2.379.809.000,00 | 51,43 | 48,03 | | 16.248.782.504,00 | | 1,33 | | |
| | 01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar | | | | 100,00 | 13.061.885.848,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebel untuk kenyamanan kantor | 100,00 | 10.732.132.851 | 94,92 | 6.415.995.471,00 | 44 OPD | 6.381.547.632,90 | 31,07 | 3.214.290.154,00 | 31,07 | 50,37 | | 9.630.285.625,00 | | 0,90 | | |
| | 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Genset (1 unit); vacum cleaner (2 unit); dispenser (10 unit); kipas angin (4 unit) | | | 100,00 | 192.580.000,00 | | | | | | | | | | | Badan Kesbangpol | |
| | 01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pembebasan tanah untuk Pkm Lais dan Ngulak | 100,00 | 1.245.743.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Kesehatan | |
| | 01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Tersedianya gedung kantor yang representatif | 16,71 | 1.794.509.956 | | | 3 OPD | 3.697.379.999,95 | 5,39 | 198.523.000,00 | 0,00 | 5,37 | | 198.523.000,00 | | 0,11 | BP2RD dan DPPKB | |
| | 01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan ( 1 Unit) | 100,00 | 1.153.057.950 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.07.11 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (26 Unit) | 100,00 | 98.120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *01.2.08* | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 100,00 | 6.500.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya telepon, air, listrik, internet dll | 99,95 | 37.318.614.837,00 | 99,96 | 37.584.226.650,00 | 48 OPD | 35.306.564.134,00 | 39,49 | 10.667.442.759,00 | 39,49 | 30,21 | | 48.251.669.409,00 | | 1,29 | | |
| | 01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | 119.696.629,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya honorarium dan gaji non PNS | 100,00 | 190.109.489.254,00 | 100,00 | 173.276.980.492,00 | 48 OPD | 150.401.667.772,50 | 52,15 | 54.830.927.209,00 | 52,15 | 36,46 | | 228.107.907.701,00 | | 1,20 | | |
| | *01.2.09* | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan mobil jabatan; pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 73,22 | 1.027.020.316,00 | 99,64 | 15.799.668.043,00 | 11 OPD | 2.849.425.000,00 | 30,45 | 684.430.437,00 | 30,45 | 24,02 | | 16.484.098.480,00 | | 16,05 | | |
| | 01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya biaya pajak kendaraan, BBM dan pemeliharaan | 100,00 | 14.522.814.644,00 | 99,64 | 15.799.668.043,00 | 40 OPD | 19.160.246.116,00 | 38,77 | 5.734.139.593,00 | 38,77 | 29,93 | | 21.533.807.636,00 | | 1,48 | | |
| | 01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan meja kerja dan meja rapat | 100,00 | 48.630.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00 | 449.580.860,00 | 100,00 | 998.803.605,00 | 3 OPD | 303.199.862,00 | 87,83 | 263.784.400,00 | 87,83 | 87,00 | | 1.262.588.005,00 | | 2,81 | | |
| | 01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rehabilitasi Penataan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu | | | 100,00 | 581.259.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya biaya pemeliharaan dan rehab gedung kantor | 92,89 | 14.896.703.793,00 | 99,88 | 18.714.568.767,00 | 44 OPD | 21.681.832.764,92 | 30,25 | 5.981.265.592,84 | 30,25 | 27,59 | | 24.695.834.359,84 | | 1,66 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor | 99,08 | 3.018.574.107,00 | 99,80 | 4.737.847.462,10 | 38 OPD | 6.484.343.720,00 | 51,97 | 2.289.050.921,84 | 51,97 | 35,30 | | 7.026.898.383,94 | | 2,33 | | |
| | 01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 100,00 | 2.251.408.649,00 | 100,00 | 518.865.051,00 | 9 OPD | 606.174.286,00 | 44,39 | 217.541.205,00 | 44,39 | 35,89 | | 736.406.256,00 | | 0,33 | | |
| | *01.2.10* | *Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Terlaksananya pelayanan BLUD | 98,51 | 223.846.942.021,80 | 89,14 | 214.239.066.575,73 | 3 RSUD; 28 Pkm | 245.486.489.000,00 | 41,89 | 98.446.590.899,33 | 41,89 | 40,10 | | 312.685.657.475,06 | | 1,40 | | |
| | *01.2.11* | *Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan khusus, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian | 30,00 | 91.880.625 | 100,00 | 54.734.400,00 | 2 Orang/ Bulan | 357.788.640,00 | 4,17 | 56.618.024,00 | 4,17 | 15,82 | | 111.352.424,00 | | 1,21 | | |
| | 01.2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | PSL (12 stel); PDH (12 stel); Batik daerah (13 stel) dan seragam Pramuka (11 stel); PSR (12 stel) | 100,00 | 349.000.000 | 100,00 | 388.520.000,00 | 1 Paket / 60 Stel | 397.080.000,00 | 15,00 | 42.500.000,00 | 15,00 | 10,70 | | 431.020.000,00 | | 1,24 | Sekretariat Daerah | |
| | 01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100,00 | 600.000.000 | 100,00 | 590.000.000,00 | 2 Orang/ Bulan | 600.000.000,00 | 100,00 | 600.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 1.190.000.000,00 | | 1,98 | | |
| | *01.2.12* | *Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 100,00 | 5.974.556.621 | 100,00 | 5.908.415.665,00 | 12 Paket | 4.411.817.948,00 | 26,29 | 1.015.021.071,00 | 26,29 | 23,01 | | 6.923.436.736,00 | | 1,16 | | |
| | 01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah | 100,00 | 523.154.517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 35,00 | 412.058.789,00 | 35,00 | 27,47 | | 412.058.789,00 | | 0,79 | Sekretariat Daerah | |
| | 01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 100,00 | 1.834.343.122 | 100,00 | 2.118.307.346,00 | 12 Paket | 1.317.974.000,00 | 35,89 | 386.704.610,00 | 35,89 | 29,34 | | 2.505.011.956,00 | | 1,37 | | |
| | *01.2.13* | *Penataan Organisasi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 100,00 | 5.974.556.621 | 100,00 | 638.512.667,00 | 48 Dokumen | 450.704.550,00 | 5,59 | 18.742.000,00 | 5,59 | 4,16 | | 657.254.667,00 | | 0,11 | Sekretariat Daerah | |
| | 01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 100,00 | 523.154.517 | 100,00 | 555.816.718,00 | 48 Laporan | 305.748.000,00 | 42,98 | 91.970.000,00 | 42,98 | 30,08 | | 647.786.718,00 | | 1,24 | Sekretariat Daerah | |
| | 01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 100,00 | 1.834.343.122 | 100,00 | 806.714.045,00 | 48 Dokumen | 599.058.792,50 | 40,00 | 87.049.001,00 | 40,00 | 14,53 | | 893.763.046,00 | | 0,49 | | |
| | 01.2.13.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 100,00 | 301.744.466,00 | 3 Dokumen | 182.794.360,00 | 85,00 | 144.593.686,00 | 85,00 | 79,10 | | 446.338.152,00 | | | Sekretariat Daerah | |
| | *01.2.14* | *Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 100,00 | 1.735.292.000 | 100,00 | 1.795.418.457,00 | 24 Laporan | 2.352.420.000,00 | 15,65 | 368.100.000,00 | 15,65 | 15,65 | | 2.163.518.457,00 | | 1,25 | | |
| | 01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 100,00 | 2.447.692.829 | 100,00 | 3.062.209.015,00 | 108 Laporan | 2.300.693.706,00 | 62,16 | 1.430.201.410,00 | 62,16 | 62,16 | | 4.492.410.425,00 | | 1,84 | Sekretariat Daerah | |
| | 01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 100,00 | 258.640.500 | 100,00 | 241.508.660,00 | 2 Laporan | 222.178.205,69 | 3,84 | 8.528.100,00 | 3,84 | 3,84 | | 250.036.760,00 | | 0,97 | | |
| | *01.2.15* | *Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Gaji dan tunjangan DPRD | 100,00 | 33.321.577.677 | 100,00 | 26.813.378.437,00 | 45 orang | 26.547.804.780,00 | 50,00 | 12.177.456.667,00 | 50,00 | 45,87 | | 38.990.835.104,00 | | 1,17 | | |
| | 01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | PSH (90 stel); PSR, PDH, pakaian adat, pakaian olahraga @ (45 stel) | 100,00 | 765.875.680 | 100,00 | 1.014.250.000,00 | 6 Paket | 1.113.750.000,00 | 69,65 | 775.698.750,00 | 69,65 | 69,65 | | 1.789.948.750,00 | | 2,34 | Sekretariat DPRD | |
| | 01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jasa pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | 42,22 | 54.741.009 | 22,22 | 22.274.742,00 | 45 orang | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.274.742,00 | | 0,41 | | |
| | *01.2.16* | *Layanan Administrasi DPRD* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 100,00 | 5.288.573.384 | 100,00 | 5.983.300.356,00 | 10 Laporan | 6.347.760.575,00 | 34,52 | 2.191.200.353,00 | 34,52 | 34,52 | | 8.174.500.709,00 | | 1,55 | Sekretariat DPRD | |
| | 01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 100,00 | 2.498.249.436 | 100,00 | 2.514.957.074,00 | 12 Paket | 2.604.479.480,00 | 50,00 | 1.123.128.480,00 | 50,00 | 43,12 | | 3.638.085.554,00 | | 1,46 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **50,67** | **44,87** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **2** | **1.01.02** | **Program Pengelolaan Pendidikan** | **Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI**<br>**Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs**<br>**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**<br>**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B**<br>**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**<br>**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B**<br>**Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs**<br>**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**<br>**Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs**<br>**Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)** | **99,85** | **280.390.337.495** | **99,85** | **279.312.602.478** | | **180.028.899.731,00** | **41,36** | **72.003.487.550** | **41,36** | **40,00** | | **260.140.743.598** | | | | |
| | *1.01.02.2.01* | ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | SDN Bumi Kencana Kec. SungaiLilin; SDN Tungkal Makmur Kec. Tungkal Jaya; SDN Simpang Bondon Kec. Bayung Lencir; SDN 1 Bayung Lencir | 100,00 | 4.619.984.480,00 | | | 3 Ruang | 3.364.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas baru | Pembangunan RKB (13 paket), penambahan ruang kelas (23 paket), | 100,00 | 20.381.307.290,00 | 100,00 | 14.322.180.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 99,72 | 2.079.864.000,00 | 100,00 | 3.729.503.000,00 | 1 Ruang | 635.566.000,00 | 46,97 | 298.516.000,00 | 46,97 | 46,97 | | 4.028.019.000,00 | | 1,94 | | |
| | 1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 100,00 | 81.625.000,00 | 100,00 | 3.730.080.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah/SD | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 99,34 | 1.116.733.000,00 | 100,00 | 5.080.688.000,00 | 3 Ruang | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.080.688.000,00 | | 4,55 | | |
| | 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 99,45 | 14.363.083.000,00 | 99,33 | 14.549.415.000,00 | 11 Unit | 5.262.836.000,00 | 38,55 | 2.028.836.000,00 | 38,55 | 38,55 | | 16.578.251.000,00 | | 1,15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Rehabilitasi ruang kelas (21 paket); rehab rumah dinas kepala sekolah, rehab rumah penjaga sekolah @ (1 unit) | 99,77 | 11.939.282.000,00 | 100,00 | 18.333.571.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 100,00 | 49.601.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 100,00 | 129.119.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana, rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya | | | 100,00 | 586.671.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 100,00 | 1.343.935.630,00 | 100,00 | 4.176.228.000,00 | | 2.037.060.000,00 | 7,25 | 147.760.000,00 | 7,25 | 7,25 | | 4.323.988.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Buku tulis (82.912 buku), seragam siswa (5.385 stel) | 100,00 | 1.976.698.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 99,90 | 34.964.378.000,00 | 100,00 | 4.292.850.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terlaksananya hasil penilaian untuk SD | 100,00 | 138.729.000,00 | 100,00 | 385.630.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.24 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terpenuhinya belanja operasional SMPN 6 Unggul Sekayu Terpenuhinya hasil penilian untuk Sekolah Menengah Pertama (15 Kecamatan) | 100,00 | 1.740.692.083,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | 100,00 | 663.475.400,00 | 35 Peserta Didik | 362.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 663.475.400,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pendidik dan Tenaga pependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100,00 | 174.790.000,00 | 100,00 | 1.418.010.648,00 | 40 Orang | 843.333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.418.010.648,00 | | 8,11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 100,00 | 20.610.000,00 | 100,00 | 832.330.600,00 | 479 Satuan Pendidikan | 318.852.000,00 | 25,00 | 5.985.000,00 | 25,00 | 1,88 | | 838.315.600,00 | | 40,68 | | |
| | 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 100,00 | 84.043.983.000,00 | 100,00 | 91.354.400.000,00 | 479 Satuan Pendidikan | 75.062.692.000,00 | 50,00 | 36.326.880.000,00 | 50,00 | 48,40 | | 127.681.280.000,00 | | 1,52 | | |
| | 1.01.02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 100,00 | 374.794.000,00 | 100,00 | 323.089.500,00 | 1004 Orang | 298.991.850,00 | 100,00 | 291.565.550,00 | 100,00 | 97,52 | | 614.655.050,00 | | 1,64 | | |
| | 1.01.02.2.01.31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 100,00 | 687.282.000,00 | 100,00 | 13.549.030.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 1.01.02.2.01.46 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | | 12 Paket | 335.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.47 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | | 9 Ruang | 5.723.245.200,00 | 12,19 | 697.859.000,00 | 12,19 | 12,19 | | 697.859.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.48 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.50 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | | 1 Paket | 265.951.800,00 | 16,37 | 43.526.800,00 | 16,37 | 16,37 | | 43.526.800,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.51 | Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | 5 Ruang | 5.655.242.750,00 | 48,95 | 2.768.042.000,00 | 48,95 | 48,95 | | 2.768.042.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.01.55 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | | 1 Paket | 3.714.497.000,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.01.02.2.02* | ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | 98,83 | 872.027.000,00 | 100,00 | 1.599.477.000,00 | 1 Unit | 1.107.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.599.477.000,00 | | 1,83 | | |
| | 1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | | 99,74 | 8.858.990.000,00 | 100,00 | 5.921.007.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | 99,41 | 743.281.000,00 | 100,00 | 1.156.146.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (1 Paket) | | | 100,00 | 2.146.435.000,00 | 1 Ruang | 148.701.000,00 | 100,00 | 148.701.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 2.295.136.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 99,60 | 602.459.000,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 100,00 | 6.345.105.000,00 | 99,43 | 7.851.040.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 99,63 | 3.193.915.000,00 | 100,00 | 5.581.564.000,00 | 165 Unit | 1.946.741.000,00 | 30,65 | 596.741.000,00 | 30,65 | 30,65 | | 6.178.305.000,00 | | 1,93 | | |
| | 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 99,77 | 11.939.282.000,00 | 99,99 | 3.992.552.000,00 | 127 Ruang | 1.068.073.050,00 | 14,03 | 149.886.000,00 | 14,03 | 14,03 | | 4.142.438.000,00 | | 0,35 | | |
| | 1.01.02.2.02.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 99,88 | 4.336.438.000,00 | 100,00 | 291.057.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.21 | Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 100,00 | 532.961.000,00 | 1 Unit | 1.599.000.000,00 | 12,45 | 199.000.000,00 | 12,45 | 12,45 | | 731.961.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | 1 Unit | 680.613.000,00 | 29,19 | 198.663.000,00 | 29,19 | 29,19 | | 198.663.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 100,00 | 798.736.000,00 | 100,00 | 3.648.048.800,00 | 1260 Unit (Kursi) 1260 Unit (Meja) | 2.520.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.648.048.800,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Buku tulis (83.902 buku), seragam siswa (5.950 stel) | 100,00 | 2.170.679.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 98,45 | 4.746.539.000,00 | 100,00 | 234.795.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terlaksananya hasil penilaian untuk SMP (158 sekolah); belanja operasional SMPN 6 Unggul Sekayu | 100,00 | 1.740.692.083,00 | 100,00 | 1.400.843.644,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100,00 | 294.439.740,00 | 100,00 | 474.873.600,00 | 1040 Peserta Didik | 354.341.000,00 | 40,00 | 4.630.000,00 | 40,00 | 1,31 | | 479.503.600,00 | | 1,63 | | |
| | 1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100,00 | 713.037.510,00 | 100,00 | 1.462.955.700,00 | 1563 Orang | 474.101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.462.955.700,00 | | 2,05 | | |
| | 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 100,00 | 315.340.560,00 | 100,00 | 382.572.400,00 | 160 Satuan Pendidikan | 1.495.795.000,00 | 24,45 | 168.062.800,00 | 24,45 | 11,24 | | 550.635.200,00 | | 1,75 | | |
| | 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 100,00 | 35.916.794.815,00 | 100,00 | 43.646.300.000,00 | 174 Satuan Pendidikan | 36.269.458.000,00 | 50,00 | 17.855.420.000,00 | 50,00 | 49,23 | | 61.501.720.000,00 | | 1,71 | | |
| | 1.01.02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 32,36 | 46.444.000,00 | 100,00 | 120.521.400,00 | 346 Orang | 110.573.700,00 | 100,00 | 110.337.700,00 | 100,00 | 99,79 | | 230.859.100,00 | | 4,97 | | |
| | 1.01.02.2.02.44 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.45 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.58 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | | 280 Satuan Pendidikan | 527.871.850,00 | 74,69 | 394.272.000,00 | 74,69 | 74,69 | | 394.272.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.59 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | | 3 Ruang | 1.756.866.531,00 | 18,71 | 328.662.950,00 | 18,71 | 18,71 | | 328.662.950,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.62 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | | 5 Paket | 145.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.02.64 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.67 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | | 11 Paket | 3.896.877.000,00 | 35,56 | 1.314.902.000,00 | 35,56 | 33,74 | | 1.314.902.000,00 | | 0,00 | | |
| | *1.01.02.2.03* | ***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | 12 | 13 |
| | 1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | 100,00 | 771.144.750,00 | 97,44 | 3.746.765.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 98,66 | 2.198.194.000,00 | 100,00 | 1.404.330.000,00 | 6 Unit | 1.009.473.000,00 | 9,85 | 99.473.000,00 | 9,85 | 9,85 | | 1.503.803.000,00 | | 0,68 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 84,75 | 908.224.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.07 | Pengadaan Mebel Paud | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | 100,00 | 47.600.000,00 | | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.600.000,00 | | | | |
| | 1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 100,00 | 25.000.000,00 | 100,00 | 40.425.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 100,00 | 100.000.000,00 | 100,00 | 200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100,00 | 168.130.000,00 | 100,00 | 364.750.000,00 | 70 orang | 270.244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 364.750.000,00 | | 2,17 | | |
| | 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 100,00 | 75.775.400,00 | 100,00 | 40.425.000 | 460 Satuan Pendidikan | 1.000.136.150,00 | 40,00 | 375.905.000,00 | 40,00 | 37,59 | | 416.330.000,00 | | 5,49 | | |
| | 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 100,00 | 10.351.403.500,00 | 100,00 | 200.000.000,00 | 482 Satuan Pendidikan | 11.271.013.000,00 | 50,00 | 5.620.506.500,00 | 50,00 | 49,87 | | 5.820.506.500,00 | | 0,56 | | |
| | 1.01.02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bop Paud | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (20 orang) | | | 100,00 | 364.750.000,00 | 20 Orang | 44.958.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 364.750.000,00 | | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 1.01.02.2.03.28 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.30 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | | 10 Ruang | 995.142.000,00 | 59,80 | 595.142.000,00 | 59,80 | 59,80 | | 595.142.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.03.45 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | 1 Unit | 198.440.000,00 | 100,00 | 198.440.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 198.440.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.03.46 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | | | | | 2 Paket | 3.601.763.000,00 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.03.47 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | | | 460 Satuan Pendidikan | 104.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.03.51 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | 10 Ruang | 487.622.250,00 | 58,98 | 287.622.250,00 | 58,98 | 58,98 | | 287.622.250,00 | | 0,00 | | |
| | *1.01.02.2.04* | *Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | | 100,00 | 3.018.719.654,00 | 100,00 | 3.347.010.186,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 1.01.02.2.04.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | | 13 Satuan Pendidikan | 218.666.800,00 | 50 | 92.000.000,00 | 50,00 | 42,07 | | 92.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | | 12 Satuan Pendidikan | 1.402.300.000,00 | 50 | 656.150.000,00 | 50,00 | 46,79 | | 656.150.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.01.02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | 100 Orang | 11.490.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **41,36** | **40,00** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **1.02.02** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Prevalensi stunting pada balita**<br>**Angka kematian ibu**<br>**Angka kematian bayi**<br>**Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama**<br>**Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna**<br>**Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat**<br>**Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas**<br>**Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit**<br>**Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan**<br>**Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana**<br>**Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan**<br>**Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular**<br>**Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular**<br>**Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi**<br>**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)**<br>**Persentase ketersediaan obat essensial**<br>**Persentase ketersediaan BMHP**<br>**Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat** | **100** | **158.124.867.272,00** | | | | **125.109.557.027,00** | **30,64** | **30.532.307.984,00** | **30,64** | **24,40** | | **147.440.297.607** | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | *1.02.02.2.01* | *Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | 100,00 | 22.668.285.750,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas | Puskesmas rawat inap Bandar Tenggulang Kec. Babat Supat | 100,00 | 154.012.500,00 | 97,34 | 3.246.322.400,00 | | | | | | | 3.246.322.400,00 | | 21,08 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.01.04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 100,00 | 393.220.000,00 | 100,00 | 1.968.665.100,00 | 3 Unit | 30.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.665.100,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 100,00 | 7.821.315.800,00 | | | 2 Unit | 17.000.000.000,00 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | | 4 Unit | 2.100.000.000,00 | 52,33 | 1.049.998.950,00 | 52,33 | 50,00 | 1.049.998.950,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.08 | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (2 unit) | | | 100,00 | 9.480.287.800,00 | | | | | | | 9.480.287.800,00 | | 0,00 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (1 unit) | | | 100,00 | 2.544.353.200,00 | 2 Unit | 1.968.725.400,00 | 23,63 | 465.236.800,00 | 23,63 | 23,63 | 3.009.590.000,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 100,00 | 1.767.926.600,00 | 2 Unit | 998.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767.926.600,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.11 | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | | | 100,00 | 293.839.000,00 | 4 Unit | 898.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.839.000,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Mobil jenazah (1 unit); ambulance dan karoseri (4 unit); stetoscope (50 bh); bed pasien manual (30 bh) | 100,00 | 4.661.794.508,00 | 92,09 | 5.992.957.921,00 | | | | | | | 5.992.957.921,00 | | 1,29 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 98,72 | 5.573.073.444,00 | 100,00 | 21.721.371.150,00 | 1 Unit | 538.094.084,00 | 81,42 | 438.094.084,00 | 81,42 | 81,42 | 22.159.465.234,00 | | 0,00 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | 100,00 | 86.660.000,00 | | | | | | | 86.660.000,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Anti hipertensi (5 jenis); antibiotik (18 jenis); branded (25 jenis); krim anti jamur/ fungi dan kortikosteroid (7 jenis); diabetes mellitus (11 jenis); saluran pencernaan (15 jenis); obat gigi (3 jenis); hipertensi esensial (6 jenis); ISPA (46 jenis); obat jiwa, salap dan cream @ (6 jenis); larutan dan injeksi, multivitamin dan mineral @ (32 jenis); myalgia, vaksin dan serum @ (11 jenis) | 100,00 | 9.339.806.563,00 | 100,00 | 4.945.809.000,00 | | | | | | | 4.945.809.000,00 | | 0,53 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | BMHP : BTI DBD, covid 19, RDT combo DBD, RO BMHP dan BPH screening, test narkoba multi drug @ (1 jenis); cadridge TCM (4.050 pieces); IVA test (3 item); mouth piece (2 item); PKM (55 item) | 100,00 | 3.263.922.917,00 | 100,00 | 5.310.760.984,00 | | | | | | | 5.310.760.984,00 | | 1,63 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | | 100 Unit | 149.939.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100,00 | 231.000.000,00 | 100 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.22 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas | 100,00 | 164.185.000,00 | | | 1 Unit | 5.221.743.650,00 | 4,25 | 221.743.650,00 | 4,25 | 4,25 | 221.743.650,00 | | 1,35 | | | |
| | 1.02.02.2.01.23 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | | 5 Paket | 13.184.209.000,00 | 59,45 | 5.170.508.122,00 | 59,45 | 39,22 | 5.170.508.122,00 | | 0,00 | | | |
| | 1.02.02.2.01.25 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 1.02.02.2.01.26 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | | | 1 Paket | 135.690.000,00 | 35,00 | 105.040.950,00 | 35,00 | 77,41 | | 105.040.950,00 | | 0,00 | | |
| | *1.02.02.2.02* | *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Tercapainya SPM pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan menurunkan kasus kematian ibu dan kasus kematian neonatus (100%); peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan maternal dan neonatal (28 pkm); petugas kesehatan dilapangan yang berkualitas sesuai SPM pelayanan kesehatan (112 orrg); ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (14.479 org); ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (13.378 org); bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (13.084 org) | 94,07 | 744.188.160,00 | 85,05 | 1.868.845.391,00 | 6 kegiatan | 1.732.774.276,00 | 18,93 | 114.042.000,00 | 18,93 | 6,58 | | 1.982.887.391,00 | | 2,66 | | |
| | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pelayanan bersalin normal (2.457 kasus); resiko tinggi (428 kasus) | 80,04 | 564.860.665,00 | 100,00 | 35.876.000,00 | | 280.541.000,00 | 47,49 | 121.370.000,00 | 47,49 | 43,26 | | 157.246.000,00 | | 0,28 | | |
| | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 44,60 | 181.340.442,00 | 100,00 | 47.054.840,00 | | 90.411.600,00 | 30,00 | 6.105.600,00 | 30,00 | 6,75 | | 53.160.440,00 | | 0,29 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Imunisasi lanjut balita, imunisasi lengkap, imunisasi bumil dan WUS | 97,43 | 903.355.617,00 | 74,53 | 569.725.328,00 | | 113.319.000,00 | 37,59 | 35.007.405,00 | 37,59 | 30,89 | | 604.732.733,00 | | 0,67 | | |
| | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pembinaan penerapan pelayanan kesehatan anak usia sekolah melalui penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala; pembinaan pelayanan kesehatan peduli remaja | 96,11 | 1.247.406.985,00 | 78,76 | 791.959.000,00 | | 1.386.720.339,00 | 12,34 | 46.864.313,00 | 12,34 | 3,38 | | 838.823.313,00 | | 0,67 | | |
| | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pembinaan pelayanan usia reproduksi dan KB | 93,59 | 284.204.830,00 | 87,79 | 406.916.000,00 | | 32.965.000,00 | 45,00 | 5.439.359,00 | 45,00 | 16,50 | | 412.355.359,00 | | 1,45 | | |
| | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Peserta yang mengikuti seminar *careGiver* | 59,72 | 355.589.910,00 | 84,99 | 426.943.600,00 | | 111.760.000,00 | 9,14 | 1.740.000,00 | 9,14 | 1,56 | | 428.683.600,00 | | 1,21 | | |
| | 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Peserta yang mengikuti seminar *careGiver* | 100,00 | 48.800.000,00 | 100,00 | 37.755.000,00 | | 33.016.000,00 | 45,00 | 2.947.560,00 | 45,00 | 8,93 | | 40.702.560,00 | | 0,83 | | |
| | 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Tidak Menular, Pembekalan Kader Posbindu | 100,00 | 45.687.356,00 | 100,00 | 632.455.000,00 | | 14.130.000,00 | 20,00 | 3.670.488,00 | 20,00 | 25,98 | | 636.125.488,00 | | 13,92 | | |
| | 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Pelayanan kesehatan pada ODGJ | 100,00 | 38.660.000 | 94,04 | 275.756.000,00 | | 492.086.000,00 | 16,38 | 23.862.800,00 | 16,38 | 4,85 | | 299.618.800,00 | | 7,75 | | |
| | 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis | 69,61 | 246.387.280,00 | 96,89 | 466.104.000,00 | | 537.540.000,00 | 15,54 | 35.776.300,000 | 15,54 | 6,66 | | 501.880.300,00 | | 2,04 | | |
| | 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100,00 | 183.980.000,00 | 94,83 | 517.685.019,84 | 18156 Orang | 35.430.000,00 | 54,25 | 19.079.298,00 | 54,25 | 53,85 | | 536.764.317,84 | | 2,92 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Pelayanan kesehatan pada penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 60,89 | 593.196.011,00 | 58,43 | 21.520.000,00 | | | | | | | | 21.520.000,00 | | 0,04 | | |
| | 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 100,00 | 3.615.150.532,00 | 96,37 | 237.355.000,00 | 1 Dokumen | 71.922.000,00 | 20,00 | 10.232.300,00 | 20,00 | 14,23 | | 247.587.300,00 | | 0,07 | | |
| | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk; Rembuk *Stunting*; pembinaan kader pembangunan manusia; pengukuran dan publikasi stunting; pencatatan dan pelaporan intervensi dan hasil; orientasi tatalaksana asuhan gizi buruk petugas di Pkm; pembinaan manajemen suplementasi gizi | 97,18 | 2.285.512.226,00 | 81,88 | 1.166.703.822,00 | | 4.207.126.974,00 | 10,92 | 76.332.000,00 | 10,92 | 1,81 | | 1.243.035.822,00 | | 0,54 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pembentukan dan pembinaan pos UKK; pengukuran jamaah haji | 91,44 | 412.799.008,00 | 88,96 | 175.820.558,00 | | 343.931.573,00 | 17,86 | 17.313.283,00 | 17,86 | 5,03 | | 193.133.841,00 | | 0,47 | | |
| | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 89,42 | 712.422.166,00 | 90,49 | 774.670.549,00 | | 538.408.843,00 | 19,86 | 54.474.584,00 | 19,86 | 10,12 | | 829.145.133,00 | | 1,16 | | |
| | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 96,64 | 1.309.955.304 | 79,16 | 1.008.330.540,00 | 29 Dokumen | 560.871.322,00 | 63,27 | 273.343.748,00 | 63,27 | 48,74 | | 1.281.674.288,00 | | 0,98 | | |
| | 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 100,00 | 40.350.000,00 | 100,00 | 45.229.404,00 | 1 Dokumen | 13.704.800,00 | 70,00 | 8.688.168,00 | 70,00 | 63,40 | | 53.917.572,00 | | 1,34 | | |
| | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Bimtek Surveilance Aktif ke RSUD; mengantar spesimen suspek campak, AFP dan keracunan pangan ke Kab; P.E penyakit berpotensial KLB Pkm ke desa; SKD KLB Kab ke Pkm; verifikasi rumors penyakit potensial KLB dan penyakit PD31 | 94,17 | 123.578.700,00 | 73,64 | 312.867.181,00 | | 640.099.640,00 | 14,92 | 27.760.000,00 | 14,92 | 4,34 | | 340.627.181,00 | | 2,76 | Dinas Kesehatan | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Orientasi dan implementasi Perda KTR ke Kec dan PKM; pembentukan Posbindu; peningkatan kapasitas tenaga kesehatan program INDRA; OJT program Iva ke PKM | 100,00 | 61.554.760,00 | 100,00 | 48.945.000,00 | | 192.808.727,00 | 11,39 | 5.600.000,00 | 11,39 | 2,90 | | 54.545.000,00 | | 0,89 | | |
| | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Pelayanan jesehatan jiwa dan NAPZA | 91,57 | 236.502.200,00 | 89,67 | 160.380.000,00 | | | | | | | | 160.380.000,00 | | 0,68 | | |
| | 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Penyuntikan vaksin haji; pembinaan kesehatan CHJ; intervensi PIS-PK petugas Kab; pembinaan manajemen PKM | 100,00 | 90.041.481,00 | 100,00 | 60.000.000,00 | | | | | | | | 60.000.000,00 | | 0,67 | | |
| | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Edukasi dan motivasi pasien TB MDR untuk memulai pengobatan atau mangkir pengobatan; *fogging* nyamuk; supervisi sistem pelaporan TB-HIV dan bimbingan teknis program *triple* eliminasi Pkm dan RSUD Kab. Muba; bimtek layanan PDP, HIV-AIDS; penjaringan kasus HIV-AIDS dan PIMS pada klinik swasta/DPM yang merupakan wilayah persinggahan; supervisi layanan alat TCM pada 4 Faskes layanan TCM; bimtek deteksi dini kasus kusta pada Pkm tidak ada kasus kusta; PE dan verifikasi rumors penyakit menular; PE dan verifikasi rumors penyakit potensial KLB dan keracunan pangan Kab ke Pkm dan desa; bimtek untuk peningkatan kapasitas petugas Pkm dalam pengendalian DBD | 98,31 | 4.448.726.042,00 | 85,41 | 4.453.924.893,00 | | 2.370.508.757,00 | 20,65 | 260.985.257,00 | 20,65 | 11,01 | | 4.714.910.150,00 | | 1,06 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 100,00 | 53.255.246.662,00 | 99,73 | 38.246.059.731,00 | 1 Dokumen | 42.192.823.200,00 | 35,00 | 13.582.840.816,00 | 35,00 | 32,19 | | 51.828.900.547,00 | | 0,97 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Telah terpantaunya Deteksi Dini Penyalagunaan Nafza di Fasyankes dan Sekolah sesuai standar | 100,00 | 3.125.000,00 | 94,81 | 193.595.000,00 | | | | | | | | 193.595.000,00 | | 61,95 | | |
| | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | 0,00 | 26,19 | 16.070.000,00 | 696 Paket | 436.284.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.070.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 100,00 | 185.940.051,00 | 100,00 | 127.519.933,00 | 1 Dokumen | 41.927.900,00 | 50,00 | 20.406.600,00 | 50,00 | 48,67 | | 147.926.533,00 | | 0,80 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Headset*, *webcam*, EKG dan laptop @ (2 unit); USG (1 unit) | 100,00 | 481.657.266,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Belanja jasa tenaga perawat, bidan, petugas radiologi, petugas farmasi, petugas kamar jenazah, penata anastesi, tenaga fisiotrerap, tenaga elektro medik, perekam medik, petugas sanitarian, dokter umum, dokter spesialis *part time*, dokter PGDS, tenaga lab, tenaga adm, tenaga akuntansi | 56,23 | 13.613.877.062,00 | | | | 16.819.823.740,00 | 42,76 | 6.940.920.174,00 | 42,76 | 41,27 | | 6.940.920.174,00 | | 0,51 | | |
| | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat; pembinaan GERMAS Tk. Desa; sosialisasi lintas sektor eliminasi malaria; sosialisasi kovergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan *stunting*; sosialisasi kecacingan pada lintas sektor; pembentukan dan pemantauan Posyandu Remaja, Posyandu Jiwa, dan Poskestren; orientasi tumbuh kembang/stimulasi deteksi dini intevensi dini tumbuh kembang; penyuluhan dampak Napza di desa; pemeriksaan kesehatan kebugaran olahraga desa; survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit peserta didik; deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu; *screening* jiwa pada anak sekolah; pemberian obat Cacing ke sekolah | 95,75 | 7.877.103.090,00 | 47,16 | 2.460.510.328,00 | | 3.667.537.385,00 | 17,62 | 313.683.466,00 | 17,62 | 8,55 | | 2.774.193.794,00 | | 0,35 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 100,00 | 7.395.112.619,00 | 100,00 | 2.718.074.623,00 | | 3.440.294.541,00 | 41,48 | 884.303.441,00 | 41,48 | 25,70 | | 3.602.378.064,00 | | 0,49 | | |
| | 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Survei akreditasi Pkm; workshop kapasitas tata kelola manajemen mutu; pengukuran indikator mutu/TPMDK ; perencanaan perbaikan strategis/PPS Pkm reakreditasi/TPMDK; penyusunan indikator keselamatan pasien/PIKP Pkm reakreditasi; penilaian pra survei Pkm reakreditasi; workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi | 100,00 | 376.119.302,00 | 100,00 | 500.443.827,00 | | | | | | | | 500.443.827,00 | | 1,33 | | |
| | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Terlaksananya investigasi awal | 95,69 | 54.490.000,00 | 57,50 | 21.450.000,00 | | 3.600.000,00 | 50,00 | 1.600.000,00 | 50,00 | 44,44 | | 23.050.000,00 | | 0,42 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Pemantauan kasus penyakit *emerging* | 100,00 | 27.382.356,00 | 100,00 | 100.000.000,00 | | 24.875.000,00 | 25,00 | 1.682.500,00 | 25,00 | 6,76 | | 101.682.500,00 | | 3,71 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.02.38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Ambulance PSC 119; pengadaan aplikasi PSC 119 integrasi ke NCC; | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.40 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | 80,61 | 185.220.000,00 | | 39.800.000,00 | 40,85 | 15.304.150,00 | 40,85 | 38,45 | | 200.524.150,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.41 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | 100,00 | 60.235.000,00 | 249 Orang | 21.120.000,00 | 65,00 | 13.493.005,00 | 65,00 | 63,89 | | 73.728.005,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.42 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | 62,77 | 66.284.000,00 | 5 Orang | 90.937.535,00 | 22,21 | 16.469.100,00 | 22,21 | 18,11 | | 82.753.100,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.43 | Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | | | | | 1 Tatanan | 13.270.000,00 | 30,00 | 3.674.297,00 | 30,00 | 27,69 | | 3.674.297,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.44 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | | 1 Dokumen | 217.921.319,00 | 17.04 | 8.316.000,00 | 17.04 | 3,82 | | 8.316.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.46 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | | 3 Dokumen | 246.405.922,00 | 13,00 | 13.850.000,00 | 13,00 | 5,62 | | 13.850.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.47 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | 169.800.000,00 | 17,22 | 11.500.000,00 | 17,22 | 6,77 | | 11.500.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02.48 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | 1.312.290.000,00 | 17,80 | 77.250.000,00 | 17,80 | 5,89 | | 77.250.000,00 | | 0,00 | | |
| | *1.02.02.2.03* | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Implementasi *costing* SPM tingkat Pkm, monitoring evaluasi dan pelaporan BOK | 89,28 | 1.391.688.900 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 100,00 | 326.003.967,00 | 100,00 | 129.730.900,00 | 31 Dokumen | 132.970.000,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 129.730.900,00 | | 0,40 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 100,00 | 92.254.840,00 | 100,00 | 181.021.000,00 | 29 Unit | 211.194.000,00 | 40,00 | 25.757.416,00 | 40,00 | 12,20 | | 206.778.416,00 | | 2,24 | Dinas Kesehatan | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **30,64** | **24,40** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1.02.03** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | **Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar**<br>**Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya** | **100,00** | **2.696.520.000,00** | **100,00** | **202.710.116,00** | **0,00** | **1.317.178.625,00** | **73,91** | **572.457.631,00** | **73,91** | **43,46** | | **2.439.837.990,00** | | | | |
| | 1.02.3.02.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.01.02 | Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 100,00 | 2.696.520.000 | 100,00 | 19.190.000,00 | | 19.980.000,00 | 75,00 | 14.625.353,00 | 75,00 | 73,20 | | 33.815.353,00 | | 0,01 | | |
| | *1.02.03.2.02* | *Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Penilaian tenaga kesehata teladan | | | 100,00 | 183.520.116,00 | | 252.755.000,00 | 25,00 | 11.162.200,00 | 25,00 | 4,42 | | 194.682.316,00 | | 0,00 | Dinas Kesehatan | |
| | *1.02.03.2.03* | *Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelatihan petugas pengawas pangan (PKP dan DFI); sosialisasi kelas balita; pertemuan review petugas penyuluhan Pkm; bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian | 100,00 | 223.768.033,00 | 100,00 | 1.664.670.243,00 | | 1.044.443.625,00 | 85,72 | 546.670.078,00 | 85,72 | 52,34 | | 2.211.340.321,00 | | 9,88 | Dinas Kesehatan | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **73,91** | **43,46** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SEDANG** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **1.02.04** | **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** | **Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman** | **100,00** | **71.099.000,00** | **100,00** | **284.628.830,00** | | **388.992.996** | **14,94** | **40.262.315** | **14,94** | **10,35** | | **186.103.945,00** | | | | |
| | *1.02.04.2.01* | *Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 100,00 | 37.485.700,00 | 1 Dokumen | 104.930.800,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 37.485.700,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pembinaan dan pengawasan sarana toko optik; sosialisasi pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha toko optik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.4.02.02 | Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.4.02.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | 36.296.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.4.02.02.02 | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | 100,00 | 48.310.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | *1.02.04.2.03* | *Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri | Bimtek keamanan pangan; sosialisasi penerbitan sertifikat laik *hygiene* keamanan pangan; penerbitan sertifikat PIRT | 100,00 | 71.099.000,00 | 100,00 | 62.434.364,00 | | 195.241.200,00 | 10,00 | 9.617.912,00 | 10,00 | 4,93 | | 72.052.276,00 | | 0,00 | | |
| | 1.02.2.1.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran Dan Depot Air Minum (dam) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.4.02.04.03 | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran Dan Depot Air Minum (dam) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | 100,00 | 45.921.566,00 | 1 Dokumen | 52.524.996,00 | 60,00 | 30.644.403 | 60,00 | 58,34 | | 76.565.969,00 | | 0,00 | | |
| | *1.02.04.2.06* | *Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 100,00 | 86.532.000,00 | 100,00 | 90.477.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.04.2.06.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Sampel makanan produk IRTP (12 sampel); inventarisasi sarana IRTP; pengawasan produk IRT yang bersertifikat P-IRT | 100,00 | 45.787.119,00 | 100,00 | 82.948.903,00 | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **14,94** | **10,35** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **1.02.05** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** | **Persentase desa yang melaksanakan PHBS**<br>**Persentase PHBS tempat kerja**<br>**Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas**<br>**Persentase Rumah Sehat** | | | | | | **370.561.128,00** | **37,65** | **81.438.420,00** | **37,65** | **21,98** | | **1.124.649.298,00** | | | | |
| | *1.02.05.2.01* | *Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100,00 | 256.773.088,00 | 100,00 | 246.885.834,00 | 29 Dokumen | 39.240.000,00 | 90,00 | 31.877.420,00 | 90,00 | 81,24 | | 278.763.254,00 | | 1,09 | Dinas Kesehatan | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | *1.02.05.2.02* | *Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Seha | 100,00 | 296.266.800,00 | 100,00 | 96.078.254,00 | 15 Dokumen | 41.539.000,00 | 75,00 | 29.411.000,00 | 75,00 | 70,80 | | 125.489.254,00 | | 0,42 | Dinas Kesehatan | |
| | 1.02.05.2.02.02 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | | | 100,00 | 94.721.493,00 | 177638 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| | *1.02.05.2.03* | *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Pertemuan tingkat Kab dan Kec | 91,32 | 486.360.240,00 | 67,50 | 700.246.790,00 | | 289.782.128,00 | 25,21 | 20.150.000,00 | 25,21 | 6,95 | | 720.396.790,00 | | 1,48 | Dinas Kesehatan dan Puskesmas | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **37,65** | **21,98** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1.03.02** | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | **Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik** | **99,61** | **29.466.123.996,00** | **86,45** | **2.691.236.300,00** | | **27.143.030.375** | **33,50** | **8.845.466.700,00** | **33,50** | **32,59** | | **14.932.213.448,00** | | | | |
| | *1.03.02.2.01* | *Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.09 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Pembangunan Tembok Penahan Sungai Keluang di Kel.Keluang Kec.Keluang, Tusan Pandak Desa Muara Teladan Kec. Sekayu, Pinggiran Sungai Piase di Masjid Al-Muttaqin Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | 95,82 | 1.092.910.000,00 | 0,5 KM | 2.586.225.500,00 | 42,17 | 1.090.673.000,00 | 42,17 | 42,17 | | 2.183.583.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.10 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Rehabilitasi Tembok Penahan Saluran Simpit Kel.Soak Baru Kec.Sekayu | | | | | 0.500 KM | 396.302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.14 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | | | | 3 Paket | 886.057.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.20 | Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | | | | | 2 Dokumen | 922.603.900,00 | 47,43 | 437.611.500,00 | 47,43 | 47,43 | | 437.611.500,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.21 | Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | | | 4 Unit | 5.248.219.450,00 | 13,36 | 701.087.050,00 | 13,36 | 13,36 | | 701.087.050,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.25 | Pembangunan Pintu Air/bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | | | 100,00 | 887.008.850,00 | 5 Paket | 1.874.382.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 887.008.850,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.26 | Rehabilitasi Pintu Air/bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi | 100,00 | 968.233.000,00 | | | 8 Paket | 3.173.216.200,00 | 35,52 | 1.127.167.700,00 | 35,52 | 35,52 | | 1.127.167.700,00 | | 1,16 | | |
| | 1.03.02.2.01.27 | Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah Dan Air Baku | Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (1 Dokumen) | | | 100,00 | 445.053.000,00 | 1 Dokumen | 347.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 445.053.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.28 | Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | | | | | 1 Dokumen | 615.995.750,00 | 43,59 | 268.494.750,00 | 43,59 | 43,59 | | 268.494.750,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.72 | Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/kota | Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 9 Dokumen | 22.500.000,00 | 15,53 | 3.493.500,00 | 15,53 | 15,53 | | 3.493.500,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.73 | Operasi Dan Pemeliharaan Sungai | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | | 1 Km | 289.090.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.75 | Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sda Kewenangan Kabupaten/kota | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dibina dan Diberdayakan | | | 50,00 | 6.528.250,00 | 5 Lembaga | 225.397.475,00 | 6,18 | 13.926.000,00 | 6,18 | 6,18 | | 20.454.250,00 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | 1.03.02.2.01.77 | Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air Ws Kewenangan Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 259.736.200,00 | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 37,82 | 2.836.500,00 | 37,82 | 37,82 | | 262.572.700,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.78 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | | | 100,00 | 204.373.750,00 | 10 Lembaga | 282.802.200,00 | 2,56 | 7.235.900,00 | 2,56 | 2,56 | | 211.609.650,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.79 | Operasi Dan Pemeliharaan Danau | Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | 100,00 | 519.108.198,00 | 2 Danau | 346.679.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 519.108.198,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.82 | Operasi Dan Pemeliharaan Polder/kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | 100,00 | 164.651.800,00 | 1 Unit | 96.363.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 164.651.800,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.02.2.01.93 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | 56,25 | 493.955.400,00 | 8 Km | 8.964.622.450,00 | 58,27 | 4.976.507.450,00 | 58,27 | 55,51 | | 5.470.462.850,00 | | 0,00 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | *1.03.02.2.02* | *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa | Terwujudnya sistem irigasi yang tepat guna | 100,00 | 1.951.721.250,00 | 100,00 | 99.670.000,00 | | | | | | | | 99.670.000,00 | | 0,05 | | |
| | 1.03.02.2.02.10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan | 99,01 | 4.247.444.000,00 | 100,00 | 2.629.006.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.02.23 | Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | 80,36 | 808.751.300,00 | 4.7 KM | 433.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 808.751.300,00 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | 1.03.02.2.02.27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Rehabilitasi daerah irigasi | 100,00 | 2.270.915.196,00 | 100,00 | 1.105.000.000,00 | | | | | | | | 1.105.000.000,00 | | 0,49 | | |
| | 1.03.02.2.02.35 | Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | | | | | 1 Dokumen | 423.934.350,00 | 51,05 | 216.433.350,00 | 51,05 | 51,05 | | 216.433.350,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **33,50** | **32,59** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **1.03.03** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | **Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)** | **98,32** | **21.432.495.200** | **97,25** | **8.162.297.521,00** | | **15.118.386.600** | **44,46** | **6.677.109.300,00** | **44,46** | **44,17** | | **14.839.406.821,00** | | | | |
| | *1.03.03.2.01* | *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan perpipaan (1 paket); pemasangan pipa transmisi (2 paket) | 95,80 | 8.490.055.000 | 100,00 | 3.946.791.200,00 | | | | | | | | 3.946.791.200,00 | | 0,46 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan (3 paket); pembangunan sumur dalam terlindungi (7 paket) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.03.2.01.17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Optimalisasi SPAMS program PAMSIMAS (5 paket); sumur bor dan perlengkapannya (14 paket); pemasangan jaringan air bersih; sumur gali (1 paket) | 100,00 | 6.195.762.200 | 94,81 | 4.215.506.321,00 | | | | | | | | 4.215.506.321,00 | | 0,68 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di desa Mekar Jadi Kec. Sungai Lilin (reservoir, jaringan perpipaan, sambungan rumah) | 100,00 | 6.746.678.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.03.2.01.22 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 3 | | | | | 60 Unit | 12.920.679.400,00 | 52,03 | 6.677.109.300,00 | 52,03 | 51,68 | | 6.677.109.300,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.03.2.01.25 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (spam) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01.28 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | | | | | 10 Liter/Detik | 2.197.707.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **44,46** | **44,17** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **1.03.05** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | **Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)** | **100,00** | **13.685.662.000,00** | **97,54** | **3.946.791.200,00** | | **19.801.238.650,00** | **21,93** | **7.883.311.389,00** | **21,93** | **39,81** | | **16.045.608.910,00** | | | | |
| | *1.03.05.2.01* | *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan (3 paket); pembangunan sumur dalam terlindungi (7 paket) | | | 100,00 | 3.946.791.200,00 | | | | | | | | 3.946.791.200,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah bangunan IPLT yang dipelihara | 100,00 | 315.073.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | MCK dan sumur bor; WC @ (1 paket); jamban dan tangki septik skala individual (30 paket) | 100,00 | 7.957.531.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.03.05.2.01.15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Tangki septik skala individual perdesaan | 100,00 | 5.413.058.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di desa Mekar Jadi Kec. Sungai Lilin (reservoir, jaringan perpipaan, | | | 94,81 | 4.215.506.321,00 | | | | | | | | 4.215.506.321,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.21 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (iplt) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan | | | | | 2 M³/Hari | 2.969.095.550,00 | 93,22 | 2.767.712.150,00 | 93,22 | 93,22 | | 2.767.712.150,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.33 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | 100 Rumah Tangga | 9.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.35 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (spald) | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | | | | | 2 Penyelenggara | 77.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.37 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | | | | | 5 Unit | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.38 | Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (spald) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | | 2 Unit | 477.570.200,00 | 25,00 | 106.592.039,00 | 25,00 | 22,32 | | 106.592.039,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.39 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (spald) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | | | | | 1019 Rumah Tangga | 15.934.346.300,00 | 8,13 | 4.850.765.600,00 | 8,13 | 30,44 | | 4.850.765.600,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01.40 | Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (spald) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.05.2.01.41 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (spald) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | | | | | 2 Dokumen | 158.241.600,00 | 100,00 | 158.241.600,00 | 100,00 | 100,00 | | 158.241.600,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **21,93** | **39,81** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **1.03.06** | **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase** | **Persentase Drainase dalam Kondisi Baik** | **97,06** | **41.537.573.453,00** | **97,54** | **11.143.165.400,00** | | **25.982.774.686** | **30,22** | **5.812.942.100,00** | **30,22** | **22,37** | | **16.956.107.500,00** | | | | |
| | *1.03.06.2.01* | *Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan jembatan gantung; pembangunan pedestrian; pembangunan drainase jalan @ (1 paket); peningkatan jalan, dusun dan | 97,06 | 41.537.573.453,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah bangunan IPLT yang dipelihara | | | 100,00 | 39.987.900,00 | | | | | | | | 39.987.900,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | | | 97,53 | 11.103.177.500,00 | 16,341.15 M | 25.982.774.686,00 | 30,22 | 5.812.942.100,00 | 30,22 | 22,37 | | 16.916.119.600,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.06.2.01.23 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Dokumen Master Plan Drainase Kota Sekayu dan DED (2 Dokumen) Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **30,22** | **22,37** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **1.03.07** | **Program Pengembangan Permukiman** | **Persentase sarana dan prasarana pemukiman yang ditangani** | **98,39** | **68.543.757.331,00** | **100** | **42.924.927.372,00** | | | | | | | | **42.924.927.372,00** | | | | |
| | *1.03.07.2.01* | *Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan jembatan gantung; pembangunan pedestrian; pembangunan drainase jalan @ (1 paket); peningkatan jalan dusun dan rehab jalan setapak @ (2 paket); pembangunan jalan lingkungan (12 paket); pembangunan jalan setapak (19 paket); peningkatan jalan dusun (30 paket); peningkatan jalan lingkungan (31 paket) | | | 100,00 | 42.924.927.372,00 | | | | | | | 42.924.927.372,00 | | 0,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan : tugu Muba Berjaya (7 paket); mesjid; pagar mesjid; balai desa @ (5 paket); gapura desa; langgar; pagar TPU; rumah marbot; tangga raja; tempat wudhu @ (2 paket); musholla (8 paket); teras masjid; teras musholla; halaman kantor Kades; gedung PKK; mapolsek Bayung; kantor PCNU; sekretariat yayasan; kantor camat Jirak Jaya @ (1 paket); balai dusun; gedung BPD; | 98,39 | 68.543.757.331,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **1.03.08** | **Program Penataan Bangunan Gedung** | **Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani** | **98,39** | **68.543.757.331,00** | **98,20** | **99.255.263.518,00** | | **107.882.362.423,00** | **21,25** | **19.273.235.200,00** | **21,25** | **17,87** | | **118.528.498.718,00** | | | | |
| | *1.03.08.2.01* | *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (imb), Sertifikat Laik Fungsi (slf), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (tabg), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi Simbg | Penerbitan Dokumen Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (120 Dokumen) | | | 100,00 | 68.800.000,00 | | | | | | | | 68.800.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan : tugu Muba Berjaya (7 paket); mesjid; pagar mesjid; balai desa @ (5 paket); gapura desa; langgar; pagar TPU; rumah marbot; tangga raja; tempat wudhu @ (2 paket); musholla (8 paket); teras masjid; teras musholla; halaman kantor Kades; gedung PKK; mapolsek Bayung; kantor PCNU; sekretariat yayasan; kantor camat Jirak Jaya @ (1 paket); balai dusun; gedung BPD; | 98,39 | 68.543.757.331,00 | 98,20 | 99.186.463.518,00 | | | | | | | | 99.186.463.518,00 | | 1,45 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 1.03.08.2.01.21 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 97 Dokumen | 107.615.930.323,00 | 21,31 | 19.273.235.200,00 | 21,31 | 17,91 | | 19.273.235.200,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.08.2.01.23 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan bangunan Gedung (pbg), Sertifikat Laik Fungsi (slf), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (sbkbg), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (rtb), Tim Profesi Ahli (tpa), Tim Penilai Teknis (tpt), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui Sysbg | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung | | | | | 15 Dokumen | 266.432.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **21,25** | **17,87** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **13** | **1.03.09** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | **Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani** | | | | | | **1.386.001.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | |
| | *1.03.09.2.01* | *Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.09.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.03.09.2.01.10 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 150 Dokumen | 1.386.001.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **1.03.10** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | **Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap** | **98,34** | **0,00** | **99,43** | **6.212.734.107,00** | | **478.665.628.419,89** | **44,03** | **193.562.747.288,00** | **44,03** | **40,44** | | **199.775.481.395,00** | | | | |
| | *1.03.10.2.01* | *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.02 | Pembebasan Lahan/tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan 10000 M² | | | 100 | 864.516.208,00 | | | | | | | | 864.516.208,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.28 | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | | | 100,00 | 2.376.349.178,00 | 6 Dokumen | 3.065.185.537,00 | 33,30 | 1.020.685.150,00 | 33,30 | 33,30 | | 3.397.034.328,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.29 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 86,84 | 3.208.743.600,00 | 100 | 2.971.868.721,00 | 4 Dokumen | 6.630.688.110,00 | 56,45 | 3.743.213.110,00 | 56,45 | 56,45 | | 6.715.081.831,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.30 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/kota Dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya | | | | | 1 KM | 624.804.700,00 | 48,70 | 304.304.700,00 | 48,70 | 48,70 | | 304.304.700,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.32 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | | | | | 1000 KM | 379.882.002.074,00 | 52,38 | 178.329.552.399,00 | 52,38 | 46,94 | | 178.329.552.399,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.38 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | | 10 Jembatan | 1.536.903.880,00 | 2,40 | 36.903.880,00 | 2,40 | 2,40 | | 36.903.880,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.39 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | | | | | 10 Jembatan | 1.867.230.000,00 | 8,96 | 167.230.000,00 | 8,96 | 8,96 | | 167.230.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.40 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | | | | | 10 Jembatan | 46.879.891.331 | 17,83 | 8.002.258.581,00 | 17,83 | 17,07 | | 8.002.258.581,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.43 | Survey Kondisi Jalan/jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | | | 100 KM | 1.718.864.000 | 45,25 | 777.864.000,00 | 45,25 | 45,25 | | 777.864.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.44 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | | | 5 KM | 5.101.816.526 | 3,37 | 172.089.206,00 | 3,37 | 3,37 | | 172.089.206,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01.46 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | | 10 KM | 31.358.242.262,00 | 3,22 | 1.008.646.262,00 | 3,22 | 3,22 | | 1.008.646.262,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **44,03** | **40,44** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **15** | **1.03.11** | **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** | **Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat** | **50,00** | **174.353.716,00** | **100,00** | **86.850.000,00** | | **550.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **86.850.000,00** | | | | |
| | *1.03.11.2.01* | *Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Bimtek manajemen mutu jasa konstruksi; pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi; bimtek dan pelatihan operator, mandor bangunan gedung, jalan dan | 50,00 | 174.353.716 | 100,00 | 86.850.000,00 | | | | | | | | 86.850.000,00 | | 0,50 | | |
| | 1.03.11.2.01.16 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi KualifikasiJabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | | | | | 200 Orang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | *1.03.11.2.02* | *Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.11.2.02.13 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.11.2.02.14 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | | 5 Orang | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.11.2.02.15 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | | | | | 1 Layanan Informasi | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.03.11.2.04* | *Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.11.2.04.04 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | | | | | 1000 Paket Pekerjaan | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | 1.03.11.2.04.06 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | | | | | 50 Lembaga | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **16** | **1.03.12** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | **Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** | **87,64** | **2.381.618.841,00** | **100,00** | **1.515.984.336,00** | | **5.927.507.650,00** | **35,62** | **1.523.550.650,00** | **35,62** | **25,70** | | **3.039.534.986,00** | | | | |
| | *1.03.12.2.01* | *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.01.05 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rtrw Kabupaten/kota | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota | 83,85 | 1.519.918.900,00 | 100,00 | 300.307.600,00 | 1 Dokumen | | | | | | | 300.307.600,00 | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | 1.03.12.2.01.13 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | | | 100,00 | 123.301.700,00 | 1 Laporan | 39.440.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 123.301.700,00 | | 0,00 | | |
| | *1.03.12.2.02* | *Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.02.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rrtr Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 0,00 | 331.894.647,00 | 100,00 | 366.606.730,00 | | | | | | | | 366.606.730,00 | | 1,10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | 1.03.12.2.02.05 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | | | | | 2 Dokumen | 3.250.167.650,00 | 51,39 | 1.460.132.850,00 | 51,39 | 44,92 | | 1.460.132.850,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.12.2.02.06 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 0,00 | 331.894.647,00 | 100,00 | 366.606.730,00 | 30 Orang | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 366.606.730,00 | | 1,10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | *1.03.12.2.03* | *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.03.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.03.04 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | | | | | 210 Layanan | 171.327.000,00 | 40,00 | 29.925.000,00 | 40,00 | 17,47 | | 29.925.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.12.2.03.05 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.03.07 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | 1 Sistem Informasi | 800.401.000,00 | 11,74 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.03.12.2.04* | *Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 100,00 | 197.910.647,00 | 100,00 | 87.689.167,00 | 1 Dokumen | 1.062.577.000,00 | 15,54 | 28.982.800,00 | 15,54 | 2,73 | | 116.671.967,00 | | 0,59 | | |
| | 1.03.12.2.04.05 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | | | | | 1 Laporan | 27.491.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.12.2.04.09 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | 1 Laporan | 38.876.000,00 | 40,00 | 4.510.000,00 | 40,00 | 11,60 | | 4.510.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.12.2.04.12 | Penilaian Perwujudan RTR | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | | | | | 1 Dokumen | 363.156.000,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.03.12.2.04.14 | Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang | | | 100,00 | 271.472.409,00 | 1 Dokumen | 89.072.000,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | | 271.472.409,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **35,62** | **25,70** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **1.05.03** | **Program Pengembangan Perumahan** | **Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab** | | | **77,25** | **880.450.701,00** | | **11.686.122.250,00** | **14,47** | **1.490.766.250,00** | **14,47** | **12,76** | | **2.371.216.951,00** | | | | |
| | *1.04.2.02.03* | *Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.2.02.03.04 | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | | 32 Unit Rumah | 1.341.866.250,00 | 100,00 | 1.341.866.250,00 | 100,00 | 100,00 | | 1.341.866.250,00 | | 0,00 | | |
| | 1.04.2.02.03.09 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | 32 Unit Rumah | 5.337.523.050,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.04.2.02.04* | *Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.2.02.04.04 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | 2 Dokumen | 31.949.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.04.2.02.05* | *Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/atau Rumah Khusus* | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 1.04.2.02.05.03 | Pembangunan Rumah Khusus | Rumah Khusus yang Dibangun | | | 77,25 | 880.450.701,00 | 1 Unit | 4.974.783.200,00 | 2,99 | 148.900.000,00 | 2,99 | 2,99 | | 1.029.350.701,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **14,47** | **12,76** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **1.04.03** | **Program Kawasan Permukiman** | **Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki** | **100** | **198.117.000,00** | **100** | **596.896.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| | *1.04.03.2.02* | *Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.03.2.02.01 | Penyusunan Rencana Tapak (site Plan) Dan Detail Engineering Design (ded) Peremajaan/pemugaran Permukiman Kumuh | Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (2 dokumen) | | | 100,00 | 596.896.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Tersusunanya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 100,00 | 198.117.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1.04.3.02.03* | *Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.3.02.03.04 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/peremajaan Permukiman Kumuh | Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (2 dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **19** | **1.04.04** | **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** | **Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun/diperbaiki** | **100,00** | **24.039.007.100,00** | **95,88** | **32.297.446.300,00** | | **22.435.404.000** | **17,91** | **3.050.000.000,00** | **17,91** | **13,59** | | **35.347.446.300,00** | | | | |
| | *1.04.04.2.01* | *Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 100,00 | 24.039.007.100,00 | 95,88 | 32.297.446.300,00 | 376 Unit Rumah | 22.435.404.000,00 | 17,91 | 3.050.000.000,00 | 17,91 | 13,59 | | 35.347.446.300,00 | | 1,47 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **17,91** | **13,59** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **20** | **1.04.05** | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** | **Persentase PSU Yang dibangun / direhab** | **100,00** | **15.251.551.000,00** | | | | **65.190.041.031,00** | **36,43** | **10.711.486.000,00** | **36,43** | **16,43** | | **10.711.486.000,00** | | | | |
| | *1.04.05.2.01* | *Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 100,00 | 15.251.551.000,00 | | | 53 Lokasi | 65.173.266.406,00 | 36,43 | 10.711.486.000,00 | 36,43 | 16,44 | | 10.711.486.000,00 | | 0,70 | | |
| | 1.04.05.2.01.10 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | 16.774.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **36,43** | **16,43** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **1.05.02** | **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten** | **96,70** | **2.396.140.812,00** | **100,00** | **3.129.578.523,00** | | **1.914.305.789,00** | **41,89** | **448.008.000,00** | **41,89** | **23,40** | | **3.577.586.523,00** | | | | |
| | *1.05.02.2.01* | *Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Pengawalan kepala daerah/pejabat Pemda; pengendalian keamanan lingkungan | 100,00 | 875.362.600,00 | 100 | 698.802.800,00 | | | | | | | | 698.802.800,00 | | 0,80 | | |
| | 1.05.02.2.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Terlaksananya pengamanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | 100,00 | 29.300.000,00 | 100 | 17.415.000,00 | | | | | | | | 17.415.000,00 | | 0,59 | | |
| | 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 100,00 | 237.924.800,00 | 100 | 188.710.000,00 | 1 Dokumen | 105.750.000,00 | 11,00 | 9.000.000,00 | 11,00 | 8,51 | | 197.710.000,00 | | 0,83 | | |
| | 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100,00 | 165.972.800,00 | 100 | 1.337.217.620,00 | 1 Dokumen | 53.099.000,00 | 54,00 | 28.644.700,00 | 54,00 | 53,95 | | 1.365.862.320,00 | | 8,23 | | |
| | 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 100,00 | 153.240.000,00 | 100 | 169.630.903,00 | 391 Orang | 152.994.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169.630.903,00 | | 1,11 | | |
| | 1.05.02.2.01.06 | Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 100,00 | 20.009.200,00 | 100 | 126.240.000,00 | 1 Dokumen | 176.850.000,00 | 50,00 | 25.200.000,00 | 50,00 | 14,25 | | 151.440.000,00 | | 7,57 | | |
| | 1.05.02.2.01.07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pemeliharaan alat korsik | 100,00 | 146.760.000,00 | 100 | 132.640.000,00 | | | | | | | | 132.640.000,00 | | 0,90 | | |
| | 1.05.02.2.01.09 | Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Tersedianya petugas layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada | | | 100 | 106.766.000,00 | | | | | | | | 106.766.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.02.2.01.12 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. | | | | | 4 Orang | 89.206.000,00 | 20,00 | 15.780.000,00 | 20,00 | 17,69 | | 15.780.000,00 | | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | 1.05.02.2.01.14 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan. | | | | | 40 Orang | 235.115.000,00 | 20,00 | 6.680.000,00 | 20,00 | 2,84 | | 6.680.000,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.02.2.01.15 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | 91 Orang | 308.625.000,00 | 69,00 | 106.746.300,00 | 69,00 | 34,59 | | 106.746.300,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.02.2.01.16 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 100,00 | 83.617.388,00 | 100 | 352.156.200,00 | 13 Laporan | 47.416.000,00 | 65,00 | 4.400.000,00 | 65,00 | 9,28 | | 356.556.200,00 | | 4,26 | | |
| | 1.05.02.2.01.17 | Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 100,00 | 329.012.200,00 | | | 4 Laporan | 221.520.000,00 | 60,00 | 29.322.000,00 | 60,00 | 13,24 | | 29.322.000,00 | | 0,09 | | |
| | 1.05.02.2.01.18 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 100,00 | 329.012.200,00 | | | 4 Laporan | 38.715.250,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.05.02.2.02* | *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.2.02.10 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0,00 | 0,00 | | | 3 Laporan | 48.218.688,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.02.2.02.11 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 100,00 | 25.929.624,00 | | | 5 Laporan | 24.996.000,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 1.05.02.2.02.12 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | 5 Laporan | 411.800.000,00 | 54,00 | 222.235.000,00 | 54,00 | 53,97 | | 222.235.000,00 | | 0,00 | Pamong Praja | |
| | *1.05.02.2.03* | *Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.2.03.01 | Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **41,89** | **23,40** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| 22 | **1.05.03** | **Program Penanggulangan Bencana** | **Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)**<br>**Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota** | **100,00** | **2.615.597.317,00** | **97,14** | **5.490.922.554,00** | | **12.428.224.108,00** | **12,59** | **1.015.522.217,00** | **12,59** | **8,17** | | **4.125.107.075,00** | | | | |
| | *1.05.3.02.01* | *Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.3.02.01.07 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 100,00 | 93.176.000,00 | 100,00 | 211.347.368,00 | 200 Orang | 125.489.087,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | | 211.347.368,00 | | 2,27 | | |
| | *1.05.3.02.02* | *Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | | | | 100,00 | 260.703.750,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.3.02.02.15 | Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 100,00 | 105.628.000,00 | 100,00 | 582.409.428,00 | 241 Unit | 346.924.821,00 | 4,00 | 13.620.107,00 | 4,00 | 3,93 | | 596.029.535,00 | | 5,64 | | |
| | 1.05.3.02.02.09 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 100,00 | 2.021.892.060,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.3.02.02.18 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 100,00 | 184.592.613,00 | 100,00 | 184.638.661,00 | 850 Orang | 54.323.000,00 | 20,00 | 3.654.900,00 | 20,00 | 6,73 | | 188.293.561,00 | | 1,02 | | |
| | 1.05.3.02.02.21 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (trc) Bencana Kabupaten/kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 100,00 | 214.419.420,00 | | | 16 Orang | 187.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.3.02.02.26 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | | | | | 1 Laporan | 930.623.000,00 | 30,00 | 200.176.950,00 | 30,00 | 21,51 | | 200.176.950,00 | | 0,00 | | |
| | *1.05.3.02.03* | *Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.3.02.03.01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | | | 100,00 | 192.397.350,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.3.02.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 100,00 | 2.208.877.317,00 | 100,00 | 105.072.500,00 | 1 Dokumen | 950.810.000,00 | 40,00 | 246.161.340,00 | 40,00 | 25,89 | | 351.233.840,00 | | 0,16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | 1.05.3.02.03.03 | Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 100,00 | 406.720.000,00 | 100,00 | 96.888.700,00 | 250 Orang | 556.432.000,00 | 42,67 | 234.504.000,00 | 42,67 | 42,14 | | 331.392.700,00 | | 0,81 | | |
| | 1.05.3.02.03.09 | Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 100,00 | 246.453.200,00 | 80 Orang | 213.204.700,00 | 45,49 | 68.286.786,00 | 45,49 | 32,03 | | 314.739.986,00 | | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD | |
| | 1.05.3.02.03.10 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/wabah Penyakit | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | | | 100,00 | 1.906.291.797,00 | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.3.02.03.12 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | | | 100,00 | 471.375.000,00 | 2 Laporan | 833.760.000,00 | 30,00 | 167.400.000,00 | 30,00 | 20,08 | | 638.775.000,00 | | 0,00 | | |
| | *1.05.03.2.02* | *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Konsumsi Satgas Linmas bantuan bencana daerah (35 org); peserta pelatihan siaga (98 org); pakaian siaga (196 stel) | | | 100,00 | 992.475.000,00 | | | | | | | | 992.475.000,00 | | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | *1.05.03.2.04* | *Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.03.2.04.05 | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | 0,00 | 0 | 20 Laporan | 62.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.03.2.04.10 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | | | 100,00 | 240.869.800,00 | 1 Kegiatan | 7.956.917.000,00 | 3,05 | 59.773.335,00 | 3,05 | 0,75 | | 300.643.135,00 | | 0,00 | | |
| | 1.05.03.2.04.14 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | | | | | 1 Dokumen | 210.080.500,00 | 25,00 | 21.944.799,00 | 25,00 | 10,45 | | 21.944.799,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **12,59** | **8,17** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **23** | **1.05.04** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** | **Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** | **100,00** | **1.092.732.700,00** | **100,00** | **1.381.257.785,00** | | **4.948.931.000,00** | **10,76** | **312.115.700,00** | **10,76** | **6,31** | | **1.693.373.485,00** | | | | |
| | *1.05.04.2.01* | *Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan BeracunKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasional petugas piket PBK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>Petugas Piket PBK (Non PNS)<br>Petugas Piket PBK (PNS)<br>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran<br>Terpenuhinya Dana Untuk Asuransi Pegawai Non PNS (Damkar) | 100,00 | 887.682.200,00 | 100,00 | 1.040.575.400,00 | 1 Laporan | 593.931.000,00 | 53,00 | 312.115.700,00 | 53,00 | 52,55 | | 1.352.691.100,00 | | 1,52 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | 1.05.04.2.01.06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Mobil komando spek CMD-1; mobil pemadam kebakaran spek tangki air 4000 ltr; mobil slip on/fire jeep spek kapasitas 300 s/d 600 ltr; mobil suply air pemadam kebakaran spek tangki air 4000 s/d 500 ltr | 100,00 | 165.325.500,00 | 100,00 | 299.822.385,00 | | | | | | | | 299.822.385,00 | | 1,81 | | |
| | 1.05.04.2.01.17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | 4.355.000.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *1.05.04.2.02* | *Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.02.01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Terlaksananya inspeksi sarana dan prasarana perusahaan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran | 100,00 | 39.725.000,00 | 100,00 | 40.860.000,00 | | | | | | | | 40.860.000,00 | | 1,03 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **10,76** | **6,31** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **1.06.02** | **Program Pemberdayaan Sosial** | **Persentase PMKS yang mendapat Layanan** | **100,00** | **3.382.804.200,00** | **100,00** | **2.000.022.123,00** | | **11.993.177.626,00** | **56,02** | **6.608.531.519,00** | **56,02** | **55,10** | | **8.604.472.742,00** | | | | |
| | *1.06.02.2.01* | *Peningkatan Kapasitas Dan Pendampingan Kat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Dan Pendampingan Kat | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,00 | 316.045.500,00 | 100,00 | 127.660.311,00 | 14 Keluarga | 49.582.000 | 9,00 | 4.080.900 | 9,00 | 8,23 | | 131.741.211,00 | | 0,42 | | |
| | *1.06.02.2.02* | *Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/kota* | | 100,00 | 185.272.900,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.06.02.2.02.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 100,00 | 185.272.900,00 | 100,00 | 4.080.900,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | *1.06.02.2.03* | *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,00 | 1.631.112.600,00 | 100,00 | 291.451.000,00 | 80 Orang | 105.045.000,00 | 36,00 | 36.944.183,00 | 36,00 | 35,17 | | 328.395.183,00 | | 0,20 | | |
| | 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,00 | 1.028.937.400,00 | 100,00 | 201.596.500,00 | 15 Orang | 9.468.887.000,00 | 67,00 | 6.306.594.900,00 | 67,00 | 66,60 | | 6.508.191.400,00 | | 6,33 | Dinas Sosial | |
| | 1.06.02.2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,00 | 36.162.900,00 | 100,00 | 598.618.800,00 | 39 Keluarga | 1.571.537.676,00 | 6,00 | 44.524.838,00 | 6,00 | 2,83 | | 643.143.638,00 | | 17,78 | | |
| | 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 741.266.812,00 | 6 Lembaga | 764.540.950,00 | 30,00 | 208.630.198,00 | 30,00 | 27,29 | | 949.897.010,00 | | 0,00 | | |
| | 1.06.02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 35.347.800,00 | 40 Sertifikat | 33.585.000,00 | 24,00 | 7.756.500,00 | 24,00 | 23,10 | | 43.104.300,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **56,02** | **55,10** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **25** | **1.06.04** | **Program Rehabilitasi Sosial** | **Persentase Disabilitas yang mendapat layanan** | **97,01** | **4.407.615.506,00** | **100,00** | **4.530.933.952,00** | | **2.076.087.700,00** | **41,28** | **851.190.536,00** | **41,28** | **41,00** | | **5.214.195.988,00** | | | | |
| | *1.06.04.2.01* | *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Pelaksanaan Program BPNT | | | | | | 1.472.994.000,00 | 28,54 | 416.096.936 | | | | 416.096.936,00 | | 0,00 | | |
| | 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Alat pendengaran (18 bh); kaki palsu (2 bh); kursi roda (54 bh); tangan palsu (1 bh); tongkat buta (26 bh); tongkat ketiak (10 pasang); tongkat struk (8 bh) | 100,00 | 210.902.200,00 | 100,00 | 167.928.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Operasional UPTD Loka Bina Karya; pelatihan dan keterampilan bagi disabilitas; kegiatan DPC-PPDI; kegiatan upacara peringatan hari Pahlawan | 100,00 | 614.449.600,00 | 100,00 | 152.746.000,00 | | 203.093.700,00 | 18,00 | 35.093.600,00 | 18,00 | 17,28 | | 187.839.600,00 | | 0,31 | Dinas Sosial | |
| | 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Bedah rumah | 100,00 | 3.396.595.600,00 | 100,00 | 3.287.616.753,00 | | 400.000.000,00 | 100 | 400.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 3.687.616.753,00 | | 1,09 | | |
| | 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | Biaya sewa rumah singgah (1 thn); beras 5 kg; gula pasir 3 kg; minyak goreng 3 ltr; susu anlene 3 kotak; tepung terigu 2 kg @ (350 paket) | 50,00 | 111.954.506,00 | 100,00 | 326.620.248,00 | | | | | | | | 326.620.248,00 | | 2,92 | | |
| | *1.06.04.2.02* | *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.03.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Laporan rehabilitasi sosial | 100,00 | 2.249.000,00 | 100,00 | 38.260.000,00 | | | | | | | | 38.260.000,00 | | 17,01 | | |
| | 1.06.04.2.03.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Pelaksanaan kegiatan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial; rakor tim penanggulangan kemiskinan klaster 1; koordinasi daerah bidang sosial sosialisasi *Coorporate Social Responsibility* (CSR) | 100,00 | 71.464.600,00 | 100,00 | 557.762.451,00 | | | | | | | | 557.762.451,00 | | 7,80 | Dinas Sosial | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **41,28** | **41,00** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **26** | **1.06.05** | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**<br>**Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga** | **100,00** | **902.744.012,00** | **98,86** | **260.726.452,00** | | **46.805.795.825** | **26,49** | **12.249.214.727** | **26,49** | **26,17** | | **33.824.143.501,00** | | | | |
| | *1.06.05.2.02* | *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Monev PMKS dan PSKS verifikasi dan validasi data mandiri fakir miskin | 100,00 | 902.744.012,00 | 100,00 | 260.726.452,00 | | 140.494.000,00 | 24,00 | 33.241.481,00 | 24,00 | 23,66 | | 293.967.933,00 | | 0,33 | Dinas Sosial | |
| | 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | KUBE (150 klmpok); bantuan untuk penyandang disabilitas (469 org) | 100,00 | 9.444.390.000,00 | 98,85 | 21.314.202.322,00 | | 46.665.301.825,00 | 26,5 | 12.215.973.246,00 | 26,50 | 26,18 | | 33.530.175.568,00 | | 3,55 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **26,49** | **26,17** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **27** | **1.06.06** | **Program Penanganan Bencana** | **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten** | **100** | **698.322.000** | **100** | **694.346.478** | | **942.265.000** | **56,01** | **522.361.527,00** | **56,01** | **55,44** | | **918.182.005,00** | | | | |
| | *1.06.06.2.01* | *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.06.2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 100 Orang | 304.180.000,00 | 98,00 | 298.526.000,00 | 98,00 | 98,14 | | 298.526.000,00 | | 0,00 | | |
| | *1.06.06.2.02* | *Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Bantuan sembako untuk korban bencana untuk 500 org (10 jenis); honorarium Tagana (95 org) | 100,00 | 698.322.000 | 100,00 | 694.346.478,00 | 100 Orang | 638.085.000,00 | 36,00 | 223.835.527,00 | 36,00 | 35,08 | | 918.182.005,00 | | 1,31 | Dinas Sosial | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **56,01** | **55,44** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28** | **2.07.02** | **Program Perencanaan Tenaga Kerja** | **Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah** | **100** | **719.869.703,00** | **100** | **381.686.750,00** | | **364.317.050,00** | **30,00** | **33.340.665,00** | **30,00** | **9,15** | | **415.027.415,00** | | | | |
| | *2.07.02.2.01* | *Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Buku pedoman pencacah (45 buku); buku pedoman PML (10 buku); pelatihan petugas pembangunan ketenagakerjaan | 100,00 | 719.869.703 | 100,00 | 381.686.750,00 | 1 Dokumen | 364.317.050,00 | 30,00 | 33.340.665,00 | 30,00 | 9,15 | | 415.027.415,00 | | 0,58 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **30,00** | **9,15** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **29** | **2.07.03** | **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Persentase Tenaga Kerja Terlatih**<br>**Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja** | **100** | **5.772.687.400,00** | **93** | **8.060.563.945,00** | | **5.839.239.000,00** | **37,70** | **2.113.339.450,00** | **37,70** | **36,19** | | **10.173.903.395,00** | | | | |
| | *2.07.03.2.01* | *Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan dan Sertifikasi Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas (40 Orang), Pelatihan dan Sertifikasi Operator Lantai Perawatan Sumur (40 Orang) | 100,00 | 5.758.252.200 | 93,30 | 8.060.563.945,00 | 200 Orang | 5.081.641.000,00 | 43,32 | 2.113.339.450,00 | 43,32 | 41,59 | | 10.173.903.395,00 | | 1,77 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | 2.07.03.2.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasidan Produktivitas pada Tahun n (3 Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03.2.01.03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | | 4 Unit | 697.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.07.03.2.05* | *Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03.2.05.01 | Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Laporan Kompetensi Tenaga Kerja dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin<br>Laporan Produktivitas Tenaga Kerja dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | 100,00 | 14.435.200 | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 59.941.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **37,70** | **36,19** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **30** | **2.07.04** | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **Persentase Pekerja yang ditempatkan** | **100** | **465.208.126,00** | **100** | **664.171.133,00** | | **511.585.825,00** | **19,63** | **94.446.221,00** | **19,63** | **18,46** | | **758.617.354,00** | | | | |
| | *2.07.04.2.01* | *Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.04.2.01.04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Operasional penunjang layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan | 100,00 | 56.370.500 | 100,00 | 96.875.256,00 | | 152.769.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 96.875.256,00 | | 1,72 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | *2.07.04.2.03* | *Pengelolaan Informasi Pasar Kerja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.04.2.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Pengembangan Website Sistem Informasi Ketenagakerjaan | 100,00 | 109.541.579 | 100,00 | 118.975.000,00 | 1 Website | 45.642.000,00 | 42,00 | 17.500.000,00 | 42,00 | 38,34 | | 136.475.000,00 | | 1,25 | | |
| | 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Job Canvasing<br>Jumlah BKK yang dibina<br>Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing<br>Laporan Pembinaan Bursa Kerja Khusus<br>Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja AK1<br>Rekruitmen Tenaga Kerja | 100,00 | 299.296.047 | 100,00 | 448.320.877,00 | 90 Perusahaan<br>23 Unit BKK<br>15 Perusahaan<br>1 Laporan<br>2300 Lembar<br>10 Kali | 109.323.000,00 | 60,00 | 61.728.514,00 | 60,00 | 56,46 | | 510.049.391,00 | | 1,70 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | 2.07.04.2.03.03 | Job Fair/bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | | | | | 300 Orang | 156.422.900,00 | 10,00 | 15.217.707,00 | 10,00 | 9,73 | | 15.217.707,00 | | 0,00 | | |
| | *2.07.04.2.04* | *Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.07.04.2.03.04.01 | Peningkatan Pelindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (pmi)/pekerja Migran Indonesia (pmi) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | | | | | 50 Orang | 47.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | **19,63** | **18,46** | | | | | | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **2.07.05** | **Program Hubungan Industrial** | **Angka sengketa pengusaha-pekerja/thn**<br>**Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan** | **100** | **547.687.800,00** | **96,78** | **877.548.523,00** | | **371.027.000,00** | **26,54** | **62.087.160,00** | **26,54** | **16,73** | | **939.635.683,00** | | | | |
| | *2.07.05.2.01* | *Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Dokumen rekomendasi upah minimum Prov dan upah minimum Kabupaten | 100,00 | 184.786.600 | 100,00 | 529.422.110,00 | | 165.655.000,00 | 26,35 | 15.045.600,00 | 26,35 | 9,08 | | 544.467.710,00 | | 2,95 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | *2.07.05.2.02* | *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (35 Perkara) | 100,00 | 226.340.600 | | | | 115.694.000,00 | 28,00 | 26.597.300,00 | 28,00 | 22,99 | | 26.597.300,00 | | 0,12 | | |
| | 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial (50 kasus); perusahaan yang mendapat pembinaan (50 perusahaan); sidang mediasi (50 kasus) | 100,00 | 136.560.600 | 100,00 | 250.182.813,00 | | | | | | | | 250.182.813,00 | | 1,83 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan LKS bipartit (50 perusahaan); pembinaan LKS tripartit di Kab. Muba | | | 75,00 | 97.943.600,00 | | 89.678.000,00 | 25,00 | 20.444.260,00 | 25,00 | 22,80 | | 118.387.860,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | **26,54** | **16,73** | | | | | | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **2.08.02** | **Program Pengarasutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | **Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG**<br>**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** | **100** | **824.333.149,00** | **100** | **1.307.770.167,00** | | **602.418.925,00** | **55,76** | **69.754.430,00** | **55,76** | **11,58** | | **1.047.635.928,00** | | | | |
| | *2.08.02.2.01* | *Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Advokasi PUB bagi PD, Camat, *Focal Point* PD dan *Focal Point* Kec | 100,00 | 216.392.470 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.01.04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Pelatihan Perencanaan Penggaran Responsive Gender (PPRG) bagi FP dan Pelatihan Fasilitator dan Pengawasan PPRG Terlatihnya orang sebagai Pelatih Perencanaan dalam penggaran Responsive Gender | 100,00 | 146.443.993,00 | 100,00 | 329.888.669,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2.08.02.2.01.08 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | 100,00 | 146.443.993,00 | 100,00 | 329.888.669,00 | | 116.743.625,00 | 50,00 | 9.380.100,00 | 50,00 | 8,03 | | 339.268.769,00 | | 0,00 | | |
| | *2.08.02.2.02* | *Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 188.750.829,00 | 5 Dokumen | 92.530.000,00 | 45,00 | 6.199.200,00 | 45,00 | 6,70 | | 194.950.029,00 | | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2.08.02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Pelaksanaan Hari Ibu,Hari Kartini, Seminar Sehari, Lomba2, Pelatihan Peningkatan Keterampilan anggota DWP, Rapat-rapat DWP di Provinsi | 100,00 | 315.052.693,00 | 100,00 | 459.242.000,00 | 6 Kegiatan | 393.145.300,00 | 60,00 | 54.175.130,00 | 60,00 | 13,78 | | 513.417.130,00 | | 1,63 | | |
| | *2.08.02.2.03* | *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelatihan kepemimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **55,76** | **11,58** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **33** | **2.08.03** | **Program Perlindungan Perempuan** | **Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan** | **100** | **161.092.010,00** | **100** | **199.868.200,00** | | **170.967.000,00** | **45,00** | **16.650.132,00** | **45,00** | **9,74** | | **216.518.332,00** | | | | |
| | *1.08.3.02.01* | *Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.08.3.02.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota | | | 100,00 | 199.868.200,00 | | | | | | | | 199.868.200,00 | | 0,00 | | |
| | 1.08.3.02.01.02 | Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,00 | 161.092.010 | | | 10 Perusahaan Perangkat Daerah | 40.552.000,00 | 45,00 | 3.654.900,00 | 45,00 | 9,01 | | 3.654.900,00 | | 0,02 | | |
| | *2.08.03.2.02* | *Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.03.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | | | | | 100 Orang | 130.415.000,00 | 45,00 | 12.995.232,00 | 45,00 | 9,96 | | 12.995.232,00 | | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dampingan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.08.03.2.03* | *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.03.2.03.03 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **45,00** | **9,74** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **34** | **2.08.04** | **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | **Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak**<br>**Jumlah Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE)** | **100** | **148.849.768,00** | **100** | **115.847.921,00** | | | | | | | | | | | | |
| | *2.08.04.2.01* | *Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.04.2.01.02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *2.08.04.2.02* | *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kg dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.04.2.02.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi dan sosialisasi pengembangan lembaga pusat pembelajaran keluarga | | | 100,00 | 115.847.921,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | *2.08.02.2.03* | *Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.03.01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dampingan pelayanan P2TP2A; visum korban pemerkosaan (18 org); visum luka korban kekerasan (19 org) | 100,00 | 148.849.768,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **35** | **2.08.05** | **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** | **Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak** | **100** | **88.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **99.387.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | |
| | *2.08.05.2.01* | *Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2.08.05.2.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak | 100,00 | 88.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.387.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **36** | **2.08.06** | **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | **Persentase Kecamatan Layak Anak**<br>**Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)** | **100** | **910.842.928,00** | **78** | **197.517.387,00** | | **335.008.911,00** | **74,64** | **179.124.330,00** | **74,64** | **53,47** | | **376.641.717,00** | | | | |
| | *2.08.06.2.01* | *Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan Sosialisasi desa Layak Anak (Dekela) untuk pencapaian kecamatan Layak Anak (Kelana)pada masyarakat pemuka agama, FA,PKK | 100,00 | 296.444.834 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Partisipasi dalam Peringatan Hari Anak Nasional | 100,00 | 302.952.404 | 100 | 197.517.387,00 | | 128.060.450,00 | 60,00 | 29.454.430,00 | 60,00 | 23,00 | | 226.971.817,00 | | 0,75 | | |
| | *2.08.06.2.02* | *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengadaan sarana bermain ramah anak *outdoor* di 5 Kec; untuk layanan UPPA Polres Muba dan SLB | 100,00 | 212.894.990 | | | | 150.747.500,00 | 100,00 | 146.315.000,00 | 100,00 | 97,06 | | 146.315.000,00 | | 0,69 | | |
| | 2.08.06.2.02.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Dokumen) | 100,00 | 98.550.700 | | | | 56.200.961,00 | 40,00 | 3.354.900,00 | 40,00 | 5,97 | | 3.354.900,00 | | 0,03 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2.08.06.2.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembuatan Modul,Backdrop,Xbanner,Spanduk, leaflet tentang Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.08.06.2.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (3 Dokumen) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | **74,64** | **53,47** | | | | | | |
| | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | **SEDANG** | **RENDAH** | | | | | | |
| **37** | **2.08.07** | **Program Perlindungan Khusus Anak** | **Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus** | **100** | **908.088.551,00** | **100** | **755.142.605,00** | | **772.807.400,00** | **51,90** | **266.023.675,00** | **51,90** | **34,42** | | **1.021.166.280,00** | | | | |
| | *2.08.07.2.01* | *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.07.2.01.04 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Honorarium komisioner KPAD | 100,00 | 908.088.551,00 | 100,00 | 608.318.205,00 | | 625.983.000,00 | 50,00 | 232.962.103,00 | 50,00 | 37,22 | | 841.280.308,00 | | 0,93 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | *2.08.07.2.02* | *Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.07.2.02.05 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Operasional UPT/Bidang PPA untuk layanan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | | | 100,00 | 146.824.400,00 | | 146.824.400,00 | 60,00 | 33.061.572,00 | 60,00 | 22,52 | | 179.885.972,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | **51,90** | **34,42** | | | | | | |
| | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | **RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38** | **2.09.02** | **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan** | **Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan** | **100** | **1.960.057.880,00** | **63** | **17.917.900,00** | | | | | | | | **17.917.900,00** | | | | |
| | *2.09.02.2.01* | *Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | 12 | 13 |
| | *2.09.02.2.01.01* | *Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan* | Jumlah bangunan lumbung pangan yang tersedia<br>Jumlah bangunan Rumah Bed Dryer yang tersedia<br>Jumlah bangunan Rumah Rice Milling Unit (RMU) yang tersedia | 100,00 | 1.020.057.880,00 | 63,00 | 17.917.900,00 | | | | | | | | 17.917.900,00 | | 0,02 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | *2.09.02.2.01.02* | *Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur* | Jumlah lantai jemur yang tersedia | 100,00 | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.09.02.2.01.03* | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | 100,00 | 840.000.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **39** | **2.09.03** | **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | **Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari** | **100** | **6.766.778.700,00** | **100** | **3.241.885.730,00** | | **2.251.445.392,00** | **10,02** | **168.365.540,00** | **10,02** | **7,48** | | **3.405.733.270,00** | | | | |
| | *2.09.03.2.01* | *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya data informasi NBM dan PPH serta laporan ketersediaan pangan | 100,00 | 46.806.300 | 100,00 | 46.620.600,00 | | | | | | | | 46.620.600,00 | | 1,00 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 100,00 | 193.232.520 | 100,00 | 191.797.400,00 | | | | | | | | 191.797.400,00 | | 0,99 | | |
| | 2.09.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | 100,00 | 204.837.500,00 | 12 Laporan | 33.129.000,00 | 9,00 | 2.625.000,00 | 9,00 | 7,92 | | 207.462.500,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya Laporan Bulanan Harga Pangan | 100,00 | 58.685.000 | 100,00 | 47.630.000,00 | | | | | | | | 47.630.000,00 | | 0,81 | | |
| | 2.09.03.2.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Peserta sosialisasi tentang pemberdayaan lumbung pangan | 100,00 | 85.056.700 | 100,00 | 87.846.600,00 | | | | | | | | 87.846.600,00 | | 1,03 | | |
| | 2.09.03.2.01.06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 100,00 | 1.054.246.200 | 100,00 | 75.703.200,00 | | | | | | | | 75.703.200,00 | | 0,07 | | |
| | 2.09.03.2.01.07 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | 195 Keluarga | 88.196.000,00 | 4,28 | 1.765.000,00 | 4,28 | 2,00 | | 1.765.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.03.2.01.08 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | 1 Laporan | 293.768.000,00 | 2,00 | 1.540.000,00 | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.01.09 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal | | | | | 1 Laporan | 132.531.500,00 | 6,00 | 2.978.000,00 | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.01.10 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | | | | | 5 Unit | 232.226.000,00 | 2,00 | 630.000,00 | 2,00 | 0,27 | | 630.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.03.2.01.13 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | 1 Dokumen | 33.912.996,00 | 6,34 | 2.149.000,00 | 6,34 | 6,34 | | 2.149.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.03.2.01.15 | Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | | | | | 15 Dokumen | 21.155.000,00 | 3,00 | 440.000,00 | 3,00 | 2,08 | | 440.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.03.2.01.16 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (nbm) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | 15 Dokumen | 23.108.196,00 | 15,20 | 3.502.100,00 | 15,20 | 15,16 | | 3.502.100,00 | | 0,00 | | |
| | *2.09.03.2.02* | *Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya rapat teknis dan pleno Dewan Ketahanan Pangan | 100,00 | 33.777.900 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.03.2.02.03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 100,00 | 87.496.500 | 100,00 | 130.827.340,00 | 10 Ton | 135.900.000,00 | 100,00 | 127.992.900,00 | 100,00 | 94,18 | | 258.820.240,00 | | 2,96 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | 2.09.03.2.02.04 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | 100,00 | 27.972.000 | 100,00 | 27.848.600,00 | 10 Ton | 36.260.000,00 | 30,00 | 9.330.000,00 | 30,00 | 25,73 | | 37.178.600,00 | | 1,33 | | |
| | *2.09.03.2.03* | Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.03.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | | | 100,00 | 34.160.000,00 | | | | | | | | 34.160.000,00 | | 0,00 | | |
| | *2.09.03.2.04* | *Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Buku laporan analisis konsumsi pangan dan PPH konsumsi | 100,00 | 66.395.400 | 100,00 | 72.644.490,00 | | 47.341.500,00 | 7,00 | 3.186.000,00 | 7,00 | 6,73 | | 75.830.490,00 | | 1,14 | | |
| | 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Belanja uang yang diberikan kepada KWT spesifikasi tahap pembinaan (23 KWT); tahap pengembangan (18 KWT; tahap penumbuhan (63 KWT) | 100,00 | 5.113.110.180 | 100,00 | 2.321.970.000,00 | | 1.173.917.200,00 | 3,74 | 12.227.540,00 | 3,74 | 1,04 | | 2.334.197.540,00 | | 0,46 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **10,02** | **7,48** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **40** | **2.09.04** | **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | **Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)** | **100** | **92.971.700,00** | **100** | **92.454.647,00** | | **40.987.545,00** | **8,20** | **3.341.700,00** | **8,20** | **8,15** | | **95.796.347,00** | | | | |
| | *2.09.04.2.01* | *Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Laporan data daerah rawan pangan serta penyebabnya sehingga mempermudah untuk intervensi | 100,00 | 46.850.800,00 | 100,00 | 46.721.357,00 | | 40.987.545,00 | 8,20 | 3.341.700,00 | 8,20 | 8,15 | | 50.063.057,00 | | 1,07 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | *2.09.04.2.02* | *Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.04.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Terdatanya angka kemiskinan | 100,00 | 46.120.900,00 | 100,00 | 45.733.290,00 | | | | | | | | 45.733.290,00 | | 0,99 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | 2.09.04.2.02.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/kota | Terdatanya angka kemiskinan | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **8,20** | **8,15** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **41** | **2.09.05** | **Program Pengawasan dan Keamanan Pangan** | **Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi** | **100** | **86.397.400,00** | **100** | **63.481.200,00** | | **175.714.919,00** | **31,34** | **41.261.170,00** | **31,34** | **23,48** | | **37.591.170,00** | | | | |
| | *2.09.05.2.01* | *Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.05.2.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Petugas pengambil contoh (PPC) pangan segar yang bersertifikat | 100,00 | 39.894.400,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.05.2.01.04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1 Dokumen | 44.825.000,00 | 25,00 | 3.670.000,00 | 25,00 | 8,19 | | 3.670.000,00 | | 0,00 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | 2.09.05.2.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan rapid test kit dan alat Lab bahan pangan segar | 100,00 | 46.503.000,00 | 100,00 | 63.481.200,00 | | | | | | | | 63.481.200,00 | | 1,37 | | |
| | 2.09.05.2.01.06 | Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | 2 Dokumen | 38.978.900,00 | 30,00 | 6.449.220,00 | 30,00 | 16,55 | | 6.449.220,00 | | 0,00 | | |
| | 2.09.05.2.01.07 | Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | | | | | 1 Dokumen | 91.911.019,00 | 35,00 | 31.141.950,00 | 35,00 | 33,88 | | 31.141.950,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **31,34** | **23,48** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **42** | **2.10.04** | **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | **Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan** | **100** | **174.613.600,00** | **100** | **155.210.000,00** | | | | | | | | **155.210.000,00** | | | | |
| | *2.10.04.2.01* | *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.04.2.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100,00 | 174.613.600,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.10.04.2.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 155.210.000,00 | | | | | | | | 155.210.000,00 | | 0,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **43** | **2.10.05** | **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan** | **Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA** | **93** | **6.077.703.851,00** | **99,66** | **14.247.101.332,00** | | **1.161.413.750,00** | **25,61** | **297.463.350,00** | **25,61** | **25,61** | | **14.544.564.682,00** | | | | |
| | *2.10.05.2.01* | *Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.05.2.01.01 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembebasan lahan (3 paket); pengadaan tanah untuk pemakaman umum bersama (Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu) Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu dan Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya | 92,91 | 5.985.562.751,00 | 99,66 | 14.247.101.332,00 | | 1.111.413.750,00 | 26,76 | 297.463.350,00 | 26,76 | 26,76 | | 14.544.564.682,00 | | 2,43 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | 2.10.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi bidang pertanahan | 100,00 | 92.141.100,00 | | | | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **25,61** | **25,61** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **44** | **2.11.13** | **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** | **Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup** | | | **100** | **800.773.800,00** | | **777.795.000,00** | **2,56** | **0,00** | **2,56** | **0,00** | | **800.773.800,00** | | | | |
| | *2.11.13.1.11* | *Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (klhs) Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.13.1.11.02 | Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs Rpjpd/rpjmd | Terpenuhinya dokumen KLHS dalam rencana penyusunan RPJMD untuk program 5 Tahun Kepala Daerah terpilih dan KLHS dalam Rencana Penyusunan RPJPD Untuk Program Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun Kabupaten Musi Banyuasin (2 Dokumen) | | | 100,00 | 800.773.800,00 | | | | | | | | 800.773.800,00 | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.13.1.11.05 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | 2 Dokumen | 777.795.000,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.13.1.11.06 | Penyusunan Rpplh Kabupaten/kota | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **2,56** | **0,00** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **45** | **2.11.03** | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai** | **100** | **2.165.619.431,00** | | | | **1.060.693.174,00** | **12,56** | **82.389.553,00** | **12,56** | **7,77** | | **17.915.818,00** | | | | |
| | *2.11.03.2.01* | *Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 100,00 | 1.375.476.135 | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota | Pemeriksaan sampel lingkungan<br>Terjaganya Kesehatan Analis Laboratorium (Suplemen)<br>Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium<br>Tersedianya Alat Pengujian Laboratorium Lingkungan<br>Tersedianya Bahan Kimia | 100,00 | 395.071.648 | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.11.03.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | 100,00 | 395.071.648 | | | 1 Kegiatan | 62.648.000,00 | 35,00 | 16.415.818,00 | 35,00 | 26,20 | | 16.415.818,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.03.2.01.09 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | | | | | 1 Unit | 70.938.000,00 | 5,00 | 0 | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01.11 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | | | | | 2 Dokumen | 49.023.000,00 | 5,00 | 11.972.700,00 | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01.12 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | | | | | 204 Paket | 204.786.000,00 | 35,00 | 45.871.535,00 | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01.14 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim | | | | | 1 Laporan | 51.798.000,00 | 5,00 | 6.629.500,00 | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01.15 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | | | | 800 Dokumen | 608.658.174,00 | 5,00 | 1.500.000,00 | 5,00 | 0,25 | | 1.500.000,00 | | 0,00 | | |
| | *1.11.3.02.02* | *Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.02.02.02.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1.11.3.02.03* | *Pemulihan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.02.03.02.03.07 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Restorasi | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | | | 1 Kegiatan | 12.842.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **12,56** | **7,77** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **46** | **2.11.04** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | **Persentase Luasan RTH yang dikelola** | **100** | **8.231.121.087,00** | **100** | **6.043.652.677,00** | | **3.852.945.250,00** | **21,17** | **305.641.725,00** | **21,17** | **7,93** | | **6.349.294.402,00** | | | | |
| | *2.11.04.2.01* | *Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.04.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Aplikasi pelayanan retribusi lab lingkungan; aplikasi e-kinerja; aplikasi pelayanan retribusi kebersihan | 100,00 | 99.592.000 | 100,00 | 86.835.287,00 | | | | | | | | 86.835.287,00 | | 0,87 | | |
| | 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,00 | 7.882.141.885 | 100,00 | 5.797.858.882,00 | 10 Ha | 2.401.285.250,00 | 31,83 | 255.536.725,00 | 31,83 | 10,64 | | 6.053.395.607,00 | | 0,77 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.04.2.01.06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Laporan data dan hasil kegiatan sosialisasi pelaku usaha dan masyarakat | 100,00 | 124.693.601 | 100,00 | 79.479.254,00 | | | | | | | | 79.479.254,00 | | 0,64 | | |
| | 2.11.04.2.01.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Laporan data dan hasil kegiatan sosialisasi pelaku usaha dan masyarakat | 100,00 | 124.693.601 | 100,00 | 79.479.254,00 | 10 Ha | 1.451.660.000,00 | 3,54 | 50.105.000,00 | 3,54 | 3,45 | | 129.584.254,00 | | 1,04 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **21,17** | **7,93** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **47** | **2.11.06** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH** | **100** | **247.454.032,00** | **100** | **240.531.549,00** | | **127.423.000,00** | **15,21** | **13.866.774,00** | **15,21** | **10,88** | | **254.398.323,00** | | | | |
| | *2.11.06.2.01* | *Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/atau Izin Pplh | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | | | 3 Dokumen | 62.369.000,00 | 5,00 | 12.066.774,00 | 5,00 | 19,35 | | 12.066.774,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perusahaan yang dinilai Tim Proper | 100,00 | 122.446.032 | 100,00 | 121.440.355,00 | | | | | | | | 121.440.355,00 | | 0,99 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Laporan Koordinasi Penyusunan AMDAL | 100,00 | 125.008.000 | 100,00 | 119.091.194,00 | | | | | | | | 119.091.194,00 | | 0,95 | | |
| | 2.11.06.2.01.09 | Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | | | 20 Badan Usaha | 65.054.000,00 | 25,00 | 1.800.000,00 | 25,00 | 2,77 | | 1.800.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | **15,21** | **10,88** | | | | | | |
| | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **48** | **2.11.07** | **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh** | **Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1.11.7.02.01* | *Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.02.01.02.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, Dan Informasi Pengakuan Keberadaan Mha Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait Dengan Pplh | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **49** | **2.11.08** | **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** | **Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup** | **100** | **115.065.986,00** | **100** | **179.186.518,00** | | **49.711.000,00** | **5,00** | **8.175.600,00** | **5,00** | **16,45** | | **187.362.118,00** | | | | |
| | *2.11.08.2.01* | *Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Sekolah berwawasan lingkungan yang dibina | 100,00 | 115.065.986 | 100,00 | 93.294.700,00 | | | | | | | | 93.294.700,00 | | 0,81 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.08.2.01.04 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat | Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan | | | 100,00 | 85.891.818,00 | | | | | | | | 85.891.818,00 | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.08.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya tentang PPLH | | | | | 2 Lembaga | 49.711.000,00 | 5,00 | 8.175.600,00 | 5,00 | 16,45 | | 8.175.600,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **5,00** | **16,45** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **50** | **2.11.9** | **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** | **Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1.11.9.02.01* | *Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.02.01.02.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia Usaha/dunia Pendidikan/filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **51** | **2.11.10** | **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** | **Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan** | | | | | | **84.114.000,00** | **35,00** | **21.054.199,00** | **35,00** | **25,03** | | **21.054.199,00** | | | | |
| | *2.11.10.2.01* | *Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.10.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.10.2.01.04 | Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/kota | Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | | | | | 13 Pengaduan | 84.114.000,00 | 35,00 | 21.054.199,00 | 35,00 | 25,03 | | 21.054.199,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.10.2.01.06 | Penerapan Sanksi Administrasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **35,00** | **25,03** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **52** | **2.11.11** | **Program Pengelolaan Persampahan** | **Persentase Penanganan sampah** | **100** | **23.365.020.608,00** | **100** | **27.239.271.890,00** | | **10.876.770.628,00** | **37,04** | **2.925.498.765,00** | **37,04** | **26,90** | | **30.164.770.655,00** | | | | |
| | *2.11.11.2.01* | *Pengelolaan Sampah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11.2.01.01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau (IDMH)<br>Jumlah Lokasi Titik Pantau Adipura di 3 (Tiga) Kecamatan | 100,00 | 201.404.441,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Pengawasan penerapan pengurangan sampah dan sumbernya | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Lokasi penerapan sampah khususnya aspek pemilahan dan pengelolaan sampah serta pengelolaan TPA | 100,00 | 2.522.996.251,00 | 100,00 | 4.670.869.320,00 | | | | | | | | 4.670.869.320,00 | | 1,85 | | |
| | 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 100,00 | 2.875.000,00 | 100,00 | 60.711.186,00 | | | | | | | | 60.711.186,00 | | 21,12 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi | 100,00 | 20.637.744.916,00 | 100,00 | 22.507.691.384,00 | 3 Dokumen | 9.222.520.053,00 | 36,47 | 2.516.646.753,00 | 36,47 | 27,29 | | 25.024.338.137,00 | | 1,21 | | |
| | 2.11.11.2.01.08 | Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.11.11.2.01.17 | Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah Tps3r, Pdu, Tpst, Tps, Spa, Psel/pltsa, Rdf, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank | | | | | 17500 Ton | 1.579.250.575,00 | 42,14 | 408.852.012,00 | 42,14 | 25,89 | | 408.852.012,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **37,04** | **26,90** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **53** | **2.12.02** | **Program Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **100** | **1.037.455.256,00** | **100** | **381.244.214,00** | | **474.786.969,00** | **56,76** | **210.833.607,00** | **56,76** | **44,41** | | **592.077.821,00** | | | | |
| | *2.12.02.2.01* | *Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.02.2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Penduduk rentan administrasi kependudukan dapat memiliki dokumen administrasi kependudukan | 100,00 | 80.853.910 | | | | 56.450.000,00 | 45,00 | 15.454.788,00 | 45,00 | 27,38 | | 15.454.788,00 | | 0,19 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | KTP elektronik dan kartu keluarga yang terlayani | 100,00 | 248.625.699 | | | | 203.778.000,00 | 65,00 | 113.805.680,00 | 65,00 | 55,85 | | 113.805.680,00 | | 0,46 | | |
| | 2.12.02.2.01.03 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | | | | | 47.839.500,00 | 50,00 | 17.000.000,00 | 50,00 | 35,54 | | 17.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.12.02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan administrasi kependudukan; perekaman, pencetakan, penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak; pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan | 100,00 | 289.626.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.12.02.2.01.05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Terlayaninya permohonan surat keterangan pindah datang WNI (SKDWNI) dari seluruh Kab se Indonesia dan surat keterangan pindah WNI (SKPWNI) di 15 Kecamatan | 100,00 | 69.376.347 | | | | 40.004.050,00 | 45,00 | 14.690.354,00 | 45,00 | 36,72 | | 14.690.354,00 | | 0,21 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | *2.12.02.2.03* | *Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.02.2.03.02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah penduduk yang terlayani dalam pengurusan administrasi kependudukan dalam pelayanan keliling | 100,00 | 348.973.300 | 100,00 | 381.244.214,00 | | 126.715.419,00 | 55,00 | 49.882.785,00 | 55,00 | 39,37 | | 431.126.999,00 | | 1,24 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **56,76** | **44,41** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **54** | **2.12.03** | **Program Pencatatan Sipil** | **Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil** | **100** | **508.449.949,00** | **100** | **219.096.100,00** | | **261.391.402,00** | **65,00** | **144.921.377,00** | **65,00** | **55,44** | | **364.017.477,00** | | | | |
| | *2.12.03.2.01* | *Pelayanan Pencatatan Sipil* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100,00 | 259.052.937 | 100,00 | 219.096.100,00 | 17426 Dokumen | 169.547.000,00 | 65,00 | 101.291.727,00 | 65,00 | 59,74 | | 320.387.827,00 | | 1,24 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | *2.12.03.2.02* | *Penyelenggaraan Pencatatan Sipil* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.03.2.02.06 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 100,00 | 149.746.806 | | | 1 Laporan | 91.844.402,00 | 65,00 | 43.629.650,00 | 65,00 | 47,50 | | 43.629.650,00 | | 0,29 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | 2.12.03.2.02.09 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Kerjsama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan tinggi | 100,00 | 99.650.206,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **65,00** | **55,44** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **55** | **2.12.04** | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat** | **100** | **2.769.687.625,00** | **100** | **2.234.841.907,00** | | **5.476.650.374,00** | **28,95** | **959.342.983,00** | **28,95** | **17,52** | | **3.194.184.890,00** | | | | |
| | *2.12.04.2.01* | *Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Laporan kependudukan tahunan (70 buku); laporan bulanan informasi kependudukan (130 buku) | 100,00 | 49.996.000 | 100,00 | 25.530.782,00 | | 38.765.950,00 | 40,00 | 2.941.583,00 | 40,00 | 7,59 | | 28.472.365,00 | | 0,57 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | 2.12.04.2.01.02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan | 100,00 | 156.665.891 | 100,00 | 148.383.454,00 | | 160.144.701,00 | 45,00 | 2.175.634,00 | 45,00 | 1,36 | | 150.559.088,00 | | 0,96 | | |
| | *2.12.04.2.02* | *Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.02.01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , | Pengelolaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) | 100,00 | 1.948.003.036 | 100,00 | 1.577.848.728,00 | | 4.327.106.580,00 | 26,38 | 830.148.224,00 | 26,38 | 19,18 | | 2.407.996.952,00 | | 1,24 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | *2.12.04.2.03* | *Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terfasilitasinya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100,00 | 87.799.942 | 100,00 | 207.318.731,00 | 1 Sistem | 358.448.800,00 | 45,00 | 68.062.427,00 | 45,00 | 18,99 | | 275.381.158,00 | | 3,14 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | 2.12.04.2.03.04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | 15 Dokumen | 26.708.923,00 | 45,00 | 8.474.616,00 | 45,00 | 31,73 | | 8.474.616,00 | | 0,00 | | |
| | 2.12.04.2.03.05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100,00 | 199.917.646 | | | 12 Laporan | 77.133.766,00 | 35,00 | 2.649.600,00 | 35,00 | 3,44 | | 2.649.600,00 | | 0,01 | | |
| | 2.12.04.2.03.07 | Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat | Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 laporan | | | 100,00 | 31.053.692,00 | | 80.752.255,00 | 50,00 | 26.518.483,00 | 50,00 | 32,84 | | 57.572.175,00 | | 0,00 | | |
| | 2.12.04.2.03.08 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 100,00 | 49.999.620 | 100,00 | 130.470.958,00 | 15 Dokumen | 57.781.054,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | 130.470.958,00 | | 2,61 | | |
| | *2.12.04.2.04* | *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.04.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100,00 | 74.991.000 | 100,00 | 74.177.350,00 | 1 Laporan | 45.869.845,00 | 45,00 | 18.372.416,00 | 45,00 | 40,05 | | 92.549.766,00 | | 0,00 | | |
| | 2.12.04.2.04.03 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Penataan dan Pengembangan Kualitas SDM SIAK dalam penguasaan Teknologi Informasi Penataan dan Pengembangan Kualitas SDM SIAK dalam penguasaan Teknologi Informasi | 100,00 | 202.314.490 | 100,00 | 40.058.212,00 | 35 Orang | 303.938.500,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | 40.058.212,00 | | 0,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **28,95** | **17,52** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **56** | **2.12.05** | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | **Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan** | **100** | **129.959.670,00** | **100** | **46.246.994,00** | | **51.919.700,00** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | | **46.246.994,00** | | | | |
| | *2.12.05.2.01* | *Penyusunan Profil Kependudukan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 100,00 | 129.959.670 | 100,00 | 46.246.994,00 | 300 Dokumen | 51.919.700,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 46.246.994,00 | | 0,36 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **10,00** | **0,00** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **57** | **2.13.04** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Desa Tertib Administrasi** | **100** | **8.894.905.469,00** | **80,54** | **2.609.466.033,00** | | **6.401.034.863,00** | **33,39** | **2.553.444.349,00** | **33,39** | **39,89** | | **5.162.910.382,00** | | | | |
| | *2.13.04.2.01* | *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rakor Pemdes | 100,00 | 70.044.040 | 98,00 | 143.567.600,00 | | 145.701.198,00 | 10,00 | 14.013.900,00 | 10,00 | 9,62 | | 157.581.500,00 | | 2,25 | | |
| | 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Peserta bimtek penyusunan RPJMDes dan RKPDes | 100,00 | 358.887.830 | 90,00 | 273.553.600,00 | | 307.288.075,00 | 2,00 | 3.453.170,00 | 2,00 | 1,12 | | 277.006.770,00 | | 0,77 | | |
| | 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Sosialisasi kegiatan dana desa APBN; terlaksananya tata kelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES | 100,00 | 911.996.109 | 84,00 | 504.783.594,00 | | 146.764.000,00 | 6,00 | 7.923.900,00 | 6,00 | 5,40 | | 512.707.494,00 | | 0,56 | | |
| | 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Bimtek awal masa jabatan Kepala Desa dan bimtek Sekretaris Desa | | | 82,00 | 1.000.988.704,00 | | 5.061.078.240,00 | 40,00 | 2.450.454.250,00 | | | | 3.451.442.954,00 | | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Pendampingan pengelolaan ADD pada desa; monev kelompok usaha | 100,00 | 225.920.000 | 70,00 | 87.608.200,00 | | 39.952.000,00 | 84,00 | 33.160.451,00 | 84,00 | 83,00 | | 120.768.651,00 | | 0,53 | | |
| | 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | BUM desa dan lembaga yang dibina | 100,00 | 632.010.922 | 87,21 | 331.403.435,00 | | 154.594.000,00 | 12,00 | 16.199.378,00 | 12,00 | 10,48 | | 347.602.813,00 | | 0,55 | | |
| | 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Pemilihan Kades serentak dalam Kabupaten Musi Banyuasin | 100,00 | 5.943.880.637 | | | | 285.166.350,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Tersedianya profil desa | 100,00 | 190.817.200 | 24,33 | 19.565.000,00 | | 52.675.000,00 | 12,00 | 5.421.400,00 | 12,00 | 10,29 | | 24.986.400,00 | | 0,13 | | |
| | 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Sosialisasi inventarisasi aset desa melalui aplikasi SIPADES | 100,00 | 369.039.239 | 67,53 | 110.222.700,00 | | 55.464.000,00 | 2,00 | 710.000,00 | 2,00 | 1,28 | | 110.932.700,00 | | 0,30 | | |
| | 2.13.04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Bimtek BPD | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.13.04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terlacaknya, terukurnya dan terpetanya batas desa; tersedianya informasi data batas wilayah | 100,00 | 102.467.000 | 43,06 | 49.127.300,00 | | 55.464.000,00 | 29,00 | 15.451.000,00 | 29,00 | 27,86 | | 64.578.300,00 | | 0,63 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Penilaian dan pembinaan terhadap perkembangan desa/kelurahan; penilaian LPM dan KPM | 100,00 | 89.842.492 | 85,00 | 88.645.900,00 | | 96.888.000,00 | 8,00 | 6.656.900,00 | 8,00 | 6,87 | | 95.302.800,00 | | 1,06 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **33,39** | **39,89** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **58** | **2.13.05** | **Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** | **Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina**<br>**Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina**<br>**Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina** | **100** | **3.730.883.334** | **95,66** | **3.160.238.315,00** | | **2.848.559.758,00** | **18,85** | **493.015.484,00** | **18,85** | **17,31** | | **3.653.253.799,00** | | | | |
| | *2.13.05.2.01* | *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.05.2.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Uang kehormatan pembina adat | 100,00 | 1.031.444.700 | 99,36 | 880.876.000,00 | | 1.046.484.250,00 | 26,00 | 257.100.000,00 | 26,00 | 24,57 | | 1.137.976.000,00 | | 1,10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (rt, Rw, Pkk | | | | | | 2.571.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Bimtek pengurus BP SPAMS; pelatihan pengurus LPM; sosialisasi penguatan lembaga Posyandu; perlombaan 10 program pokok PKK | 100,00 | 213.581.500 | 90,68 | 163.202.600,00 | | 150.581.450,00 | 8,56 | 10.417.898,00 | 8,56 | 6,92 | | 173.620.498,00 | | 0,81 | | |
| | 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Bimtek penguatan kelembagaan Posyantek | 100,00 | 570.337.534 | 92,69 | 306.551.912,00 | | 152.736.225,00 | 5,00 | 5.613.208,00 | 5,00 | 3,68 | | 312.165.120,00 | | 0,55 | | |
| | 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional | 100,00 | 639.803.600 | 94,36 | 683.563.961,00 | | 482.682.858,00 | 18,00 | 79.569.818,00 | 18,00 | 16,48 | | 763.133.779,00 | | 1,19 | | |
| | 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Pembinaan BBGRM | 100,00 | 130.670.000 | 99,98 | 112.245.268,00 | | 91.272.800,00 | 11,00 | 9.699.935,00 | 11,00 | 10,63 | | 121.945.203,00 | | 0,93 | | |
| | 2.13.05.2.01.08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terpenuhinya penerapan program kerja TP PKK Kab. Muba | 100,00 | 1.145.046.000 | 94,78 | 1.013.798.574,00 | | 922.231.025,00 | 16,00 | 130.614.625,00 | 16,00 | 14,16 | | 1.144.413.199,00 | | 1,00 | | |
| | 2.13.05.2.01.10 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-keluarga, Warga, Dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.05.2.01.11 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **18,85** | **17,31** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **59** | **2.14.02** | **Program Pengendalian Penduduk** | **Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)** | **100** | **643.913.644,00** | **100** | **562.715.781,00** | | **578.531.200,00** | **22,78** | **130.321.000,00** | **22,78** | **22,53** | | **693.036.781,00** | | | | |
| | *2.14.02.2.01* | *Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02.2.01.05 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Terbentuknya Kerjasama (MOU) Dengan Pihak Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Tentang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | 100,00 | 54.572.040 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02.2.01.13 | Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan | Terlaksananya sosialisasi kajian dampak kependudukan | 100,00 | 62.257.100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02.2.01.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Pengusulan penghargaan Satya Lencana; mengikuti acara Puncak HARGANAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.02.01.02.01.21 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | | | | | 2 Kegiatan | 31.141.500,00 | 85,00 | 26.211.300,00 | 85,00 | 84,17 | | 26.211.300,00 | | 0,00 | | |
| | *2.14.02.2.02* | *Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.02.2.02.04 | Pemetaan Kependudukan | Terlaksananya Pemetaan Penduduk di 15 Kecamatan dan Adanya Peta Persebaran Penggunaan Alat Kontrasepsi di 15 Kecamatan | 100,00 | 137.418.924 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.02.2.02.08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Rumah Data Sebagai Pusat Data dan Informasi , Pusat Intervensi Masalah Kependuudkan, KB Pembangunan Keluarga dan Pusat Integrasi Aktifitas Kampung KB | 100,00 | 75.574.600 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.02.2.02.09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Kader Kampung KB, Kader KB Desa dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) | 100,00 | 175.804.500 | 100,00 | 259.578.900,00 | 1.305 Orang | 60.000.000,00 | 19,00 | 10.500.000,00 | | | | 270.078.900,00 | | 1,54 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.02.2.02.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Tersedianya Peta Persebaran Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Terwujudnya Sistem Informasi Keluarga di Kab. Muba | 100,00 | 14.957.460 | 100,00 | 166.336.881,00 | 15 Kecamatan | 72.309.700,00 | 100,00 | 72.309.700,00 | 100,00 | 100,00 | | 238.646.581,00 | | 15,96 | | |
| | 2.14.02.2.02.12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 laporan, Peta Persebaran Pemakaian Alat Kontrasepsi, Terwujudnya Sistem Informasi Keluarga dan | | | 100,00 | 46.800.000,00 | 1.305 Orang | 235.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.800.000,00 | | 0,00 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Tersedianya Peta Persebaran Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Terwujudnya Sistem Informasi Keluarga di Kab. Muba | 100,00 | 123.329.020 | 100,00 | 90.000.000,00 | 15 Kecamatan | 180.000.000,00 | 12,00 | 21.300.000,00 | 12,00 | 11,83 | | 111.300.000,00 | | 0,90 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **22,78** | **22,53** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **60** | **2.14.03** | **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** | **Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)**<br>**Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi**<br>**Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana** | **100** | **7.917.069.669,00** | **100** | **5.281.520.630,00** | | **7.660.322.699,05** | **16,73** | **1.244.235.297,00** | **16,73** | **16,24** | | **6.525.755.927,00** | | | | |
| | *2.14.03.2.01* | *Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.01.01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Tersebarnya Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana di Kab. Muba | 100,00 | 4.325.000 | 100,00 | 79.594.917,00 | | | | | | | | 79.594.917,00 | | 18,40 | | |
| | 2.14.03.2.01.03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Media advokasi dan KIE (5 jenis); media luar ruang (umbul-umbul, spanduk, standing banner dan kalender) | 100,00 | 24.645.000 | 100,00 | 139.379.600,00 | | | | | | | | 139.379.600,00 | | 5,66 | | |
| | 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Luar Ruang Pengadaan Media KIE Berupa Media Cetak dan Elektronik Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media cetak dan media luar ruang | 100,00 | 148.591.500 | 100,00 | 456.141.200,00 | | | | | | | | 456.141.200,00 | | 3,07 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Terlaksananya Rakor Kecamatan | 100,00 | 227.144.100 | 100,00 | 194.850.000,00 | | | | | | | | 194.850.000,00 | | 0,86 | | |
| | 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Biaya operasional : penyuluhan KB; pengolahan data; pembinaan kader; tenaga lini lapangan | 100,00 | 881.956.200 | 100,00 | 1.128.890.613,00 | | 375.000.000,00 | 10,00 | 37.016.000,00 | 10,00 | 9,87 | | 1.165.906.613,00 | | 1,32 | | |
| | 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPK | Tersebarnya Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana di Kab. Muba | 100,00 | 577.639.916 | 100,00 | 79.942.000,00 | | | | | | | | 79.942.000,00 | | 0,14 | | |
| | 2.14.03.2.01.09 | Penyediaan Dan Distribusi Sarana Kie Program Bangga Kencana | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 11276 Unit | 100,00 | 39.500.000 | | | | 172.250.000,00 | 18,00 | 27.906.903,00 | 18,00 | 16,20 | | 27.906.903,00 | | 0,71 | | |
| | 2.14.03.2.01.11 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes), Dan Mini Lokakarya (minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga | | | | | | 335.483.000,00 | 12,78 | 34.429.800,00 | 12,78 | 10,26 | | 34.429.800,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.03.2.01.12 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga | | | | | 15 Kecamatan | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.03.2.01.14 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan | | | | | 20 Organisasi | 85.120.000,00 | 21,00 | 17.050.000,00 | 21,00 | 20,03 | | 17.050.000,00 | | 0,00 | | |
| | *2.14.03.2.02* | *Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.02.01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Terlaksananya Orientasi PPKBD | 100,00 | 176.631.500 | 100,00 | 174.872.100,00 | | | | | | | | 174.872.100,00 | | 0,99 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jasa PPKBD (240 org x 10 bln); sub PPKBD (240 org x 10 bln) | | | 100,00 | 913.900.000,00 | | 1.944.000.000,00 | 20,00 | 387.200.000,00 | 20,00 | 19,92 | | 1.301.100.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.03.2.02.05 | Pembinaan Imp Dan Program Bangga Kencana Di Lini Lapangan Oleh Pkb/plkb | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana | 100,00 | 1.152.000.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.03.2.02.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana | 100,00 | 1.152.000.000 | | | | 64.978.000,00 | 82,00 | 53.035.900,00 | 82,00 | 81,62 | | 53.035.900,00 | | 0,05 | | |
| | *2.14.03.2.03* | *Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Obat pendamping kontrasepsi (8 jenis); operasional pendistribusian alokon; pperasional registrasi; visitasi Faskes | 100,00 | 235.501.760 | 100,00 | 137.396.000,00 | | 67.618.000,00 | 14,00 | 9.381.900,00 | 14,00 | 13,87 | | 146.777.900,00 | | 0,62 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Operasional untuk mengadakan pelayanan kepada akseptor KB IUD, implant, MOW dan MOP | 100,00 | 504.150.775 | 100,00 | 822.876.000,00 | | 2.576.620.000,00 | 12,75 | 319.697.000,00 | 12,75 | 12,41 | | 1.142.573.000,00 | | 2,27 | | |
| | 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Rehab gudang obat kontrasepsi; pagar balai penyuluhan KB Kec. Lalan @ (1 paket); LCD proyektor, modem, meja LCD, screen, laptop dan printer @ (16 unit) | 100,00 | 1.019.113.518 | 100,00 | 119.334.200,00 | | 769.722.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 119.334.200,00 | | 0,12 | | |
| | 2.14.03.2.03.07 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Terlaksananya pembinaan bagi peserta KB | 100,00 | 210.242.900 | 100,00 | 104.382.800,00 | | 62.005.500,00 | 13,00 | 7.735.800,00 | 13,00 | 12,48 | | 112.118.600,00 | | 0,53 | | |
| | 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jasa petugas : klinik KB (132 org); penghubung klinik (15 org); R/R klinik KB Kab (1 org); R/R klinik KB Kec (135 org) | 100,00 | 234.046.000 | 100,00 | 171.909.200,00 | | 64.342.249,05 | 43,11 | 26.738.730,00 | 43,11 | 41,56 | | 198.647.930,00 | | 0,85 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Pelayanan KB keliling dengan mobil unit pelayanan KB | 100,00 | 227.711.800 | 100,00 | 122.733.000,00 | | 82.591.350,00 | 32,00 | 26.315.470,00 | 32,00 | 31,86 | | 149.048.470,00 | | 0,65 | | |
| | 2.14.03.2.03.13 | Peningkatan Kesertaan Kb Pria | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (27 Orang) | 100,00 | 261.169.200 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | *2.14.03.2.04* | *Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.04.01 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB | 100,00 | 132.864.600 | | | | 42.011.800,00 | 30,00 | 11.546.840,00 | 30,00 | 27,48 | | 11.546.840,00 | | 0,09 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.03.2.04.02 | *Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB* | Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3 dokumen, Akseptor KB Yang Terlayani Melalui Kegiatan KB Bersama IBI, TNI dan PKK 3000 | 100,00 | 132.667.900 | 100,00 | 8.991.000,00 | | | | | | | | 8.991.000,00 | | 0,07 | | |
| | 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Pertemuan kelompok kerja di kampung KB; mini loka karya di kampung KB; operasional ketahanan keluarga di kampung KB | 100,00 | 575.168.000 | 100,00 | 542.178.000,00 | | | | | | | | 542.178.000,00 | | 0,94 | | |
| | 2.14.03.2.04.04 | Pembinaan Terpadu Kampung Kb | Laporan Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | 100,00 | 84.150.000,00 | 1 Laporan | 42.073.500,00 | 14,00 | 5.476.954,00 | 14,00 | 13,02 | | 89.626.954,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.03.2.04.06 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | | 153 Kampung | 876.506.500,00 | 33,24 | 280.704.000,00 | 33,24 | 32,03 | | 280.704.000,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **16,73** | **16,24** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **61** | **2.14.04** | **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** | **Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina** | **100** | **2.504.216.445,00** | **100** | **4.098.427.764,00** | | **3.302.670.500,00** | **29,97** | **942.760.565,00** | **29,97** | **28,55** | | **5.041.188.329,00** | | | | |
| | *2.14.04.2.01* | *Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pembinaan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) | Pembinaan kelompok UPPKS | 100,00 | 135.208.200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | KIT siap nikah anti *stunting* (25 bh); bina keluarga balita (BKB) *kit stunting* (12 bh) | | | 100,00 | 352.500.000,00 | | | | | | | | 352.500.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.01.03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Gizi Pada rema<br>Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Ibu Hamil dan Keluarga Yang Memiliki Anak Usia Dibawah 2 Tahun di | 100,00 | 492.079.491 | 100,00 | 94.862.400,00 | 30 Desa<br>30 Desa | | | | | | | 94.862.400,00 | | 0,19 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.04.2.01.04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelatihan Kader BKB di Lokus Stunting | 100,00 | 221.847.700 | 100,00 | 3.377.096.900,00 | | | | | | | | 3.377.096.900,00 | | 15,22 | | |
| | 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Melalui Kelompok Usaha dan Kelompok Tribina | 100,00 | 1.401.680.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.01.07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Terlaksananya Pembinaan terhadap remaja Pramuka Tentang Kespro, Nafza, PUP, HIV Aids dan Program KB | | | 100,00 | 159.388.444,00 | 80 Orang<br>4 Sekolah | | | | | | | 159.388.444,00 | | 0,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.04.2.01.08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Terlaksananya Pembinaan terhadap remaja Pramuka Tentang Kespro, Nafza, PUP, HIV Aids dan Program KB | 100,00 | 116.461.154 | 100,00 | 41.337.420,00 | | | | | | | | 41.337.420,00 | | 0,35 | | |
| | 2.14.04.2.01.16 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga | | | | | 15 Kecamatan | 134.400.000,00 | 14,00 | 18.390.000,00 | 14,00 | 13,68 | | 18.390.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.01.17 | Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Ppks, Pik-r Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (uppka) | Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL | | | | | 15 Kecamatan | 90.006.500,00 | 74,00 | 66.399.055,00 | 74,00 | 73,77 | | 66.399.055,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.01.18 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan | | | | | 154 Unit | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.01.19 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, | | | | | 350 Orang | 77.264.000,00 | 83,00 | 63.955.510,00 | 83,00 | 82,78 | | 63.955.510,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.01.21 | Orientasi Dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Ppks, Pik-r Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (uppka) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.14.04.2.02* | *Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.02.02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelatihan Terhadap Kader Kelompok BKB | 100,00 | 136.939.900 | 100,00 | 73.242.600,00 | | | | | | | | 73.242.600,00 | | 0,53 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.04.2.02.05 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu | | | | | | 1.305.000.000,00 | 2,00 | 12.216.000,00 | 2,00 | 0,94 | | 12.216.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.14.04.2.02.06 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil | | | | | | 1.566.000.000,00 | 52,00 | 781.800.000,00 | 52,00 | 49,92 | | 781.800.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **29,97** | **28,55** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62** | **2.15.02** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | **Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan**<br>**Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik** | **96,42** | **15.784.434.868,00** | **100,00** | **11.647.773.476,00** | | **29.183.777.760,00** | **32,74** | **9.458.305.188,00** | **32,74** | **32,41** | | **21.106.078.664,00** | | | | |
| | *2.15.02.2.02* | *Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Koordinasi terkait rencana pembangunan prasarana jalan ke Kementerian terkait | 12,18 | 12.167.480 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Perhubungan | |
| | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota | Pembangungan jaringan instalasi PJU (24 paket); pembangunan jaringan *solar cell* (3 paket); rambu bersuar (APILL); rambu lalu lintas dan rambu pendahulu penunjuk jurus an @(15 bh); patok tikungan (40 bh); kerucut lalu lintas (180 bh) | 95,61 | 7.654.613.221 | 100,00 | 4.338.734.365,00 | | 15.728.798.500,00 | 39,01 | 6.135.308.500,00 | 39,01 | 39,01 | | 10.474.042.865,00 | | 1,37 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan | |
| | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Lampu LED non *smart system* : 100 watt (830 bh); 40 watt (1.487 bh); 60 watt (726 bh); 80 watt (735 bh); lampu LED *smart system* 120 watt (137 bh); material lampu jalan (12 jenis); meterisasi lampu PJU (5 unit); pemeliharaan trafo 25 KVA (11 unit) | 100,00 | 6.049.199.609 | 100,00 | 5.525.901.432,00 | | 11.987.471.900,00 | 22,21 | 2.643.703.580,00 | 22,21 | 22,05 | | 8.169.605.012,00 | | 1,35 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan | |
| | *2.15.02.2.03* | *Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | BBM solar (76.538 liter); operasional dan pemeliharaan kendaraan (6 unit) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.15.02.2.04* | *Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | | | | | | 6.413.400,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | | |
| | *2.15.02.2.05* | *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 100,00 | 362.960.000 | 100,00 | 92.410.308,00 | | | | | | | | 92.410.308,00 | | 0,25 | | |
| | 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Pagar gedung PKB (211 m); taman gedung PKB (216 m2) | 100,00 | 34.388.259 | 100,00 | 27.382.500,00 | | 7.500.000,00 | 85,00 | 6.192.200,00 | 85,00 | 82,56 | | 33.574.700,00 | | 0,98 | Dinas Perhubungan | |
| | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Bukti lulus uji elektronik (BLUE) yang dikeluarkan oleh KEMENHUB | 100,00 | 273.127.000 | 100,00 | 163.837.000,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163.837.000,00 | | 0,60 | | |
| | 2.15.02.2.05.06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | | | 5 Laporan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor | 100,00 | 49.951.035 | 100,00 | 40.560.792,00 | | 238.070.161,00 | 85,00 | 192.492.131,00 | 85,00 | 80,86 | | 233.052.923,00 | | 4,67 | | |
| | 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Uji keliling di wilayah Musi Banyuasin | | | | | | 4.000.000,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.15.02.2.06* | *Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 5 Laporan | 142.074.023,00 | 30,00 | 25.029.900,00 | 30,00 | 17,62 | | 25.029.900,00 | | 0,00 | | |
| | 2.15.02.2.06.15 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 6 Laporan | 59.194.000,00 | 35,00 | 7.481.600,00 | 35,00 | 12,64 | | 7.481.600,00 | | 0,00 | | |
| | 2.15.02.2.06.16 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | | | | 1 Dokumen | 98.880.000,00 | 5,00 | 3.220.000,00 | 5,00 | 3,26 | | 3.220.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.15.02.2.06.17 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 97,49 | 279.898.350 | 100,00 | 295.397.000,00 | 3 Laporan | 723.624.678,00 | 57,00 | 388.354.980,00 | 57,00 | 53,67 | | 683.751.980,00 | | 2,44 | | |
| | *2.15.02.2.08* | *Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru; pemilihan pelajar pelopor; penyuluhan bagi sopir/juru mudi (ABDIYASA)(50 org); razia gabungan dengan instansi terkait (6x); sosialisasi terkait keselamatan LLAJ (24x) | 100,00 | 941.129.914 | 100,00 | 1.163.550.079,00 | | 164.751.098,00 | 40,00 | 56.522.297,00 | 40,00 | 34,31 | | 1.220.072.376,00 | | 1,30 | Dinas Perhubungan | |
| | 2.15.02.2.16.03 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sopir angkot/ardes yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota<br>Jumlah sopir speedboat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota<br>Jumlah sopir ojek roda empat | 100,00 | 127.000.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | | | | | | | | **32,74** | **32,41** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **63** | **2.15.03** | **Program Pengelolaan Pelayaran** | **Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik** | **100** | **3.308.359.899,00** | **100** | **1.280.611.891,00** | | **2.383.158.054,00** | **4,47** | **84.803.031,00** | **4,47** | **3,56** | | **649.426.356,00** | | | | |
| | *2.15.03.2.03* | *Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.03.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang | 100,00 | 36.030.000 | 100,00 | 60.491.400,00 | | 45.507.000,00 | 78,00 | 34.925.589,00 | 78,00 | 76,75 | | 95.416.989,00 | | 2,65 | Dinas Perhubungan | |
| | *2.15.03.2.13* | *Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.03.2.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau | Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | | | | | 1 Dokumen | 30.201.000,00 | 40,00 | 10.261.198,00 | 40,00 | 33,98 | | 10.261.198,00 | | 0,00 | | |
| | 2.15.03.2.13.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Operasional KM. Putri Cindai, KM. Banawa dan Jetsky | 100,00 | 1.523.373.827 | 100,00 | 527.953.291,00 | | 553.013.054,00 | 5,00 | 15.794.878,00 | 5,00 | 2,86 | | 543.748.169,00 | | 0,36 | | |
| | 2.15.03.2.13.06 | Pembangunan Dermaga Sungai Dan Danau | Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau | 100,00 | 1.748.956.072 | 100,00 | 692.167.200,00 | | 1.569.299.500,00 | 0,22 | 3.195.000,00 | | | | 695.362.200,00 | | 0,40 | Dinas Perhubungan | |
| | 2.15.03.2.13.11 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | | | | | 176 Unit | 185.137.500,00 | 15,00 | 20.626.366,00 | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **4,47** | **3,56** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **64** | **2.15.04** | **Program Pengelolaan Penerbangan** | **Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | | **48.020.000,00** | **30,00** | **7.387.659,00** | **30,00** | **15,38** | | **7.387.659,00** | | | | |
| | *2.15.04.2.01* | *Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.04.2.01.01 | Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter | Pembangunan pagar keliling bandara | 94,87 | 2.667.997.842 | 100,00 | 137.846.434,00 | | | | | | | | 137.846.434,00 | | 0,05 | Dinas Perhubungan | |
| | 2.15.04.2.01.02 | Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter | Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan | | | | | 1 Dokumen | 48.020.000,00 | 30,00 | 7.387.659,00 | 30,00 | 15,38 | | 7.387.659,00 | | 0,00 | Dinas Perhubungan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **30,00** | **15,38** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **65** | **2.16.02** | **Program Informasi dan Komunikasi Publik** | **Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik** | **100** | **9.516.029.700,00** | **100** | **10.065.844.038,00** | | | | | | | | **10.065.844.038,00** | | | | |
| | *2.16.02.2.01* | *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.02.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Terpeliharanya tiang baliho Tersedianya peralatan publikasi Terselenggaranya izin frekuensi / penyiaran radio dan TV | 100,00 | 1.074.136.744 | 100,00 | 600.223.864,00 | | | | | | | | 600.223.864,00 | | 0,56 | | |
| | 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Terpenuhinya Layanan Emergency Call Centre | 100,00 | 290.651.369 | 100,00 | 306.137.600,00 | | | | | | | | 306.137.600,00 | | 1,05 | | |
| | 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Peliputan kegiatan KDH/WKDH dan kunjungan kerja pejabat negara/lembaga pemerintah; pembuatan video greating Pemkab Muba; publikasi kegiatan pemerintah Kab. Muba pada media massa dan media elektronik | 100,00 | 850.854.209 | 100,00 | 913.425.424,00 | | | | | | | | 913.425.424,00 | | 1,07 | | |
| | 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kerjasama dengan media online; Muba Expo; penyiaran radio Gema Randik dan Muba TV | 100,00 | 39.712.470 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Pendampingan sengketa informasi publik, tersedianya baliho, spanduk bildboard | 100,00 | 506.145.230 | 100,00 | 566.689.055,00 | | | | | | | | 566.689.055,00 | | 1,12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media | Terpublikasinya kegiatan pemerintah kab. muba pada media masa dan elektronik serta terlaksananya kerja sama dengan media online | 100,00 | 6.387.233.690 | 100,00 | 7.535.084.995,00 | | | | | | | | 7.535.084.995,00 | | 1,18 | | |
| | 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Terlaksananya pelatihan serta tersedianya peralatan publikasi dalam rangka mendukung kegiatan pemkab muba | 100,00 | 129.544.200 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.02.2.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah | Tersedianya jasa pengacara sengketa informasi di komisi informasi Tersedianya jasa pengacara sengketa informasi di PTUN | 100,00 | 237.751.788 | 100,00 | 104.266.900,00 | | | | | | | | 104.266.900,00 | | 0,44 | | |
| | 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Terlaksananya sosialisasi dalam membangun masyarakat informasi (KIM) | | | 100,00 | 40.016.200,00 | | | | | | | | 40.016.200,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **66** | **2.16.03** | **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | **Persentase aplikasi / website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten** | **100** | **0,00** | **100** | **0,00** | | **7.804.016.430,20** | **42,91** | **2.032.435.384,00** | **42,91** | **26,04** | | **264.026.324,00** | | | | |
| | *2.16.02.2.01* | *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.02.2.01.15 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.02.2.01.16 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan | | | | | 2 Laporan | 166.962.250,00 | 30,00 | 4.561.400,00 | 30,00 | 2,73 | | 4.561.400,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.02.2.01.19 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | | | | | 3 Rekomendasi | 643.829.000,00 | 33,06 | 155.617.474,00 | 33,06 | 24,17 | | 155.617.474,00 | | 0,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | 2.16.02.2.01.21 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/luknis | | | | | 150 Media | 5.557.000.000,00 | 45,00 | 1.479.989.998,00 | 45,00 | 26,63 | | 1.479.989.998,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.02.2.01.22 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Strategi Komunikasi Publik yang disusun | | | | | 200 Dokumen | 531.522.070,70 | 40,00 | 128.240.188,00 | 40,00 | 24,13 | | 128.240.188,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.02.2.01.23 | Penyusunan Konten | Konten Informasi Publik | | | | | 3 Konten | 904.703.109,50 | 41,14 | 264.026.324,00 | 41,14 | 29,18 | | 264.026.324,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **42,91** | **26,04** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **67** | **2.16.03** | **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | **Persentase aplikasi / website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten** | **100** | **2.375.935.370,00** | **100** | **10.887.869.292,00** | | **8.650.449.091,50** | **60,71** | **2.277.597.254,00** | **60,71** | **26,33** | | **13.165.466.546,00** | | | | |
| | *2.16.03.2.01* | *Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jasa bandwidth, pengembangan SIKD seluruh PD | 100,00 | 1.725.936.849 | 100,00 | 9.682.045.781,00 | | | | | | | | 9.682.045.781,00 | | 5,61 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | *2.16.03.2.02* | *Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.03.2.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Penyusunan master plan dan sosialisasi Smart City; rencana induk SPBE; osialisasi dan evaluasi SPBE; terpeliharanya website/sistem aplikasi pemerintah daerah dan bertambahnya website perangkat daerah | 100,00 | 290.434.770 | 100,00 | 821.218.947,00 | | | | | | | | 821.218.947,00 | | 2,83 | | |
| | 2.16.03.2.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Peta menara telekomunikasi | 100,00 | 359.563.751 | 100,00 | 384.604.564,00 | | | | | | | | 384.604.564,00 | | 1,07 | | |
| | 2.16.03.2.18 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | | | | | 1 Dokumen | 253.609.380,00 | 30,00 | 24.885.690,00 | 30,00 | 9,81 | | 24.885.690,00 | | 0,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | 2.16.03.2.24 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | 48 Perangkat Daerah | 8.275.531.711,50 | 62,18 | 2.242.398.564,00 | 62,18 | 27,10 | | 2.242.398.564,00 | | 0,00 | | |
| | 2.16.03.2.27 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | | | | | 18 Program | 121.308.000,00 | 25,00 | 10.313.000,00 | 25,00 | 8,50 | | 10.313.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **60,71** | **26,33** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **68** | **2.17.03** | **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | **Jumlah koperasi aktif** | **100** | **1.088.607.024,00** | **100** | **402.982.648,00** | | **218.295.000,00** | **24,30** | **50.569.078,00** | **24,30** | **23,17** | | **453.551.726,00** | | | | |
| | 2.17.03.2.01 | *Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Tercapainya koperasi/ KUD yang sehat organisasi | 100,00 | 437.464.474 | 100,00 | 153.798.000,00 | | | | | | | | 153.798.000,00 | | 0,35 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| | 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi aktif dan sehat, lembaga/ kelompok dapat berbadan hukum secara legal | 100,00 | 651.142.550 | 100,00 | 249.184.648,00 | | | | | | | | 249.184.648,00 | | 0,38 | | |
| | 2.17.03.2.01.03 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 312 Unit Usaha | | | | | | 142.255.000,00 | 25,00 | 34.074.800,00 | 25,00 | 23,95 | | 34.074.800,00 | | 0,00 | | |
| | 2.17.03.2.01.04 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 120 Unit Usaha | | | | | | 76.040.000,00 | 23,00 | 16.494.278,00 | 23,00 | 21,69 | | 16.494.278,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **24,30** | **23,17** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **69** | **2.17.04** | **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** | **Jumlah Koperasi sehat** | **50** | **42.180.000,00** | **100** | **149.492.489,00** | | **247.357.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **149.492.489,00** | | | | |
| | *2.17.04.2.01* | *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota | | | | | | | 247.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.17.04.2.01.02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Penilaian koperasi dan UKM berpretasi, menghadiri HUT Koperasi tingkat nasional | 50,00 | 42.180.000,00 | 100,00 | 149.492.489,00 | | | | | | | | 149.492.489,00 | | 3,54 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **70** | **2.17.05** | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | **Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya** | **100** | **705.442.110,00** | **100** | **564.174.500,00** | | **173.292.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **564.174.500,00** | | | | |
| | *2.17.05.2.01* | *Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang mengikuti bimtek pelatihan pengelolaan koperasi | 100,00 | 535.922.120 | 100,00 | 564.174.500,00 | | 173.292.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 564.174.500,00 | | 1,05 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| | *2.17.05.2.02* | *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.05.2.02.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi UKM | Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang mengikuti bimtek pelatihan pengelolaan koperasi | 100,00 | 169.519.990 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **71** | **2.17.06** | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | **Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing** | **100** | **277.570.640,00** | **100** | **444.060.100,00** | | **224.699.200,00** | **25,00** | **45.281.100,00** | **25,00** | **20,15** | | **489.341.200,00** | | | | |
| | *2.17.06.2.01* | *Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing dengan lembaga keuangan lainnya | 100,00 | 277.570.640,00 | 100,00 | 444.060.100,00 | | | | | | | | 444.060.100,00 | | 1,60 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| | 2.17.06.2.01.05 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (60 Unit Usaha | | | | | | 224.699.200,00 | 25,00 | 45.281.100,00 | 25,00 | 20,15 | | 45.281.100,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **25,00** | **20,15** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **72** | **2.17.07** | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** | **Jumlah UMK yang berdaya saing** | **100** | **1.052.371.699,00** | **100** | **623.996.257,00** | | **634.534.900,00** | **42,29** | **248.217.400,00** | **42,29** | **39,12** | | **872.213.657,00** | | | | |
| | *2.17.07.2.01* | *Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Termonitornya UMKM yang telah mendapat kredit program KUR; pemberian IUMK dan akurasi data kinerja UMKM | 100,00 | 344.712.209 | 100,00 | 149.940.800,00 | | | | | | | | 149.940.800,00 | | 0,43 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| | 2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi tentang memproduksi makanan dan minuman halal | 100,00 | 413.089.700 | 100,00 | 176.874.730,00 | | 160.735.000,00 | 45,00 | 59.252.400,00 | 45,00 | 36,86 | | 236.127.130,00 | | 0,57 | | |
| | 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Pelaku UMKM yang dibina berjalan baik dan usaha berkembang | 100,00 | 294.569.790 | 100,00 | 149.680.727,00 | | 75.000.000,00 | 63,00 | 47.225.100,00 | 63,00 | 62,97 | | 196.905.827,00 | | 0,67 | | |
| | 2.17.07.2.01.06 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 60 orang, Terpenuhinya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan | | | 99,00 | 147.500.000,00 | | | | | | | | 147.500.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.17.07.2.01.09 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | | | | | 100 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.17.07.2.01.11 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | | 260 Unit Usaha | 139.500.000,00 | 5,00 | 3.654.900,00 | | | | 3.654.900,00 | | | | |
| | 2.17.07.2.01.14 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (3 Unit Usaha) | | | | | 3000 Unit Usaha | 122.799.900,00 | 45,00 | 51.585.000,00 | 45,00 | 42,01 | | 51.585.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.17.07.2.01.15 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | | | | | 90 Orang | 86.500.000,00 | 100,00 | 86.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 86.500.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **42,29** | **39,12** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **73** | **2.17.08** | **Program Pengembangan UMKM** | **Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil** | **100** | **6.695.098.149,00** | **100** | **3.521.343.538,00** | | **6.168.631.425,00** | **48,96** | **3.015.779.000,00** | **48,96** | **48,89** | | **6.537.122.538,00** | | | | |
| | *2.17.08.2.01* | *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Bantuan untuk kelompok UKM pertanian, perikanan, pertukangan dan perkebunan; pengadaan peralatan tukang; pengadaan peralatan bengkel otomotif; belanja modal kerja pelaku UMKM | 100,00 | 6.695.098.149,00 | 100,00 | 3.521.343.538,00 | | | | | | | | 3.521.343.538,00 | | 0,53 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| | 2.17.08.2.01.06 | Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi | Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | | | | | 200 Unit Usaha | 6.168.631.425,00 | 48,96 | 3.015.779.000,00 | 48,96 | 48,89 | | 3.015.779.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **48,96** | **48,89** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **74** | **2.18.02** | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | **Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah** | **100** | **374.228.386,00** | **100** | **195.281.329,00** | | **239.665.750,00** | **32,46** | **19.555.200,00** | **32,46** | **8,16** | | **214.836.529,00** | | | | |
| | 2.18.02.2.01 | *Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersedianya deregulasi di bidang pelayanan publik perizinan dan non perizinan | 100,00 | 167.400.897 | 100,00 | 97.462.283,00 | | 30.452.250,00 | 50,00 | 5.727.900,00 | 50,00 | 18,81 | | 103.190.183,00 | | 0,62 | | |
| | 2.18.02.2.01.02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 100,00 | 20.134.950 | 100,00 | 32.965.158,00 | | | | | | | | 32.965.158,00 | | 1,64 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | 2.18.02.2.01.03 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | | | | | 28 Dokumen | 40.153.000,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.02.2.01.04 | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | 1 Dokumen | 33.920.500,00 | 47,00 | 2.649.600,00 | 47,00 | 7,81 | | 2.649.600,00 | | 0,00 | | |
| | *2.18.02.2.02* | *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.02.2.02.01 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | buku profil potensi dan peluang investasi (156 buku); peta investasi; penyusunan data dan informasi | 100,00 | 7.069.800 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Pengembangan Database Aplikasi Peta Investasi Kab. Muba | 100,00 | 179.622.739 | 100,00 | 64.853.888,00 | | | | | | | | 64.853.888,00 | | 0,36 | | |
| | 2.18.02.2.02.04 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | 1 Dokumen | 135.140.000,00 | 24,10 | 11.177.700,00 | 24,10 | 8,27 | | 11.177.700,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **32,46** | **8,16** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **75** | **2.18.03** | **Program Promosi Penanaman Modal** | **Minat investasi** | **100** | **570.848.551,00** | **100** | **297.620.883,00** | | **395.431.400,00** | **55,00** | **106.706.240,00** | **55,00** | **26,98** | | **404.327.123,00** | | | | |
| | *2.18.03.2.01* | *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pembuatan info grafis dan video grafis; Pameran Nasional, Pameran Provinsi, Muba Expo | 100,00 | 570.848.551 | 100,00 | 297.620.883,00 | | 395.431.400,00 | 55,00 | 106.706.240,00 | 55,00 | 26,98 | | 404.327.123,00 | | 0,71 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **55,00** | **26,98** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **76** | **2.18.04** | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | **Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan**<br>**Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**<br>**Persentase Penerbitan izin dan non perizinan sesuai SOP** | **100** | **1.653.056.560,00** | **100** | **798.664.073,00** | | **1.129.583.525,00** | **43,81** | **106.710.828,00** | **43,81** | **9,45** | | **905.374.901,00** | | | | |
| | *2.18.04.2.01* | *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Belanja aplikasi : e-Pengadaan; Sistem Antrian Berbasis Sistem Komputer; Survei Kepuasan Masyarakat; Tracking, Notifikasi Perizinan dan Upgrade Website | 100,00 | 259.193.194 | 100,00 | 155.051.865,00 | | | | | | | | 155.051.865,00 | | 0,60 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha yang Perlu diterbitkan Perizinan dan Non perizinan Melalui PATEN Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | 100,00 | 1.104.004.850 | 100,00 | 524.701.200,00 | | | | | | | | 524.701.200,00 | | 0,48 | | |
| | 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Tersedianya jumlah pengaduan/saran/masukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan indek kepuasan masyarakat (IKM) atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan | 100,00 | 97.112.044 | 100,00 | 55.487.778,00 | | | | | | | | 55.487.778,00 | | 0,57 | | |
| | 2.18.04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Tersedianya Fasilitasi Tim Satgas Percepatan Berusaha Terjadinya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah | 100,00 | 192.746.472 | 100,00 | 63.423.230,00 | | | | | | | | 63.423.230,00 | | 0,33 | | |
| | 2.18.04.2.01.05 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 3 Dokumen | 76.883.125,00 | 60,00 | 20.100.882,00 | 60,00 | 26,14 | | 20.100.882,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.04.2.01.06 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | 1500 Pelaku Usaha | 307.263.250,00 | 10,81 | 7.264.900,00 | 10,81 | 2,36 | | 7.264.900,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.04.2.01.07 | Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | 10 Pelaku Usaha | 55.790.850,00 | 65,00 | 23.528.600,00 | 65,00 | 42,17 | | 23.528.600,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.04.2.01.08 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku | | | | | 4 Kegiatan Usaha | 689.646.300,00 | 55,00 | 55.816.446,00 | 55,00 | 8,09 | | 55.816.446,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **43,81** | **9,45** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **77** | **2.18.05** | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | **Nilai Realisasi investasi PMA**<br>**Nilai Realisasi investasi PMDN** | **100** | **725.964.688,00** | **100** | **651.834.271,00** | | **206.928.959,00** | **50,01** | **54.413.002,00** | **50,01** | **26,30** | | **706.247.273,00** | | | | |
| | *2.18.05.2.01* | *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Tersedianya Jumlah Berita Acara/Laporan perusahaan yang di pantau/diawasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Peserta Bimtek LKPM | 100,00 | 153.146.062,00 | 100,00 | 95.704.000,00 | | | | | | | | 95.704.000,00 | | 0,62 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Tersedianya Database Perusahaan/Pelaku Usaha Jumlah BA/Laporan Pasilitasi Permasalahan | 100,00 | 403.385.516,00 | 100,00 | 392.146.919,00 | | | | | | | | 392.146.919,00 | | 0,97 | | |
| | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100,00 | 169.433.110,00 | 100,00 | 163.983.352,00 | | | | | | | | 163.983.352,00 | | 0,97 | | |
| | 2.18.05.2.01.04 | Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | 15 Kegiatan Usaha | 80.000.000,00 | 50,00 | 14.196.000,00 | 50,00 | 17,75 | | 14.196.000,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.05.2.01.05 | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | 20 Pelaku Usaha | 42.189.959,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.18.05.2.01.06 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan | | | | | 15 Kegiatan Usaha | 84.739.000,00 | 55,00 | 40.217.002,00 | 55,00 | 47,46 | | 40.217.002,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **50,01** | **26,30** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **78** | **2.18.06** | **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | **Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola** | **100** | **132.461.987,00** | **100** | **96.055.550,00** | | **59.802.000,00** | **55,00** | **10.238.400,00** | **55,00** | **17,12** | | **106.293.950,00** | | | | |
| | *2.18.06.2.01* | *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Informasi Perizinan dan Non Perizinan bebasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data | 100,00 | 132.461.987,00 | 100,00 | 96.055.550,00 | | | | | | | | 96.055.550,00 | | 0,73 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | 2.18.06.2.01.02 | Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | | 2 Dokumen | 59.802.000,00 | 55,00 | 10.238.400,00 | 55,00 | 17,12 | | 10.238.400,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **55,00** | **17,12** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **79** | **2.19.02** | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** | **Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina**<br>**Persentase pemuda yang bebas narkoba** | **100** | **4.049.275.100,00** | **100** | **1.163.697.060,00** | | **904.676.500,00** | **13,64** | **107.261.900,00** | **13,64** | **11,86** | | **1.250.118.060,00** | | | | |
| | *2.19.02.2.01* | *Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Pelatihan Kewirausahaan Bidang Perbengkelan | 100,00 | 124.955.400 | 100,00 | 246.272.200,00 | | | | | | | | 246.272.200,00 | | 1,97 | | |
| | 2.19.02.2.01.04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis | Peserta Penyuluhan tentang bahaya Narkoba | 100,00 | 217.837.800 | 100,00 | 216.342.400,00 | | | | | | | | 216.342.400,00 | | 0,99 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan | 100,00 | 401.506.900 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.02.2.01.09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Peserta pendidikan dan Pelatihan dasar Paskibraka | 100,00 | 1.490.989.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.02.2.01.11 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | | | 305 Orang | 543.713.000,00 | 5,76 | 14.839.500,00 | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01.14 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | | | | | 200 Orang | 107.530.500,00 | 5,00 | 6.001.400,00 | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01.15 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan | 100,00 | 1.490.989.000 | | | 75 Orang | 15.907.000,00 | 97,08 | 15.442.600,00 | 97,08 | 97,08 | | 15.442.600,00 | | 0,01 | | |
| | *2.19.02.2.02* | *Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Pemuda (30 org); KNPI | 100,00 | 161.498.500 | 100,00 | 350.541.230,00 | | | | | | | | 350.541.230,00 | | 2,17 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.02.2.02.03 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 100,00 | 161.498.500 | 100,00 | 350.541.230,00 | 20 Organisasi | 237.526.000,00 | 30,00 | 70.978.400,00 | 30,00 | 29,88 | | 421.519.630,00 | | 2,61 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **13,64** | **11,86** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **80** | **2.19.03** | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** | **Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga**<br>**Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk Unit** | **100** | **27.396.595.039,00** | **98,12** | **56.302.471.687,00** | | **84.734.653.811,00** | **22,25** | **10.431.119.303,00** | **22,25** | **12,31** | | **66.733.590.990,00** | | | | |
| | *2.19.03.2.01* | *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana olahraga yang representatif | 100,00 | 10.178.985.447,00 | 96,34 | 27.634.650.032,00 | | | | | | | | 27.634.650.032,00 | | 2,71 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.03.2.01.05 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 100,00 | 10.178.985.447,00 | 96,34 | 27.634.650.032,00 | 27 Unit | 31.726.066.523,00 | 15,28 | 4.735.815.264,00 | 15,28 | 14,93 | | 32.370.465.296,00 | | 3,18 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | *2.19.03.2.02* | *Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/kota | 100,00 | 1.809.787.100,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.03.2.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.19.03.2.02.04 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 1.312.861.207,00 | 4 Kegiatan | 12.445.500.399,00 | 15,00 | 107.253.388,00 | 15,00 | 0,86 | | 1.420.114.595,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.03.2.02.06 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | | | 100,00 | 1.312.861.207,00 | 145 Orang | 706.507.500,00 | 30,00 | 159.216.468,00 | 30,00 | 22,54 | | 1.472.077.675,00 | | 0,00 | | |
| | *2.19.03.2.03* | *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.03.06 | Seleksi Atlet Daerah | Atlet Daerah yang Diseleksi | | | 100,00 | 78.926.900,00 | 150 Orang | 51.103.000,00 | 100,00 | 49.603.000,00 | 100,00 | 97,06 | | 128.529.900,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.03.2.03.09 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Makan dan Minum pada Fasilitas Pelayanan Pendidikan PPLP-D; Penginapan Atlet PPLP-D; Pakaian Kerja Lapangan | 100,00 | 10.595.699.492,00 | 100,00 | 10.164.002.281,00 | 248 Orang | 11.241.548.250,00 | 45,00 | 3.275.128.332,00 | 45,00 | 29,13 | | 13.439.130.613,00 | | 1,27 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | *2.19.03.2.04* | *Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Dana Hibah KONI Kabupaten Muba | 100,00 | 3.824.980.000,00 | 100,00 | 14.413.445.760,00 | | | | | | | | 14.413.445.760,00 | | 3,77 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.03.2.04.03 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/kota Dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (1 Dokumen) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.03.2.04.05 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | Pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | | | | | 1 Dokumen | 27.061.098.300,00 | 25,00 | 2.094.415.750,00 | 25,00 | 7,74 | | 2.094.415.750,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.03.2.04.06 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | | | | | 3 Dokumen | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *2.19.03.2.05* | *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.05.01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Kegiatan Jalan Sehat, Sepeda Sehat, senam bersama dan peringatan HAORNAS | 100,00 | 114.963.000,00 | 100,00 | 334.567.800,00 | | | | | | | | 334.567.800,00 | | 2,91 | | |
| | 2.19.03.2.05.06 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | 1 Laporan | 154.292.960,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.03.2.05.07 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 100,00 | 782.491.000,00 | 100,00 | 1.051.156.500,00 | 3 Laporan | 1.102.581.879,00 | 5,00 | 9.687.101,00 | 5,00 | 0,88 | | 1.060.843.601,00 | | 1,36 | | |
| | 2.19.03.2.05.08 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 100,00 | 89.689.000,00 | | | 5 Dokumen | 140.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **22,25** | **12,31** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **81** | **2.19.04** | **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | **Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi** | **91,62** | **4.388.687.990,00** | **100** | **3.533.350.466,00** | | **3.181.772.150,00** | **37,77** | **1.055.918.532,00** | **37,77** | **33,19** | | **4.589.268.998,00** | | | | |
| | *2.19.04.2.01* | *Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.04.2.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (1 Dokumen) | | | | | | 31.200.000,00 | 30,00 | 8.796.400,00 | 30,00 | 28,19 | | 8.796.400,00 | | 0,00 | | |
| | 2.19.04.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Dana Hibah Kwarcab Musi Banyuasin | 100,00 | 3.853.455.389,00 | 100,00 | 2.896.938.207,00 | | 2.500.000.000,00 | 40,00 | 886.299.046,00 | 40,00 | 35,45 | | 3.783.237.253,00 | | 0,98 | | |
| | 2.19.04.2.01.03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Peserta Pembinaan Saka Pariwisata | 42,97 | 313.667.951,00 | 100,00 | 307.273.484,00 | | 214.081.020,00 | 30,00 | 49.484.326,00 | 30,00 | 23,11 | | 356.757.810,00 | | 1,14 | | |
| | 2.19.04.2.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Monitoring dan Evaluasi kegiatan pramuka di Kabupaten Musi Banyuasin, Pembinaan Gudep Pramuka 100%, Monitoring Kwarran 15 Kwarran dan Pembinaan Gudep Pramuka di Sekolah sebnayak 302 Gudep | 100,00 | 221.564.650,00 | 100,00 | 329.138.775,00 | | 236.493.530,00 | 50,00 | 106.409.680,00 | 50,00 | 44,99 | | 435.548.455,00 | | 1,97 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 2.19.04.2.01.07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Dan Pengawasan Prasarana Dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (1 Unit) | | | | | | 199.997.600,00 | 5,00 | 4.929.080,00 | 5,00 | 2,46 | | 4.929.080,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **37,77** | **33,19** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **82** | **2.20.02** | **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | **Persentase data Statistik Sektoral**<br>**Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan**<br>**Persentase Ketersediaan Data Statistik Pertanian** | **100** | **1.256.545.293,00** | **100** | **1.199.075.684,00** | | **766.009.363,30** | **36,42** | **135.141.474,00** | **36,42** | **17,64** | | **1.314.051.242,00** | | | | |
| | *2.20.02.2.01* | *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | | 10 = 6 + 8 | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Data Base Kegiatan Satu Data Kabupaten; Estimasi Data Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Banyuasin - Tersedianya Data Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Setiap Bulan; Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Bidang Perkebunan | 100,00 | 874.033.652 | 100,00 | 448.989.535,00 | | | | | | | | 448.989.535,00 | | 0,51 | Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan | |
| | 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Metadata Statistik Sektoral | 100,00 | 199.052.147 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.20.02.2.01.06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah | Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten 1 aplikasi, Tersedianya Statistik Kecamatan 1 dokumen, Tersedianya Statistik Level Desa dan Fasilitasi Statistik Desa 15 Kecamatan | | | 100,00 | 537.584.055,00 | | | | | | | | 537.584.055,00 | | 0,00 | | |
| | 2.20.02.2.01.07 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Sosialisasi/worksshop dan studi pembelajaran Statistik Sektoral Pemda | 100,00 | 183.459.494 | 100,00 | 212.502.094,00 | 1 Kegiatan | 250.947.863,30 | 60,51 | 112.284.258,00 | 60,51 | 44,74 | | 324.786.352,00 | | 1,77 | | |
| | 2.20.02.2.01.08 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi | | | | | 100 Persentase | 327.036.500,00 | 25,00 | 18.934.616,00 | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | 2.20.02.2.01.10 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | | | 1 Dokumen | 154.814.000,00 | 25,00 | 1.231.300,00 | | | | | | | | |
| | 2.20.02.2.01.11 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | | | | | 1 Dokumen | 33.211.000,00 | 20,00 | 2.691.300,00 | 20,00 | 8,10 | | 2.691.300,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **36,42** | **17,64** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Persandian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **83** | **2.21.02** | **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | **Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah** | **100** | **539.646.977,00** | **100** | **540.355.719,00** | | **1.552.730.108,00** | **45,70** | **573.007.388,00** | **45,70** | **36,90** | | **1.113.363.107,00** | | | | |
| | *2.21.02.2.01* | *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen NSPK | 100,00 | 135.502.941 | 100,00 | 197.050.558,00 | | | | | | | | 197.050.558,00 | | 1,45 | | |
| | 2.21.02.2.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya NSPK Persandian dan Terlaksananya Kontra Penginderaan Ruang Rapat | 100,00 | 64.335.100 | | | | 389.678.000,00 | 36,74 | 99.678.000,00 | 36,74 | 25,58 | | 99.678.000,00 | | 1,55 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Tersedianya Jasa Pendukung Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati | 100,00 | 339.808.936 | 100,00 | 179.295.762,00 | | 825.480.200,50 | 62,49 | 473.329.388,00 | 62,49 | 57,34 | | 652.625.150,00 | | 1,92 | | |
| | 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Peralatan Pendukung Tanda Tangan Elektronik | | | 100,00 | 164.009.399,00 | | 337.571.907,50 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | | 164.009.399,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **45,70** | **36,90** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **84** | **2.22.02** | **Program Pengembangan Kebudayaan** | **Penyelenggaraan festival seni dan budaya** | **100** | **4.625.152.813,00** | **100** | **5.920.608.370,00** | | **4.423.242.825,00** | **45,64** | **1.925.766.821,00** | **45,64** | **43,54** | | **7.846.375.191,00** | | | | |
| | *2.22.02.2.01* | *Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.02.2.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Pembinaan nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan kepada pelajar | 100,00 | 272.329.313,00 | 100,00 | 321.073.670,00 | | 171.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 321.073.670,00 | | 1,18 | | |
| | *2.22.02.2.02* | *Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 2.22.02.2.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Pagelaran seni budaya lintas daerah dan bantuan alat kesenian | 100,00 | 3.391.186.200,00 | 100,00 | 5.091.489.900,00 | | 3.466.363.825,00 | 56,46 | 1.863.816.821,00 | 56,46 | 53,77 | | 6.955.306.721,00 | | 2,05 | | |
| | 2.22.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Kegiatan Festival Randik, video seni dan budaya tradisional, video dokumenter cejarah Musi Banyuasin | 100,00 | 961.637.300,00 | 100,00 | 508.044.800,00 | | 785.875.000,00 | 7,88 | 61.950.000,00 | 7,88 | 7,88 | | 569.994.800,00 | | 0,59 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **45,64** | **43,54** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **85** | **2.22.04** | **Program Pembinaan Sejarah** | **Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan** | **100** | **379.820.000,00** | **100** | **291.150.000,00** | | **343.150.000,00** | **29,04** | **99.650.000,00** | **29,04** | **29,04** | | **390.800.000,00** | | | **29,04** | |
| | *2.22.04.2.01* | *Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.04.2.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Pembuatan video : seni, tradisi dan budaya Muba; profil seniman Muba; rekam situs cagar budaya dan rumah tradisional | 100,00 | 379.820.000,00 | 100,00 | 291.150.000,00 | | 343.150.000,00 | 29,04 | 99.650.000,00 | 29,04 | 29,04 | | 390.800.000,00 | | 1,03 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **29,04** | **29,04** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **86** | **2.22.05** | **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** | **Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan iventarisasi** | **100** | **725.262.000,00** | **100** | **592.242.598,00** | | **286.397.500,00** | **26,43** | **107.800.000,00** | **26,43** | **37,64** | | **700.042.598,00** | | | | |
| | *2.22.05.2.02* | *Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.05.2.02.03 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Situs makam : rehab (4 paket), pemeliharaan jalan setapak; pembangunan pagar; penataan halaman kuburan @ (1 paket) | 100,00 | 725.262.000,00 | 100,00 | 592.242.598,00 | | 286.397.500,00 | 37,64 | 107.800.000,00 | 37,64 | 37,64 | | 700.042.598,00 | | 0,97 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **26,43** | **37,64** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **87** | **2.22.06** | **Program Pengelolaan Permuseuman** | **Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi** | **100** | **199.482.000,00** | **100** | **208.040.300,00** | | **415.351.000,00** | **24,05** | **99.885.000,00** | **24,05** | **24,05** | | **307.925.300,00** | | | | |
| | *2.22.06.2.01* | *Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.06.2.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Pembangunan museum | 100,00 | 199.482.000,00 | 100,00 | 208.040.300,00 | | 415.351.000,00 | 24,05 | 99.885.000,00 | 24,05 | 24,05 | | 307.925.300,00 | | 1,54 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **24,05** | **24,05** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **88** | **2.23.02** | **Program Pembinaan Perpustakaan** | **Terbinanya PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **1.871.500.609,00** | **100** | **810.941.304,00** | | **2.488.562.680,50** | **30,67** | **544.631.499,00** | **30,67** | **21,89** | | **1.151.457.749,00** | | | | |
| | | | **Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *2.23.02.2.01* | *Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Tersedianya pembaruan e-library dan buku elektronik (e-book) sebanyak 1.000 judul buku; peralatan dan mesin untuk layanan perpustakaan (8 jenis) | 100,00 | 170.785.182 | 100,00 | 142.919.054,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2.23.02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kunjungan siswa PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA secara reguler ke perpustakaan daerah | 100,00 | 56.070.000 | 100,00 | 48.502.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2.23.02.2.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya koleksi naskah kuno di DPK Kab. Muba | 100,00 | 37.120.000 | 100,00 | 12.694.000,00 | 13 buku | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat di 13 kecamatan yang dibina | 100,00 | 274.985.195 | 100,00 | 82.311.280,00 | | 34.460.000,00 | 80,00 | 25.872.500,00 | 80,00 | 75,08 | | 108.183.780,00 | | 0,39 | | |
| | 2.23.02.2.01.17 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Data dan informasi Perpustakaan | | | | | 40 Dokumen | 24.477.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.23.02.2.01.18 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | | 4500 Eksemplar | 351.786.686,00 | 5,00 | 14.422.999,00 | 5,00 | 4,10 | | 14.422.999,00 | | 0,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | |
| | 2.23.02.2.01.19 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | | 2 Eksemplar | 45.833.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.23.02.2.01.20 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | | | | | 12 Perpustakaan | 113.775.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2.23.02.2.01.08 | Pengembangan Bahan Pustaka | Bertambahnya koleksi buku perpustakaan | 100,00 | 372.760.000 | 100,00 | 233.055.070,00 | | | | | | | | 233.055.070,00 | | 0,63 | | |
| | 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Pemeliharaan buku perpustakaan | 100,00 | 24.734.000 | 100,00 | 29.725.900,00 | | | | | | | | 29.725.900,00 | | 1,20 | | |
| | 2.23.02.2.01.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemetaan perpustakaan pada kecamatan dalam rangka penyusunan satu data perpustakaan DPK Kab. Muba | 100,00 | 39.980.000 | 100,00 | 9.315.000,00 | 10 Kecamatan | | | | | | | 9.315.000,00 | | 0,23 | | |
| | *2.23.02.2.02* | *Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.02.07 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 100,00 | 135.406.700 | 100,00 | 73.523.000,00 | 5 Perpustakaan | 514.178.777,00 | 55,00 | 97.462.000,00 | 55,00 | 18,95 | | 170.985.000,00 | | 1,26 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 2.23.02.2.02.08 | Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100,00 | 629.251.152 | | | 4 Perpustakaan | 942.921.883,00 | 44,30 | 401.513.000,00 | | | | 401.513.000,00 | | 0,64 | | |
| | 2.23.02.2.02.09 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 100,00 | 75.104.380 | 100,00 | 142.896.000,00 | 30 Orang | 411.377.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 142.896.000,00 | | 1,90 | | |
| | 2.23.02.2.02.10 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 100,00 | 55.304.000 | 100,00 | 36.000.000,00 | 13 Lokus | 49.751.182,50 | 35,00 | 5.361.000,00 | 35,00 | 10,78 | | 41.361.000,00 | | 0,75 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **30,67** | **21,89** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **89** | **2.24.02** | **Program Pengelolaan Arsip** | **Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**<br>**Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **88,32** | **485.408.250,00** | **100** | **411.727.155,00** | | **420.155.063,00** | **35,99** | **65.926.900,00** | **35,99** | **15,69** | | **477.654.055,00** | | | | |
| | *2.24.02.2.02* | *Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.02.2.02.04 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah; pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah; penelusuran naskah arsip di OPD | 100,00 | 131.729.040 | 100,00 | 134.248.865,00 | | 169.323.457,00 | 5,00 | 16.449.600,00 | 5,00 | 9,71 | | 150.698.465,00 | | 1,14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | |
| | *2.24.02.2.03* | *Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.02.2.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Pengelolaan Sistem Informasi dan Kearsipan Daerah | 100,00 | 123.169.440 | 100,00 | 111.005.300,00 | | 155.156.086,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | | 111.005.300,00 | | 0,90 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | |
| | 2.24.02.2.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah; penelusuran naskah arsip di OPD | 80,00 | 230.509.770 | 100,00 | 166.472.990,00 | | 95.675.520,00 | 60,00 | 49.477.300,00 | 60,00 | 51,71 | | 215.950.290,00 | | 0,94 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **35,99** | **15,69** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **3.25.03** | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Produksi perikanan tangkap (ton)** | **100** | **2.867.967.643,00** | **100** | **4.708.996.274,00** | | **2.677.526.100,00** | **8,11** | **215.185.505,00** | **8,11** | **8,04** | | **4.924.181.779,00** | | | | |
| | *3.25.03.2.01* | *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Data statistik perikanan tangkap (1 dokumen) pendataan calon penerima bantuan konverter kit berupa mesin perahu pengganti BBM ke BBG (5 kecamatan) | 100,00 | 199.411.005 | 100,00 | 146.348.340,00 | | 72.727.800,00 | 36,00 | 25.957.230,00 | 36,00 | 35,69 | | 172.305.570,00 | | 0,86 | | |
| | 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Bantuan perahu penangkap ikan beserta mesin dan alat bantu penangkapan ikan berupa jaring, jala dan senter | 100,00 | 1.040.196.769 | 100,00 | 2.139.447.267,00 | | | | | | | | 2.139.447.267,00 | | 2,06 | Dinas Perikanan | |
| | 3.25.03.2.01.04 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Bantuan perahu penangkap ikan beserta mesin dan alat bantu penangkapan ikan berupa jaring, jala dan senter | 100,00 | 1.040.196.769 | 100,00 | 2.139.447.267,00 | | 2.450.674.250,00 | 7,03 | 171.659.452,00 | 7,03 | 7,00 | | 2.311.106.719,00 | | 2,22 | | |
| | *3.25.03.2.02* | *Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya di 8 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin | 100,00 | 472.480.000 | 100,00 | 141.876.700,00 | 1000 Orang | 110.230.050,00 | 5,00 | 4.478.300,00 | 5,00 | 4,06 | | 146.355.000,00 | | 0,31 | Dinas Perikanan | |
| | 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Terbentuknya koperasi perikanan tangkap | 100,00 | 115.683.100 | 100,00 | 141.876.700,00 | 1000 Orang | 43.894.000,00 | 30,00 | 13.090.523,00 | | | | 154.967.223,00 | | 1,34 | | |
| | 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Perlindungan asuransi nelayan | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **8,11** | **8,04** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **91** | **3.25.04** | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Produksi perikanan budidaya (ton)** | **100** | **4.762.873.565,00** | **100** | **3.929.045.793,00** | | **2.512.436.306,00** | **21,00** | **537.392.366,00** | **21,00** | **21,39** | | **4.466.438.159,00** | | | | |
| | *3.25.04.2.02* | *Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Bantuan paket budidaya ikan patin di keramba jaring apung (40 paket); bantuan paket budidaya lele (220 paket); meningkatnya produksi perikanan budidaya (20.714 ton) | 100,00 | 863.518.722 | 100,00 | 1.711.209.536,00 | | 517.895.500,00 | 89,63 | 464.215.000,00 | 89,63 | 89,63 | | 2.175.424.536,00 | | 2,52 | Dinas Perikanan | |
| | 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan | Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan | | | 100,00 | 72.922.000,00 | | 115.436.000,00 | 10,00 | 7.088.500,00 | 10,00 | 6,14 | | 80.010.500,00 | | 0,00 | | |
| | *3.25.04.2.04* | *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.04.2.04.09 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Bantuan paket pengolahan pakan ikan berbahan baku maggot | 100,00 | 164.070.300 | 100,00 | 389.890.830,00 | | 1.792.526.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 389.890.830,00 | | 2,38 | | |
| | 3.25.04.2.04.10 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Data statistik perikanan budidaya (1 dokumen); pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya ikan (5 kelompok) | 100,00 | 161.443.981 | 100,00 | 177.177.323,00 | | 86.578.000,00 | 60,00 | 66.088.866,00 | 60,00 | 76,33 | | 243.266.189,00 | | 1,51 | | |
| | 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Data dan informasi perikanan (1 dokumen); media informasi (434 leaflet); buku informasi (150 buku) | 100,00 | 238.717.458 | 100,00 | 440.428.640,00 | | | | | | | | 440.428.640,00 | | 1,84 | | |
| | 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Belanja pompa dan kincir air (7 unit); pakan Ikan untuk produksi benih (2.150.000 ekor) | 100,00 | 3.173.679.123 | 100,00 | 671.991.791,00 | | | | | | | | 671.991.791,00 | | 0,21 | Dinas Perikanan | |
| | 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Data statistik perikanan budidaya (1 dokumen); pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya ikan (5 kelompok) | 100,00 | 161.443.981 | 100,00 | 177.177.323,00 | | | | | | | | 177.177.323,00 | | 1,10 | | |
| | 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat | Dokumen Kajian Pemanfaatan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, | | | 100,00 | 288.248.350,00 | | | | | | | | 288.248.350,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **21,00** | **21,39** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **92** | **3.25.05** | **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** | **Tingkat Partisipasi Pokmaswas** | **100** | **1.330.728.647,00** | **100** | **1.143.582.818,00** | | **729.533.020,00** | **12,97** | **46.572.978,00** | **12,97** | **6,38** | | **350.025.378,00** | | | | |
| | *3.25.05.2.01* | *Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.05.2.01.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Bantuan alat tangkap ikan (90 paket); bantuan perahu dan mesin kapal (10 unit); pembinaan POKMASWAS (10 POKMASWAS); restocking ikan lokal (6 danau); sidak destruktive fishing (6 lokasi) | 100,00 | 685.928.419,00 | 100,00 | 478.783.702,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 3.25.05.2.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Data Base Potensi Sumberdaya Perikanan<br>Dokumen Peta Hasil Kajian Kawasan Suaka Perikanan (Reservaat)<br>Review Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 024 Tahun 2004 Tentang Suaka Perikanan Di Kabupaten Musi Banyuasin | 100,00 | 322.400.114,00 | 100,00 | 332.399.558,00 | 1 Data Base<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 3.25.05.2.01.04 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | 50 Pelaku Usaha | 306.588.500,00 | 15,00 | 11.936.430,00 | | | | | | | Dinas Perikanan | |
| | 3.25.05.2.01.06 | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | 30 Pelaku Usaha | 79.061.027,00 | 22,00 | 17.010.728,00 | | | | | | | | |
| | 3.25.05.2.01.07 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Data Base Potensi Sumberdaya Perikanan Dokumen Peta Hasil Kajian Kawasan Suaka Perikanan (Reservaat) Review Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 024 Tahun 2004 Tentang Suaka Perikanan Di Kabupaten Musi Banyuasin | 100,00 | 322.400.114,00 | 100,00 | 332.399.558,00 | 1 Data Base<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 343.883.493,00 | 9,09 | 17.625.820,00 | 9,09 | 5,13 | | 350.025.378,00 | | 1,09 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **12,97** | **6,38** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **93** | **3.25.06** | **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan Konsumsi ikan** | **100** | **1.834.525.147,00** | **100** | **1.075.371.994,00** | | **1.544.652.327,00** | **6,69** | **100.958.228,00** | **6,69** | **6,54** | | **1.176.330.222,00** | | | | |
| | *3.25.06.2.01* | *Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka Konsumsi Ikan (37,05%); bantuan ikan segar bagi Ibu-ibu hamil dan menyusui bagi masyarakat miskin (6.000 kg untuk 200 orang) | | | 100,00 | 63.610.402,00 | | | | | | | | 63.610.402,00 | | 0,00 | | |
| | 3.25.06.2.01.05 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | 243.384.200,00 | 13,00 | 30.478.167,00 | 13,00 | 12,52 | | 30.478.167,00 | | 0,00 | | |
| | *3.25.06.2.02* | *Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Laporan Monev Poklahsar (1 laporan); pelatihan Poklahsar dan bantuan paket pengolahan ikan bagi masyarakat miskin (2 angkatan @ 30 orang) | 100,00 | 1.017.545.047,00 | 100,00 | 27.840.000,00 | | | | | | | | 27.840.000,00 | | 0,03 | Dinas Perikanan | |
| | *3.25.06.2.03* | *Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.06.2.03.01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 100,00 | 535.763.406,00 | 6 Ton | 742.297.000,00 | 4,30 | 31.231.384,00 | 4,30 | 4,21 | | 566.994.790,00 | | 0,00 | | |
| | 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi | 100,00 | 816.980.100,00 | 100,00 | 511.768.588,00 | 4 unit | 558.971.127,00 | 7,11 | 39.248.677,00 | 7,11 | 7,02 | | 551.017.265,00 | | 0,67 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **6,69** | **6,54** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **94** | **3.26.02** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Jumlah objek wisata** | **91,92** | **1.337.558.000,00** | **100** | **2.986.919.350,00** | | **1.201.215.000,00** | **10,00** | **73.454.224,00** | **10,00** | **6,11** | | **3.060.373.574,00** | | | | |
| | *3.26.02.2.01* | *Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.02.2.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 lokasi | | | 100,00 | 533.969.350,00 | | | | | | | | 533.969.350,00 | | 0,00 | | |
| | 3.26.02.2.01.06 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (3 Lokasi) | | | | | | 1.201.215.000,00 | 10,00 | 73.454.224,00 | 10,00 | 6,11 | | 73.454.224,00 | | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | *3.26.02.2.03* | *Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Danau Ulak Lia Sekayu | 91,92 | 1.337.558.000 | 100,00 | 2.452.950.000,00 | | | | | | | | 2.452.950.000,00 | | 1,83 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **10,00** | **6,11** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **95** | **3.26.03** | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah kunjungan wisatawan** | **100** | **2.192.554.383,00** | **100** | **1.699.723.186,00** | | **2.148.770.800,00** | **50,00** | **683.170.854,00** | **50,00** | **31,79** | | **2.382.894.040,00** | | | | |
| | *3.26.03.2.01* | *Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.03.2.01.03 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik | 100,00 | 2.192.554.383,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.26.03.2.01.06 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan wisata Kuliner; Pemilihan Kuyung Kupek Musi Banyuasin | | | 100,00 | 1.699.723.186,00 | | 2.148.770.800,00 | 50,00 | 683.170.854,00 | 50,00 | 31,79 | | 2.382.894.040,00 | | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **50,00** | **31,79** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **96** | **3.26.05** | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Jumlah pelaku usaha pariwisata** | **100** | **2.237.919.200,00** | **100** | **316.913.044,00** | | **123.364.900,00** | **15,00** | **14.411.300,00** | **15,00** | **11,68** | | **331.324.344,00** | | | | |
| | *3.26.05.2.01* | *Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jenis dan Paket Wisata Unggulan dan sosialisasi Pokdarwis | 100,00 | 2.237.919.200,00 | 100,00 | 246.913.044,00 | | | | | | | | 246.913.044,00 | | 0,11 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | |
| | 3.26.05.2.01.04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (10 orang) | | | 100,00 | 70.000.000,00 | | | | | | | | 70.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | 3.26.05.2.01.06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumbe Daya Manusia Ekonomi Kreatif (20 Orang) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.26.05.2.01.10 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (10 Orang) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *3.26.05.2.02* | *Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.05.2.02.01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | 123.364.900,00 | 15,00 | 14.411.300,00 | 15,00 | 11,68 | | 14.411.300,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **15,00** | **11,68** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **97** | **3.27.02** | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan**<br>**Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)** | **100** | **8.124.789.418,00** | **98,10** | **17.492.680.304,00** | | **17.814.377.691,00** | **17,70** | **2.402.687.658,00** | **17,70** | **13,49** | | **19.895.367.962,00** | | | | |
| | *3.27.02.2.01* | *Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.01.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida; data pestisida dan pupuk @ (15 kecamatan); rapat sosialisasi, koordinasi dan evaluasi komisi pengawasan pupuk dan pestisida (2x); pendampingan peramajaan kebun kelapa (5.200 ha); pendampingan kebun yang sudah diremajakan/memasuki tanaman menghasilkan (2.000 ha) | 100,00 | 2.185.746.543 | 95,43 | 7.123.519.909,00 | | 3.533.774.926,00 | 20,38 | 705.448.265,00 | 20,38 | 19,96 | | 7.828.968.174,00 | | 3,58 | | |
| | 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terciptanya kawasan pengembangan cabai besar (25 ha); terciptanya kawasan pengembangan tanaman cabai rawit (5 ha); monitoring bantuan sarana pasca panen tanaman pangan (15 kecamatan); panen raya padi/jagung (1 lokasi); bantuan dolomit (300 kg); bantuan insektisida (30 ltr); bantuan jagung ketan (360 bks); bantuan jagung manis (57 kg); bantuan pupuk kandang (54.195 kg); bantuan pupuk urea, TSP & KCl (675 kg); sarana pendukung perkebunan untuk kelompok tani/UPPB (3 jenis); data kelompok tani/UPPB calon penerima bantuan (1 dokumen); peralatan panen karet (pisau sadap dan bak pembeku) untuk 3 UPPB | 100,00 | 866.161.139 | 100,00 | 2.916.669.270,00 | | 3.551.327.100,00 | 21,68 | 769.715.457,00 | 21,68 | 21,67 | | 3.686.384.727,00 | | 4,26 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.02.2.01.03 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih | Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (50 VUB) | | | | | | 310.686.000,00 | 4,07 | 12.645.014,00 | 4,07 | 4,07 | | 12.645.014,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.01.14 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (2 Laporan) | | | | | | 2.298.000.000,00 | 1,77 | 40.745.740,00 | 1,77 | 1,77 | | 40.745.740,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.01.16 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (1 Laporan) | | | | | | 754.931.100,00 | 2,37 | 17.933.818,00 | 2,37 | 2,38 | | 17.933.818,00 | | 0,00 | | |
| | *3.27.02.2.02* | *Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Terbinanya kelompok penangkar benih padi (2 kelompok); produksi padi (50 ton); benih padi inhibrida label ungu (2.000 kg); insektisida | 100,00 | 2.265.055.492,00 | 100,00 | 4.381.722.230,00 | | | | | | | | 4.381.722.230,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Pengembangan tanaman perkebunan | | | | | | 54.102.000,00 | 24,00 | 4.854.900,00 | 24,00 | 8,97 | | 4.854.900,00 | | 0,00 | Dinas Perkebunan | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | kelompok); produksi padi (50 ton); benih padi inhibrida label ungu (2.000 kg); insektisida (195 ltr); pupuk NPK (4.766 kg); bibit karet polybag siap salur (170.000 btg); bibit pinang siap salur (55.000 btg); bibit tanaman kelapa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.02.04 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | 3.373.683.025 | 45,49 | 825.945.064,00 | 45,49 | 24,48 | | 825.945.064,00 | | 0,00 | Dinas Perkebunan | |
| | *3.27.02.2.04* | *Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.04.01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | 17.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *3.27.02.2.05* | *Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.05.03 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Monitoring ternak sapi bantuan pemerintah | 100,00 | 49.888.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.05.05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Meningkatkan kualitas SDM peternak (100 org); pembibitan dan perawatan ternak melalui inseminasi buatan (3.000 ekor); pengembangan | 100,00 | 2.757.938.244,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.05.06 | Pengawasan Produksi Benih/bibit Ternak Dan Hpt, Bahan Pakan/pakan | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (1 Laporan) | | | 100,00 | 33.605.000,00 | | | | | | | | 33.605.000,00 | | 0,00 | | |
| | *3.27.02.2.06* | *Penyediaan Benih/bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Lain* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 5000 ekor | | | 100,00 | 3.037.163.895,00 | | | | | | | | 3.037.163.895,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.06.03 | Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (213 Ekor) | | | | | | 3.157.848.000,00 | 0,56 | 12.554.950,00 | 0,56 | 0,40 | | 12.554.950,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.02.2.06.04 | Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/kota Lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (5000 Dosis) | | | | | | 762.460.540,00 | 3,61 | 12.844.450,00 | 3,61 | 1,68 | | 12.844.450,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **17,70** | **13,49** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **98** | **3.27.03** | **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan**<br>**Persentase Ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)** | **95,84** | **10.873.714.133,00** | **98,55** | **13.086.307.218,00** | | **10.495.722.041,00** | **6,20** | **429.898.950,00** | **6,20** | **4,10** | | **13.516.206.168,00** | | | | |
| | *3.27.03.2.01* | *Pengembangan Prasarana Pertanian* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Pembangunan Sumur Bor untuk Kel. Tani | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.03.2.01.02 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Terlaksananya pengukuran atau pemetaan luas lahan baku sawah (1 dok); tersusunnya laporan curah hujan (12 bln) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Partisipasi pada Muba EXPO; event promosi potensi dan produk perkebunan (2 event) | 100,00 | 199.383.300 | 100,00 | 259.342.897,00 | | 100.024.500,00 | 75,00 | 52.766.000,00 | 75,00 | 52,75 | | 312.108.897,00 | | 1,57 | Dinas Perkebunan | |
| | *3.27.03.2.02* | *Pembangunan Prasarana Pertanian* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Pembangunan Sumur Bor untuk Kel. Tani | 100,00 | 3.705.424.504 | 100,00 | 242.815.000,00 | | | | | | | | 242.815.000,00 | | 0,07 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | |
| | 3.27.03.2.02.02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Pembangunan Embung Air untuk Kelompok Tani | 100,00 | 603.274.500 | | | | 290.358.240,00 | 12,82 | 37.235.500,00 | 12,82 | 12,82 | | 37.235.500,00 | | 0,06 | | |
| | 3.27.03.2.02.03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Pembangunan kontruksi jalan produksi kawasan perkebunan (3 paket); pembangunan jalan usaha tani (JUT) dengan koral (3 paket) | 100,00 | 1.298.193.229 | 100,00 | 9.533.532.883,00 | | 7.768.964.189,00 | 6,56 | 310.714.800,00 | 6,56 | 4,00 | | 9.844.247.683,00 | | 7,58 | | |
| | 3.27.03.2.02.04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (6 Unit) | 100,00 | 149.829.000 | | | | 289.343.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.03.2.02.05 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | Tersedianya Long Storage | 100,00 | 1.047.952.600 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | |
| | 3.27.03.2.02.06 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Pembangunan pintu air saluran drainase tersier untuk pertanian | 59,54 | 708.173.000 | 100,00 | 616.059.579,00 | | 549.559.300,00 | 3,13 | 17.216.150,00 | | | | 633.275.729,00 | | 0,89 | | |
| | 3.27.03.2.02.08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh dikecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 100,00 | 3.161.484.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (3 Unit) | | | 92,75 | 2.434.556.859,00 | | 1.296.061.820,00 | 0,89 | 11.516.500,00 | 0,89 | 0,89 | | 2.446.073.359,00 | | 0,00 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | |
| | 3.27.03.2.02.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (1 Unit) | | | | | | 201.410.230,00 | 0,22 | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **6,20** | **4,10** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **99** | **3.27.04** | **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani** | **100** | **1.165.385.100,00** | **100** | **1.295.331.051,00** | | **1.241.541.500,00** | **20,25** | **82.147.464,00** | **20,25** | **6,62** | | **1.377.478.515,00** | | | | |
| | *3.27.04.2.01* | *Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Meningkatnya angka kesehatan hewan dan produktivitas sebanyak 80% dari jumlah hewan yang dilakukan pengobatan (6.400 ekor); pelayanan kesehatan hewan keliling | 100,00 | 476.581.600 | 100,00 | 138.210.060,00 | | | | | | | | 138.210.060,00 | | 0,29 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | |
| | 3.27.04.2.01.02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Surveilance penyakit jembrana dan brucelosis; surveilance wabah penyakit unggas @ (1.000 ekor); surveilance penyakit parasit darah (350 ekor); surveilance penyakit | 100,00 | 356.090.250 | 100,00 | 164.462.706,00 | | | | | | | | 164.462.706,00 | | 0,46 | | |
| | 3.27.04.2.01.05 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan Dan Zoonosis Pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (6 Wilayah) | | | | | | 110.999.000,00 | 20,00 | 11.954.533,00 | 20,00 | 10,77 | | 11.954.533,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.04.2.01.08 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan | | | | | | 243.659.500,00 | 30,00 | 20.767.111,00 | 30,00 | 8,52 | | 20.767.111,00 | | 0,00 | | |
| | *3.27.04.2.03* | *Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (6 laporan) | | | 100,00 | 835.390.600,00 | | 395.609.000 | 15,00 | 5.906.740,00 | | | | 841.297.340,00 | | 0,00 | | |
| | *3.27.04.2.04* | *Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Pengawasan hygine dan sanitasi di lingkungan peternakan rakyat; pengawasan pemotongan ternak di RPH | 100,00 | 182.824.000 | 100,00 | 67.621.185,00 | | 46.362.500,00 | 65,00 | 21.158.530,00 | 65,00 | 45,64 | | 88.779.715,00 | | 0,49 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | |
| | 3.27.04.2.04.04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu pangan asal hewan | 100,00 | 149.889.250 | 100,00 | 89.646.500,00 | | 222.226.500,00 | 30,00 | 22.360.550,00 | 30,00 | 10,06 | | 112.007.050,00 | | 0,75 | | |
| | 3.27.04.2.04.07 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | | | | | 20 Orang | 222.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | *3.27.04.2.05* | *Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.05.01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Pembangunan kandang ayam (5 unit); kantor SPR (3 unit); rumah kompos (1 unit) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **20,25** | **6,62** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **100** | **3.27.05** | **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | **Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan**<br>**Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani** | **100** | **438.653.100,00** | **97,58** | **10.373.186.099,00** | | **16.105.099.347,00** | **11,27** | **1.604.345.649,00** | **11,27** | **9,96** | | **11.977.531.748,00** | | | | |
| | *3.27.05.2.01* | *Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Monitoring terhadap OPT (15 kecamatan); fungisida (850 kg); insektisida pengerek batang (500 kg); insektisida untuk keong (900 ltr); rodentisida (1.000 ltr); traktor roda 4 (3 unit); peningkatan pengetahuan petani untuk mengendalikan hama penyakit tanaman; peningkatan pengetahuan petani untuk mengendalikan OPT @ (25 org) | 100,00 | 56.972.772 | 100,00 | 252.720.105,00 | | 449.907.749,00 | 10,72 | 34.361.966,00 | 10,72 | 7,64 | | 287.082.071,00 | | 5,04 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.05.2.01.03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pengadaan Excavator Type PC210 (2 Unit); Pengadaan Truk Self Loading (Tronton) (1 unit) | 100,00 | 336.695.328 | 97,51 | 10.075.530.994,00 | | 15.632.691.598,00 | 11,31 | 1.569.983.683,00 | | | | 11.645.514.677,00 | | 34,59 | Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.05.2.01.05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Data non OPT (banjir dan kebakaran); peta daerah rawan kebakaran dan lokasi sumur bor dan embung | 100,00 | 44.985.000 | 100,00 | 44.935.000,00 | | | | | | | | 44.935.000,00 | | 1,00 | | |
| | 3.27.05.2.01.06 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | | | | | 1 Laporan | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **11,27** | **9,96** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **101** | **3.27.06** | **Program Perizinan Usaha Pertanian** | **Persentase Pelaku usaha Perkebunan Mendapat Kejelasan Status Usahanya** | **100** | **388.550.931,00** | **100** | **235.536.835,00** | | **1.190.081.000,00** | **55,00** | **72.597.430,00** | **55,00** | **6,10** | | **308.134.265,00** | | | | |
| | *3.27.06.2.01* | *Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.06.2.01.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Pelepasan areal HPKP menjadi APL yang berbasis lahan perkebunan rakyat (15.000 ha); sertifikasi lahan perkebunan milik rakyat (2.000 persil); penilaian usaha perkebunan (17 perusahaan); rapat gangguan usaha perkebunan (20 kali) | 100,00 | 388.550.931 | 100,00 | 235.536.835,00 | | | | | | | | 235.536.835,00 | | 0,61 | Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.06.2.01.05 | Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (12 Laporan) | | | | | | 1.190.081.000,00 | 55,00 | 72.597.430,00 | 55,00 | 6,10 | | 72.597.430,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **55,00** | **6,10** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **102** | **3.27.07** | **Program Penyuluhan Pertanian** | **Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani**<br>**Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani** | **100** | **6.036.720.316,00** | **100** | **6.502.336.225,00** | | **8.034.467.288,50** | **45,32** | **2.684.850.694,00** | **45,32** | **33,42** | | **9.187.186.919,00** | | | | |
| | *3.27.07.2.01* | *Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 96 Orang | 100 | | | | | 437.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Peserta bimtek kostratani (35 org); monitoring kegiatan penyuluh dan dokumentasi data simluhtan (15 kecamatan); pertemuan penyuluh pertanian dan peternakan tingkat kabupaten (237 org); laporan programa penyuluhan kabupaten dan BPP (15 laporan) | 100,00 | 1.058.718.342 | 100,00 | 1.685.431.150,00 | | 2.607.970.974,00 | 70,59 | 1.841.000.000,00 | 70,59 | 70,59 | | 3.526.431.150,00 | | 3,33 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | |
| | 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Peserta sarasehan petani nelayan tingkat kabupaten (13 org); sekolah lapang pertemuan penyuluh (80 petani); terfasilitasinya kemitraan antara petani kelapa sawit swadaya dengan pabrik CPO (300 KK); terlaksananya kelembagaan petani dan bertambahnya pengetahuan serta keterampilan pengurus dan anggota UPPB (20 UPPB) | 100,00 | 291.766.036 | 100,00 | 1.211.831.744,00 | | 2.383.357.497,00 | 46,56 | 45.426.592,00 | 46,56 | 1,91 | | 1.257.258.336,00 | | 4,31 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.07.2.01.03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Belanja operasional pelaksana penyuluh non PNS (127 org); belanja operasional pelaksana penyuluh THL-TBPP (21 org); gedung UPPB (10 unit); mesin pendukung separator lateks dan pendukung mesin saparator lateks @ (2 unit); bangunan pendukung centrifu | 100,00 | 4.686.235.938 | 100,00 | 3.027.071.585,00 | | 2.781.709.500,00 | 28,67 | 791.608.052,00 | 28,67 | 28,46 | | 3.818.679.637,00 | | 0,81 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.07.2.01.04 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (4 unit) | | | 100,00 | 97.783.375,00 | | | | | | | | 97.783.375,00 | | 0,00 | Dinas Perkebunan | |
| | 3.27.07.2.01.05 | Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (5 Unit) | | | 100,00 | 480.218.371,00 | | 183.447.942,50 | 50,00 | 6.816.050,00 | | | | 487.034.421,00 | | 0,00 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | |
| | 3.27.07.2.01.08 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (3 Unit) | | | | | | 77.981.375,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | Perkebunan | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **45,32** | **33,42** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **103** | **3.30.02** | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | **Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit** | **100** | **222.323.700,00** | **100** | **213.222.800,00** | | **350.949.378,00** | **50,47** | **109.850.300,00** | **50,47** | **31,30** | | **317.725.100,00** | | | | |
| | *3.30.02.2.01* | *Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | | | | | 15 Dokumen | 69.851.000,00 | 15,00 | 5.348.000,00 | 15,00 | 7,66 | | 5.348.000,00 | | 0,00 | | |
| | *3.30.02.2.02* | *Penerbitan Tanda Daftar Gudang* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.02.2.02.01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Database Gudang dalam Kab. Muba Rekomendasi Penerbitan TDG | 100,00 | 96.070.000 | 100,00 | 65.390.000,00 | 1 Database 10 Rekomendasi | 35.667.000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | 65.390.000,00 | | 0,68 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | *3.30.02.2.06* | *Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 3.30.02.2.06.03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Pedagang yang Diawasi<br>Laporan Hasil Pengawasan | 100,00 | 126.253.700 | 95,00 | 147.832.800,00 | 40 Pedagang<br>4 Laporan | 245.431.378,00 | 65,00 | 104.502.300,00 | 65,00 | 42,58 | | 252.335.100,00 | | 2,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **50,47** | **31,30** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **104** | **3.30.03** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik** | **100** | **9.718.201.600,00** | **57,23** | **6.380.200.952,00** | | **3.824.543.450,00** | **16,86** | **594.330.350,00** | **16,86** | **15,54** | | **6.760.578.402,00** | | | | |
| | *3.30.03.2.01* | *Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen master plan Pasar Randik Sekayu (1 dokumen); pembebasan lahan Pasar Randik (10.000 m)2; sarana pendukung Pasar Randik (315 m2); pagar area parkir Pasar Randik (70 m); rehab kantor UPTD Pasar Randik (110 m2); l penertiban dan pengamanan Pasar Randik; los pasar Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin (18,9 m2); pengawasan sarana distribusi perdagangan (15 kec) | 100,00 | 8.989.794.000 | 55,35 | 6.013.528.500,00 | | 3.824.543.450,00 | 16,86 | 594.330.350,00 | 16,86 | 15,54 | | 6.607.858.850,00 | | 0,74 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | *3.30.03.2.02* | *Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pedagang kaki lima dan asongan yang diawasi mutu dagangannya | 100,00 | 142.756.100 | 100,00 | 213.952.900,00 | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.30.03.2.02.02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perdagangan (Pasar) dalam Wilayah Kab. Muba | 100,00 | 585.651.500 | 100,00 | 152.719.552,00 | | | | | | | | 152.719.552,00 | | 0,26 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **16,86** | **15,54** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **105** | **3.30.04** | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | **Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan** | **73,71** | **538.768.500,00** | **92,21** | **891.109.300,00** | | **1.172.436.000,00** | **21,16** | **422.225.800,00** | **21,16** | **36,01** | | **1.313.335.100,00** | | | | |
| | *3.30.04.2.01* | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.04.2.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan | 100,00 | 221.415.800 | 90,00 | 80.842.900,00 | | 38.856.000,00 | 45,00 | 5.796.100,00 | 45,00 | 14,92 | | 86.639.000,00 | | 0,39 | | |
| | 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Tersedianya paket sembako murah | 65,93 | 317.352.700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *3.30.04.2.02* | *Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Termonitornya harga dan stok bahan pokok; terlaksananya pengawasan barang pokok dan strategis | | | 95,00 | 120.272.900,00 | | 38.952.000,00 | 45,00 | 6.479.300,00 | 45,00 | 16,63 | | 126.752.200,00 | | 0,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Tersedianya paket sembako murah | | | 100,00 | 661.603.500,00 | | 1.070.152.000,00 | 19,00 | 400.897.900,00 | 19,00 | 37,46 | | 1.062.501.400,00 | | 0,00 | | |
| | *3.30.04.2.03* | *Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi | Terawasinya Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 2 Laporan | | | 34,00 | 28.390.000,00 | | 24.476.000,00 | 40,00 | 9.052.500,00 | 40,00 | 36,99 | | 37.442.500,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **21,16** | **36,01** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **106** | **3.30.05** | **Program Pengembangan Ekspor** | **Persentasi peningkatan volume penjualan produk** | **100** | **3.008.653.950,00** | **100** | **3.288.882.350,00** | | **4.399.264.240,00** | **8,82** | **247.774.500,00** | **8,82** | **5,63** | | **3.468.791.850,00** | | | | |
| | *3.30.05.2.01* | *Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Peserta pelatihan hilirisasi karet (10 org); bahan dan peralatan hilirisasi karet (1 paket); gedung promosi gambo Muba (657 m2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.05.2.01.02 | Pameran Dagang Nasional | Pameran produk unggulan Musi Banyuasin di tingkat Nasional | 100,00 | 1.172.073.350 | 100,00 | 698.390.450,00 | | 918.991.000,00 | 22,35 | 183.394.500,00 | 22,35 | 19,96 | | 881.784.950,00 | | 0,75 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.30.05.2.01.03 | Pameran Dagang Lokal | Terlaksananya Event Milenial Bussines Creatif Twenty One | 100,00 | 1.606.708.850 | 100,00 | 2.522.626.900,00 | | 3.454.925.240,00 | 5,29 | 64.380.000,00 | 5,29 | 1,86 | | 2.587.006.900,00 | | 1,61 | | |
| | 3.30.05.2.01.04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (4 Pelaku Usaha) | | | | | | 25.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.30.05.2.01.05 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Terlaksanya Event Pameran JFW di Jakarta | 100,00 | 229.871.750 | 100,00 | 67.865.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **8,82** | **5,63** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **107** | **3.30.06** | **Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen** | **Persentase UTTP Bertanda Tera Sah** | **100** | **461.289.700,00** | **100** | **459.526.900,00** | | **198.404.040,00** | **38,84** | **36.053.000,00** | **38,84** | **18,17** | | **495.579.900,00** | | | | |
| | *3.30.06.2.01* | *Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kalibrasi peralatan UTTP (40 jenis); pelayanan tera/tera ulang alat UTTP (15 kecamatan) | 100,00 | 313.556.850 | 100,00 | 299.797.000,00 | | 144.498.040,00 | 40,20 | 26.303.000,00 | 40,20 | 18,20 | | 326.100.000,00 | | 1,04 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Pengawasan/penyuluhan UTTP metrologi legal | 100,00 | 147.732.850 | 100,00 | 159.729.900,00 | | 53.906.000,00 | 35,20 | 9.750.000,00 | 35,20 | 18,09 | | 169.479.900,00 | | 1,15 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **38,84** | **18,17** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **108** | **3.30.07** | **Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** | **Jumlah Kemitraan Usaha** | | | **96,95** | **269.232.600,00** | | **64.473.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **269.232.600,00** | | | | |
| | *3.30.07.2.01* | *Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.07.2.01.02 | Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 2 UMKM | | | 96,95 | 269.232.600,00 | | 64.473.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 269.232.600,00 | | 0,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **109** | **3.31.02** | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | **Persentase Peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah**<br>**Persentase Peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah** | **100** | **4.245.596.510,00** | **100** | **2.861.883.300,00** | | **2.752.955.414,50** | **34,34** | **17.480.000,00** | **34,34** | **0,63** | | **2.879.363.300,00** | | | | |
| | *3.31.02.2.01* | *Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen | | | 100,00 | 181.097.200,00 | | | | | | | | 181.097.200,00 | | 0,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 100,00 | 1.141.293.100,00 | | | | | | | | 1.141.293.100,00 | | 0,00 | | |
| | 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen Master Plan Kawasan Industri Hijau | 100,00 | 1.732.401.855 | 100,00 | 1.242.577.050,00 | | 1.905.653.094,00 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | | 1.242.577.050,00 | | 0,72 | | |
| | 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Telaksananya fasilitasi kemasan | 100,00 | 2.513.194.655 | 100,00 | 296.915.950,00 | | 847.302.320,50 | 93,08 | 17.480.000,00 | 93,08 | 2,06 | | 314.395.950,00 | | 0,13 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **34,34** | **0,63** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **110** | **3.31.03** | **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota** | **Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali** | **100** | **141.602.600,00** | **100** | **83.350.400,00** | | **27.517.000,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | | **83.350.400,00** | | | | |
| | *3.31.03.2.01* | *Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah IKM yang mendapatkan perizinan hak merk dan izin halal | 100,00 | 141.602.600,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.31.03.2.01.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kabupaten/ Kota | Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan | | | 100,00 | 83.350.400,00 | | | | | | | | 83.350.400,00 | | 0,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.31.03.2.01.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, | | | | | | 27.517.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **50,00** | **0,00** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **111** | **3.31.04** | **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** | **Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas Unit** | **100** | **294.346.800,00** | **100** | **139.993.000,00** | | **103.004.000,00** | **15,00** | **3.780.000,00** | **15,00** | **3,67** | | **143.773.000,00** | | | | |
| | *3.31.04.2.01* | *Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen peluang hilirisasi (Ubi kayu, gambir dan kelapa) Laporan hasil survey inventarisasi dan pendataan sumber bahan baku dan IKM hilirisasi (Ubi kayu, gambir dan kelapa) Sosialisasi potensi hilirisasi (Ubi kayu, gambir dan kelapa) | 100,00 | 180.608.600 | 100,00 | 69.317.100,00 | | 103.004.000,00 | 15,00 | 3.780.000,00 | | | | 73.097.100,00 | | 0,40 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | 3.31.04.2.01.02 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | Data informasi industri kabupaten (1 dokumen); website e-commerce | 100,00 | 113.738.200 | 100,00 | 70.675.900,00 | | | | | | | | 70.675.900,00 | | 0,62 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **15,00** | **3,67** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **112** | **3.32.03** | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | **Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi** | **0,00** | **118.270.000,00** | | | | **156.038.586,00** | **46,23** | **59.978.980,00** | **46,23** | **38,44** | | **59.978.980,00** | | | | |
| | *3.32.03.2.01* | *Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.32.03.2.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | | | | | | | 106.968.100,00 | 50,00 | 44.067.900,00 | 50,00 | 41,20 | | 44.067.900,00 | | 0,00 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | 3.32.03.2.01.02 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Pembekalan relokasi warga transmigrasi UPT JUD Nganti SP3 | 100,00 | 118.270.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.32.03.2.01.20 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | Pembekalan relokasi warga transmigrasi UPT JUD Nganti SP3 | | | | | | 49.070.486,00 | 38,00 | 15.911.080,00 | 38,00 | 32,42 | | 15.911.080,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **46,23** | **38,44** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **113** | **3.32.04** | **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi** | **Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *3.32.04.2.01* | *Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.32.04.2.01.02 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Peserta pelatihan produk unggulan di ex UPT Air Balui | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **114** | **4.01.02** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu**<br>**Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**<br>**Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan**<br>**Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten**<br>**Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi**<br>**Terbinanya Sarjana Bina Desa**<br>**Terbinanya Sarjana Bina Desa**<br>**Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun**<br>**Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri** | **100** | **13.401.234.675,00** | **100** | **46.103.085.119,00** | | **14.848.415.235,00** | **43,02** | **3.675.152.334,00** | **43,02** | **24,75** | | **49.778.237.453,00** | | | | |
| | *4.01.02.2.01* | *Administrasi Tata Pemerintahan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Peringatan HUT RI dan HUT Muba (2 kegiatan); data perkembangan kecamatan persiapan (1 kec); data perkembangan kelurahan persiapan (5 kelurahan) | 100,00 | 1.645.936.154 | 100,00 | 1.113.793.515,00 | | 1.329.523.580,00 | 8,00 | 73.444.213,00 | 8,00 | 5,52 | | 1.187.237.728,00 | | 0,72 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Terjaganya, terawat dan terpasangnya pilar batas antara Kab. Muba dengan kabupaten lain (2 segmen); fasilitasi penyelesaian konflik batas kelurahan dan kecamatan dalam Kab. Muba dan fasilitasi penyelesaian konflik batas | 100,00 | 159.635.977 | 100,00 | 186.868.115,00 | | 148.229.351,00 | 11,00 | 14.568.254,00 | 11,00 | 9,83 | | 201.436.369,00 | | 1,26 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Terdatanya data-data rupa bumi berupa unsur alam dan unsur buatan dalam wilayah Kab. Muba | 100,00 | 240.482.866 | 100,00 | 188.376.511,00 | | 141.646.796,00 | 21,00 | 26.789.800,00 | 21,00 | 18,91 | | 215.166.311,00 | | 0,89 | | |
| | *4.01.02.2.02* | *Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kegiatan STQ tingkat Kabupaten (859 org), STQ tingkat Provinsi (40 org), MTQ tingkat Kabupaten, MTQ | 100,00 | 7.055.507.100 | 100,00 | 39.979.283.390,00 | | 10.206.927.630,00 | 50,00 | 2.920.275.785,00 | 50,00 | 28,61 | | 42.899.559.175,00 | | 6,08 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.02.2.02.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Fasilitasi Konflik batas Kelurahan, Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin - Batas Antara | | | 100,00 | 325.176.500,00 | | 146.433.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325.176.500,00 | | 0,00 | | |
| | 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Fasilitasi Sarjana Bina Desa Kab. Muba<br>Isbat Nikah untuk Orang kurang mampu<br>Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan | 100,00 | 2.159.875.657 | 100,00 | 2.734.858.191,00 | 45 sarjana bina desa<br>1000 pasang pengantin<br>8 Hari Besar Keagamaan | 1.668.328.566,00 | 41,01 | 281.158.654,00 | 41,01 | 16,85 | | 3.016.016.845,00 | | 1,40 | | |
| | *4.01.02.2.03* | *Fasilitasi dan Koordinasi Hukum* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas | 100,00 | 410.065.079 | 100,00 | 385.544.175,00 | | 149.012.607,00 | 30,00 | 33.073.900,00 | 30,00 | 22,20 | | 418.618.075,00 | | 1,02 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Penyelesaian sengketa hukum (5 kasus); penyelesaian sengketa hukum masyarakat miskin (80 kasus) | 100,00 | 1.110.704.316 | 100,00 | 518.469.265,00 | | 619.901.977,50 | 40,39 | 212.634.528,00 | 40,39 | 34,30 | | 731.103.793,00 | | 0,66 | | |
| | 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Kemudahan informasi dokumentasi produk hukum daerah (5 jenis); kesadaran hukum bagi narapidana LP Sekayu (40 org); terciptanya masyarakat yang memahami norma- | 100,00 | 159.021.301 | 100,00 | 156.774.105,00 | | 77.212.982,50 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | | 156.774.105,00 | | 0,99 | | |
| | *4.01.02.2.04* | *Fasilitasi Kerjasama Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Terjalinnya koordinasi kerjasama antar daerah | 100,00 | 281.573.500 | 100,00 | 172.888.739,00 | | 142.136.000,00 | 50,00 | 63.207.200,00 | 50,00 | 44,47 | | 236.095.939,00 | | 0,84 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.02.2.04.02 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Terfasilitasinya kerjasama luar negeri meliputi kerjasama daerah dengan pemrintah daerah dan lembaga luar negeri | 100,00 | 91.386.000 | 100,00 | 313.840.666,00 | | 198.320.000,00 | 35,00 | 50.000.000,00 | 35,00 | 25,21 | | 363.840.666,00 | | 3,98 | | |
| | 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Terjalinnya koordinasi kerjasama antar daerah | 100,00 | 87.046.725 | 90,00 | 27.211.947,00 | | 20.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.211.947,00 | | 0,31 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **43,02** | **24,75** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | **Laporan Inflasi secara periode** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkroniasasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Standar Satuan Harga (SSH)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **115** | **4.01.03** | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | **Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan** | **92,11** | **2.521.553.873,00** | **100** | **2.131.526.602,00** | | **1.970.823.975,00** | **37,24** | **222.064.874,00** | **37,24** | **11,27** | | **2.353.591.476,00** | | | | |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Jumlah rekomendasi izin pertambangan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *4.01.03.2.01* | *Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terbinanya BLUD dan BUMD | | | 100 | 128.703.918,00 | | 121.786.000,00 | 63,00 | 36.358.734,00 | 63,00 | 29,85 | | 165.062.652,00 | | 0,00 | | |
| | 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Terkendalinya inflasi daerah (1 laporan); laporan inflasi daerah (12 laporan) | 100 | 304.358.599 | 100 | 124.437.900,00 | | 95.759.000,00 | 60,00 | 27.700.052,00 | 60,00 | 28,93 | | 152.137.952,00 | | 0,50 | | |
| | 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Pengawasan UKM | 100 | 165.153.400 | 100 | 156.220.718,00 | | 99.124.000,00 | 65,00 | 33.796.414,00 | 65,00 | 34,10 | | 190.017.132,00 | | 1,15 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.03.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | SOP Pembentukan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD | 37,31 | 20.825.000 | | | 1 SOP 31 BLUD | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 4.01.03.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | SOP Pembentukan BUMD Terlaksananya Pembinaan BUMD | 100 | 147.693.265 | | | 1 SOP 4 BUMD | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *4.01.03.2.02* | *Pelaksanaan Administrasi Pembangunan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | dokumen standar bahan dan upah pekerjaan konstruksi; dokumen standar harga barang; dokumen | 100 | 521.871.046 | 100 | 497.345.418,00 | | 313.120.000,00 | 35,00 | 26.493.544,00 | 35,00 | 8,46 | | 523.838.962,00 | | 1,00 | | |
| | 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Fasilitasi serah terima pekerjaan konstruksi (600 paket); verifikasi kontrak strategis kegiatan konstruksi | 100 | 245.244.300 | 100 | 275.154.200,00 | | 148.244.000,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | | 275.154.200,00 | | 1,12 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Monitoring dan pemeriksaan fisik kegiatan pembangunan (15 kecamatan); verifikasi pengendalian | 100 | 43.840.000 | 100 | 21.930.000,00 | | 80.365.000,00 | 35,00 | 4.886.200,00 | 35,00 | 6,08 | | 26.816.200,00 | | 0,61 | | |
| | *4.01.03.2.03* | *Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa lainnya (95 paket); konstruksi (500 paket); barang (48 paket) | 100 | 370.746.532 | 100 | 253.379.148,00 | | 315.071.475,00 | 55,56 | 17.968.861,00 | 55,56 | 5,70 | | 271.348.009,00 | | 0,73 | | |
| | 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Telaksananya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | 100 | 192.915.159 | 100 | 187.715.976,00 | | 189.864.500,00 | 50,00 | 5.166.561,00 | 50,00 | 2,72 | | 192.882.537,00 | | 1,00 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan pemahaman aparatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah | 21,78 | 29.535.410 | 100 | 165.880.724,00 | | 126.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 165.880.724,00 | | 5,62 | | |
| | *4.01.03.2.04* | *Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Terlaksanya Kegiatan dan Pengendalian Terkait Sumber Daya Alam | 20,21 | 30.563.000 | | | 15 Kecamatan | 15.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 4.01.03.2.04.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Terselenggaranya Penelitian Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | 100 | 376.414.900 | 100 | 320.758.600,00 | 15 Kecamatan | 388.048.000,00 | 7,07 | 23.031.000,00 | 7,07 | 5,94 | | 343.789.600,00 | | 0,91 | Sekretariat Daerah | |
| | 4.01.03.2.04.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Fasilitasi permasalahan SDA (10 kali); monitoring dan evaluasi ekploitasi SDA (10 laporan); pemetaan potensi SDA (10 kec) | 100 | 72.393.262 | | | | 77.797.000,00 | 62,08 | 46.663.508,00 | 62,08 | 59,98 | | 46.663.508,00 | | 0,64 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **37,24** | **11,27** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **116** | **4.02.02** | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | **Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD** | **98,66** | **18.814.600.036,00** | **99,80** | **23.846.558.575,00** | | **23.050.739.415,00** | **34,85** | **7.067.540.243,00** | **34,85** | **30,66** | | **30.914.098.818,00** | | | | |
| | *4.02.02.2.01* | *Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Terlaksanannya rancangan Peraturan Daerah | 100,00 | 1.061.065.758 | 100,00 | 1.386.746.771,00 | | 1.965.226.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.386.746.771,00 | | 1,31 | | |
| | 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Tersedianya raperda inisiatif yang akuntabel | 100,00 | 240.193.400 | 100,00 | 85.045.135,00 | | 259.711.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.045.135,00 | | 0,35 | Sekretariat DPRD | |
| | *4.02.02.2.02* | *Pembahasan Kebijakan Anggaran* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS | 100,00 | 762.042.553 | 100,00 | 553.999.017,00 | | 1.096.686.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 553.999.017,00 | | 0,73 | | |
| | 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS | 100,00 | 522.698.799 | 100,00 | 183.085.704,00 | | 1.096.686.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 183.085.704,00 | | 0,35 | | |
| | 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | Terlaksananya pembahasan APBD | 100,00 | 461.913.338 | 100,00 | 594.452.288,00 | | 666.435.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 594.452.288,00 | | 1,29 | Sekretariat DPRD | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | | | 10 = 6 + 8 | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan | 100,00 | 253.780.322 | 100,00 | 601.191.265,00 | | 666.435.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 601.191.265,00 | | 2,37 | | |
| | 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Terlaksannya pembahasan pertanggungjawaban APBD | 100,00 | 415.047.134 | 100,00 | 551.053.905,00 | | 1.096.686.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 551.053.905,00 | | 1,33 | | |
| | *4.02.02.2.03* | *Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 100,00 | 1.229.010.500 | 100,00 | 1.076.462.167,00 | | 2.231.694.654,00 | 100,00 | 1.483.336.489,00 | 100,00 | 66,47 | | 2.559.798.656,00 | | 2,08 | Sekretariat DPRD | |
| | *4.02.02.2.04* | *Peningkatan Kapasitas DPRD* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.04.01 | Orientasi Dprd | | 80,00 | 502.270.659 | 100,00 | 1.047.753.006,00 | | | | | | | | 1.047.753.006,00 | | 2,09 | | |
| | 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | Terlaksananya bimtek untuk 45 orang anggota DPRD | 100,00 | 516.000.000 | 100,00 | 522.000.000,00 | | 1.222.672.000,00 | 17,14 | 209.577.797,00 | 17,14 | 17,14 | | 731.577.797,00 | | 1,42 | | |
| | 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Tersedianya gaji untuk kelompok pakar dan tim ahli DPRD | 100,00 | 480.000.000 | 100,00 | 480.000.000,00 | | 720.000.000,00 | 50,00 | 240.000.000,00 | 50,00 | 33,33 | | 720.000.000,00 | | 1,50 | Sekretariat DPRD | |
| | 4.02.02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tersedianya gaji untuk tenaga ahli fraksi | | | | | | 480.000.000,00 | 50,00 | 175.000.000,00 | 50,00 | 36,46 | | 175.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | 4.02.02.2.04.08 | Publikasi Dan Dokumentasi Dprd | | | | | | | 1.216.335.300,00 | 44,93 | 546.442.800,00 | 44,93 | 44,93 | | 546.442.800,00 | | 0,00 | | |
| | *4.02.02.2.05* | *Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD | 5,56 | 6.350.000 | 1,77 | 1.125.000,00 | | 152.275.000,00 | 2,20 | 3.343.786,00 | 2,20 | 2,20 | | 4.468.786,00 | | 0,70 | Sekretariat DPRD | |
| | 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya reses anggota DPRD | 100,00 | 1.684.181.232 | 100,00 | 1.924.976.141,00 | | 1.971.390.199,00 | 33,33 | 624.736.148,00 | 33,33 | 31,69 | | 2.549.712.289,00 | | 1,51 | | |
| | *4.02.02.2.07* | *Pembahasan Kerja Sama Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Tersedianya liputan radio, televisi, media harian, advetorial. mungguan dan media online dan jasa pembuatan stand | 100,00 | 3.953.148.584 | 100,00 | 2.768.846.316,00 | | 1.571.160.000,00 | 1,34 | 21.000.000,00 | 1,34 | 1,34 | | 2.789.846.316,00 | | 0,71 | Sekretariat DPRD | |
| | *4.02.02.2.08* | *Fasilitasi Tugas DPRD* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya study komparatif alat kelengkapan dewan | | 6.726.897.757 | 100,00 | 8.168.136.636,00 | | 3.381.367.600,00 | 76,12 | 2.573.865.694,00 | 76,12 | 76,12 | | 10.742.002.330,00 | | 1,60 | Sekretariat DPRD | |
| | 4.02.02.2.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd | Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen | | | 100,00 | 3.901.685.224,00 | | 3.255.976.000,00 | 36,56 | 1.190.237.529,00 | 36,56 | 36,56 | | 5.091.922.753,00 | | 0,00 | Sekretariat DPRD | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **34,85** | **30,66** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Perencanaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **117** | **5.01.02** | **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | **Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan** | **100** | **2.366.184.195,00** | **100** | **2.619.078.307,00** | | **2.092.151.367,20** | **49,66** | **403.321.670,00** | **49,66** | **19,28** | | **3.022.399.977,00** | | | | |
| | | | **Persentase Keselarasan program RKPD dalam RPJMD** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Persentase Keselarasan program kabupaten dengan program nasional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *5.01.02.2.01* | *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.01.01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | 50.505.000,00 | 100,00 | 50.505.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 50.505.000,00 | | 0,00 | | |
| | 5.01.02.2.01.02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Dokumen perencanaan dan laporan triwulanan program kegiatan yang bersumber dana non APBD | 100,00 | 187.054.223 | 100,00 | 290.968.865,00 | | 332.718.200,00 | 35,00 | 19.748.770,00 | 35,00 | 5,94 | | 310.717.635,00 | | 1,66 | | |
| | 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Terlaksananya forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah | 100,00 | 94.529.000 | 100,00 | 8.725.000,00 | | 10.591.000,00 | 85,00 | 0 | 85,00 | 0,00 | | 8.725.000,00 | | 0,09 | Bappeda | |
| | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang RKPD | 100,00 | 238.921.800 | 100,00 | 274.714.250,00 | | 533.209.000,00 | 58,74 | 127.390.550,00 | 58,74 | 23,89 | | 402.104.800,00 | | 1,68 | | |
| | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen | 100,00 | 458.952.750 | 100,00 | 821.436.827,00 | | 672.731.492,00 | 54,95 | 105.255.600,00 | 54,95 | 15,65 | | 926.692.427,00 | | 2,02 | | |
| | *5.01.02.2.02* | *Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen analisis data sosial budaya dan pembangunan manusia | 100,00 | 154.977.700 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 5.01.02.2.02.02 | Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | dokumen analisis data perencanaan program/kegiatan 1 Dokumen | 100,00 | 67.710.950 | 100,00 | 55.088.150,00 | | 27.661.000,00 | 50,00 | 1.856.600,00 | 50,00 | 6,71 | | 56.944.750,00 | | 0,84 | Bappeda | |
| | 5.01.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab. Muba (1 aplikasi); data hasil koordinasi dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Kab. Muba (1 dokumen); video virtual akhir Tahun 2021 | 100,00 | 265.006.060 | 100,00 | 430.152.240,00 | | 37.282.050,00 | 100,00 | 37.282.050,00 | 100,00 | 100,00 | | 467.434.290,00 | | 1,76 | | |
| | *5.01.02.2.03* | *Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (2 Laporan) | 100,00 | 324.162.612 | 100,00 | 212.980.894,00 | | 139.529.894,00 | 25,00 | 5.478.600,00 | 25,00 | 3,93 | | 218.459.494,00 | | 0,67 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 5.01.02.2.03.02 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Laporan pelaksanaan forum CSR Kab. Muba TA. 2021 )1 dokumen); laporan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kerjasama | 100,00 | 141.275.200 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Bappeda | |
| | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Pengelolaan data realisasi untuk SISMONTEPRA (12 kali); pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan dan SMS-Centre (4 aplikasi); buku daftar kegiatan | 100,00 | 433.593.900 | 100,00 | 447.846.356,00 | | 225.426.356,00 | 41,70 | 55.804.500,00 | 41,70 | 24,76 | | 503.650.856,00 | | 1,16 | | |
| | *5.01.02.2.04* | *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.04.02 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 3 Dokumen | | | 100,00 | 77.165.725,00 | | 62.497.375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 77.165.725,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **49,66** | **19,28** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **118** | **5.01.03** | **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase Program / kegiatan PD yang sesuai dengan dokumen perencanaan** | **100** | **2.455.758.537,00** | **100** | **2.048.460.564,00** | | **2.071.393.820,00** | **57,57** | **885.537.703,00** | **57,57** | **42,75** | | **2.933.998.267,00** | | | | |
| | *5.01.03.2.01* | *Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen | | | 100,00 | 89.339.498,00 | | 104.638.000,00 | 50,00 | 37.894.095,00 | 50,00 | 36,21 | | 127.233.593,00 | | 0,00 | | |
| | 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan; laporan Rencana Aksi Nasional dan Daerah bidang pemerintahan | 100,00 | 135.586.500 | 100,00 | 41.027.299,00 | | 74.621.000,00 | 50,00 | 4.885.328,00 | 50,00 | 6,55 | | 45.912.627,00 | | 0,34 | | |
| | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia | 100,00 | 317.516.800 | 100,00 | 84.792.572,00 | | 137.923.250,00 | 45,00 | 5.868.152,00 | 45,00 | 4,25 | | 90.660.724,00 | | 0,29 | Bappeda | |
| | 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 100,00 | 27.499.500,00 | | | | | | | | 27.499.500,00 | | 0,00 | | |
| | 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kab. Muba; rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (3 kali); aplikasi penanggulangan kemiskinan | 100,00 | 383.339.750 | 100,00 | 287.805.875,00 | | 204.148.250,00 | 50,00 | 23.142.900,00 | 50,00 | 11,34 | | 310.948.775,00 | | 0,81 | | |
| | *5.01.03.2.02* | *Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Buku analisis ekonomi daerah; laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 100,00 | 92.518.250 | 100,00 | 88.157.865,00 | | 32.746.000,00 | 60,00 | 6.639.200,00 | 60,00 | 20,27 | | 94.797.065,00 | | 1,02 | | |
| | 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (1 Laporan) | | | 100,00 | 8.250.000,00 | | 10.385.000,00 | 50,00 | 1.365.808,00 | 50,00 | 13,15 | | 9.615.808,00 | | 0,00 | | |
| | 5.01.03.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Buku produk unggulan daerah Kab. Muba (50 eks); laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDA | 100,00 | 134.343.510 | 100,00 | 118.867.445,00 | | 55.772.000,00 | 85,00 | 5.096.200,00 | 85,00 | 9,14 | | 123.963.645,00 | | 0,92 | | |
| | 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda | Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (1 Laporan) | | | 100,00 | 15.281.850,00 | | 26.529.000,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | 15.281.850,00 | | 0,00 | | |
| | *5.01.03.2.03* | *Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Program/Kegiatan ARKA di Kab. Muba (Sanimas, Nawasis, STBM, Kelanjutan SPAM, PPSP, ALS); dokumen pemuktahiran SSK Kab. Muba 2021-2025; updating dan analisis data infrastruktur dan | 100,00 | 186.403.500 | 100,00 | 138.023.410,00 | | 447.107.820,00 | 70,00 | 299.129.720,00 | 70,00 | 66,90 | | 437.153.130,00 | | 2,35 | | |
| | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (1 Laporan) | | | 100,00 | 75.337.100,00 | | 38.588.000,00 | 20,00 | 1.077.000,00 | 20,00 | 2,79 | | 76.414.100,00 | | 0,00 | Bappeda | |
| | 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan pelaksanaan kegiatan pendukung program IPDMIP di Kab. Muba | 100,00 | 269.234.700 | 100,00 | 185.073.300,00 | | 71.499.000,00 | 35,00 | 12.359.500,00 | 35,00 | 17,29 | | 197.432.800,00 | | 0,73 | | |
| | 5.01.03.2.03.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dokumen integrasi data geospasial daerah; aplikasi geospasial Kab. Muba; simpul jaringan informasi geospasial daerah | 100,00 | 565.460.327 | 100,00 | 513.725.850,00 | | 744.820.500,00 | 64,93 | 465.626.300,00 | 64,93 | 62,52 | | 979.352.150,00 | | 1,73 | | |
| | 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Fasilitasi kegiatan yang mendukung capaian target penurunan emisi gas rumah kaca/perubahan iklim; koordinasi penyusunan dan | 100,00 | 371.355.200 | 100,00 | 375.279.000,00 | | 122.616.000,00 | 25,00 | 22.453.500,00 | 25,00 | 18,31 | | 397.732.500,00 | | 1,07 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | 57,57 | 42,75 | | | | | | |
| | | | PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | RENDAH | SANGAT RENDAH | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **119** | **5.02.02** | **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan**<br>**Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)**<br>**Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**<br>**Persentase Pencairan Dana On Skedul** | **100** | **486.590.782.365** | **100** | **507.543.953.536** | | **529.932.971.079,65** | **47,78** | **251.832.010.725,00** | **47,78** | **47,52** | | **759.375.964.261** | | | | |
| | *5.02.02.2.01* | *Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Dokumen KUA-PPAS Induk | 100,00 | 171.264.133 | 100,00 | 100.515.729,00 | | 65.680.000,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.515.729,00 | | 0,59 | | |
| | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen Perubahan-KUA; dokumen Perubahan-PPAS | 100,00 | 124.787.048 | 100,00 | 114.299.587,00 | | 25.955.000,00 | 50,00 | 7.957.300,00 | 50,00 | 30,66 | | 122.256.887,00 | | 0,98 | | |
| | 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Tersedianya RKA yang valid dan sesuai setelah di verifikasi | 100,00 | 71.346.200 | 100,00 | 62.548.300,00 | | | | | | | | 62.548.300,00 | | 0,88 | | |
| | 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD | Tersedianya RKA perubahan yang valid dan sesuai setelah di verifikasi | 100,00 | 33.800.000 | 100,00 | 46.702.500,00 | | | | | | | | 46.702.500,00 | | 1,38 | | |
| | 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Tersedianya DPA yang valid dan sesuai setelan di verifikasi | 100,00 | 19.797.300 | 100,00 | 26.303.405,00 | | | | | | | | 26.303.405,00 | | 1,33 | | |
| | 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD | Tersedianya DPPA yang valid dan sesuai setelah di verifikasi | 100,00 | 25.331.100 | 100,00 | 37.551.188,00 | | | | | | | | 37.551.188,00 | | 1,48 | BPKAD | |
| | 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022 Tersusunnya Raperda Pra, Pasca dan Perda | 100,00 | 466.939.592 | 100,00 | 294.927.487,00 | | 185.745.000,00 | 25,00 | 66.173.100,00 | 25,00 | 35,63 | | 361.100.587,00 | | 0,77 | | |
| | 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Perbup penjabaran APBD TA. 2022 Tersusunnya Raperda Pra, Pasca dan Perda | 100,00 | 359.165.810 | 100,00 | 342.876.444,00 | | 148.840.000,00 | 15,00 | 53.991.677,00 | 15,00 | 36,27 | | 396.868.121,00 | | 1,10 | | |
| | 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Sistem penganggaran Elektronik (1 aplikasi); leaflet (2.000 lbr); standing banner (4 bh); buku profil APBD Induk dan Perubahan 2021; buku saku APBD Induk dan Perubahan 2021 @ 100 buku; dokumen ASB | 100,00 | 340.856.620 | 100,00 | 340.975.820,00 | | 87.240.000,00 | 25,00 | 58.861.220,00 | 25,00 | 67,47 | | 399.837.040,00 | | 1,17 | | |
| | *5.02.02.2.02* | *Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Penerbitan SP2D : Gaji, UP, GU, TU, LS, Nihil, SKPP (7 dokumen); dokumen Kajian Investasi Daerah (1 dokumen) | 100,00 | 557.690.907 | 100,00 | 136.194.376,00 | | 66.702.000,00 | 90,00 | 41.525.100,00 | 90,00 | 62,25 | | 177.719.476,00 | | 0,32 | | |
| | 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Anggaran Kas dan SPD (Surat Penyediaan Dana) | 100,00 | 79.757.404 | 100,00 | 31.115.400,00 | 2 Jenis Dokumen | 54.293.500,00 | 86,00 | 16.112.315,00 | 86,00 | 29,68 | | 47.227.715,00 | | 0,59 | BPKAD | |
| | 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Laporan : (DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, NTPN, Dana Kelurahan) | 100,00 | 72.482.445 | 100,00 | 47.490.982,00 | | 49.204.450,00 | 81,00 | 21.933.254,00 | 81,00 | 44,58 | | 69.424.236,00 | | 0,96 | | |
| | 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Perbup sistem dan proseduur pelaksanaan APBD; Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | *5.02.02.2.03* | *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Tersusunnya laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | 100,00 | 141.832.986 | | | | 34.186.500,00 | 75,00 | 17.245.610,00 | 75,00 | 50,45 | | 17.245.610,00 | | 0,12 | | |
| | 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-lO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, | 100,00 | 76.441.167 | | | | 29.802.400,00 | 75,00 | 17.737.871,00 | 75,00 | 59,52 | | 17.737.871,00 | | 0,23 | | |
| | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan realisasi APBD Kab. Muba (12 laporan); laporan realisasi APBD semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya APBD Kab. Muba (2 laporan) | 100,00 | 283.993.737 | 100,00 | 246.838.820,00 | | 80.312.249,00 | 60,00 | 63.203.059,00 | 60,00 | 78,70 | | 310.041.879,00 | | 1,09 | | |
| | 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Muba | 100,00 | 235.917.222 | 100,00 | 230.269.942,00 | | 69.666.000,00 | 96,36 | 67.133.500,00 | 96,36 | 96,36 | | 297.403.442,00 | | 1,26 | | |
| | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020; Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2020 | 100,00 | 284.521.281 | 100,00 | 201.783.763,00 | | 89.382.500,00 | 25,00 | 15.666.000,00 | 25,00 | 17,53 | | 217.449.763,00 | | 0,76 | BPKAD | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Tersedianya Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas ASN bukan Bendahara | 100,00 | 69.012.420 | 100,00 | 39.851.395,00 | | 41.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.851.395,00 | | 0,58 | | |
| | 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Raperbup tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi | | | 100,00 | 152.670.095,00 | | 43.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 152.670.095,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Tersusunnya Perbup tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah | | | | | | 39.910.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi untuk PPK dan Operator Perangkat Daerah | | | | | | 53.739.500,00 | 50,00 | 19.413.747,00 | 50,00 | 36,13 | | 19.413.747,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.02.2.03.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Bimtek Pengelolaan BLUD<br>Bimtek Pengelolaan BLUD | 100,00 | 272.784.512 | | | | 55.643.450,00 | 50,00 | 25.207.627,00 | 50,00 | 45,30 | | 25.207.627,00 | | 0,09 | | |
| | *5.02.02.2.04* | *Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (3 Laporan) | 100,00 | 11.088.298.859 | 100,00 | 2.229.803.709,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.229.803.709,00 | | 0,20 | | |
| | 5.02.02.2.04.03 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Pembayaran bunga utang pinjaman kepada BUMN (PT.SMI) | 100,00 | 468.725.290.360 | 100,00 | 502.554.795.271,00 | | | | | | | | 502.554.795.271,00 | | 1,07 | BPKAD | |
| | 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | ADD; ADDK; Pengembalian Biaya Lelang Lebak Lebung | 100,00 | 2.387.427.830 | 100,00 | 21.000.000,00 | | 512.767.981.358,00 | 49,25 | 251.300.075.230,00 | 49,25 | 49,01 | | 251.321.075.230,00 | | 105,27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPKAD | |
| | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Belanja tidak terduga | | | | | | 15.713.733.622,40 | 0,20 | 31.950.062,00 | 0,20 | 0,20 | | 31.950.062,00 | | 0,00 | BPKAD | |
| | *5.02.02.2.05* | *Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.05.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Pemeliharaan program aplikasi database Simda Keuangan Perangkat Daerah | 100,00 | 416.355.522 | 100,00 | 285.439.323,00 | | 150.143.000,00 | 5,00 | 3.000.000,00 | 5,00 | 2,00 | | 288.439.323,00 | | 0,69 | BPKAD | |
| | 5.02.02.2.05.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan PPK Perangkat Daerah dan Operator yang mengikuti sosialisasi SIPD/ Simda Keuangan | 100,00 | 285.687.910 | | | | 29.740.650,00 | 20,00 | 4.824.053,00 | 20,00 | 16,22 | | 4.824.053,00 | | 0,02 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **47,78** | **47,52** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **120** | **5.02.03** | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Persentase data aset yang akurat** | **100** | **1.812.160.565,00** | **100** | **1.316.478.272,00** | | **1.080.733.500,00** | **27,85** | **148.632.573,00** | **27,85** | **13,75** | | **1.465.110.845,00** | | | | |
| | *5.02.03.2.01* | *Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.03.2.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tersedianya peraturan bupati untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100,00 | 344.204.820 | | | | 104.978.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Penetapan status BMD, reklasifikasi aset, pengalihan status penggunaan BMD (3 laporan); pengembangan aplikasi BMD (2 aplikasi) | 100,00 | 115.251.700 | 100,00 | 130.809.213,00 | | 110.080.000,00 | 45,00 | 4.966.000,00 | 45,00 | 4,51 | | 135.775.213,00 | | 1,18 | | |
| | 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Inventarisasi aset gedung / bangunan Pemkab Muba (300 unit); inventarisasi aset tanah Pemkab Muba (150 persil) | 100,00 | 145.483.800 | 100,00 | 146.274.900,00 | | 71.126.000,00 | 25,00 | 3.692.460,00 | 25,00 | 5,19 | | 149.967.360,00 | | 1,03 | | |
| | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Penarikan kendaraan dinas dari mantan pejabat/DPRD; pengukuran dan persertifikat tanah Pemda (300 sertifikat); penyimpanan BPKB kendaraan Pemda (10 BPKB) | 100,00 | 514.257.686 | 100,00 | 412.979.774,00 | | 241.478.700,00 | 30,00 | 5.552.899,00 | 30,00 | 2,30 | | 418.532.673,00 | | 0,81 | | |
| | 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Penilaian untuk pencatatan BMD, pemanfaatan BMD, pemindatanganan BMD dan ganti rugi BMD | 100,00 | 68.016.340 | 100,00 | 67.620.575,00 | | 57.287.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.620.575,00 | | 0,99 | BPKAD | |
| | 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100,00 | 87.864.194 | 100,00 | 74.911.316,00 | 1 Laporan | 46.630.200,00 | 25,00 | 4.704.800,00 | 25,00 | 10,09 | | 79.616.116,00 | | 0,91 | | |
| | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Hasil barang masuk dan keluar BMD (3 dokumen); P3D ke Pemprov Sumsel (1 dokumen); pemanfaatan BMD; pemusnahan BMD; penghapusan BMD (6 dokumen) | 100,00 | 168.557.833 | 100,00 | 185.865.160,00 | | 115.921.800,00 | 30,00 | 28.704.432,00 | 30,00 | 24,76 | | 214.569.592,00 | | 1,27 | | |
| | 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Penyusunan kertas kerja rekonsiliasi barang milik daerah (2 laporan); penyusunan laporan realisasi rincian belanja modal (12 laporan) | 100,00 | 76.323.460 | 100,00 | 65.215.000,00 | | 42.498.000,00 | 35,00 | 3.471.000,00 | 35,00 | 8,17 | | 68.686.000,00 | | 0,90 | | |
| | 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Penyusunan laporan BMD tahunan unaudited, laporan BMD tahunan audited, laporan BMD penyusunan unaudited, laporan penyusunan BMD audited, laporan BMD semesteran | 100,00 | 292.200.732 | 100,00 | 232.802.334,00 | | 153.647.000,00 | 65,00 | 97.540.982,00 | 65,00 | 63,48 | | 330.343.316,00 | | 1,13 | | |
| | 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (66 Orang) | | | | | | 137.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **27,85** | **13,75** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **121** | **5.02.04** | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **100** | **4.530.881.041,00** | **100** | **4.494.652.574,09** | | **5.454.445.140,00** | **16,52** | **879.916.585,00** | **16,52** | **16,13** | | **5.374.569.159,09** | | | | |
| | *5.02.04.2.01* | *Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Koordinasi/ rekonsiliasi, penerimaan pendapatan dana bagi hasil | 100,00 | 144.342.756 | 100,00 | 301.722.136,09 | | 463.010.000,00 | 6,00 | 24.626.200,00 | 6,00 | 5,32 | | 326.348.336,09 | | 2,26 | | |
| | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Perbup pajak daerah (2 perbup); perda pajak daerah (2 perda); PKS pajak daerah (3 PKS); aplikasi e-potensi pajak daerah (1 aplikasi) | 100,00 | 374.058.124 | 100,00 | 410.962.321,00 | | 267.122.500,00 | 6,00 | 15.313.800,00 | 6,00 | 5,73 | | 426.276.121,00 | | 1,14 | | |
| | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Sosialisasi pajak daerah (3 kecamatan); Gebyar Pajak Daerah (1 kali) | 100,00 | 586.996.650 | 100,00 | 399.454.750,00 | | 395.866.200,00 | 3,00 | 8.138.700,00 | 3,00 | 2,06 | | 407.593.450,00 | | 0,69 | | |
| | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (10 Unit) | | | 100,00 | 69.861.300,00 | | 80.081.440,00 | 5,00 | 3.267.900,00 | 5,00 | 4,08 | | 73.129.200,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Data OP/WP (2.000 OP/WP); surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang terdistribusi ke wajib pajak (9 jenis WP); tervalidasinya data SPPT PBB (40.000 OP/WP) | 100,00 | 656.984.000 | 100,00 | 457.171.705,00 | | 790.974.000,00 | 14,00 | 109.854.992,00 | 14,00 | 13,89 | | 567.026.697,00 | | 0,86 | | |
| | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pengembangan aplikasi SIMPATDA; pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak daerah, E-BPHTB, host to host dan jaringan server yang baik | 100,00 | 364.468.470 | 100,00 | 311.642.100,00 | | 414.309.600,00 | 50,89 | 210.531.500,00 | 50,89 | 50,82 | | 522.173.600,00 | | 1,43 | | |
| | 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Tercetaknya SPPT; terlayaninya wajib pajak PBB dengan baik (10.000 WP) | 100,00 | 112.132.800 | 100,00 | 138.305.000,00 | | 280.249.400,00 | 18,18 | 50.534.000,00 | 18,18 | 18,03 | | 188.839.000,00 | | 1,68 | | |
| | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang terdistribusi ke wajib pajak (3.000 SKPD/SKPDKB); terdistribusinya SPPT PBB P2 ke wajib pajak (250.000 SPPT PBB W2) | 100,00 | 713.770.420 | 100,00 | 485.362.082,00 | | 691.978.500,00 | 19,00 | 126.813.888,00 | 19,00 | 18,33 | | 612.175.970,00 | | 0,86 | | BP2RD |
| | 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Terselenggaranya pelayanan pajak daerah yang baik (9 jenis pajak daerah); terlayani dengan baik wajib pajak PBB dan BPHTB (10.000 WP) | 100,00 | 357.018.400 | 100,00 | 283.213.888,00 | | 432.375.000,00 | 9,00 | 35.985.888,00 | 9,00 | 8,32 | | 319.199.776,00 | | 0,89 | | |
| | 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Laporan realisasi pendapatan daerah yang akuntabel, transparan dan terukur | 100,00 | 418.279.846 | 100,00 | 476.040.284,00 | | 506.410.000,00 | 26,00 | 130.925.592,00 | 26,00 | 25,85 | | 606.965.876,00 | | 1,45 | | |
| | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah ketetapan PBB tertagih, jumlah ketetapan BPHTB tertagih; terselenggaranya kegiatan penagihan pajak daerah Dalam Kab. Muba | 100,00 | 518.558.924 | 100,00 | 603.863.023,00 | | 367.530.500,00 | 16,00 | 57.038.725,00 | 16,00 | 15,52 | | 660.901.748,00 | | 1,27 | | |
| | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (182 Dokumen) | | | 100,00 | 54.923.900,00 | | 205.607.000,00 | 9,00 | 18.360.000,00 | 9,00 | 8,93 | | 73.283.900,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Laporan evaluasi pendapatan yang akurat dan akuntabel (4 laporan); terbitnya Surat Keputusan Penghapusan dan Laporan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB (1 dokumen); tercapainya | 100,00 | 284.270.651 | 100,00 | 356.074.735,00 | | 372.646.000,00 | 24,00 | 88.525.400,00 | 24,00 | 23,76 | | 444.600.135,00 | | 1,56 | | |
| | 5.02.04.2.01.14 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Laporan evaluasi pendapatan yang akurat dan akuntabel (4 laporan); terbitnya Surat Keputusan Penghapusan dan Laporan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB (1 dokumen); tercapainya target penertiban pajak daerah; | | | 100,00 | 59.537.400,00 | | 94.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.537.400,00 | | 0,00 | | |
| | 5.02.04.2.01.15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (2 Laporan) | | | 100,00 | 86.517.950,00 | | 91.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 86.517.950,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **16,52** | **16,13** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **122** | **5.03.02** | **Program Kepegawaian Daerah** | **Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan**<br>**Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan**<br>**Persentase Capaaian Kenerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik**<br>**Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN**<br>**Survey Kepuasan ASN** | **100** | **4.553.786.360,00** | **95,09** | **3.229.216.618,00** | | **5.875.608.175,00** | **29,05** | **2.491.761.542,00** | **29,05** | **42,41** | | **5.720.978.160,00** | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | *5.03.02.2.01* | *Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Tersedianya formasi penerimaan (CPNS dan PPPK di lingkungan Pemkab. Muba | 100,00 | 241.968.800 | 100,00 | 401.153.349,00 | | 220.000.050,00 | 86,15 | 148.257.396,00 | 86,15 | 67,39 | | 549.410.745,00 | | 2,27 | BKPSDM | |
| | 5.03.02.2.01.04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Pengambilan sumpah terhadap PNS | 100,00 | 110.100.000 | 100,00 | 86.616.400,00 | | 197.650.000,00 | 67,3 | 6.840.000,00 | 67,30 | 3,46 | | 93.456.400,00 | | 0,85 | | |
| | 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Proses persetujuan teknis dalam penerbitan SK pensiun / pemberhentian PNS tepat waktu | 100,00 | 19.838.800 | 100,00 | 46.827.900,00 | | 25.000.000,00 | 76,15 | 7.020.394,00 | 76,15 | 28,08 | | 53.848.294,00 | | 2,71 | | |
| | 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Fasilitasi klaim jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja PNS; koordinasi kegiatan kelembagaan profesi ASN | 100,00 | 62.237.828 | 100,00 | 40.641.496,00 | | 44.625.000,00 | 60,15 | 6.091.500,00 | 60,15 | 13,65 | | 46.732.996,00 | | 0,75 | | |
| | 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tertatanya arsip pegawai baik hardcopy maupun elektronik, updatenya data untuk PNS di Pemkab Muba | 100,00 | 102.589.676 | 100,00 | 54.749.857,00 | | 61.000.000,00 | 85,1 | 6.723.664,00 | 85,10 | 11,02 | | 61.473.521,00 | | 0,60 | | |
| | *5.03.02.2.02* | *Mutasi dan Promosi ASN* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Terlaksananya Pensiun PNS, Mutasi ASN antar Perangkat Daerah, Mutasi Keluar dan Masuk ke Kab. MUBA | 100,00 | 197.766.698 | 100,00 | 145.286.256,00 | 50 Orang | 97.887.950,00 | 52,00 | 49.916.854,00 | 52,00 | 50,99 | | 195.203.110,00 | | 0,99 | BKPSDM | |
| | 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Terlaksannya proses kenaikan pangkat PNS | 100,00 | 189.716.831 | 100,00 | 196.362.608,00 | | 73.081.925,00 | 55,00 | 25.926.000,00 | 55,00 | 35,48 | | 222.288.608,00 | | 1,17 | | |
| | 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | Pelantikan pejabat struktural dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional (3 kali); Rapat/Sidang Baperjakat (6 kali) | 100,00 | 163.959.626 | 100,00 | 182.074.669,00 | | 136.749.925,00 | 53,00 | 53.459.249,00 | 53,00 | 39,09 | | 235.533.918,00 | | 1,44 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | *5.03.02.2.03* | *Pengembangan Kompetensi ASN* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (6 OPD); seleksi uji kompetensi/job fit bagi pejabat yang telah menduduki JPT Pratama (23 JPT) | 100,00 | 821.866.717 | 50,00 | 89.507.246,00 | | 2.799.999.700,00 | 45,00 | 1.199.667.850,00 | 45,00 | 42,85 | | 1.289.175.096,00 | | 1,57 | | |
| | 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | PNS tugas belajar dan ikatan dinas | 100,00 | 1.179.866.019 | 100,00 | 829.787.552,00 | | 956.149.775,00 | 70,00 | 665.943.275,00 | 70,00 | 69,65 | | 1.495.730.827,00 | | 1,27 | | |
| | 5.03.02.2.03.05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | ASN yang mempunyai kompetensi bahasa asing dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (70 org); terpenuhinya persyaratan | 100,00 | 1.004.378.352 | 100,00 | 737.777.929,00 | | 681.777.900,00 | 28,00 | 179.983.540,00 | 28,00 | 26,40 | | 917.761.469,00 | | 0,91 | BKPSDM | |
| | 5.03.02.2.03.06 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Terlaksananya Pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi | 100,00 | 112.898.059 | | | | 148.999.700,00 | 22,00 | 31.223.200,00 | 22,00 | 20,96 | | 31.223.200,00 | | 0,28 | | |
| | 5.03.02.2.03.09 | Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (1 Dokumen) | | | | | | 144.874.900,00 | 6,50 | 9.331.800,00 | 6,50 | 6,44 | | 9.331.800,00 | | 0,00 | | |
| | *5.03.02.2.04* | *Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Pengadaan aplikasi e-kinerja dan pengembangan aplikasi e-absen (2 aplikasi); laporan penilaian kinerja PNS | 100,00 | 81.028.558 | 100,00 | 107.592.440,00 | | 51.421.500,00 | 94,00 | 29.607.900,00 | 94,00 | 57,58 | | 137.200.340,00 | | 1,69 | | |
| | 5.03.02.2.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya | 100,00 | 35.294.109 | 100,00 | 54.243.123,00 | | 25.120.000,00 | 58,00 | 1.110.000,00 | 58,00 | 4,42 | | 55.353.123,00 | | 1,57 | | |
| | 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin Asn | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (80 Orang) | | | | | | 58.991.850,00 | 100,00 | 11.514.600,00 | 100,00 | 19,52 | | 11.514.600,00 | | 0,00 | | |
| | 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Terkelolanya kasus-kasus pelanggaran disiplin dan penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS | 100,00 | 98.631.288 | 100,00 | 127.614.575,00 | | 60.229.500,00 | 85,00 | 47.516.400,00 | 85,00 | 78,89 | | 175.130.975,00 | | 1,78 | BKPSDM | |
| | 5.03.02.2.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Terkelolanya kasus perceraian PNS dan penetapan keputusan izin perceraian | 100,00 | 41.298.415 | 100,00 | 35.697.500,00 | | 15.064.500,00 | 50,00 | 6.091.500,00 | 50,00 | 40,44 | | 41.789.000,00 | | 1,01 | | |
| | 5.03.02.2.04.10 | Evaluasi Disiplin ASN | Terlaksananya laporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN | 100,00 | 90.346.584 | 100,00 | 93.283.718,00 | | 76.984.000,00 | 100,00 | 5.536.420,00 | 100,00 | 7,19 | | 98.820.138,00 | | 1,09 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **29,05** | **42,41** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **123** | **5.05.02** | **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan**<br>**Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti** | **100** | **883.419.794,00** | **100** | **500.296.974,00** | | **510.770.278,00** | **31,98** | **40.106.800,00** | **31,98** | **7,85** | | **538.198.774,00** | | | | |
| | *5.05.02.2.01* | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.01.14 | Fasilitasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (1 Laporan) | | | | | | 141.087.730,00 | 35,00 | 4.492.170,00 | 35,00 | 3,18 | | 4.492.170,00 | | 0,00 | | |
| | *5.05.02.2.02* | *Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Fasilitasi Dewan Riset Daerah; fasilitasi Indikasi Geografis (IG) Gambir Gindesug; pilot project budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan | 100,00 | 279.887.650 | 100,00 | 268.984.774,00 | | 95.953.317,00 | 35,00 | 20.477.466,00 | 35,00 | 21,34 | | 289.462.240,00 | | 1,03 | Bappeda | |
| | *5.05.02.2.03* | *Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.03.04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Kerjasama pemasaran karet lateks perkebunan; pelatihan dan intercroping gambir sebagai tanaman sela pada kebun karet dengan pola Identifikasi Geografis (IG) | 100,00 | 99.135.020,00 | 100,00 | 2.205.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.03.07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | 104.801.333,00 | 25,00 | 3.567.900,00 | 25,00 | 3,40 | | 3.567.900,00 | | 0,00 | Bappeda | |
| | *5.05.02.2.04* | *Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | orangtua murid; rakorda kerjasama Litbang dgn Institusi/lembaga lain (3 lembaga); fasilitasi pembangunan jaringan gas bumi utk rumah tangga; data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD); data Indeks Inovasi Daerah dan pembinaan TGA | 100,00 | 504.397.124 | 100,00 | 229.107.200,00 | | 73.560.120,00 | 35,00 | 5.646.064,00 | 35,00 | 7,68 | | 234.753.264,00 | | 0,47 | Bappeda | |
| | 5.05.02.2.04.04 | *Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | | | | 49.316.000,00 | 25,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | 46.051.778,00 | 35,00 | 5.923.200,00 | 35,00 | 12,86 | | 5.923.200,00 | | 0,00 | Bappeda | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **31,98** | **7,85** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | **Bidang Urusan Inspektorat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **124** | **6.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB**<br>**Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)**<br>**Opini terhadap laporan keuangan pemda**<br>**Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti**<br>**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat** | **100** | **3.230.266.395,00** | **100** | **3.230.266.395,00** | | **3.273.767.950,00** | **36,98** | **1.202.553.809,00** | **36,98** | **36,73** | | **4.432.820.204,00** | | | | |
| | *6.01.02.2.01* | *Penyelenggaraan Pengawasan Internal* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan hasil : pemeriksaan OPD; pengawasan dan pembinaan PNS terpadu; evaluasi SAKIP; evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG); evaluasi pelayanan publik; audit penggadaan barang dan | 100,00 | 573.315.814,00 | 100,00 | 573.315.814,00 | | 655.441.400,00 | 27,00 | 176.949.868,00 | 27,00 | 27,00 | | 750.265.682,00 | | 1,31 | | |
| | 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan hasil : pemeriksaan eksternal negeri dan swasta; pengawasan terhadap optimalisasi PAD; | 100,00 | 363.949.402,00 | 100,00 | 363.949.402,00 | | 524.718.500,00 | 14,46 | 75.875.000,00 | 14,46 | 14,46 | | 439.824.402,00 | | 1,21 | | |
| | 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Laporan hasil reviu LKPJ | 100,00 | 268.253.981,00 | 100,00 | 268.253.981,00 | | 310.357.000,00 | 41,67 | 129.331.600,00 | 41,67 | 41,67 | | 397.585.581,00 | | 1,48 | Inspektorat | |
| | 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Laporan hasil reviu LKPD | 100,00 | 99.049.000,00 | 100,00 | 99.049.000,00 | | 91.866.950,00 | 100,00 | 83.620.000,00 | 100,00 | 91,02 | | 182.669.000,00 | | 1,84 | | |
| | 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa | 100,00 | 769.502.000,00 | 100,00 | 769.502.000,00 | | 674.364.750,00 | 20,32 | 137.055.000,00 | 20,32 | 20,32 | | 906.557.000,00 | | 1,18 | | |
| | 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Laporan hasil : evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal; evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal | 100,00 | 248.924.117,00 | 100,00 | 248.924.117,00 | | 202.178.900,00 | 43,91 | 88.784.350,00 | 43,91 | 43,91 | | 337.708.467,00 | | 1,36 | | |
| | *6.01.02.2.02* | *Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara / daerah | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Inspektorat | |
| | 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan hasil : pemeriksaan khusus; penanganan pengaduan masyarakat | 100,00 | 907.272.081,00 | 100,00 | 907.272.081,00 | | 814.840.450,00 | 62,7 | 510.937.991,00 | 62,70 | 62,70 | | 1.418.210.072,00 | | 1,56 | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | **36,98** | **36,73** | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **125** | **6.01.03** | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | **Nilai Kapabilitas APIP**<br>**Nilai Maturitas SPIP**<br>**Nilai Reformasi dan Birokrasi Pemda** | **100** | **1.825.358.841,00** | **100** | **1.310.936.589,00** | | **1.317.017.900,00** | **27,52** | **362.453.820,00** | **27,52** | **27,52** | | **1.673.390.409,00** | | | | |
| | *6.01.03.2.01* | *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Penyusunan dokumen PKPT berbasis resiko dan SOP | 100,00 | 99.593.192 | 100,00 | 191.554.134,00 | | 152.723.950,00 | 61,08 | 93.277.613,00 | 61,08 | 61,08 | | 284.831.747,00 | | 2,86 | Inspektorat | |
| | 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Sistem informasi pengawasan yang andal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *6.01.03.2.02* | *Pendampingan dan Asistensi* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintaha | | | 100,00 | 191.554.134,00 | | 252.918.000,00 | 37,04 | 93.680.000,00 | 37,04 | 37,04 | | 285.234.134,00 | | 0,00 | | |
| | 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Laporan hasil : pengawasan reformasi birokrasi; penilaian zona integritas; evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah | 100,00 | 562.035.994 | 100,00 | 120.748.348,00 | | 347.119.900,00 | 24,54 | 85.188.636,00 | 24,54 | 24,54 | | 205.936.984,00 | | 0,37 | | |
| | 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Laporan hasil : pengendalian gratifikasi; pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; koordinasi supervisi pencegahan korupsi; survei indeks persepsi anti korupsi (IPAK); evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan | 100,00 | 570.652.067 | 100,00 | 557.334.010,00 | | 469.205.400,00 | 4,01 | 18.800.421,00 | 4,01 | 4,01 | | 576.134.431,00 | | 1,01 | Inspektorat | |
| | 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Laporan hasil : pengelola LHKASN; survei penilaian integritas; kapabilitas APIP; penilaian angka kredit | 100,00 | 593.077.588 | 100,00 | 249.745.963,00 | | 95.050.650,00 | 75,23 | 71.507.150,00 | 75,23 | 75,23 | | 321.253.113,00 | | 0,54 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **27,52** | **27,52** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Kewilayahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **126** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan** | **98,04** | **6.865.752.839,00** | **98,34** | **5.753.017.499,00** | | **8.246.000.299,25** | **26,96** | **1.585.038.840,00** | **26,96** | **19,22** | | **7.338.056.339,00** | | | | |
| | *7.01.02.2.01* | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Kegiatan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Lawang Wetan | |
| | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah dan fasilitasi pendukung kegiatan kabupaten | 97,83 | 5.628.827.000,00 | 98,72 | 4.356.509.000,00 | 15 Kec | 6.050.569.591,00 | 27,89 | 1.308.310.500,00 | 27,89 | 21,62 | | 5.664.819.500,00 | | 1,01 | Kec dalam Kab. Muba | |
| | *7.01.02.2.02* | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | 24 Dokumen | 150.000.000,00 | 39,65 | 59.475.853,00 | 39,65 | 39,65 | | 59.475.853,00 | | 0,00 | Kec. Babat Supat | |
| | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 98,96 | 1.236.925.839,00 | 97,15 | 1.396.508.499,00 | 14 Kec; 11 Kel | 2.016.103.208,25 | 23,53 | 217.252.487,00 | 23,53 | 10,78 | | 1.613.760.986,00 | | 1,30 | Kec dan Kel. dalam Kab. Muba | |
| | *7.01.02.2.02.04* | *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | | | | | | | | | 0,00 | #DIV/0! | | 0,00 | | #DIV/0! | Kec dan Kel. dalam Kab. Muba | |
| | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 13 Kecamatan | 29.327.500,00 | 6,01 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | Kec dan Kel. dalam Kab. Muba | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **26,96** | **19,22** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **127** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** | **97,34** | **6.608.466.696,00** | **98,32** | **7.380.208.273,00** | | **9.215.401.166,00** | **1,91** | **148.564.400,00** | **0,00** | **1,61** | | **7.528.772.673,00** | | | | |
| | *7.01.03.2.01* | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kelurahan | 100 | 265.170.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Kec. Sekayu, Kec. Lawang Wetan | |
| | *7.01.03.2.02* | *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan | 100 | 4.698.741.739 | 99,67 | 4.107.710.230,00 | 13 Kelurahan, 6 Kecamatan | 4.696.198.946,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | | 4.107.710.230,00 | | 0,87 | Kel dalam Kab. Muba | |
| | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan | 90,43 | 1.644.554.957,00 | 96,80 | 3.272.498.043,00 | 13 Kelurahan | 4.519.202.220,00 | 3,73 | 148.564.400,00 | 3,73 | 3,29 | | 3.421.062.443,00 | | 2,08 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,61 | | | | | | |
| **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | | | | SANGAT RENDAH | SANGAT RENDAH | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **128** | **7.01.04** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase Penegakan Perda** | **73,44** | **225.390.000,00** | **98,32** | **7.380.208.273,00** | | **104.609.430,00** | **31,17** | **25.130.000,00** | **31,17** | **24,02** | | **7.405.338.273,00** | | | | |
| | *7.01.04.2.02* | *Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Fasilitasi Penegak Perda | 73,44 | 225.390.000 | | | 15 Kec | 104.609.430,00 | 31,17 | 25.130.000,00 | 31,17 | 24,02 | | 25.130.000,00 | | 0,11 | Kec. Dalam Kab. Muba | |
| | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan | | | 99,67 | 4.107.710.230,00 | | | | | | | | 4.107.710.230,00 | | 0,00 | | |
| | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan | | | 96,80 | 3.272.498.043,00 | | | | | | | | 3.272.498.043,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **31,17** | **24,02** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **129** | **7.01.05** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan** | **79,19** | **108.195.000,00** | **91,27** | **200.055.000,00** | | **137.494.500,00** | **23,09** | **23.100.000,00** | **23,09** | **16,80** | | **223.155.000,00** | | | | |
| | *7.01.05.2.01* | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 79,19 | 108.195.000 | 96,70 | 200.055.000,00 | 13 Kec | 130.714.500,00 | 24,29 | 23.100.000,00 | 24,29 | 17,67 | | 223.155.000,00 | | 2,06 | Kec. Dalam Kab. Muba | |
| | 7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (1 Laporan) | | | 0,00 | 0,00 | 1 Kec | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Kec. Dalam Kab. Muba | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **23,09** | **16,80** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **130** | **7.01.06** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase jumlah Desa yang dibina** | **83,34** | **276.235.000,00** | **96,52** | **301.301.640,00** | | **277.578.499,00** | **32,63** | **78.010.000,00** | **32,63** | **28,10** | | **379.311.640,00** | | | | |
| | *7.01.06.2.01* | *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01.15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitasi batas desa/wilayah | 69,83 | 109.145.000,00 | 92,38 | 133.897.640,00 | | 129.351.499,00 | 22,95 | 25.145.000,00 | 22,95 | 19,44 | | 159.042.640,00 | | 1,46 | Kec. Dalam Kab. Muba | |
| | 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 94,38 | 167.090.000,00 | 100,00 | 167.404.000,00 | | 148.227.000,00 | 41,08 | 52.865.000,00 | 41,08 | 35,66 | | 220.269.000,00 | | 1,32 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **32,63** | **28,10** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **131** | **8.01.02** | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa** | **100** | **546.660.789,00** | **100** | **1.913.929.722,00** | | **1.742.217.170,00** | **25,72** | **221.215.457,00** | **25,72** | **12,70** | | **2.135.145.179,00** | | | | |
| | *8.01.02.2.01* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya fasilitasi pertemuan FPK dan Fasilitasi GNRM Terlaksananya kebijakan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar Terlaksananya kebijakan sosialisasi atau | 100,00 | 384.134.189,00 | 100,00 | 1.850.979.822,00 | 5 Gugus Tugas 2 Kali 140 Orang 150 Orang | 1.630.010.270,00 | 25,00 | 208.400.030,00 | 25,00 | 12,79 | | 2.059.379.852,00 | | 5,36 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Dokumen Hasil koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | 100,00 | 139.646.600,00 | 100,00 | 45.248.700,00 | 1 Dokumen | 98.731.900,00 | 35,00 | 7.218.938,00 | 35,00 | 7,31 | | 52.467.638,00 | | 0,38 | | |
| | 8.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100,00 | 22.880.000,00 | 100,00 | 17.701.200,00 | 12 Bulan | 13.475.000,00 | 45,00 | 5.596.489,00 | 45,00 | 41,53 | | 23.297.689,00 | | 1,02 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **25,72** | **12,70** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **132** | **8.01.03** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | **Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik** | **100** | **2.725.915.600,00** | **98,42** | **50.084.555.768,00** | | **6.491.082.783,00** | **60,46** | **3.886.330.190,00** | **60,46** | **59,87** | | **53.970.885.958,00** | | | | |
| | *8.01.03.2.01* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan* | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | 8.01.03.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah | | | 98,38 | 48.789.744.371,00 | | 6.049.760.783,00 | 58,68 | 3.513.750.000,00 | 58,68 | 58,08 | | 52.303.494.371,00 | | 0,00 | | |
| | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Bantuan hibah kepada KPU dan Partai Politik | 100,00 | 1.695.170.000,00 | 100,00 | 585.018.000,00 | | 88.222.000,00 | 100,00 | 87.776.132,00 | 100,00 | 99,49 | | 672.794.132,00 | | 0,40 | | |
| | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol; sosialisasi peningkatan kesadaran politik dan demokrasi | 100,00 | 690.793.100,00 | 100,00 | 120.607.797,00 | | 102.755.000,00 | 85,00 | 86.760.417,00 | 85,00 | 84,43 | | 207.368.214,00 | | 0,30 | | |
| | 8.01.03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi; monitoring fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah | 100,00 | 339.952.500,00 | 100,00 | 589.185.600,00 | | 250.345.000,00 | 80,00 | 198.043.641,00 | 80,00 | 79,11 | | 787.229.241,00 | | 2,32 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **60,46** | **59,87** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **RENDAH** | **RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **133** | **8.01.04** | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina** | **100,00** | **206.383.286,00** | **100** | **99.742.406,00** | | **71.504.000,00** | **35,00** | **11.697.912,00** | **35,00** | **16,36** | | **111.440.318,00** | | | | |
| | *8.01.04.2.01* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Pembinaan dan verifikasi administrasi Ormas | 100,00 | 206.383.286,00 | 100,00 | 99.742.406,00 | | 71.504.000,00 | 35,00 | 11.697.912,00 | 35,00 | 16,36 | | 111.440.318,00 | | 0,54 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **35,00** | **16,36** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| **134** | **8.01.05** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **100,00** | **344.663.800,00** | **100** | **263.361.000,00** | | **212.219.890,00** | **15,00** | **28.250.701,00** | **15,00** | **13,31** | | **291.611.701,00** | | | | |
| | *8.01.05.2.01* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sosialisasi peningkatan rasa solidaritas; pemetaan wilayah rawan peredaran gelap narkotika ; penyelesaian permasalahan di masyarakat dan pembiaan FKUB kecamatan | 100,00 | 344.663.800,00 | 100,00 | 263.361.000,00 | | 212.219.890,00 | 15,00 | 28.250.701,00 | 15,00 | 13,31 | | 291.611.701,00 | | 0,85 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **15,00** | **13,31** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)* | Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (n-1) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (tahun n-1) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | | Rp. | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 =8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| **135** | **8.01.06** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial** | **100** | **564.288.684,00** | **100** | **751.743.446,00** | | **343.355.140,00** | **49,89** | **132.867.062,00** | **49,89** | **38,70** | | **884.610.508,00** | | | | |
| | *8.01.06.2.01* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.06.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah | Terlaksananya Kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme dikalangan Pemuda dan Pelajar | 100,00 | 110.427.751,00 | 100,00 | 100.951.249,00 | 175 Orang | 37.859.840,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | | 100.951.249,00 | | 0,91 | | |
| | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Koordinasi Pemantapan Kewaspadaan Dini Daerah | 100,00 | 135.573.800,00 | 100,00 | 147.460.530,00 | 12 Bulan | 65.312.000,00 | 50,00 | 32.336.600,00 | 50,00 | 49,51 | | 179.797.130,00 | | 1,33 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Potensi konflik/Konflik Sosial | 100,00 | 188.767.882,00 | 100,00 | 225.015.400,00 | 12 Bulan | 95.686.000,00 | 85,00 | 77.462.040,00 | 85,00 | 80,95 | | 302.477.440,00 | | 1,60 | | |
| | 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi FORKOPIMDA | 80,00 | 129.519.251,00 | 100,00 | 278.316.267,00 | 1 Kali | 144.497.300,00 | 20,00 | 23.068.422,00 | 20,00 | 15,96 | | 301.384.689,00 | | 2,33 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **49,89** | **38,70** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |
| | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **136** | **15.1.13** | **Program Peningkatan Kerja Sama Desa** | **Jumlah Desa yang melakukan kerjasama** | | | | | | **97.640.900,00** | **8,10** | **6.971.778,00** | **8,10** | **7,14** | | **0,00** | | | | |
| | *1.13.3.02.01* | *Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.13.3.02.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (6 Dokumen) | | | | | | 53.747.000,00 | 9,00 | 4.555.900,00 | 9,00 | 8,48 | | 4.555.900,00 | | 0,00 | Dinas PMD | |
| | 1.13.3.02.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (6 Dokumen) | | | | | | 43.893.900,00 | 7,00 | 2.415.878,00 | 7,00 | 5,50 | | 2.415.878,00 | | 0,00 | | |
| | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | **8,10** | **7,14** | | | | | | |
| | | | **PREDIKAT KINERJA** | | | | | | | | | **SANGAT RENDAH** | **SANGAT RENDAH** | | | | | | |

Keseuaian antara target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2024 tercermin pada **Tabel 2.99** berikut ini :

**Tabel 2.99**

**Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Daya beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat | 1 | Angka Kemiskinan | 14,35 | 12,88 | 110,24 |
| | | 2 | Indeks Gini | 0,296 | 0,314 | 106,08 |
| | | 3 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,00-4,50 | 4,94 | 109,77 |
| | | 4. | Pengeluaran Per Kapita | 10.883 | 11.424 | 104,97 |
| 2. | Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Sebagai menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi | 5. | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) (%) | 3,69 | 4,58 | 124,12 |
| 3. | Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi | 6. | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (%) | 1,94 | 3,16 | 162,89 |
| | | 7. | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK) (%) | 1,05 | 9,81 | 934,28 |
| | | 8. | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan | 1,12 | 18,75 | 1674,11 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) (%) | | | |
| 4. | Peningkatan Kesejahteraan Para Petani | 9. | Nilai Tukar Petani (NTP) | 95,00 | NA | NA |
| 5. | Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh Tenaga Kerja Terampil | 10. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 3,65 | 2,13 | 58,36 |
| | | 11. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) | 70,03 | 69,85 | 99,74 |
| 6. | Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat | 12. | Indeks Pembangungan Manusia (IPM) | 69,17 | 72,27 | 104,48 |
| | | 13. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 12,76 | 12,33 | 96,63 |
| | | 14. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 7,8 | 7,95 | 101,92 |
| 7. | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 15. | Usia Harapan Hidup (UHH) | 69,2 | 74,42 | 107,54 |
| 8. | Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat | 16. | Indeks Pelayanan Infrastruktur | 91,15 | 80,55 | 88,37 |
| | | 17. | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | 73,14 | 61,16 | 83,62 |
| | | 18. | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih | 100 | 94,96 | 94,96 |
| | | 19. | Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang layak | 100 | 83,67 | 83,67 |
| | | 20. | Persentase Kawasan | 58,17 | 7,87 | 13,52 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kumuh Tertangani | | | |
| 9. | Peningkatan Kualiats Lingkungan Hidup | 21. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 67,51 | 68,17 | 100,97 |
| 10. | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah | 22. | Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah | BB | B | 98,67 |
| | | 23. | Opini BPK RI terhadap LKPD | WTP | WDP | WDP |
| 11. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 24. | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | BB | 122,48 |
| | | 25. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 92 | 88,79 | 96,51 |
| | | 26. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,235 | 3,62 | 111,9 |

*Sumber: LKjIP Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama. Tahapan yang telah dilakukan melalui sinkronisasi terhadap indikator makro yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan 26 Indikator Kinerja Utama menjadi 5 Indikator Kinerja Utama Makro Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 399/KPTSSETDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif | 1. | Angka Kemiskinan | 14,35 | 12,88 | 110,24 |
| | | 2. | Pertumbuhan Ekonomi | 4,00-4,50 | 4,94 | 109,77 |
| | | 3. | Indeks Pelayanan Infrastruktur | 91,15 | 80,55 | 88,37 |
| 2. | Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | 4. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,71 | 72,27 | 104,48 |
| 3. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* | 5. | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | BB | 122,48 |

*Sumber: LKjIP Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

Dari 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Banyuasin pada Tabel 2.11, untuk tahun 2024 ada 18 (delapan belas) indikator yang menunjukkan capaian ≥91%. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan berjalan dengan sangat baik. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan penuh dari kepemimpinan Kepala Daerah beserta jajarannya. Disamping itu dalam proses awal perencanaan sampai pada berakhirnya masa pelaksanaan tahun anggaran, program-program tersebut telah melalui serangkaian telah, evaluasi dan koordinasi seluruh pihak sehingga dalam pelaksanaanya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk beberapa target IKU Kabupaten Musi Banyuasin yang tingkat capaiannya 76%-90%, ada sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Pelayanan

Infrastruktur, Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, dan Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak. Sedangkan target IKU dengan capaian <60% sebanyak 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Kawasan Kumuh Tertangani.

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi fisik keuangan untuk masing-masing instansi. Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan data yang diinput dari Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, penyerapan keuangan Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Musi Banyuasin dari total anggaran sebesar Rp. 4.039.447.940.721,32,- sampai Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2025 terdapat penyerapan keuangan sebesar Rp. 1.594.453.280.289,49,- (39,47%), yang berarti terdapat deviasi sebesar 7,86% dari target keuangan di Bulan Maret yang telah ditetapkan. Begitu juga untuk realisasi fisik kegiatan, ada deviasi sebesar 19,6% dari target yang ditetapkan sebesar 24,55%.

Anggaran tersebut untuk membiayai 126 program yang terbagi dalam 4.988 kegiatan yang tersebar di 46 PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Rincian realisasi fisik dan keuangan Belanja Langsung per Perangkat daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.100**

**Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per Perangkat Daerah s.d Triwulan II (Bulan Juni) Tahun 2025**

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | BELANJA LANGSUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | APBD (Rp) | PENYERAPAN KEUANGAN | | REALI-SASI FISIK (%) |
| | | | REALISASI (Rp) | (%) | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.016.580.563.613,00 | 459.251.045.412,00 | 45,18 | 51,06 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 366.246.320.662,00 | 158.656.544.605,00 | 43,32 | 52,78 |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU | 151.550.980.015,00 | 62.927.190.021,90 | 41,52 | 43,62 |
| 4 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN | 31.268.300.000,00 | 14.809.603.650,00 | 47,36 | 46,81 |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR | 27.750.543.725,00 | 13.896.172.374,00 | 50,08 | 52,18 |
| 6 | UPT. PUSKESMAS NGULAK | 2.819.313.719,00 | 657.871.744,00 | 23,33 | 23,33 |
| 7 | UPT. PUSKESMAS BABAT TOMAN | 3.566.524.882,00 | 1.147.142.492,00 | 32,16 | 32,17 |
| 8 | UPT. PUSKESMAS ULAK PACEH | 3.237.129.230,00 | 549.279.552,00 | 16,97 | 17,12 |
| 9 | UPT. PUSKESMAS TANAH ABANG | 2.102.442.028,00 | 223.914.249,00 | 10,65 | 16,34 |
| 10 | UPT. PUSKESMAS LUBUK BINTIALO | 1.599.258.423,00 | 499.626.389,00 | 31,24 | 41,66 |
| 11 | UPT. PUSKESMAS BUKIT SELABU | 1.084.908.234,00 | 183.620.255,00 | 16,92 | 19,6 |
| 12 | UPT. PUSKESMAS CINTA KARYA | 1.741.971.295,00 | 449.761.939,73 | 25,82 | 37,68 |
| 13 | UPT. PUSKESMAS SUKA DAMAI | 1.546.964.295,00 | 306.819.496,00 | 19,83 | 19,83 |
| 14 | UPT. PUSKESMAS SIDO RAHAYU | 1.495.013.695,00 | 274.599.285,00 | 18,37 | 18,37 |
| 15 | UPT. PUSKESMAS TEBING BULANG | 2.979.162.092,00 | 685.942.878,00 | 23,02 | 32,56 |
| 16 | UPT. PUSKESMAS JIRAK | 2.069.054.784,00 | 353.494.120,00 | 17,08 | 18,75 |
| 17 | UPT. PUSKESMAS BALAI AGUNG | 4.556.405.953,00 | 1.188.361.041,50 | 26,08 | 26,24 |
| 18 | UPT. PUSKESMAS LUMPATAN | 3.550.910.469,00 | 1.021.488.709,33 | 28,77 | 28,77 |
| 19 | UPT. PUSKESMAS LAIS | 3.380.752.828,00 | 635.194.799,00 | 18,79 | 22,95 |

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | BELANJA LANGSUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | APBD (Rp) | PENYERAPAN KEUANGAN | | REALI-SASI FISIK (%) |
| | | | REALISASI (Rp) | (%) | |
| 20 | UPT. PUSKESMAS GARDU HARAPAN | 1.357.509.530,00 | 232.861.163,00 | 17,15 | 32,34 |
| 21 | UPT. PUSKESMAS TELUK KIJING | 1.820.259.901,00 | 278.879.360,00 | 15,32 | 67,21 |
| 22 | UPT. PUSKESMAS TANJUNG KERANG | 2.406.986.582,00 | 369.376.254,00 | 15,35 | 15,34 |
| 23 | UPT. PUSKESMAS SUNGAI LILIN | 3.712.047.469,00 | 892.971.129,00 | 24,06 | 24,05 |
| 24 | UPT. PUSKESMAS SRI GUNUNG | 1.811.089.774,00 | 264.055.340,00 | 14,58 | 14,58 |
| 25 | UPT. PUSKESMAS KARYA MAJU | 2.347.647.881,00 | 450.592.222,00 | 19,19 | 19,86 |
| 26 | UPT. PUSKESMAS MEKAR JAYA | 1.462.035.505,00 | 348.500.026,00 | 23,84 | 24,67 |
| 27 | UPT. PUSKESMAS BAYUNG LENCIR | 5.828.667.884,00 | 1.119.560.716,03 | 19,21 | 19,8 |
| 28 | UPT. PUSKESMAS SUKA JAYA | 2.181.062.631,00 | 277.041.213,00 | 12,7 | 12,7 |
| 29 | UPT. PUSKESMAS PENINGGALAN | 2.263.084.538,00 | 413.870.801,00 | 18,29 | 18,59 |
| 30 | UPT. PUSKESMAS SUMBER HARUM | 1.729.821.517,00 | 431.397.895,00 | 24,94 | 24,94 |
| 31 | UPT. PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR | 1.472.447.190,00 | 233.567.937,00 | 15,86 | 19,08 |
| 32 | UPT. PUSKESMAS BANDAR AGUNG | 1.719.287.205,00 | 441.603.309,00 | 25,69 | 26,58 |
| 33 | UPT. PUSKESMAS KARANG MUKTI | 2.614.319.411,00 | 496.681.422,00 | 19 | 34,55 |
| 34 | UPT. PUSKESMAS AIR BALUI | 1.129.956.034,00 | 237.635.637,00 | 21,03 | 27,88 |
| 35 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 573.880.636.562,60 | 225.879.631.499,00 | 39,36 | 42,72 |
| 36 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 286.617.249.939,00 | 63.127.766.098,00 | 22,03 | 28,18 |
| 37 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15.729.775.180,00 | 7.686.125.956,00 | 48,86 | 50,56 |
| 38 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 28.543.434.842,00 | 11.378.935.578,00 | 39,87 | 42,93 |
| 39 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 20.846.891.590,30 | 5.347.189.592,00 | 25,65 | 28,22 |
| 40 | DINAS SOSIAL | 71.078.458.319,00 | 24.706.740.416,00 | 34,76 | 35,43 |
| 41 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 14.685.394.607,00 | 5.736.105.257,00 | 39,06 | 41,89 |

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | BELANJA LANGSUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | APBD (Rp) | PENYERAPAN KEUANGAN | | REALISASI FISIK (%) |
| | | | REALISASI (Rp) | (%) | |
| 42 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7.895.100.434,00 | 3.165.037.925,00 | 40,09 | 53,33 |
| 43 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 9.511.812.834,00 | 2.230.273.776,00 | 23,45 | 38,82 |
| 44 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 47.827.958.990,00 | 19.214.816.893,00 | 40,17 | 42,71 |
| 45 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 21.207.392.007,00 | 6.927.625.919,00 | 32,67 | 39,31 |
| 46 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 16.627.009.835,00 | 6.289.644.083,00 | 37,83 | 37,87 |
| 47 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 24.525.805.900,00 | 7.016.229.903,00 | 28,61 | 29,38 |
| 48 | DINAS PERHUBUNGAN | 17.816.213.157,40 | 6.373.014.024,00 | 35,77 | 38,04 |
| 49 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 27.520.943.902,90 | 8.950.857.128,00 | 32,52 | 50,23 |
| 50 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 13.452.703.389,00 | 5.584.051.492,00 | 41,51 | 45,62 |
| 51 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 18.031.413.973,50 | 7.184.195.043,00 | 39,84 | 45,15 |
| 52 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA | 104.911.132.986,00 | 18.496.171.868,00 | 17,63 | 26,6 |
| 53 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 10.540.459.900,50 | 3.923.195.452,00 | 37,22 | 42,45 |
| 54 | DINAS PERIKANAN | 15.637.255.264,00 | 4.659.952.579,00 | 29,8 | 30,45 |
| 55 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 46.281.963.321,00 | 15.782.349.405,00 | 34,1 | 35,22 |
| 56 | DINAS PERKEBUNAN | 45.452.095.332,00 | 9.282.461.377,00 | 20,42 | 26,3 |
| 57 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 24.885.525.027,00 | 7.013.258.663,00 | 28,18 | 33,67 |
| 58 | SEKRETARIAT DAERAH | 109.282.577.775,49 | 36.895.431.787,00 | 33,76 | 39,28 |
| 59 | SEKRETARIAT DPRD | 90.435.478.609,00 | 40.070.397.747,00 | 44,31 | 48,49 |
| 60 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 21.072.571.895,50 | 7.698.103.042,00 | 36,53 | 50,3 |
| 61 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 539.311.062.365,14 | 254.252.781.888,00 | 47,14 | 47,57 |
| 62 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 31.710.601.156,00 | 11.001.860.859,00 | 34,69 | 42,32 |

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | BELANJA LANGSUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | APBD (Rp) | PENYERAPAN KEUANGAN | | REALI-SASI FISIK (%) |
| | | | REALISASI (Rp) | (%) | |
| 63 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 17.398.004.668,00 | 7.038.454.601,00 | 40,46 | 49,61 |
| 64 | INSPEKTORAT | 25.405.988.673,00 | 10.471.244.327,00 | 41,22 | 41,42 |
| 65 | KECAMATAN SEKAYU | 9.403.706.061,00 | 2.133.823.186,00 | 22,69 | 39,86 |
| 66 | KECAMATAN LAIS | 4.321.507.171,00 | 1.689.374.833,00 | 39,09 | 46,74 |
| 67 | KECAMATAN BABAT TOMAN | 5.788.894.527,99 | 3.587.422.572,00 | 61,97 | 61,13 |
| 68 | KECAMATAN KELUANG | 4.283.758.632,00 | 1.853.432.137,00 | 43,27 | 44,73 |
| 69 | KECAMATAN SANGA DESA | 5.048.781.443,00 | 2.215.953.189,00 | 43,89 | 46,86 |
| 70 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI | 3.308.979.432,10 | 1.390.302.413,00 | 42,02 | 50,19 |
| 71 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO | 3.610.526.224,00 | 1.362.750.594,00 | 37,74 | 46,79 |
| 72 | KECAMATAN SUNGAI KERUH | 3.508.488.603,00 | 1.419.533.210,00 | 40,46 | 42,48 |
| 73 | KECAMATAN SUNGAI LILIN | 4.797.902.165,00 | 2.251.532.483,00 | 46,93 | 49,35 |
| 74 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR | 4.347.809.902,40 | 1.883.993.344,00 | 43,33 | 52,99 |
| 75 | KECAMATAN LALAN | 3.986.475.719,50 | 1.074.722.680,00 | 26,96 | 29,12 |
| 76 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA | 4.451.435.056,00 | 1.730.520.059,00 | 38,88 | 40,53 |
| 77 | KECAMATAN LAWANG WETAN | 4.287.086.459,00 | 1.487.669.089,00 | 34,7 | 41,24 |
| 78 | KECAMATAN BABAT SUPAT | 3.551.807.288,00 | 1.407.209.583,00 | 39,62 | 43,22 |
| 79 | KECAMATAN JIRAK JAYA | 2.467.032.059,00 | 981.306.244,00 | 39,78 | 43,35 |
| 80 | KELURAHAN SERASAN JAYA | 849.999.937,00 | 4.172.315,00 | 0,49 | 2,14 |
| 81 | KELURAHAN SOAK BARU | 854.958.948,00 | 7.529.149,00 | 0,88 | 2,72 |
| 82 | KELURAHAN BALAI AGUNG | 850.000.000,00 | 127.581.013,00 | 15,01 | 15,83 |
| 83 | KELURAHAN KAYUARA | 850.000.000,00 | 2.473.000,00 | 0,29 | 8,71 |
| 84 | KELURAHAN BABAT | 870.796.948,00 | 8.760.000,00 | 1,01 | 2,03 |

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | BELANJA LANGSUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | APBD (Rp) | PENYERAPAN KEUANGAN | | REALI-SASI FISIK (%) |
| | | | REALISASI (Rp) | (%) | |
| 85 | KELURAHAN MANGUN JAYA | 871.825.007,00 | 10.700.000,00 | 1,23 | 2,58 |
| 86 | KELURAHAN KELUANG | 849.999.875,00 | 0 | 0 | 0,08 |
| 87 | KELURAHAN NGULAK I | 886.708.854,00 | 70.933.336,00 | 8 | 10,03 |
| 88 | KELURAHAN NGULAK | 886.337.512,00 | 84.941.068,00 | 9,58 | 10,3 |
| 89 | KELURAHAN SUNGAI LILIN | 853.540.000,00 | 31.713.688,00 | 3,72 | 4,52 |
| 90 | KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA | 854.995.000,00 | 44.759.491,00 | 5,24 | 6,15 |
| 91 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR | 849.014.113,00 | 0 | 0 | 5,5 |
| 92 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH | 849.918.355,00 | 0 | 0 | 5,49 |
| | | | | | |
| TOTAL..... | | 4.039.447.940.721,32 | 1.594.453.280.289 | 45,2 | 51,06 |

*Sumber: SIPP Mubakab.go.id, diolah*

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II, terdapat 20 (dua puluh) Perangkat Daerah, 7 (tujuh) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan, 28 (dua puluh delapan) Puskesmas yang realisasi fisiknya dibawah realisasi fisik Kabupaten (44,18%), sementara untuk penyerapan keuangan 20 (dua puluh) Perangkat Daerah, 6 (enam) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan, 29 (dua puluh sembilan) Puskesmas yang penyerapan keuangannya di bawah penyerapan Kabupaten (39,47%).

Dilihat dari status *Capaian Kinerja* sampai dengan Triwulan II, dari seluruh sub kegiatan/pekerjaan/paket di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 4.988, ada 1.848 sub kegiatan/pekerjaan/paket (37,05%) yang

mencapai target, 2.673 sub kegiatan/pekerjaan/paket (53,59%) yang tidak tercapai, 467 sub kegiatan/pekerjaan/paket (9,36%) yang belum berjalan. Sedangkan dari status *Capaian Anggaran*, ada 1.349 sub kegiatan/pekerjaan/paket (27,04%) yang penyerapan keuangannya mencapai target, 2.776 sub kegiatan/pekerjaan/paket (55,65%) tidak tercapai target, 863 sub kegiatan/pekerjaan/paket (17,30%) yang belum berjalan.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh masing – masing OPD diawal tahun, ada 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah, 8 (delapan) Kecamatan, 11 (sebelas) Kelurahan, 24 (dua puluh empat) Puskesmas yang realisasi fisiknya tidak mencapai target dengan tingkat deviasi < 5 %, sedangkan untuk penyerapan keuangan, ada 17 ( tujuh belas) Perangkat Daerah, 8 (delapan) Kecamatan, 5 (lima) Kelurahan, 24 (dua puluh empat) Puskesmas yang tidak mencapai target dengan tingkat deviasi < 10 %.

Berdasarkan monitoring paket pengadaan pada portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di fitur Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) total paket pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa di Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2025 dengan metode tender, seleksi, pengadaan langsung, e-purchasing, penunjukan langsung, pengecualian dan kontes (sayembara) senilai Rp. 2.000.000.000.000,00. Sampai dengan 23 Juli 2025, paket pekerjaan yang sudah berkontrak (termasuk paket toko daring) senilai Rp. 90.900.000.000,00.

## 2.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan yang ditemui oleh Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan urusan yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Tetapi hal itu saling terkait satu dengan lain, sehingga penyelesaian dari setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-bersama dengan perangkat daerah yang lain dalam rangka mencari jalan keluar dan solusi terbaik bagi kelanjutan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena beberapa permasalahan hanya bisa diselesaikan oleh perangkat daerah yang lain, bukan pelaksana kegiatan, sehingga sangat diperlukan sinergitas dalam penyelesaian masalah tersebut. Berikut beberapa masalah yang bisa diidentifikasi antara lain :

**Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.101**
**Identifikasi Masalah berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029**

| Tujuan RPJMD 2025-2029 | Sasaran RPJMD 2025-2029 | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis Internal |
|---|---|---|---|
| **Tujuan 1** | | | |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | **IPM yang masih rendah** terutama komponen harapan lama sekolah dan angka melek huruf | Kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang belum merata |
| | 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | | |
| **Tujuan 2** | | | |
| Menurunkan Angka Kemiskinan | 1. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat | **Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi** dan kesenjangan antar wilayah | Distribusi pembangunan belum merata dan keterbatasan akses desa ke pusat pertumbuhan |
| | 2. Meningkatnya keluarga dan ketahanan pangan masyarakat | | |
| | 3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | **Tingkat pengangguran terbuka** yang fluktiatif dan rendahnya keterampilan kerja | Lemahnya *link and match* antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja |
| **Tujuan 3** | | | |
| Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah | 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat | **Ketergantungan ekonomi pada sektor ekstratif** (migas, sawit, karet) | Rendahnya nilai tambah dan belum optimalnya hilirisasi SDA |
| | 2. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | | |

| Tujuan RPJMD 2025-2029 | Sasaran RPJMD 2025-2029 | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis Internal |
|---|---|---|---|
| | 3. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok | | |
| **Tujuan 4** | | | |
| Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan | 1. Terciptanya kerukunan umat beragama | Adanya tantangan modernisasi dan arus globalisasi terhadap penerapan nilai spiritual dan moral umat beragama | Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat masih rendah |
| | 2. Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat | Masih adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi umat | |
| | 3. Meningkatnya usaha/industri yang menerapkan standar halal | | |
| **Tujuan 5** | | | |
| Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, Bebas dari KKN dan Berorientasi Pelayanan Publik yang Berkualitas | 1. Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik | **Birokrasi belum sepenuhnya responsif dan adaptif terhadap perubahan** | SPBE belum optimal, koordinasi antar-OPD belum maksimal |
| | 2. Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN | | |
| | 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | |
| **Tujuan 6** | | | |
| Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas | 1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten | **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum optimal**, khususnya jalan desa, air bersih, sanitasi | Keterbatasan infrastruktur strategis dan aksesibilitas ekonomi lokal |

| Tujuan RPJMD 2025-2029 | Sasaran RPJMD 2025-2029 | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis Internal |
|---|---|---|---|
| | 2. Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman | | |
| | 3. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak | | |
| **Tujuan 7** | | | |
| Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing | 1. Meningkatnya inovasi daerah | **Tingkat pengangguran terbuka** yang fluktiatif dan rendahnya keterampilan kerja | Lemahnya *link and match* antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja |
| | 2. Meningkatnya kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | | |
| | 3. Meningkatnya pembangunan desa | | |
| **Tujuan 8** | | | |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Turunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | **Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman bencana ekologis** | Tata ruang dan pengendalian lingkungan masih lemah |
| | 2. Turunnya potensi risiko bencana | | |

Tema pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 diarahkan pada "Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi". Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2026 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Rancangan Prioritas Daerah, 15 (lima belas) Rancangan Program Prioritas Daerah, dan 14 (empat belas) Rancangan Proyek Prioritas Daerah sebagai berikut:

**PRIORITAS DAERAH 1 (PD 1) :**

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS UNGGULAN SERTA DIGITALISASI USAHA EKONOMI UNTUK MEMPERKUAT PASAR

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 1.1 | Peningkatan produktivitas serta kualitas komoditas untuk Pemenuhan kebutuhan domestik dan hilirisasi. | 1. Digitalisasi dan Klinik Usaha;<br>2. Bantuan Modal Usaha UMK, Petani dan Nelayan;<br>3. Program bantuan bibit, pertanian, perkebunan dan perikanan. |
| PPD 1.2 | Optimalisasi pengembangan UMKM, IKM dan BUMDes. | |
| PPD 1.3 | Peningkatan investasi dengan menjaga iklim investasi yang Kondusif serta promosi investasi yang efektif dan tepat sasaran. | |
| PPD 1.4 | Pengendalian Inflasi. | |

**PRIORITAS DAERAH 2 (PD 2) :**

MENURUNKAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PENGURANGAN BEBAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 2.1 | Penguatan perlindungan sosial. | 1. Program Keluarga Maju untuk Pengentasan Kemiskinan;<br>2. Santunan Kematian dan Fakir Miskin. |
| PPD 2.2 | Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. | |
| PPD 2.3 | Pengurangan wilayah kantong- | |

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| | kantong kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. | |

**PRIORITAS DAERAH 3 (PD 3) :**

PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR, INFRASTRUKTUR KAWASAN SENTRA PRODUKSI DAN PUSAT PERTUMBUHAN SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN SAMPAI KE DESA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 3.1 | Peningkatan konektivitas pada kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan. | 1. Infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan;<br>2. Mengupayakan perluasan jaringan gas rumah tangga;<br>3. Tambahan satu desa menjadi 1,5 Miliar untuk kemandirian desa; |
| PPD 3.2 | Peningkatan dan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar kawasan Permukiman. | |
| PPD 3.3 | Peningkatan dan pengamanan sumber daya air. | |

**PRIORITAS DAERAH 4 (PD 4) :**

MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 4.1 | Peningkatan pelayanan | 1. Optimalisasi Upaya Kesehatan |

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| | Pendidikan yang berkualitas. | Berbasis Masyarakat;<br>2. Sekolah Gratis Negeri dan Swasta;<br>3. Peningkatan Gaji Guru Swasta (Madrasah dan Pesantren);<br>4. Bantuan Sayang Anak (BASANAK). |
| PPD 4.2 | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. | |
| PPD 4.3 | Peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga Kerja lokal. | |

**PRIORITAS DAERAH 5 (PD 5) :**

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN EFEKTIF BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 5.1 | Peningkatan pelayanan publik berbasis digital. | 1. Akte, KK, dan KTP Gratis sampai di rumah;<br>2. Sikat Korupsi menuju pemerintahan bersih. |

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

***"Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah ditujukan dalam rangka Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi dengan menjaga tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan serta prioritas dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 "***

Kerangka ekonomi daerah menggambarkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2026 yang disusun berdasarkan proyeksi dengan memperhatikan kondisi agregat dan indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026. Sementara itu, kerangka keuangan daerah mencakup rencana pendanaan yang merumuskan kebijakan fiskal daerah, termasuk analisis sumber pendapatan, identifikasi sektor-sektor unggulan, serta estimasi belanja dan pembiayaan yang diperkirakan dapat mendukung peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2026.

Kerangka pendanaan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran yang bertujuan untuk memastikan alokasi dana dilakukan secara efektif dan efisien, dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja. Hal ini juga bertujuan agar setiap belanja dapat terukur dampaknya dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kerangka

ekonomi daerah tahun 2026 mencakup dinamika perekonomian global dan nasional, proses pemulihan ekonomi, serta peluang pertumbuhan pada sektor-sektor usaha prioritas yang mendukung pengembangan wilayah. Oleh karena itu, kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026 akan menjadi panduan kebijakan yang menyeluruh dan terarah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

## 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren pemulihan yang terus berlanjut, setelah sebelumnya tertekan oleh dampak pandemi Covid-19. Peralihan menuju status endemi mendorong pemulihan ekonomi daerah, yang sebelumnya sempat mengalami kontraksi sebesar -0,04% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi berhasil

mencapai 3,42%, meningkat menjadi 4,27% di tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 4,51% di tahun 2023.

Secara keseluruhan, ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,94% di tahun 2024. Capaian ini tidak lepas dari keberhasilan dalam pengendalian pandemi dan inflasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat daerah.

**Tabel 3.1**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi**
**Muba-Provinsi-Nasional Tahun 2020-2024 (%)**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Muba** | -0,04 | 3,42 | 4,27 | 4,51 | 4,94 |
| **Provinsi** | -0,11 | 3,58 | 5,24 | 5,08 | 5,03 |
| **Nasional** | -2,07 | 3,70 | 5,31 | 5,05 | 5,03 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah.*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah yang positif hingga mencapai angka 4,94 persen pada tahun 2024. Sebagian besar sektor usaha mengalami peningkatan yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang masing-masing mencapai 5,03 persen pada tahun yang sama. Hal ini menggambarkan adanya proses pemulihan ekonomi di berbagai sektor, sejalan dengan tren yang terjadi di kabupaten/kota lain dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2024, seluruh wilayah di provinsi tersebut berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif,

meskipun rata-rata pertumbuhannya masih belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022, bila tidak memasukkan sektor migas, Kabupaten Musi Banyuasin telah melampaui angka pra-pandemi dengan capaian pertumbuhan sebesar 8,13 persen. Sementara itu, bila dihitung termasuk sektor migas, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 4,94 persen, yang juga telah melebihi capaian tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari struktur PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi kontributor utama dengan porsi sebesar 49,79 persen, meskipun mengalami penurunan dari 51,16 persen di tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 12,09 persen, tetap stabil seperti tahun 2022. Sementara itu, sektor industri pengolahan naik menjadi 11,92 persen dari 11,69 persen di tahun 2023. Pertumbuhan juga terjadi di sektor konstruksi yang mencapai 8,20 persen (naik dari 8,08 persen), serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor yang meningkat menjadi 5,90 persen dari 5,64 persen.

Data kontribusi sektor-sektor tersebut memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Musi Banyuasin masih sangat bergantung pada sektor-sektor ekstraktif, terutama pertambangan dan pertanian. Meski demikian, sektor industri pengolahan dan konstruksi menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan dan perlu terus didorong agar dapat

memberikan kontribusi lebih besar di masa depan. Dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial lainnya, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

**Tabel 3.2**
**Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)**
**Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut**
**Lapangan Usaha Periode 2020 - 2024 (%)**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12,00 | 11,70 | 11,26 | 12,09 | 12,09 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 52,48 | 53,84 | 54,94 | 51,16 | 49,79 |
| C. Industri Pengolahan | 10,95 | 10,69 | 10,73 | 11,69 | 11,92 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| F. Konstruksi | 8,09 | 7,85 | 7,47 | 8,08 | 8,20 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,03 | 4,97 | 5,00 | 5,64 | 5,90 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,26 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,34 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,95 | 1,84 | 1,69 | 1,71 | 1,71 |
| L. Real Estate | 2,17 | 2,03 | 2,08 | 2,40 | 2,51 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,43 | 3,32 | 3,15 | 3,34 | 4,02 |
| P. Jasa Pendidikan | 1,96 | 1,91 | 1,85 | 1,96 | 1,96 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,57 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024 (BPS), 2025*

*Catatan/Notes :*

** Angka sementara / Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin/ BPS-Statistic of Musi Banyuasin Regency*

Lima sektor lapangan usaha utama yang berkontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Musi Banyuasin tahun 2024, di antaranya adalah:

1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,79%;
2) Industri Pengolahan sebesar 11,92%;
3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,09%;
4) Konstruksi sebesar 8,20%;
5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,90%.

**Tabel 3.3**
**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7.910,17 | 8.496,72 | 9.280,78 | 10.358,31 | 11.207,22 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 34.606,16 | 39.109,19 | 45.284,55 | 43.831,46 | 46.139,57 |
| C. Industri Pengolahan | 7.221,34 | 7.767,15 | 8.848,93 | 10.014,05 | 11.048,19 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 33,15 | 36,24 | 40,04 | 43,59 | 49,14 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13,26 | 13,79 | 14,34 | 15,11 | 15,17 |
| F. Konstruksi | 5.336,63 | 5.704,89 | 6.157,59 | 6.921,79 | 7.598,87 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.318,61 | 3.613,09 | 4.119,79 | 4.832,53 | 5.466,17 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 201,61 | 200,95 | 220,77 | 237,66 | 237,74 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 122,68 | 131,37 | 151,10 | 177,38 | 215,89 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| J. Informasi dan Komunikasi | 202,29 | 221,44 | 253,24 | 294,00 | 318,91 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.284,94 | 1.335,06 | 1.395,25 | 1.468,33 | 1.587,98 |
| L. Real Estate | 1.432,02 | 1.474,72 | 1.711,19 | 2.054,69 | 2.321,39 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 28,55 | 28,87 | 30,54 | 33,00 | 40,43 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.264,15 | 2.409,79 | 2.600,43 | 2.860,93 | 3.722,97 |
| P. Jasa Pendidikan | 1.290,31 | 1.384,73 | 1.527,43 | 1.675,84 | 1.816,25 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 259,73 | 283,13 | 316,12 | 326,45 | 354,80 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 418,28 | 432,58 | 479,44 | 525,95 | 526,20 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | **65.943,88** | **72.643,72** | **82.431,54** | **85.671,07** | **92.666,87** |

*Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024 (BPS), 2025*

*Catatan/Notes :*

** Angka sementara / Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin/ BPS-Statistic of Musi Banyuasin Regency*

Salah satu indikator utama untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Sebagai indikator ekonomi yang signifikan, PDRB dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu dari sisi produksi (sektoral) dan dari sisi penggunaan.

Perkembangan nilai PDRB sektoral, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Dari sisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sub sektoral lapangan usaha. Tahun 2020 nilai PDRB sebesar Rp.65.943,88 milyar meningkat menjadi Rp.92.666,87 milyar pada tahun 2024. Begitu juga dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020 nilai PDRB sebesar Rp44.604,66 milyar meningkat menjadi Rp52.754,10 milyar pada tahun 2024.
2. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Musi Banyuasin tahun 2024 ditunjang oleh lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2024 tumbuh sebesar 29,00% dari Rp.1.540,40 milyar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. Rp.1.987,09 milyar pada tahun 2024, sedangkan untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 tumbuh sebesar 18,75% dari Rp.72,25 milyar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.85,80 milyar pada tahun 2024.
3. Bila ditinjau dari share PDRB atas dasar harga berlaku Musi Banyuasin ditunjang oleh lapangan usaha primer yaitu pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada

tahun 2024 share pertambangan dan penggalian sebesar 49,79% dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,09%.

4. Sektor sekunder juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin pada tahun 2024, 3 lapangan usaha tersier yang tertinggi di antaranya yaitu, 1) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 9,81% dari tahun sebelumnya, 2) lapangan usaha konstruksi tumbuh 9,47% dari tahun sebelumnya, 3) lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 7,51%.

**Tabel 3.4**

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.872,32 | 6.124,83 | 6.347,48 | 6.879,63 | 7.194,49 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 26.379,81 | 27.128,26 | 27.818,41 | 28.347,54 | 29.143,03 |
| C. Industri Pengolahan | 3.478,64 | 3.580,99 | 3.950,11 | 4.329,57 | 4.466,17 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 12,31 | 13,10 | 14,21 | 15,39 | 16,54 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,96 | 6,99 | 7,20 | 7,53 | 7,38 |
| F. Konstruksi | 3.103,38 | 3.203,27 | 3.361,24 | 3.678,98 | 4.027,34 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.388,14 | 1.495,77 | 1.636,72 | 1.809,79 | 1.987,40 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 101,38 | 100,75 | 105,37 | 108,92 | 108,98 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 52,13 | 55,61 | 62,53 | 72,25 | 85,80 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
| J. Informasi dan Komunikasi | 125,74 | 137,50 | 155,33 | 174,77 | 198,52 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 791,56 | 813,94 | 819,00 | 843,75 | 843,75 |
| L. Real Estate | 751,01 | 773,32 | 857,57 | 961,04 | 1.073,24 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 14,87 | 14,97 | 15,73 | 16,48 | 18,64 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.299,99 | 1.380,82 | 1.453,65 | 1.540,40 | 1.987,09 |
| P. Jasa Pendidikan | 818,57 | 872,19 | 941,41 | 1.003,77 | 1.044,85 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 147,57 | 159,05 | 172,79 | 172,84 | 181,72 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 260,27 | 267,63 | 288,88 | 305,70 | 324,61 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | **44.604,66** | **46.128,99** | **48.097,66** | **50.268,35** | **50.754,10** |

*Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024 (BPS), 2025*

*Catatan/Notes :*

** Angka sementara / Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin/ BPS-Statistic of Musi Banyuasin Regency*

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 menyajikan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah tidak hanya menitikberatkan pada analisis dan estimasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, kesenjangan sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Tabel 3.5**

**Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin**

| Indikator | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Reali-sasi | Target | Reali-sasi | Target | Reali-sasi | Target | Reali-sasi | Target (RKPD) | Target (P-RKPD) | Target (RKPD) |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 2.40-2,70 | 3,42 | 2,50-3,00 | 4,27 | 3,75-4,25 | 4,51 | 4,00-4,50 | 4,94 | 4,25-4,75 | 4,25-4,95 | 5,0-5,2 |
| PDRB/kapita ADHB (Rp. Juta) | - | 115,56 | - | 106,21 | - | 115,56 | - | 142,14 | - | - | 160,00-167,00 |
| PDRB/kapita ADHK 2010 (Rp. Juta) | - | 73,38 | - | 71,84 | - | 73,38 | - | 80,92 | 84,42 | 84,42 | - |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 14,25 | 15,84 | 13,20 | 16,13 | 15,05 | 15,84 | 14,35 | 12,88 | 13,85 | 12,50 | 12,0-12,5 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44 | 3,99 | 4,24 | 4,40 | 3,80 | 2,58 | 3,65 | 2,13 | 3,50 | 2,10 | 2,03 |
| IPM | 69,47 | 70,25 | 70,77 | 70,73 | 69,17 | 72,30 | 69,71 | 72,27 | 70,25 | 72,50 | 73,07 |
| Indeks Gini | 0,31 | 0,326 | 0,30 | 0,339 | 0,306 | 0,310 | 0,296 | 0,314 | 0,285 | 0,285 | 0,280-0.295 |

*Sumber: RPJMD Kab. Muba 2025-2029, BPS ,diolah*

Penetapan berbagai asumsi dalam kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk menciptakan dorongan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha agar dapat melakukan investasi baru serta memperluas kegiatan usahanya. Dengan meningkatnya investasi dan skala usaha, diharapkan akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Investasi turut berperan dalam mendorong permintaan terhadap barang modal dan membuka peluang kerja baru, yang pada akhirnya akan

mengaktifkan kapasitas produksi dan memperbesar daya beli masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sejauh ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Selain itu, tantangan ketenagakerjaan lainnya adalah masih dominannya sektor informal yang tidak diiringi peningkatan kualitas pekerja informal. Faktor pendidikan juga memengaruhi preferensi jenis pekerjaan yang diambil, disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Di sisi lain, tekanan ekonomi global turut berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

Dari sisi capaian kerangka ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan proses pemulihan yang konsisten setelah mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi sempat tertekan hingga -0,04 persen, mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap aktivitas produksi, konsumsi, maupun investasi di daerah. Namun, kondisi mulai membaik pada tahun 2021 dengan realisasi pertumbuhan sebesar 3,42 persen, menunjukkan adanya pemulihan yang cukup kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun berikutnya di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai 4,27 persen, kemudian meningkat lagi pada 2023 menjadi 4,51 persen. Peningkatan yang terjadi tidak hanya mencerminkan pemulihan pasca pandemi, tetapi juga hasil dari berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk dukungan investasi, program pemulihan UMKM, serta

peningkatan kegiatan sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, dan energi. Memasuki tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin kembali menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan capaian 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini sekaligus menandakan adanya momentum pertumbuhan yang lebih kuat dan stabil, sehingga memberikan optimisme bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren pertumbuhan yang positif baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan 2010 (ADHK). Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat dari tahun ke tahun. Dari sisi ADHB, nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp106,21 juta, kemudian meningkat menjadi Rp115,56 juta pada 2021. Pertumbuhan ini terus berlanjut dengan capaian Rp129,49 juta pada 2022, Rp132,95 juta pada 2023, hingga mencapai Rp142,14 juta pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan nilai tambah ekonomi secara nominal, sejalan dengan perkembangan sektor-sektor produktif di Musi Banyuasin. Sementara itu, berdasarkan ADHK 2010 yang mencerminkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi inflasi, PDRB per kapita juga menunjukkan peningkatan stabil. Pada 2020 tercatat sebesar Rp71,84 juta, naik menjadi Rp73,38 juta pada 2021, Rp75,55 juta pada 2022, Rp78,01 juta pada 2023, hingga mencapai Rp80,92 juta pada 2024. Kenaikan secara konsisten ini

menandakan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang cukup baik, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih nyata dari waktu ke waktu serta menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi, meskipun masih perlu dipastikan agar manfaat pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan secara merata.

Disamping itu, indikator kesejahteraan sosial menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami tren penurunan yang konsisten dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Pada tahun 2017, angka kemiskinan tercatat sebesar 16,75%, kemudian sedikit menurun menjadi 16,52% pada 2018 dan 16,41% pada 2019. Tren penurunan ini terus berlanjut, meskipun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan masih relatif tinggi di angka 16,13%. Memasuki tahun 2021, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 15,84%, kemudian berlanjut pada 15,19% pada 2022. Penurunan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,90%, dan semakin tajam pada tahun 2024 yaitu 12,88%. Secara keseluruhan, periode 2017–2024 mencatat penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3,87 poin persentase, dari 16,75% menjadi 12,88%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, baik melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, meskipun tren penurunan cukup baik, masih diperlukan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting agar masyarakat

miskin tidak kembali rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global maupun dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi sumber penghidupan masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang berfluktuasi namun menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 4,79%, kemudian menurun menjadi 3,99% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 angka TPT kembali naik menjadi 4,40%, yang dapat mencerminkan adanya tekanan dari kondisi ekonomi nasional maupun global. Setelah itu, kondisi membaik cukup signifikan, dengan TPT turun menjadi 2,58% pada tahun 2023, dan kembali turun pada tahun 2024 hingga mencapai 2,13%, angka terendah dalam lima tahun terakhir. Tren ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menekan angka pengangguran terbuka, terutama setelah melewati tantangan pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap dunia kerja. Penurunan TPT ini sekaligus menandakan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, meskipun kualitas dan keberlanjutan pekerjaan di sektor informal masih menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,13% sejalan dengan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 69,85%, meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 72,63%. Artinya, pada tahun 2024 sebanyak 69,85% penduduk usia kerja di Kabupaten Musi Banyuasin aktif dalam pasar tenaga kerja. Penurunan TPAK perlu menjadi perhatian, karena meskipun

tingkat pengangguran menurun, penurunan partisipasi angkatan kerja dapat mencerminkan adanya penduduk usia produktif yang tidak terserap dalam dunia kerja maupun tidak aktif mencari pekerjaan.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Musi Banyuasin berada pada angka sekitar 69,83. Angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,25, kemudian naik cukup signifikan pada 2022 mencapai 70,73. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, khususnya dari sisi akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 71,30, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, IPM kembali menunjukkan tren positif dengan target dan realisasi diproyeksikan naik menjadi 72,27, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan manusia. Secara keseluruhan, perkembangan IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengindikasikan arah pembangunan manusia yang semakin baik dan berkelanjutan. Namun, meskipun tren peningkatan cukup konsisten, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penurunan disparitas kesejahteraan.

Indeks Gini merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Semakin mendekati angka 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tren indeks gini dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil dengan kecenderungan membaik. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,321, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 0,326. Meskipun terjadi kenaikan, angka ini masih mencerminkan ketimpangan yang relatif rendah dan masih terkendali Pada tahun 2022, Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,339, menandakan adanya pelebaran kesenjangan distribusi pendapatan di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Meski demikian, angka tersebut masih berada pada kategori ketimpangan rendah hingga sedang. Memasuki tahun 2023, Indeks Gini menurun ke 0,310, menunjukkan perbaikan distribusi hasil pembangunan. Hal ini mengindikasikan adanya dampak positif dari kebijakan daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi, meskipun tantangan masih ada, terutama pada sektor informal yang cenderung berpendapatan tidak stabil dan terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap peluang ekonomi. Untuk tahun 2024, Indeks Gini tercatat sebesar 0,314, yang menunjukkan tingkat ketimpangan masih relatif rendah dan terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan tetap memberikan pengaruh positif dalam menjaga ketimpangan agar tidak semakin melebar.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat dinamika fluktuasi dari tahun ke tahun, tren Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah yang semakin baik. Dengan penguatan kebijakan pemerataan ekonomi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM, diharapkan distribusi pendapatan dapat semakin merata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain:

1. **Isu strategis pembangunan di luar Kabupaten Musi Banyuasin**

   a. Inflasi dan kurs mata uang

      Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) neraca pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten;

b. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari US$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 7,5%;

c. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha.

Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui;

d. Tuntutan Pemerintahan yang bersih dan profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi

dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas;

e. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

### 3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Musi Banyuasin mempunyai modal dasar pembangunan yaitu berupa sumber daya alam dan pertanian/perkebunan yang berlimpah, sumber daya manusia dan iklim investasi yang kondusif. Potensi energi di Musi Banyuasin yaitu batu bara mempunyai cadangan batu bara 3.491,71 juta ton, potensi minyak bumi mempunyai cadangan 299.129,60 MSTB, dan cadangan gas

bumi mencapai 4.546,23 BSCF. Potensi pertanian/perkebunan di Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**
**Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin**

| Komoditas | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Luas (Ha) | Produksi (Ton) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Produksi (Ton) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Produksi (Ton) | Luas (Ha) | Produksi (Ton) |
| **Karet** | 208.212 | 210.201 | 210.364 | 208.212 | 192.716 | 155.059 | 203.184 | 211.416 | 203.184 | 203.084 |
| **Kelapa Sawit** | 43.616 | 48.561 | 431.793 | 43.616 | 44.533 | 441.046 | 46.049 | 455.067 | 46.049 | 455.066 |
| **Kelapa** | 4.540 | 3.840 | 3.143 | 4.540 | 6.294 | 4.688 | 8.375 | 6.350 | 8.375 | 6.348 |
| **Gambir** | 137,13 | 210 | 270 | 137,13 | 177 | 8,16 | 177 | 8,16 | 177 | 8,16 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, 2025, diolah*

Empat komoditas perkebunan terbesar yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin adalah, karet, kelapa sawit, kelapa, dan gambir. Namun penunjang terbesar ialah Karet dan Kelapa Sawit. Produksi Karet pada tahun 2024 sebesar 203.084 ton dengan luas lahan sebesar 203.184 Ha sedangkan total produksi kelapa sawit sebesar 455.066 ton dengan luas lahan 46.049 Ha. Komoditas lain yang menjadi andalan adalah kelapa dan gambir dengan total produksi tahun 2024 untuk kelapa sebesar 6.348 ton dengan luas lahan 8.375 Ha sedangkan total produksi gambir sebesar 8,16 ton dengan luas lahan 177 Ha. Namun umumnya komoditas kelapa sawit dan karet sebagian diekspor dalam bentuk barang setengah jadi, meskipun sudah ada pengolahan minyak goreng (kelapa sawit) atau bahan vulkanisir ban (karet) tetapi masih sebagian kecil dari total produksi.

Sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya alam berlimpah khususnya di sektor pertanian/perkebunan dan pertambangan, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun yang perlu diperhatikan adalah komoditas pertanian rentan terpengaruh oleh harga komoditas dunia khususnya subsektor perkebunan sehingga nilainya akan sangat bergantung pada perkembangan perekonomian global. Berbeda jika ekspor dalam bentuk barang jadi yang harganya lebih stabil daripada dalam bentuk barang mentah ataupun setengah jadi yang rentan dengan aksi para spekulan. Musi Banyuasin mengekspor komoditas pertanian khususnya perkebunan dalam bentuk barang mentah dan produk setengah jadi, jika terjadi fluktuasi harga pasar di dunia yang dipengaruhi oleh perekonomian negara pengguna komoditas tersebut maka akan sangat mempengaruhi harga maupun jumlah beli dari komoditas tersebut yang akan berdampak negatif terhadap tingkat pendapatan masyarakat Musi Banyuasin khususnya petani subsektor perkebunan.

Strategi dan arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dijabarkan di bawah ini;

1) Pemulihan kebijakan ekonomi melalui ketahanan UMKM
    a. Mengembangkan kewirausahaan, ketahanan UMKM diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin;
    b. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM.
    c. sumber pendapatan rumah tangga miskin;
    d. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM.

2) Pengembangan pertanian yang unggul dan berdaya saing
   a. Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian.
   b. Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana petani dan nelayan.
3) Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi. Hal ini sesuai dengan potensi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah dengan komoditi unggulan yaitu penghasil karet dan sawit. Komoditi tersebut diekspor masih dalam bentuk barang setengah jadi sehingga strategi dalam hilirisasi hasil pertanian, bisa langsung diterapkan dalam program pada OPD terkait sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dengan target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0-5,2.
   a. Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi).
   b. Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan.
   c. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar.
4) Pengembangan Pariwisata
   a. Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata.
   b. Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan.
   c. Mengembangkan wisata olahraga, religius, kuliner dan budaya.
   d. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata.

5) Optimalisasi pengelolaan pertambangan

a. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang.

b. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan.

## 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran

sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti:

1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mencakup seluruh kebutuhan;
3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja *(performance oriented)* untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Desa (DAD), Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini dikarenakan sumber utama dari Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan sekitar 70% dari APBD utamanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang hampir sekitar 50% dari APBD. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2024 berkaitan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari Rp.3.510.691.709.632 pada tahun 2021, menurun menjadi Rp. 3.221.260.445.686,84 pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.807.807.962.928,72. Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2021-2023 terjadi pertumbuhan realisasi pendapatan yang positif yaitu 4,98 persen.

Realisasi pendapatan asli daerah berfluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 mencapai Rp.377.346.398.574 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp.352.504.682.841,06 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 369.450.573.693,72. Realisasi pendapatan transfer mencapai Rp 3.025.394.578.711 pada tahun 2021, turun menjadi Rp. 2.758.120.796.366 pada tahun 2022, dan mengalami peningkatan kembali menjadi Rp.3.436.298.411.805 pada tahun 2023.

Untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2021 mencapai Rp. 107.950.732.347, naik menjadi Rp. 110.634.966.480 pada tahun 2022, dan mengalami penurunan mencapai Rp. 2.058.977.430

pada tahun 2023. Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer 7,88 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah -47,83% pada tahun 2023.Pada komponen Pendapatan Hibah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp 1,8 M meningkat menjadi Rp.7,5 M pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaaan LKPD TA. 2024 terkait kekeliruan penganggaran belanja yang tidak sesuai substansi seperti peruntukan belanja hibah dari belanja modal yang mengakibatkan peningkatan belanja hibah. Pertumbuhan pendapatan yang berfluktuatif salah satunya disebabkan masih bergantungnya pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan pendapatan transfer dari pusat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.7**
**Realisasi Pendapatan Daerah**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024**

| No. | Uraian | Realisasi (Rp.) | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **4** | **PENDAPATAN** | **3.221.260.445.686,84** | **3.807.807.962.928,72** | **3.754.947.990.722,66** | **5,24%** |
| **04.01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **352.504.682.841,06** | **369.450.573.693,72** | **393.331.951.633,26** | **3,72%** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 92.131.328.321 | 86.526.896.700,00 | 113.650.131.384,00 | 7,25% |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 4.931.450.592,75 | 6.354.903.597,00 | 6.626.027.122,00 | 10,35% |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 19.065.474.112,22 | 28.082.895.564,79 | 27.898.190.463,75 | 13,53% |
| 04.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 236.376.429.815,09 | 248.485.877.831,93 | 245.157.602.663,51 | 1,22% |
| **04.02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.758.120.796.365,78** | **3.436.298.411.805,00** | **3.354.108.863.089,40** | **6,74%** |
| **04.02.01** | **Transfer Pemerintah Pusat** | **2.608.298.128.799,00** | **2.965.323.836.668,00** | **2.860.225.317.214,00** | **3,12%** |
| 4.2.1.1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 1.769.991.697.984,00 | 2.222.038.745.210,00 | 1.944.582.915.190,00 | 3,19% |
| 4.2.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 371.455.549.531,00 | 401.856.285.900,00 | 491.100.513.274,00 | 9,75% |

| No. | Uraian | Realisasi (Rp.) | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 235.844.414.284,00 | 341.428.805.558,00 | 424.541.888.750,00 | 21,65% |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Desa (DAD) | 219.803.363.000,00 | 227.448.129.600,00 | 229.955.545.000,00 | 1,52% |
| 4.2.1.5 | Dana Insentif Daerah (DID) | 11.203.104.000,00 | 23.878.101.000,00 | 24.672.901.000,00 | 30,10% |
| **04.02.02** | **Transfer Antar Daerah** | **149.822.667.567,00** | **219.648.344.537,00** | **239.255.099.875,40** | **16,89%** |
| 4.2.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 136.169.608.567,00 | 153.271.461.737,00 | 171.283.262.620,00 | 7,95% |
| 4.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah | 13.653.059.000,00 | 66.376.882.800,00 | 67.971.837.255,40 | 70,75% |
| **04.03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **110.634.966.480,00** | **2.058.977.430,00** | **7.507.176.000,00** | |
| 04.03.01 | Pendapatan Hibah | 2.132.717.185,00 | 1.800.000.000,00 | 7.507.176.000,00 | 52,12% |
| 04.03.03 | Pendapatan lainnya | 108.502.249.295,00 | 258.977.430,00 | 0,00 | |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022-2024, diolah*

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Juli 2025 dibandingkan dengan anggaran pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

**Tabel 3.8**
**Realisasi Pendapatan Daerah**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun s.d 31 Juli 2025**

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **529.884.959.800,00** | **307.241.307.517,05** | **57,98** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 216.466.151.000,00 | 107.953.976.186,35 | 49,87 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 5.195.787.000,00 | 6.189.286.390,00 | 119,12 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 30.000.000.000,00 | 18.395.564.057,62 | 61,32 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 278.223.021.800,00 | 174.702.480.883,08 | 62,79 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **3.631.000.983.500,00** | **1.660.290.901.018,83** | **45,73** |
| 4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 3.505.400.983.500,00 | 1.610.068.412.580,00 | 45,93 |

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.2 | Transfer Pemerintah Daerah | 125.600.000.000,00 | 50.222.488.438,83 | 39,99 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **4.160.885.943.300,00** | **1.967.532.208.535,88** | **47,29** |

*Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025, diolah*

Sumber pendapatan daerah yang paling dominan berkontribusi realisasinya terhadap pendapatan daerah selama periode tahun 2022 sampai tahun 2025 berasal dari pendapatan transfer baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.9**
**Persentase Sumber Pendapatan Daerah**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024**

| No. | Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
| **4** | **PENDAPATAN** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **04.01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **10,94%** | **9,70%** | **10,48%** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 2,86% | 2,27% | 3,03% |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 0,15% | 0,17% | 0,18% |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,59% | 0,74% | 0,74% |
| 04.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 7,34% | 6,53% | 6,53% |
| **04.02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **85,62%** | **90,24%** | **89,33%** |
| **04.02.01** | **Transfer Pemerintah Pusat** | **80,97%** | **70,72%** | **76,17%** |

| No. | Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
| 4.2.1.1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 54,95% | 58,35% | 51,79% |
| 4.2.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 11,53% | 10,55% | 13,08% |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 7,32% | 8,97% | 11,31% |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Desa (DAD) | 6,82% | 5,97% | 6,12% |
| 4.2.1.5 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,35% | 0,63% | 0,66% |
| **04.02.02** | **Transfer Antar Daerah** | **4,65%** | **5,77%** | **6.37%** |
| 4.2.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 4,23% | 4,03% | 4.56% |
| 4.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah | 0,42% | 1,74% | 1.81% |
| **04.03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **3,43%** | **0,05%** | **0.20%** |
| 04.03.01 | Pendapatan Hibah | 0,07% | 0,05% | 0.20% |
| 04.03.03 | Pendapatan lainnya | 3,37% | 0,01% | - |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025, diolah*

Prognosis pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada beberapa regulasi,; (1) Prognosis pendapatan berdasarkan RPJPD 2005-2045; (2) Prognosis pendapatan pada RPJMD Tahun 2025-2029; (3) Surat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 900/401/BPPRD.V/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Prognosa Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026 (4) serta prognosis pendapatan berdasarkan hasil kajian terhadap asumsi pendapatan serta memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kapasitas pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan pada nilai Rp. 4.160.880.943.300, dengan komposisi sumber pendapatan Rp.529.884.959.800 dari pendapatan asli daerah (PAD), dan Rp. 3.631.000.983.500 dari pendapatan transfer. Untuk perhitungan prognosis pendapatan daerah pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp. 3.748.803.641.024 turun sebesar 11,36 persen dari prognosis pendapatan tahun 2025. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan pendapatan transfer di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.10**
**Prognosis Pendapatan Daerah**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2026**

| No | Uraian | Prognosis Tahun 2025 (Rp) | Prognosis Tahun 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **3.366.370.761.800** | **3.748.803.641.024** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **529.884.959.800** | **537.897.152.524** |
| **4.1.1** | Pajak Daerah | 216.466.151.000 | 223.569.997.000 |
| **4.1.2** | Retribusi Daerah | 5.195.787.000 | 5.811.015.100 |
| **4.1.3** | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| **4.1.4** | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 278.223.021.800 | 278.516.140.424 |
| | | | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.836.485.802.000** | **3.210.906.488.500** |
| **4.2.1** | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.710.885.802.000 | 3.070.306.488.500 |
| **4.2.2** | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 125.600.000.000 | 140.600.000.000 |
| | | | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | - | - |
| **4.3.1** | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | - | - |

*Sumber: SIPD, RKPD, 2025, prognosis pendapatan BPPRD, diolah*

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkruen, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2026 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2022-2024. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.223,569 milyar. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah.

Untuk pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2022-2024 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 5,811 miliar. Hal ini disebabkan

antara lain ada beberapa komponen retribusi daerah yang mengalami penurunan. Begitu pun dengan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 30 miliar pada tahun 2026. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp.278,516 miliar pada tahun 2026. Sementara itu pada jenis pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp.3,07 triliun pada tahun 2026. Serta pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp140,600 miliar.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2026 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 85,65 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat bergantung pada sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber - sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber - sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- *Review* Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
- Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

- Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan;

b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
   - Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
   - Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
   - Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar diupayakan pemungutan pajak daerah dan retribusi dilakukan secara elektronifikasi.
   - Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2022-2024 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi dari Rp. 3.259.813.882.099,83 pada tahun 2022, menurun menjadi

Rp. 3.623.039.910.364,02 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp. 3.811.670.043.170,23 pada tahun 2024.

Realisasi belanja operasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.173.313.722.361,86 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp. 2.368.483.329.746,10 dan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.507.571.123.568,16 pada tahun 2024. Kemudian untuk realisasi belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp.619.786.347.959,97, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp.756.123.871.417,92 dan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 814.583.797.586,07 pada tahun 2024. Untuk realisasi belanja tak terduga pada tahun 2022 sebesar Rp.2.347.728.430, kemudian menurun menjadi Rp. 21.000.000 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.155.951.800. Kemudian untuk belanja transfer pada tahun 2022 sebesar Rp.464.366.083.349, dan meningkat menjadi Rp. 498.411.709.200 pada tahun 2023, dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 487.359.170.216. Realisasi belanja daerah pada tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.11**

**Realisasi Belanja Daerah**

**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024**

| No | Jenis Belanja | Realisasi (Rp.) | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **5** | **BELANJA** | **3.259.813.882.099,83** | **3.623.039.910.364,02** | **3.811.670.043.170,23** | **5.35%** |
| **05.01** | **BELANJA OPERASI** | **2.173.313.722.361,86** | **2.368.483.329.746,10** | **2.507.571.123.568,16** | **4.88%** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 999.547.471.827,50 | 1.049.080.026.130,18 | 1.199.348.281.960,91 | 6.26% |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.134.253.894.449,36 | 1.204.877.864.227,92 | 1.166.182.290.152.25 | 368.47% |
| 05.01.03 | Belanja Bunga | 11.088.298.859,00 | 2.229.803.709,00 | 0,00 | -100.00% |
| 05.01.04 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 28.132.557.225,00 | 112.095.635.679,00 | 136.655.551.455,00 | 69.36% |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 291.500.000,00 | 200.000.000,00 | 5.385.000.000,00 | 164.35% |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **619.786.347.959,97** | **756.123.871.417,92** | **814.583.797.586,07** | **9.54%** |
| 05.02.01 | Belanja Modal Tanah | 7.540.913.151,00 | 14.994.980.293,00 | 14.159.821.565,00 | 23.37% |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 140.284.444.182,73 | 127.634.008.214,00 | 102.795.588.522,20 | -9.85% |
| 05.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 163.318.924.570,77 | 165.490.547.392,58 | 161.139.070.395,87 | -0.45% |
| 05.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 296.077.957.195,47 | 434.337.839.983,34 | 519.469.106.288,00 | 20.61% |
| 05.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.564.108.860,00 | 13.666.495.535,00 | 17.020.210.815,00 | 10.65% |
| **05.03** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **2.347.728.430,00** | **21.000.000,00** | **2.155.951.800,00** | **-2.80%** |
| **05.04** | **BELANJA TRANSFER** | **464.366.083.349,00** | **498.411.709.200,00** | **487.359.170.216,00** | **1.62%** |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2024, diolah*

Adapun realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**

**Realisasi Belanja Daerah**

**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 31 Juli 2025**

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | **4.182.242.825.046,--** | **1.546.503.276.029,97** | **36,98** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.719.235.800.603,40** | **1.137.736.007.067,97** | **41,84** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.469.549.640.159,49 | 763.170.113.982,89 | 51,93 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 968.309.858.553,91 | 317.115.589.375,08 | 32,75 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | - | - | 0,00 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | 0,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 211.009.717.980,00 | 44.610.755.400,00 | 21,14 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 70.366.583.910,00 | 12.839.548.310,00 | 18,25 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **776.928.385.422,29** | **196.215.237.859,00** | **25,26** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 1.996.785.750,00 | 806.275.350,00 | 40,38 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.790.146.573,40 | 20.026.184.511,00 | 20,07 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 148.459.071.458,00 | 23.193.606.429,00 | 15,62 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 510.144.790.316,89 | 152.020.967.569,00 | 29,80 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 16.499.992.627,00 | 168.204.000,00 | 1,02 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 37.598.698,00 | 0 | 0,00 |
| **5.3** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **180.726.515.766,31** | **77.330.054,00** | **0,04** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **505.352.123.254,00** | **212.474.701.049,00** | **42,04** |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025*

**Tabel 3.13**
**Prognosis Belanja Daerah**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2026**

| No | Uraian | Prognosis 2025 (Rp) | Prognosis 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.437.395.116.986** | **2.758.136.334.062,75** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.295.908.850.867 | 1.641.731.294.048,83 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 948.035.102.928 | 834.535.955.406,76 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | - | - |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | - | - |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 129.458.929.281 | 183.268.972.607,16 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 63.992.233.910 | 98.600.112.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **486.791.276.486** | **429.902.972.961,25** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 2.914.120.000 | 10.543.999.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.619.003.740 | 58.584.501.788,65 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 97.830.841.003 | 64.370.630.851,60 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 305.767.316.471 | 293.324.613.151,80 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.597.330.777 | 291.228.169,20 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 62.664.495 | 2.788.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **494.667.382.300** | **579.464.334.000** |
| | **Jumlah Belanja** | **3.423.853.775.772** | **3.772.503.641.024** |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025*

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengamanatkan Belanja Pegawai maksimal 30% dari total Belanja. Untuk Tahun 2026, Prognosis Belanja Pegawai

Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 43,27% atau Rp.1.641.731.294.049 dan telah melebihi dari maksimal 30% Belanja Pegawai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kondisi tersebut dan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan Nasional tentang penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

  Pemerintah pusat melalui formasi nasional mendorong percepatan penuntasan tenaga honorer menjadi PPPK, khususnya pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan penyuluhan. Kabupaten Musi Banyuasin juga mengikuti kebijakan tersebut sehingga alokasi anggaran untuk jumlah pegawai yang harus dibiayai oleh APBD meningkat signifikan.
- Pertumbuhan belanja pegawai lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan daerah

  Dalam kondisi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat relatif stabil namun pertumbuhan belanja pegawai akibat adanya pengangkatan formasi PPPK lebih tinggi, maka akan menyebabkan rasio belanja pegawai terhadap total APBD akan meningkat melewati batas maksimal 30%.

- Implikasi kapasitas fiskal daerah

  Peningkatan belanja pegawai ini akan berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal untuk belanja Pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

- Untuk Belanja Pegawai Kabupaten Musi Banyuasin pada RKPD Tahun 2026, terdiri dari:

  a. Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 1.499.701.351.549

     Rincian:

     | | | |
     |---|---|---|
     | PNS | : Rp. | 802.468.380.305 |
     | PPPK | : Rp. | 680.168.664.182 |
     | Insentif Pungut | :Rp. | 8.864.307.062 |
     | BPJS dari TPG, ,TKG, TAMSIL GURU | : Rp. | 8.200.000.000 |

  b. Gaji KDH/WKDH : Rp. 357.788.640

  c. Gaji DPRD : Rp. 26.553.028.396

  d. Penunjang Operasional KDH : Rp. 600.000.000

  e. Pembayaran Utang BPJS ASN Tahun (2020-2024) : Rp. 5.000.000.000

  f. Belanja pegawai BLUD : Rp. 109.519.125.464

  Total Belanja Pegawai dalam APBD : RP. 1.641.731.294.049

b. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

c. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Adapun belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total Belanja Daerah sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggaran fungsi kesehatan Minimal 10% dari total APBD di luar gaji, anggaran pengawasan dihitung untuk Belanja Daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) serta Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer sebagaimana amanat Pasal 147 ayat 1 UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- Fungsi Pendidikan: Rp. 767.181.488.212 ( 20,34%)
- Fungsi Kesehatan : Rp. 719.546.360.822 (19,07 %)
- Fungsi Pengawasan : Rp. 42.099.576.171 ( 1,12 %)
- Infrastruktur Publik : Rp. 1.165.880.381.053 ( 36,51 %)
- Alokasi Dana Desa : Rp. 353.900.000.000 ( 11,51 %)

d. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
e. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada

perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Selanjutnya Pembiayaan Neto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit APBD.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya juga pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

a. Dari sisi sumber penerimaan daerah antara lain:
   - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000;

b. Dari sisi sumber pengeluaran daerah antara lain:
   - Penyertaan modal daerah sebesar dianggarkan Rp. 21.300.000.000 dengan rincian untuk PDAM Tirta Randik sebesar Rp. 11.300.000.000 dan BUMD sebesar Rp. 10.000.000.000.

**Tabel 3.14**
**Realisasi Pembiayaan Daerah**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024**

| No. | Jenis Belanja | Realisasi (Rp.) | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **294.340.224.015,75** | **62.401.787.597,88** | **131.728.424.206,58** | **-23.51%** |
| 6.1.1 | Penggunaan Silpa | 271.671.938.265,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6.1.4 | Pinjaman Dalam Negeri | 22.668.285.750 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **192.415.108.046** | **127.625.314.529,00** | **24.950.000.000,00** | **-49.39%** |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 36.100.000.000 | 36.952.171.529,00 | 24.950.000.000,00 | -11.59% |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 156.315.108.046 | 90.673.143.000,00 | 0,00 | -100.00% |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022-2024*

Adapun realisasi pembiayaan daerah pada tahun berjalan 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15**

**Realisasi Pembiayaan Daerah**

**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 31 Juli 2025**

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Berjalan (RP) | % |
|---|---|---|---|---|
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **45.842.991.372** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1.1 | Penggunaan Silpa | 45.842.991.372 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | Pinjaman Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **24.486.109.626** | **0,00** | **0,00** |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 24.486.109.626 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025*

Adapun proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16**

**Prognosis Pembiayaan Daerah**

**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2026**

| No | Uraian | Prognosis 2025 (Rp) | Prognosis 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **69.983.013.972** | **45.000.000.000** |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 69.983.013.972 | 45.000.000.000 |
| | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **12.500.000.000** | **21.300.000.000** |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 12.500.000.000 | 21.300.000.000 |

*Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025*

## 3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NON APBD

Dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin selain dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin didukung juga dari dana keuangan non APBD Kabupaten sebagai berikut:

**1. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya Melalui Pinjaman Daerah**

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**2. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR**

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan – perusahaan melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat mereka melakukan usaha.

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data laporan dari perusahaan yang masuk ke Sekretariat Forum MSH-CSR Kabupaten Musi Banyuasin, Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015–2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.17**

**Rekapitulasi Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 - 2024**

| No | Tahun | Program | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengembangan Infrastruktur | Pemberdayaan Masyarakat | Hubungan Komunitas | |
| 1 | 2015 | 25.514.392.762 | 5.369.919.593 | 5.580.614.101 | 36.500.452.864 |
| 2 | 2016 | 24.211.716.268 | 1.275.356.000 | 3.016.029.733 | 28.503.102.001 |
| 3 | 2017 | 10.224.493.495 | 1.005.129.816 | 2.741.093.409 | 13.970.716.720 |
| 4 | 2018 | 1.860.012.643 | 1.004.140.104 | 3.766.569.197 | 6.630.721.944 |
| 5 | 2019 | 6.226.859.931 | 13.799.392.443 | 14.873.985.235 | 34.900.237.609 |
| 6 | 2020 | 2.223.775.631 | 735.327.475 | 12.314.095.553 | 15.273.198.659 |
| 7 | 2021 | 6.751.657.333 | 5.920.608.410 | 21.918.463.052 | 34.590.728.795 |
| 8 | 2022 | 8.615.058.739 | 5.764.551.375 | 28.210.608.883 | 43.584.123.867 |
| 9 | 2023 | 8.134.002.087 | 3.022.971.119 | 27.874.170.400 | 43.303.333.790 |
| 10 | 2024 | 6.097.839.123 | 4.138.636.973 | 14.251.788.431 | 25.578.699.543 |

*Sumber: Bappeda Kab. Musi Banyuasin, 2015-2025*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

***Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi" adalah tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro sasaran RPJMN 2025 – 2029, sasaran RPJMN 2025-2029, serta sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029.***

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dilaksanakan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS), serta mensinergikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, dan *top down-bottom-up planning.* Selain itu, digunakan pendekatan perencanaan berbasis kewilayahan yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan sesuai dengan potensi daerah.

Perumusan prioritas RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjawab tantangan isu strategi yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan beserta hasil evaluasi pembangunan pada tahun 2025. Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam perencanaan jangka Panjang dan jangka menengah nasional maupun daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 ini dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisis lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah serta keterkaitan dengan tingkat nasional dan provinsi dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana serta pelaksanaan RPJMD Tahun sebelumnya.

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 sebagai bentuk komitmen dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimanatkan dalam peraturan tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah serta memperhatikan RKP Nasional Tahun 2026. Adapun visi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah:

> "MAJU LEBIH CEPAT, BERSAMA MENYEJAHTERAKAN MUSI BANYUASIN"

Mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 4.1.**
Pokok-pokok Visi Kabupaten Musi Banyuasin

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Keterangan |
|---|---|---|
| **Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin** | Maju Lebih Cepat | Penguatan SDM melalui transformasi pendidikan dan kesehatan harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani agar pembangunan dapat lebih cepat. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan membutuhkan sistem pemerintahan efisien, transparan, dan berbasis teknologi, yang memungkinkan layanan publik lebih cepat dan merata. Digitalisasi di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sistem informasi manajemen terintegrasi, akan mempercepat pemetaan kebutuhan tenaga pendidik dan medis, serta meningkatkan kualitas layanan. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan penyederhanaan birokrasi. Dengan pemerintahan modern dan responsif, dukungan terhadap pengembangan SDM akan lebih efektif, memberikan akses lebih baik pada pendidikan dan layanan kesehatan. Sinergi antara transformasi SDM dan inovasi tata kelola pemerintahan akan mendorong Musi Banyuasin maju lebih cepat, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. |
| | Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin | Rekonstruksi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung oleh moderasi beragama dan ekonomi keumatan untuk menciptakan masyarakat yang kuat secara sosial dan ekonomi. Hal ini tercipta melalui nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong, serta penguatan perlindungan sosial dan ketahanan budaya, yang perlu diiringi dengan harmoni antar umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal harus mengutamakan keadilan dan keberpihakan pada ekonomi keumatan untuk meratakan kesejahteraan. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas keagamaan, dan pelaku usaha berbasis keumatan akan |

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Keterangan |
|---|---|---|
| | | menciptakan ekosistem ekonomi inklusif yang fokus pada kesejahteraan bersama. Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan peran dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, merupakan pilar utama dalam upaya Menyejahterakan Musi Banyuasin. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka akses layanan dasar serta peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penguatan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem ekonomi inovatif. Kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan pemerintah akan meningkatkan daya saing daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Keberlanjutan pembangunan juga bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dengan penerapan konservasi lingkungan. Dengan mengintegrasikan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan, Musi Banyuasin dapat berkembang menjadi daerah yang maju, kompetitif, dan berkelanjutan, serta menciptakan kesejahteraan yang merata. |

*Sumber: RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029*

Dua pokok Visi di atas akan diuraikan lebih lanjut ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Misi ini berfungsi untuk memperjelas serta menegaskan arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan perincian Visi ke dalam pokok-pokok utama di atas, berikut disajikan keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk lima tahun mendatang. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2.**
Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Keterangan |
|---|---|---|
| **Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin** | Maju lebih cepat | Misi 2: Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan.<br>Misi 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, dan Melayani. |
| | Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin | Misi 3: Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera.<br>Misi 4: Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan.<br>Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas.<br>Misi 6: Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi.<br>Misi 7: Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. |

*Sumber: RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029*

Tabel di atas menggambarkan pemetaan yang digunakan sebagai pendekatan logis untuk menunjukkan keterkaitan antara Visi dan Misi. Secara lebih mendalam, keterkaitan tersebut mencakup berbagai aspek yang luas, di

mana setiap visi dapat didukung oleh lebih dari satu misi, sementara masing-masing pokok Visi juga memiliki hubungan serta hierarki tertentu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kebijakan dan strategi yang dirumuskan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil pemetaan Misi yang mengacu pada pokok-pokok Visi di atas, telah ditetapkan tujuh Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1: *Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, dan Melayani.*

Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik, terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bebas dari KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan berbasis elektronik mempercepat proses administrasi dan memudahkan akses informasi, sementara pemerintahan yang transparan dan akuntabel membangun kepercayaan publik dengan memastikan pengelolaan sumber daya yang jujur dan tepat. Peningkatan kualitas pelayanan publik memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan efisien, menciptakan pemerintahan yang responsif dan mampu memberikan layanan terbaik kepada warganya, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga faktor ini saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berfokus pada kepentingan publik.

Misi 2: *Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan.*

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menjadi tujuan utama dalam misi ini. Dalam sektor pendidikan, peningkatan akses dan mutu layanan menjadi prioritas agar setiap individu, termasuk di daerah terpencil, dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Di sektor kesehatan, upaya dilakukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang lebih merata, serta pemanfaatan teknologi kesehatan seperti telemedicine (Sumsel Tanggap 119) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Misi 3: *Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera.*

Misi ini berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas sektor unggulan, dan terjaganya stabilitas harga bahan pokok, yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan ekonomi daerah. Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat memiliki daya beli yang lebih kuat, yang mendukung perekonomian lokal. Sektor unggulan yang produktif menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, memperkuat basis ekonomi daerah, sementara stabilitas harga bahan pokok menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang dapat merugikan perekonomian. Ketiga faktor ini saling

mendukung untuk menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kemiskinan secara efektif.

Misi 4: *Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan.*

Terciptanya kerukunan umat beragama, meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat, serta meningkatnya usaha atau industri yang menerapkan standar halal memiliki peran besar dalam mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis, didukung oleh sumber daya ekonomi keummatan. Kerukunan antar umat beragama menciptakan suasana damai dan saling menghargai, yang memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam zakat tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi. Sementara itu, semakin banyaknya usaha dan industri yang menerapkan standar halal memastikan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian umat. Ketiga faktor ini bekerja bersama untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya harmonis, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Misi 5: *Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas.*

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya, meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman, serta meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak berperan penting dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Kondisi jalan yang lebih baik mendukung mobilitas yang lancar, mempermudah distribusi barang dan

jasa, serta mempercepat akses ke berbagai layanan publik. Pelayanan infrastruktur permukiman yang lebih baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar yang memadai, sementara meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki hunian layak memastikan adanya tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi setiap keluarga. Ketiga faktor ini saling mendukung untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkualitas, yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong model pembiayaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), guna mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD.

Misi 6: *Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi.* Meningkatnya inovasi daerah, kewirausahaan, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, serta meningkatnya pembangunan desa berperan penting dalam mewujudkan Musi Banyuasin yang inovatif dan berdaya saing. Inovasi daerah yang terus berkembang mendorong terciptanya solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor-sektor lokal. Kewirausahaan yang tumbuh pesat, didukung oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, membuka peluang usaha baru dan memperkuat perekonomian daerah. Sementara itu, pembangunan desa yang merata memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, menciptakan desa yang lebih maju dan berdaya saing. Ketiga faktor ini bekerja bersama

untuk menjadikan Musi Banyuasin daerah yang lebih inovatif, mandiri, dan siap bersaing di tingkat yang lebih luas.

Misi 7: *Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.*

Turunnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan turunnya potensi risiko bencana berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengurangan emisi GRK mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia, sekaligus mendukung upaya global untuk mengatasi pemanasan global. Sementara itu, menurunnya potensi risiko bencana melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti mitigasi bencana alam dan perbaikan infrastruktur, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kedua faktor ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat, aman, dan lebih tahan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 merupakan pendefinisian terhadap terhadap program pembangunan daerah dalam rangka memberikan kep

astian operasionalisasi dan keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran – ukuran terlaksananya tujuan dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan

program pembangunan dari upaya – upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan dalam memberikan arah strategis yang ingin dicapai oleh pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk memberikan arahan terhadap pembangunan kabupaten secara umum dan memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029:

1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas;
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3) Menurunkan angka kemiskinan;

4) Mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah;
5) Mewujudkan masyarakat religius, rukun dan harmonis yang didukung sumber daya ekonomi keummatan;
6) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas;
7) Mewujudkan Musi Banyuasin yang inovatif dan berdaya saing;
8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
6. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat;
7. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
8. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan pangan masyarakat;
9. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
10. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan;
11. Terjaganya tingkat inflasi;
12. Terciptanya kerukunan umat beragama;
13. Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat;

14. Meningkatnya Usaha Mikro/IKM yang menerapkan standar halal;
15. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten);
16. Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman;
17. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak;
18. Meningkatnya inovasi daerah;
19. Meningkatnya kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital;
20. Meningkatnya pembangunan desa;
21. Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
22. Turunnya potensi risiko bencana.

Pada tabel 4.3 berikut, akan disajikan hubungan visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran sebagai berikut:

## Tabel 4.3
## Hubungan Visi,Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
| Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin<br>- Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani<br>- Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan<br>- Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera<br>- Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan<br>- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas<br>- Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi<br>- Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas. | | Indeks Reformasi Birokrasi () | 73.69 | 74.02 | 74.7 | 74.9 | 75.3 | 75.59 |
| | | Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 3.7 | - | - | - | - | - |
| | | | Indeks Pemerintah Digital (Indeks) | - | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| | | Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN | Survey Penilaian Integritas (Nilai) | 65.41 | 66.41 | 67.41 | 68.41 | 69.41 | 70.41 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 4.6 | 4.63 | 4.66 | 4.69 | 4.72 | 4.77 |
| | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 72.67 | 73.07 | 73.10 | 73.33 | 73.50 | 74.00 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 7.95 | 8.09 | 8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.5 |
| | | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12.51 | 12.69 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.5 |
| | | | Angka Literasi/Numerasi (%) | 75.77 | 76.83 | 77.88 | 78.94 | 80 | 80.06 |
| | | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) | 74.52 | 74.55 | 75.25 | 75.55 | 76.00 | 76.25 |
| | | | Prevalensi Stunting (%) (%) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| | Menurunkan Angka Kemiskinan | | Tingkat Kemiskinan (%) | 12.70-12.88 | 12.0-12.5 | 11.45-12.0 | 10.75-11.45 | 9.98-10.75 | 9.59-9.98 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
| | | Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat | Rasio Gini (Indeks) | 0.290-0.300 | 0.280-0.295 | 0.270-0.295 | 0.270-0.295 | 0.260-0.295 | 0.255-0.295 |
| | | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2.08 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.89 |
| | | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks) | 63.3 | 63.97 | 64.5 | 64.99 | 65.41 | 65.8 |
| | | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) | 80.97 | 82.04 | 83.11 | 84.18 | 85.26 | 86.33 |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| | Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah | | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4.5-5.0 | 5.0-5.2 | 5.02-5.28 | 5.05-5.35 | 5.10-5.5 | 5.13-5.58 |
| | | Meningkatnya pendapatan masyarakat | PDRB per kapita (Rp. Juta Per Tahun) | 145 | 160 | 175 | 180 | 186 | 191 |
| | | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| | | | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (%) | 12.56 | 12.86 | 13.15 | 13.45 | 13.74 | 14.04 |
| | | | Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) (%) | 12.26 | 12.45 | 12.64 | 12.84 | 13.03 | 13.23 |
| | | Terjaganya Tingkat Inflasi | Indeks Perkembangan Harga (%) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| | Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan | | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Terciptanya kerukunan umat beragama | Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%) (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| | | Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat | Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin) | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.73 |
| | | Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal | Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal (%) | 1.5 | 2.74 | 4.18 | 5.68 | 7.22 | 8.76 |
| | | | Persentase IKM yang bersertifikasi Halal (%) | 37 | 58 | 75 | 95 | 100 | 100 |
| | Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas | | Indeks Pelayanan Infrastruktur (Indeks) | 82.5 | 85 | 86.67 | 90 | 93.33 | 93.33 |
| | | Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten) | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) | 62.11 | 63.18 | 65.28 | 67.52 | 68.94 | 70.12 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
| | | Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%) | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
| | | Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) (%) | 72.72 | 72.98 | 73.24 | 73.5 | 73.76 | 74.00 |
| | Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing | | Indeks Daya Saing Daerah (Angka) | 3.51 | 3.6 | 3.71 | 3.82 | 3.93 | 4 |
| | | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (Indeks) | 40.01 | 45.02 | 46.55 | 50.12 | 54.7 | 60.01 |
| | | Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | Rasio Kewirausahaan (Persentase) | 5.48 | 5.70 | 5.92 | 6.16 | 6.40 | 6.65 |
| | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks) | 40.70 | 45.27 | 49.84 | 54.41 | 58.98 | 63.55 |
| | | Meningkatnya Pembangunan Desa | Persentase Desa Mandiri (%) | 50.22 | 54.59 | 58.95 | 63.32 | 67.69 | 72.05 |
| | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks) | 64.44 | 64.69 | 64.94 | 65.2 | 65.45 | 65.7 |
| | | Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e) (TonCO2e) | 1828335.80 | 2012452.45 | 2224591.60 | 2460414.98 | 2688752.02 | 2943543.17 |
| | | Turunnya Potensi Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) | 109.25 | 108.45 | 107.64 | 106.84 | 106.84 | 106.05 |

*Sumber: RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029*

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan para petani;
6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tabel berikut, akan disajikan hubungan visi, misi, tujuan, sasaran,indikator sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Hubungan Visi,Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan**

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| 20252029 - Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin<br>- Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan<br>- Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera<br>- Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan<br>- Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani<br>- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas<br>- Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi<br>- Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas. | | | Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks) | | |
| | | Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik | | Indeks Pemerintah Digital (Indeks) | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani | |
| | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik (%) | | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
| | | | Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah (%) | | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi | | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | dengan pusat data kabupaten (%) | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN | | Survey Penilaian Integritas (Nilai) | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani | |
| | | | 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Terisinya jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi dan jabatan fungsional (%) | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%) | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | | Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN (%) | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | | Persentase capaian kinerja ASN (%) | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | persentase pengisian ASN berdasarkan formasi Kebutuhan (%) | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | 1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) | | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| | | | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| | | | | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) | | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| | | | 1) Meningkatnya tata kelola anggaran 2) Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3) Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) | | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | Meningkatnnya kinerja pengelolaan arsip, perlindungan arsip dan penyelamatan arsip | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) | | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah melalui pencegahan, efektivitas tindak lanjut pengawasan dan perbaikan tata kelola yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas KKN | Persentase audit kepatuhan terhadap perangkat daerah (%) | | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| | | | | Opini BPK RI terhadap LKPD (Predikat) | | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| | | | | Perangkat Daerah yang memeroleh nilai SAKIP minimal BB (Predikat) | | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| | | | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik Pada Masyarakat dan Kader Partai Politik (%) | | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| | | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan dan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendampingan dan asistensi yang efektif, efisien dan akuntabel | Perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM (Predikat) | | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| | | | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) (Indeks) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase Pasangan Isbat Nikah masyarakat kurang mampu yang difasilitasi (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase Juara kafilah STQ/MTQ Tingkat Provinsi (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase Partisipasi Peserta STQ/MTQ Kafilah Kecamatan di Tingkat Kabupaten (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah | Persentase batas wilayah daerah bermasalah yang terfasilitasi (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase kesepakatan kerjasama dalam negeri yang aktif diimplementasikan (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase perkara yang difasilitasi bantuan hukum (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Nilai) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Persentase Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga yang Terpasang (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Persentase BUMD/BLUD berpredikat sehat (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Indeks Perkembangan Harga (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Inspektorat Daerah | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Pendapatan Daerah) | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat Daerah | Persentase tersusunnya laporan Evaluasi Pelayanan Publik (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Angka) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Laporan) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase tersusunnya dokumen ketatalaksanaan yang berkualitas (%) | | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat DPRD | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai) | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani | |
| | | | Efektifnya pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sanga Desa) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya) (%) | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral (%) | | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
| | | | Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan | Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase) | | 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
| | | | | Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%) | | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut | Persentase Sarana Prasarana ASDP dalam kondisi baik (%) | | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%) | | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%) | | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | | | Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | PersentaseTerpeliharanya Sarana Prasarana Bandar Udara (%) | | 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN |
| | | | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | | 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin (%) | | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Supat) | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Toman) | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Batanghari Leko) | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Bayung Lencir) | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Jirak Jaya) | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Keluang) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lais) | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lalan) | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lawang Wetan) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Plakat Tinggi) | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sanga Desa) | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sekayu) | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Keruh) | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Lilin) | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Tungkal Jaya) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase) | | 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |
| | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | Indeks Pembangunan Manusia(Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | Penguatan SDM melalui transformasi bidang pendidikan dan kesehatan | |
| | | | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | |
| | | | | Angka Literasi/Numerasi (%) | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | | 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan | Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase) | | 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
| | | | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) | | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks Pemerataan Guru (Rasio) | | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| | | | | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) | | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
| | | | Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) | | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| | | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
| | | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
| | | | Terpeliharanya warisan budaya dan sejarah bangsa | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Indonesia dalam bentuk naskah kuno | | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perpustakaan | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Tersalurnya Bantuan Keuangan Sektor Pendidikan | | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | | Prevalensi Stunting (%) (%) | Penguatan SDM melalui transformasi bidang | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | | pendidikan dan kesehatan | |
| | | | | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) | | |
| | | | Meningkatnya efektifitas pelayanan BLUD FKTP dan FKTL | Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL (UPT) | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP (UPT) | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) | | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
| | | | | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%) | | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
| | | | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi (%) | | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%)) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. ((%)) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Indeks Pencapaian SPM Kesehatan (Indeks) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Presentase lanjut usia yang mandiri (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai Standar (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%) | | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | | Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%) | | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio) | | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) | | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase) | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
| | | | | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) (%) | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
| | | | | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
| | | | | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase) | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
| | | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | terpenuhi (unmet need) (%) | | KELUARGA BERENCANA (KB) |
| | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk (Rasio) | | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| | | | | Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga (%) | | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
| | | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai) | | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
| | | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
| | | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen) | | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan | dilaksanakan tepat waktu (%) | | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | Menurunkan Angka Kemiskinan | | | Tingkat Kemiskinan(%) | | |
| | | Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat | | Rasio Gini (Indeks) | Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%) | | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
| | | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis Terlantas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) | | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial | Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%) | | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai) | | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera | |
| | | | Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%) | | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| | | | | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) | | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| | | | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | Persentase Penyelesaian Lahan Transmigrasi yang Bersertifikat (%) | | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI |
| | | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%) | | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang | | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | sesuai dengan Dokumen Perencanaan (%) | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Tenaga Kerja | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | | Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks) | Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera | |
| | | | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | | | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Indeks Lansia Berdaya (Indeks) | | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) | | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| | | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketahanan Pangan | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah | | | Laju Pertumbuhan Ekonomi(%) | | |
| | | Meningkatnya pendapatan masyarakat | | PDRB per kapita (Rp. Juta Per Tahun) | Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera | |
| | | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berminat Sesuai Ketentuan (%) | | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL |
| | | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%) | | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |
| | | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%) | | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Persentase pertumbuhan volume penjualan produk lokal berorientasi ekspor (%) | | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase) | | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| | | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha (%) | | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | Peningkatan peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi | |
| | | | | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (%) | | |
| | | | | Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) (%) | | |
| | | | Meningkatnya Daya Saing UMKM | Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan (%) | | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Jumlah objek wisata (Unit) | | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) (%) | | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | | Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan (%) | | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan (%) | | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | | | | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (%) | | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | | | | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (%) | | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan (Orang) | | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| | | | | Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani (%) | | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%) | | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | | Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Jumlah pelaku usaha pariwisata (Orang) | | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | | | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%) | | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| | | | | Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%) | | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase) | | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha industri yang terkendali (%) | | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI |
| | | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%) | | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%) | | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |
| | | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| | | | Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan atas izin usaha perkebunan yang diterbitkan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan atas Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan (%) | | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Pertumbuhan UMKM/IKM yang memasarkan produk melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi (%) | | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%) | | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (Persentase) | | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
| | | | Meningkatnya realisasi | Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (%) | | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | pembangunan industri | | | PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perdagangan | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Perkebunan) | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Terjaganya Tingkat Inflasi | | Indeks Perkembangan Harga (%) | Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera | |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) (%) | | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | | Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan (%) | | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| | | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Persentase Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga yang Terpasang (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Persentase BUMD/BLUD berpredikat sehat (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Indeks Perkembangan Harga (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%) | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%) | | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| | Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan | | | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban(Angka) | | |
| | | Terciptanya kerukunan umat beragama | | Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%) (%) | Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumattan | |
| | | | 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten (%) | | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | Efektifnya penyelesaian konflik di wilayah kecamatan | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Persentase Penyelesaian Konflik (Persentase) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%) | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
| | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
| | | | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak Jaya (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Supat (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Bayung Lencir (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sekayu (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi (%) | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial (%) | | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat | | Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin) | Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumattan | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) (Indeks) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase Pasangan Isbat Nikah masyarakat kurang mampu yang difasilitasi (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase Juara kafilah STQ/MTQ Tingkat Provinsi (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | Persentase Partisipasi Peserta STQ/MTQ Kafilah Kecamatan di Tingkat Kabupaten (%) | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal | | Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal (%) | Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumattan | |
| | | | | Persentase IKM yang bersertifikasi Halal (%) | | |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%) | | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| | | | | Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%) | | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (%) | | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas | | | Indeks Pelayanan Infrastruktur(Indeks) | | |
| | | Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten) | | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) | Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas | |
| | | | Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap (%) | | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | | | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat (%) | | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan (%) | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | | | ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | | Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan (%) | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | | Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ (%) | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | | Persentase Transportasi Yang Nyaman dan Laik Jalan (%) | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | | Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan (%) | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman | | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%) | Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas | |
| | | | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal) (%) | | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) | | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%) | | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak | | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) (%) | Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas | |
| | | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) | | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
| | | | Tertatanya Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki (%) | | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
| | Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing | | | Indeks Daya Saing Daerah(Angka) | | |
| | | Meningkatnya Inovasi Daerah | | Indeks Inovasi Daerah (Indeks) | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani | |
| | | | 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase) | | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | | | |
| | | | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) | | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | | 1. Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase) | | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase) | | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | | Rasio Kewirausahaan (Persentase) | Peningkatan peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi | |
| | | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Persentase pemuda yang bebas narkoba (%) | | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | | | Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina (%) | | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik (%) | | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%) | | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | Meningkatnya Pembangunan Desa | | Persentase Desa Mandiri (%) | Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas | |
| | | | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA |
| | | | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase) | | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | | *(06)* |
| | | | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase desa yang memiliki Bumdes (%) | | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu (%) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais (%) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Bayung Lencir (%) | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | Terbinanya Pemerintahan Desa | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | Persentase Penegakan Perda (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%) | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%) | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah(Indeks) | | |
| | | Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | | Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e) (TonCO2e) | Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%) | | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH (%) | | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase Luasan RTH yang dikelola (%) | | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
| | | | | Indeks Kualitas Lahan (Indeks) | | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan (%) | | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Persentase Penanganan sampah (%) | | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
| | | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai (%) | | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | Turunnya Potensi Risiko Bencana | | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) | Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | |
| | | | 1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%) (%) | | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
| | | | | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
| | | | | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
| | | | | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
| | | | 1) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran 2) Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%) | | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) | | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
| | | | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan (%) | | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah) | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | | (06) |
| | | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |

*Sumber: SIPD Kab. Muba, diolah*

## 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional serta strategi dan kebijakan pembangunan pusat dan provinsi.

4.2.1 Isu Strategis

Pengidentifikasian Isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.3/032/BAPPEDA/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Rancangan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagai pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**
**Isu Strategis**

| NO. | RPJPD KAB. MUBA TAHUN 2025-2045 | NO. | KEPALA/ WAKIL KEPALA DAERAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia | 1 | Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah |
| 2 | Bonus Demografi Kabupaten Musi Banyuasin | 2 | Pengentasan prevalensi stunting |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi lokal masih lambat | 3 | Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat masih rendah |
| 4 | Kualitas infrastruktur wilayah masih rendah | 4 | Penguatan infrastruktur untuk perekonomian dan digitalisasi pelayanan publik |
| 5 | Pembangunan belum berfokus pada pembangunan berkelanjutan | 5 | Pelestarian lingkungan dan penurunan risiko bencana |
| 6 | Belum terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif | 6 | Tata kelola pemerintahan yang bersih dan upaya penegakan hukum |
| 7 | Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan | 7 | Angka kemiskinan yang masih sangat tinggi |

*Sumber: RPJPD Kab Muba 2025-2045,SE Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Muba Tahun 2026, diolah*

Dari data pada tabel tersebut, maka isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi Masyarakat;
3. Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan dukungan infrastruktur untuk perekonomian;
4. Belum terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
5. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;
6. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya penanganan daerah risiko bencana.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 juga memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Visi Presiden Periode 2025 – 2029 yaitu " Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik/*Quick win*.

Visi pembangunan nasional pada tahun 2025-2029 disajikan pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.1.**
**VISI MISI PRESIDEN**




*Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029*

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang mewujudkan wujud implementasi langsung dari Asta Cita. Tahun 2026 merupakan tahun kedua transisi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029. RKP Tahun 2026 sebagai tahap kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi awal perwujudan fondasi transformasi, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

**Gambar 4.2.**
**Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan**




*Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029*

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap pertama yang menentukan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan sasaran Visi Indonesia Emas menuju 2045 yaitu "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dengan sasaran terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tecermin dalam lima sasaran visi yaitu (1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zaro Emission.

Adapun Tema RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif". Penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri dari 5 Direktif Presiden dan program-program lain yang konkrit, terukur dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Pangan dan Energi

- Swasembada Pangan, Energi dan Air (PN 2)
    - Optimalisasi BULOG
    - Pelaksanaan food estate
    - Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel
    - Energi terbarukan
    - Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

B. Ekonomi:

- Produktif (PN 1,4, 7 dan 8)
  - Pendidikan dan kesehatan
    a. Ekosisten Makan Bergizi Gratis
    b. Percepatan renovasi sekolah
    c. Sekolah unggulan
    d. Cek kesehatan
    e. Percepatan rumah sakit daerah
  - Deregulasi dan kepastian hukum
    a. Reformasi birokrasi
    b. Kemudahan berbisnis
    c. Ketertarikan investasi
  - Adopsi teknologi dan inovasi
    a. Transformasi digital riset dan inovasi
  - Pertahanan semesta
    a. Komponen cadangan
    b. Pemenuhan alutsista
    c. Penguatan kemampuan teritorial
  - Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi
- Inklusif (PN 3, 5 dan 6)
  - Percepatan pertumbuhan ekonomi
    a. Percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia
    b. Optimalisasi potensi SWF Danantara

- Percepatan pengentasan kemiskinan
  a. Data tunggal kemiskinan
  b. Digitalisasi bantuan
  c. 3 juta rumah
  d. 70.000 koperasi merah putih

Adapun Sasaran Makro Pembangunan Nasional tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan:
   - Pertumbuhan Ekonomi : 5,8-6,3 %
   - GNI per Capita : 5.870
   - Penurunan Intensitas Emisi GRK : 37,14%
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67
2. Penurunan Kemiskinan:
   - Tingkat Kemiskinan : 6,5-7,5 %
   - Kemiskinan Ekstrem : 0 %
   - Rasio Gini : 0,377-0,380
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas:
   - Indeks Modal Manusia : 0,57

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 juga memperhatikan strategi dan arah kebijakan provinsi yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Pada tahun 2026, Provinsi Sumatera Selatan memperoleh tantangan dan isu besar Pembangunan, sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;
5. Akses, kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;
6. Infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar belum optimal;
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
8. Penetapan target-target dari pusat bersifat imperatif;
9. Sumsel ditunjuk sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang tertuang dalam Proyek Strategis Nasional (PSN);
10. Bandara SMB II resmi kembali menyandang status Bandara Internasional.

Adapun tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 adalah **"Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan"** dengan indikasi sasaran pembangunan provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,8-6,3
2. PDRB Per Kapita (Rp juta) : 92,14
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 65,48-68,86
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) : 68,44

5. Indeks Modal Manusia (Poin) : 0,55
6. Tingkat Kemiskinan : 9,07-10,07
7. Rasio Gini (Poin) : 0,304-0,307

Adapun 7 (tujuh) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas;
2. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi an industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas;

7. Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal.

Tema Pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah **"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi"** yang selaras dengan arah kebijakan Pembangunan tahap I RPJMD Tahun 2025-2029 pada RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 yaitu: **"Penguatan Fondasi Transformasi"** yang berfokus pada membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ekonomi hijau serta penyediaan infrastruktur dasar dan tata Kelola pemerintah yang akuntabel. Pada tabel 4.5 berikut ini, dapat dilihat arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-20245 (Tahap I RPJMD tahun 2025-2029) dan Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**
**Keselarasan Arah Kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJPD dan Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah Kab. Muba Tahun 2025-2029**

| NO. | ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045 (TAHAP I RPJMD) | NO. | MISI KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendorong investasi dengan menguatkan kebijakan makroekonomi dan stabilitas keamanan daerah | 1 | Peningkatan peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi |
| 2 | Menyediakan infrastruktur dasar yang tangguh untuk dengan memanfaatkan potensi daerah | 2 | Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045 (TAHAP I RPJMD) | NO. | MISI KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| 3 | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dengan fokus utama pada peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang inklusif serta merata | 3 | Penguatan SDM melalui transformasi bidang pendidikan dan kesehatan |
| 4 | Mengembangkan ekonomi lokal melalui penguatan sektor primer dan kapasitas kelembagaan ekonomi serta iklim usaha yang kondusif. | 4 | Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera |
| 5 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | 5 | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani |
| 6 | Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan lingkungan | 6 | Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumattan |
| 7 | Penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan | 7 | Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan |

*Sumber: SE Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Muba Tahun 2026, diolah*

Dari tabel tersebut, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan pasar melalui digitalisasi ekonomi, peningkatan peran dunia usaha dan perguruan tinggi;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendorong konektivitas dan peningkatan pelayanan dasar;
3. Penguatan SDM pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif serta pemerataan sarana prasarana yang sesuai standar;
4. Pengembangan ekonomi lokal dan penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi pentahelix;

5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan berorientasi kepada pelayanan publik;
6. Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan;
7. Penguatan potensi masyarakat mendorong moderasi beragam dan kemandirian ekonomi berbasis keumatan.

Pada tabel berikut ini, dapat dilihat keselarasan Misi Presiden, Misi Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**
**Keselarasan Misi Nasional-Provinsi-Kab. Muba Tahun 2025-2029**

| NO. | MISI PRESIDEN (RPJMN 2025-2029) | NO. | MISI BUPATI MUBA (RPJMD 2025-2029) | NO. | MISI GUBERNUR SUMSEL (RPJMD 2025-2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 1 | Peningkatan peran dunia usaha, dunia industri dan perguruan tinggi | 1 | Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | | |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan pangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | 2 | Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas | 2 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan |
| 4 | Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas | 3 | Penguatan SDM melalui transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan | 3 | Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing |

| NO. | MISI PRESIDEN (RPJMN 2025-2029) | NO. | MISI BUPATI MUBA (RPJMD 2025-2029) | NO. | MISI GUBERNUR SUMSEL (RPJMD 2025-2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | 4 | Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 4 | Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | 5 | Rekonstruksi Sosial Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera | 5 | Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | 6 | Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani | 6 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 7 | Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keummatan | 7 | Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal |

*Sumber: SE Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Muba Tahun 2026, diolah*

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan, Isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dan mengusung tema Pembangunan yang diarahkan pada “Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi”, maka ditetapkanlah 5 (lima) Prioritas Daerah dan 15 (lima belas) Program Prioritas daerah dan 14 (empat belas) Proyek Prioritas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 sebagai berikut:

**PRIORITAS DAERAH 1 (PD 1) :**
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS UNGGULAN SERTA DIGITALISASI USAHA EKONOMI UNTUK MEMPERKUAT PASAR

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 1.1 | Peningkatan produktivitas serta kualitas komoditas untuk Pemenuhan kebutuhan domestik dan hilirisasi. | 1. Digitalisasi dan Klinik Usaha;<br>2. Bantuan Modal Usaha UMK, Petani dan Nelayan;<br>3. Program bantuan bibit, pertanian, perkebunan dan perikanan. |
| PPD 1.2 | Optimalisasi pengembangan UMKM, IKM dan BUMDes. | |
| PPD 1.3 | Peningkatan investasi dengan menjaga iklim investasi yang Kondusif serta promosi investasi yang efektif dan tepat sasaran. | |
| PPD 1.4 | Pengendalian Inflasi. | |

**PRIORITAS DAERAH 2 (PD 2) :**
MENURUNKAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PENGURANGAN BEBAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 2.1 | Penguatan perlindungan sosial. | 1. Program Keluarga Maju untuk Pengentasan Kemiskinan;<br>2. Santunan Kematian dan Fakir Miskin. |
| PPD 2.2 | Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. | |
| PPD 2.3 | Pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. | |

**PRIORITAS DAERAH 3 (PD 3) :**
PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR, INFRASTRUKTUR KAWASAN SENTRA PRODUKSI DAN PUSAT PERTUMBUHAN SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN SAMPAI KE DESA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 3.1 | Peningkatan konektivitas pada kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan. | 1. Infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan;<br>2. Mengupayakan perluasan jaringan gas rumah tangga;<br>3. Tambahan satu desa menjadi 1,5 Miliar untuk kemandirian desa; |
| PPD 3.2 | Peningkatan dan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar kawasan Permukiman. | |
| PPD 3.3 | Peningkatan dan pengamanan sumber daya air. | |

**PRIORITAS DAERAH 4 (PD 4) :**
MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 4.1 | Peningkatan pelayanan Pendidikan yang berkualitas. | 1. Optimalisasi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;<br>2. Sekolah Gratis Negeri dan Swasta;<br>3. Peningkatan Gaji Guru Swasta (Madrasah dan Pesantren);<br>4. Bantuan Sayang Anak (BASANAK). |
| PPD 4.2 | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. | |
| PPD 4.3 | Peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga Kerja lokal. | |

**PRIORITAS DAERAH 5 (PD 5) :**
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN EFEKTIF BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

| PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD) | | PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) |
|---|---|---|
| PPD 5.1 | Peningkatan pelayanan publik berbasis digital. | 1. Akta, KK, dan KTP Gratis sampai di rumah;<br>2. Sikat Korupsi menuju pemerintahan bersih. |
| PPD 5.2 | Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. | |

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyeleraskan baik tema pembangunan maupun indikator dan prioritas daerah dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Adapun keselarasan tema pembangunan tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.3.**
**Keselarasan Tema Pembangunan Tahun 2026**




*Sumber: RKP, Ranwal RKPD Prov Sumsel, SE Arah Kebijakan Pemb. Kab. Muba Tahun 2026*

Adapun keselarasan indikator makro Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin-Provinsi Sumatera Selatan dengan Nasional dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**
**Keselarasan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin-Provinsi Sumatera Selatan-Nasional Tahun 2026**

| No | INDIKATOR MAKRO | TARGET KAB. MUBA | TARGET PROVINSI SUMSEL | TARGET NASIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,0-5,2 | 5,8-6,3 | 5,8-6,3 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,0-12,5 | 9,0-10,07 | 6,5-7,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,03 | 3,75-3,85 | - |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 73,07 | 0,55 (IMM) | 0,57 (IMM) |

| No | INDIKATOR MAKRO | TARGET KAB. MUBA | TARGET PROVINSI SUMSEL | TARGET NASIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Pendapatan Per Kapita (ADHB) (Rp.Juta) | 160,00-167,00 | 92,14 | 5.870 (GNI) |
| 6 | Rasio Gini (Rasio) | 0,280-0,295 | 0,304-0,307 | 0,377-0,380 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 64,99 | 68,44 | 76,67 |
| 8 | Penurunan Emisi GRK Tahunan (Ton Co2 Eq) | 2.012.452,45 | 65,48-68,86 | 37,14 |

*Sumber: RKP, Ranwal RKPD Prov. Sumsel, RPJMD Kab. Muba, diolah*

**Tabel 4.9**
**Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**
**Dalam RPJMD Kab Muba-RPJMD Prov. Sumsel – RPJM Nasional**
**Tahun 2025-2029**

| No. | Tujuan | RPJMD Kab. Muba 2025-2029 | RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029 | RPJM Nasional 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| | | Sasaran/Indikator | Sasaran/Indikator | Sasaran/Indikator |
| 1 | Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas | **1 Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik** | **1 Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi** | **1 Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat** |
| | | a Indeks SPBE (Angka) | | a Global Power Index (Angka) |
| | | b Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) | | |
| | | | | |
| | | **2 Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan beretika serta bebas dari KKN** | | |
| | | a Survey Penilaian Integritas (Angka) | | |
| | | | | |
| | | **3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | **2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | |
| | | a Indeks Pelayanan Publik (Angka) | | |

| No. | Tujuan | RPJMD Kab. Muba 2025-2029<br>Sasaran/Indikator | RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029<br>Sasaran/Indikator | RPJM Nasional 2025-2029<br>Sasaran/Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | **1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat** | **1 Meningkatnya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan Sumber Daya Manusia** | **1 Daya saing Sumber Daya Manusia meningkat** |
| | | a Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | | a Indeks Modal Manusia (Indeks) |
| | | b Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | |
| | | c Angka Literasi/Numerasi (%) | | |
| | | | **2 Meningkatnya pembangunan kebudayaan** | |
| | | | | |
| | | **2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat** | **3 Meningkatnya derajat kesehatan** | |
| | | a Usia Harapan Hidup (Tahun) | | |
| | | b Prevalensi Stunting (%) | | |
| | | | | |
| 3 | Menurunkan angka kemiskinan | **1 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat** | **1 Meningkatnya upaya perlindungan sosial** | **1 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang** |
| | | a Rasio Gini (angka) | | a Tingkat kemiskinan (%) |
| | | | | b Kemiskinan Ekstrem (%) |
| | | **2 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka** | **1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha** | c Rasio Gini (angka) |
| | | a Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | d Kontribusi PDRB KTI (%) |
| | | | | |
| | | **3 Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan pangan masyarakat** | **1 Meningkatnya pembangunan sektor kepemudaan** | |
| | | a Indeks Pembangunan Keluarga (angka) | | |
| | | b Indeks Ketahanan Pangan (Angka) | **2 Meningkatnya ketahanan pangan, energi dan air** | |
| | | c Indeks Ketimpangan Gender (Angka) | | |

| No. | Tujuan | RPJMD Kab. Muba 2025-2029<br>Sasaran/Indikator | RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029<br>Sasaran/Indikator | RPJM Nasional 2025-2029<br>Sasaran/Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | **3 Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak** | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah | **1 Meningkatnya pendapatan masyarakat** | | **1 Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju** |
| | | a PDRB per kapita (Rp Juta)(ADHB) | | a Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) |
| | | | | b GNI per kapita |
| | | **2 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan** | **1 Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah** | c Kontribusi PDB Maritim (%) |
| | | a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) | | d Kontribusi PDB Manufaktur (%) |
| | | b Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | **2 Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)** | |
| | | c Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | | |
| | | | | |
| | | **3 Terjaganya tingkat inflasi** | **1 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah** | |
| | | a Indeks Perkembangan Harga (%) | | |
| | | | | |
| 5 | Mewujudkan masyarakat religius, rukun dan harmonis yang didukung sumber daya ekonomi dan keummatan | **1 Terciptanya kerukunan umat beragama** | **1 Meningkatnya ketentraman di masyarakat** | |
| | | a Penyelesaian konflik antar umat beragama (%) | | |
| | | | | |

| No. | Tujuan | RPJMD Kab. Muba 2025-2029<br>Sasaran/Indikator | RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029<br>Sasaran/Indikator | RPJM Nasional 2025-2029<br>Sasaran/Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | **2 Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat** | | |
| | | a Indeks Zakat Nasional (Poin) | | |
| | | | | |
| | | **3 Meningkatnya Usaha Mikro/IKM yang menerapkan standar halal** | | |
| | | a Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi halal (%) | | |
| | | b Persentase IKM yang bersertifikasi halal (%) | | |
| | | | | |
| 6 | Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas | **1 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)** | **1 Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas** | |
| | | a Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) | | |
| | | | | |
| | | **2 Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman** | **2 Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi** | |
| | | a Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum (%) | | |
| | | b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | | |
| | | | | |
| | | **3 Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak** | **3 Meningkatnya hunian dan permukiman yang layak** | |
| | | a Rumah tangga dengan akses hunian layak (%) | | |
| | | | | |
| 7 | Mewujudkan Musi Banyuasin yang inovatif dan berdaya saing | **1 Meningkatnya inovasi daerah** | | |
| | | a Indeks Inovasi Daerah (Angka) | | |

| No. | Tujuan | RPJMD Kab. Muba 2025-2029 | RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029 | RPJM Nasional 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| | | Sasaran/Indikator | Sasaran/Indikator | Sasaran/Indikator |
| | | | | |
| | | **2 Meningkatnya kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital** | | |
| | | a Rasio kewirausahaan (%) | | |
| | | b Indeks masyarakat digital (Indeks) | | |
| | | | | |
| | | **3 Meningkatnya pembangunan desa** | | |
| | | a Persentase desa mandiri (%) | | |
| | | | | |
| 8 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | **1 Turunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | **1 Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca** | **1 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission** |
| | | a Kontribusi penurunan intensitas emisi GRK (Ton CO2-e-) | | a Penurunan intensitas emisi GRK (%) |
| | | | | b Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) |
| | | **2 Turunnya potensi risiko bencana** | **2 Meningkatnya upaya penanggulangan bencana** | |
| | | a Indeks risiko bencana (angka) | | |

*Sumber: SIPD Kab. Muba, diolah*

Sebagai upaya pencapaian target dan sasaran maka Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dapat digambarkan pada matriks program prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**
**Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas RKPD Tahun 2026**

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 642.385.000 | 1.506.575.219.526 |
| | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 2.370.176.000 | |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 247.530.000 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | 193.297.810 | |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.451.536.010 | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 494.468.150 | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 92.612.547.571 | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 861.452.250 | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9.409.102.900 | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 63.773.140.300 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 212.568.900 | |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 151.781.250 | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 34.351.746.620 | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 978.028.500 | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 2.267.871.500 | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.399.572.100 | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 291.677.668 | |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.154.326.570 | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 53.998.822 | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 1.560.150.800 | |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 787.270.750 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 165.000.000 | |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.939.243.100 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan | 606.132.393.339 | |
| | | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 16.733.969.754 | |
| | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 653.466.408.702 | |
| | | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 181.900.000 | |
| | | Kecamatan Sekayu | 3.777.174.560 | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 568.810.000 | |
| | Program Perlindungan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 185.246.600 | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan | 160.444.000 | |
| | | | | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 419.274.500 | 183.408.096.249 |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.781.494.000 | |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 380.725.500 | |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 356.782.800 | |
| | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Dinas Perikanan | 1.087.744.500 | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan | 2.242.792.198 | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan | 2.706.678.866 | |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 213.911.000 | |
| | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2.905.753.316 | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 710.764.000 | |
| | Program Pengembangan Umkm | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3.373.859.000 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 5.176.276.696 | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 1.338.783.860 | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 311.216.570 | |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Perikanan | 1.599.550.650 | |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 300.042.000 | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 7.543.837.977 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 9.948.242.359 | |
| | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16.576.539.951 | |
| | | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 16.676.693.055 | |
| | | Dinas Perikanan | 14.228.052.916 | |
| | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 53.648.197.191 | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 12.179.008.392 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 17.272.061.431 | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 6.932.842.339 | |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 903.465.455 | |
| | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 338.069.144 | |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Dinas Perkebunan | 494.399.383 | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 737.489.000 | |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 754.012.000 | |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 269.536.200 | |
| | | | | |
| Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 438.033.000 | 141.648.280.919 |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 4.845.821.896 | |
| | Program Pembangunan | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 555.243.800 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Kawasan Transmigrasi | | | |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 490.000.000 | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial | 1.641.955.250 | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 1.001.163.000 | |
| | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial | 1.010.346.000 | |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | 100.449.000 | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 720.623.450 | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | 224.016.519 | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | 1.156.495.000 | |
| | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial | 200.000.000 | |
| | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 168.462.000 | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan | 2.789.903.795 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Ketahanan Pangan | 9.880.678.725 | |
| | | Dinas Sosial | 14.407.713.212 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 13.249.020.372 | |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 382.917.500 | |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial | 86.913.614.200 | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial | 1.471.824.200 | |
| | | | | |
| Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3.370.000.000 | 667.582.141.556 |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Dinas Lingkungan Hidup | 200.316.000 | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | 79.926.000 | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.971.326.014 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 450.000.000 | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 66.118.220.800 | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8.057.755.200 | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 18.500.400.000 | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 12.308.005.000 | |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dinas Lingkungan Hidup | 17.708.059.940 | |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan | 1.877.900.000 | |
| | Program Pengelolaan Penerbangan | Dinas Perhubungan | 63.846.000 | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | 15.433.409.649 | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 20.120.000.000 | |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.500.000.000 | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8.285.000.000 | |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | 1.900.472.935 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup | 100.000.000 | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 63.654.760.000 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.645.199.145 | |
| | | Dinas Lingkungan Hidup | 40.828.655.033 | |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 40.920.536.336 | |
| | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 15.474.479.518 | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 236.891.777.987 | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 39.170.337.000 | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.420.000.000 | |
| | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3.031.759.000 | |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 23.400.000.000 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 100.000.000 | |
| | | | | |
| Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 6.535.016.433 | 1.273.289.902.774 |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Sekretariat DPRD | 31.988.851.095 | |
| | Program Kepegawaian Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 8.835.959.384 | |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.751.227.000 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Sekayu | 234.759.600 | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.388.672.520 | |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 54.427.210 | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3.343.537.366 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kelurahan Serasan Jaya | 9.489.753.726 | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Sekayu | 581.944.000 | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 215.776.000 | |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 2.785.006.076 | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 3.000.000.000 | |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah | 25.394.520.066 | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 919.829.408 | |
| | Program Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 374.165.208 | |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.721.968.550 | |
| | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.226.361.750 | |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.794.888.416 | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8.089.300.000 | |
| | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 610.562.038 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah | 1.938.000.000 | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 63.634.800 | |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.617.061.382 | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.498.578.355 | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 592.654.334.000 | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 6.403.372.000 | |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100.217.500 | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 626.183.797 | |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 93.893.900 | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.743.946.036 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 14.362.519.559 | |
| | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 9.171.446.698 | |
| | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 44.000.975.220 | |
| | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah | 58.270.377.930 | |

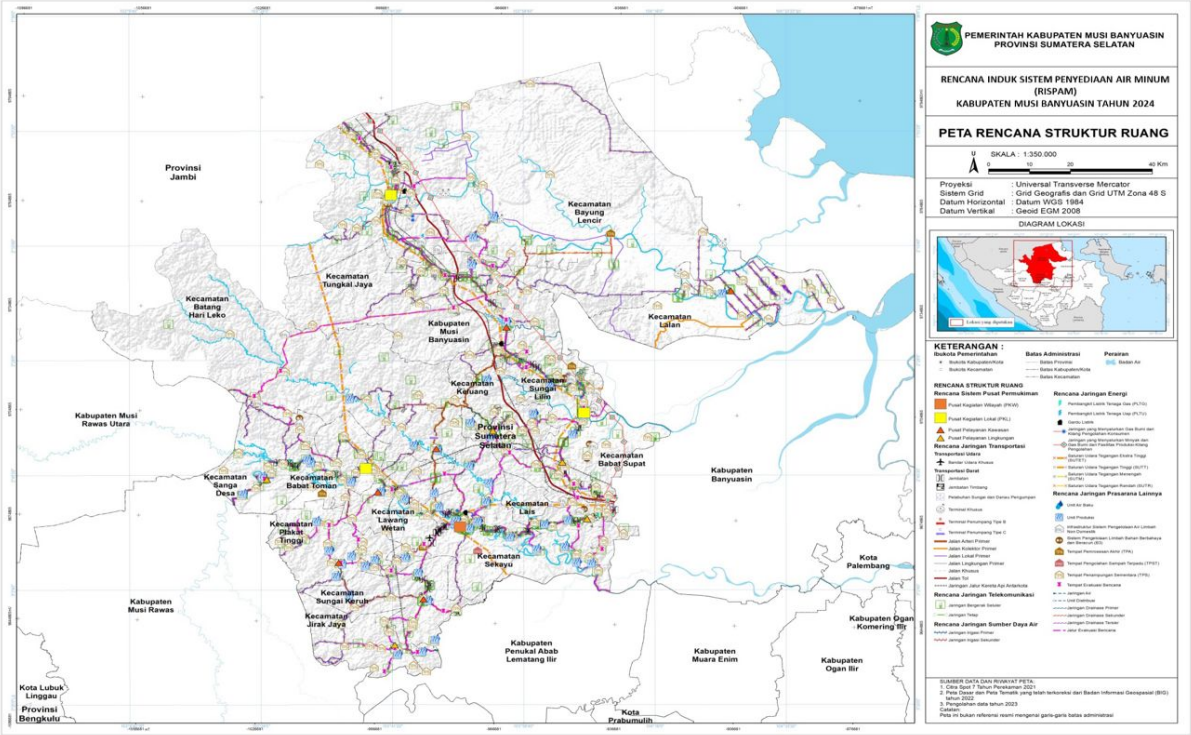
| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 21.287.629.395 | |
| | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 15.281.800.423 | |
| | | Dinas Kesehatan | 970.623.000 | |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 13.104.988.925 | |
| | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 10.103.082.209 | |
| | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8.942.570.670 | |
| | | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 12.859.603.302 | |
| | | Dinas Perhubungan | 15.729.733.276 | |
| | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 12.478.991.847 | |
| | | Inspektorat | 34.006.734.402 | |
| | | Kecamatan Sekayu | 75.358.286.377 | |
| | | Sekretariat Daerah | 105.466.921.525 | |
| | | Sekretariat DPRD | 68.391.984.985 | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan Sekayu | 10.813.461.978 | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat | 5.586.720.769 | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.054.000.000 | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika | 356.495.000 | |

| Prioritas Daerah RKPD | Program Prioritas | OPD | Alokasi Pendanaan (Rp) | Total Pendanaan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Sekayu | 342.821.000 | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah | 2.497.924.555 | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.038.285.218 | |
| | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 87.164.850 | |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Inspektorat | 2.506.121.000 | |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.142.891.045 | |
| **TOTAL** | | | **3.772.503.641.024** | **3.772.503.641.024** |

Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki 1 PKW (Sekayu) dan 2 PKL (Bayung Lencir dan Sungai Lilin) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perekonomian terbesar kedua setelah Palembang (diukur dari PDRB ADHB) dan diperkirakan semakin berkembang karena berada dalam Koridor Ekonomi Sumatera. Musi Banyuasin memiliki banyak komoditas unggulan, diantaranya pertambangan, karet, perikanan, palawija, padi, dan peternakan sapi. Secara sektoral, sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang banyak juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan serta penyediaan tempat tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Peningkatan produktivitas pertanian khususnya melalui pengelolaan jaringan irigasi.
- Penurunan angka kemiskinan.

**Gambar 4.4.**
**Peta Kabupaten Musi Banyuasin**




Sejak tahun 2018, di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan sistem PATEN sebagai bentuk implementasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan sektor komoditi utama yaitu perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain dengan membangun pabrik pengolahan aspal karet lateks .

Sebagai bahan bakunya diambil dari petani karet di kabupaten Musi Banyuasin atau daerah sekitarnya. Pada tahun 2020, pabrik aspal karet Musi Banyuasin resmi beroperasi. Pabrik ini dapat memproduksi dari sebesar 155.303 ton karet akan dihasilkan 636 ribu ton lateks serta 318 ribu ton lateks pekat, maka potensi serapan lokalnya adalah 4,1 juta ton aspal karet. Maka dari itu, Kabupaten Musi Banyuasin mampu memenuhi kebutuhan aspal karet nasional yang diperkirakan saat ini sebesar 1,6 juta ton. Melalui deversifikasi dan hilirisasi komoditas karet petani karet dapat memiliki peluang dan pilihan dalam pengiolahan komoditi karet.

Pada Perpres No.109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan sebagai lokasi pengembangan teknologi biohidrokarbon berbasis kelapasawit (pengembangan teknologi produksi ivo dan bensin sawit dengan katalis merah putih yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat). Program strategis Nasional ini terintegrasi dengan program peremajaan sawit rakyat yang dimulai dan diresmikan presiden jokowidodo pada 2017 sampai saat ini sudah tertanam 15.000 ha dan 5.000 ha yang sudah panen. Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan ITB memprakarsai produksi bioenergi berbasis biohydrocarbon menggunakan katalis merah putih. MUBA ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan co-processing sebesar 20% di pertamina plaju untuk menghasilkan bensin bio-hidro karbon (awal tahun 2021).

Diproyeksikan Musi Banyuasin mempu berkontribusi terhadap kebutuhan bioenergi nasional sebesar 1.79% di tahun 2030. Saat ini Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan kelembagaan rantai pasok yaitu mendirikan Kerjasama TUM (Total Usaha Mandiri) yang terdiri dari Private, KUD dan BUMD) yang saat ini sudah melibatkan 24 KUD.

Dengan adanya rencana Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) –Tempino – Jambi melewati kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 132 Km, melewati 6 Kecamatan dan 27 desa. Rencana jalan tol ini di integrasikan dengan kawasan segitiga emas (*golden triangle*) kabupaten musi banyuasin merupakan kawasan strategis pendukung pertumbuhan ekonomi dan merupakan ruas jalan penghubung ke pusat kota sekayu serta ke kabupaten sekitar (kab.Pali, kab.Musirawas, dan provinsi Jambi). Total investasi infrastruktur jalan strategis pada segitiga emas adalah sebesar 457,57 miliyar .

Tujuan pembangunan kawasan industri adalah mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industry dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. **Faktor pendukung dalam pembangunan kawasan industri antara lain :**

1. Berlimpah komoditas perkebunan dan mendorong industry pengolahan hasil perkebunan dalam satu Kawasan

2. Memaksimalkan potensi sda (migas dan batubara) dan perkebunan
3. Meminimalisir dampak lingkungan dari pengembangan industri
4. Rencana lokasi kawasan industri terletak di Kecamatan Sungai Lilin.

Tahapan yang sudah dan akan dilakukan untuk pembangunan kawasan industri adalah :

Tahun 2020 : Penyusunan *Feasibility Study*

Tahun 2021 :Penyusunan Master Plan, Penyiapan Skema Pembiayaan, Penunjukan PT. Bina Karya sebagai Pemrakarsa Pembangunan Kawasan, Penyusunan Masterplan Kawasan Industri.

Tahun 2022 : direncanakan revisi RTRW untuk memasukkan lokasi kawasan industri di RTRW 2016- 2036.

Tahun 2023 : direncanakan revisi RTRW untuk memasukkan lokasi kawasan industri di RTRW 2016- 2036

Tahun 2024 : proses revisi RTRW

Tahun 2025 : proses revisi RTRW

Kabupaten Musi Banyuasin telah merintis proses pengelolaan data geospasial pada tahun 2018 melalui MoU Inisiatif Satu Peta di Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan WRI Indonesia yang kemudian disusul dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Badan Informasi Geospasial dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta. Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah, dikeluarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 57 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 661/KPTS-BAPPEDA/2018 tentang Simpul Jaringan

Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kedua peraturan ini menjadi landasan hukum implementasi Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Musi Banyuasin.

Seiring dengan tuntutan percepatan dan ketepatan perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pengelolaan data geospasial dengan melibatkan 17 OPD teknis dan telah menghasilkan 225 data geospasial yang 55 diantaranya telah tersedia secara online dan dapat diakses oleh publik. Kami tentu belum berpuas diri, dalam rangka meningkatkan produksi data geospasial, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong peningkatan kapasitas SDM yang didampingi oleh ketersediaan teknologi melalui kebijakan anggaran data geospasial yang porsinya meningkat tiap tahun. Data geospasial yang dihasilkan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga proses *advice planning*.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang menyusun mekanisme integrasi antara Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Integrasi kedua kebijakan ini diharapkan dapat memperkaya ketersediaan data baik tabular maupun geospasial di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan memberikan sumbangsih data secara nasional.

Untuk mencapai masyarakat Musi Banyuasin sehat berkualitas ada beberapa tujuan dan sasaran dalam RPJMD seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan**
**Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Awal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Prevelensi Stunting pada balita | 16,5% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8,5% |
| | | Angka Kematian Ibu | 76/100000 KH | 75/100000 KH | 74/100000 KH | 73/100000 KH | 72/100000 KH | 71/100000KH | 70/100000 KH |
| | | Angka Kematian bayi | 7/1000KH | 7/1000Kh | 6/1000Kh | 6/1000Kh | 5/1000Kh | 4/1000Kh | 4/1000Kh |
| | | Capaian Kabupaten Kota Sehat | Wiwerda | Wistara | Wistara | Wistara | Wistara | Wistara Paripurna | Wistara paripurna |
| | | Indeks keluarga Sehat | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.58 | 0.6 |
| | | Cakupan Penemuan TB | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Angka Keberhasilan Pengobatan TB | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| **Meningkatnya sistim Akuntabilitas Kinerja** | **Terlaksananya Sistim Akuntabilitas Kinerja** | **Predikat Penguatan Sistim Akuntabilitas** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **DIHAPUS** | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Muba*

Program pengendalian Tuberkulosis, HIV AIDS dan Malaria memang tidak disebutkan secara khusus. Namun sudah ada dalam tujuan Kabupaten berupa meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dan pelayanan publik dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan sasaran berupa meningkatnya angka Harapan Hidup. Indikator kinerja dari Angka Harapan hidup salah satunya adalah angka Kematian, prevelensi stunting dan indeks keluarga sehat. seperti penyakit Tuberkulosis, HIV AIDS dan Malaria sebagai penyakit menular merupakan salah satu penyebab stunting, penyebab kematian dan ada dalam salah satu indikator dari Indeks Keluarga Sehat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Tuerkulosis, HIV AIDS dan Malaria) di Kabupaten Musi Banyuasin sebenarnya memang cukup strategis dan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan Kesehatan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029.

Program Pengendalian Tuberkulosis, HIV AIDS dan Malaria tercantum sebagai bagian dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dirincikan dalam sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang berisiko terinfeksi HIV AIDS dan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Integrasi Program Tuberkulosis, HIV AIDS dan Malaria ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut untuk memastikan adanya dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pengalokasian anggaran yang memadai yang akan digunakan untuk pembiayaan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis, HIV AIDS dan Malaria di Kabupaten Musi Banyuasin.

Perencanaan pembangunan Musi Banyuasin Tahun 2026 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan :

1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2026 dan RPJMN 2025-2029 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
2. Mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan rencana target capaian Tahun 2026;
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
5. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politk, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Arah Kebijakan Pendanaan dan Kebijakan Belanja APBD Kab. Muba ***"Money Follow Program"*** diprioritaskan untuk :

1. Pos Belanja Wajib dan Mengikat (Belanja Pegawai / Gaji);
2. Belanja wajib berdasar Undang-Undang (Pendidikan, dana desa dan infrastruktur);
3. Belanja dalam rangka pencapaian prioritas RKPD 2026;
4. Belanja dalam penurunan angka kemiskinan, stunting dan pemulihan ekonomi*;*
5. Belanja untuk kepentingan publik, kepentingan yang luas dan strategis.

Pada tabel dibawah ini, dijelaskan konsistensi sasaran, indikator kinerja dari prioritas daerah tahun 2026 dan RPJMD tahun pelaksanaannya:

**Tabel 4.12**

**KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026**

**DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | **Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan** | | | | **Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan** | | | |
| 1 | | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 100 | | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 100 |
| | **Terciptanya kerukunan umat beragama** | | | | **Terciptanya kerukunan umat beragama** | | | |
| 1 | Terciptanya kerukunan umat beragama | Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%) | % | 75 | Terciptanya kerukunan umat beragama | Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%) | % | 75 |
| | **Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat** | | | | **Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat** | | | |
| 1 | Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat | Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) | Indeks | 0 | Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat | Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) | Indeks | 0 |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | **Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal** | | | | **Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal** | | | |
| 1 | Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal | Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal | % | 2,74 | Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal | Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal | % | 2,74 |
| 2 | Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal | Persentase IKM yang bersertifikasi Halal | % | 58 | Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal | Persentase IKM yang bersertifikasi Halal | % | 58 |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | | | | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | | | |
| 1 | | Tingkat Kemiskinan | % | 12.0-12.5 | | Tingkat Kemiskinan | % | 12.0-12.5 |
| | **Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat** | | | | **Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat** | | | |
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 63,97 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 63,97 |
| 2 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | | 79,5 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | | 79,5 |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 3 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,57 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,57 |
| | **Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat** | | | | **Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat** | | | |
| 1 | Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat | Rasio Gini | Indeks | 0.280-0.295 | Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat | Rasio Gini | Indeks | 0.280-0.295 |
| | **Menurunnya tingkat pengangguran terbuka** | | | | **Menurunnya tingkat pengangguran terbuka** | | | |
| 1 | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,03 | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,03 |
| | **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** | | | | **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** | | | |
| 1 | | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,07 | | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,07 |
| | **Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** | | | | **Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,09 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,09 |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,69 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,69 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Angka Literasi/Numerasi | % | 76,83 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Angka Literasi/Numerasi | % | 76,83 |
| | **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** | | | | **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Prevalensi Stunting (%) | % | 12 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Prevalensi Stunting (%) | % | 12 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 74,5 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 74,5 |
| | **Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah** | | | | **Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah** | | | |
| 1 | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.0-5.2 | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.0-5.2 |
| | **Meningkatnya pendapatan masyarakat** | | | | **Meningkatnya pendapatan masyarakat** | | | |
| 1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | PDB per kapita | Rp | 160000000 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | PDB per kapita | Rp | 160000000 |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | **Meningkatnya produktivitas sektor unggulan** | | | | **Meningkatnya produktivitas sektor unggulan** | | | |
| 1 | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 0,24 | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 0,24 |
| 2 | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | % | 12,35 | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | % | 12,35 |
| 3 | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | % | 12,45 | Meningkatnya produktivitas sektor unggulan | Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | % | 12,45 |
| | **Terjaganya Tingkat Inflasi** | | | | **Terjaganya Tingkat Inflasi** | | | |
| 1 | Terjaganya Tingkat Inflasi | Tingkat Inflasi | (%) | 1,97 | Terjaganya Tingkat Inflasi | Tingkat Inflasi | (%) | 1,97 |
| | **Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas** | | | | **Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas** | | | |
| 1 | | Indeks Pelayanan Infrastruktur | Indeks | 85 | | Indeks Pelayanan Infrastruktur | Indeks | 85 |
| | **Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)** | | | | **Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)** | | | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten) | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | % | 67,05 | Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten) | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | % | 67,05 |
| | **Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman** | | | | **Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman** | | | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 100 | Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 2,5 | Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 2,5 |
| | **Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak** | | | | **Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak** | | | |
| 1 | Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) | % | 72,98 | Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) | % | 72,98 |
| | **Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing** | | | | **Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing** | | | |
| 1 | | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,6 | | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,6 |
| | **Meningkatnya Inovasi Daerah** | | | | **Meningkatnya Inovasi Daerah** | | | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 45,02 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 45,02 |
| | **Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital** | | | | **Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital** | | | |
| 1 | Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 5,70 | Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 5,70 |
| 2 | Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | Indeks | 45,27 | Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | Indeks | 45,27 |
| | **Meningkatnya Pembangunan Desa** | | | | **Meningkatnya Pembangunan Desa** | | | |
| 1 | Meningkatnya Pembangunan Desa | Persentase Desa Mandiri | % | 54,59 | Meningkatnya Pembangunan Desa | Persentase Desa Mandiri | % | 54,59 |
| | **Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.** | | | | **Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.** | | | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | | Indeks Reformasi Birokrasi | | 74,02 | | Indeks Reformasi Birokrasi | | 74,02 |
| 2 | | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | 70 | | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | |
| | **Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik** | | | | **Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik** | | | |
| 1 | Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,80 | Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,80 |
| | **Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN** | | | | **Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN** | | | |
| 1 | Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN | Survey Penilaian Integritas | Nilai | 66,41 | Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN | Survey Penilaian Integritas | Nilai | 66,41 |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | | | | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,63 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,63 |
| | **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | | | | **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | | | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 64,69 | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 64,69 |
| | **Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | | | | **Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | | | |
| 1 | Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e) | TonCO2e | 2012452,45 | Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e) | TonCO2e | 2012452,45 |
| | **Turunnya Potensi Risiko Bencana** | | | | **Turunnya Potensi Risiko Bencana** | | | |
| 1 | Turunnya Potensi Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 108,45 | Turunnya Potensi Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 108,45 |

*Sumber: SIPD, diolah*

Dalam rangka penyelarasan antara pusat dan daerah maka Penyusunan Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 telah disinkronkan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2026 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2026**

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV SUMSEL TAHUN 2026 | ALOKASI PAGU PADA RKPD 2026 (Rp) | PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 | ALOKASI PAGU PADA RKPD 2026 (Rp) | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas | 1.114.895.515.166 | tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada pelayanan publik | 20.751.353.128 | Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) |
| | | | | 1.109.030.003.981 | Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan |
| 2 | Pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan | 728.303.027.021 | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | 628.360.111.772 | Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi |
| | | | | 242.626.425.566 | Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV SUMSEL TAHUN 2026 | ALOKASI PAGU PADA RKPD 2026 (Rp) | PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 | ALOKASI PAGU PADA RKPD 2026 (Rp) | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas | 1.484.198.521.554 | Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia | 1.511.203.218.074 | Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas |
| 4 | Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi an industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat | 107.315.751.835 | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | 65.127.891.624 | Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri |
| 5 | Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru | 128.321.558.560 | | 118.906.388.422 | Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru |
| 6 | Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan | 121.638.520.901 | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | 76.498.248.457 | Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur |
| 7 | Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal | 87.830.745.987 | | | |
| **TOTAL** | | **3.772.503.641.024** | | **3.772.503.641.024** | |

*Sumber: SIPD, diolah*

Dari tabel rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan pendukung prioritas nasional di atas, dapat diidentifikasi pendanaan prioritas daerah RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagai berikut

**Tabel 4.14**
**Pendanaan Prioritas Daerah RKPD Kabupaten Musi Banyuasin**
**Tahun 2026**

| PRIORITAS | URAIAN | ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD (Rp) | % TERHADAP RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada pelayanan publik | 1.273.289.902.774 | 33,75 |
| 2 | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur Kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan Pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | 667.582.141.556 | 17,70 |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia | 1.506.575.219.526 | 39,94 |
| 4 | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | 183.408.096.249 | 4,86 |
| 5 | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | 141.648.280.919 | 3,75 |
| **T O T A L** | | **3.772.503.641.024** | **100** |

*Sumber: SIPD, diolah*

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

***"Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, lima Prioritas Daerah Tahun 2026 menjadi koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2026"***

## 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.3 /032/SETDA/BAPPEDA/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Rancangan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 diarahkan untuk **"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi"** yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan tahap I RPJMD Tahun 2025-2029 pada RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 yaitu **"Penguatan Fondasi Transformasi"** yang berfokus pada membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ekonomi hijau serta penyediaan infrastruktur dasar dan tata Kelola pemerintah yang akuntabel, dengan prioritas daerah sebagai berikut :

1. **Prioritas Daerah 1**: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Unggulan serta Digitalisasi Usaha Ekonomi untuk Memperkuat Pasar;
2. **Prioritas Daerah 2**: Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Melalui Pengurangan Beban dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. **Prioritas Daerah 3**: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Kawasan Sentra Produksi dan Pusat Pertumbuhan serta Pemerataan Pembangunan Sampai ke Desa yang Berwawasan Lingkungan;
4. **Prioritas Daerah 4**: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
5. **Prioritas Daerah 5**: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan pasar melalui digitalisasi ekonomi, peningkatan peran dunia usaha dan perguruan tinggi;
2. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar untuk mendorong konektivitas dan peningkatan pelayanan dasar;
3. Penguatan SDM pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif serta pemerataan sarana prasarana yang sesuai standar;
4. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan melalui Peningkatan Kolaborasi dan Partisipasi Pentahelix;
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan berorientasi kepada pelayanan publik;

6. Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan hidup;
7. Penguatan potensi masyarakat mendorong moderasi beragama dan kemandirian ekonomi berbasis keummatan.

Disamping prioritas daerah yang telah tercantum dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026, terdapat juga target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berikut ini disampaikan capaian SPM Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 :

**Tabel 5.1**
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan**
**Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| **1.** | **Pendidikan Dasar** | | | | |
| | • Jumlah yang harus dilayani : | Jumlah total yang harus dilayani | Jumlah total yang terlayani | Yang belum terlayani | |
| | | **122.687** | **123.355** | **888** | **99,28%** |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Belum Tersedia | Persentase Capaian Mutu 100% |
| | 1. Angka Partisipasi Kasar | 100 | 105,66 | -5,66 | 100,00% |
| | 2. Angka Partisipasi Sekolah | 100 | 99,55 | 0,45 | 99,55% |
| | 3. Angka Partisipasi Murni | 100 | 92,7 | 7,3 | 92,70% |
| | 4. Kemampuan Literasi | 100 | 62,97 | 37,03 | 62,97% |
| | 5. Kemampuan Numerasi | 100 | 57,74 | 42,26 | 57,74% |

| NO | INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| | 6. Perbedaan Skor Literasi | 100 | 35,4 | 64,6 | 35,4 % |
| | 7. Perbedaan Skor Numerasi | 100 | 29,7 | 70,3 | 29,7% |
| | 8. Indeks iklim keamanan | 100 | 72,62 | 27,38 | 72,62% |
| | 9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas | 100 | 55,27 | 44,73 | 55,27% |
| | 10. Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 50 | 50 | 50% |
| | 11. Indeks distribusi guru | 10 | 37 | 63 | 37 % |
| | 12. Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 84,75 | 15,25 | 84,75% |
| | 13. Proporsi PTK penggerak | 100 | 19,89 | 80,11 | 19,89% |
| **2.** | **Pendidikan Dasar SMP** | | | | |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Belum Tersedia | Persentase Capaian Mutu 100% |
| | 1. Angka Partisipasi Kasar | 100 | 106,24 | -6,24 | 100,00 % |
| | 2. Angka Partisipasi Sekolah | 100 | 98,3 | 1,7 | 98,3 % |
| | 3. Angka Partisipasi Murni | 100 | 76,77 | 23,23 | 76,77 % |
| | 4. Kemampuan Literasi | 100 | 56,09 | 43,91 | 56,09 % |
| | 5. Kemampuan Numerasi | 100 | 54,74 | 45,26 | 54,74 % |
| | 6. Perbedaan Skor Literasi | 100 | 3 | 7 | 3 % |
| | 7. Perbedaan Skor Numerasi | 100 | 1,29 | 8,71 | 1,29 % |
| | 8. Indeks iklim keamanan | 100 | 67,9 | 32,1 | 67,9 % |
| | 9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas | 100 | 55,21 | 44,79 | 55,21 % |
| | 10. Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 50 | 50 | 50 % |

| NO | INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| | 11. Indeks distribusi guru | 100 | 34 | 66 | 34 % |
| | 12. Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 15,58 | 84,42 | 15,58 % |
| | 13. Proporsi PTK penggerak | 100 | 3,3 | 96,7 | 3,3 % |
| | 14. Pengalaman pelatihan guru | 100 | 29,2 | 70,8 | 29,20 % |
| **3.** | **Pendidikan Kesetaraan (Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan)** | | | | **86,34 %** |
| | • Jumlah yang harus dilayani : | Jumlah total yang harus dilayani | Jumlah total yang terlayani | Yang belum terlayani | |
| | | **2.400** | **2.106** | **294** | **88%** |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | Persentase capaian mutu 100% |
| | 1. Angka Partisipasi Kasar | 100 | 58,25 | 41,75 | 58,25 % |
| | 2. Angka Partisipasi Sekolah | 100 | 55,50 | 44,5 | 55,50 % |
| | 3. Angka Partisipasi Murni | 100 | 60,50 | 39,5 | 60,50 % |
| | 4. Kemampuan Literasi | 100 | 52,42 | 47,58 | 52,42 % |
| | 5. Kemampuan Numerasi | 100 | 28,57 | 71,43 | 28,57 % |
| | 6. Perbedaan Skor Literasi | 100 | 5,54 | 4,46 | 5,54 % |
| | 7. Perbedaan Skor Numerasi | 100 | 2,38 | 7,62 | 2,38 % |
| | 8. Indeks iklim keamanan | 100 | 65,14 | 34,86 | 65,14 % |
| | 9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas | 100 | 51,56 | 48,44 | 51,56 % |
| | 10. Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 0 | 100 | 0,00 % |
| | 11. Indeks distribusi guru | 10 | 0 | 10 | 0,00 % |

| NO | INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| | 12. Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 0 | 100 | 0,00 % |
| | 13. Proporsi PTK penggerak | 100 | 0 | 100 | 0,00 % |
| | 14. Pengalaman pelatihan guru | 100 | 27,5 | 72,5 | 27,50 % |
| **4 .** | **Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD)** | | | | |
| | Jumlah yang harus dilayani : | Jumlah total yang harus dilayani | Jumlah total yang terlayani | Yang belum terlayani | |
| | | **25.718** | **19.422** | **6.296** | **77,85 %** |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | Persentase capaian mutu 100% |
| | 1. Angka Partisipasi Sekolah | 100 | 83,48 | 16,52 | 83,48 % |
| | 2. Proporsi junlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B | 100 | 67,59 | 32,41 | 67,59 % |
| | 3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D4 | 100 | 68 | 32 | 68 % |
| | 4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD | 10 | 0,19 | 99,81 | 0,19 % |
| | 5. Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 50 | 50 | 50 % |
| | 6. Indeks distribusi guru | 100 | 32 | 68 | 32 % |
| | 7. Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 38,96 | 61,04 | 38,96 % |
| | 8. Proporsi PTK penggerak | 100 | 0,65 | 99,35 | 0,65 % |
| | 9. Pengalaman pelatihan guru | 100 | 0,06 | 99,94 | 0,06 % |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

## Tabel 5.2

## Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2024

| NO | INDIKATOR SPM | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM (%) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| A | PELAYANAN KESEHATAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 14.479 | 13.321 | 73,60 | 100,00 % | 86,87 | 17,37 | 90,98 | Tuntas Utama |
| 2 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 13.831 | 12.786 | 73,96 | 100,00 % | 92,12 | 18,42 | 92,38 | Tuntas Utama |
| 3 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 13.163 | 12.574 | 76,42 | 100,00 % | 93,03 | 18,61 | 95,03 | Tuntas Utama |
| 4 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita | 41.175 | 40.884 | 79,43 | 100,00 % | 96,91 | 19,38 | 98,82 | Tuntas Utama |
| 5 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 12.062 | 119.602 | 76,51 | 100,00 % | 83,18 | 16,64 | 93,14 | Tuntas Utama |
| 6 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 40.903 | 397.278 | 79,28 | 100,00 % | 86,9 | 17,38 | 96,66 | Tuntas Utama |
| 7 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 55.391 | 53.710 | 77,57 | 100,00 % | 83,83 | 16,77 | 94,34 | Tuntas Utama |
| 8 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 130.380 | 130.296 | 79,95 | 100,00 % | 94,04 | 18,81 | 98,76 | Tuntas Utama |
| 9 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 39.022 | 38.921 | 79,79 | 100,00 % | 92,31 | 18,46 | 98,25 | Tuntas Utama |
| 10 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa | 1.385 | 1.383 | 79,88 | 100,00 % | 65,44 | 13,09 | 92,97 | Tuntas Utama |
| 11 | Cakupan Pelayanan Kesehatan orang TB | 11.922 | 11.922 | 80,00 | 100,00 % | 91,13 | 18,23 | 98,23 | Tuntas Utama |
| 12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV | 18.124 | 18.124 | 80,00 | 100,00 % | 88,42 | 17,68 | 97,68 | Tuntas Utama |
| KABUPATEN MUSI BANYUASIN | | | | 78,03 | | | 17,57 | 95,60 | TUNTAS UTAMA |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

**Tabel 5.3**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | **TUNTAS MADYA** | | | **95 %** | |
| **1.** | **Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari** | | | | **90 %** | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah total yang harus dilayani | Jumlah total yang terlayani | Yang belum terlayani | 80 % | |
| | **A. Jumlah Yang Harus Dilayani:** | **4600** | **4600** | **0** | **100%** | |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 10% | |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **50 %** | |
| | **Jaringan Perpipaan** | | | | | |
| | 1 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| | 2 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmenyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| | **Bukan Jaringan Perpipaan** | | | | | |
| | 3 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | |
| | 4 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | 1150 | 1150 | 0 | 100 % | |
| **2.** | **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik** | | | | **100 %** | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah total yang harus dilayani | Jumlah total yang terlayani | Yang belum terlayani | 80 % | |
| | **A. Jumlah Yang Harus Dilayani :** | **1629** | **1629** | **0** | **100 %** | |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 20 % | |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **100 %** | |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| | 1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengelolahan Air Limbah Domestik | 1629 | 1629 | 0 | 100% | |
| | 2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLTl; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | 3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangka septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar | 0 | 0 | 0 | 100% | |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

**Tabel 5.4**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | **TUNTAS PARIPURNA** | | | **100 %** | |
| **1.** | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota** | | | | **100 %** | |
| ***Tidak Terjadi Bencana ( Lampirkan Form 4A, 4B, 4C, 4D)*** | | | | | | |
| | 1. Pendataan | | | | 100 % | |
| | 2. Perhitungan | | | | 100 % | |
| | 3. Perencanaan | | | | 100 % | |
| **2.** | **Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **100 %** | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80 % | |
| | **A. Jumlah Yang Harus Dilayani :** | **64** | **64** | **0** | **100 %** | |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 100 % | |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **100 %** | |
| | 1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan | 64 | 64 | 0 | 100 % | |
| | 2 . Bantuan Akses Rumah Layak Huni | 0 | 0 | 0 | 0 % | |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

**Tabel 5.5**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024**

| Indikator SPM | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Pembiayaan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (4) | | |
| 1 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota | 100 | 0 | 0 | 1 | **Program Peningkatan Ketentraman Umum** | |
| | | | | | | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| | | | | | | **KEGIATAN** Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 155.760.000,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 5.176.691.000,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 173.266.000,- |

| Indikator SPM | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Pembiayaan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (4) | | |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 139.181.000,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 627.019.125,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa | 47.722.000,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | 256.360.000,- |

| Indikator SPM | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Pembiayaan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (4) | | |
| | | | | | | **KEGIATAN** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 89.841.036,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | 61.590.000,- |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 502.072.000,- |
| 2 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 | 100 | 100 | **2** | **Program Penanggulangan Bencana** | |
| | | | | | | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| | | | | | | **KEGIATAN** Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | |
| | | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Pencarian, Petolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota | 409.885.000,- |

| Indikator SPM | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Pembiayaan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | | |
| | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 76.423.500,- |
| | | | | 3 | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** | |
| | | | | | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| | | | | | **KEGIATAN** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | |
| | | | | | **DENGAN SUB KEGIATAN** Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 863.563.000,- |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

**Tabel 5.6**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana Daerah Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | **TUNTAS UTAMA** | | | **98,67%** | |
| **1.** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)** | | | | **80,00 %** | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | | |
| | **A. Jumlah Yang Harus Dilayani (orang) :** | **200** | **200** | **0** | **100,00 %** | |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 20,00 % | |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia** | **100,00 %** | |
| | 1. Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (Tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 100,00 % | |
| | 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana (Orang) | 7 | 7 | 0 | 100,00 % | |
| | 3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahan multimedia) (Orang) | 27 | 27 | 0 | 100,00 % | |
| | 4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana (Unit) | 2 | 2 | 0 | 100,00 % | |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| **2.** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kebencanaan)** | | | | **100,00 %** | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80,00 % | |
| | **A. Jumlah Yang Harus Dilayani (orang) :** | **800** | **800** | **0** | **100,00 %** | |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 20,00 % | |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **100,00 %** | |
| | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi,....dll) (Unit) | 231 | 310 | 0 | 100,00 % | |
| | 2 . Peningkatan kapasitaas personil/ sumber daya manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 16 | 16 | 0 | 100,00 % | |
| **3.** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)** | | | | **96,00 %** | |
| | Ya | Yang terjadi bencana | | | | Upload SK Bencana |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80,00 % | |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) |
| | **A. Jumlah Yang Harus Dilayani (orang) :** | **250** | **250** | **0** | **100,00 %** | |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 16,00 % | |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia** | **100,00 %** | |
| | 1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sitem komdando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) | 27 | 27 | 0 | 100,00 % | |
| | 2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana | 27 | 27 | 0 | 100,00 % | |
| | 3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kajian cepat dan penetapan status darurat bencana) | 119 | 119 | 0 | 100,00 % | |
| | 4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/ wabah zoonosis prioritas (terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| | 5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 27 | 27 | 0 | 100,00 % | |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

**Tabel 5.7**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja | Target Capaian Tahun 2024 | | | Target Capaian Pembiayaan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Skala Kabupaten/Kota | Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | 100% | 92,05% | 92,05% | 644.781.960,00 | 560.277.500,00 | 86,89% |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Skala Kab/Kota | Persentase (%) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | 100% | 85,42% | 85,42% | 251.946.00,00 | 251.946.00,00 | 100% |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Skala Kab/Kota | Persentase (%) Rehabilitasi sosial Lanjut Terlantar di Luar Panti | 100% | 89,23% | 89,23% | 308.779.000,00 | 286.744.700,00 | 92,86% |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota | Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti | 100% | 33,45% | 33,45% | 51.017.000,00 | 51.017.000,00 | 100% |
| 5. | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Alam Kab/Kota | Persentase (% ) Korban Bencana Alam Perlindungan dan jaminan sosial Pada Saat dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota | 100% | 58,11% | 58,11% | 292.348.000,00 | 291.348.000,00 | 99,65% |

*Sumber: Laporan SPM Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024*

## Tabel 5.8

## Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran

## Untuk Pemenuhan SPM Pada RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026

| No. | SPM BIDANG | Jenis Pelayanan SPM | Indikator | Target | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Jumlah Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) | 100% | Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 3.000.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 3.230.000.000 | |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.950.000.000 | |
| | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.447.701.906 | |
| | | | | | | | Pengadaan Mebel Sekolah | 1.200.000.000 | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 795.580.000 | |
| | | | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 337.431.000 | |
| | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1.371.370.194 | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 335.980.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | - (diusulkan melalui DAK) | |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOS SD | 341.066.850 | |
| | | | | 100% | Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | - (diusulkan melalui DAK) | |
| | | | | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 3.488.562.656 | |
| | | | | | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | - (diusulkan melalui DAK) | |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.500.000.000 | |
| | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 200.000.000 | |
| | | | | | | | Pengadaan Mebel Sekolah | 1.100.000.000 | |
| | | | | | | | Pembangunan Laboraturium | - (diusulkan melalui DAK) | |
| | | | | | | | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 923.361.600 | |
| | | | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 350.000.000 | |
| | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 783.525.400 | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 2.128.086.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | - (diusulkan melalui DAK) | |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 172.222.700 | |

| No. | SPM BIDANG | Jenis Pelayanan SPM | Indikator | Target | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Jumlah Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berparisipasi dala pendidikan kesetaraan | 100% | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Pendidikan Nonformal | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan | - (diusulkan melalui DAK) | |
| | | Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase terlayaninyapendidikan anak usia dini 0-6tahun di PAUD | 100% | Pengelolaan Proses Anak Usia Dini (PAUD) | Pendidikan Anak Usia Dini | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 104.200.000 | |
| | | | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah | 200,000,000 | |
| | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 285.487.000 | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 917.379.644 | |
| | | | | | | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | - (diusulkan melalui DAK | |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 89.916.600 | |
| 2 | Kesehatan | Pelayanan dalam bidang kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif | | 100% | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil | 79.188.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin | 71.998.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir | 715.014.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita | 100.000.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 86.497.137 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif | 92.314.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut | 85.895.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | 92.680.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 97.690.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 98.000.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 647.726.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 97.409.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | - | |
| | | | | | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. | 151.878.000 | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok | 100% | Program pengelolaan dan pengembangan sistem | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 3.292.480.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| No. | SPM BIDANG | Jenis Pelayanan SPM | Indikator | Target | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Jumlah Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | hari Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | air minum sehari hari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | | penyediaan air minum | Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 8.515.525.000 | |
| | | | | 100% | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten /Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 496.070.200 | |
| | | | | 100% | Program pengembangan jasa kontruksi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 400.000.000 | |
| 4 | Perumahan Rakyat | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Pogram peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Urusan penyelenggaraan PSU perumahan | Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | 63.604.760.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyedian rumah yang layak huni | | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5,435,523,050 | |
| | | | | | Program Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | | | - | |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (Penegakan Perda) | 100% | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota | Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan | 225.557.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 74.280.000 | |
| | | | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 121.650.000 | |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 66.870.000 | |
| | | | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 91.350.000 | |
| | | | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | |

| No. | SPM BIDANG | Jenis Pelayanan SPM | Indikator | Target | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Jumlah Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 300.380.000 | |
| | | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) | 85% | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 749.625.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 2.790.095.550 | |
| | | | | | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota | 940.611.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencanan Kabupaten / Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 218.653.408 | BPBD |
| | | | | | | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 948.637.000 | BPBD |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 2.736.858.114 | BPBD |
| | | | | | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 250.000.000 | BPBD |
| | | | | | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 186.300.000 | BPBD |
| | | | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 302.011.000 | BPBD |
| 6 | Sosial | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | 953.848.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | Penyediaan Alat Bantu | 178.415.000 | |
| | | | | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 237.206.200 | |
| | | | | | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | - | |
| | | | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | 66.593.000 | |
| | | | Persetase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota | | Program Penanganan Bencana | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 647.313.000 | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **120,663,249,159** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

Terkait dengan target penurunan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 menjadi 12,88 persen dari kondisi tahun 2020 yang sebesar 16,13 persen, perlu kinerja penurunan persentase kemiskinan yang cukup tinggi dengan dukungan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

**Tabel 5.9**
**Alokasi Program Penanggulangan Kemiskinan**
**Kab. Musi Banyuasin Tahun 2026**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 9.409.102.900 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 79.188.000 | Dinas Kesehatan |
| 3 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 71.998.000 | Dinas Kesehatan |
| 4 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 715.014.000 | Dinas Kesehatan |
| 5 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 100.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 6 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 86.497.137 | Dinas Kesehatan |
| 7 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 92.314.000 | Dinas Kesehatan |
| 8 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 92.680.000 | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 97.690.000 | Dinas Kesehatan |
| 10 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 98.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 11 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 647.726.000 | Dinas Kesehatan |
| 12 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 97.409.000 | Dinas Kesehatan |
| 13 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 54.000.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 14 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 23.400.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Dinas Sosial - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | 156.351.750 | Dinas Sosial |
| 16 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 580.357.500 | Dinas Sosial |
| 17 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Penyediaan Permakanan | Dinas Sosial - Penyediaan Permakanan | 953.848.000 | Dinas Sosial |
| 18 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Dinas Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 237.206.200 | Dinas Sosial |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Sosial - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 332.535.000 | Dinas Sosial |
| 20 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Dinas Sosial - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 17.220.000.000 | Dinas Sosial |
| 21 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Dinas Sosial - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 60.265.498.700 | Dinas Sosial |
| 22 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Pelayanan Dukungan Psikososial | Dinas Sosial - Pelayanan Dukungan Psikososial | 363.033.000 | Dinas Sosial |
| 23 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Dinas Sosial - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 647.313.000 | Dinas Sosial |
| 24 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 3.504.976.200 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 25 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 97.187.600 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 26 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Dinas Ketahanan Pangan - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 326.429.300 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 27 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Dinas Ketahanan Pangan - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 147.626.095 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 28 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Dinas Ketahanan Pangan - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 244.624.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 29 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Dinas Ketahanan Pangan - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.405.846.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 30 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 50.081.000 | Dinas Ketahanan Pangan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 272.600.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 32 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 224.164.925 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 33 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.022.231.025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 34 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 165.792.000 | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 35 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 3.333.859.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 36 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | 310.306.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata |
| 37 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 2.336.023.866 | Dinas Perikanan |
| 38 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Dinas Perikanan - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 169.695.000 | Dinas Perikanan |
| 39 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Dinas Perikanan - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 61.296.000 | Dinas Perikanan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Dinas Perikanan - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 46.600.000 | Dinas Perikanan |
| 41 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Perikanan - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 168.444.000 | Dinas Perikanan |
| 42 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perikanan - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.665.045.198 | Dinas Perikanan |
| 43 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Dinas Perikanan - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 63.324.000 | Dinas Perikanan |
| 44 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perikanan - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 677.404.000 | Dinas Perikanan |
| 45 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perikanan - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 798.928.650 | Dinas Perikanan |
| 46 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 105.712.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 47 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 3.172.425.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 48 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 415.173.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 49 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 246.012.500 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | 582.539.800 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 51 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 657.003.583 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 52 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 203.571.230 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 53 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 544.848.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 54 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 1.173.838.401 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 55 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 452.864.653 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 56 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Dinas Perkebunan - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1.764.511.999 | Dinas Perkebunan |
| 57 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | Dinas Perkebunan - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | 3.775.973.182 | Dinas Perkebunan |
| 58 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Dinas Perkebunan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 8.744.119.000 | Dinas Perkebunan |
| 59 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Dinas Perkebunan - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 2.114.352.896 | Dinas Perkebunan |
| 60 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 650.383.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | UNIK | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 271.281.935 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | **TOTAL** | | | **211.710.856.231** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

Dalam rangka upaya mendukung Program Strategis Nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengalokasikan untuk beberapa program pendukung sebagai berikut:

**Tabel 5.10**
**Alokasi Program Sanitasi**
**Kab. Musi Banyuasin Tahun 2026**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 496.070.200 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 100.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 3 | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 400.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4 | | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 578.685.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | | Penyediaan Unit pengolahan setempat | 5.883.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 600.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | 8.515.525.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 8 | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 3.292.480.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 9 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 500.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 10.413.409.650 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 11 | | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 4.819.999.999 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12 | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 50.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 13 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | 150.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 14 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 18.500.400.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **TOTAL** | | | **54.299.569.855** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

**Tabel 5.11**
**Alokasi Program Swasembada Pangan**
**Kab. Musi Banyuasin Tahun 2026**

| NO | PROGRAM | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 326.429.300 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 147.626.095 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 2.336.023.866 | Dinas Perikanan |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 169.695.000 | Dinas Perikanan |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 46.600.000 | Dinas Perikanan |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan | 168.444.000 | Dinas Perikanan |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.665.045.198 | Dinas Perikanan |
| 8 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | 180.290.000 | Dinas Perikanan |
| 9 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | 628.733.000 | Dinas Perikanan |
| 10 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 3.488.734.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 11 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | 504.667.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 12 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | 2.935.928.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 13 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | 135.626.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 14 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 3.172.425.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |

| NO | PROGRAM | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 15 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 923.307.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 16 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian. | 1.130.500.979 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 17 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 415.173.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 18 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 246.012.500 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 19 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | 582.539.800 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 20 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 657.003.583 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 21 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 203.571.230 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 22 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 208.862.660 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 23 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 544.848.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 24 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 452.864.653 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| **TOTAL** | | | **20.817.085.211** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

## Tabel 5.12
## Alokasi Program PSN Tiga Juta Rumah
## Kab. Musi Banyuasin Tahun 2026

| NO | PROGRAM | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 7.160.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 125.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan Rumah Khusus | 1.000.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 23.400.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 2.000.000.000 | Dinas Sosial |
| **TOTAL** | | | **33.685.000.000** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

## Tabel 5.13
## Alokasi Program Makan Bergizi Gratis
## Kab. Musi Banyuasin Tahun 2026

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | 2.464.066.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUIDAYAAN |
| 2 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 86.260.000 | DINAS KESEHATAN |
| **TOTAL** | | | **2.550.326.000** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

**Tabel 5.14**
**Alokasi Program Penurunan Stunting**
**Kab. Musi Banyuasin Tahun 2026**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 408.758.000 | Bappeda |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 285.579.417 | Bappeda |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 533.838.600 | Bappeda |
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 64.532.000 | DPPKB |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 154.518.000 | DPPKB |
| 6 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 54.638.000 | DPPKB |
| 7 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 226.637.000 | DPPKB |
| 8 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 708.763.000 | Dinas Kesehatan |
| 9 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 79.188.000 | Dinas Kesehatan |
| 10 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 715.014.000 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 100.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 92.314.000 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 54.000.000.000 | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 64.345.500 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 142.810.000 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 1.136.352.800 | Dinas Kesehatan |
| 17 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.684.920.000 | Dinas Kesehatan |
| 18 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok | 100.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 19 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Penyelenggaran promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat | 76.964.990 | Dinas Kesehatan |
| 20 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 29.970.000 | Dinas Kesehatan |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.458.262.800 | Dinas Kesehatan |
| 22 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 47.977.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 23 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.405.846.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 24 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 115.658.400 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 25 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 326.429.300 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 26 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 100.761.719 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 27 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 75.277.800 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 28 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 2.866.000.000 | Dinas Kominfo |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASAYRAKAT HUKUM ADAT | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.022.231.025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 30 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 5.485.586.375 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 31 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 88.431.500 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 32 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 104.200.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 33 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.950.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 34 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 285.487.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 35 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 100.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 36 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 1.850.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 37 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD | 89.916.400 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 38 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 917.379.644 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 39 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1.050.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 40 | PROGRAM PEGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 677.404.000 | Dinas Perikanan |
| 41 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 798.928.650 | Dinas Perikanan |
| 42 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 1.173.838.401 | DTPHP |
| 43 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 102.649.200 | DTPHP |
| 44 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Penyediaan Permakanan | 953.848.000 | Dinas Sosial |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | RKPD 2026 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 332.535.000 | Dinas Sosial |
| 46 | PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 17.220.000.000 | Dinas Sosial |
| **TOTAL** | | | **101.681.583.146** | |

*Sumber: SIPD 2025, diolah.*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Berjalan serta Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.15**
**Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin**
**Sampai Dengan 31 Juli 2025**

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | Berjalan (Rp.) |
|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 |
| **4.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **3.754.947.990.722,66** | **1.133.633.936.220,92** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **393.331.951.633,26** | **307.241.307.517,05** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 113.650.131.384,00 | 107.953.976.186,35 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 6.626.027.122,00 | 6.189.286.390,00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 27.898.190.463,75 | 18.395.564.057,62 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 245.157.602.663,51 | 174.702.480.883,08 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **3.354.108.863.089,40** | **1.660.290.901.018,83** |
| **4.2.1** | **Transfer Pemerintah Pusat** | **2.860.225.317.214,00** | **1.610.068.412.580,00** |
| 4.2.1.1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 1.944.582.915.190,00 | 1.012.370.699.200,00 |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | Berjalan (Rp.) |
|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 |
| 4.2.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 491.100.513.274,00 | 286.783.032.444,00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 424.541.888.750,00 | 163.061.647.226,00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Desa (DAD) | 229.955.545.000,00 | 147.853.033.710,00 |
| 4.2.1.5 | Dana Insentif Daerah (DID) | 24.672.901.000,00 | 0,00 |
| **4.2.2** | **Transfer antar Daerah** | **239.255.099.875,40** | **50.222.488.438,83** |
| 4.2.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 171.283.262.620,00 | 50.222.488.438,83 |
| 4.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah | 67.971.837.255,40 | 0,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **7.507.176.000,00** | **0,00** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 7.507.176.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **874.876.531.365,80** | **1.546.503.276.029,97** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **634.325.215.176,80** | **1.137.736.007.067,97** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 413.236.942.982,36 | 763.170.113.982,89 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.166.979.594,44 | 317.115.589.375,08 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 87.591.956.464,00 | 44.610.755.400,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 300.000.000,00 | 12.839.548.310,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **706.484.072.832,00** | **196.215.237.859,00** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 21.470.259.819,00 | 806.275.350,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 69.989.853.997,00 | 20.026.184.511,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 109.291.032.872,00 | 23.193.606.429,00 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 505.087.489.136,00 | 152.020.967.569,00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 645.437.008,00 | 168.204.000,00 |
| **5.3** | **Belanja Tak Terduga** | **4.236.878.272,00** | **77.330.054,00** |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **300.281.670.257,00** | **212.474.701.049,00** |
| **6.** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **106.778.424.206,58** | **0,00** |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **131.728.424.206,58** | **0,00** |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | Berjalan (Rp.) |
|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 |
| 6.1.6 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.7 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **24.950.000.000,00** | **0,00** |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 24.950.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.6 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **106.778.424.206,58** | **0,00** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | **50.056.371.759,01** | **421.028.932.505,91** |

*Sumber: BPKAD 2025, diolah*

**Tabel 5.16**

**Struktur RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026**

| No | Uraian | Prognosis Tahun 2026 (Rp) |
|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **3.748.897.152.524,00** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **537.897.152.524,00** |
| **4.1.1** | Pajak Daerah | 223.569.997.000,00 |
| **4.1.2** | Retribusi Daerah | 5.811.015.100,00 |
| **4.1.3** | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 30.000.000.000,00 |
| **4.1.4** | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 278.516.140.424,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **3.210.906.488.500,00** |
| **4.2.1** | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.070.306.488.500,00 |
| **4.2.2** | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 140.600.000.000,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,00** |
| **4.3.1** | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 |
| **5** | **BELANJA** | **3.772.503.641.024,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.758.136.334.062,75** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.641.731.294.048,83 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 834.535.955.406,76 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 183.268.972.607,16 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 98.600.112.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **429.902.972.961,25** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 10.543.999.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.584.501.788,65 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 64.370.630.851,60 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 293.324.613.151,80 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 291.228.169,20 |

| No | Uraian | Prognosis Tahun 2026 (Rp) |
|---|---|---|
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 2.788.000.000,00 |
| **5.3** | **Belanja Tak Terduga** | **5.000.000.000.00** |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **579.464.334.000,00** |
| | **Surplus/(Defisit)** | **-23.700.000.000,00** |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **45.000.000.000,00** |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 45.000.000.000,00 |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **21.300.000.000,00** |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 21.300.000.000,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **23.700.000.000,00** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | **0,00** |
| **Total APBD** | | **3.793.803.641.024,00** |

*Sumber: SIPD 2025, diolah*

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2026 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 serta RKP tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja di tahun 2026. Berikut ini merupakan rekapitulasi dan penjabaran pada program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.

**Tabel 5.17**

**Rekapitulasi Pagu RKPD Berdasarkan Perangkat Daerah**

**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026**

| NO. | PERANGKAT DAERAH | PAGU RKPD TAHUN 2026 (RP.) |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 730.903.177.902 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 704.629.456.520 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 341,362,314,323 |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 222,750,379,518 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 21,616,525,158 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50,386,719,214 |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 20,751,353,128 |
| 8 | Dinas Sosial | 105,645,452,862 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 20,191,660,018 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11,369,328,920 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 14,151,543,039 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 76,250,839,557 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 20,599,606,263 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 20,075,529,908 |
| 15 | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 14,916,904,302 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 21,331,816,276 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 29,103,362,280 |
| 18 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 16,560,420,159 |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20,103,284,068 |
| 20 | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 57,047,468,864 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 16,016,152,021 |
| 22 | Dinas Perikanan | 21,864,819,130 |
| 23 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 55,069,485,081 |
| 24 | Dinas Perkebunan | 41,972,084,211 |
| 25 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 29,916,494,717 |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | PAGU RKPD TAHUN 2026 (RP.) |
|---|---|---|
| 26 | Sekretariat Daerah | 133,359,366,146 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 100,380,836,080 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 29,014,921,074 |
| 29 | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah | 612,995,072,006 |
| 30 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 46,271,011,924 |
| 31 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 23,198,478,943 |
| 32 | Inspektorat | 42,099,576,171 |
| 33 | Kecamatan Sekayu | 14,916,723,587 |
| 34 | Kecamatan Lais | 5,625,398,859 |
| 35 | Kecamatan Babat Toman | 8,683,018,400 |
| 36 | Kecamatan Keluang | 6,766,536,590 |
| 37 | Kecamatan Sanga Desa | 8,001,189,996 |
| 38 | Kecamatan Plakat Tinggi | 5,183,236,462 |
| 39 | Kecamatan Batanghari Leko | 5,232,357,700 |
| 40 | Kecamatan Sungai Keruh | 4,722,682,544 |
| 41 | Kecamatan Sungai Lilin | 8,242,533,680 |
| 42 | Kecamatan Bayung Lencir | 7,974,432,678 |
| 43 | Kecamatan Lalan | 5,367,613,287 |
| 44 | Kecamatan Tungkal Jaya | 5,880,802,000 |
| 45 | Kecamatan Lawang Wetan | 5,347,848,168 |
| 46 | Kecamatan Babat Supat | 4,213,693,626 |
| 47 | Kecamatan Jirak Jaya | 4,440,133,664 |
| **JUMLAH** | | **3,772,503,641,024** |

*Sumber: SIPD, diolah.*

Adapun rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

# RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TAHUN KEDUA RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **730.903.177.902** | | | | | | | | **874.529.308.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **717.239.549.002** | | | | | | | | **863.802.328.000** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **717.239.549.002** | | | | | | | | **863.802.328.000** | |
| 1, | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **653.466.408.702** | | | | | | | - | **726.348.100.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70.01** | **0**<br>**100** | **100**<br>**70.01** | **100**<br>**70.01** | **653.466.408.702** | - | - | - | - | - | - | - | **726.348.100.000** | - |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat*<br>*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 200.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 250.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 100.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 50.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 100.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 638.852.386.902 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 657.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 6450 Orang/bulan | 638.852.386.902 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 657.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 30.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 30.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 30.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 236.461.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 200.100.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 138.876.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 100.100.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 11 Orang | 97.585.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 100.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 1.188.788.800 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 1.577.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 30.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 404.168.800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 97.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 44.620.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 50.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 50.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 541.837.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 1.153.400.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 442.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 653.400.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan | | | | | 442.800.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 99.037.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 10.861.040.400 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 64.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 3.041.540.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 4.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 7.819.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 60.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 1.555.894.600 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | - | 2.137.600.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 22 Unit | 535.499.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 987.600.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 16 Unit | 880.608.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Dikbud (Belakang) | | | | | 191.840.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Dikbud (Depan) | | | | | 193.148.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SKB | | | | | 9.702.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung PBG | | | | | 29.988.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung PBG Kec. Lalan | | | | | 103.488.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Sekolah Olahraga | | | | | 14.994.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung Korwil Dikbud Kec. Sekayu | | | | | 30.084.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung Korwil Dikbud Kec. Lais | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung Korwil Dikbud Kec. Plakat Tinggi | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung Korwil Dikbud Kec. Sungai Keruh | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Lawang Wetan | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Babat Toman | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Sanga Desa | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Batanghari Leko | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Keluang | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Babat Supat | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Sungai Lilin | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Tungkal Jaya | | | | | 9.996.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Bayung Lencir | | | | | 29.768.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan gedung kantor Korwil Kec. Lalan | | | | | 17.640.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Kantor Korwil Dikbud Kec. Plakat Tinggi | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 35 Unit | 139.787.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab. Muba | | 150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | **63.773.140.300** | | | | | | | - | **137.454.228.000** | |
| | | **[ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ]** | **Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** | **98.92** | **96.89** | **97.23** | **97.56** | **63.773.140.300** | - | - | - | - | - | - | - | **137.454.228.000** | - |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>0,60 %<br>100 % | 32.911.529.950 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | - | 71.116.728.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 6 Unit | 3.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 10.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN 1 Terusan (Filial) Terusan Cek Molek Kec. Sanga Desa | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Lubuk Bintialo (Filial) Pemekaran Bugis Desa Lubuk Bintialo Kec. Batanghari Leko | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Sungai Angit (Filial) KM.9 Kec. Babat Toman | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDN Suka Jaya Kec. Plakat Tinggi di RT 7 Dusun IV Desa Suka Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Perpustakaan SDN 2 Desa Cipta Praja Kec. Keluang | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 36 Unit | 4.950.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 6.600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Penataan Halaman SDN 1 Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kec. Batanghari Leko | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SD Muhamadiyah Desa Teluk Kec. Lais | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN 2 Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Penataan Halaman SDN 1 Muara Teladan Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN Air Putih Ilir Kec. Plakat Tinggi | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara - Depan - (Kecamatan Plakat Tinggi) | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN 2 Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Musholloh SDN 1 Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN 4 Lumpatan Kec. Sekayu | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN Tampang Baru Kec. Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN Saud Ketapi Kec. Batanghari Leko | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN 6 Ngulak Kec. Sanga Desa | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN 3 Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung AULA SDN Balin Kec. Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN Suka Jaya Kec. Plakat Tinggi di RT 7 Dusun IV Desa Suka Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Pagar SDN Suka Jaya Kec. Plakat Tinggi di RT 7 Dusun IV Desa Suka Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN 2 Sukajaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penimbunan Halaman SDN 1 Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN 2 Ulak Teberau Kec. Lawang Wetan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN 1 Ulak Teberau Kec. Lawang Wetan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SDN 1 Keluang Kec. Keluang | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN Sri Gunung Kec. Sungai Lilin | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SDN 3 Sungai Angit Kec. Babat Toman | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Muara Teladan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SDN 1 Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SDN Talang Sahabat Kec. Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEWAJIBAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di/Rehabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SDN Kampung Sekate Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SDN 1 Bandar Jaya Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1.200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 6.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Meja Siswa | | | | | 715.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kursi Siswa | | | | | 385.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Meja Siswa SDN Tenggaro Kec. Keluang | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kursi Siswa SDN Tenggaro Kec. Keluang | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 180 Peserta Didik | 337.431.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 2.400.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 550 Orang | 1.371.370.194 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 3.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah | | | | | 1.098.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 2.362.194 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.632.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 5.022.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 33.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 22.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 188.934.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 13.200.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 488 Satuan Pendidikan | 335.980.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 2.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 1004 Orang | 341.086.850 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | 13.602.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 15.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD/MI | | | | | 13.602.400.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 35 Ruang | 3.230.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 10.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Selaro Berseri Kec. Bayung Lencir | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sri Damai Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Sungai Angit Kec. Babat Toman | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja jasa Konsultansi DPPT Pengadaan Tanah | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi KJPP Pengadaan Tanah | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembebasan Lahan untuk SDN 4 Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin | | | | | 430.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 3 Sungai Angit Kec. Babat Toman | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SDIT Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 488 Satuan Pendidikan | 795.580.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 316.728.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 32 Ruang | 2.447.701.906 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SD dalam Kab. Muba | | 11.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Mendis Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 1.053.401.906 | | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kampung Sekate Kec. Sekayu | | | | | 526.500.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Sungai Petai Kec. Sanga Desa | | | | | 667.800.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tebing Merana kelas jauh di Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs*<br>*Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs*<br>*Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>0,80 %<br>75,20 %<br>100 % | 22.055.758.358 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | - | 39.250.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Pembangunan Kantor Kepala SMP Negeri 15 Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Guru di Pondok Pesantren Al hidayah Desa Cipta Praja Kec. Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SMP Islam Darul Ulum Ngulak Kec. Sanga Desa | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 1.500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 1 Sungai Keruh Kec. Sungai Keruh | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SMPN 8 Sekayu Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SMPN 3 Plakat Tinggi Kec. Plakat Tinggi | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tembok Penahan Tebing SMPN 15 Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman SMPN 10 Sekayu Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar SMP Patri Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1.100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 6.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Belanja Modal Mebel - Kursi Siswa | | | | | 385.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Mebel - Meja Siswa | | | | | 715.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1040 Peserta Didik | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Peralatan Olahraga Kegiatan GSI | | | | | 16.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.620.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 45.060.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | 12.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 31.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 16.388.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 19.932.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 440 Orang | 783.525.400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 3.800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Penyediaan Hadiah (Laptop) Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi | | | | | 198.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 9.540.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 24.909.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 190.551.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 10.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 28.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 12.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 18.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 129.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 89.925.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 72.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMAJUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 173 Satuan Pendidikan | 2.128.086.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Penyediaan Pembuatan Aplikasi Dewan Pendidikan | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Kursus Singkat/Pelatihan Asesmen Kepala Sekolah | | | | | 112.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Hadiah Tablet Pemenang Lomba Keg. HGN dan Hardiknas | | | | | 44.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 15.306.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 41.178.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | 425.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 280.450.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 1.105.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 89.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 84.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 8.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tata Rias | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | 4.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 19.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Mebel | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | 10.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Taman | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 164.607.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 77.330.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 5.500.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 346 Orang | 172.222.700 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 173 Satuan Pendidikan | 923.361.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 350.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Penyediaan Kursus Singkat/Pelatihan Gasing Akademi | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 654.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 272.475.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 14.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 195.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 22.212.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 18.620.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 10 Ruang | 3.488.562.656 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 8.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 8 Tungkal Jaya Kec. Tungkal Jaya | | | | | 788.562.656 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 12 Tungkal Jaya Kec. Tungkal Jaya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Al Hidayah Desa Cipta Praja Kec. Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs AN NAHL Kec.Lais | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Nur Hidayah di Rt.18 Dusun 2 Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Pondok Pesantren Darul Qur'an Mafaza Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Patri Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Abadi 2 Petaling Kec. Lais | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 10.760.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SMP dalam Kab. Muba | | 13.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMP/MTs | | | | | 10.760.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD*<br>*Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*<br>*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* | - | | | 62,50 %<br>24 %<br>100 % | 8.017.083.044 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | - | 15.537.500.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 1.050.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Penataan Halaman | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan AULA | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 430.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.987.500.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengadaan Meja dan Kursi Siswa PAUD | | | | | 430.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 200 Orang | 285.487.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 2.350.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 494 Satuan Pendidikan | 917.379.644 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 494 Orang | 89.916.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Ruang Guru KB Kacang Tanah Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 5 Ruang | 1.950.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Cahaya di Dusun II Desa Suka Jaya Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) KB Nurrahmi Desa Pangkalan Jaya Kec. Babat Toman | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Mimtahul Ulum Desa Mangsang Kec. Tungkal Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Kacang Tanah Desa Rimba Ukur C5 Kec. Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK IT Rumah Ilmu di Komp Griya Bumi Lestari Kelurahan Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Al Fatih RT. 19 Kelurahan Babat Kec. Babat Toman | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Purnama Desa Teluk Kec. Lais | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Desa Tanjung Bali Kec. Batanghari Leko | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 8 Unit | 1.850.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TKN 2 Tungkal Jaya Kec. Tungkal Jaya | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung SKB Kab. Muba | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung PKBM Hidayah Kel. Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir | | | | | 750.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 695.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TK/RA | | | | | 695.100.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 145.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengadaan APE PAUD | | | | | 145.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 494 Satuan Pendidikan | 104.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Belanja pakaian seragam polisi cilik | | | | | 16.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 675.300 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 944.700 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 25.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 9.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tata Rias | | | | | 9.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 4.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 10.890.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 10.890.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD dalam Kab. Muba | | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Bina Sahabat Desa Epil Kec. Lais | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri 3 Sekayu Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | - | | | 62,50 %<br>100 % | 788.768.950 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKBM dalam Kab. Muba | - | 11.550.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 14 Satuan Pendidikan | 162.070.050 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKBM dalam Kab. Muba | | 450.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 11 Satuan Pendidikan | 603.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKBM dalam Kab. Muba | | 11.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Dana BOSP Kesetaraan Daerah (Dana BPKP) | | | | | 603.800.000 | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 22 Orang | 22.898.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKBM dalam Kab. Muba | | 100.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.254.526.000** | | | | | | | | **2.726.980.000** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **4.254.526.000** | | | | | | | | **2.726.980.000** | |
| 1, | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **3.399.572.100** | | | | | | | - | **1.700.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ]** | **Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.399.572.100** | - | - | - | - | - | - | - | **1.700.000.000** | - |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya* | - | | | 100 %<br>13 Kali | 2.425.012.100 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | - | 800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 10 Objek | 822.729.100 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | | 400.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 130 Orang | 1.602.283.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | | 400.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pengadaan Peralatan Hadroh dan Soundsytem Kelompok Pengajian Nurul Muhabah Desa Senawar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Hadroh dan Soundsytem Kelompok Kesenian Rt. 23 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Hadroh dan Soundsytem Kelompok Kesenian Rt. 08 Desa Wonorejo Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Sound System untuk Pagayuban Seni Kuda Lumping Krida Budaya Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Bantuan peralatan hadroh untuk Group Hadroh Nurul Amal Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat Musik Hadroh Dan Seragam group seni Miftahul Jana Desa Mendis Kec. Bayung Lincir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat Musik Hadroh Dan Seragam group seni Tarbiyatul hasana Desa Muara Medak Kec. Bayung Lincir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat Musik Hadroh Dan Seragam group seni Al Muhlisin Dusun 2 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lincir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan kesaseni adat dari Bali Sangar Seni Taman Sari Desa Mendis Kec. Bayung Lincir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan alat-bahan kesenian adat Bali Desa Pulai gading Kec. Bayung Lincir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.247.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 50.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | | 130.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | 551.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 68.936.000 | | | | | | | | | |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya* | - | | | 100 %<br>13 Kali | 974.560.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | - | 900.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan* | | | | 895 Sertifikat | 974.560.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | | 900.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Kegiatan Festival Randik | | | | | 288.855.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 85.950.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 162.855.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 2.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | 34.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 32.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 276.000.000 | | | | | | | | | |
| 2. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | **642.385.000** | | | | | | | - | **676.980.000** | |
| | | **[ Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan ]** | **Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan<br>Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan** | **100<br>80** | **100<br>20** | **100<br>40** | **100<br>50** | **642.385.000** | - | - | - | - | - | - | - | **676.980.000** | - |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi<br>Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya* | - | | | 78 %<br>100 % | 299.995.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | - | 276.980.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 10 Objek | 299.995.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | | 276.980.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi<br>Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya* | - | | | 78 %<br>100 % | 342.390.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | - | 400.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan* | | | | 7 Objek | 342.390.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | | 400.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Pembangunan Makam Keramat Puyang Tanah Abang Tua Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Festival Cagar Budaya Musi Banyuasin | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 39.650.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 55.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 7.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 8.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 66.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | **212.568.900** | | | | | | | - | **350.000.000** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi*<br>*Meningkatnya Penegelolaan dan Pemanfaatan Museum* | - | | | 1 Unit<br>100 % | 212.568.900 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | - | 350.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 1 Unit | 212.568.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | | 350.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Museum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 137.533.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 10.035.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 65.000.000 | | | | | | | | | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **9.409.102.900** | | | | | | | | **8.000.000.000** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **9.409.102.900** | | | | | | | | **8.000.000.000** | |
| 1. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | **9.409.102.900** | | | | | | | - | **8.000.000.000** | |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 9.409.102.900 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | - | 8.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 6 Laporan | 9.409.102.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Muba | | 8.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Penyediaan UKT Beasiswa S2 Unsri Angkatan 2025 | | | | | 425.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan UKT Beasiswa S2 Unsri Angkatan 2026 | | | | | 850.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya Pendaftaran Beasiswa S2 Unsri Angkatan 2026 | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Beasiswa S1 Mahasiswa Asal Kab. Musi Banyuasin | | | | | 1.650.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya (Uang BPP, UP3, SDP2, dan Asuransi Kesehatan) Beasiswa Mahasiswa Telkom Angkatan 2026 | | | | | 799.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Uang Asrama Mahasiswa Mandiri dan Living Kost & Biaya Operasional Telkom Angkatan 2026 | | | | | 2.037.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya UKT, Pembelajaran Al - Qur'an dan Boarding Matrikulasi Mahasiswa IAI Tazkia Angkatan 2024 | | | | | 564.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya UKT, Pembelajaran Al - Qur'an dan Boarding Matrikulasi Mahasiswa IAI Tazkia Angkatan 2025 | | | | | 564.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya (Uang BPP dan Asuransi Kesehatan) Beasiswa Mahasiswa Telkom Angkatan 2023 | | | | | 413.400.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Penyediaan Biaya (Uang BPP dan Asuransi Kesehatan) Beasiswa Mahasiswa Telkom Angkatan 2024 | | | | | 481.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya (Uang BPP dan Asuransi Kesehatan) Beasiswa Mahasiswa Telkom Angkatan 2025 | | | | | 409.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya UKT, Pembelajaran Al - Qur'an dan Boarding Matrikulasi Mahasiswa IAI Tazkia Angkatan 2026 | | | | | 564.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Biaya Pendaftaran, Uang Pangkal dan Asuransi Kesehatan Mahasiswa IAI Tazkia Angkatan 2026 | | | | | 110.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Uang Saku Mahasiswa IAI Tazkia | | | | | 216.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 11.986.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 54.873.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 45.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 45.067.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 117.276.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | **440.869.333.115** | | | | | | | | **2.220.088.828.908** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **440.869.333.115** | | | | | | | | **2.220.088.828.908** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **440.869.333.115** | | | | | | | | **2.220.088.828.908** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **360.742.892.815** | | | | | | | - | **1.948.250.281.388** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu** | **100**<br>**79.75** | **100**<br>**78.43** | **100**<br>**78.75** | **100**<br>**79** | **360.742.892.815** | - | - | - | - | - | - | - | **1.948.250.281.388** | - |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 175.596.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 110.180.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 60.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 90.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 90.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 29 Data | 75.596.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 110.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH* | - | | | 100 %<br>100 % | 332.925.626.851 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 455.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2500<br>Orang/bulan | 332.925.626.851 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 455.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH*<br>*Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 414.575.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 235.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 389.535.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 90.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 31 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 100.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 25.040.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 45.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH* | - | | | 100 %<br>100 % | 382.897.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 1.100.099.860.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2246 Paket | 283.322.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 1.100.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 12 Orang | 99.575.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 99.860.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH* | - | | | 100 %<br>100 % | 865.615.200 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 251.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 29.963.174 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 550.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 59.994.100 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 75.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 197.639.502 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 250.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 88.018.426 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 180.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 70.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 350.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN* | - | | | 100 %<br>100 % | 193.600.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 580.800.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 93.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 380.800.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Sewa Kendaraan Operasional Dinas Lapangan | | | | | 93.600.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persenatse Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH* | - | | | 100 %<br>100 % | 24.812.400.764 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 29.579.621.388 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 31 Laporan | 2.204.262.364 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 1.867.930.188 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 22.608.138.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 27.711.691.200 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJUKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH* | - | | | 100 %<br>100 % | 972.582.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | - | 1.250.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 53 Unit | 691.880.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 850.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 189.992.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 90.710.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas | | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **78.212.547.690** | | | | | | | - | **268.425.243.720** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ]** | **Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup**<br>**Angka Kematian Ibu (AKI)**<br>**Cakupan imunisasi bayi lengkap**<br>**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)**<br>**Indeks Pencapaian SPM Kesehatan**<br>**Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**<br>**Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis**<br>**Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat**<br>**Persentase fasilitas** | **0**<br>**100**<br>**100-13295**<br>**1.4**<br>**4**<br>**70**<br>**90**<br>**95** | **0**<br>**100**<br>**12574**<br>**14**<br>**65**<br>**65.5**<br>**69.61**<br>**70**<br>**74.42**<br>**86.53** | **0**<br>**100**<br>**100-12662**<br>**1.4**<br>**6**<br>**65.5**<br>**70**<br>**75**<br>**76**<br>**8**<br>**87**<br>**90** | **0**<br>**100**<br>**100-12789**<br>**1.4**<br>**43**<br>**65.5**<br>**7**<br>**75**<br>**80**<br>**87.50**<br>**90** | **78.212.547.690** | - | - | - | - | - | - | - | - | **268.425.243.720** | - |
| | | | **kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai Standar**<br>**Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional**<br>**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**<br>**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna**<br>**Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.**<br>**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**<br>**Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan**<br>**Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat**<br>**Presentase lanjut usia yang mandiri**<br>**Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun**<br>**Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun**<br>**TFR (Angka Kelahiran Total)**<br>**Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota PERSENTASE FASYANKES YANG MEMIIKI FASILITASPELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP SESUAI STANDAR*<br>*Persentase Fasyankes yang memiliki Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 16.434.905.160 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | - | 172.421.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | DED Pembangunan Puskesmas Kelurahan Mangun Jaya Kec.Babat Toman | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 3.500.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Konsultan Perencanaan Pagar Rumah Dinas Puskesmas Babat Toman | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Pengawasan Pagar Rumah Dinas Puskesmas Babat Toman | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Rumah Dinas Puskesmas Babat Toman | | | | | 267.960.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 6 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais<br>Kab. Musi Banyuasin, Lais, Tanjung Agung Barat<br>Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Suka Damai<br>Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Mukti<br>Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Bandar Agung | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 15.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 10 Unit | 2.677.936.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 5.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Pengadaan Motor Operasional Fogging | | | | | 105.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Ambulans Puskesmas | | | | | 366.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 79.321.329 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 30.854.587 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 30.854.587 | | | | | | | | | |
| | | | Partisi Ruang Rapat | | | | | 251.711.110 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Pendingin Puskesmas | | | | | 90.408.800 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 72.023.127 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 31.018.950 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 38.550.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 19.275.150 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 17.245.404 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 51.187.650 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 51.187.650 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 51.187.650 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 83.036.400 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 16.072.800 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 16.072.800 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 49.950.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 59.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 34.965.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 19.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 23.320.212 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 89.152.980 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 43.400.112 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 29.525.112 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 33.255.600 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 39.906.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 26.604.480 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 13.302.240 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan gedung arsip | | | | | 306.034.700 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebeluer Puskesmas Bintiale | | | | | 70.765.700 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 58.821.120 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 14.260.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Bukit Selabu | | | | | 29.410.560 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 63.623.750 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Ulak Paceh | | | | | 22.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 70.493.436 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebel PKM Tanah Abang | | | | | 23.836.584 | | | | | | | | | |
| | | | Pembustin atap tangga, teras dan terali gedung arsip | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 4.080.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 2 Unit | 452.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais<br>Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang<br>Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat<br>Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Mekar Jaya<br>Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Sukajaya<br>Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Bero Jaya Timur Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 45.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Penataan Halaman di UPT Puskesmas Berojaya Timur | | | | | 99.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Sidorahayu | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Sidorahayu | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Sidorahayu | | | | | 309.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 110.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 1.890.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 6 Unit | 1.786.620.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 30.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Pemeliharaan Pustu Kelurahan Kayuara Kec.Sekayu | | | | | 101.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pustu Kayuara Kec.Sekayu | | | | | 383.685.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pustu Rukun Rahayu Kec.Jirak Jaya | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pustu Bukit Sejahtera Kec.Batang Hari Leko | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pustu Sungai Medak Kec.Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pustu Ulak Embacang Kec. Sanga Desa | | | | | 240.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 4.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 7.155.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 4 Unit | 500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 16.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Cinta Karya | | | | | 199.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas 2 unit | | | | | 299.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 800.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 5.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Pengadaan Alat Fogging | | | | | 36.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas | | | | | 13.340.250 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) | | | | | 640.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Fogging | | | | | 109.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 259.750 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 7 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 40.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 17 Paket | 9.088.188.560 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 12.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan* | | | | 4 Layanan | 309.160.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Pagar Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 600.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 30 Paket | 321.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 321.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR*<br>*Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar* | - | | | 100 %<br>100 % | 61.228.723.530 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | - | 95.474.243.720 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 14392 Orang | 79.188.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 83.871.700 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 13738 Orang | 71.998.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 75.852.700 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 12661 Orang | 715.014.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 775.976.300 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 53152 Orang | 100.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 687.478.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 121717 Orang | 86.497.137 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 100.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 429038 Orang | 92.314.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 150.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 52230 Orang | 85.895.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 100.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 130380 Orang | 92.680.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 121aporan Orang | 97.690.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1432 Orang | 98.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 160.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 348 Orang | 647.726.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 2.667.681.720 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 15136 Orang | 97.409.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 600.978.600 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 151.878.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 3 Dokumen | 708.763.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 418.407.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 10 Dokumen | 384.644.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 150.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 64.345.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 29 Dokumen | 142.810.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 300.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 29.903.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 60 Dokumen | 44.002.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 70.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 laporan Dokumen | 166.932.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 1.380.870.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 54.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 80.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 124.008.160 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 350.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.016.160 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 28.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 22.952.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 39.050.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 2.471.547.333 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 6.120.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Pembuatan Stand Posko Lebaran dan Nataru PSC 119 | | | | | 333.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang PMI Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 1.500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 5.179.333 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.780.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 27.405.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO KEWANGA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 49.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 72.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | | | | | 20.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Lembur | | | | | 100.740.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 6.660.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 72.150.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 21.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 136.593.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 103.440.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 24 Dokumen | 68.232.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 70.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1742 Orang | 318.412.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 152.989.200 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 115 Orang | 97.515.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 149.786.400 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 5 Orang | 91.320.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 160.352.100 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 243 Tatanan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi JUMLAH SISTIM INFORMASI KESEHATAN YANG TERINTEGRASI* | - | | | 40 aplikasi<br>40 APLIKASI | 200.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Aplikasi | - | 210.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Aplikasi | | 210.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Aplikasi SIMPEG | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Aplikasi SELUANG | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 335.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.240.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 9.836.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 23.399.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.830.000 | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE TERLAKSANANYA PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*<br>*Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 %<br>100 % | 348.919.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD | - | 320.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PROKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar* | | | | 3 Rumah Sakit Unit | 92.836.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD | | 170.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 29 Puskesmas & 3 RS Unit | 256.083.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD | | 150.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | **1.560.150.800** | | | | | | | - | **1.543.303.800** | |
| | | **[ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ]** | **Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**<br>**Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.**<br>**Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.**<br>**Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi** | **0.80**<br>**100** | **0**<br>**100** | **0.35**<br>**100** | **0.4**<br>**100** | **1.560.150.800** | - | - | - | | | - | - | **1.543.303.800** | - |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Berjalan*<br>*PERSENTASE IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN YANG BERJALAN* | - | | | 100 %<br>100 % | 65.079.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Orang | - | 130.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 30 Dokumen | 65.079.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Orang | | 130.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDMK*<br>*JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DAN PROFIL SDMK*<br>*Tersedianya rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | - | | | 1 Dokumen<br>1 DOKUMEN<br>100 % | 319.299.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Orang | - | 237.531.500 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 3 Dokumen | 319.299.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Orang | | 237.531.500 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENINGKATAN KOPETENSI* | - | | | 100 %<br>80 % | 1.175.772.300 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Orang | - | 1.175.772.300 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 30 Orang | 1.175.772.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Orang | | 1.175.772.300 | DINAS KESEHATAN |
| 4, | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | **160.444.000** | | | | | | | - | **480.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman ]** | **Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman**<br>**Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **160.444.000** | - | - | - | | | - | - | **480.000.000** | - |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik serta UMOT yang memiliki izin* | - | | | 100<br>Persentase 100 % | 33.150.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 1 Dokumen | 33.150.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | *Jumlah Dokumen Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat* | - | | | 1 Dokumen<br>100 % | 41.034.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh Industri Rumah Tangga | - | 80.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | 27 Dokumen | 41.034.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, , Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh Industri Rumah Tangga | | 80.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Jumlah TPM, jasa boga, rumah makan, dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene Jumlah TPM, Jasa Boga, Rumah Makan dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene* | - | | | 30 unit<br>15 unit | 86.260.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh Industri rumah tangga | - | 350.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 1 Dokumen | 86.260.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh Industri rumah tangga | | 350.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **193.297.810** | | | | | | | - | **1.390.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ]** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **193.297.810** | - | - | - | | - | - | - | **1.390.000.000** | - |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 86.362.820 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh masyarakat Kab. Musi Banyuasin | - | 600.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 29 Dokumen | 86.362.820 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh masyarakat Kab. Musi Banyuasin | | 600.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* | - | | | 2 Dokumen<br>30 DOKUMEN | 76.964.990 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh masyarakat Kab. Musi Banyuasin | - | 390.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 29 Dokumen | 76.964.990 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh masyarakat Kab. Musi Banyuasin | | 250.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat* | | | | 29 Keluarga | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh masyarakat Kab. Musi Banyuasin | | 140.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT*<br>*Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | - | | | 100 %<br>100 % | 29.970.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kader kesehatan Kab. Musi Banyuasin | - | 400.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 29 Dokumen | 29.970.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kader kesehatan Kab. Musi Banyuasin | | 400.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN** | | | | | | **44.500.000.000** | | | | | | | | **38.300.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **44.500.000.000** | | | | | | | | **38.300.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **44.500.000.000** | | | | | | | | **38.300.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **42.000.000.000** | | | | | | | - | **34.800.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 42.000.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | - | 34.800.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 42.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 34.800.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **2.500.000.000** | | | | | | | - | **3.500.000.000** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR*<br>*Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar* | - | | | 100 %<br>100 % | 2.500.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin | - | 3.500.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin | | 3.500.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN |
| | | | Belanja Partisi/Mebel/Meja Plywood HPL per Meter (RSUD Sungai Lilin) | | | | | 211.120.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 1.200.960.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 119.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 968.220.000 | | | | | | | | | |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR** | | | | | | **31.000.000.000** | | | | | | | | **33.500.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **31.000.000.000** | | | | | | | | **33.500.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **31.000.000.000** | | | | | | | | **33.500.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **28.000.000.000** | | | | | | | - | **30.000.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 28.000.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | - | 30.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 28.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir | PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknolog/ Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 30.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **3.000.000.000** | | | | | | | - | **3.500.000.000** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR*<br>*Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar* | - | | | 100 %<br>100 % | 3.000.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | RSUD Bayung Lencir | - | 3.500.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | RSUD Bayung Lencir | | 3.500.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR |
| | | **PUSKESMAS NGULAK** | | | | | | **2.652.172.659** | | | | | | | | **2.763.781.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.652.172.659** | | | | | | | | **2.763.781.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.652.172.659** | | | | | | | | **2.763.781.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.652.172.659** | | | | | | | - | **2.763.781.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 2.652.172.659 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Ngulak | - | 2.763.781.000 | PUSKESMAS NGULAK |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.652.172.659 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Ngulak | | 2.763.781.000 | PUSKESMAS NGULAK |
| | | **PUSKESMAS BABAT TOMAN** | | | | | | **3.181.128.960** | | | | | | | | **3.448.504.320** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.181.128.960** | | | | | | | | **3.448.504.320** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.181.128.960** | | | | | | | | **3.448.504.320** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.181.128.960** | | | | | | | - | **3.448.504.320** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 3.181.128.960 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Babat Toman | - | 3.448.504.320 | PUSKESMAS BABAT TOMAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 3.181.128.960 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Babat Toman | | 3.448.504.320 | PUSKESMAS BABAT TOMAN |
| | | **PUSKESMAS ULAK PACEH** | | | | | | **1.820.000.000** | | | | | | | | **1.820.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.820.000.000** | | | | | | | | **1.820.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.820.000.000** | | | | | | | | **1.820.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.820.000.000** | | | | | | | - | **1.820.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.820.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Ulak Paceh | - | 1.820.000.000 | PUSKESMAS ULAK PACEH |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.820.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Ulak Paceh | | 1.820.000.000 | PUSKESMAS ULAK PACEH |
| | | **PUSKESMAS TANAH ABANG** | | | | | | **870.000.000** | | | | | | | | **900.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **870.000.000** | | | | | | | | **900.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **870.000.000** | | | | | | | | **900.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **870.000.000** | | | | | | | - | **900.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 870.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanah Abang | - | 900.000.000 | PUSKESMAS TANAH ABANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 870.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanah Abang | | 900.000.000 | PUSKESMAS TANAH ABANG |
| | | **PUSKESMAS LUBUK BINTIALO** | | | | | | **570.000.000** | | | | | | | | **627.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **570.000.000** | | | | | | | | **627.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **570.000.000** | | | | | | | | **627.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **570.000.000** | | | | | | | - | **627.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 570.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Lubuk Bintialo | - | 627.000.000 | PUSKESMAS LUBUK BINTIALO |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 570.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Lubuk Bintialo | | 627.000.000 | PUSKESMAS LUBUK BINTIALO |
| | | **PUSKESMAS BUKIT SELABU** | | | | | | **470.000.000** | | | | | | | | **776.104.066** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **470.000.000** | | | | | | | | **776.104.066** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **470.000.000** | | | | | | | | **776.104.066** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **470.000.000** | | | | | | | - | **776.104.066** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 470.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bukit Selabu | - | 776.104.066 | PUSKESMAS BUKIT SELABU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 470.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bukit Selabu | | 776.104.066 | PUSKESMAS BUKIT SELABU |
| | | **PUSKESMAS CINTA KARYA** | | | | | | **1.220.914.951** | | | | | | | | **1.455.216.211** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.220.914.951** | | | | | | | | **1.455.216.211** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.220.914.951** | | | | | | | | **1.455.216.211** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.220.914.951** | | | | | | | - | **1.455.216.211** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.220.914.951 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Cinta Karya | - | 1.455.216.211 | PUSKESMAS CINTA KARYA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.220.914.951 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sungai Batang<br>Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Rimba Ukur<br>Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Ilir<br>Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Cinta Karya Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sialang Agung<br>Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Ulu<br>Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Talang Piase | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Cinta Karya | | 1.455.216.211 | PUSKESMAS CINTA KARYA |
| | | **PUSKESMAS SUKA DAMAI** | | | | | | **1.098.177.000** | | | | | | | | **1.207.994.700** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.098.177.000** | | | | | | | | **1.207.994.700** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.098.177.000** | | | | | | | | **1.207.994.700** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.098.177.000** | | | | | | | - | **1.207.994.700** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.098.177.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Suka Damai | - | 1.207.994.700 | PUSKESMAS SUKA DAMAI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.098.177.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Suka Damai | | 1.207.994.700 | PUSKESMAS SUKA DAMAI |
| | | **PUSKESMAS SIDO RAHAYU** | | | | | | **949.290.500** | | | | | | | | **1.240.385.300** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **949.290.500** | | | | | | | | **1.240.385.300** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **949.290.500** | | | | | | | | **1.240.385.300** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **949.290.500** | | | | | | | - | **1.240.385.300** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 949.290.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sido Rahayu | - | 1.240.385.300 | PUSKESMAS SIDO RAHAYU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 949.290.500 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sido Rahayu | | 1.240.385.300 | PUSKESMAS SIDO RAHAYU |
| | | **PUSKESMAS TEBING BULANG** | | | | | | **2.080.837.338** | | | | | | | | **2.493.613.178** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.080.837.338** | | | | | | | | **2.493.613.178** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.080.837.338** | | | | | | | | **2.493.613.178** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.080.837.338** | | | | | | | - | **2.493.613.178** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 2.080.837.338 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tebing Bulang | - | 2.493.613.178 | PUSKESMAS TEBING BULANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.080.837.338 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tebing Bulang | | 2.493.613.178 | PUSKESMAS TEBING BULANG |
| | | **PUSKESMAS JIRAK** | | | | | | **1.424.263.000** | | | | | | | | **1.699.158.457** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.424.263.000** | | | | | | | | **1.699.158.457** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.424.263.000** | | | | | | | | **1.699.158.457** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.424.263.000** | | | | | | | - | **1.699.158.457** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.424.263.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Jirak | - | 1.699.158.457 | PUSKESMAS JIRAK |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.424.263.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Jirak | | 1.699.158.457 | PUSKESMAS JIRAK |
| | | **PUSKESMAS BALAI AGUNG** | | | | | | **3.754.530.000** | | | | | | | | **3.313.500.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.754.530.000** | | | | | | | | **3.313.500.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.754.530.000** | | | | | | | | **3.313.500.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.754.530.000** | | | | | | | - | **3.313.500.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 3.754.530.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Balai Agung | - | 3.313.500.000 | PUSKESMAS BALAI AGUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 3.754.530.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya<br>Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru<br>Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung<br>Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sukarami | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Balai Agung | | 3.313.500.000 | PUSKESMAS BALAI AGUNG |
| | | **PUSKESMAS LUMPATAN** | | | | | | **2.869.318.442** | | | | | | | | **3.022.841.935** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.869.318.442** | | | | | | | | **3.022.841.935** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.869.318.442** | | | | | | | | **3.022.841.935** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.869.318.442** | | | | | | | - | **3.022.841.935** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 2.869.318.442 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Lumpatan | - | 3.022.841.935 | PUSKESMAS LUMPATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.869.318.442 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bailangu Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Muara Teladan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bandar Jaya Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan 2 Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Baliangu Timur | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Lumpatan | | 3.022.841.935 | PUSKESMAS LUMPATAN |
| | | **PUSKESMAS LAIS** | | | | | | **2.803.134.500** | | | | | | | | **3.367.592.837** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.803.134.500** | | | | | | | | **3.367.592.837** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.803.134.500** | | | | | | | | **3.367.592.837** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.803.134.500** | | | | | | | - | **3.367.592.837** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT 32 Unit | 2.803.134.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Lais | - | 3.367.592.837 | PUSKESMAS LAIS |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.803.134.500 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Lais | | 3.367.592.837 | PUSKESMAS LAIS |
| | | **PUSKESMAS GARDU HARAPAN** | | | | | | **830.650.280** | | | | | | | | **830.650.280** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **830.650.280** | | | | | | | | **830.650.280** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **830.650.280** | | | | | | | | **830.650.280** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **830.650.280** | | | | | | | - | **830.650.280** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT 32 Unit | 830.650.280 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Gardu Harapan | - | 830.650.280 | PUSKESMAS GARDU HARAPAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 830.650.280 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Gardu Harapan | | 830.650.280 | PUSKESMAS GARDU HARAPAN |
| | | **PUSKESMAS TELUK KIJING** | | | | | | **820.000.000** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **820.000.000** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **820.000.000** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **820.000.000** | | | | | | | - | **850.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT 32 Unit | 820.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Teluk Kijing | - | 850.000.000 | PUSKESMAS TELUK KIJING |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 820.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Teluk Kijing | | 850.000.000 | PUSKESMAS TELUK KIJING |
| | | **PUSKESMAS TANJUNG KERANG** | | | | | | **1.629.166.800** | | | | | | | | **1.709.166.800** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.629.166.800** | | | | | | | | **1.709.166.800** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.629.166.800** | | | | | | | | **1.709.166.800** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.629.166.800** | | | | | | | - | **1.709.166.800** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.629.166.800 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Kerang | - | 1.709.166.800 | PUSKESMAS TANJUNG KERANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.629.166.800 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Seratus Lapan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Ramba Jaya<br>Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Gajah Muda Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Tenggulang Baru Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Sumber Jaya Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Gajah Mati<br>Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Langkap Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Tanjung Kerang Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Kerang | | 1.709.166.800 | PUSKESMAS TANJUNG KERANG |
| | | **PUSKESMAS SUNGAI LILIN** | | | | | | **2.967.935.700** | | | | | | | | **3.270.679.763** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.967.935.700** | | | | | | | | **3.270.679.763** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.967.935.700** | | | | | | | | **3.270.679.763** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.967.935.700** | | | | | | | - | **3.270.679.763** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 2.967.935.700 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Lilin | - | 3.270.679.763 | PUSKESMAS SUNGAI LILIN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.967.935.700 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Lilin | | 3.270.679.763 | PUSKESMAS SUNGAI LILIN |
| | | **PUSKESMAS SRI GUNUNG** | | | | | | **1.359.546.545** | | | | | | | | **1.379.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.359.546.545** | | | | | | | | **1.379.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.359.546.545** | | | | | | | | **1.379.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.359.546.545** | | | | | | | - | **1.379.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.359.546.545 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sri Gunung | - | 1.379.000.000 | PUSKESMAS SRI GUNUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.359.546.545 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sri Gunung | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sri Gunung | | 1.379.000.000 | PUSKESMAS SRI GUNUNG |
| | | **PUSKESMAS KARYA MAJU** | | | | | | **1.910.000.000** | | | | | | | | **2.365.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.910.000.000** | | | | | | | | **2.365.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.910.000.000** | | | | | | | | **2.365.000.000** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.910.000.000** | | | | | | | - | **2.365.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.910.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Karya Maju | - | 2.365.000.000 | PUSKESMAS KARYA MAJU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.910.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Karya Maju | | 2.365.000.000 | PUSKESMAS KARYA MAJU |
| | | **PUSKESMAS MEKAR JAYA** | | | | | | **1.054.886.000** | | | | | | | | **1.336.886.900** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.054.886.000** | | | | | | | | **1.336.886.900** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.054.886.000** | | | | | | | | **1.336.886.900** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.054.886.000** | | | | | | | - | **1.336.886.900** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.054.886.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Mekar Jaya | - | 1.336.886.900 | PUSKESMAS MEKAR JAYA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.054.886.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Mekar Jaya | | 1.336.886.900 | PUSKESMAS MEKAR JAYA |
| | | **PUSKESMAS BAYUNG LENCIR** | | | | | | **4.507.727.488** | | | | | | | | **4.507.727.488** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.507.727.488** | | | | | | | | **4.507.727.488** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.507.727.488** | | | | | | | | **4.507.727.488** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.507.727.488** | | | | | | | - | **4.507.727.488** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 4.507.727.488 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bayung Lencir | - | 4.507.727.488 | PUSKESMAS BAYUNG LENCIR |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 4.507.727.488 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bayung Lencir | | 4.507.727.488 | PUSKESMAS BAYUNG LENCIR |
| | | **PUSKESMAS SUKA JAYA** | | | | | | **920.000.000** | | | | | | | | **0** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **920.000.000** | | | | | | | | **0** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **920.000.000** | | | | | | | | **0** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **920.000.000** | | | | | | | - | **0** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 920.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | - | 0 | PUSKESMAS SUKA JAYA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 920.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Sukajaya | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 0 | PUSKESMAS SUKA JAYA |
| | | **PUSKESMAS PENINGGALAN** | | | | | | **1.680.635.753** | | | | | | | | **2.015.903.261** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.680.635.753** | | | | | | | | **2.015.903.261** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.680.635.753** | | | | | | | | **2.015.903.261** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.680.635.753** | | | | | | | - | **2.015.903.261** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.680.635.753 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Peninggalan | - | 2.015.903.261 | PUSKESMAS PENINGGALAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 29 Unit Kerja | 1.680.635.753 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Peninggalan | | 2.015.903.261 | PUSKESMAS PENINGGALAN |
| | | **PUSKESMAS SUMBER HARUM** | | | | | | **970.623.000** | | | | | | | | **0** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **970.623.000** | | | | | | | | **0** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **970.623.000** | | | | | | | | **0** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **970.623.000** | | | | | | | - | **0** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 970.623.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 0 | PUSKESMAS SUMBER HARUM |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 970.623.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Sumber Harum | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 0 | PUSKESMAS SUMBER HARUM |
| | | **PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR** | | | | | | **1.033.775.000** | | | | | | | | **1.137.550.500** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.033.775.000** | | | | | | | | **1.137.550.500** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.033.775.000** | | | | | | | | **1.137.550.500** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.033.775.000** | | | | | | | - | **1.137.550.500** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.033.775.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | - | 1.137.550.500 | PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.033.775.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Margo Mulyo Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Pandan Sari Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Bero Jaya Timur Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Beji Mulyo | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 1.137.550.500 | PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR |
| | | **PUSKESMAS BANDAR AGUNG** | | | | | | **1.393.503.251** | | | | | | | | **1.486.428.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.393.503.251** | | | | | | | | **1.486.428.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.393.503.251** | | | | | | | | **1.486.428.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.393.503.251** | | | | | | | - | **1.486.428.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.393.503.251 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bandar Agung | - | 1.486.428.000 | PUSKESMAS BANDAR AGUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.393.503.251 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Bandar Agung | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bandar Agung | | 1.486.428.000 | PUSKESMAS BANDAR AGUNG |
| | | **PUSKESMAS KARANG MUKTI** | | | | | | **1.892.642.857** | | | | | | | | **1.958.373.718** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.892.642.857** | | | | | | | | **1.958.373.718** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.892.642.857** | | | | | | | | **1.958.373.718** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **1.892.642.857** | | | | | | | - | **1.958.373.718** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 1.892.642.857 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Karang Mukti | - | 1.958.373.718 | PUSKESMAS KARANG MUKTI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.892.642.857 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Karang Mukti | | 1.958.373.718 | PUSKESMAS KARANG MUKTI |
| | | **PUSKESMAS AIR BALUI** | | | | | | **625.263.500** | | | | | | | | **665.789.850** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **625.263.500** | | | | | | | | **665.789.850** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **625.263.500** | | | | | | | | **665.789.850** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **625.263.500** | | | | | | | - | **665.789.850** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 625.263.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Air Balui | - | 665.789.850 | PUSKESMAS AIR BALUI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 625.263.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Air Balui | | 665.789.850 | PUSKESMAS AIR BALUI |
| | | **UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH** | | | | | | **1.900.000.000** | | | | | | | | **2.000.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.900.000.000** | | | | | | | | **2.000.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.900.000.000** | | | | | | | | **2.000.000.000** | |
| 1, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **1.900.000.000** | | | | | | | - | **2.000.000.000** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR*<br>*Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar* | - | | | 100 %<br>100 % | 1.900.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | - | 2.000.000.000 | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1.900.000.000 | - | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKTP dan FKTL | | 2.000.000.000 | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
| | | | Belanja Jasa Konsultan Izin Limbah | | | | | 70.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Laboratorium | | | | | 691.666.640 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat penunjang Laboratorium | | | | | 98.423.550 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembangunan Pagar Latikesda | | | | | 370.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | 8.005.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 20.098.702 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 5.502.858 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 5.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | | | | | 5.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pengolahan Air Limbah | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 3.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 70.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | | | | | 7.190.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 36.920.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 12.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 70.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 55.242.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 37.540.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | 4.991.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 8.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 27.850.000 | | | | | | | | | |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU** | | | | | | **136.999.999.881** | | | | | | | | **142.000.000.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **136.999.999.881** | | | | | | | | **142.000.000.000** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **136.999.999.881** | | | | | | | | **142.000.000.000** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **127.000.000.000** | | | | | | | - | **130.000.000.000** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD*<br>*Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD* | - | | | 33 UNIT<br>32 Unit | 127.000.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Musi Banyuasin | - | 130.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 127.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Musi Banyuasin | | 130.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **9.999.999.881** | | | | | | | - | **12.000.000.000** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR*<br>*Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar* | - | | | 100 %<br>100 % | 9.999.999.881 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Musi Banyuasin | - | 12.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 9.999.999.881 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Musi Banyuasin | | 12.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studio (CCTV) | | | | | 578.550.000 | | | | | | | | | |
| | | | Alat kedokteran Umum | | | | | 304.879.260 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | | | | | 197.520.000 | | | | | | | | | |
| | | | Laptop | | | | | 399.893.000 | | | | | | | | | |
| | | | Personal Computer | | | | | 15.202.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | | | | | 14.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan | | | | | 275.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Kelas I Menjadi Ruang Rawat Inap VIP | | | | | 1.200.060.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan | | | | | 5.175.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Telepon | | | | | 607.432.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 860.928.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 4.457.405.521 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 70.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | | | | | 234.350.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 335.664.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 443.040.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **341.362.314.323** | | | | | | | | **1.597.600.200.000** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **305.852.314.323** | | | | | | | | **1.577.600.200.000** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **305.852.314.323** | | | | | | | | **1.577.600.200.000** | |
| 1, | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **40.920.536.336** | | | | | | | - | **44.255.200.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**81.04** | **100**<br>**77.80** | **100**<br>**78.34** | **100**<br>**78.88** | **40.920.536.336** | - | - | - | - | - | - | - | **44.255.200.000** | - |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | - | | | 6 Dokumen | 90.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 60.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 35.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 25.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 180 Orang | 21.465.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 21.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 178 Orang/bulan | 21.465.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 21.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | - | | | 1 Dokumen | 117.230.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 117.230.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | - | | | 1 Dokumen | 280.930.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 180.930.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 14 Orang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi* | - | | | 100 % | 897.320.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 1.585.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 217.320.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 75.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 600.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 30.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 30.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 98.444.790 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 200.200.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 70 Unit | 98.444.790 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 200.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi* | - | | | 100 % | 16.986.071.346 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 19.300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 14.370.447.346 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 15.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.615.624.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 4.300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik* | - | | | 100 % | 985.540.200 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | - | 1.560.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 599.790.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 650.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 600.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 276.878.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 91 Unit | 108.872.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pegawai Dinas PUPR | | 110.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | **20.120.000.000** | | | | | | | - | **58.950.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ]** | **Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik** | **77.50** | **67.73** | **67.73** | **69.12** | **20.120.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **58.950.000.000** | - |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik* | - | | | 69,12 % | 19.312.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 57.250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0026 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 800.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Rehabilitasi Pintu Air Desa Sari Agung, Kec. Lalan | | | | | 195.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pintu Air Desa Bumi Agung, Kec. Lalan | | | | | 195.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pintu Air Desa Sukajadi, Kec. Lalan | | | | | 195.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Pintu Air Desa Bandar Agung, Kec. Lalan | | | | | 195.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 17.316.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0072 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 1 KM | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemeliharaan Sungai Simpit Kecamatan Sekayu | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Sungai Tusan Tuan Kecamatan Sekayu | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Sungai Belimbing Kecamatan Sekayu | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Saluran RSUD Kecamatan Sekayu | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 13.600.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan* | | | | 5 Lembaga | 465.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 350.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0078 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi* | | | | 4 Lembaga | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Survey dan Perencanaan untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Survey dan Perencanaan untuk Pekerjaan Embung | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Survey dan Perencanaan untuk Pekerjaan Bangunan Irigasi | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 14.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 137.060.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 48.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0082 | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemeliharaan Kolam Retensi Didekat Perumahan GMP Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.400.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 125 KM | 7.500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 23.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Normalisasi Sungai Kelurahan Mangun Jaya Kec. Babat Toman | | | | | 295.403.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Desa Sukarami, Kec. Sekayu | | | | | 295.203.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Lebung Sialang Desa Ngulak II, Kec. Sanga Desa | | | | | 979.425.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Desa Sindang Marga Kec. Sungai Keruh | | | | | 1.582.175.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Anak Sungai Talang Mandi Angin, Kec. Lawang Wetan | | | | | 195.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder Desa Tenggulang Baru Kec. Babat Supat | | | | | 493.887.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Desa Gajah Mudа Kec. Babat Supat | | | | | 493.887.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Cengal desa Tampang Baru Kec. Bayung Lencir | | | | | 492.337.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Normalisasi Sungai Tuhuran desa Tampang Baru Kec.Bayung Lencir | | | | | 492.337.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Desa Sridamai Kec. Keluang | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai di Rt.17 Dusun 02 Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Pinang Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai Denau Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Normalisasi Sungai di RT.06 RW.01 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 41.625.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 38.050.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan* | | | | 0.5 KM | 1.820.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 16.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pembangunan Tembok Penahan Embung Desa Mekar Sari Kec. Keluang | | | | | 395.443.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Tembok Penahan Sungai Ahmad Mantri Desa Sukarami, Kec. Sekayu | | | | | 984.175.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tembok Penahan Tebing sungai Rt. 006 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan perkuatan tebing sungai di Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman | | | | | 270.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 11.322.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.060.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun* | | | | 4 Titik | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyusunan Rencana Teknis Pengendalian Banjir di Sungai Biduk Kecamatan Keluang | | | | | 345.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.329.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun* | | | | 14 Unit | 3.250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 8.500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pembangunan Embung Desa Ngulak II, Kec. Sanga Desa | | | | | 295.043.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Embung Desa Lumpatan, Kec. Sekayu | | | | | 295.203.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Embung Desa Warga Mulya, Kec. Plakat Tinggi | | | | | 295.363.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Embung Desa Ringin Agung, Kec. Lalan | | | | | 391.483.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Embung Gapoktan Kecamatan Sanga Desa | | | | | 1.479.425.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Embung Dusun 6 RT 16 Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Embung Dusun 1 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 20.313.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 23.170.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0125 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun* | | | | 4 Unit | 1.350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pembangunan Pintu Air Desa Ngulak II, Kec. Sanga Desa | | | | | 592.329.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pintu Air Kelompok Tani Bagan Ulu, Kel. Balai Agung, Kec. Sekayu | | | | | 145.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pintu Air di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.325.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.675.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyusunan Rencana Teknis Potensi Air Tanah di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 345.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.329.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyusunan Dokumen Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 495.005.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.995.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0129 | Rehabilitasi Embung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung yang Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1.850.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 800.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Normalisasi Embung Desa Mandala Sari, Kec. Lalan | | | | | 291.483.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Embung di Desa Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Embung Dusun 1 Rt. 02 Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Embung di Dusun 3 Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Embung Dusun 7 Desa Mekar Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.997.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 5.520.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01.0130 | Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0134 | Pemeliharaan danau | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah danau yang dipelihara* | | | | 1 Danau | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemeliharaan Danau Ulak Lia Kec. Sekayu | | | | | 193.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.800.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik* | - | | | 69,12 % | 808.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 4,5 KM | 458.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DIR Sukamaju, Kec. Babat Supat | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DIR Letang, Kec. Babat Supat | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DIR Langkap, Kec. Babat Supat | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Pintu Air Kec. Lalan | | | | | 96.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Pintu Air Kec. Sekayu, Kec. Lawang Wetan, Kec. Babat Toman | | | | | 57.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 13.640.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.02.0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyusunan Rencana Teknis Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 345.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.329.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | **236.891.777.987** | | | | | | | - | **1.463.800.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman ]** | **Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap** | **70.12** | **61.16** | **62.11** | **63.18** | **236.891.777.987** | - | - | - | - | - | - | - | **1.463.800.000.000** | - |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap*<br>*Prosentase panjang jalan dalam kondisi mantap* | - | | | 80,10 %<br>80,10 % | 236.891.777.987 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.463.800.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola* | | | | 3 Dokumen | 2.100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 4.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pembuatan Leger Jalan Ruas Jalan Simpang Jalan Negara - Senawar Jaya - Wonorejo, Simpang Jalan Negara - Tebing Merana | | | | | 593.999.384 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Leger Jalan Ruas Jalan Simpang Jalan Negara (Simpang Trifika) - Mendis Jaya - Sungai Medak | | | | | 643.499.327 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMAJUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembuatan Leger Jalan Ruas Jalan Simpang Jalan Negara - Lubuk Harjo, Simpang Jalan Negara (Simpang Bayat 1) - Desa Bayat Ilir - Desa Pangkalan Bayat - Pagar Desa, Simpang Jalan Negara - Mendis | | | | | 841.499.886 | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 21.001.402 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 5 Dokumen | 5.080.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Updating Data Jalan Kabupaten untuk syarat pengusulan Kegiatan DAK Tahun 2027 | | | | | 792.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Updating Data Jembatan Kabupaten untuk syarat pengusulan Kegiatan DAK Tahun 2027 | | | | | 692.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Survey Harga Bahan Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan | | | | | 392.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Program Harga Satuan Konstruksi Jalan dan Jembatan | | | | | 492.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | DED Jembatan Sungai Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 293.000.673 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Perencanaan | | | | | 991.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Pengawasan (Supervisi) | | | | | 991.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 90.126.327 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 314.623.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 32.250.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 55 KM | 600.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 12 KM | 15.357.516.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, OPSEN PKB, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 31.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Sanga Desa | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Lalan | | | | | 213.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Motor Greder | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Excavator | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Bacho Loader | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Vibrator Roller Compactor | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Tendem Roller | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Mobil Truk Tronton | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Dump Truck | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Truck mixer / Mobil Towing + Crane | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan/Tanggap Darurat di Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan/Tanggap Darurat di Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan/Tanggap Darurat di Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 3.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan/Tanggap Darurat di Kecamatan Sekayu | | | | | 1.727.516.400 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Jalan Strategis Dalam Kabupaten ( Program Jalan Tanpa Lobang ) | | | | | 2.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Sekayu | | | | | 496.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Keluang | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Babat Supat | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Babat Toman | | | | | 496.670.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Batanghari Leko | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Lais | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 296.670.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 49.950.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 28.920.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | 784.080.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan* | | | | 204 KM | 179.735.026.457 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SAWIT, DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.200.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Peningkatan Jalan Dalam Kota Sekayu | | | | | 4.986.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengingkatan Jalan Sekayu - Talang Care | | | | | 10.980.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan desa Kertajaya menuju desa Keramat Jaya dan tebing bulang dengan cor beton Kec. Sungai Keruh | | | | | 9.979.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Sukarami - Berlian Makmur (C2) | | | | | 29.963.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Jirak - Talang Mandung | | | | | 3.984.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Tanjung Kerang - Langkap | | | | | 2.982.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Ruas Jalan Sumber Harum - Sinar Tungkal | | | | | 7.970.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dengan Cor Beton Dusun 002 Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan | | | | | 485.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Ruas Jalan dari Desa Loka Jaya menuju Keluang dengan Cor Beton, Kec. Keluang | | | | | 96.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Dusun 1,2,3,4 Desa Loka Jaya dengan Aspal Hotmix, Kec. Keluang | | | | | 39.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Penghubung Desa Rantau Sialang ke Desa Rimba Ukur dengan Cor Beton, Kec. Sungai Keruh | | | | | 1.386.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Penghubung Desa Langkap menuju Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat dengan Cor Beton | | | | | 388.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan di Philip 18 Desa Letang Kecamatan Babat Supat dengan aspal | | | | | 487.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan di Desa Ulak Kembang - Desa Sungai Napal (Sungai Selerang) dengan cor beton | | | | | 1.486.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengerasan jalan Penghubung Rt. 08 dan Rt. 09 Dusun 03 Desa Wonorejo menuju Desa Mendis Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 385.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Poros Rt. 03 Menuju Rt. 09 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 385.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Dusun 2 dan 3 Desa Wonorejo menuju Desa Muara Medak, Kec. Bayung Lencir | | | | | 388.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pelebaran Jalan dari Desa Dawas menuju Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 289.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkar Desa Karang Anyar, Kec. Lawang Wetan | | | | | 392.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Poros Dusun I Desa Bukit Pangkuasan, Kec. Batanghari Leko | | | | | 292.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dari Sport Center menuju perkebunan Kelompok 2 TASA VI dan Lokasi Cluster AR Dusun 2 Desa Lais Utara kec. Lais | | | | | 192.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan ruas jalan Kasmaran - Pinggap di Dusun 4 Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 788.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Jernih di Belakang kantor Camat Sungai Keruh Desa Tebing Bulang, Kec. Sungai Keruh | | | | | 788.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dengan aspal Jalan Lingkar di Desa Toman, Kec. Babat Toman | | | | | 1.486.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di Dusun 5 Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dengan Aspal Hotmix dalam Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman | | | | | 788.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dalam kelurahan Keluang dengan cor beton, Kec. Keluang | | | | | 392.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dari PAUD Dusun 1 menuju kebun Nazom Nurhawi B6 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 392.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan agregat Desa Mekar Sari Kec. Lalan | | | | | 585.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan agregat Desa Ringin Agung Kec. Lalan | | | | | 585.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Badan Jalan Belakang Polsek Sungai Lilin Menuju Jalan Lingkar, Kec. Sungai Lilin | | | | | 193.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Badan Jalan dengan Cor Beton Rt.07 Rw.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya, Kec. Sungai Lilin | | | | | 1.200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dusun 3 Desa Talang Piase dengan Cor Beton, Kec. Lawang Wetan | | | | | 292.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Poros RT 09 Dusun Sri Mulyo Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 987.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Srimulyo, Kec. Babat Toman | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dusun 1 Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 194.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dalam desa Sialang Agung dengan Cor Beton Kec. Plakat Tinggi | | | | | 3.982.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dalam desa Tanjung keputren dengan Cor Beton Kec. Plakat Tinggi | | | | | 3.982.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dalam desa Air Putih Ulu dengan Cor Beton Kec. Plakat Tinggi | | | | | 5.978.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Sungai Guci - Danau Cala Kec. Lais | | | | | 14.974.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Dari Desa Sungai Angit menuju Desa Srimulyo dengan Hotmix Kec. Babat Toman | | | | | 2.233.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Desa Tanjung Bali - Desa Bukit Sejahtera (SP3) Kec. Batanghari Leko (Program KARBAK TNI) | | | | | 1.984.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Desa Muara Teladan - Talang Salaburau Kec. Sekayu (Program KARBAK TNI) | | | | | 1.986.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Penghubung dari Dusun II ke Dusun IV dan V Desa Sinar Tungkal (Program TMMD Ke 127) | | | | | 1.478.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Ruas Jalan Sumber Harum - Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.476.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Dusun I Desa Danau Cala Kecamatan Lais | | | | | 588.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Desa Purwosari menuju Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais | | | | | 588.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Badan Jalan dengan Cor Beton di Dusun 5 Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 1.182.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan RW 006 Kelurahan Sungai Lilin dengan agregat, Kec. Sungai Lilin | | | | | 984.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Cor Penghubung Desa Ringin Agung ke Mekar Sari Kecamatan Lalan | | | | | 253.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Cor Penghubung Desa Mekar Sari ke Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan | | | | | 1.082.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Cor penghubung Desa Mekar Sari ke Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan | | | | | 2.175.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan lingkar desa di Desa Talang Leban Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Aspal Hotmix di RT 04 RW 02, sungai lilin jaya, Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 984.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Poros Desa/Kelurahan dan Jalan Penghubung antar Desa/Kelurahan di Dusun 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 1.386.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di Dusun I - III di Desa Keramat jaya Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa/Kelurahan dan Jalan Penghubung antar Desa/Kelurahan dari simpang jalan negara menuju Dusun III Village IX Kecamatan Lais | | | | | 1.486.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan penghubung dari Dusun 2 lais menuju Dusun 4 lais Kecamatan Lais | | | | | 1.486.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di Desa Mekar Sari Kec. Keluang | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di Desa Mekar Jaya Kec. Keluang | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa/Kelurahan dan Jalan Penghubung antar Desa/Kelurahan di Desa Toman Kecamatan Babat Toman | | | | | 488.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pelebaran Jalan Depan SMP N1 dan SD N 3 Kec. Sekayu | | | | | 327.883.600 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Poros Desa / Kelurahan dan Jalan Lingkar Dalam Dusun III Village IX Desa Teluk Kijing III. Kec. Lais | | | | | 992.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Sido Rahayu - Bukit Indah - Keramat Jaya (DBH sawit) | | | | | 9.852.276.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Jirak - Mekar Jaya | | | | | 5.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Babat - Sungai Angit Kec. Babat Toman | | | | | 16.717.489.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 283.012.857 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 10.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 662.165.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 8 KM | 1.800.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 14.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Keluang - Simpang Selabu | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Dawas - Trans C2 ( Berlian Makmur ) | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Pauh - Desa Pandan Sari ( B4 ) | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Simpang Sari - Talang Care - Bandar Jaya | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sekayu - Muara Teladan - Sp. Supat | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KM.II - Rimba Ukur | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Desa Berlian Jaya ( A2 ) - Desa Sumber Harum ( A1 ) | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Jalan Negara - Nusa Serasan ( B6 ) | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Jalan Negara - Suka Damai ( B5 ) | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Warga Mulya ( B4 ) - Tanjung Kaputren ( B5 ) | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mekar Jaya - Rukun Rahayu | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bukit Indah ( B3 ) - Keramat Jaya | | | | | 147.669.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 27.972.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0058 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 183 Meter | 3.170.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 5.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Lalan | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Keluang - Talang Siku | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Tanah Abang - Berlian Makmur ( C2 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Sp. Pauh - Pandan Sari ( B4 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Desa Sumber Harum ( A1 ) - Desa Sido Mulyo (A5 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Desa Sumber Harum ( A1 ) - Desa Berlian Jaya ( A2 ) | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Desa Tanah Abang - Pinggap | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan di Desa Bukit Selabu ( B2 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Suka Makmur ( Sp.4 ) - Sukamaju ( Sp. 5 ) - Bangun Harjo ( Sp. 6 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Bukit Indah - Keramat Jaya - Kertajaya | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Tebing Bulang - Sungai Dua | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Jirak - Layan | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Mulyo Rejo - ( B4 ) - Linggo sari ( B3 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Ngulak - Desa Suka Damai ( Sp.3 ) | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabiltasi/Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Negara - Desa Nusa Serasan | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Jembatan pada Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di Dusun III, Desa Keramat Jaya, Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jembatan pada ruas jalan poros Desa/ Kelurahan dan jalan Penghubung antar Desa/Kelurahan Dusun 1 Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0060 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi* | | | | 100 KM | 600.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen dan Pelatihan Audit Internal untuk Akreditasi Laboratorium Bahan Dinas PUPR Kab. Muba | | | | | 190.621.850 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Laboratorium | | | | | 93.240.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 12.901.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.615.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 176.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 7.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 13.222.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 15 Jembatan | 2.250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Batanghari Leko | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Sekayu | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Keluang | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Babat Supat | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Babat Toman | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Lais | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Sanga Desa | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Lalan | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang jembatan yang dibangun* | | | | 300 Meter | 26.199.235.130 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jembatan Rantau Kroya | | | | | 9.975.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Plat Deker Jalan Jurusan Padang Harimau Dusun III Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko | | | | | 292.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan di ruas jalan Desa Suka Maju, Kec. Bayung Lencir | | | | | 979.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan menuju Desa Warga Mulya Kec. Plakat Tinggi | | | | | 192.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Pada Ruas Jalan Teladan - Sp.Supat, Kec. Sekayu | | | | | 9.978.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Plat Deuker Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 340.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Talang Sahabat menuju Sungai Jamban Darat Desa Muara Teladan Kec. Sekayu | | | | | 790.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa | | | | | 586.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan di Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa | | | | | 486.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Jembatan penghubung Dusun Bungkal SAD ke Dusun 1 Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 984.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Plat Deuker di Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 289.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jembatan pada ruas jalan poros desa/kelurahan dan jalan penghubung antar desa/kelurahan Desa Sri Mulyo, Kec. Babat Toman | | | | | 191.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Boxculvert / Jembatan di Dusun III dan Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa | | | | | 340.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Box Culvert dari Dusun 4 Desa Bumi Ayu menuju Desa Air Putih Ilir Dusun IV Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 591.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 46.125.130 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 4.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 135.030.000 | | | | | | | | | |
| 4. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | **1.500.000.000** | | | | | | | - | **1.400.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi ]** | **Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat** | **50** | **28.57** | **28.57** | **30** | **1.500.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **1.400.000.000** | - |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Jumlah Tenaga Konstruksi yang terampil dan bersertifikat* | - | | | 210 Orang | 400.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 750.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 200 Orang | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 750.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 1.100.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas PUPR, Tenaga Konstruksi | - | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1.100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas PUPR, Tenaga Konstruksi | | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyediaan Database Informasi Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Konstruksi di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.704.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 97.296.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Orang | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas PUPR, Tenaga Konstruksi | | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan* | | | | 1 Layanan Informasi | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas PUPR, Tenaga Konstruksi | | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Jumlah Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan* | - | | | 2 Dokumen | 0 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat MUBA | - | 450.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 250 Paket Pekerjaan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat MUBA | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 50 Lembaga | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat MUBA | | 250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5, | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **6.420.000.000** | | | | | | | - | **9.195.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang ]** | **Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** | **90** | **84.17** | **84.17** | **85.33** | **6.420.000.000** | - | - | - | | | - | - | **9.195.000.000** | - |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan penyusunan dokumen RTRW dan RRTR*<br>*Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang* | - | | | 100 %<br>84 % | 370.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | - | 410.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Fasilitasi Legislasi Ranperbup RDTR Kawasan Perkotaan | | | | | 275.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.627.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 22.373.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.* | | | | 1 Laporan | 70.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 110.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang*<br>*Persentase terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Daerah* | - | | | 84 %<br>100 % | 3.175.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | - | 5.400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0004 | Penyusunan Peta Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMUDIAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah data SHP Peta Dasar* | | | | 3 Peta | 2.550.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak II Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 1.700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyiapan Peta Dasar RDTR Kawasan Perkotaan Lais | | | | | 824.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyiapan Peta Dasar RDTR Kawasan Perkotaan Sanga Desa | | | | | 824.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyiapan Peta Dasar RDTR Kawasan Perkotaan Babat Supat | | | | | 824.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.772.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.985.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 53.853.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.390.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 3.600.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Babat Supat | | | | | 370.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.408.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 14.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 12.142.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 2.450.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan* | | | | 4 Orang | 225.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang*<br>*Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan fungsinya* | - | | | 84 %<br>100 % | 2.450.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | - | 2.875.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang* | | | | 4 Dokumen | 1.900.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 2.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pemetaan dan Proses Penyelesaian Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 472.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemetaan dan Proses Penyelesaian Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 471.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemetaan dan Proses Penyelesaian Lahan Usaha Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 710.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 12.534.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.636.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 79.730.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 145.420.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 5 Layanan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 75.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 350.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 277.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.520.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 14.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 7.480.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 1 Sistem Informasi | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Updating Data Base Sistem Informasi Infrastruktur Wilayah Berbasis Sistem Informasi Geografis | | | | | 188.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.405.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.575.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.020.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang*<br>*Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah* | - | | | 84 %<br>100 % | 425.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | - | 510.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0005 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 75.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0011 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat* | | | | 1 Dokumen | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 85.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **35.510.000.000** | | | | | | | | **20.000.000.000** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **35.510.000.000** | | | | | | | | **20.000.000.000** | |
| 1. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | **35.510.000.000** | | | | | | | - | **20.000.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ]** | **Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan** | **93.01** | **88.01** | **88.01** | **89.01** | **35.510.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **20.000.000.000** | - |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase Lampu Jalan dalam Kondisi Baik* | - | | | 89.01 % | 35.510.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | - | 20.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1500 Unit | 22.010.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 15.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Keramat Jaya Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Sido Mukti Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman | | | | | 362.160.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman | | | | | 362.160.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman | | | | | 199.188.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 181.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Talang Pase Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di Desa Ulak Embacang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 198.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Meterisasi Pasang Baru KWH Meter Daya 5500VA Model Duduk | | | | | 606.784.000 | | | | | | | | | |
| | | | Meterisasi Pasang Baru KWH Meter Daya 10600VA Model Duduk | | | | | 324.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan di Dusun 4 Desa Petaling Kec. Lais | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan dari Dusun 4 Desa Babat Kec. Babat Supat menuju Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu jalan Desa Simpang tungkal Kec.Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu jalan Dusun III Desa Bumi Kencana | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Perumahan MBR Rt. 011 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Jaringan Listrik Lampu Jalan di Tanjung Bali | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu jalan Desa Dawas Kecamatan Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penambahan Lampu Jalan di Desa Tanjung Dalam | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan jaringan lampu penerangan jalan dalam Desa Air Itam Kec. Sanga Desa | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan jaringan lampu penerangan jalan laut dari Dusun 1 menuju Dusun 2 Desa Terusan Kec. Sanga Desa | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan jaringan lampu jalan di Toman Sari Dusun 5 Desa Toman Kec. Babat Toman | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan jaringan lampu penerangan jalan di Rt. 20 Kelurahan Babat Kec. Babat Toman | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu penerangan jalan menuju TPU RT. 04 Kel. Sungai Lilin Jaya | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu penerangan Jalan di Desa Mekar Sari Kec. Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu penerangan Jalan dalam Desa Sumber Agung Kec. Keluang | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan RT. 01 RW.06 Kel. Sungai Lilin | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu penerangan Jalan di RT 15 Kelurahan Keluang Kec. keluang | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan di Desa Saud Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu jalan di Desa Ulak Kembang Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 450.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan di Dusun I, II, Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Umum di Dusun IV Desa Letang Kecamatan Babat Supat | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Umum di Dusun I sampai IV Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana Penerangan Jalan Umum di Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Instalasi PJU di RT. 029 RW. 008 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 322.920.320 | | | | | | | | | |
| | | | Meterisasi Pasang Baru KWH Meter Daya 5500 VA Model Gendong | | | | | 35.468.940 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell dalam kelurahan di Kecamatan Sekayu | | | | | 358.236.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Epil Barat Kecamatan Lais | | | | | 379.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 252.960.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Desa Supat Kecamatan Babat Supat | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Banjar Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sumber Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan di lingkungan UPT Puskesmas Tenggulang Raya Kec. Babat Supat | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Tanjung Kerang Kec. Babat Supat | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Pondok Pesantren Al-Mubarokah Desa Babat Kec. Babat Supat | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Tenaga Surya jalan Desa Mekar Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Tenaga Surya jalan Desa Jirak | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Tenaga Surya jalan Desa Tebing Bulang | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan jaringan lampu jalan tenaga Surya di Dusun I dan Dusun II Desa Srimulyo | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu penerangan Jalan di Tugu Kalong Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Kabupaten Dari Desa Cinta Karya menuju Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 1.800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Karang Sari Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Karang Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 322.068.720 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 395.064.540 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu | | | | | 241.551.540 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di RT. 019 RW. 006 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu | | | | | 241.551.540 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Lingkungan Gang Barokah dan Jalan Jambu RT. 046 RW. 012 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Lais Kecamatan Lais | | | | | 805.171.800 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Teluk Kecamatan Lais | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Lais Utara Kecamatan Lais | | | | | 362.327.310 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di Desa Petaling Kecamatan Lais | | | | | 805.171.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 9.024.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 11.560.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 245.008.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 118.200.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 550 Unit | 13.500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Musi Banyuasin | | 5.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | Pengadaan Lampu LED | | | | | 5.686.734.250 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Material Lampu Jalan | | | | | 2.766.620.750 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Penerangan Lampu Jalan | | | | | 206.338.650 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 379.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 42.760.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 59.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 171.408.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | | | | | 3.185.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Lembur | | | | | 211.380.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 216.463.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 155.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 19.745.350 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **222.750.379.518** | | | | | | | | **406.985.430.051** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **204.544.141.000** | | | | | | | | **391.827.471.800** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **105.434.381.000** | | | | | | | | **281.674.412.200** | |
| 1. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | **12.308.005.000** | | | | | | | - | **87.684.842.000** | |
| | | **[ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ]** | **Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum** | **100** | **94.67** | **97.5** | **100** | **12.308.005.000** | - | - | - | - | - | - | - | **87.684.842.000** | - |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap konsumsi air minum* | - | | | 96,80 % | 12.308.005.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 87.684.842.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun* | | | | 72 Unit | 8.515.525.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 18.742.362.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Lais, Babat Supat dan Batanghari Leko | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Sekayu, Lawang Wetan, Babat Toman dan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Keluang, Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Lalan, Sungai Lilin, Tungkal Jaya dan Bayung Lencir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Lalan, Sungai Lilin, Tungkal Jaya dan Bayung Lencir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Sekayu, Lawang Wetan, Babat Toman dan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Keluang, Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan Spam Desa Paska Pamsimas Di Kecamatan Lalan, Sungai Lilin, Tungkal Jaya dan Bayung Lencir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di Dusun 7 RT.19 Desa Lumpatan | | | | | 343.241.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Mendis Kec. Bayung Lencir | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Mendis Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Muara Bahar Kec. Bayung Lencir | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Spam Desa Paska Pamsimas Desa Letang Kec. Babat Supat | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di IPLT Sungai Medak Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di UPTD PALD Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor Dan Perlengkapannya Di Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 337.284.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di Kantor Camat Babat Supat | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya Di Kantor Camat Jirak Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor Dan Perlengkapannya Dusun V Desa Cinta Karya Kec. Plakat Tinggi | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor di Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Gali Desa Lais Kec. Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Gali Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya Dusun 2 RT. 01 Desa Linggo Sari Kec. Sungai Lilin | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Sumur Bor Dusun IV Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor RT. 12 Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan PAMSIMAS Rt. 23 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor di Desa Mekar Jaya (D1) Kec. Jirak Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor di Desa Suka Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor Desa Tebing Bulang | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Sumur Bor di RT 08 Dusun 02 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Sumur Bor TPA Mambul Hidayah Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor dan Kelengkapannya di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.150.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 31.850.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 12 Dokumen | 500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.000.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Penyusunan Database Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis data spasial Kecamatan Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Database Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis data spasial Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Database Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis data spasial Kecamatan Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Database Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis data spasial Kecamatan Lais Kab. Musi Banyuasin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Database Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis data spasial Kecamatan Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 10 Liter/Detik | 3.292.480.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 67.942.480.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Jaringan Perpipaan (PDAM) di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Jaringan Perpipaan (PDAM) di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Kecamatan Lalan | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Kecamatan Lalan | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Kecamatan Lalan | | | | | 1.200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Jaringan Perpipaan (PDAM) di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 1.945.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 42.480.000 | | | | | | | | | |
| 2. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | **8.057.755.200** | | | | | | | - | **93.537.890.200** | |
| | | **[ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah ]** | **Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman** | **7.5 92.7** | **1.2 83.67** | **2 85.2** | **2.5 86.42** | **8.057.755.200** | - | - | - | | - | - | - | **93.537.890.200** | - |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)* | - | | | 100 % | 8.057.755.200 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 93.537.890.200 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja* | | | | 100 Rumah Tangga | 578.685.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 42.160.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun* | | | | 3 M³/Hari | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.500.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 175.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 496.070.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 477.570.200 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Belanja Alat Pelindung Diri | | | | | 18.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 49.856.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 183.100.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | | | | | 96.174.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 148.440.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | | | | 100 Orang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0043 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 Penyeleng gara | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0044 | Penyediaan Unit pengolahan setempat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.* | | | | 3050 Rumah Tangga | 5.883.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 89.943.160.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan MCK Desa Air Itam Kec. Sanga Desa | | | | | 18.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab WC Di Masjid Al Wustho Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jamban Dan Tangki Septik Skala Individual Desa Terusan Kec. Sanga Desa | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyedian Jamban dan Tanki Septik Skala Individual Desa Galih Sari (P11) Kec. Lalan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyedian Jamban dan Tanki Septik Skala Individual Desa Karya Mukti (P10) Kec. Lalan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik dan Jamban Skala Individual di Desa Kerta Jaya Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik dan Jamban Skala Individual di Desa Ulak Embacang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik dan Jamban Skala Individual di Desa Epil Barat Kecamatan Lais | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik dan Jamban Skala Individual di Desa Teluk Kecamatan Lais | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik dan Jamban Skala Individual di Desa Sialang Agung Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik dan Jamban Skala Individual di Desa Rantau Sialang Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jamban dan Tangki Septik Skala Individual Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jamban dan Tangki Septik Skala Individual Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jamban dan Tangki Septik Skala Individual Desa Mandala Sari Kecamatan Lalan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan MCK Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab WC Di Masjid Al Wustho Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jamban dan Tangki Septik Skala Individual Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 408.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 79.400.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.05.2.01.0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 2 Dokumen | 600.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | DED Pembangunan IPLT Kecamatan Lalan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Aplikasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Database Air Limbah Domestik | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | **18.500.400.000** | | | | | | | - | **57.106.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan ]** | **Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik** | **29** | **25** | **25** | **26** | **18.500.400.000** | - | - | - | | - | - | - | **57.106.000.000** | - |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Drainase dalam Kondisi Baik* | - | | | 26 % | 18.500.400.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 57.106.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 77.507,5 M | 18.500.400.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 56.606.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Sungai Lilin dan Lalan | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Sungai Lilin dan Lalan | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Batanghari Leko, Keluang, Babat Supat dan Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Batanghari Leko, Keluang, Babat Supat dan Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Lawang Wetan, Babat Toman dan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Di Kecamatan Lawang Wetan, Babat Toman dan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Jalan Dalam Desa Tegal Mulyo Kec. Keluang | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Dan Normalisasi Parit Lorong Permukiman Desa Mandala Sari Kec. Lalan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Box Culver / Plat Dueker Di Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Perumahan Becak Kec. Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Di Lingkungan Perumahan Relokasi Bantaran Sungai Di Desa Ulak Teberau Kec. Lawang Wetan | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Di Komplek Villa Bukit Sejahtera Kel. Kayuara Kec. Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Perumahan Lapas Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase dalam Lingkungan RT.031 RW.006 dari TPU Kayu Ara menuju Masjid Raya Baitul Makmur Kel. Kayu Ara Kec. Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Rehab Drainase Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Rehab Drainase di Jl. Kopral hamid lingkungan 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Desa Rejo Sari Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Drainase Jalan Merdeka dari MI Istiqomah menuju Lapangan STIER | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Ruas Jalan lingkungan Dusun I Desa Simpang Tungkal | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase RT 13 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Dusun II Rt. 006 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Rt 007 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Rt 014 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Saluran Drainase dalam Desa Lumpatan II | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Lingkungan Dalam Desa Loka Jaya Kec. Keluang | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Lingkungan Dalam Desa Sumber Rezeki Kec. Sungai Lilin | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Lingkungan dalam Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Drainase dan Plat Duicker Komplek Perumnas Jl. Merawan Rt. 11 Rw. 04 Kel. Balai Agung Sekayu | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perbaikan drainaseLingkungan di Perumnas Griya Bumi Lestari RT 40 RW II Kel. Balai Agung | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Rt. 08 Dusun 03 Desa Wonorejo Kec. bayung Lencir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Rt. 09 Dusun 03 Desa Wonorejo Kec. bayung Lencir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Plat Duicker Pada Saluran Drainase Prumahan Pemda Laut Sekayu | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Drainase Dusun 8 Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Gang Barokah RT. 046 RW. 012 Kel. Balai Agung | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Drainase Jalan Meranti, Jalan Merawan dan Jalan Merbau RT.011 RW.004 Komplek Perumnas Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan drainase dalam Dusun di Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan drainase di dusun 1 Desa Dawas Kec. Keluang | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Drainase Dusun 2 Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Drainase Dusun III Desa Dawas Kecamatan Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Parit di Dusun I, Dusun II, dan Dusun III Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perbaikan drainase di Rt. 15 Kelurahan Babat Kec. Babat Toman | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Drainase di Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perbaikan drainase Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Parit Genangan air di Desa Lumpatan II Dusun II dan VIII Kecamatan Sekayu | | | | | 320.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di RT 15 Kelurahan Keluang | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Dusun I, II, III Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Drainase di Rt.013 Dusun 003 Desa Margo Mulyo Kecamata Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Drainase di Rt. 05 Dusun 02 Desa Pandan Sari Kecamatan tungkal jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Parit / Drainase Dusun III dan Dusun IV Desa Karang Ringin II Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Drainase di Rt. 10 Dusun 02 Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Plat Deker di RT 18 Dusun III Desa Berojaya Timur Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Plat Deker di Rt 02 Dusun 01 desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Parit/Drainase di Dusun II dan V, Desa Mekar Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan/Rehab Saluran Drainase di Dusun I, III, DAN IV, Desa Babat Banyuasin, Kecamatan Babat Supat | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Dusun 1 dampai Dusun 5 Desa Bandar Tenggulang Kecamatan Babat Supat | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Dusun 6 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Perumahan Green Village Selarai RT. 038 RW. 005 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu. | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman | | | | | 1.030.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase Lingkungan III Kelurahan Kayuara Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | **66.118.220.800** | | | | | | | - | **41.945.680.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas bangunan gedung ]** | **Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik** | **83** | **75** | **75** | **77** | **66.118.220.800** | - | - | - | - | - | - | - | **41.945.680.000** | - |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani* | - | | | 98 % | 66.118.220.800 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 41.945.680.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 291 Dokumen | 65.718.220.800 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 41.345.680.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Penataan Lanscape Kantor Camat Sungai Keruh | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Al Abror Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyelesaian Masjid Baitul Izzah Perumahan Komplek Villa Bukit Sejahtera (VBS) Kel. Kayuara Kec. Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Toman Baru Kec. Babat Toman | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholllah Al-Ikhwan Desa Ngulak I Kec. Sanga Desa | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Penyelesaian Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kepala Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Baitul Mustaghfirin Komplek Perumnas Jl. Jati Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 24.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Al Hidayah Sungai Harapan Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan | | | | | 18.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan halaman Mushola As Salam Komplek Praja Mukti Kelurahan Soak baru Kec. Sekayu | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Dan Renovasi Gedung Mapolres Muba | | | | | 11.090.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Serbaguna Lapas Musi Banyuasin | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Gedung Aula Serbaguna Kodim 0401 Muba | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Unit Asrama Kodim 0401 Muba | | | | | 1.200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Rumah Dinas Polsek Sungai Lilin | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Dan Renovasi Gedung Mapolres Muba | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Dan Renovasi Gedung Mapolres Muba | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Serbaguna Lapas Musi Banyuasin | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Serbaguna Lapas Musi Banyuasin | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KEWENANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung Aula Serbaguna Kodim 0401 Muba | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Gedung Aula Serbaguna Kodim 0401 Muba | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Unit Asrama Kodim 0401 Muba | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Unit Asrama Kodim 0401 Muba | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa konsultasi Perencanaan Rehab Rumah Dinas Polsek Sungai Lilin | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Rumah Dinas Polsek Sungai Lilin | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Kantor Kepala Desa Epil Kec. Lais | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Kapolsek Lais | | | | | 1.235.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tugu Gajah Desa Gaja Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Balai Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Pangkalan Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman Kantor Desa peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 1.800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Balai Pertemuan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung TPA Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman dan Penimbunan lapangan fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan | | | | | 495.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Sekretariat PKK Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gapura TPU Dusun II Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman Kantor Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung serbaguna di Jalur 3 Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 570.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna, Desa Sukarami Kec. Sekayu | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan | | | | | 270.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman Kantor Kepala Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan gedung serba guna Dusun 4 Desa Terusan Kec. Sanga Desa | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Serba Guna Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Teluk Kemang Kel. Sungai Lilin | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Gedung serbaguna Kelurahan Keluang | | | | | 332.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung PKK Kantor Camat Sekayu | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung PKK Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Gedung serba guna di Dusun I Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gapura Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung serba guna di Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Kantor Kepala Desa Epil Kec. Lais | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan gedung serbaguna di Kecamatan Babat Supat Dusun XI Kecamatan Babat Supat | | | | | 1.425.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Kantor Camat Plakat Tinggi Kec. Plakat Tinggi | | | | | 4.940.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Kantor Kepala Desa Epil Kec. Lais | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi gedung kantor Iurah Mangun Jaya di Kecamatan Babat Toman | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan gedung serba guna di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kapolsek Lais | | | | | 32.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kapolsek Lais | | | | | 32.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tugu Gajah Desa Gaja Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tugu Gajah Desa Gaja Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KEGIATAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Gapura Masjid Muhajirin Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar dan Gapura Masjid Muhajirin Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan gedung serba guna Dusun 4 Desa Terusan Kec. Sanga Desa | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Pangkalan Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Teluk Kemang Kel. Sungai Lilin | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Teluk Kemang Kel. Sungai Lilin | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Pangkalan Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Halaman kantor Desa peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Gedung serbaguna Kelurahan Keluang | | | | | 8.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Gedung serbaguna Kelurahan Keluang | | | | | 8.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman kantor Desa peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PKK Kantor Camat Sekayu | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung PKK Kantor Camat Sekayu | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PKK Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung PKK Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung TPA Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung TPA Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Sekretariat PKK Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Sekretariat PKK Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Halaman Kantor Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung serba guna di Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung serba guna di Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan gedung serbaguna di Kecamatan Babat Supat Dusun XI Kecamatan Babat Supat | | | | | 32.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Halaman dan Penimbunan lapangan fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan | | | | | 27.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman dan Penimbunan lapangan fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan | | | | | 27.500.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO KEWENANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung serbaguna di Jalur 3 Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung serbaguna di Jalur 3 Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna, Desa Sukarami Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna, Desa Sukarami Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan gedung serbaguna di Kecamatan Babat Supat Dusun XI Kecamatan Babat Supat | | | | | 32.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Plakat Tinggi Kec. Plakat Tinggi | | | | | 130.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Plakat Tinggi Kec. Plakat Tinggi | | | | | 130.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Gedung serba guna di Dusun I Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Gedung serba guna di Dusun I Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Prasarana Jalan di Kelurahan Mangun Jaya Kec. Babat Toman | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Prasarana Jalan di Kelurahan Mangun Jaya Kec. Babat Toman | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan gedung serba guna di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan gedung serba guna di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi gedung kantor lurah Mangun Jaya di Kecamatan Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi gedung kantor lurah Mangun Jaya di Kecamatan Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman Kantor Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Halaman Kantor Kepala Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman Kantor Kepala Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gapura Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gapura Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Al Abror Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyelesaian Masjid Baitul Izzah Perumahan Komplek Villa Bukit Sejahtera (VBS) Kel. Kayuara Kec. Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Toman Baru Kec. Babat Toman | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholllah Al-Ikhwan Desa Ngulak I Kec. Sanga Desa | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Penyelesaian Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kepala Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Baitul Mustaghfirin Komplek Perumnas Jl. Jati Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Al Hidayah Sungai Harapan Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan | | | | | 252.740.800 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Penataan halaman Mushola As Salam Komplek Praja Mukti Kelurahan Soak baru Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Musholah Hasan Djafar Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman Masjid Nurul Iman Desa Sumber Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Pagar dan Penataan Halaman Masjid Al Ahmad Desa Ulak Kembang Kec. Batanghari Leko | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar TPU Kayuara | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Pagar dan Penataan Halaman Masjid Al Ahmad Desa Ulak Kembang Kec. Batanghari Leko | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman Masjid Al Yakub Arrahman Kelurah Balai agung Sekayu | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Masjid KTGR Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 475.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Halaman di Musholah Al- Malik di Desa Loka Jaya Kec. Keluang | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Nurul Iman Dusun 3 Desa Air Putih Ilir Kec. Plakat Tinggi | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Al - Ihklassul Muttaqin, Dusun 4 Desa Mendis Kec. Bayung Lencir | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Durul Falah Rt. 05 Dusun 2 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Al – Bainah Dusun VI Desa Dawas Kecamatan Keluang | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 450.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Balai Masyarakat di Talang Bendar Kelurahan Kayu Ara Kec. Sekayu | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholah Al-Hidayah Dusun 15 Desa Karya Maju Kec. Keluang | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan tangga raja RT 02 RW 01 Lk IV Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Atap Mushola Nurul Iman, Rt. 06 Dusun 2 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Baitul Amal Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan halaman Mushola Baiturahman Rt. 08 Dusun 3 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Masjid Thorikul Jannah Rt. 23 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Masjid Al.Hurryah Dusun III Desa Lais Kec.Lais | | | | | 1.140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Jami Nurrohim Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Masjid Al Jamik Dusun 2 RT 004 Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Nurul Huda Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Musholah Al-Mutahidah Dusun II Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Gedung Nahdatul Ulama (NU) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 475.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Masjid Jami' Dusun I Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholah Baitul Muttaqin Desa Tenggulang Baru Kec. Babat Supat | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholla Nurul Huda Desa Sumber Jaya Kec. Babat Supat | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Miftahul Pala Desa Sukarami Kecamatan Sekayu | | | | | 2.090.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar dan Penataan halaman dengan paving block Masjid Baitul Imaroh Dusun 02 Rt.07 Desa Sari Agung Kec.Lalan | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun 4 Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Tempat Wudhu dan Parkir Motor Masjid Darussholihin Dusun III Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung TPA dan TPQ Nurul Huda Rt.4 Dusun 5 Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar TPA Al'falah dusun 1 RT 01 Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholah Al Istiqomah Dusun I Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Renovasi Masjid Sabilil Muttaqien Dusun 3 Desa Air Putih ulu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Musholah Al-Huda Dusun II Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangga Raja di Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Rehab Total Masjid Al Hidayah Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tangga Raja Jalan Laskar Jimbun Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 475.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholla Al Amin Dusun 5 Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Awwabin Desa Lumpatan Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar TPU RT.010 RW.004 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan WC dan Tempat Wudhu Musholah Sabilillah Dusun 3 Desa Karang Waru | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar TPU Komplek Danau Cala Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Musholla Al-Hasan Jalan Inpres Km. 11 Kampung Sekate Kel Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gapura Musholla Al-Hasan Jalan Inpres Km. 11 Kampung Sekate Kel Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan WC dan Teras Musholiah Al Ikhlas Dusun IV Desa Bukit Sejahtera | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gapura/Gerbang Masjid Ponpes Al Fath Yatim Dhuafa Kab. Muba | | | | | 475.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Musholo Nurul Hidayah di Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 180.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gudang dan Rumah Marbot Masjid Nurul Iman Desa Ulak Teberau Kec. Lawang Wetan | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan dan Penimbunan Pemakaman Umum Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid AL-MUHAJJIRIN Dusun 5 Talang Ucin Kec. Lais | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan pagar TPU dan Gapura TPU Dusun 3 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 95.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Masjid AT TAQWA Dusun 3 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyelesaian Pembangunan Tangga Raja Dusun 1 dan 4 Desa Epil Kec. Lais | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung PAKOI Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Balai Serba Guna Dusun Selaro Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan halaman Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Masjid AL Muklis Dusun 5 Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir | | | | | 95.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Mushola dan Penataan halaman untuk PKM Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penimbunan Lahan MBR Dusun 4 Desa Karang Waru | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar dan Gapura Masjid Muhajirin Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tempat wudhu dan Toilet Masjid AT-Taufik Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Mushola Al- Muhajirin Kebun Sayur Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Raudatul Jannah RT.04 RW.02 Kel. Sungai Lilin Jaya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan TPA Rt.07 Dusun 02 Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Muhajirin Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Mushola Miftahul Jannah Rt.09 di Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Mushola Darusa'adah Rt.10 Rw.05 Lk.6 Kelurahan Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 95.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Mushola At-Taqwa Rt.34 Rw.10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 95.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan MCK dan Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman RT 03 RW 01 Desa Kaliberau Kec. Bayung Lencir | | | | | 332.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penimbunan PPKM di RT 016 RW 005 Lk. II Terusan Deras Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Nurul Huda Dusun 6 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan MCK Madin Mamba Ul Hidayah V Rt. 10 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 142.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Musholah Hasan Djafar Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Ruang Kantor TPA Mambul Hidayah Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Masjid Jami' Darussalam Dusun II Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu | | | | | 1.140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penimbunan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) PPKM komplek Danau Cala Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Pagar dan Penataan Halaman Masjid Al Ahmad Desa Ulak Kembang Kec. Batanghari Leko | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penimbunan lahan PKM Kota di Kampung Sekate KM.11 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 427.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Masjid di Dusun II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Masjid AL-Muhajirin Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Musholah Hasan Djafar Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Halaman Masjid Al Yakub Arrahman Kelurah Balai agung Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin | | | | | 760.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman Masjid Al Yakub Arrahman Kelurah Balai agung Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Halaman di Musholah Al- Malik di Desa Loka Jaya Kec. Keluang | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman di Musholah Al- Malik di Desa Loka Jaya Kec. Keluang | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid KTGR Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Masjid Nurus Salam di Dusun II Desa Bangkit Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 304.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Masjid KTGR Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Sugi Raya Kecamatan Babat Toman | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Masjid di Desa Bruge Kecamatan Babat Toman | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Halaman Masjid Nurul Iman Desa Sumber Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Prasarana Jalan di Kelurahan Mangun Jaya Kec. Babat Toman | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Al Mujahidin Desa Jirak Kec. Jirak Jaya | | | | | 237.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Halaman Masjid Nurul Iman Desa Sumber Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Masjid AL Muklis Dusun 5 Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Masjid Al – Bainah Dusun VI Desa Dawas Kecamatan Keluang | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Masjid AL Muklis Dusun 5 Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Masjid Al – Bainah Dusun VI Desa Dawas Kecamatan Keluang | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Nahdatul Ulama (NU) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Masjid Fajrul Iman RT.1 Dusun 1 Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 285.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Al Mujahidin Desa Jirak Kec. Jirak Jaya | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Al Mujahidin Desa Jirak Kec. Jirak Jaya | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Nahdatul Ulama (NU) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat wudhu dan Toilet Masjid AT-Taufik Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat wudhu dan Toilet Masjid AT-Taufik Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Masjid Fajrul Iman RT.1 Dusun 1 Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan gedung serba guna Dusun 4 Desa Terusan Kec. Sanga Desa | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Masjid Fajrul Iman RT.1 Dusun 1 Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Nurul Iman Dusun 3 Desa Air Putih Ilir Kec. Plakat Tinggi | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Mushala Al-Muhajirin Kebun Sayur Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Nurul Iman Dusun 3 Desa Air Putih Ilir Kec. Plakat Tinggi | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Mushala Al-Muhajirin Kebun Sayur Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Masjid Al - Ihklassul Muttaqin, Dusun 4 Desa Mendis Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Masjid Al - Ihklassul Muttaqin, Dusun 4 Desa Mendis Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Raudatul Jannah RT.04 RW.02 Kel. Sungai Lilin Jaya | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Durul Falah Rt. 05 Dusun 2 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Raudatul Jannah RT.04 RW.02 Kel. Sungai Lilin Jaya | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Durul Falah Rt. 05 Dusun 2 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Atap Mushola Nurul Iman, Rt. 06 Dusun 2 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penimbunan PPKM di RT 016 RW 005 Lk. II Terusan Deras Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Atap Mushola Nurul Iman, Rt. 06 Dusun 2 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan halaman Mushola Baiturahman Rt. 08 Dusun 3 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penimbunan PPKM di RT 016 RW 005 Lk. II Terusan Deras Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan halaman Mushola Baiturahman Rt. 08 Dusun 3 Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Masjid Thorikul Jannah Rt. 23 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Masjid Thorikul Jannah Rt. 23 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penimbunan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) PPKM komplek Danau Cala Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Balai Masyarakat di Talang Bendar Kelurahan Kayu Ara Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Kayuara | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar TPU Kayuara | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penimbunan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) PPKM komplek Danau Cala Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Al.Hurryah Dusun III Desa Lais Kec.Lais | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Balai Masyarakat di Talang Bendar Kelurahan Kayu Ara Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Masjid Al.Hurryah Dusun III Desa Lais Kec.Lais | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan TPA Rt.07 Dusun 02 Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Penataan halaman dengan paving block Masjid Baitul Imaroh Dusun 02 Rt.07 Desa Sari Agung Kec.Lalan | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TPA Rt.07 Dusun 02 Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar dan Perataan halaman dengan paving block Masjid Baitul Imaroh Dusun 02 Rt.07 Desa Sari Agung Kec.Lalan | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Muhajirin Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Jami Nurrohim Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan tangga raja RT 02 RW 01 Lk IV Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Jami Nurrohim Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Muhajirin Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar Masjid Al Jamik Dusun 2 RT 004 Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Musholа Miftahul Jannah Rt.09 di Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Musholа Miftahul Jannah Rt.09 di Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Musholah Al-Hidayah Dusun 15 Desa Karya Maju Kec. Keluang | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Musholа Darusa'adah Rt.10 Rw.05 Lk.6 Kelurahan Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Masjid Al Jamik Dusun 2 RT 004 Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan tangga raja RT 02 RW 01 Lk IV Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Musholа Darusa'adah Rt.10 Rw.05 Lk.6 Kelurahan Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Musholah Al-Hidayah Dusun 15 Desa Karya Maju Kec. Keluang | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Baitul Amal Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Musholа At-Taqwa Rt.34 Rw.10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Musholа At-Taqwa Rt.34 Rw.10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Masjid Miftahul Pala Desa Sukarami Kecamatan Sekayu | | | | | 55.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Baitul Amal Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan MCK dan Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman RT 03 RW 01 Desa Kaliberau Kec. Bayung Lencir | | | | | 8.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Masjid Miftahul Pala Desa Sukarami Kecamatan Sekayu | | | | | 55.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan MCK dan Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman RT 03 RW 01 Desa Kaliberau Kec. Bayung Lencir | | | | | 8.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Masjid Nurul Huda Dusun 6 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Masjid Nurul Huda Dusun 6 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan MCK Madin Mamba Ul Hidayah V Rt. 10 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan MCK Madin Mamba Ul Hidayah V Rt. 10 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kantor TPA Mambul Hidayah Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kantor TPA Mambul Hidayah Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura TPU Dusun II Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura TPU Dusun II Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Masjid Jami' Darussalam Dusun II Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Masjid Jami' Darussalam Dusun II Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun 4 Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun 4 Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung TPA dan TPQ Nurul Huda Rt.4 Dusun 5 Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Nurul Huda Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung TPA dan TPQ Nurul Huda Rt.4 Dusun 5 Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar TPA Al'falah dusun 1 RT 01 Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Nurul Huda Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar TPA Al'falah dusun 1 RT 01 Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Musholah Baitul Muttaqin Desa Tenggulang Baru Kec. Babat Supat | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Masjid Sabilil Muttaqien Dusun 3 Desa Air Putih ulu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Renovasi Masjid Sabilil Muttaqien Dusun 3 Desa Air Putih ulu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Musholah Baitul Muttaqin Desa Tenggulang Baru Kec. Babat Supat | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Balai Serba Guna Dusun Selaro Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penimbunan lahan PKM Kota di Kampung Sekate KM.11 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 11.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Balai Serba Guna Dusun Selaro Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penimbunan lahan PKM Kota di Kampung Sekate KM.11 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 11.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PAKOI Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Musholla Nurul Huda Desa Sumber Jaya Kec. Babat Supat | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung PAKOI Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penataan halaman Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Masjid di Dusun II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penataan halaman Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Masjid di Dusun II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa | | | | | 6.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Musholla Nurul Huda Desa Sumber Jaya Kec. Babat Supat | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Masjid di Desa Bruge Kecamatan Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Masjid di Desa Bruge Kecamatan Babat Toman | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Tempat Wudhu dan Parkir Motor Masjid Darussholihin Dusun III Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Tempat Wudhu dan Parkir Motor Masjid Darussholihin Dusun III Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Musholah Al Istiqomah Dusun I Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Musholah Al Istiqomah Dusun I Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Masjid AL-Muhajirin Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Masjid AL-Muhajirin Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Sugi Raya Kecamatan Babat Toman | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan WC dan Tempat Wudhu Musholah Sabilillah Dusun 3 Desa Karang Waru | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Sugi Raya Kecamatan Babat Toman | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Masjid Nurus Salam di Dusun II Desa Bangkit Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 8.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan WC dan Tempat Wudhu Musholah Sabilillah Dusun 3 Desa Karang Waru | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Masjid Nurus Salam di Dusun II Desa Bangkit Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 8.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan WC dan Teras Musholah Al Ikhlas Dusun IV Desa Bukit Sejahtera | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan WC dan Teras Musholah Al Ikhlas Dusun IV Desa Bukit Sejahtera | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penimbunan Lahan MBR Dusun 4 Desa Karang Waru | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penimbunan Lahan MBR Dusun 4 Desa Karang Waru | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang dan Rumah Marbot Masjid Nurul Iman Desa Ulak Teberau Kec. Lawang Wetan | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gudang dan Rumah Marbot Masjid Nurul Iman Desa Ulak Teberau Kec. Lawang Wetan | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Masjid AL-MUHAJJIRIN Dusun 5 Talang Ucin Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Masjid AL-MUHAJJIRIN Dusun 5 Talang Ucin Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan pagar TPU dan Gapura TPU Dusun 3 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Penyelesaian Pembangunan Tangga Raja Dusun 1 dan 4 Desa Epil Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan Tangga Raja Dusun 1 dan 4 Desa Epil Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan pagar TPU dan Gapura TPU Dusun 3 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Masjid AT-TAQWA Dusun 3 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Masjid AT-TAQWA Dusun 3 Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Mushola dan Penataan halaman untuk PKM Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mushola dan Penataan halaman untuk PKM Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Musholah Al-Mutahidah Dusun II Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Musholah Al-Mutahidah Dusun II Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tangga Raja Dusun 1 dan 4 Desa Epil Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Masjid Jami' Dusun I Desa Simpang Sari Kec. Lawang wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Tangga Raja Dusun 1 dan 4 Desa Epil Kec. Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Masjid Jami' Dusun I Desa Simpang Sari Kec. Lawang wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Musholah Al-Huda Dusun II Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Musholah Al-Huda Dusun II Desa Simpang Sari Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tangga Raja di Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tangga Raja di Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Total Masjid Al Hidayah Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Total Masjid Al Hidayah Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tangga Raja Jalan Laskar Jimbun Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tangga Raja Jalan Laskar Jimbun Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Musholla Al Amin Dusun 5 Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Musholla Al Amin Dusun 5 Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Awwabin Desa Lumpatan Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Awwabin Desa Lumpatan Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar TPU RT.010 RW.004 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar TPU RT.010 RW.004 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Komplek Danau Cala Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar TPU Komplek Danau Cala Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Menara Musholla Al-Hasan Jalan Inpres Km. 11 Kampung Sekate Kel Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Menara Musholla Al-Hasan Jalan Inpres Km. 11 Kampung Sekate Kel Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura Musholla Al-Hasan Jalan Inpres Km. 11 Kampung Sekate Kel Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura Musholla Al-Hasan Jalan Inpres Km. 11 Kampung Sekate Kel Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura/Gerbang Masjid Ponpes Al Fath Yatim Dhuafa Kab. Muba | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura/Gerbang Masjid Ponpes Al Fath Yatim Dhuafa Kab. Muba | | | | | 12.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Mushola Nurul Hidayah di Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Mushola Nurul Hidayah di Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan dan Penimbunan Pemakaman Umum Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan dan Penimbunan Pemakaman Umum Desa Lumpatan II Kec. Sekayu | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Menara Masjid Agung Dusun 2 Desa Danau Cala Kecamatan Lais | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Menara Masjid Agung Dusun 2 Desa Danau Cala Kecamatan Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Menara Masjid Agung Dusun 2 Desa Danau Cala Kecamatan Lais | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Lanscape Kantor Camat Sungai Keruh | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 221.280.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 27.200.000 | | | | | | | | | |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 1 Dokumen | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Koordinasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | | | | | 22.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 31.468.500 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 194.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 92.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 33.036.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 26.895.500 | | | | | | | | | |
| 5. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | **450.000.000** | | | | | | | - | **1.400.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata ]** | **Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan** | **80** | **60** | **60** | **65** | **450.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.400.000.000** | - |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangan* | - | | | 45 % | 450.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.400.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 8 Dokumen | 450.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.400.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **99.109.760.000** | | | | | | | | **110.153.059.600** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **400.000.000** | | | | | | | - | **300.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100** | **100** | **100** | **100** | **400.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | **300.000.000** | - |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase terlaksanannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 400.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | - | - | 300.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | - | | 300.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | **8.285.000.000** | | | | | | | - | **21.320.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah ]** | **Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.285.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | **21.320.000.000** | - |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | - | | | 536 Unit | 7.160.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 20.195.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 128 Unit Rumah | 7.160.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 20.195.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais | | | | | 1.925.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 925.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman | | | | | 2.800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Relokasi di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan di Rumah Relokasi Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan di Rumah Relokasi Desa Sukarami Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Rumah Relokasi Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase di Rumah Relokasi Desa Sukarami Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.04.02.2.04 | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Persentase Terlaksana nya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi* | - | | | 100 % | 125.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 125.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.04.0004 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 125.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 125.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | *persentase terlaksanainya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | - | | | 100 % | 1.000.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.000.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0003 | Pembangunan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 1.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.000.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Penataan Halaman Rusunawa Kecamatan Sekayu | | | | | 925.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Halaman Rusunawa Kecamatan Sekayu | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **3.370.000.000** | | | | | | | - | **13.400.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kawasan kumuh yang tertangani ]** | **Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani** | **22** | **8** | **9** | **11** | **3.370.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **13.400.000.000** | - |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki*<br>*Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki* | - | | | 800 Unit Rumah<br>100 % | 3.370.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 13.400.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Laporan | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Reviu Dokumen Kebijakan Kawasan Kumuh | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.561.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 189.439.000 | | | | | | | | | |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan* | | | | 2 Ha | 3.020.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 13.200.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Kayuara I Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bayung Lencir Indah II Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bayung Lencir Indah II Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Bayung Lencir Indah I Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Bayung Lencir Indah I Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Kayuara II Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Kayuara II Kecamatan Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Ballangu Timur I Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Ballangu Timur I Kecamatan Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Balai Agung I Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Balai Agung I Kecamatan Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Babat I Kecamatan Babat Toman | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Babat I Kecamatan Babat Toman | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Kayuara I Kecamatan Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Serasan Jaya kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kelurahan Serasan Jaya kecamatan Sekayu | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| 4. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | **23.400.000.000** | | | | | | | - | **10.100.000.000** | |
| | | **[ Tertatanya Perumahan Dan Kawasan Permukiman ]** | **Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki** | **66** | **11.7** | **22** | **33** | **23.400.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **10.100.000.000** | - |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki* | - | | | 50 % | 23.400.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 10.100.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 630 Unit Rumah | 23.400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 10.100.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Jasa Konsultan Update Data RTLH Kecamatan Sekayu, Lais, Babat Supat | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Update Data RTLH Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Lalan | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Update Data RTLH Kecamatan Batang Hari Leko, Lawang Wetan, Keluang | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Update Data RTLH Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman, Plakat Tinggi, Jirak Jaya, Sungai Keruh | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 2.100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Babat Supat | | | | | 750.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Babat Toman | | | | | 1.250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Keluang | | | | | 1.100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Lais | | | | | 750.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Lalan | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 1.250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Sanga Desa | | | | | 1.250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Sekayu | | | | | 1.250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah bagi Masyarakat Desa Teluk Kec. Lais | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah bagi Masyarakat Desa Lais Kec. Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah bagi Masyarakat Desa Purwosari Kec. Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah bagi Masyarakat Desa Teluk Kijing 2 Kec. Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah bagi Masyarakat Desa Gajah Muda Kec. Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Desa Margo Mulyo (B3) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah bagi Masyarakat Desa Supat Kec. Babat Supat | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Desa Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Desa Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Untuk Rakyat Miskin di Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Untuk Rakyat Miskin di Kecamatan Babat Toman | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Kurang Mampu di Desa Loka Jaya Kec. Keluang | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Keluang Kec. Keluang | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni Desa Supat Kecamatan Babat Supat | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Untuk Rakyat Miskin di Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin dalam Kab. Musi Banyuasin | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Kurang Mampu dalam Kecamatan Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat tinggi | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin dalam Kecamatan Sekayu | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Kurang Mampu di Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin dalam Kabupaten Muba | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kelurahan Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai Lilin | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin dalam Kab. Muba | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin dalam Kec. Lawang Wetan | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin dalam Kecamatan Keluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Suluk RT.16 dan RW. 5 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Dusun 3 Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Kecamatan Sekayu | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah di Dusun 1 dan 2 Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Dusun I dan Dusun VII Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Desa Layan Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni Desa Rejosari Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Masyarakat Miskin Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BSPS/Bedah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 59.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 171.235.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.665.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 98.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 564.000.000 | | | | | | | | | |
| 5. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | **63.654.760.000** | | | | | | | - | **65.033.059.600** | |
| | | **[ Meningkatnya penyediaan PSU permukiman ]** | **Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)** | **100** | **80** | **80** | **85** | **63.654.760.000** | - | - | - | - | - | - | - | **65.033.059.600** | - |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *n Persentase PSU Yang dibangun / direhab* | - | | | 38 % | 63.654.760.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | masyarakat kabupaten musi banyuasin | - | 65.033.059.600 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | masyarakat kabupaten musi banyuasin | | 50.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum* | | | | 138 Lokasi | 63.604.760.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | masyarakat kabupaten musi banyuasin | | 64.983.059.600 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batanghari Leko, Keluang, Babat Supat dan Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sungai Lilin dan Lalan | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Lawang Wetan, Babat Toman dan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batanghari Leko, Keluang, Babat Supat dan Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sungai Lilin dan Lalan | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Lawang Wetan, Babat Toman dan Sanga Desa | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Cor Beton Jalan Lorong Dusun II dan XI Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pemasangan batu kali dan penimbunan Jalan menuju SDN 2 Teluk Desa Teluk Kec. Lais | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan Dengan Cor Beton Dusun VI ( philip 12 ) Desa Lais | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan menuju Pondok Pesantren ALHIDAYAH ALQURANIYYAH Desa Cipta Praja Kec. Keluang | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 1 desa cinta damai Kec. Sungai Lilin dengan cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 5 desa cinta damai Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Desa Sidorahayu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 2 desa cinta damai Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 6 dan Dusun 4 Desa Bukit Jaya Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 5 RT 20 dan RT 21 Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 5 Menuju Dusun 4 Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Bukit Jaya Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 3 Desa Suka Damai Baru Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 4 RT 2 Desa Linggosari Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 143.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 11 RT 01 Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dari SMPN 1 sampai Ke Posyandu Desa Peninggalan dengan cor beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan H. Nunung Dusun III Rt. 015 Desa Peninggalan dengan cor beton | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Bangsal Rt 17 Desa Peninggalan dengan cor beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dengan Cor Beton Jalan Lrg. H. Muin Rt. 06 Dusun 2 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dengan Cor Beton Jalan Lrg. Bidan Rt. 08 Dusun 2 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dengan Cor Beton Jalan dalam Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Dengan Cor beton Dusun II Desa Panca Tunggal | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan lingkungan Rt.014 Rw.04 Desa Margo Mulyo (B3) dengan beton Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Rt.09 Rw.02 Desa Margo Mulyo (B3) dengan beton Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab jalan setapak dari RT.4 ke RT. 10 Desa Sinar Hrapan Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Penmbangunan Jalan Lingkungan di RT. 08 Desa Marga Mulyo (B3) dengan Beton ke Tungkal Jalan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 06 Desa Margo Mulyo (B3) dengan Beton Ke Tungkal Jaya | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | pembangunan Jalan Lingkungan di RT.04 Desa Pandan Sari (B4) dengan Beton Kec. Tungkal Jaya | | | | | 230.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Desa Madya Mulya Kecamatan Lalan dengan Cor Beton | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dalam Desa Lumpatan | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan lingkungan Dusun III Desa Petaling Kec. Lais | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengerasan Jalan dalam Desa Karang Rejo Kec. Lalan | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Desa di Dusun IV Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat dengan Cor Beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan RT 02 Dusun IV Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat dengan Cor Beton | | | | | 650.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lorong di Rt.01, Rt.04, Rt.03, Rt.05, Rt.06 Desa Mulya Jaya Kecamatan Lalan | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan setapak dengan Cor Beton Rt. 05 Dusun II Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KEWENANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton Rt. 05 Dusun 02 Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Rt.01, Rt.03, Rt.05 sampai Rt.12 Dusun 1 sampai Dusun 3 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dalam Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan lingkungan Dusun 5 Rt 08 Desa warga Mulya Kec. Plakat Tinggi | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Dusun 6 Desa Rantau Sialang dengan Cor Beton | | | | | 420.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jalan Dari Danau Ulak Lia ke Sawah Seberang Desa Sukarami | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Rt.16 Rw.7 Dusun 3 Desa Bandar Jaya dengan Cor Beton | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Rt 13 Dusun 5 Desa Sumber Harum dengan cor beton | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dalam Desa Sialang Agung Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan setapak Dusun 004 RT 007 dan RT 005 Desa Sungai Batang Kec. Sekayu dengan cor beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Cor Beton menuju Pemakaman Umum Desa Kasmaran | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Cor Beton Dusun V Desa Kasmaran Menuju Dusun VIII Desa Kasmaran | | | | | 650.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan menuju pesantren Darul Tauhit Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan lorong Pak Imam Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan solok terap desa simpang bayat Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Dusun I Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan RT 28 Dusun II Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lorong Mukri RT 30 Dusun II Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04 Dusun 1 Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Tidar Dusun 3 RT. 16 dan 17 Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dengan Cor beton menuju Pesantren Darul Quran Al Madani Desa Pangkalan Jaya Kecamatan Babat Toman | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton Dusun 5 Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton Dusun III Desa Langkap Kec. Babat Supat | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton Rt. 003 Dusun 5 Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan Rompok Riau Ganau menuju Rompok Mayor Dusun I dan Dusun II Desa Lais Utara dengan Batu Pecah Desa Lais Utara Kec. Lais | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Kaplingan PTP Dusun 4 Desa Teluk Kijing 3 Kec. Lais dengan Cor Beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan lorong Dusun 2 Desa Pinang Banjar dengan cor beton | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengar Cor Beton Dusun 1 Desa Beji Mulyo Kec. Tugkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusn 2 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT 07 dan Rt. 08 Dusun 2 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan menuju TPU dengan Cor Beton di Dusun 3 Desa Beji Mulyo | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan di Dusun 3 Rt. 16 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusun 4 Rt. 21 Desa Beji Mulyo | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT 13 Dusun 07 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT 09 s.d 10 Dusun 2 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT 14 Dusun 7 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT 22 Dusun 5 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton RT 09 Dusun II Desa Berjaya Timur Kec. Tungkal Jaya | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di RT 14 Dusun 4 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan setapak Dengan Corbeton Dusun 3 Desa Kepayang Kec. Bayung Lincir | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di RT. 03 Dusun 01 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Rt. 03 Dusun 01 Desa Berojaya Timur Kec. Tungkal Jaya | | | | | 260.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusun 6 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT 012 Dusun 004 Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi jalan Lingkungan dengan Cor beton Dusun 3 di Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusun I, II, III, IV, VII, IX DAN XI Desa Babat Banyuasin, Kecamatan Babat Supat | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembustan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusun IV, Desa Babat Supat, Kecamatan Babat Supat | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT. 013 Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Desa Rimba Ukur Dusun 1,2, dan 4 Kecamatan Sekayu | | | | | 177.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab jalan menuju TPU di Dusun III Desa Suka Maju | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Dusun I RT 01 Desa Pangkalan Tungkal | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan menuju lapangan sepakbola RT 05 Dusun 2 Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Dengan Cor Beton Desa Muara Bahar Kec. Bayung Lincir | | | | | 2.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Desa Dusun 1 Desa Sialang Agung Kec. Plakat Tinggi | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Dengan Cor Beton Talang Bulu Kuring Ulu Rt. 03 Dusun I Desa Utak Paceh Jaya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Desa Rt. 04/Rw. 02 Desa Warga Mulya Kec. Plakat Tinggi | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan menuju PKM di RT.16 RW.05 Kel.soak baru kec.sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar PKU di RT.45 Jln. Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Cor di Simpit Rt. 035 Rw. 010 Kel Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jalan Setapak Menuju Musholah AL-MUSTOPA DI Rt. 39 Rw. 05 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak SDN 6 Sampai dengan sungai Lebung Buruh Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan H. Majid Malik Rt. 035 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dan Parit di RT. 034 Masjid Arrahman RT.034 RW 010 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Griya Mulya Permai (GMP) RT. 22 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Iwan Eder Rt. 040 Rw. 06 Kelurahan Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan di Lorong Damai Rt. 040 Rw. 06 Kelurahan Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dan Plat Deker di PPKUI Menuju Perumahan Becak Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Rt. 15 Rw. 05 Kel. Soak Baru dengan cor beton | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Cor Beton Dalam Dusun XIII RT.XIV Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Jalan Cor Beton Talang Buluh Kuring Ulu RT.03 Dusun I Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jalan di Desa Galih Sari Kec. Lalan Dengan Cor Beton | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Menuju Gedung Serbaguna di Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh Dengan Cor Beton | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan cor beton di Rt. 014 Rw. 006 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan di dalam Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Dwi Putra Desa Sukarami Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Dusun Indah Ulak Lia RT. 12 RW. 5 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Komplek GBL Blok A2 RT.37 RW. 01 Samping Masjid Baiturahman | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perumahan Griya Bumi Lestari (GBL) Rt. 42 Rw. 11 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Blok A3 Lorong Ketua RW. 011 LK III Perumahan GBL | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru di rt 25 rw 07 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu ( Jalan Masuk ke Talang Cempedak Ampe) | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Ulak Paceh Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan | | | | | 450.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Komplek GBL BLOK D2 Rt.42 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Cor Beton Dalam Jalur Di Desa Loka Jaya Kec. Keluang | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Pembangunan Jalan Setapak Dalam Jalur Desa Lokajaya Kec. Keluang | | | | | 276.640.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan di Desa Supat Kecamatan Babat Supat | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Menuju TPU Desa Sereka Kec. Babat Toman | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan di Desa Talang Leban Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 280.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Menuju Pustu Di Desa Loka Jaya Kecamata Keluang dengan cor beton | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan lingkungan di desa galih sari kec. Lalan dengan cor beton | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan lingkungan di Perumahan Griya Bumi Lestari (GBL) Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dalam Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak Puyang Dak Bepusar RT.09 Dusun 3 Desa Bailangu Kec.Sekayu | | | | | 241.820.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perumahan Griya Bumi Lestari (GBL) Rt. 44 Rw. 11 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT.01 Rw.04 Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di RT.05 Rw.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan lingkungan dari jalan Abdul Somad (Inpres Penjara) Rt. 014 Rw. 006 Kel. Soak baru | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dalam Komplek VBS Kel. Kayuara dengan cor beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan menuju TK. Al Fatih Rt. 17 Kelurahan Babat Kec. Babat Toman dengan cor beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak dari jalan Cha-cha ke jalan SDN 5 Sekayu Kelurahan Balai Agung | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan setapak di Jln. Merdeka LK I RT 04 RW 002 Kelurahan Kayuara Kec. Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan setapak di RT 16 RW 02 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan RT 01 RW 01 Lorong Darussalam Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu dengan cor beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan dengan cor beton di Perumahan Griya Cahaya Ilahi (GCI) RT.019 RW 008 Kelurahan Serasan Jaya Kec. Sekayu | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Menuju Pesantren Al Ma'Arif di Kelurahan Babat | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan di Rt. 15 Kelurahan Babat Kec. Babat Toman dengan cor beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dengan cor beton di RT.03,RT.04 dan RT. 05, RW. 01 Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMUDIAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Peningkatan Jalan menuju Puskesmas RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Pasar Pagi RW.01 Kebun Kelapa Kelurahan Sungai Lilin dengan Cor Beton Jalan | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT. 04 Kel. Sungai Lilin Jaya dengan Cor Beton | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Swadaya RT.04 RW.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Cor Beton | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan RT.06 RW.02 Kelurahan Sungai Lilin Jalan dengan Batu Agregat | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan menuju Mushola Istiqomah RT. 01 RW.05 Teluk Kemang, Kelurahan Sungai Lilin dengan cor beton | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan jalan Lrg. Hatta RT. 01 RW. 04 Teluk Kemang, Kel. Sungai Lilin dengan cor beton | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan menuju Mushola Al Husnah RT. 04 RW.06 Kampung Pertamina Kel. Sungai Lilin dengan Cor Beton | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak di RT. 11 RW. 4 Depan Rumah Subki Kel. Soak Baru | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I Keluarahan Ngulak Kecamatan Sanga Desa | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusun 5 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Desa Sri Damai - Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan dengan cor beton di Dusun 1-2 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan dengan cor beton di Dusun 1-4 Desa Loka Jaya Kecamatan Keluang | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun III Desa Pandan Dulang Desa Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor Beton di Dusun I dan II Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Cor di Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dengan Cor Beton di RT 15 Kelurahan Keluang Kec. Keluang | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan dengan Cor Beton di RT 15 RW.04 Kelurahan Keluang Kec Keluang | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pelebaran Jalan Setapak menuju TPU Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Dusun 1 Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang dengan Cor Beton | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Jalan SK Dusun I Desa Dawas Kec. Keluang | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Dusun 3 Desa Gajah Mati dengan Cor Beton | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan di Blok G RT 09 RW 09 di Desa Karya Maju | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Villa Bukit Sejahtera (VBS) Kecamatan Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju RT. 35 LK III Menuju Vila Kurma Kelurahan Balai Agung | | | | | 1.080.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 009 RW. 004 Kelurahan Serasan Jaya | | | | | 265.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.131.759.000** | | | | | | | | **800.000.000** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **3.131.759.000** | | | | | | | | **800.000.000** | |
| 1, | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | | **3.031.759.000** | | | | | | | - | **700.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ]** | **Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan** | **45** | **0** | **0** | **10** | **3.031.759.000** | - | - | - | - | - | - | - | **700.000.000** | - |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA* | - | | | 100 % | 3.031.759.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 700.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.05.2.01.0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah* | | | | 10 Dokumen | 3.031.759.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kantor Lurah Pemekaran Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 49.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembebasan Lahan untuk Kantor Kepala Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman | | | | | 275.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Kantor Kepala Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Penilaian Pengadaan Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Kantor Kepala Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum di samping Taman Air Serasan Sekate Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum di samping Taman Air Serasan Sekate Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 2.156.079.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Patok dan Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Tanah Untuk TPU Di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kantor Lurah Pemekaran Balai Agung Kec. Sekayu | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum di samping Taman Air Serasan Sekate Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | | **100.000.000** | | | | | | | - | **100.000.000** | |
| | | **[ Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah ]** | **Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee** | **100** | **0** | **0** | **100** | **100.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **100.000.000** | - |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Tersedianya tanah Obyek landreform (TOL) yang siap di retribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum tanah absentee* | - | | | 100 % | 100.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | MAsyarakat KAbupaten Musi Banyuasin | - | 100.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | MAsyarakat KAbupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.06.2.01.0006 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.* | | | | 2 Berita Acara | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | MAsyarakat KAbupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **15.074.479.518** | | | | | | | | **14.357.958.251** | |
| | **01.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **15.074.479.518** | | | | | | | | **14.357.958.251** | |
| 1. | **01.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **15.074.479.518** | | | | | | | - | **14.357.958.251** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananyaKegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 145.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 170.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 65.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 20.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 40 Data | 85.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 85.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 11.663.123.118 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 9.735.033.236 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 91 Orang/bulan | 11.663.123.118 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 9.735.033.236 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 92.295.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 92.295.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 8 Dokumen | 92.295.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 92.295.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 192.910.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 297.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 91 Paket | 92.910.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 97.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 630.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.130.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 60.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 23 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 25 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 80.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 66 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 40.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 100.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 150.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 1.323.143.200 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.721.729.545 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 706.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 708.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 617.143.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.013.729.545 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 928.008.200 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 1.061.900.470 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 649.100.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 649.100.200 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 139.454.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 345.199.150 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | Pemasangan Interior Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin | | | | | 124.454.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan Interior Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.04.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 70 Unit | 139.454.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 67.601.120 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **21.616.525.158** | | | | | | | | **22.853.859.845** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **21.616.525.158** | | | | | | | | **22.853.859.845** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **21.616.525.158** | | | | | | | | **22.853.859.845** | |
| 1, | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **14.645.199.145** | | | | | | | - | **16.739.859.845** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**79.30** | **100**<br>**76.60** | **100**<br>**77.05** | **100**<br>**77.50** | **14.645.199.145** | - | - | - | - | - | - | - | **16.739.859.845** | - |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 104.984.400 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 160.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 35.413.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 70.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 19.665.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 30.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 49.906.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 60.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran* | - | | | 100 % | 11.129.922.319 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 11.875.359.845 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 141 Orang/bulan | 11.129.922.319 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 11.875.359.845 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah perkantoran* | - | | | 100 % | 185.375.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 220.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 185.375.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 220.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu* | - | | | 100 % | 397.637.940 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 380.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 246.382.940 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 180.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 17 Orang | 151.255.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran* | - | | | 100 % | 669.241.047 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.030.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.771.190 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 40.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 149.960.237 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 280.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 42.526.764 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 60.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 151.850.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 160.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 75.060.057 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 40.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 250 Laporan | 150.072.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur* | - | | | 100 % | 75.680.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 250.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 75.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran* | - | | | 100 % | 889.108.438 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.246.500.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 252.163.638 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 350.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 636.944.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 896.500.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik* | - | | | 100 % | 1.193.250.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.578.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 27 Unit | 1.019.450.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 148.920.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 450.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 30 Unit | 24.880.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 28.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | **6.971.326.014** | | | | | | | - | **6.114.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ 1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana ]** | **Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana<br>Persentase Penanganan Pasca Bencana<br>Persentase penanganan tanggap bencana darurat** | **100<br>2.19** | **0.52<br>100** | **0.69<br>100** | **0.90<br>100** | **6.971.326.014** | - | - | - | - | - | - | - | **6.114.000.000** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Laporan Data Kebencanaan yang Akurat* | - | | | 100 % | 150.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 170.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 400 Orang | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 170.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Terlaksananya Koordinasi & pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas* | - | | | 100 % | 4.121.795.114 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.670.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 250 Unit | 2.736.858.114 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.000.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | mobil skylift | | | | | 1.552.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mobil Jenazah | | | | | 406.593.000 | | | | | | | | | |
| | | | belanja HT Satelite | | | | | 135.159.500 | | | | | | | | | |
| | | | belanja life jacket | | | | | 133.362.336 | | | | | | | | | |
| | | | TV LED 85 inch | | | | | 96.887.500 | | | | | | | | | |
| | | | helm safety | | | | | 51.416.976 | | | | | | | | | |
| | | | Jas Hujan | | | | | 36.219.300 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | 183.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 101.887.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 39.832.000 | | | | | | | | | |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota* | | | | 1500 Orang | 250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 270.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 31 Orang | 186.300.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 400.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 1 laporan | 948.637.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.000.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Laporan Data Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | - | | | 100 % | 1.539.343.100 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.174.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas* | | | | 1 Laporan | 30.125.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 52.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 1 Dokumen | 302.011.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 960.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 80 Orang | 163.255.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 110.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 80 Orang | 174.027.100 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 160.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu* | | | | 1 Dokumen | 30.125.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 52.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 839.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 840.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | - | | | 100 % | 1.160.187.800 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* | | | | 4 Laporan | 62.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 1 Kegiatan | 249.488.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 500.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 3 Dokumen | 749.724.800 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 500.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 98.975.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **50.386.719.214** | | | | | | | | **50.386.719.214** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **50.386.719.214** | | | | | | | | **50.386.719.214** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **50.386.719.214** | | | | | | | | **50.386.719.214** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **44.000.975.220** | | | | | | | - | **44.000.975.220** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**72.50** | **100**<br>**71.90** | **100**<br>**72.00** | **100**<br>**72.10** | **44.000.975.220** | - | - | - | | - | - | - | **44.000.975.220** | - |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 87.465.117 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 87.465.117 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 34.999.560 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 34.999.560 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 22.773.720 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 22.773.720 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.05.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 29.691.837 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 29.691.837 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 38.828.500.742 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 38.828.500.742 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 591 Orang/bulan | 38.828.500.742 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 38.828.500.742 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 109.335.250 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 109.335.250 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 109.335.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 109.335.250 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 1.589.064.775 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 1.589.064.775 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1.589.064.775 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 1.589.064.775 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 1.121.321.925 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 1.121.321.925 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.959.247 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 29.959.247 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 342.000.678 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 342.000.678 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 74.998.141 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 74.998.141 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 186.378.089 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 186.378.089 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 148.005.770 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 148.005.770 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 40.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 50.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 249.980.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 249.980.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 750.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 750.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 14 Unit | 750.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 750.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | Belanja Pengadaan Alat Korsik | | | | | 725.409.187 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 157.813 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 23.753.000 | | | | | | | | | |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 238.462.088 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 238.462.088 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 67.350.888 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 67.350.888 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 171.111.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 171.111.200 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 1.276.825.323 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 1.276.825.323 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 84.230.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 84.230.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 34 Unit | 1.121.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 1.121.950.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 52.955.323 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 52.955.323 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 29 Unit | 17.690.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 17.690.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.743.946.036** | | | | | | | - | **1.743.946.036** | |
| | | **[ 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS ]** | **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.743.946.036** | - | - | - | | - | - | - | **1.743.946.036** | - |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 1.025.431.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 1.025.431.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 121.650.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 121.650.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 79.966.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 79.966.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 1 Dokumen | 91.350.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 91.350.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0012 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.* | | | | 10 Orang | 65.378.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 65.378.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas* | | | | 50 Orang | 66.870.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 66.870.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 91 laporan | 225.557.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 225.557.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 40 Laporan | 74.280.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 74.280.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | | | | 6 Laporan | 300.380.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 300.380.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota* | - | | | 100 % | 686.653.036 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 686.653.036 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 3 Laporan | 89.841.036 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 89.841.036 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 4 Laporan | 54.912.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 54.912.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 4 Laporan | 541.900.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 541.900.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda* | - | | | 100 %<br>3 Orang | 31.862.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | - | 31.862.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah* | | | | 1 Laporan | 31.862.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Anggota Satpol PP | | 31.862.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 3. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | **919.829.408** | | | | | | | - | **919.829.408** | |
| | | **[ 1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana ]** | **Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **919.829.408** | - | - | - | - | - | - | - | **919.829.408** | - |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 68.653.408 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 68.653.408 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 80 Orang | 68.653.408 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 68.653.408 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | - | | | 100 % | 851.176.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 851.176.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 10 Orang | 777.356.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 777.356.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 40 Orang | 73.820.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 73.820.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 4, | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | **3.721.968.550** | | | | | | | - | **3.721.968.550** | |
| | | **[ 1) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran 2) Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ]** | **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.721.968.550** | - | - | - | | - | - | - | **3.721.968.550** | - |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah* | - | | | 100 % | 3.630.028.550 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 3.630.028.550 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 749.625.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 749.625.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | | | | 3 Orang | 90.308.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 90.308.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 7 Unit | 2.790.095.550 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 2.790.095.550 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran | | | | | 1.234.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Mobil Pemadam Kebakaran Fire Rescue | | | | | 1.487.760.750 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran | | | | | 50.426.579 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran | | | | | 16.860.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 47.322 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | *Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran* | - | | | 100 % | 36.690.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 36.690.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN BESARAN KEBUTUHAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 36.690.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 36.690.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | *Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran* | - | | | 100 % | 55.250.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | | 55.250.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 40 Orang | 55.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 55.250.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **20.751.353.128** | | | | | | | | **19.720.000.000** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **20.751.353.128** | | | | | | | | **19.720.000.000** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **20.751.353.128** | | | | | | | | **19.720.000.000** | |
| 1, | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **9.171.446.698** | | | | | | | - | **8.420.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran** | **100 76.05** | **100 75.80** | **100 75.85** | **100 75.90** | **9.171.446.698** | - | - | - | - | - | - | - | **8.420.000.000** | - |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD* | - | | | 100 % | 86.968.000 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 130.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 23.036.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 70.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 21.281.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 42.651.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 12 Bulan | 7.182.329.861 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 5.000.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 58 Orang/bulan | 7.182.329.861 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 5.000.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 100 % | 36.902.500 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 50.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 5 Dokumen | 36.902.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD* | - | | | 100 % | 175.156.000 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 125.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 54.768.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 120.388.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 65.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran* | - | | | 100 % | 857.940.800 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 995.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 27.177.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 193.434.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 200.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 38 Paket | 40.440.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 59 Paket | 157.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 56.810.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 55.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 20 Laporan | 41.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 301.278.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 400.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 116.170.137 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.250.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 1.100.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 116.170.137 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor* | - | | | 100 % | 260.219.400 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 400.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 133.711.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 126.508.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 455.760.000 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 470.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 246.910.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 193.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 200.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 25 Unit | 15.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | **2.154.326.570** | | | | | | | - | **2.800.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ]** | **Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.154.326.570** | - | - | - | | | - | - | **2.800.000.000** | - |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Presentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa* | - | | | 100 % | 2.154.326.570 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Generasi Muda, Mahasiswa/Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama | - | 2.800.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 200 Orang | 147.614.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Generasi Muda, Mahasiswa/Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama | | 200.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 100 Orang | 193.295.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Generasi Muda, Mahasiswa/Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama | | 250.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 4 Laporan | 21.268.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Generasi Muda, Mahasiswa/Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama | | 50.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 75 Orang | 1.792.148.670 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Generasi Muda, Mahasiswa/Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama | | 2.300.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | **5.939.243.100** | | | | | | | - | **6.650.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya etika dan budaya politik ]** | **Persentase Pendidikan Politik Pada Masyarakat dan Kader Partai Politik** | **100** | **-** | **20** | **40** | **5.939.243.100** | - | - | - | - | - | - | - | **6.650.000.000** | - |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik* | - | | | 100 % | 5.939.243.100 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Partai Politik, Lembaga Vertikal, Lembaga Pemerintah, Generasi Muda, Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat | - | 6.650.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 5.461.440.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Partai Politik, Lembaga Vertikal, Lembaga Pemerintah, Generasi Muda, Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat | | 5.500.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | Hibah Kepada Parpol | | | | | 5.461.440.000 | | | | | | | | | |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 195 Orang | 100.627.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Partai Politik, Lembaga Vertikal, Lembaga Pemerintah, Generasi Muda, Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat | | 450.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 100 Orang | 136.219.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Partai Politik, Lembaga Vertikal, Lembaga Pemerintah, Generasi Muda, Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat | | 200.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 365 Laporan | 240.956.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Partai Politik, Lembaga Vertikal, Lembaga Pemerintah, Generasi Muda, Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat | | 500.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | **247.530.000** | | | | | | | - | **500.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ]** | **Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif** | **85** | **55** | **60** | **65** | **247.530.000** | - | - | - | - | - | - | - | **500.000.000** | - |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | - | | | 100 % | 247.530.000 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Ormas/LSM dan OKP | | 500.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 100 Orang | 247.530.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Ormas/LSM dan OKP | | 500.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | **2.451.536.010** | | | | | | | - | **500.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ]** | **Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.451.536.010** | - | - | - | - | - | - | - | **500.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* | - | | | 100 % | 2.451.536.010 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKUB, Pelajar/Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | - | 500.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 125 Orang | 2.451.536.010 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | FKUB, Pelajar/Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | | 500.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | Makan minum pasien rumah rehab (NAPZA) | | | | | 177.390.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Kepada BNK Musi Banyuasin | | | | | 1.700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 27.537.510 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 27.162.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 22.775.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 24.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 10.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 168.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 168.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 54.851.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 71.020.000 | | | | | | | | | |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | **787.270.750** | | | | | | | - | **850.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ]** | **Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial** | **100** | **100** | **100** | **100** | **787.270.750** | - | - | - | | - | - | - | **850.000.000** | - |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | - | | | 100 % | 787.270.750 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah, Pelajar, Masyarakat, FKDM | - | 850.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 160 Orang | 59.493.780 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah, Pelajar, Masyarakat, FKDM | | 150.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 50 Orang | 228.665.800 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah, Pelajar, Masyarakat, FKDM | | 200.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 3 Laporan | 232.224.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah, Pelajar, Masyarakat, FKDM | | 200.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 266.887.170 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah, Pelajar, Masyarakat, FKDM | | 300.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | **105.645.452.862** | | | | | | | | **79.093.042.300** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **105.645.452.862** | | | | | | | | **79.093.042.300** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **105.645.452.862** | | | | | | | | **79.093.042.300** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **14.407.713.212** | | | | | | | - | **15.763.972.200** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial ]** | **Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah** | **100 75.92** | **100 75.80** | **100 75.82** | **100 75.85** | **14.407.713.212** | - | - | - | | - | - | - | **15.763.972.200** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 108.792.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 191.539.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 35.012.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 78.509.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 24.229.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 63.030.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 26 Data | 49.551.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 50.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya laporan dan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 % | 10.329.509.562 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba | - | 9.300.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 69 Orang/bulan | 10.329.509.562 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba | | 9.300.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan* | - | | | 100 % | 160.950.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba | - | 315.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 68.162.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba | | 65.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 92.788.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba | | 250.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku* | - | | | 100 % | 898.837.955 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 1.685.004.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 30.000.265 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 120.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 170.496.550 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 230.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 59.996.740 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 175.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 199.994.450 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 450.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 99.999.950 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 270.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 80.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 24 Laporan | 49.140.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 110.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 125 Laporan | 249.210.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 250.004.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya barang milik daerah yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 98.891.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 170.180.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 98.891.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 170.180.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 601.608.094 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 1.567.699.200 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 108.274.494 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 160.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 493.333.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 1.407.699.200 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan dan standar teknis* | - | | | 100 % | 2.179.244.437 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 2.434.550.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 10 Unit | 434.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 409.780.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 1.675.764.437 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 1.950.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Rehabilitasi Exs kantor dinas Sosial (gedung Kantor, Pagar, Halaman Kantor) | | | | | 1.477.384.437 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 198.380.000 | | | | | | | | | |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 32 Unit | 69.280.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 74.770.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan* | - | | | 100 % | 29.879.964 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 12 Laporan | 29.879.964 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | **1.641.955.250** | | | | | | | **100 %** | **2.246.256.600** | |
| | | **[ Meningkatnya pemberdayaan sosial ]** | **Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.641.955.250** | - | - | - | | - | - | - | **2.246.256.600** | - |
| | 1.06.02.2.01 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | *Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang menerima bantuan sosial* | - | | | 100 % | 156.351.750 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | - | 95.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 150 Keluarga | 156.351.750 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | 95.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi kompetensi* | 100 % | | | 40 % | 1.485.603.500 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat,Pekerja Sosial | 0 % | 2.151.256.600 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Lembaga | 580.357.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat,Pekerja Sosial | | 930.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0010 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial* | | | | 46 Orang | 573.794.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat,Pekerja Sosial | | 596.280.600 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMUDIAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 90 Orang | 331.452.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat,Pekerja Sosial | | 624.976.000 | DINAS SOSIAL |
| 3, | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | **1.471.824.200** | | | | | | | - | **4.790.828.500** | |
| | | **[ Meningkatnya rehabilitasi sosial ]** | **Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis Terlantas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.471.824.200** | - | - | - | | - | - | - | **4.790.828.500** | - |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* | - | | | 100 % | 1.471.824.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | 4.790.828.500 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1243 Orang | 953.848.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 2.483.393.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu | | | | | 447.098.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direnanakan Kepada Individu | | | | | 27.274.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan Dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | | | | | 353.268.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 72.608.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 50.880.000 | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 385 Orang | 178.415.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 1.277.435.500 | DINAS SOSIAL |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu | | | | | 125.716.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 31.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 20.655.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | | | | | 24.000 | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 3.915.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 30.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 237.206.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 800.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 31.847.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 30.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 66.593.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 170.000.000 | DINAS SOSIAL |
| 4, | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | **86.913.614.200** | | | | | | | - | **54.089.270.000** | |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial ]** | **Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar** | **100** | **100** | **100** | **100** | **86.913.614.200** | - | - | - | | - | - | - | **54.089.270.000** | - |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar* | - | | | 2000 Orang | 86.913.614.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat Miskin yang Terdata pda DTKS/DTSEN dan P3KE | - | 54.089.270.000 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET DAN PAGU RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2000 Orang | 60.265.498.700 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat Miskin yang Terdata pda DTKS/DTSEN dan P3KE | | 26.000.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Bantuan Sosial Tunai Kematian | | | | | 631.454.700 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Program Keluarga Maju Tahap 1 | | | | | 25.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Program Keluarga Maju Tahap 2 | | | | | 34.500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 21.916.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi Terkait Pelaksanaan Program Keluarga Maju di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 43.063.000 | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi Terkait Program Keluarga Maju di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 68.385.000 | | | | | | | | | |
| | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3050 Orang | 17.220.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat Miskin yang Terdata pda DTKS/DTSEN dan P3KE | | 18.279.641.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Sekayu | | | | | 440.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Babat Supat | | | | | 280.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Babat Toman | | | | | 240.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Lais | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Jirak Jaya | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Keluang | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan RS-RTLH Kec. Bayung Lencir | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BANTUAN BANTU UMAK | | | | | 14.400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 59.597.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 81.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 1.100.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | | | | | 435.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 4.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Pendingin | | | | | 2.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | 10.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Taman | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 90.638.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 85.185.000 | | | | | | | | | |
| | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usulan Peninditklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan* | | | | 500 Usulan | 332.535.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat Miskin yang Terdata pda DTKS/DTSEN dan P3KE | | 734.605.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 45000 Orang | 9.095.580.500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat Miskin yang Terdata pda DTKS/DTSEN dan P3KE | | 9.075.024.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Non ASN | | | | | 9.072.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 6.037.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 6.278.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 11.265.000 | | | | | | | | | |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | **1.010.346.000** | | | | | | | - | **1.177.715.000** | |
| | | | **[ Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana ]** | **84** | **58.82** | **70** | **72** | **1.010.346.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.177.715.000** | - |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Jumlah korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat* | - | | | 100 % | 363.033.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Korban Bencana | - | 367.767.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 500 Orang | 363.033.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Korban Bencana | | 367.767.000 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan atau fasilitasi peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 647.313.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Tagana dan Korban Bencana | - | 809.948.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 647.313.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Tagana dan Korban Bencana | | 809.948.000 | DINAS SOSIAL |
| 6, | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | **200.000.000** | | | | | | | - | **1.025.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan ]** | **Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan** | **100** | **0** | **0** | **100** | **200.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **1.025.000.000** | - |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 200.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | - | 1.025.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 950.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Pemeliharaan Tugu Pahlawan di Epil | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 76 Makam | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | ASN Dinas Sosial Kab. Muba dan Publik | | 75.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | **20.191.660.018** | | | | | | | | **29.657.958.925** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **19.636.416.218** | | | | | | | | **29.007.958.925** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **19.636.416.218** | | | | | | | | **29.007.958.925** | |
| 1, | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **13.249.020.372** | | | | | | | - | **14.023.890.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Tenaga Kerja ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**77** | **100**<br>**71.60** | **100**<br>**72** | **100**<br>**73** | **13.249.020.372** | - | - | - | | - | - | - | **14.023.890.000** | - |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 52.443.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | - | 107.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 29.150.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 65.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 5 Data | 23.293.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 42.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 9.647.083.734 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | - | 9.000.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 98 Orang/bulan | 9.647.083.734 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 9.000.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 17.590.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | - | 17.590.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 17.590.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 17.590.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 165.245.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | - | 230.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 65.228.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 80.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 12 Orang | 100.017.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 689.400.286 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | - | 974.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.935.980 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 22.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 149.331.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 250.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 39.040.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 40.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 149.997.509 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 140.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 77.115.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 86.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 40.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 39.986.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 46.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 173.993.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 350.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 430.273.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | - | 1.186.800.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 317.760.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 886.800.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Penyediaan Kendaraan Dinas Roda Empat | | | | | 317.760.000 | | | | | | | | | |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 59 Unit | 112.513.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pegawai Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin | | 300.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 265.080.952 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | - | 281.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 226.529.352 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 251.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 38.551.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 30.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 1.981.904.400 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | - | 2.227.500.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 89.350.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 90.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 1.865.714.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 1.777.500.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Penyediaan Jasa Perencanaan Rehabilitasi Gedung Asrama BLK | | | | | 83.294.400 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor Disnakertrans | | | | | 147.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Halaman UPT Balai Latihan Kerja | | | | | 11.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Bangunan Asrama UPT Balai Latihan Kerja | | | | | 1.624.420.000 | | | | | | | | | |
| | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 100 Unit | 26.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnakertrans Kab. Muba | | 360.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | | **382.917.500** | | | | | | | - | **420.000.000** | |
| | | **[ Terkelolanya informasi tenaga kerja ]** | **Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan** | **100** | **50** | **55** | **60** | **382.917.500** | - | - | - | | - | - | - | **420.000.000** | - |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*<br>*Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)* | - | | | 100 %<br>100 % | 382.917.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Publik | - | 420.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 382.917.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Publik | | 420.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | **4.845.821.896** | | | | | | | - | **11.800.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ]** | **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi** | **35** | **5** | **10** | **15** | **4.845.821.896** | - | - | - | | - | - | - | **11.800.000.000** | - |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi* | - | | | 100 % | 4.845.821.896 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | - | 11.800.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 280 Orang | 3.504.976.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 7.800.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Kontribusi Pelatihan Subsektor Industri Minyak dan Gas - Pelatihan Juru Ikat Beban | | | | | 803.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kontribusi Pelatihan Subsektor Industri Minyak dan Gas - Pelatihan Operator Lantai Perawatan Sumur | | | | | 882.210.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 44.420.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 36.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 1.075.695.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 109.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 122.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 50.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 299.541.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 81.270.000 | | | | | | | | | |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja* | | | | 4 Unit | 1.340.845.696 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 4.000.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Pengadaan AC Asrama BLK | | | | | 193.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Tempat Tidur Asrama BLK | | | | | 396.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantal Asrama BLK | | | | | 15.840.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lemari pakaian Asrama BLK | | | | | 109.187.200 | | | | | | | | | |
| | | | Meja Asrama BLK | | | | | 144.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kursi asrama BLK | | | | | 90.421.180 | | | | | | | | | |
| | | | Sofa asrama BLK | | | | | 184.460.000 | | | | | | | | | |
| | | | Televisi asrama BLK | | | | | 18.562.500 | | | | | | | | | |
| | | | Dispenser asrama BLK | | | | | 21.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Meja makan Asrama BLK | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kulkas Asrama BLK | | | | | 118.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 7.842.816 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 26.532.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | **720.623.450** | | | | | | | - | **1.404.068.925** | |
| | | **[ Meningkatnya penempatan tenaga kerja ]** | **Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri** | **72** | **68.04** | **69** | **70** | **720.623.450** | - | - | - | - | - | - | - | **1.404.068.925** | - |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 227.132.200 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | - | 444.068.925 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 500 Orang | 129.944.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 130.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | 32 Orang | 97.187.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 314.068.925 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja* | - | | | 100 % | 493.491.250 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | - | 960.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online* | | | | 1 Dokumen | 64.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 75.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Website Disnakertrans Kab.Muba | | | | | 22.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | | | | | 42.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 1000 Orang | 183.798.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 415.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 400 Orang | 245.693.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pencari Kerja | | 470.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Belanja Sewa stand/dekor booth dan aksesoris lainnya untuk Job Fair | | | | | 119.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 24.641.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | 2.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 73.107.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 21.225.000 | | | | | | | | | |
| 5, | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | **438.033.000** | | | | | | | - | **1.360.000.000** | |
| | | **[ Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi ]** | **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**<br>**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial** | **57.53**<br>**6500** | **41.65**<br>**64766** | **52.53**<br>**64860** | **53.53**<br>**64885** | **438.033.000** | - | - | - | | - | - | - | **1.360.000.000** | - |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terkasananya Pelaksanan Pengesahan dan Pendaftaran Perrjajian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang beroperasasi di Kabupaten Musi Banyuasin* | - | | | 100 % | 225.671.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pekerja dan Perusahaan di Wilayah Kab. Muba | - | 780.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 5 Laporan | 225.671.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pekerja dan Perusahaan di Wilayah Kab. Muba | | 780.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksanaya Pencegahan Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 212.362.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Tenaga Kerja dan Perusahaan di Wilayah Kab. Muba | - | 580.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 35 Perkara | 137.522.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Tenaga Kerja dan Perusahaan di Wilayah Kab. Muba | | 400.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 1 Lembaga | 74.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Tenaga Kerja dan Perusahaan di Wilayah Kab. Muba | | 180.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **555.243.800** | | | | | | | | **650.000.000** | |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **555.243.800** | | | | | | | | **650.000.000** | |
| 1, | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | **555.243.800** | | | | | | | - | **650.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi ]** | **Persentase Penyelesaian Lahan Transmigrasi yang Bersertifikat** | **100** | **19.7** | **32.95** | **43.39** | **555.243.800** | - | - | - | | - | - | - | **650.000.000** | - |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 555.243.800 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Warga Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin | - | 650.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0020 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi* | | | | 9 Lokasi | 555.243.800 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Warga Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin | | 650.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **11.369.328.920** | | | | | | | | **15.940.000.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **11.369.328.920** | | | | | | | | **15.940.000.000** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **11.369.328.920** | | | | | | | | **15.940.000.000** | |
| 1, | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8.942.570.670** | | | | | | | - | **12.950.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**78.50** | **100**<br>**75.80** | **100**<br>**76.00** | **100**<br>**76.50** | **8.942.570.670** | - | - | - | | | - | - | - | **12.950.000.000** | - |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD* | - | | | 100 %<br>100 % | 55.166.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | - | 125.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 18.021.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 70.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 20.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 4 Data | 17.145.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 35.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.433.973.200 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | - | 11.000.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 75 Orang/bulan | 7.433.973.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 11.000.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 141.973.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | - | 180.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 74 Paket | 40.596.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 55.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 101.375.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 125.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 651.050.458 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | - | 815.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 22 Paket | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 20.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 51.872.994 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 150.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 40 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 45.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 80 Paket | 165.051.664 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 175.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 105.629.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 100.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 50.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3 Laporan | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 25.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 5 Laporan | 213.496.800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 250.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 40.860.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pejabat Pegawai Dinas PPPA | - | 35.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 40.860.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pejabat Pegawai Dinas PPPA | | 35.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 272.016.512 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | - | 420.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 120.543.712 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 120.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 151.472.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 300.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 347.531.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | - | 375.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 200.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 220.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 115.101.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 120.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 32.330.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dinas PPPA | | 35.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | **861.452.250** | | | | | | | - | **1.150.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan ]** | **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** | **46.25<br>55.40** | **39.25<br>54.84** | **40.25<br>54.90** | **42.25<br>54.95** | **861.452.250** | - | - | - | | - | - | - | **1.150.000.000** | - |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Jumlah PD yang menerapkan PUG melalui PPRG* | - | | | 100 % | 276.311.650 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 48 Organisasi Perangkat Daerah | - | 450.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)* | | | | 32 Lembaga | 111.027.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 48 Organisasi Perangkat Daerah | | 200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0014 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek* | | | | 100 Orang | 165.283.750 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 48 Organisasi Perangkat Daerah | | 250.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan MeningkatnyaPemberday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan* | - | | | 100 %<br>100 % | 585.140.600 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perangkat Daerah, Organisasi Perempuan, Dunia Usaha, DWP Muba, TP-PKK MUBA dan Kecamatan di MUBA | - | 700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi* | | | | 950 orang<br>dan 7 Lembaga | 457.645.600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perangkat Daerah, Organisasi Perempuan, Dunia Usaha, DWP Muba, TP-PKK MUBA dan Kecamatan di MUBA | | 550.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | | Paket Pembuatan Stan DWP Muba | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 13.792.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 140.100.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 12.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | 17.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Taman | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 134.313.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 10.640.000 | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan* | | | | 100 Orang | 127.495.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perangkat Daerah, Organisasi Perempuan, Dunia Usaha, DWP Muba, TP-PKK MUBA dan Kecamatan di MUBA | | 150.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | **185.246.600** | | | | | | | - | **230.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan ]** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif** | **100** | **100** | **100** | **100** | **185.246.600** | - | - | - | - | - | - | - | **230.000.000** | - |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Terpenuhinya layanan Perlindungan lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tersedianya [ KEGIATAN ] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 100 %<br>100 % | 185.246.600 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perempuan Rentan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Perempuan Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual , Anak Perempuan Pelecehan, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan | - | 230.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 orang | 185.246.600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perempuan Rentan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Perempuan Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual , Anak Perempuan Pelecehan, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan | | 230.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4, | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | **165.000.000** | | | | | | | - | **170.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaran gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak ]** | **Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai** | **1** | **1** | **1** | **1** | **165.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | **170.000.000** | - |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten* | - | | | 100 %<br>100 % | 165.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perempuan Rentan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan | - | 170.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 165.000.000 | Kab. Muai Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perempuan Rentan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan | | 170.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5, | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | **151.781.250** | | | | | | | - | **170.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak ]** | **Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **151.781.250** | - | - | - | - | - | - | - | **170.000.000** | - |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 151.781.250 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | OPD lintas Sektor, Data untuk Anak-Anak, Perempuan, Disabilitas, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | - | 170.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.2.01.0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 151.781.250 | Kab. Muai Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | OPD lintas Sektor, Data untuk Anak-Anak, Perempuan, Disabilitas, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | | 170.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6, | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | **494.468.150** | | | | | | | - | **670.000.000** | |
| | | **[ Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif ]** | **Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**<br>**Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)** | **62.86**<br>**800** | **59.86**<br>**700** | **60.36**<br>**700** | **60.86**<br>**720** | **494.468.150** | - | - | - | - | - | - | - | **670.000.000** | - |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatkan upaya dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak* | - | | | 100 %<br>100 % | 494.468.150 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Forum Anak Muba, Dunia Usaha, Sekolah tingkat Perguruan Tinggi, SMP dan SMA | - | 670.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek* | | | | 1 dokumen Orang | 77.775.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Forum Anak Muba, Dunia Usaha, Sekolah tingkat Perguruan Tinggi, SMP dan SMA | | 200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 251.799.250 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Forum Anak Muba, Dunia Usaha, Sekolah tingkat Perguruan Tinggi, SMP dan SMA | | 300.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0007 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)* | | | | 6 sekolah Lembaga | 164.893.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Forum Anak Muba, Dunia Usaha, Sekolah tingkat Perguruan Tinggi, SMP dan SMA | | 170.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7, | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | **568.810.000** | | | | | | | - | **600.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak ]** | **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** | **85.97** | **76.97** | **78.47** | **79.97** | **568.810.000** | - | - | - | | - | - | - | **600.000.000** | - |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan huku*<br>*Persentase Menurunannya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk tindak Pidana, Perdagangan Orang dengan Fokus Pada Pencegahan, Penanganan Korban* | - | | | 100 %<br>100 % | 568.810.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Anak Korban Kekerasan, Anak berhadapan dengan Hukum dan Anak pekerja di bawah umur, Anak Rentan | - | 600.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 75 Orang | 268.810.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Anak Korban Kekerasan, Anak berhadapan dengan Hukum dan Anak pekerja di bawah umur, Anak Rentan | | 250.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak di Muba, Anak Korban Kekerasan, Anak berhadapan dengan Hukum dan Anak pekerja di bawah umur, Anak Rentan | | 350.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | | | | | | **14.151.543.039** | | | | | | | | **17.364.096.263** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.151.543.039** | | | | | | | | **17.364.096.263** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **14.151.543.039** | | | | | | | | **17.364.096.263** | |
| 1, | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **9.880.678.725** | | | | | | | - | **12.024.400.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketahanan Pangan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**77.86** | **100**<br>**74.90** | **100**<br>**75.08** | **100**<br>**75.64** | **9.880.678.725** | - | - | - | | - | - | - | **12.024.400.000** | - |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 100 % | 95.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 171.700.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 55.700.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 78.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 35.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 38.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 100 % | 8.088.585.585 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 7.119.200.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 73 Orang/bulan | 8.088.585.585 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 7.119.200.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* | - | | | 100 % | 40.730.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 51.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 4 Dokumen | 40.730.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 51.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi kepegawaian* | - | | | 100 % | 173.177.340 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 290.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 79.927.340 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 165.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 93.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 125.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 793.758.788 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.482.500.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 55.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 195.886.221 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 310.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 87.500.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 149.539.136 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 255.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 68.333.431 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 110.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 110.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 80.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 475.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah* | - | | | 100 % | 181.049.212 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 530.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 32 Unit | 99.112.647 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 275.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 81.936.565 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 255.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya jasa penunjang perkantoran* | - | | | 100 % | 178.637.800 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.215.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 86.733.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 225.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 91.904.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 990.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara* | - | | | 100 % | 329.740.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.165.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 163.070.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 285.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 142.270.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 770.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 40 Unit | 24.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | - | | 110.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | **1.156.495.000** | | | | | | | - | **961.715.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ]** | **Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan** | **50** | **0** | **50** | **50** | **1.156.495.000** | - | - | - | | - | - | - | **961.715.000** | - |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota* | - | | | 1 Unit | 1.156.495.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 961.715.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia* | | | | 1 unit | 1.156.495.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 961.715.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | Hibah Uang yang diserahkan ke Kelompok Lumbung Pangan | | | | | 1.150.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.260.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.675.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | **2.789.903.795** | | | | | | | - | **3.892.427.500** | |
| | | **[ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ]** | **Skor Pola Pangan Harapan** | **93.04** | **92.8** | **92.84** | **92.86** | **2.789.903.795** | - | - | - | | - | - | - | **3.892.427.500** | - |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari (Kkal/Kap/Hari)* | - | | | 2.105 Kkal/Kap/Hari | 877.954.795 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 1.516.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | | | | 12 Laporan | 54.778.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 65.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | | | | 195 Keluarga | 326.429.300 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 300.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | Belanja Hibah Barang | | | | | 55.977.300 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Uang untuk diberikan kepada Kelompok | | | | | 205.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 938.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 19.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 8.844.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 30.450.000 | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota* | | | | 1 laporan | 147.626.095 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 250.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal* | | | | 1 Laporan | 115.658.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Ptakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 600.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | Belanja Hibah Barang (Vacuum sealer) | | | | | 19.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 2.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.188.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 15.920.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 21.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 52.010.000 | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | | | | 5 Unit | 44.065.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 50.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 74.236.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 80.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | 12 Dokumen | 50.081.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 88.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0020 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 65.081.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 83.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Terkelolanya cadangan pangan pemerintah kabupaten* | - | | | 10 Ton | 367.395.600 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 270.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 15 Ton | 244.624.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 170.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota* | | | | 15 Ton | 122.771.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 100.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Angka konsumsi beras* | - | | | 232,6 Gr/Kap/Hari | 1.544.553.400 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 2.106.427.500 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Dokumen | 65.559.900 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 150.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Laporan | 1.405.846.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 1.800.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | Belanja Hibah Uang untuk diberikan Kepada Kelompok Desa BZSA - Tahap Pengembangan | | | | | 1.250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.333.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 9.072.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 76.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 20.986.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 47.955.000 | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.04.0005 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Dokumen | 73.147.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 156.427.500 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 4, | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | **100.449.000** | | | | | | | - | **158.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ]** | **Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan** | **0.41** | **0.41** | **0.41** | **0.41** | **100.449.000** | - | - | - | | | - | - | **158.000.000** | - |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | *Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan* | - | | | 1 Dokumen | 50.081.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 93.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 50.081.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 93.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Fasilitasi Penanganan Kerawanan Pangan* | - | | | 2 Subkegiatan | 50.368.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 65.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 13.395.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 25.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 36.973.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 40.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | **224.016.519** | | | | | | | - | **327.553.763** | |
| | | **[ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ]** | **Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan** | **95.20** | **94.57** | **94.60** | **94.70** | **224.016.519** | - | - | - | | - | - | - | **327.553.763** | - |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diawasi* | - | | | 30 Jenis | 224.016.519 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | - | 327.553.763 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 47.977.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 89.300.295 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan* | | | | 2 Dokumen | 75.277.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 73.262.117 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 100.761.719 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat , ASN | | 164.991.351 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **76.250.839.557** | | | | | | | | **64.083.461.808** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **76.250.839.557** | | | | | | | | **64.083.461.808** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **76.250.839.557** | | | | | | | | **64.083.461.808** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **40.828.655.033** | | | | | | | - | **46.993.080.096** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**74.90** | **100**<br>**74.90** | **100**<br>**74.90** | **100**<br>**74.90** | **40.828.655.033** | - | - | - | - | - | - | - | **46.993.080.096** | - |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu Persentase Terpenuhinya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan tepat waktu* | - | | | 6 Laporan<br>100 % | 102.561.600 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 144.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 49.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 25.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 10 Data | 42.561.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 70.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN* | - | | | 100 % | 13.596.221.731 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 12.262.725.200 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 134<br>Orang/bulan | 13.596.221.731 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 12.262.725.200 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | - | | | 100 % | 49.917.250 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 54.908.975 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 49.917.250 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 54.908.975 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 261.457.210 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 249.697.800 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 131.052.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 139.854.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 130.405.210 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 109.843.800 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN* | - | | | 100 % | 872.963.190 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai msyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 1.360.660.361 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 22.970.918 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 32.998.760 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 601.672.365 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 59.992.272 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 65.991.500 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 60 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 219.997.736 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 121.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 44.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 55.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 220.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik*<br>*Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 632.080.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 4.500.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 532.080.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 4.400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Sewa Kendaraan Operasional Lapangan | | | | | 532.080.000 | | | | | | | | | |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran*<br>*Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 24.845.190.352 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 27.915.492.090 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 440.067.252 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 475.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 24.405.123.100 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 27.440.492.090 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 468.263.700 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | - | 505.595.670 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 37 Unit | 261.910.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 289.564.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 137.234.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 140.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 46 Unit | 69.119.700 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin | | 76.031.670 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **1.900.472.935** | | | | | | | - | **3.111.781.712** | |
| | | **[ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ]** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai** | **65.70** | **68.17** | **64.44** | **64.69** | **1.900.472.935** | - | - | - | | - | - | - | **3.111.781.712** | - |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP*<br>*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai* | - | | | 66.72 Indeks<br>65,72 % | 1.875.748.935 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 3.075.481.712 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | | | | 1 Kegiatan | 125.915.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 138.600.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | | | | 1 Dokumen | 99.999.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 125.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | | | | 1 Unit | 178.872.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 193.050.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | | | | 2 Dokumen | 99.961.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 165.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | | | | 204 Paket | 294.140.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA USAHA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 379.896.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0014 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim* | | | | 1 Laporan | 80.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 110.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 850 Dokumen | 996.861.435 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA USAHA, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.963.935.712 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | | | | | 347.381.604 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 403.664.659 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Barang dalam Proses | | | | | 75.061.072 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 4.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | | | | | 23.976.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | | | | | 15.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | 27.732.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pengolahan Air Limbah | | | | | 19.705.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | | | | | 6.637.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 72.222.000 | | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP*<br>*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai* | - | | | 66,72 Indeks<br>66,72 % | 24.724.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 36.300.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | | | | 1 Kegiatan | 24.724.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin | | 36.300.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | **17.708.059.940** | | | | | | | - | **0** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ]** | **Indeks Kualitas Lahan**<br>**Persentase Luasan RTH yang dikelola** | **20**<br>**68.28** | **20**<br>**41.80** | **20**<br>**67.93** | **20**<br>**68** | **17.708.059.940** | - | - | - | - | - | - | - | **0** | - |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Persentase Luasan RTH yang dikelola* | - | | | 20 % | 17.708.059.940 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Luasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin | - | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 4 Dokumen | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Luasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 275,94 Ha | 15.896.059.940 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR PERMUKAAN, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK AIR TANAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Luasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl. Bupati Osman Bakar Sekayu | | | | | 24.874.400 | | | | | | | | | |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl. KH Ahmad Dahlan Sekayu | | | | | 34.970.480 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Teknis Pembangunan Taman ex Rumah Dinas Pertanian Sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Data Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sungai Lilin | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Data Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sekayu | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Median Jalan Simpang Jl. Kol. Wahid Udin - Jl Kop. Hanafiah Sekayu | | | | | 125.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Median Jl Kol Wahid Udin Sekayu | | | | | 299.527.200 | | | | | | | | | |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl. Kol Wahid Udin Sekayu | | | | | 199.873.120 | | | | | | | | | |
| | | | Perawatan Bangunan dan Lanskap Furnitur | | | | | 236.931.365 | | | | | | | | | |
| | | | PerencanaanTeknis Revitalisasi Taman Permata sekayu | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Taman Dekat Jembatan Penyebrangan Mangun Jaya Rt. 04 Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman | | | | | 392.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Taman dekat Jembatan Penyebrangan Mangun Jaya RT.04 Kel. 04 Kel. Mangun Jaya Kec.Babat TomanT | | | | | 8.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas Taman Kirab Remaja Sekayu | | | | | 278.112.730 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Rehabilitas Taman KirabRemaja Sekayu | | | | | 5.675.770 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pemasangan Lampu Penerangan Median JL. Kol. wahid Udin Kota Sekayu | | | | | 1.410.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Median Jl Kol Wahid Udin Sekayu | | | | | 53.004.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl. Kol Wahid Udin Sekayu | | | | | 19.154.880 | | | | | | | | | |
| | | | Perawatan Bangunan dan Lanskap Furnitur | | | | | 363.068.635 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas Taman Kirab Remaja Sekayu | | | | | 1.388.887.270 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Rehabilitas Taman KirabRemaja Sekayu | | | | | 194.324.230 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalur Pejalan Kaki | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jalur Hijau Jl.Bupati Oesman Bakar Sekayu . | | | | | 924.963.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl.Kapten Rivai Sekayu | | | | | 36.774.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl.Letnan H.Nur Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO KEWANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengecatan Kanstin Jl.Merdeka Sekayu | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas Pulau Jalan dan Tugu Bintang Kota Sekayu | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | pengawasan taman kirab remaja sekayu | | | | | 116.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Revitalisasi taman Permata Sekayu | | | | | 2.082.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Revitalisasi Taman Permata Sekayu | | | | | 145.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Revitalisasi Taman Waterfront sekayu | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Revitalisasi Taman Waterfront sekayu | | | | | 2.120.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan revitalisasi taman waterfront sekayu | | | | | 145.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Taman | | | | | 95.978.939 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | 314.094.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 874.442.501 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 160.511.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 5.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 261.820.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 36.952.550 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 482.936.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Lembur | | | | | 37.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 49.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 99.984.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 177.187.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | | | | | 11.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | 3.800.120 | | | | | | | | | |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 5 Unit | 827.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Luasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengadaan Peralatan Kerja - Mesin Pompa Air | | | | | 37.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kerja - Jack Hammer | | | | | 13.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kerja - Mesin Chain Saw | | | | | 15.190.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dump Truck - Truck Sampah | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kerja - Mesin Rumput | | | | | 28.112.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kerja - Genset | | | | | 15.394.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 16.524.000 | | | | | | | | | |
| | 2.11.04.2.01.0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7 TAMAN KEHATI Unit | 585.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Luasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Perencanaan Teknis Pembangunan Taman Kehati Ds. Air Putih Ulu Plakat Tinggi | | | | | 242.011.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang terbuka Hijau (RTH) Desa Sinar Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 294.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Sinar Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 19.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 17.439.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 6.150.000 | | | | | | | | | |
| 4. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | **200.316.000** | | | | | | | - | **279.400.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan ]** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH** | **100** | **100** | **100** | **100** | **200.316.000** | - | - | - | | - | - | - | **279.400.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGAJUKAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH* | - | | | 100 %<br>100 % | 200.316.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan | - | 279.400.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 12 Dokumen | 99.918.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan | | 137.500.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 13 Badan Usaha | 100.398.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan | | 141.900.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5, | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | **100.000.000** | | | | | | | - | **110.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup ]** | **Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **110.000.000** | - |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *PERSENTASE LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYA RAKAT/KOMUNITAS/KELOM POK MASYARAKAT YANG MENINGKAT KAPASITAS DAN KOMPETENSINYA TERKAIT PPLH Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100.000.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Lembaga Pendidikan Formal /Lembaga Masyarakat /Komunit as/Kelompok Masyarakat | - | 110.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | | | | 2 Lembaga | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Lembaga Pendidikan Formal /Lembaga Masyarakat /Komunit as/Kelompok Masyarakat | | 110.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6, | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **79.926.000** | | | | | | | - | **189.200.000** | |
| | | **[ Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup ]** | **Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **79.926.000** | - | - | - | | - | - | - | **189.200.000** | - |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadila Persentase penyelesaian kasus pencemaran lingkungan diluar pengadilan / melalui pengadilan* | - | | | 100 %<br>100 % | 79.926.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha Terkait PPLH di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 189.200.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola* | | | | 11 Pengaduan | 79.926.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha Terkait PPLH di Kabupaten Musi Banyuasin | | 189.200.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7, | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | **15.433.409.649** | | | | | | | - | **13.400.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola persampahan ]** | **Persentase Penanganan sampah** | **48** | **43.1** | **44** | **45** | **15.433.409.649** | - | - | - | | - | - | - | **13.400.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Persentase penanganan sampah*<br>*Persentase Penangan Sampah* | - | | | 100 %<br>100 % | 15.433.409.649 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 13.400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 90 Kelompok | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.*<br>*Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | | | | 3 Dokumen | 10.413.409.650 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 11.000.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Belanja kendaraan mobil Pick Up | | | | | 1.080.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Motor Roda Tiga | | | | | 1.110.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Truck Sampah | | | | | 1.400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bak Amrol | | | | | 220.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Truck Sampah | | | | | 2.100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 39.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 2.323.640.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 25.875.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 201.003.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Lembur | | | | | 72.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 1.372.690.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | | | | | 246.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 72.684.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 46.997.150 | | | | | | | | | |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | | | | 30000 Ton | 4.819.999.999 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), RETRIBUSI JASA UMUM | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | Masyarakat Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.000.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pembangunan Sarana/Prasana Penunjang TPA - Bangunan TPST di Lawang Wetan | | | | | 191.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sarana/Prasana Penunjang TPA - Bangunan TPST di Batang Hari Leko | | | | | 199.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sarana/Prasana Penunjang TPA - Bangunan TPST di Bayung Lincir | | | | | 192.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sarana/Prasana Penunjang TPA - Bangunan TPST di Kecamatan Keluang | | | | | 198.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembebasan Lahan Untuk Pembuangan Akhir (TPA) di kelurahan Bayung Lincir | | | | | 575.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan pembebasan lahan untuk pembuangan sampah akhir di Kelurahan Bayung Lincir | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Konsultan penyusunan dokumen perencanaan pembebasan lahan (TPA) di Kelurahan Bayung Lincir | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar TPA Kec. Babat Toman | | | | | 699.580.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan tempat pembuangan sampah di Kecamatan Babat Toman | | | | | 497.550.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan tempat pembuangan sampah di Kecamatan Batanghari Leko | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Mesin Potong Rumput | | | | | 22.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Bangunan TPST Kec. Sungai Keruh | | | | | 193.680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 488.844.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 36.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | 272.867.499 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 24.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 59.510.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Lembur | | | | | 74.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 3.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 111.140.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 53.018.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **20.599.606.263** | | | | | | | | **28.391.986.711** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **20.599.606.263** | | | | | | | | **28.391.986.711** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **20.599.606.263** | | | | | | | | **28.391.986.711** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **15.281.800.423** | | | | | | | - | **19.472.422.005** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**77.80** | **100**<br>**74.80** | **100**<br>**77.80** | **100**<br>**77.80** | **15.281.800.423** | - | - | - | | | - | - | **19.472.422.005** | - |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 90.137.678 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | - | 155.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 75.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 30.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 30.137.678 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 12.181.068.115 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | - | 13.121.781.405 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 116 Orang/bulan | 12.181.068.115 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 13.121.781.405 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 205.326.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | - | 165.520.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 104 Paket | 105.326.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 65.520.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 11 Orang | 100.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 100.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.329.876.650 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.610.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 500.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 350.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 99.880.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 299.996.650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 400.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 227.360.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | - | 1.720.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 177.360.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 1.220.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Operasional | | | | | 177.360.000 | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 500.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 867.869.980 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | - | 2.319.700.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 462.569.980 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 500.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 405.300.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 1.819.700.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 380.162.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | - | 380.420.600 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 190.610.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 190.490.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 99.930.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 99.930.600 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 50 Unit | 89.621.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai | | 90.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | **1.226.361.750** | | | | | | | - | **1.533.668.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk ]** | **Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan**<br>**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** | **100**<br>**80** | **100**<br>**60** | **100**<br>**62** | **100**<br>**64** | **1.226.361.750** | - | - | - | - | - | - | - | **1.533.668.000** | - |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*<br>*Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | - | | | 100 %<br>12 bulan | 653.761.750 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | - | 919.368.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | | | | 1091<br>Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 130.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | | | | 43000<br>Dokumen | 417.008.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 601.500.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat - Pengadaan Blanko KTP-EL | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 156.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 60.128.000 | | | | | | | | | |
| | 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk* | | | | 300 Orang | 59.363.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 99.100.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | | | | 30000 Dokumen | 77.390.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 88.768.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | *Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | - | | | 100 % | 572.600.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | | 614.300.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk* | | | | 6000 Dokumen | 272.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 314.300.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk* | | | | 1 Laporan | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **374.165.208** | | | | | | | - | **380.000.283** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil ]** | **Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**<br>**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**<br>**Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**<br>**Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** | **100**<br>**99** | **100**<br>**99** | **100**<br>**99** | **100**<br>**99** | **374.165.208** | - | - | - | | - | - | - | **380.000.283** | - |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat dan Akurat* | - | | | 100 % | 224.164.925 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | | 230.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 17426 Dokumen | 224.164.925 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 230.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksana* | - | | | 100 % | 150.000.283 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | | 150.000.283 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 150.000.283 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 150.000.283 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4, | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | **3.617.061.382** | | | | | | | - | **6.855.896.423** | |
| | | **[ Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan ]** | **Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan** | **99,87** | **99** | **99,85** | **99,85** | **3.617.061.382** | - | - | - | | - | - | - | **6.855.896.423** | - |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang Terkumpul* | - | | | 100 % | 244.144.701 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | - | 285.000.620 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 54 Dokumen | 84.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 85.000.620 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 30 Dokumen | 160.144.701 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 200.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.02 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | - | | | 12 bulan | 1.889.242.364 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | - | 4.679.736.972 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.02.0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1.889.242.364 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 4.679.736.972 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Printer Cetak Dokumen Kependudukan | | | | | 15.906.079 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Alat Survey Kepuasan Masyarakat | | | | | 31.740.450 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Finger Print | | | | | 151.137.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Signature Pad | | | | | 59.510.430 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Iris Scanner | | | | | 96.605.076 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studio Audio - Kamera Rekam KTP - el | | | | | 66.888.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - SmartPhone (Pelayanan Adminduk Online) | | | | | 21.032.280 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Kabel Jaringan | | | | | 8.731.260 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Konektor Kabel Jaringan | | | | | 901.875 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Switch Hub | | | | | 4.595.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Switch Hub Managable | | | | | 37.018.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Access Door Ruang Server | | | | | 5.384.277 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Smoke Detector (Ruangan Server) | | | | | 1.276.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Router Wifi | | | | | 959.040 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Label Printer | | | | | 1.243.755 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Hub USB Type C | | | | | 461.760 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Hub USB 3.0 | | | | | 1.037.850 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - USB Wifi Adapter | | | | | 574.425 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - Power Supply CCTV | | | | | 1.373.070 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Adaptor Printer | | | | | 15.586.095 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Toolset | | | | | 12.467.409 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan - DVR | | | | | 15.126.525 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Tester CCTV | | | | | 8.169.600 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Printer Thermal (Mesin Antrian Pelayanan) | | | | | 2.170.050 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Uninterupted Power Suply (UPS) : 1 Unit | | | | | 41.208.750 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.102.757.250 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 390.289 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 33.300.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | 8.103.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | | | | | 56.743.200 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 59.822.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 27.020.000 | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | - | | | 100 % | 1.039.421.627 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | - | 1.388.465.831 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 566.998.631 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 669.998.631 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 15 Dokumen | 53.417.847 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 100.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 12 Laporan | 154.315.995 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 149.692.466 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 200.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan* | | | | 15 Dokumen | 114.996.688 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 118.467.200 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | - | | | 100 % | 444.252.690 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | - | 502.693.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.04.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 91.559.690 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 352.693.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 352.693.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5, | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | **100.217.500** | | | | | | | - | **150.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas profil kependudukan ]** | **Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan** | **80** | **80** | **80** | **80** | **100.217.500** | - | - | - | | - | - | - | **150.000.000** | - |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | *Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan* | - | | | 100 % | 100.217.500 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | - | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 1 dokumen Dokumen | 100.217.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai dan Masyarakat | | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **20.075.529.908** | | | | | | | | **21.542.371.443** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **20.075.529.908** | | | | | | | | **21.542.371.443** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **20.075.529.908** | | | | | | | | **21.542.371.443** | |
| 1, | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **10.103.082.209** | | | | | | | - | **8.121.120.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | **100** | **100** | **100** | **100** | **10.103.082.209** | - | - | - | | - | - | - | **8.121.120.000** | - |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 100 % | 77.829.900 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 110.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 31.719.900 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 11.110.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 11 Data | 35.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 35.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 7.462.477.867 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 5.000.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 7.462.477.867 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 5.000.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah* | - | | | 100 % | 35.170.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 44.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 5 Dokumen | 35.170.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 44.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 169.727.120 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 112.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 69.477.120 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 27.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 100.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 85.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum* | - | | | 100 % | 879.926.853 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.090.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.992.755 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 17.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 240.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 59.999.098 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 88.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 100.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 45.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 49.935.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 300.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 704.720.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 469.720.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 604.720.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 354.720.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan | | | | | 354.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Operasional | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 21 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 115.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoraan* | - | | | 100 % | 248.575.732 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 948.400.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 176.571.732 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 182.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 72.004.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 766.400.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik* | - | | | 100 % | 524.654.737 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 347.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 197.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 224.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 296.666.237 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 92.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 23 Unit | 30.888.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 31.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | | **93.893.900** | | | | | | | - | **350.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas kerja sama desa ]** | **Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa** | **95** | **82** | **85** | **87** | **93.893.900** | - | - | - | | - | - | - | **350.000.000** | - |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Terpenuhinya Kerjasama antar Desa* | - | | | 10 Desa | 93.893.900 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | - | 350.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota* | | | | 10 Dokumen | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 150.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 43.893.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **6.535.016.433** | | | | | | | - | **8.153.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ]** | **Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**<br>**Persentase desa yang memiliki Bumdes**<br>**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa** | **100**<br>**80.74** | **0**<br>**100** | **100**<br>**68.32** | **100**<br>**71.43** | **6.535.016.433** | - | - | - | | - | - | - | **8.153.000.000** | - |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa* | - | | | 100 % | 6.535.016.433 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | - | 8.153.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 74.561.198 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa* | | | | 65 Dokumen | 315.580.310 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 3 Dokumen | 88.431.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 2916 Orang | 5.485.586.375 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 4.903.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kepala Desa | | | | | 415.316.232 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kepala Dusun | | | | | 2.027.613.744 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kepala Seksi dan Kepala Urusan | | | | | 2.481.015.744 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Sekretaris Desa | | | | | 415.316.232 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 14.204.448 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 12.484.975 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 26.085.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 68.860.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 24.690.000 | | | | | | | | | |
| | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa* | | | | 229 Dokumen | 190.896.892 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 600.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | | | | 5 Dokumen | 154.594.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 229 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 150.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 2 Dokumen | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 400.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | | | | 3 Desa | 58.478.158 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 3 Dokumen | 76.888.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa Musi Banyuasin | | 200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | **3.343.537.366** | | | | | | | - | **4.918.251.443** | |
| | | **[ Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ]** | **Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.343.537.366** | - | - | - | | - | - | - | **4.918.251.443** | - |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatknya kapasitas kelembagaan masyarakat desa* | - | | | 100 % | 3.343.537.366 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | - | 4.918.251.443 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat* | | | | 15 Dokumen | 1.466.484.250 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 1.401.384.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | Belanja Pakaian Adat Daerah - Pakaian Adat Untuk Pemangku Adat | | | | | 420.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.982.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.910.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 1.027.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 4.472.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 8.120.000 | | | | | | | | | |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 1 Dokumen | 56.090.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 174.740.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 229 Lembaga | 120.470.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 159.420.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 3 Dokumen | 170.343.625 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 300.000.443 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 4 Laporan | 416.645.916 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 1.500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 16 Laporan | 91.272.550 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 102.150.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 15 Dokumen | 1.022.231.025 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelembagaan Desa | | 1.280.557.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | Belanja Jasa Pembuatan Stand dan Perlengkapannya | | | | | 65.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 18.907.275 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 16.476.750 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 82.150.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 13.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 334.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 12.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 298.847.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 135.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **14.916.904.302** | | | | | | | | **19.722.000.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.916.904.302** | | | | | | | | **19.722.000.000** | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **14.916.904.302** | | | | | | | | **19.722.000.000** | |
| 1, | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **13.041.503.302** | | | | | | | - | **16.632.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**75.30** | **100**<br>**74.20** | **100**<br>**74.30** | **100**<br>**74.50** | **13.041.503.302** | - | - | - | - | - | - | - | **16.632.000.000** | - |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Laporan Yang Dilaksanakan Sangat Tepat Terlaksananya Laporan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu* | - | | | 100 %<br>100 % | 60.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | - | 155.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 75.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 7 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 30.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 58 Orang | 11.109.171.076 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | - | 10.400.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 11.109.171.076 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 10.400.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Berkas Kepegawaian Yang Lengkap dan Sesuai Standar* | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | - | 315.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 125.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 70.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 120.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Yang Disusun* | - | | | 8 Dokumen | 893.139.001 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.087.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 32.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 55.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 230.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 90.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 55.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 55.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 238.139.001 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 320.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Paket Pengadaan Barang Yang Selesai Sesuai Prosedur dan Tepat Waktu* | - | | | 2 Paket | 181.900.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin dan Lembaga Terkait | - | 3.690.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 81.900.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin dan Lembaga Terkait | | 90.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 81.900.000 | | | | | | | | | |
| | 2.14.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 23 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin dan Lembaga Terkait | | 100.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin dan Lembaga Terkait | | 3.500.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan* | - | | | 2 Paket | 324.889.225 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | - | 610.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 223.182.825 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 260.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 101.706.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin | | 350.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara* | - | | | 28 Unit | 372.404.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah pengguna Barang Milik Daerah, khususnya yang memanfaatkan aset berupa gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur sipil negara sebagai pengguna langsung barang, serta masyarakat secara tidak langsung turut merasakan manfaat dari kondisi aset daerah yang terpelihara baik | - | 375.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 266.110.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah pengguna Barang Milik Daerah, khususnya yang memanfaatkan aset berupa gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur sipil negara sebagai pengguna langsung barang, serta masyarakat secara tidak langsung turut merasakan manfaat dari kondisi aset daerah yang terpelihara baik | | 270.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 92.874.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah pengguna Barang Milik Daerah, khususnya yang memanfaatkan aset berupa gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur sipil negara sebagai pengguna langsung barang, serta masyarakat secara tidak langsung turut merasakan manfaat dari kondisi aset daerah yang terpelihara baik | | 75.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 13.420.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah pengguna Barang Milik Daerah, khususnya yang memanfaatkan aset berupa gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur sipil negara sebagai pengguna langsung barang, serta masyarakat secara tidak langsung turut merasakan manfaat dari kondisi aset daerah yang terpelihara baik | | 30.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | **168.462.000** | | | | | | | - | **270.000.000** | |
| | | **[ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ]** | **Jumlah data profil kependudukan yang disusun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **168.462.000** | - | - | - | - | - | - | - | **270.000.000** | - |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Persentase Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya Kerjasama Pendidikan Formal Yang Dilaksanakan dan Terlaksananya Kerjasama Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah Prov dengan Pemerintah Kab/Kota* | - | | | 95 %<br>94 % | 88.712.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | OPD dan Lembaga Terkait | - | 210.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0025 | Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 24.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | OPD dan Lembaga Terkait | | 50.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal* | | | | 5 Satuan Pendidikan | 63.872.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | OPD dan Lembaga Terkait | | 160.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota Tersedianya Data Keluarga Yang Valid Untuk Diinput ke Sistem Informasi Keluarga di Kab. Muba* | - | | | 96 %<br>94 % | 79.750.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB dan Lembaga Terkait | - | 60.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | 1 Laporan | 54.638.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB dan Lembaga Terkait | | 60.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0026 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk* | | | | 15 Unit | 25.112.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB dan Lembaga Terkait | | 0 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | **1.216.939.000** | | | | | | | - | **2.185.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ]** | **Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**<br>**Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri**<br>**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**<br>**Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)**<br>**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)**<br>**Persentase penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** | **100**<br>**10.00**<br>**21.5**<br>**40.8-40.8**<br>**6.72**<br>**73.80** | **11.70**<br>**18**<br>**20**<br>**43.2**<br>**6.89**<br>**71.60** | **11.35**<br>**19**<br>**25**<br>**42.5-42**<br>**6.85**<br>**72.00** | **11.00**<br>**19.5**<br>**35**<br>**42-41.7**<br>**6.83**<br>**72.10** | **1.216.939.000** | - | - | - | - | - | - | - | - | **2.185.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Budaya Lokal* | - | | | 95,70 %<br>93,50 % | 280.537.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Stakeholder dan Mitra Kerja, Masyarakat dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | - | 565.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 6977 Unit | 221.425.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Stakeholder dan Mitra Kerja, Masyarakat dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | 320.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | 1 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Stakeholder dan Mitra Kerja, Masyarakat dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | 170.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 59.112.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Stakeholder dan Mitra Kerja, Masyarakat dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | 75.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Terlaksananya Pembinaan Kader Lapangan / Petugas Lapangan KB* | - | | | 95 %<br>96 % | 154.518.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur, Calon Pengantin, Balita, Ibu Hamil, Lansia dan Peserta KB, Remaja dan Pemuda serta Masyarakat Umum | - | 230.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | 1 Laporan | 154.518.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur, Calon Pengantin, Balita, Ibu Hamil, Lansia dan Peserta KB, Remaja dan Pemuda serta Masyarakat Umum | | 230.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi serta Terlaksananya Pembinaan KB Untuk Mendukung Kegiatan Pelayanan KB* | - | | | 98,05 %<br>99 % | 566.108.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur | - | 1.020.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 1 Laporan | 87.476.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur | | 180.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 10 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur | | 120.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB* | | | | 375 Orang | 187.463.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur | | 230.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 1 Laporan | 64.532.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur | | 170.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* | | | | 2 Laporan | 226.637.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Pasangan Usia Subur | | 320.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertan Ber-KB Terlaksana Pembinaan Terpadu Kampung KB Untuk Mendukung Program Bangga Kencana* | - | | | 95 %<br>90 % | 215.776.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Organisasi Kemasyarakatan | - | 370.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DASHAT di Kampung KB* | | | | 28 Unit | 183.503.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Organisasi Kemasyarakatan | | 250.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 15 Kampung | 32.273.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Organisasi Kemasyarakatan | | 120.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4, | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | **490.000.000** | | | | | | | - | **635.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ]** | **Indeks Lansia Berdaya**<br>**Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja** | **58.70**<br>**84.90** | **57.50**<br>**83.10** | **57.80**<br>**83.50** | **58.00**<br>**83.90** | **490.000.000** | - | - | - | | - | - | - | **635.000.000** | - |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pembinaan Kelompok UPPKS dan PIK-R* | - | | | 97,06 %<br>96 % | 490.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Keluarga Yang Memiliki Balita dan Anak | - | 635.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Laporan | 204.208.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Keluarga Yang Memiliki Balita dan Anak | | 300.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)* | | | | 375 Orang | 165.792.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Keluarga Yang Memiliki Balita dan Anak | | 190.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)* | | | | 1 Laporan | 120.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan | Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Keluarga Yang Memiliki Balita dan Anak | | 145.000.000 | DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **21.331.816.276** | | | | | | | | **31.809.855.600** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **21.331.816.276** | | | | | | | | **31.809.855.600** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **21.331.816.276** | | | | | | | | **31.809.855.600** | |
| 1, | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **15.729.733.276** | | | | | | | - | **24.253.005.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70.01** | **100**<br>**70.01** | **100**<br>**70.01** | **100**<br>**70.01** | **15.729.733.276** | - | - | - | - | - | - | - | **24.253.005.000** | - |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 6 Laporan | 105.000.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | - | 160.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 35.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 70.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 35.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 50 Data | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 55.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 107 Orang | 9.772.372.479 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 14.500.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 107 Orang/bulan | 9.772.372.479 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 14.500.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD* | - | | | 1 Dokumen | 67.333.750 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | - | 80.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 67.333.750 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 80.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian SKPD* | - | | | 1 Dokumen | 354.670.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | - | 350.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 254.670.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 175.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 175.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 670.239.192 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | - | 1.430.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 35.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 300.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 65.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 275.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 175.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 55.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 100.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 155.239.192 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 425.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik SKPD* | - | | | 1 Dokumen | 1.276.954.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | - | 2.287.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1.101.954.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 162.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 162.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Bus Sekolah | | | | | 905.100.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 34.854.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 125.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 2.000.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang SKPD* | - | | | 24 Dokumen | 1.368.390.855 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | - | 2.866.740.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 254.729.655 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 325.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.113.661.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Non ASN | | 2.541.740.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik SKPD* | - | | | 3 Dokumen | 2.114.773.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 2.579.265.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 21 Unit | 1.890.373.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 1.969.265.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 550.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 40 Unit | 24.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 60.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | **3.660.337.000** | | | | | | | - | **5.305.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ]** | **Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan**<br>**Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan**<br>**Persentase Transportasi Yang Nyaman dan Laik Jalan**<br>**Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ** | **100**<br>**-14**<br>**40.00**<br>**80** | **41**<br>**52**<br>**6.67**<br>**-8** | **41**<br>**52**<br>**6.67**<br>**-8** | **13.33**<br>**53**<br>**60**<br>**-9** | **3.660.337.000** | - | - | - | | - | - | - | **5.305.000.000** | - |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas* | - | | | 3 Dokumen | 1.524.790.130 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 3.100.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1054 Unit | 1.081.760.130 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 2.200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Usulan Pokir untuk Pembangunan Halte & ZOSS di depan SDN 1 Sungai Angit Kecamatan Babat Toman | | | | | 189.366.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (thermoplast) | | | | | 275.362.630 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan/Delinator (bahan plastik) | | | | | 55.888.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu (ukuran 75x75) | | | | | 239.760.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu (ukuran 75x75) (Zona Selamat Sekolah 2 lokasi) | | | | | 133.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan marka jalan coldplastik (Zona Selamat Sekolah 2 lokasi) | | | | | 40.404.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan marka jalan thermoplastik (Zona Selamat Sekolah 2 lokasi) | | | | | 27.195.000 | | | | | | | | | |
| | | | Usulan Pokir untuk Pembangunan Halte & ZOSS di depan SDN 1 Sungai Angit Kecamatan Babat Toman | | | | | 25.034.000 | | | | | | | | | |
| | | | Usulan Pokir untuk Pembangunan Halte & ZOSS di depan SDN 1 Sungai Angit Kecamatan Babat Toman | | | | | 85.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 5.220.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 4.050.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 150 Unit | 187.350.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 1 Unit | 255.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 900.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Fasilitas Parkir* | - | | | 1 Dokumen | 8.400.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 25.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 4 Dokumen | 8.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 25.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | - | | | 5 Dokumen | 547.834.976 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 164.478.976 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Pembelian Alat Uji Emisi Gas Buang CO/HC | | | | | 155.577.378 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 8.901.598 | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 4 Orang | 38.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 100.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMUDIAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 1 Dokumen | 22.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 40.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 11 Unit | 308.630.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | 154.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 46.790.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | | | | | 8.640.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | | | | | 80.808.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 7.692.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 3 Laporan | 14.226.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 60.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas* | - | | | 4 Dokumen | 1.289.130.500 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 1.980.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 178.482.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 300.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 110.560.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 180.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | | | | 1 Dokumen | 206.654.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 500.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Pengadaan Rambu Lalu Lintas Portable | | | | | 91.554.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traffic Block | | | | | 111.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 3.420.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | | | | 3 Laporan | 793.434.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 1.000.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Pembuatan Stand Posko Lebaran dan Nataru | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.665.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 258.656.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 27.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 24.853.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 120.580.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | *Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan* | - | | | 1 Dokumen | 290.181.394 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 290.181.394 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | | **1.877.900.000** | | | | | | | - | **2.172.559.300** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut ]** | **Persentase Sarana Prasarana ASDP dalam kondisi baik** | **90** | **35** | **35** | **47** | **1.877.900.000** | - | - | - | - | - | - | - | **2.172.559.300** | - |
| | 2.15.03.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | *Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau* | - | | | 1 Dokumen | 96.892.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 91.181.200 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 96.892.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 91.181.200 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | *Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau* | - | | | 2 Dokumen | 1.781.008.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 2.081.378.100 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 10 Unit | 852.488.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 836.134.200 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Biaya Pemeliharaan Dermaga Sekayu | | | | | 600.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 97.808.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | | | | | 144.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan* | | | | 3 Unit | 730.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 1.000.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Pembangunan Dermaga / Tempat Tambat Perahu - Desa Karang Tirta | | | | | 240.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Dermaga / Tempat Tambat Perahu - Desa Madya Mulya | | | | | 240.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Dermaga / Tempat Tambat Perahu - Desa Bandar Agung | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia* | | | | 65 Unit | 198.520.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 245.243.900 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Belanja Alat Keselamatan Pelayaran - Alat Keselamatan Pelayaran Life Jacket | | | | | 24.420.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu | | | | | 133.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 2.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | | | | | 20.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 2.000.000 | | | | | | | | | |
| 4. | **2.15.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN** | | | | | | **63.846.000** | | | | | | | - | **79.291.300** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ]** | **PersentaseTerpeliharanya Sarana Prasarana Bandar Udara** | **75** | **50** | **50** | **50** | **63.846.000** | - | - | - | | - | - | - | **79.291.300** | - |
| | 2.15.04.2.01 | Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara* | - | | | 1 Dokumen | 63.846.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 79.291.300 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan* | | | | 1 Dokumen | 63.846.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 79.291.300 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **29.103.362.280** | | | | | | | | **32.260.400.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **29.103.362.280** | | | | | | | | **32.260.400.000** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **26.692.867.280** | | | | | | | | **29.475.400.000** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **-** | | | | | | | | | | | - | **10.185.400.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**7.01** | **100**<br>**7.01** | **100**<br>**7.01** | **100**<br>**7.01** | **13.104.988.925** | - | - | - | | - | - | - | **10.185.400.000** | - |
| | | | **Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik* | - | | | 11 Laporan | 59.930.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 165.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 30.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 65.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 45.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 120 Data | 29.130.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 55.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran* | - | | | 100 % | 10.375.731.970 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 5.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 106 Orang/bulan | 10.375.731.970 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 5.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas* | - | | | 100 % | 214.723.480 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 295.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 115.071.480 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 140.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 99.652.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 155.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Kelancaran Aktivitas Kerja dan Perkantoran* | - | | | 20 Laporan | 809.621.317 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 1.305.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 49.995.233 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 55.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 99.811.145 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 310.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 59.860.201 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 199.997.258 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 210.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 101.564.481 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 160.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 55.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.022.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 55.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 208.371.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 360.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja* | - | | | 12 Unit | 236.853.017 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 350.400.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 140.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 140.400.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Sewa Mobil | | | | | 140.400.000 | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 96.453.017 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 210.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 25 Laporan | 980.407.891 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 1.820.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 427.357.460 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 450.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 553.050.431 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 1.370.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 72 Unit | 427.721.250 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | - | 750.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 249.770.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 545.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 123.711.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 150.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 64 Unit | 54.240.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Dinkominfo | | 55.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | ***Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten*** | **-** | | | | **5.498.578.355** | | | | | | | - | **9.180.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten<br>Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik** | **100** | **100** | **100** | **35%100** | **5.498.578.355** | - | - | - | | - | - | - | **9.180.000.000** | - |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab,MUba yang menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat* | - | | | 160 Media | 5.498.578.355 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 9.180.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 10 Komunitas | 134.488.850 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 155.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika* | | | | 2 Laporan | 165.346.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 355.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 3 Rekomend asi | 405.022.650 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 505.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Jasa IMA ( Inteligen Media Analisis) | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | | | | | 15.120.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 39.902.650 | | | | | | | | | |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 150 Media | 2.866.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 5.565.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun* | | | | 200 Dokumen | 1.083.463.724 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Camera DSLR | | | | | 69.798.960 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Komputer - PC Computer | | | | | 43.580.598 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Komputer - Laptop | | | | | 56.302.309 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Komputer - Eco Tank Printer Ink Jet | | | | | 15.681.859 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 829.410.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 68.690.000 | | | | | | | | | |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 3 Konten | 844.257.131 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studi Video dan Film - Teleprompter | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studi Video dan Film - Charger Baterai | | | | | 3.330.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - Laptop | | | | | 48.840.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 287.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 157.160.029 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 257.886.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 78.645.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | | | | | 1.896.102 | | | | | | | | | |
| 3, | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | - | | | | **8.089.300.000** | | | | | | | - | **10.110.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ]** | **Indeks SPBE**<br>**Indeks Masyarakat Digital Indonesia**<br>**Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten** | **100** | **100** | **100** | 3.0 Indeks/3.27 Indeks/100 | **8.089.300.000** | - | - | - | | - | - | - | **10.110.000.000** | - |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika* | - | | | 100 % | 8.089.300.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 10.110.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 48 Perangkat Daerah | 7.418.021.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 9.355.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Belanja Jasa Internet Satelit | | | | | 1.157.046.923 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bandwidth untuk Perangkat Daerah | | | | | 2.580.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Jaringan Metro Ethernet | | | | | 3.240.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Peralatan Jaringan - Router | | | | | 224.087.078 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 8.436.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 96.916.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 11.535.000 | | | | | | | | | |
| | 2.16.03.2.02.0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 466.798.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 510.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas* | | | | 1 Dokumen | 204.481.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 245.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **356.495.000** | | | | | | | | **970.000.000** | |
| 1, | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | - | | | | **356.495.000** | | | | | | | - | **970.000.000** | |
| | | **[ Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ]** | **Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba**<br>**Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral** | **100** | **100** | **100** | **100 %** | **356.495.000** | - | - | - | | - | - | - | **970.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.* | - | | | 1 Dokumen | 356.495.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 970.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik* | | | | 100 % | 148.865.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 465.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Satu Data MUBA | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.883.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 89.982.000 | | | | | | | | | |
| | 2.20.02.2.01.0020 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik* | | | | 50 Orang | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 285.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0021 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral* | | | | 100 % | 207.630.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 220.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **2.054.000.000** | | | | | | | | **1.815.000.000** | |
| 1, | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | - | | | | **2.054.000.000** | | | | | | | - | **1.815.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah ]** | **Persentase Tingkat kematangan Keamana Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muba**<br>**Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah** | **100** | **100** | **100** | **78%100** | **2.054.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.815.000.000** | - |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba* | - | | | 100 % | 2.054.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.815.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 1 Laporan | 437.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 880.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Peningkatan backup dan Replication | | | | | 86.006.130 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | | | | | 24.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Peralatan Mainframe | | | | | 113.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software | | | | | 117.833.999 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 96.119.871 | | | | | | | | | |
| | 2.21.02.2.01.0006 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan* | | | | 1 Laporan | 291.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 475.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian* | | | | 48 Perangkat Daerah | 1.326.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | | 460.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | Belanja Modal Pendukung Persandian - Hardisk External | | | | | 23.687.999 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Pendukung Persandian - Printer Multifungsi | | | | | 14.890.317 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Pendukung Persandian - UPS | | | | | 10.656.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Perangkat Keamanan Jaringan - Perangkat Firewall | | | | | 998.812.999 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Pendukung Persandian - Personal Computer | | | | | 36.142.932 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | | | | | 134.449.151 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | | | | | 12.573.525 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 94.787.078 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **16.560.420.159** | | | | | | | | **13.805.430.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **16.560.420.159** | | | | | | | | **13.805.430.000** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **16.560.420.159** | | | | | | | | **13.805.430.000** | |
| 1, | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **9.948.242.359** | | | | | | | - | **8.705.430.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**79.70** | **74.30**<br>**97** | **75.20**<br>**98** | **76.10**<br>**99** | **9.948.242.359** | - | - | - | | - | - | - | **8.705.430.000** | - |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | - | | | 10 Data<br>3 Dokumen<br>4 Laporan | 81.112.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 85.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 35.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 35.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 12.700.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 15.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 10 Data | 33.412.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 35.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 45 Orang/bulan | 8.429.334.691 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 6.500.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 45 Orang/bulan | 8.429.334.691 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 6.500.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | - | | | 1 Paket<br>10 Orang | 174.019.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 172.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 74.328.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 47.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 99.691.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 125.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>1 Paket | 669.621.400 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 908.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 23.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 149.975.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 200.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.033.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 45.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 149.999.970 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 190.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 70.268.730 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 105.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 39.988.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 45.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 159.356.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 250.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*<br>*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | - | | | 36 Unit<br>0 Unit | 74.793.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 542.220.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 382.220.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 36 Unit | 74.793.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 160.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan | 301.382.268 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 280.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 120.370.268 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 130.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 181.012.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 150.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | - | | | 1 Unit<br>3 Unit | 217.980.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 218.210.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 118.260.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 113.210.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 49.720.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 33 Unit | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 55.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | **356.782.800** | | | | | | | - | **400.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi ]** | **Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | **24.75** | **28.57** | **18.13** | **19.52** | **356.782.800** | - | - | - | - | - | - | - | **400.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEWANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan* | - | | | 312 Unit Usaha<br>120 Unit Usaha | 356.782.800 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | - | 400.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 312 Unit Usaha | 190.290.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | | 230.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 120 Unit Usaha | 166.492.800 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | | 170.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3, | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | **300.042.000** | | | | | | | - | **300.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi ]** | **Persentase Koperasi Aktif** | **40.76** | **51.43** | **33.35** | **34.18** | **300.042.000** | - | - | - | - | - | - | - | **300.000.000** | - |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | - | | | 68 koperasi | 300.042.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | - | 300.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 15 Unit Usaha | 300.042.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | | 300.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4, | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | **380.725.500** | | | | | | | - | **350.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian ]** | **Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan** | **17.47** | **14.29** | **10.57** | **11.99** | **380.725.500** | - | - | - | - | - | - | - | **350.000.000** | - |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | - | | | 120 Orang | 380.725.500 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | - | 350.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengelahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 120 Orang | 380.725.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | | 350.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5, | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | **419.274.500** | | | | | | | - | **450.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya produktivitas koperasi ]** | **Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi** | **53.00** | **50.16** | **50.50** | **51.00** | **419.274.500** | - | - | - | - | - | - | - | **450.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PROKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | - | | | 60 Unit Usaha | 419.274.500 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | - | 450.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 60 Unit Usaha | 419.274.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Koperasi | | 450.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | **1.781.494.000** | | | | | | | - | **1.850.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ]** | **Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal** | **18.60** | **10.58** | **12.32** | **13.92** | **1.781.494.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.850.000.000** | - |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*<br>*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata*<br>*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*<br>*Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan*<br>*Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi*<br>*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | - | | | 150 Unit Usaha<br>2500 Unit Usaha<br>300 Unit Usaha<br>3500 unit usaha<br>100 Unit Usaha<br>325 Unit Usaha | 1.781.494.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | - | 1.850.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 3500 Unit Usaha | 220.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 235.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 300 Unit Usaha | 79.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 150.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi* | | | | 100 Unit Usaha | 125.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 50.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 325 Unit Usaha | 391.744.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 300.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 2 Unit Usaha | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 425.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | Pembuatan pagar pengaman terali besi untuk PJS | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan etalase kaca untuk Klinik Usaha di warung Seluang | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KEMAMPUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata* | | | | 2500 Unit Usaha | 132.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 170.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 150 Orang | 433.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 520.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | **3.373.859.000** | | | | | | | - | **1.750.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya Daya Saing UMKM ]** | **Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan** | **0.2510** | **-** | **0.0829** | **0.1216** | **3.373.859.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.750.000.000** | - |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*<br>*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | - | | | 180 Unit Usaha<br>300 unit usaha | 3.373.859.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | - | 1.750.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 300 Unit Usaha | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 180 Unit Usaha | 3.333.859.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaku UMKM | | 1.750.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | Pemberian Bantuan Hibah Uang untuk Pelaku Usaha Mikro | | | | | 1.090.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bentor untuk Usaha Pelaminan dan Karangan Bunga Desa Epil Kec. Lais | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan peralatan bengkel untuk UKM Bambang Bengkel Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Motor untuk Usaha Kecil Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Peralatan Martabak untuk UMKM Erin Martabak Desa Sumber Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Peralatan Perbengkelan Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kendaraan Roda 2 (Dua) Untuk UMKM Desa Bumi Kencana | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kendaraan Roda 2 (Dua) Untuk UMKM Dusun Talang siku Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Alat Perbengkelan Untuk UMKM Desa Mekar Jadi Kec.Sungai Lilin | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kendaraan Bentor Roda 3 (Tiga) Untuk UMKM Kelurahan Sungai Lilin Induk Kec.Sungai Lilin | | | | | 37.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Alat Perlengkapan Salon untuk UMKM Elsy Salon Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Gerobak Bakso untuk UMKM Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kontainer untuk UMKM Jualan Roti Bakar dan Martabak Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kontainer untuk UMKM Jualan makanan Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kontainer untuk UMKM Jualan Es Teh dan Es Jeruk Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Bantuan Gerobak untuk UMKM Jualan Gorengan Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM untuk Rumah Makan Nadia Kuliner Dusun 1 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM untuk Bengkel Las Sahid Sulistiono Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM untuk Toko Pakan Ternak Adly RT06 Dusun 1 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM untuk Warung Syambudy RT.25 Dusun VII Desa Pulai Gading Kec. Bayung Lencir | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Bengkel Rabani Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Meubel Adelia Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Warung Mas Arif Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Warung Mbak Diah Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Warung Mbak Miatun Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Bengkel Cahaya Patih Motor Rt. 16 Dusun 03 Desa Pandan Sari | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Kantin Sekolah Mama Farel Desa Berojaya Timur | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan UMKM Usaha Dagang Mie Ayam dan Bakso Puryoto Dusun IV Desa Berojaya Timur Kec. Tungkal Jaya | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Mesin Peras Kelapa untuk Usaha Santan Kelapa di Desa Ngunang | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kendaraan Roda 2 untuk UMKM Desa Rantau Panjang | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kendaraan Roda 2 untuk UMKM Kec. Babat Toman | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Mesin Jahit untuk UMKM dalam Kec. Lawang Wetan | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Peralatan Pertukangan dalam Kec. Sanga Desa | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat Bengkel LAS UMKM Patoni LAS Kel. Bayung Lincir Kec. Bayung Lincir | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat Bengkel LAS UMKM Bengkel Las HDHT Desa Telang Kec. Bayung Lincir | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat UMKM Sepeda Motor roda 2 untuk pedagang keliling Pemburu Rupiah Kec. Bayung Lincir | | | | | 220.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Pangkas Rambut untuk UMKM dalam Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat UMKM Bengkel Mesin Acdian Servive dalam Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Peralatan Las untuk Usaha Asmawi Las Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan peralatan Pande Besi untuk Pengrajin Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Kendaraan roda 3 (Betor) untuk usaha Penjual Gas LPG Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Peralatan Las untuk Usaha Yanto Las Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Peralatan Catering untuk UKM Desa Terusan Kec. Sanga Desa | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan mesin pembuatan tahu untuk UKM Desa Toman Baru Kec. Babat Toman | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan mesin jahit dan obras untuk Penjahit Berkah Jaya Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan alat-alat pembuatan kue untuk UKM Mulanjadi Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan jasa pembuatan stand - Pameran Sumsel Expo, HUT UMKM, Smesco | | | | | 160.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 126.675.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 44.199.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 147.765.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 38.220.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **20.103.284.068** | | | | | | | | **25.757.639.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **20.103.284.068** | | | | | | | | **25.757.639.000** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **20.103.284.068** | | | | | | | | **25.757.639.000** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **16.576.539.951** | | | | | | | - | **21.180.639.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**73.77** | **100**<br>**73.70** | **100**<br>**73.72** | **100**<br>**73.73** | **16.576.539.951** | - | - | - | - | - | - | - | **21.180.639.000** | - |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah (data)*<br>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | - | | | 4 Data<br>7 Dokumen<br>7 Laporan | 97.388.896 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 125.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 39.999.704 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 50.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 7 Laporan | 19.999.758 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 25.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 28 Data | 37.389.434 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 50.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*<br>*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 79 orang /bulan 100 % | 11.902.233.379 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 16.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 100 Orang/bulan | 11.902.233.379 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 16.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*<br>*Persentase tersedianya jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik* | - | | | 100 %<br>100 % | 0 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 50.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 50.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*<br>*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*<br>*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah*<br>*Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran* | - | | | 1 Paket<br>16 orang 100 %<br>100 % | 209.122.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 250.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 109.238.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 100.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 17 Orang | 99.884.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 150.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*<br>*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*<br>*Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan (paket)*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*<br>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)* | - | | | 1 paket<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1.084.997.974 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 1.063.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 70.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 82.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 120.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 249.998.327 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 226.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 124.999.647 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 90.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 50.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 95.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)* | - | | | 1 paket | 149.522.210 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 517.760.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 317.760.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 17 Unit | 149.522.210 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)* | - | | | 2 Laporan<br>1 Laporan | 1.580.522.292 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 1.478.200.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 821.541.492 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 850.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 758.980.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 628.200.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*<br>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)* | - | | | 3 unit<br>9 unit<br>1 unit | 1.552.753.200 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 1.696.679.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 325.990.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 330.430.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 1.013.576.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 1.131.249.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 213.187.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 235.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | **710.764.000** | | | | | | | - | **1.090.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kemudahan berinvestasi ]** | **Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi** | **102.19** | **102.07** | **102.09** | **102.11** | **710.764.000** | - | - | - | - | - | | - | **1.090.000.000** | - |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*<br>*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*<br>*Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko* | - | | | 28 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 302.798.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Akademisi, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 420.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | | | | 2 Dokumen | 139.080.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Akademisi, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 185.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah* | | | | 28 Dokumen | 72.444.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Akademisi, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko* | | | | 2 Dokumen | 91.274.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Akademisi, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 135.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*<br>*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*<br>*Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha di Kabupaten Musi Banyuasin* | - | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>100 % | 407.966.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Pelaku Usaha dan Calon Investor | - | 670.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 284.288.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Pelaku Usaha dan Calon Investor | | 320.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | Belanja Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.580.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 31.708.000 | | | | | | | | | |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 123.678.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Pelaku Usaha dan Calon Investor | | 350.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | Belanja Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Kab. Muba | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 22.996.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **737.489.000** | | | | | | | - | **750.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal ]** | **Persentase Peningkatan Investor yang Berminat Sesuai Ketentuan** | **50** | **15** | **15** | **30** | **737.489.000** | - | - | - | - | - | - | - | **750.000.000** | - |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal* | - | | | 1 Dokumen<br>100 % | 737.489.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Pelaku Usaha, Calon Investor dan Masyarakat | - | 750.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 737.489.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Pelaku Usaha, Calon Investor dan Masyarakat | | 750.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | Belanja Rehab Baliho/Billboard DPMPTSP Kab. Muba | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 87.750.850 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | 97.308.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 7.480.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 201.990.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 37.960.000 | | | | | | | | | |
| 4, | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **1.388.672.520** | | | | | | | - | **2.067.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko ]** | **Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin** | **99.55** | **99.36** | **99.40** | **99.43** | **1.388.672.520** | - | - | - | - | - | - | - | **2.067.000.000** | - |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*<br>*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*<br>*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*<br>*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | - | | | 13 Pelaku Usaha<br>1600 Pelaku Usaha<br>3 Dokumen<br>4 Kegiatan Usaha | 1.388.672.520 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.067.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 77.502.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 210.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 1600 Pelaku Usaha | 270.098.720 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 492.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 13 Pelaku Usaha | 76.502.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 165.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 4 Kegiatan Usaha | 964.569.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Masyarakat, Stakeholder di Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | Outdors Street Light Pole Pillar Bilboard (Bilboard Informasih Halaman MPP) | | | | | 190.671.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 15.318.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 20.310.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 340.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 302.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 93.430.000 | | | | | | | | | |
| 5, | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **626.183.797** | | | | | | | - | **445.000.000** | |
| | | **[ Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal ]** | **Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha** | **95** | **62** | **62.50** | **65** | **626.183.797** | - | - | - | - | - | - | - | **445.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan*<br>*: serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*<br>*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*<br>*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | - | | | 17 Kegiatan Usaha<br>60 Pelaku Usaha<br>18 Kegiatan Usaha | 626.183.797 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Pelaku Usaha | - | 445.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 18 Kegiatan Usaha. | 160.615.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Pelaku Usaha | | 180.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 120 Pelaku Usaha | 311.404.797 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Pelaku Usaha | | 90.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan*<br>*: serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 20 Kegiatan Usaha | 154.164.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN dan Pelaku Usaha | | 175.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6, | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **63.634.800** | | | | | | | - | **225.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal ]** | **Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal** | **55** | **30** | **30** | **30** | **63.634.800** | - | - | - | - | - | - | - | **225.000.000** | - |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | - | | | 3 Dokumen | 63.634.800 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Pelaku Usaha dan Masyarakat | - | 225.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 3 Dokumen | 63.634.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, Pelaku Usaha dan Masyarakat | | 225.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA** | | | | | | **57.047.468.864** | | | | | | | | **7.117.800.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **54.331.616.374** | | | | | | | | **3.567.800.000** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **54.331.616.374** | | | | | | | | **3.567.800.000** | |
| 1, | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **16.733.969.754** | | | | | | | - | **82.500.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70.01** | **0**<br>**100** | **100**<br>**70.01** | **100**<br>**70.01** | **16.733.969.754** | - | - | - | - | - | - | - | **82.500.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEBERHASILAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen yang disampaikan tepat waktu* | - | | | 4 Dokumen | 66.736.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 33.220.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 15.016.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 4 Data | 18.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Perkantoran Berjalan Dengan Baik* | - | | | 12 Bulan | 11.555.159.732 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PEGAWAI | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 95 Orang/bulan | 11.555.159.732 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PEGAWAI | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Barang milik daerah yang dikelola* | - | | | 10 unit | 52.728.750 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 9 Dokumen | 52.728.750 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur* | - | | | 100 % | 190.476.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 90.476.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Administrasi Umum Berjalan Dengan Baik* | - | | | 100 % | 932.500.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 82.500.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 82.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 82.500.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 200.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Penyediaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 % | 100.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Penyediaan Jasa Penunjang Kantor* | - | | | 12 Bulan | 3.327.097.272 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 1.703.756.472 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.623.340.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 % | 509.272.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 9 Unit | 328.560.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 165.462.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 15.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | **978.028.500** | | | | | | | - | **685.300.000** | |
| | | **[ Meningkatnya daya saing kepemudaan ]** | **Persentase pemuda yang bebas narkoba**<br>**Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina** | **42.25**<br>**99.98** | **35.12**<br>**99.95** | **36.79**<br>**99.95** | **41.09**<br>**99.96** | **978.028.500** | - | - | - | | - | - | - | **685.300.000** | - |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | - | | | 140 Orang | 492.739.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pemuda | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 140 Orang | 310.306.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pemuda | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Bantuan Service Elektronik (HP) | | | | | 70.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Service AC | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 12.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMAJUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.111.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.766.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 25.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 32.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 33.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 12.289.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 21.940.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi* | | | | 200 Orang | 182.433.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pemuda | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Organisasi yang mendapatkan pembinaan* | - | | | 20 Organisasi | 485.289.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepemudaan | - | 685.300.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 20 Organisasi | 485.289.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Organisasi Kepemudaan | | 685.300.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | **34.351.746.620** | | | | | | | - | **2.800.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga ]** | **Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga**<br>**Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk** | **0.34**<br>**20.10** | **0.29**<br>**18.03** | **0.29**<br>**18.95** | **0.30**<br>**19.00** | **34.351.746.620** | - | - | - | | - | - | - | **2.800.000.000** | - |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan* | - | | | 100 % | 17.485.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab.Muba | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 27 Unit | 17.485.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | ASN Dinas Dikbud Kab.Muba | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Pembangunan Gedung Prasarana Lapangan Bulutangkis Desa Sereka Kecamatan Babat Toman | | | | | 2.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Renovasi Lapangan Futsal Desa Sumber Rejeki Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tribun Lapangan Bola Kaki di Desa Linggo Sari Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Lapangan Sport Center RT. 06 RW. 02 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tribun Lapangan Bola Kaki dan Pemasangan Pagar Lapangan Bola Kaki di Dusun VII Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Olahraga di RT. 07 Dusun 2 Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sport Center di desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 1.955.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengerasan Lapangan Volly dan Bulutangkis di Dusun II, Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Lapangan Bola Volly di Desa Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Lapangan Bola Volly di Dusun 2 Desa Margo Mulyo (B3) Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki dengan Kawat Harmonika Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Atap Sport Center Desa Rantau Panjang | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Lapangan Volly di RT. 06 Dusun 2 Desa Karang Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Volly Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Bangunan Fasilitas Sport Center Desa Muara Teladan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Penataan Halaman Sport Center Desa Muara Teladan | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Volly Dusun 7 Desa Beji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Futsal di RT. 013 Dusun 003 Desa Margo Mulyo | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Volly di Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sport Center Dusun Teluk Kemang Kelurahan Sungai Lilin | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Bola Kaki Dusun Selaro Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Volly dan Perlengkapannya Dusun 4 Talang Duku Jaya Kecamatan Lais | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 1.500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Sport Center di Dusun 1 Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Lais Kecamatan Lais | | | | | 1.400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sport Center Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Halaman Gedung Olahraga Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Lapangan Volly dan Futsal Desa Bandar Tenggulang Kecamatan Babat Supat | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lapangan Basket dan Lapangan Volly di Halaman Parkir Masjid Agung Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Olahraga Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Venue | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 16.450.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 54.955.100 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | | | | | 213.922.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 87.782.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 50.240.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) | | | | | 6.650.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | - | | | 4 kegiatan | 2.150.640.432 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 0 Orang | 2.150.640.432 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan* | - | | | 248 Orang | 10.766.616.128 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | | | | 150 Orang | 85.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Belanja Peralatan Seleksi | | | | | 13.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.672.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KEWANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 9.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 15.128.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 31.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 226 Orang | 10.681.616.128 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Belanja Peralatan Olahraga | | | | | 393.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 1.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 26.383.728 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | | | | | 79.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | 139.475.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 25.455.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 2.446.341.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | 143.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 38.100.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 2.108.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 1.765.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 133.862.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | | | | | 840.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 2.482.979.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan* | - | | | 1 Organisasi | 2.100.000.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 2.100.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Olahraga Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Hibah KONI Kabupaten Musi Banyuasin | | | | | 2.100.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan*<br>*Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan* | - | | | 5 Dokumen<br>9 Event<br>9 Kejuaraan | 1.849.490.060 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Penggiat / Pelaku Olahraga Rekreasi | - | 2.800.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi* | | | | 1 Laporan | 274.207.960 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Penggiat / Pelaku Olahraga Rekreasi | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan* | | | | 3 Laporan | 1.409.872.100 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Penggiat / Pelaku Olahraga Rekreasi | | 2.800.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Penyelenggaraan Event Kejurnas Balap Motor | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Event Muba Run | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 112.300.100 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 129.850.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 137.500.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 2.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 138.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 2.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Electric Generating Set | | | | | 18.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 18.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Mebel | | | | | 4.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 59.732.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 270.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 165.410.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Penggiat / Pelaku Olahraga Rekreasi | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | **2.267.871.500** | | | | | | | - | **0** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kepramukaan ]** | **Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi** | **77.07** | **21.27** | **30.52** | **39.77** | **2.267.871.500** | - | - | - | - | - | - | - | **0** | - |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi* | - | | | 39,77 % | 2.267.871.500 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Gusus Depan Kab. Musi Banyuasin | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 23.670.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Gusus Depan Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 1.500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Gusus Depan Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin | | | | | 1.500.000.000 | | | | | | | | | |
| | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 30 Orang | 270.390.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Gusus Depan Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 273.891.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Gusus Depan Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan* | | | | 1 Unit | 199.920.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Gusus Depan Kab. Musi Banyuasin | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Pembangunan Anjungan Pramuka di Bumi Perkemahan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Jirak Jaya | | | | | 194.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 5.880.000 | | | | | | | | | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2.715.852.490** | | | | | | | | **3.550.000.000** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **2.715.852.490** | | | | | | | | **3.550.000.000** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | **53.998.822** | | | | | | | - | **0** | |
| | | **[ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ]** | **Jumlah objek wisata** | **74** | **67** | **69** | **70** | **53.998.822** | - | - | - | - | - | - | - | **0** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah objek wisata Jumlah Objek Wisata* | - | | | 72 Unit<br>72 Unit | 53.998.822 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Objek Wisata, SDM Pariwisata dan Wisatawan | - | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 6 Unit | 53.998.822 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Objek Wisata, SDM Pariwisata dan Wisatawan | | 0 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Pemeliharaan Destinasi Wisata Danau Ulak Lia | | | | | 33.571.990 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 5.104.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 3.346.632 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 11.976.200 | | | | | | | | | |
| 2. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | **2.370.176.000** | | | | | | | - | **2.700.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata ]** | **Jumlah kunjungan wisatawan** | **50.254** | **39.407** | **42.184** | **43.798** | **2.370.176.000** | - | - | - | - | - | - | - | **2.700.000.000** | - |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan*<br>*Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan* | - | | | 43.798<br>Orang<br>43798 Orang | 2.370.176.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SDM Pariwisata dan Wisatawan | - | 2.700.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 9 Kegiatan | 2.370.176.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SDM Pariwisata dan Wisatawan | | 2.700.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | | Pemilihan Kuyung Kupek Musi Banyuasin | | | | | 800.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 120.001.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | 9.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 161.850.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 7.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 67.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 16.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 138.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | 225.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 1.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | 85.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 16.388.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 83.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Mebel | | | | | 2.826.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 200.041.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 19.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 145.000.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | **291.677.668** | | | | | | | - | **850.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif ]** | **Jumlah pelaku usaha pariwisata** | **940** | **460** | **540** | **620** | **291.677.668** | - | - | - | - | - | - | - | **850.000.000** | - |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | *Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina* | - | | | 60 Orang<br>320 Orang | 291.677.668 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SDM Pariwisata | - | 850.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif* | | | | 80 Orang | 291.677.668 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SDM Pariwisata | | 850.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH** | | | | | | **16.016.152.021** | | | | | | | | **17.345.436.800** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **16.016.152.021** | | | | | | | | **17.345.436.800** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **15.318.425.133** | | | | | | | | **16.355.436.800** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **12.478.991.847** | | | | | | | - | **12.795.436.800** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perpustakaan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**75.78**<br>**83.5** | **100**<br>**73.55**<br>**80** | **100**<br>**73.92**<br>**81** | **100**<br>**74.29**<br>**81.5** | **12.478.991.847** | - | - | - | | - | - | - | **12.795.436.800** | - |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas* | - | | | 100 persentase | 109.999.850 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 170.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 39.999.850 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 60.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 60.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 58 Data | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar* | - | | | 100 persentase | 10.290.678.888 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 9.000.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 63 Orang/bulan | 10.290.678.888 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 9.000.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar* | - | | | 100 persentase | 171.350.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 170.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 63 Paket | 73.350.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 14 Orang | 98.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 120.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 persentase | 903.076.350 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 1.395.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 29.994.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 60.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 199.156.100 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 59.994.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 90.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 199.999.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 250.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 25 Paket | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 180.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 24.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 49.994.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 80.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 199.939.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 450.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *BMD perangkat daerah yang terkelola sesuai standar* | - | | | 100 persenta setase | 75.306.401 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 55 Unit | 75.306.401 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang* | - | | | 100 persentase | 529.597.983 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 1.040.436.800 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 188.169.183 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 500.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 341.428.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 540.436.800 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *BMD yang terpelihara* | - | | | 100 persentase | 398.982.375 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | - | 820.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 222.949.375 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 127.623.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 320.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 16 Unit | 48.410.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Dispusip | | 300.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **2.785.006.076** | | | | | | | - | **3.490.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan ]** | **Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **61.12** | **44** | **46.70** | **49.59** | **2.785.006.076** | - | - | - | | - | - | - | **3.490.000.000** | - |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan* | - | | | 33, 4500 Per pustakaan, Eksemp | 909.416.396 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.170.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 33 Perpustak aan | 24.996.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 160.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 33 Perpustak aan | 48.912.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat* | | | | 1000 Eksemplar | 93.885.501 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | | Buku Digital | | | | | 93.205.501 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan* | | | | 40 Dokumen | 24.996.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 70.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 4500 Eksemplar | 468.321.578 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 450.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | | Belanja Hibah Buku Umum | | | | | 71.124.804 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Untuk Perpustakaan Desa Pangkal Tungkal Kec.Tungkal Jaya | | | | | 36.221.016 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Buku Umum | | | | | 198.022.669 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Buku Perpustakaan Kantor Lurah Sungai Lilin Jaya | | | | | 57.484.494 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 39.682.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.717.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1,190.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 650.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 57,826.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 155.844 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 1.246.752 | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 2 Eksemplar | 70.001.617 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 70.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 25000 Exsamplar Perpustakaan | 178.302.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin | | 270.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | | Panel Informasi Titik Baca | | | | | 126.961.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 7.326.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 18.335.000 | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Durasi Membaca Masyarakat* | - | | | 5, 13 Perpustakaan , lokus | 1.875.589.680 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemustaka dalam wilayah Kab. Muba | - | 2.320.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 5 Perpustakaan | 608.878.280 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemustaka dalam wilayah Kab. Muba | | 950.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 4 Perpustakaan | 1.046.591.290 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemustaka dalam wilayah Kab. Muba | | 900.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | | Sarana Perpustakaan Kelurahan Ngulak Kec. Sanga Desa | | | | | 89.266.422 | | | | | | | | | |
| | | | Sarana dan Prasarana Gedung Perpustakaan Mandrasah Diniyah Takmiliyah Darul Ma'arif | | | | | 131.645.667 | | | | | | | | | |
| | | | Sarana Perpustakaan Desa Pangkalan Tungkal | | | | | 119.712.501 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Perpustakaan | | | | | 389.470.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Perpustakaan di Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 195.460.000 | | | | | | | | | |
| | | | Sarana Prasarana Perpustakaan Kel. Sungai Lilin Jaya | | | | | 121.036.700 | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 30 Orang | 96.730.110 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemustaka dalam wilayah Kab. Muba | | 300.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 13 Lokus | 123.390.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemustaka dalam wilayah Kab. Muba | | 170.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 3, | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | **54.427.210** | | | | | | | - | **70.000.000** | |
| | | **[ Terpeliharanya warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia dalam bentuk naskah kuno ]** | **Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki** | **6** | **0** | **1** | **2** | **54.427.210** | - | - | - | | - | - | - | **70.000.000** | - |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno milik daerah* | - | | | 4 eksemplar | 54.427.210 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Naskah kuno dalam wilayah Kab. Muba | - | 70.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 10 Orang | 42.410.439 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Naskah kuno dalam wilayah Kab. Muba | | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 4 Eksemplar | 12.016.771 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Naskah kuno dalam wilayah Kab. Muba | | 20.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **697.726.888** | | | | | | | | **990.000.000** | |
| 1, | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | **610.562.038** | | | | | | | - | **890.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ]** | **Tingkat Digitalisasi Arsip** | **89.27** | **86.64** | **87.07** | **87.51** | **610.562.038** | - | - | - | | - | - | - | **890.000.000** | - |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Pengelolaan Arsip Dinamis yang sesuai standar* | - | | | 100, 47 Berkas, Lembaga | 525.194.026 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | - | 660.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan* | | | | 100 Berkas | 172.743.408 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.01.0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis* | | | | 2 Unit | 139.143.481 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 150.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Access Door | | | | | 10.768.554 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Mesin Penghancur kertas | | | | | 17.316.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Scanner | | | | | 63.265.116 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran - Alat Pemadam Portable / APAR | | | | | 10.531.125 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laboratorium Kearsipan - Cutting metal/ alas potong | | | | | 956.820 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laboratorium Kearsipan - Spatula | | | | | 114.330 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laboratorium Kearsipan - Rak Pengering Arsip | | | | | 14.041.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laboratorium Kearsipan - Pinset | | | | | 342.990 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laboratorium Kearsipan - Thermohygrometer digital | | | | | 1.831.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 5.511.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya | | | | | 1.275.390 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | 4.739.006 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laboratorium Kearsipan | | | | | 7.770.000 | | | | | | | | | |
| | 2.24.02.2.01.0005 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan* | | | | 47 Lembaga | 136.513.403 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 170.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.01.0008 | Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip* | | | | 9 Lembaga | 54.683.550 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 90.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.01.0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis* | | | | 48 Instansi | 22.110.186 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Pengelolaan Arsip Statis yang sesuai standar* | - | | | 1500 Arsip | 55.337.012 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | - | 150.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 1500 Arsip | 55.337.012 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 150.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simput Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Pengelolaan Simput Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Semakin Berkualitas* | - | | | 130 Pengguna | 30.031.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | - | 80.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 130 Pengguna | 30.031.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 80.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | **87.164.850** | | | | | | | - | **100.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip, perlindungan arsip dan penyelamatan arsip ]** | **Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | **30** | **0** | **0** | **10** | **87.164.850** | - | - | - | | - | - | - | **100.000.000** | - |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Pelaksanaan Pemusnahan Arsip sesuai NSPK* | - | | | 50 berkas | 87.164.850 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | - | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | 50 Berkas | 87.164.850 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat daerah dalam wilayah Kab. Muba | | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | **DINAS PERIKANAN** | | | | | | **21.864.819.130** | | | | | | | | **21.247.818.587** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **21.864.819.130** | | | | | | | | **21.247.818.587** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **21.864.819.130** | | | | | | | | **21.247.818.587** | |
| 1, | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **14.228.052.916** | | | | | | | - | **9.373.826.754** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**88.00** | **100**<br>**76.10** | **100**<br>**78.00** | **100**<br>**80.00** | **14.228.052.916** | - | - | - | | - | - | - | **9.373.826.754** | - |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 81.752.475 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Kebahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 114.282.236 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 31.563.341 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Kebahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 77.219.203 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 8.969.584 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Kebahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 18.118.033 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 41.219.550 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Kebahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 18.945.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 11.697.313.089 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Kebahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 5.442.861.103 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMBALI TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 116 Orang/bulan | 11.697.313.088 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 5.442.861.103 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 52.301.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 52.371.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 5 Dokumen | 52.301.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 52.371.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 208.728.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 140.685.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 114.128.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 39.800.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 94.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 100.885.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 827.979.132 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 994.187.715 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 45.390.380 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 65.724.080 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 167.856.077 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 200.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Perialatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 53.262.944 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 53.245.105 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 198.369.935 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 198.355.808 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 42.712.672 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 81.884.353 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 40.680.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 49.317.128 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 49.304.369 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 205.390.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 279.994.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 25.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 261.442.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 500.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 162.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 400.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | | | Pengadaan Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 162.000.000 | | | | | | | | | |
| | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 66 Unit | 99.442.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 100.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 561.522.521 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 1.348.700.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 288.903.321 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 300.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 272.619.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 1.048.700.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 537.014.700 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 780.739.700 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 340.609.700 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 340.609.700 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 163.465.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 400.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 54 Unit | 32.940.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 40.130.000 | DINAS PERIKANAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | **2.706.678.866** | | | | | | | - | **5.700.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya produksi perikanan tangkap ]** | **Produksi Perikanan Tangkap** | **24415** | **25244.31** | **24370** | **24379** | **2.706.678.866** | - | - | - | | - | - | - | **5.700.000.000** | - |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | - | | | 100 % | 2.475.687.866 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | - | 5.250.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 139.664.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | | 250.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 281 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | | 2.500.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 521 Unit | 2.336.023.866 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | | 2.500.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | | | PAKET 1 PEMBUATAN TEMPAT TAMBATAN PERAHU KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) "ANDALAS" DESA RINGIN AGUNG KECAMATAN LALAN | | | | | 399.983.616 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MUARA DANAU DESA DANAU CALA KECAMATAN LAIS | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) LUBUK LANTANG DESA LUMPATAN KECAMATAN SEKAYU | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MUSI BERSATU DESA LUMPATAN KECAMATAN SEKAYU | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) AYO HIJAU SUNGAI MUSI DESA LUMPATAN KECAMATAN SEKAYU | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PARA NELAYAN SUNGAI MUSI DESA LUMPATAN KECAMATAN SEKAYU | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) SELUANG MUDIK KELURAHAN SERASAN JAYA KECAMATAN SEKAYU | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) TAJABA JAYA DESA TANJUNG AGUNG BARAT KECAMATAN LAIS | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN SEJATI DESA TANJUNG AGUNG TIMUR KECAMATAN LAIS | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN JAYA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR KECAMATAN LAIS | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 4 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN MAKMUR BERSAMA DESA KARANG MAKMUR KECAMATAN LALAN | | | | | 472.305.000 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 3 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) ULAK RENGAS MAJU KELURAHAN NGULAK 1 KECAMATAN SANGA DESA | | | | | 56.829.225 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 3 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) KERAMAT JATI DESA TERUSAN KECAMATAN SANGA DESA | | | | | 56.829.225 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 3 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) SUMBER JAYA MENANTI DESA KARANG RINGIN 2 KECAMATAN LAWANG WETAN | | | | | 56.829.225 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PANGKALAN MAKMUR DESA PANGKALAN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 5 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MERAH PUTIH RANTAU PANJANG DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LAWANG WETAN | | | | | 54.945.033 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 5 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NURANI RAKYAT RANTAU PANJANG DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LAWANG WETAN | | | | | 54.945.033 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEGIATAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | PAKET 6 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) FAUNA TIRTA KELURAHAN SOAK BARU KECAMATAN SEKAYU | | | | | 97.291.533 | | | | | | | | | |
| | | | PAKET 2 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MANDIRI BANGKIT BERSAMA KELURAHAN BALAI AGUNG KECAMATAN SEKAYU | | | | | 87.551.283 | | | | | | | | | |
| | | | Biaya Jasa Konsultan Tambatan Perahu | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.623.859 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 45.248.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 31.410.000 | | | | | | | | | |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 230.991.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | - | 450.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 500 Orang | 169.695.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | | 300.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 5 Kelompok | 61.296.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Nelayan | | 150.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| 3, | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | **2.242.792.198** | | | | | | | - | **2.922.437.833** | |
| | | **[ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ]** | **Produksi Perikanan Budidaya** | **12240** | **12094.86** | **12119** | **12143** | **2.242.792.198** | - | - | - | - | - | - | - | **2.922.437.833** | - |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* | - | | | 100 % | 215.044.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Pokdakan | - | 186.568.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 12 Kelompok | 46.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Pokdakan | | 71.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 9 Kelompok | 168.444.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Pokdakan | | 115.568.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan* | - | | | 100 % | 2.027.748.198 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Masyarakat | - | 2.735.869.833 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 362.703.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 250.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | | | Penyediaan jasa konsultansi pengelolaan sumber daya perikanan | | | | | 338.833.001 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.118.999 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 17.076.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.675.000 | | | | | | | | | |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 200 Unit | 1.665.045.198 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN dan Masyarakat | | 2.485.869.833 | DINAS PERIKANAN |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "SUMBER JAYA KAHIRUPAN" / RIKA ISTIANTO DESA BERO JAYA TIMUR KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "MINA BERKAH JAYA" / SUMANTO DESA BERO JAYA TIMUR KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "MEKAR SARI" / ZAENAL ABIDIN DESA BERLIAN JAYA KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "HARAPAN INDAH" / AHMAD HAMBALI DESA BERLIAN JAYA KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "GARUDA JAYA MAJU " / WALYONO DESA PANDAN SARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "AIR MENGALIR JERNIH" / EDY GUNAWAN KELURAHAN SUNGAI SUNGAI LILIN JAYA KECAMATAN SUNGAI LILIN | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "MAJU NUSWANTARA SAKTI" / SYARIFUDDIN KELURAHAN SOAK BARU KECAMATAN SEKAYU | | | | | 63.469.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "IKAN MUDIK BAROKAH" / ZULKARNAIN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LAWANG WETAN | | | | | 55.781.800 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "MATEK KAIL PANCING" / KRISTIAN KELURAHAN SOAK BARU KECAMATAN SEKAYU | | | | | 55.781.800 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "BINA WARGA BAROKAH" / BENY SETIAWAN KELURAHAN BABAT KECAMATAN BABAT TOMAN | | | | | 16.943.000 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "SINAR TELADAN" / SUPRIADI DESA MUARA TELADAN KECAMATAN SEKAYU | | | | | 16.943.000 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "KRISNA MINA UTAMA" / JAKARIA SAPUTRA DESA SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 16.943.000 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "BERDIKARI" / SUPRIADI KELURAHAN MANGUNJAYA KECAMATAN BABAT TOMAN | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "PENYELAMAT IWAK TENGGELAM" / EFENDI KASIM KELURAHAN SUNGAI SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "BOMBER BUMI BERJAYA" / DIDIK APRIADI DESA BUMI KENCANA KECAMATAN SUNGAI LILIN | | | | | 57.165.650 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "SERBA BAKTI MUBA" / IBRAHIM DESA TELUK KIJING III KECAMATAN LAIS | | | | | 9.701.400 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KEWAJIBAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "BERKAT JAYA" / ABDUL ZAELANI DESA BERO JAYA TIMUR KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA MESIN PAKAN DAN BAHAN | | | | | 12.765.000 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "SERBA BAKTI MUBA" / IBRAHIM DESA TELUK KUING III KECAMATAN LAIS | | | | | 47.464.250 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "SAHABAT AIR JAYA" / FIRDAUS KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KECAMATAN SUNGAI LILIN | | | | | 57.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | BELANJA HIBAH BARANG UNTUK POKDAKAN "MAGGOT KREATIF" / SAWALANI DESA PINANG BANJAR KECAMATAN SUNGAI LILIN | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | 874.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 5.555.115 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 2.164.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 3.330.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 53.703.465 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | 354.825 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | 422.420.791 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 4.760.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 88.674.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 58.380.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Pompa | | | | | 3.441.444 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | | | | | 9.103.110 | | | | | | | | | |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **1.087.744.500** | | | | | | | - | **1.066.554.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan ]** | **Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan** | **100** | **0** | **15** | **30** | **1.087.744.500** | - | - | - | | - | - | - | **1.066.554.000** | - |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan* | - | | | 100 % | 1.087.744.500 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, Masyarakat dan Nelayan Perikanan | - | 1.066.554.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 50 Pelaku Usaha | 180.290.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, Masyarakat dan Nelayan Perikanan | | 475.069.000 | DINAS PERIKANAN |
| | | | Belanja Pengadaan Benih Ikan Lokal yang Dilepas Liarkan di Lokasi Perairan umum Daratan dalam Wilayah kab/Kota (Danau Ulak Litok Kec. Sanga Desa) | | | | | 63.392.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 45.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 47.100.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 21.498.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 2.940.000 | | | | | | | | | |
| | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMAJUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 50 Pelaku Usaha | 628.733.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, Masyarakat dan Nelayan Perikanan | | 591.485.000 | DINAS PERIKANAN |
| | | | Pengadaan Benih ikan lokal yang Dilepas liarkan di Perairan Umum Daratan di Wilayah Kecamatan dalam Kab. Musi Banyuasin | | | | | 210.401.083 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Barang yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Danau Ulak Lia Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 173.179.458 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Barang yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Nelayan Hujan Mas Kec. Sanga Desa | | | | | 173.179.458 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 47.418.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 24.555.000 | | | | | | | | | |
| | 3.25.05.2.01.0011 | Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun* | | | | 40 Unit | 278.721.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, Masyarakat dan Nelayan Perikanan | | 0 | DINAS PERIKANAN |
| | | | Penyediaan Prasarana Papan Larangan Destructive Fishing | | | | | 229.770.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 7.683.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 17.688.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 23.580.000 | | | | | | | | | |
| 5, | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | **1.599.550.650** | | | | | | | - | **2.185.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ]** | **Angka Konsumsi Ikan**<br>**Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan** | **2**<br>**42.74** | **16.63**<br>**40.27** | **2**<br>**40.67** | **2**<br>**41.08** | **1.599.550.650** | - | - | - | - | - | - | - | **2.185.000.000** | - |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | *Persentase Ketersediaan Data Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan* | - | | | 100 % | 63.324.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, dan Masyarakat | - | 500.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko* | | | | 1 Dokumen | 63.324.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, dan Masyarakat | | 500.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil* | - | | | 100 % | 59.894.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | - | 85.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 10 Unit Usaha | 59.894.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN | | 85.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | - | | | 100 % | 1.476.332.650 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, dan Masyarakat | - | 1.600.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Ton | 677.404.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, dan Masyarakat | | 800.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 60 Pelaku Usaha | 798.928.650 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Non ASN, dan Masyarakat | | 800.000.000 | DINAS PERIKANAN |
| | | | Bantuan hibah Barang untuk Kelompok JM PONTON LAME Kelurahan Sosik Baru | | | | | 61.965.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan hibah Barang untuk Kelompok BOGARASA Desa Lumpatan | | | | | 94.935.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan hibah Barang untuk Kelompok SRIKANDI PEJUANG RUPIAH Desa Lumpatan | | | | | 94.935.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan hibah Barang untuk Kelompok LAMBAK CEMILANG Desa Lubuk Buah | | | | | 94.935.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan hibah Barang untuk Kelompok BAHAGIA BERSAMA Desa Lumpatan | | | | | 94.935.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 683.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 20.627.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 31.372.286 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | 969.114 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.552.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 196.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 38.170.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 42.050.000 | | | | | | | | | |
| | | **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN** | | | | | | **55.069.485.081** | | | | | | | | **46.865.553.030** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **55.069.485.081** | | | | | | | | **46.865.553.030** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **55.069.485.081** | | | | | | | | **46.865.553.030** | |
| 1, | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **35.518.501.785** | | | | | | | - | **23.582.542.418** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**74.45** | **100**<br>**74.15** | **100**<br>**74.20** | **100**<br>**74.25** | **35.518.501.785** | - | - | - | - | - | - | - | **23.582.542.418** | - |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 110.382.894 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 205.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 51.073.640 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 9.309.255 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 20.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 49.999.999 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 135.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 30.654.730.682 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 20.178.442.418 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 298 Orang/bulan | 30.654.730.682 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 20.178.442.418 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 88.191.250 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 150.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 14 Dokumen | 88.191.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 150.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 376.432.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 195.200.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 278.432.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 115.200.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 98.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 80.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 872.447.279 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 1.490.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.976.993 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 100.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 198.581.581 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 300.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 59.974.328 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 75.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.684.728 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 200.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.010.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 150.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.682.649 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 40.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 49.993.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 192.544.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 575.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 277.298.420 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 250.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 177.360.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 0 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Dinas | | | | | 177.360.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 136 Unit | 99.938.420 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 250.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 1.847.894.745 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 330.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 252.985.145 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 330.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.594.909.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 0 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KEWANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 1.291.124.514 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 783.900.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 14 Unit | 551.880.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 510.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 689.444.514 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 150.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 81 Unit | 49.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 123.900.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | **11.300.529.000** | | | | | | | - | **11.804.822.400** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ]** | **Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura**<br>**Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan** | **0.67**<br>**1** | **-** | **-** | **0.67**<br>**1** | **11.300.529.000** | - | - | - | | - | - | - | **11.804.822.400** | - |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian* | - | | | 100 % | 7.170.667.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | - | 10.100.805.400 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 1 Laporan | 3.488.734.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 5.000.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Pengadaan Handsprayer Poktan Padang Sapi A Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu | | | | | 26.550.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Handsprayer Poktan Usaha Maju Desa Ballangu Timur Kecamatan Sekayu | | | | | 26.550.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Harapan Maju Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Mapari Desa Karang Sari Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Matahari Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Mekar Tani Desa Madya Mulya Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Mulya Jaya A Desa Mulya Agung Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Pematang Melintang Desa JUD I Kecamatan Sanga Desa | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Purwa Jaya B Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Sido Mulyo Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Suka Maju Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Suka Makmur Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Sumber Rejeki Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Sumber Tani Desa Karang Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 35.908.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 4 UPJA Karya Bersama Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan | | | | | 444.333.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 4 UPJA Rizki Jaya Tani Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan | | | | | 444.333.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Excavator UPJA Gajah Mandiri Desa Sri Gading Kecamatan Lalan | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Sidorejo Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 Poktan Bersaudara Desa Karang Sari Kecamatan Lalan | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Excavator Poktan Desa karang Tirta Kecamatan Lalan | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 54.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 8.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 47.432.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 60.330.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 105.712.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 550.591.200 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak* | | | | 3 Ton | 504.667.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 561.692.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Penangkaran Benih - Kelompok Tani Rangkawe Maju Kelurahan Ngulak Kecamatan Sanga Desa | | | | | 88.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penangkaran Benih - Kelompok Tani Suka Maju Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 88.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penangkaran Benih - Kelompok Tani Suka Makmur Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa | | | | | 88.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penangkaran Benih - Kelompok Tani Suka Makmur Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa | | | | | 88.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penangkaran Benih - Kelompok Tani Pematang Melintang Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa | | | | | 88.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.051.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 42.526.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 16.800.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.01.0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan* | | | | 2 Laporan | 2.935.928.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 3.208.290.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Harapan Kita Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Bagan II Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Bagong Karya Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Karya Utama Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Harapan Baru Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Budi Mulya Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Tunas Muda Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Cendana Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Tirta Rahayu Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Mandung Jaya 1 Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 56.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Sido Mulyo 1 Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Bersama Satu Desa Jembatan Gantung Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Sari Satu Desa Rejosari Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Suka Makmur Desa Rejosari Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Sumber Sari Desa Rejosari Kecamatan Jirak Jaya | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Pematang Ujung Desa Panai Kecamatan Sanga Desa | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Eceng Gondok Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Harapan Baru Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Ketapang Kresek Makmur Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Suka Maju Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Pangkalan Aman Desa Toman Kecamatan Babat Toman | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Harapan Maju 2 Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Harapan Maju 1 Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Tunas Baru Desa Beruga Kecamatan Babat Toman | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Pantra Desa Sugiwaras Kecamatan Babat Toman | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Maju Bersama Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Palapa Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Sungai Gumanti Desa Petaling Kecamatan Lais | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Bhineka Desa Teluk Kecamatan Lais | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Sepakat Tani Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Usaha Bersama 2 Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher Kelompok Tani Mekar Jaya I Desa Teluk Kijing 2 Kecamatan Lais | | | | | 28.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Combine Harvester Besar Kelompok Tani Makmur Sejahtera Desa Sri Gading Kecamatan Lalan | | | | | 425.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Combine Harvester Besar UPJA Tri Famili Desa Karang Sari Kecamatan Lalan | | | | | 425.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Combine Harvester Besar Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan | | | | | 425.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Penggilingan Padi Mini Kelompok Tani Sumber Rezki Desa Karang Ringin II Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Combine Harvester Besar Kelompok Tani Sekar Arum Desa Karang Sari Kecamatan Lalan | | | | | 425.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.998.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 43.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 74.130.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.01.0016 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura* | | | | 1 Laporan | 135.626.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 780.232.200 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman | | | | | 134.946.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | *Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer* | - | | | 100 % | 35.130.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | - | 60.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar* | | | | 1 Laporan | 35.130.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 60.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | *Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain* | - | | | 100 % | 4.094.732.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | - | 1.644.017.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 96 Ekor | 3.172.425.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 773.114.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KEWANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengadaan Bantuan Pengembangan Ternak Ayam Petelur Kelompok Tani Pemuda Mandiri Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman | | | | | 242.478.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Warga Mulya Kec. Plakat Tinggi | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Sekate Suka Makmur Kel. Soak Baru Kec. Sekayu | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Melati Makmur Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Sido Makmur Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Sumber Sari Kec. Tungkal Jaya | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Arto Moro Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Hijau Makmur Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Mulya Tani Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Kambing Kelompok Tani Karya Tani Desa Wono Rejo Kec. Bayung Lencir | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Berkah Kasmaran Desa Kasmaran Kec. Babat Toman | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Harapan Baru Kel. Babat Kec. Babat Toman | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Bukit Jaya Kec. Sungai Lilin | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Muda Padu Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Pengembangan Ternak Itik Petelur Kelompok Tani Kencana Maju Bersama Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Mesin Pemrosesan Pakan Ternak Kelompok Tani Toman Farm Desa Toman Kec. Babat Toman | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Sialang Agung Kec. Plakat Tinggi | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Tunas Muda Bersama Desa Sri Mulyo Kec. Babat Toman | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 62.247.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 65.650.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 5000 Dosis | 922.307.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 870.903.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi - Pengadaan Alat-alat Penunjang Inseminasi Buatan (IB) | | | | | 475.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum - Pengadaan Alat-alat Penunjang Inseminasi Buatan (IB) | | | | | 16.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 7.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | 255.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 64.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 64.110.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | **3.234.801.092** | | | | | | | - | **4.450.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ]** | **Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)** | **25** | **20** | **25** | **25** | **3.234.801.092** | - | - | - | - | - | - | - | **4.450.000.000** | - |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Luasan atau jumlah penerima manfaat* | - | | | 50 Ha | 1.130.500.979 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani dan Gapoktan | - | 0 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan* | | | | 360 Ha | 1.130.500.979 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani dan Gapoktan | | 0 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Belanja Benih Jagung (300 Ha) | | | | | 450.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Cabai Besar ( 70 Ha ) | | | | | 565.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 7.191.979 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 34.504.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 72.195.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Terlaksananinya Pembangunan Prasarana Pertanian* | - | | | 100 % | 2.104.300.113 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | - | 4.450.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 2 Unit | 415.173.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 520.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Pembangunan Embung Pertanian BPP Kecamatan Babat Supat | | | | | 357.320.100 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 22.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 57.150.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 246.012.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 300.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan Korat Kelompok Tani Suka Makmur Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa | | | | | 228.376.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 38.700 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 4.422.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 12.495.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 10 Unit | 582.539.800 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 1.150.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Pembangunan Pintu Air Saluran Tersier Gapoktan Maju Tani 01 Desa Prumpung Raya Kecamatan Lalan | | | | | 327.282.390 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pintu Air Saluran Tersier Gapoktan Usaha Bersama Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan | | | | | 218.188.260 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 69.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 35.640.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 4 Unit | 657.003.583 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 380.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Pembangunan Jembatan Beton Saluran Sekunder Gapoktan Mitra Tani Desa Karang Sari Kecamatan Lalan | | | | | 303.764.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan Beton Saluran Sekunder Gapoktan Berkat Yakin Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa | | | | | 159.049.680 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan Beton Saluran Sekunder Kelompok Tani Danau Apung Ilo Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu | | | | | 156.108.180 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 41.723 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 36.000.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 203.571.230 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 2.100.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pembangunan Jaringan Irigasi air Tanah Dalam (Sumur Bor) Kelompok Tani Panjang Harapan Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 186.417.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 124.230 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 16.350.000 | | | | | | | | | |
| 4, | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | **1.338.783.860** | | | | | | | - | **1.802.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ]** | **Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)** | **25** | **-** | **-** | **25** | **1.338.783.860** | - | - | - | - | - | - | - | **1.802.000.000** | - |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 421.534.660 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | - | 700.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan* | | | | 15 Wilayah | 212.672.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 300.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 208.862.660 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 400.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 480.022.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | - | 600.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 1 Laporan | 480.022.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 600.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner* | - | | | 100 % | 437.227.200 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | - | 502.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 1 Laporan | 102.649.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 182.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 1 Dokumen | 118.418.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 180.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.04.0007 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi* | | | | 14 Orang | 216.160.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani Ternak | | 140.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 5, | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | **544.848.000** | | | | | | | - | **600.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ]** | **Persentase Penanganan Bencana Pertanian** | **25** | **25** | **25** | **25** | **544.848.000** | - | - | - | - | - | - | - | **600.000.000** | - |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota* | - | | | 100 % | 544.848.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | - | 600.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 1500 Ha | 544.848.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 600.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 6, | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | **3.132.021.344** | | | | | | | - | **4.626.188.212** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ]** | **Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan** | **30** | **0** | **0** | **20** | **3.132.021.344** | | | - | | - | - | - | **4.626.188.212** | - |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian* | - | | | 100 % | 3.132.021.344 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | - | 4.626.188.212 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 15 Unit | 1.505.318.290 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 2.700.000.000 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 15 Unit | 1.173.838.401 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 1.455.499.559 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | Belanja Hibah Uang untuk diberikan kepada Pihak III Kegiatan Optimalisasi Pekarangan Kelompok Wanita Tani | | | | | 280.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 23.264.379 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 53.904.022 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 23.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Siaga | | | | | 4.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 24.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 46.776.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 616.734.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 36.360.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi* | | | | 6 Unit | 452.864.653 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani | | 470.688.653 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | **DINAS PERKEBUNAN** | | | | | | **41.972.084.211** | | | | | | | | **53.045.000.000** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **41.972.084.211** | | | | | | | | **53.045.000.000** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **41.972.084.211** | | | | | | | | **53.045.000.000** | |
| 1, | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **18.129.695.406** | | | | | | | - | **19.295.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Perkebunan) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**82** | **100**<br>**75.40** | **100**<br>**77** | **100**<br>**78** | **18.129.695.406** | - | - | - | | - | - | - | **19.295.000.000** | - |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah*<br>*Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 156.040.020 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 355.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 40.000.220 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 80.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 19.957.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 25.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 96.082.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 250.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 13.864.508.065 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 13.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 156 Orang/bulan | 13.864.508.065 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 13.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 52.440.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 60.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 6 Dokumen | 52.440.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 60.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah*<br>*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 237.978.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 620.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 153.248.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 250.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 84.730.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 200.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 19 Orang | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 170.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 909.065.861 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 1.700.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.668.580 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 40.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 256.721.923 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 600.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 52.650.916 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 100.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.019.350 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 260.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 98.185.092 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 150.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 31.140.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 450.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 230.011.360 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 850.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 400.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 141.831.360 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 200.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | 141.831.360 | | | | | | | | | |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 88.180.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 250.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 877.543.200 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 340.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 235.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 300.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 642.343.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 40.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.802.108.900 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 2.370.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 242.550.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 340.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 1.299.283.900 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 1.700.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 200.355.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 200.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Rehabilitasi Gedung UPTP4K Batang Hari Leko | | | | | 99.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Kantor UPT P4K Sanga Desa | | | | | 99.675.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 41 Unit | 59.920.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 80.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | **5.971.532.431** | | | | | | | - | **8.700.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ]** | **Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan** | **25** | **0** | **15** | **17** | **5.971.532.431** | - | - | - | | | | - | **8.700.000.000** | - |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terfaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)* | - | | | 100 %<br>100 % | 2.019.439.249 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 4.350.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 12 Laporan | 254.927.250 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 350.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 1.764.511.999 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 4.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Belanja Pengadaan Mesin Perontok Sawit untuk Kelompok Tani Wanasari Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 66.600.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pengadaan Pupuk Organik Cair untuk Kelompok Tani RT 01 Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Bayung Sejahtera | | | | | 62.604.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Bayung Sejahtera | | | | | 55.490.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Bintang Timur Desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Harapan Bahagia Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Harum Jaya 1 Desa Sukadamai Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Maju Bersama IV Desa Seratus Lapan Kecamtan Babat Supat | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Martabe Desa Talang Buluh Kecamatan Batangheri Leko | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Rizki Kelurahan Ngulak Kecamatan Sanga Desa | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Sahabat Tani Jaya Desa Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Sinar Teladan Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Suban V Desa Lais Kecamatan Lais | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Sumber Maju Dusun 2 Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sarana Pendukung Perkebunan (Pupuk Organik Cair, Herbisida dan Handsprayer) untuk Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu | | | | | 118.094.288 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 40.388.000 | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 50.392.549 | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 100 %<br>100 % | 3.952.093.182 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 4.350.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 76.120.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 200.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 150.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | | | | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 3.775.973.182 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 4.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Penyediaan Polybag Tanaman untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 176.601.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Biji Karet Medan untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 26.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Benih Kecambah Kelapa Sawit Tania Selatan Tahap 1 | | | | | 148.479.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Benih Kecambah Kelapa Sawit PPKS untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Bina Sawit Makmur Tahap 1 | | | | | 195.036.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Benih Kecambah Kelapa Sawit Bina Sawit Makmur Tahap 2 untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 195.036.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Benih Kecambah Kelapa Sawit Tania Selatan Tahap 2 untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 189.150.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Benih Kelapa Sawit Baby Bag Tahap 1 untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 196.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Benih Kelapa Sawit Baby Bag Tahap 2 untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 196.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Benih Pinang Batara untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 47.540.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Mesin Pompa Air untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 8.325.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Mesin Pompa Air Submersible untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 18.581.400 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 55.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sumur Bor untuk Kebun Pembibitan Dinas Perkebunan Kab. Muba | | | | | 189.147.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | 148.923.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 94.441.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 24.975.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone | | | | | 5.744.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | | | | | 1.393.559.782 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 9.520.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 99.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 151.073.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 56.190.000 | | | | | | | | | |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | **8.944.207.300** | | | | | | | - | **8.900.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ]** | **Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan** | **100** | **20** | **20** | **20** | **8.944.207.300** | - | - | - | - | - | - | - | **8.900.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)* | - | | | 100 %<br>100 % | 200.088.300 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 300.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 15 Laporan | 200.088.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 300.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian (Perkebunan)* | - | | | 100 %<br>100 % | 8.744.119.000 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 8.600.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 2 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 600.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 10 Unit | 8.744.119.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 4.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Ampera Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Bintang Timur Kecamatan Babat Supat | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Harum Jaya I Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Lebung Are Kecamatan Sekayu | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Lebung Selang Ngulak II Kecamatan Sanga Desa | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Maju Tani 2 Kecamatan Babat Supat | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Mitra Tani Makmur Desa Simpang Sari Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Mulya Tani Kecamatan Sekayu | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Perjaya Kecamatan Sanga Desa | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Sekate Suka Makmur Kecamatan Sekayu | | | | | 176.599.300 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi di Beton Seroji Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan pembangunan jalan produksi Kelompok Tani Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Harjo Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 570.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi dan Box Culvert KT. Tunas Harapan II Dusun III Desa Letang Kecamatan Babat Supat | | | | | 665.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Mulya Jaya Dusun 2 Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman | | | | | 950.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Tunas Muda Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengerasan Jalan Produksi Kelompok Tani RT.12 Dusun IV Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 380.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Peningkatan jalan produksi dengan batu agregat KT. Maju Makmur RT 25 Dusun 5 Desa Beji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 190.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan produksi KT. Langkah Baru Desa Talang Leban Kecamatan Batanghari Leko | | | | | 475.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi KT. Makmur Bersama Desa Bangun Sari menuju kebun PT. PUSA / Kebun Topsa Kecamatan Babat Toman | | | | | 1.520.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultan Perencana Jalan Produksi | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi | | | | | 47.309.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi | | | | | 63.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 129.180.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 185.037.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 13.600.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 6 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 2.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 2.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| 4. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | **4.631.428.696** | | | | | | | - | **10.450.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ]** | **Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan** | **47** | **1.7** | **47** | **47** | **4.631.428.696** | - | - | - | - | - | - | - | **10.450.000.000** | - |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota* | - | | | 100 %<br>100 % | 4.631.428.696 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 10.450.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 2150 Ha | 341.948.104 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 350.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan* | | | | 315 Ha | 4.244.480.592 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 10.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Karya Makmur Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Siaga Geni Desa Air Puluh Ulu Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Suka Jaya Desa Suka Makmur Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Krista Mukti Mandiri Desa Sido Mukti Kecamatan Plakat Tinggi | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Serius Kelurahan Ngulak Kecamatan Sanga Desa | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Lebung Selang Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun untuk KTPA Sejahtera Mandiri Desa Sungai Napal Kecamatan Batanghari Leko | | | | | 174.135.135 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Pancur Jaya Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 165.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Bintang Timur Desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat | | | | | 165.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Penantian Kelurahan Ngulak Kecamatan Sanga Desa | | | | | 164.995.868 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Budidoyo Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 310.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Suka Maju Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 34.165.800 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 170.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Sejahtera Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 448.162.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 288.150.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 355.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Tani Makmur Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 333.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | | | | | 15.468.683 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | | | | | 14.535.450 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan | | | | | 39.119.886 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | | | | | 56.139.461 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 96.682.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 368.175.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan* | | | | 1 Laporan | 45.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 100.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| 5, | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | **494.399.383** | | | | | | | - | **1.000.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan atas izin usaha perkebunan yang diterbitkan ]** | **Persentase Pengawasan dan Pembinaan atas Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan** | **100** | **30** | **30** | **40** | **494.399.383** | - | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000** | - |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota TerlaksananyaPenerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 %<br>100 % | 494.399.383 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 1.000.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perlimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 299.999.383 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 300.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi* | | | | 12 Laporan | 194.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 700.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| 6. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | **3.800.820.995** | | | | | | | - | **4.700.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ]** | **Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani** | **14** | **14** | **9** | **12** | **3.800.820.995** | - | - | - | - | - | - | - | **4.700.000.000** | - |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)*<br>*Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)* | - | | | 100 %<br>100 % | 3.800.820.995 | | | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | - | 4.700.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 15 Unit | 1.350.179.553 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 1.700.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Penyediaan Baju untuk Peserta Pelatihan | | | | | 60.439.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 9.989.334 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 25.680.719 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 158.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 828.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 105.310.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 148.640.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 78 Unit | 2.114.352.896 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 2.500.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor Untuk Kelompok UPPB | | | | | 356.250.500 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung UPPB Tani Jaya Desa Banjar Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 199.797.444 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung UPPB Muara Teladan Maju Bersama Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu | | | | | 196.716.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung UPPB Salero Berseri Jaya Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 199.847.409 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung UPPB Berlian Maju Jaya Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 199.797.444 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Lais Mandiri Desa Lais Kecamatan Lais | | | | | 59.304.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Talang Piase Desa Talang Piase Kecamatan Lawang Wetan | | | | | 54.151.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Bones Desa Sukadamai Kecamatan Pkat Tinggi | | | | | 61.696.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Berlian Maju Jaya Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 63.413.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Macang Sakti Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Teluk Sejahtera Desa Teluk Kecamatan Lais | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Peninggalan Bersatu Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Tani Mulya Desa Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Panca Makmur Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Wonorejo Desa Wonorejo Kecamatan Bayung Lencir | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Maju Bersama Tani Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Sumber Makmur Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Sumber Jaya Madya Desa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Seratus Lapan Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Muara Teladan Maju Bersama Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Tani Jaya Desa Banjar Jaya Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Bina Kertayu Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Kelompok UPPB Rimba Makmur Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 45.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Jasa Nasihat dan Pra Disain Arsitektural | | | | | 40.128.099 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 35.902.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 14.850.000 | | | | | | | | | |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi* | | | | 2 Unit | 261.188.546 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 300.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk* | | | | 5 Unit | 75.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Kelompok Tani/Pekebun | | 200.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | **29.916.494.717** | | | | | | | | **137.820.346.795** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **29.916.494.717** | | | | | | | | **137.820.346.795** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **28.799.118.262** | | | | | | | | **136.415.346.795** | |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **16.676.693.055** | | | | | | | - | **19.530.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perdagangan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**79.80** | **100**<br>**77.40** | **100**<br>**77.80** | **100**<br>**78.20** | **16.676.693.055** | - | - | - | | - | - | - | **19.530.000.000** | - |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | - | | | 121 Data<br>9 Dokumen<br>6 Laporan | 123.312.302 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 100.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 42.122.610 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 30.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 8 Laporan | 50.692.378 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 20.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 121 Data | 30.497.314 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 50.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 121 Orang/bulan | 13.030.482.206 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 17.000.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 121 Orang/bulan | 13.030.482.206 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 17.000.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | - | | | 1 Paket 7 Orang | 204.992.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 250.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 78.255.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 90.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 126.737.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 160.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | - | | | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket | 831.730.136 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 930.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.158.334 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 25.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 217.752.474 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 280.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 58.396.545 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 55.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 189.618.192 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 205.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 113.735.591 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 120.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 22.050.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 25.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 200.019.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | 220.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | - | | | 28 Unit | 112.297.562 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 170.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 28 Unit | 112.297.562 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 170.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | - | | | 4 Laporan<br>12 Laporan | 1.895.809.349 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 530.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 488.110.949 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 515.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.407.698.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 15.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | - | | | 1 Unit<br>7 Unit<br>32 Unit | 478.069.500 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | - | 550.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 285.330.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 300.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 149.978.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 205.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 32 Unit | 42.761.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | - | | | 45.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | **338.069.144** | | | | | | | - | **380.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ]** | **Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan** | **80** | **49.26** | **55** | **60** | **338.069.144** | - | - | - | | - | - | - | **380.000.000** | - |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | *Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik*<br>*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | - | | | 1 Laporan<br>20 Dokumen | 45.077.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pelaku Usaha dan ASN | - | 50.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 20 Dokumen | 13.965.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pelaku Usaha dan ASN | | 25.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | | | | | |
| | 3.30.02.2.01.0002 | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik* | | | | 1 laporan | 31.112.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa<br>Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pelaku Usaha dan ASN | | 25.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | - | | | 16 Dokumen | 13.965.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pelaku Usaha dan ASN | - | 20.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | | | | 16 Dokumen | 13.965.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pelaku Usaha dan ASN | | 20.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | | | | | |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)* | - | | | 2 Laporan | 279.027.144 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, UMKM, dan Masyarakat | - | 310.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi , Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)* | | | | 2 Laporan | 279.027.144 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, UMKM, dan Masyarakat | | 310.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3, | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | **7.543.837.977** | | | | | | | - | **110.000.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ]** | **Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya** | **12.1** | **9.45** | **10.8** | **10.8** | **7.543.837.977** | - | - | - | | - | - | - | **110.000.000.000** | - |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | - | | | 3 Unit | 7.543.837.977 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Masyarakat, ASN dan UMKM | - | 110.000.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMAJUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 3 Unit | 7.543.837.977 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Loka Jaya Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA USAHA, RETRIBUSI JASA UMUM, DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Masyarakat, ASN dan UMKM | | 110.000.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Jasa Penilai Publik (KJPP) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pematangan Lahan Pasar Randik Kecamatan Sekayu | | | | | 296.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh | | | | | 2.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pematangan Lahan Pasar Randik Kecamatan Sekayu | | | | | 2.960.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pematangan Lahan Pasar Randik Kecamatan Sekayu | | | | | 177.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Berat Pasar Desa Loka Jaya Kecamatan Keluang | | | | | 1.251.248.272 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Pasar Desa Loka Jaya Kecamatan Keluang | | | | | 85.441.523 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Pasar Desa Loka Jaya Kecamatan Keluang | | | | | 143.841.182 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Los Pasar Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 234.375.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 42.187.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Los Pasar Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya | | | | | 23.437.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan Pasar Sungai Lilin | | | | | 91.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan Pasar Bayung Lencir | | | | | 91.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 35.887.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 11.820.000 | | | | | | | | | |
| 4, | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | **754.012.000** | | | | | | | - | **1.245.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ]** | **Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting** | **99.11** | **98.84** | **98.89** | **98.94** | **754.012.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.245.000.000** | - |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | - | | | 12 Laporan | 36.021.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN dan UMKM | - | 40.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | 12 Laporan | 36.021.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN dan UMKM | | 40.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | - | | | 21 Laporan<br>12 Laporan | 688.447.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Masyarakat, UMKM dan Non ASN | - | 1.155.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 38.064.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Masyarakat, UMKM dan Non ASN | | 55.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 21 Laporan | 650.383.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, Masyarakat, UMKM dan Non ASN | | 1.100.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | - | | | 2 Laporan | 29.544.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Masyarakat (Petani) dan ASN | - | 50.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | | | | 2 Laporan | 29.544.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Masyarakat (Petani) dan ASN | | 50.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | **2.905.753.316** | | | | | | | | **4.610.346.795** | |
| | | **[ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ]** | **Persentase pertumbuhan volume penjualan produk lokal berorientasi ekspor** | **4.25** | **-** | **3** | **3.25** | **2.905.753.316** | - | - | - | - | - | - | - | **4.610.346.795** | - |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan*<br>*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*<br>*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | - | | | 2 Pelaku Usaha<br>12 Pelaku Usaha<br>275 Pelaku Usaha | 2.905.753.316 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM, ASN, UMKM, dan Industri Menengah | - | 4.610.346.795 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 12 Pelaku Usaha | 625.295.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM, ASN, UMKM, dan Industri Menengah | | 700.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | Jasa Pembuatan Stand/Booth Dekor Nasional | | | | | 179.820.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Pembuatan Stand/Booth Dekor Regional | | | | | 34.965.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 2.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | | | | | 900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 3.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | 205.350.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 185.510.000 | | | | | | | | | |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | | | | 275 Pelaku Usaha | 2.245.661.316 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM, ASN, UMKM, dan Industri Menengah | | 3.850.346.795 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | Jasa Pembuatan Dekorasi Stand/Booth Dagperin Muba Expo | | | | | 63.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Kontribusi Fashion Show Kriya Sriwijaya (Regional) | | | | | 23.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Dekor Pameran Kriya Sriwijaya 2026 | | | | | 34.965.000 | | | | | | | | | |
| | | | Jasa Penyelenggaraan Muba Expo 2026 | | | | | 1.670.831.750 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 103.452.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 48.357.066 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 34.465.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 5.880.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 92.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 3.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 39.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 15.750.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | | | | | 1.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 4.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 54.930.000 | | | | | | | | | |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan* | | | | 2 Pelaku Usaha | 34.797.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM, ASN, UMKM, dan Industri Menengah | | 60.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 6, | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | **269.536.200** | | | | | | | - | **400.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ]** | **Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku** | **56.02** | **26.02** | **31.02** | **36.02** | **269.536.200** | - | - | - | - | - | - | - | **400.000.000** | - |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | - | | | 2000 Unit<br>400 Orang | 269.536.200 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pedagang dan ASN | - | 400.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 2000 Unit | 217.038.895 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pedagang dan ASN | | 250.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | Belanja Peralatan Komunikasi | | | | | 11.585.100 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.618.045 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | 7.285.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 46.077.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 131.740.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | | | | | 7.233.750 | | | | | | | | | |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 400 Orang | 52.497.305 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | Pedagang dan ASN | | 150.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 7. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | **311.216.570** | | | | | | | - | **250.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ]** | **Persentase Pertumbuhan UMKM/IKM yang memasarkan produk melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi** | **4.25** | **2.50** | **3** | **3.25** | **311.216.570** | - | - | - | - | - | - | - | **250.000.000** | - |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | - | | | 4 UMKM | 311.216.570 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM, UMKM, dan ASN | - | 250.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 4 UMKM | 311.216.570 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM, UMKM, dan ASN | | 250.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | Penyelenggara Promosi Produk di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II | | | | | 203.786.570 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 15.315.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 1.470.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 1.380.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 14.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 74.965.000 | | | | | | | | | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **1.117.376.455** | | | | | | | | **1.405.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | **903.465.455** | | | | | | | - | **1.000.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ]** | **Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan** | **4.75** | **-** | **3.5** | **3.75** | **903.465.455** | - | - | - | | - | - | - | **1.000.000.000** | - |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*<br>*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | - | | | 100 Dokumen<br>33 Dokumen | 903.465.455 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, UMKM dan IKM | - | 1.000.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 100 Dokumen | 736.314.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, UMKM dan IKM | | 750.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 33 Dokumen | 167.151.455 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | ASN, UMKM dan IKM | | 250.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | **213.911.000** | | | | | | | - | **405.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya pemanfaatan informasi industri ]** | **Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini** | **90** | **50** | **60** | **70** | **213.911.000** | - | - | - | | - | - | - | **405.000.000** | - |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*<br>*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | - | | | 1 Dokumen<br>22 Dokumen | 213.911.000 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM dan ASN | - | 405.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 1 Dokumen | 91.759.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM dan ASN | | 255.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | | | | | | |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 22 Dokumen | 122.152.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat | Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar | IKM dan ASN | | 150.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **133.359.366.146** | | | | | | | | **148.813.388.157** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **133.359.366.146** | | | | | | | | **148.813.388.157** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **133.359.366.146** | | | | | | | | **148.813.388.157** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **105.466.921.525** | | | | | | | - | **123.454.389.367** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat Daerah ]** | **Indeks Reformasi Birokrasi<br>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah<br>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel<br>Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah<br>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu<br>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran<br>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik<br>Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah<br>Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah<br>Persentase tersusunnya dokumen ketatalaksanaan yang berkualitas<br>Persentase tersusunnya laporan Evaluasi Pelayanan Publik** | **100<br>75.59<br>80.00** | **100<br>73.49<br>79.10** | **100<br>73.69<br>79.25** | **100<br>74.02<br>79.50** | **105.466.921.525** | - | - | - | - | - | - | - | **123.454.389.367** | - |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 180.943.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 350.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 89.873.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 200.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 100.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 16.070.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 50.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>12 Bulan | 40.051.720.421 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 38.000.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 370<br>Orang/bulan | 40.051.720.421 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 38.000.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>21 Laporan | 628.603.322 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 849.969.992 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 132<br>Dokumen | 598.832.742 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 599.969.992 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 29.770.580 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 250.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 300 Orang<br>100 % | 916.365.180 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 2.453.526.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 12 Paket | 454.195.180 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 553.526.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 129 Orang | 462.170.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 1.900.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu* | - | | | 26 Paket<br>100 %<br>20 Laporan | 13.957.438.587 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 22.703.570.573 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 537.958.170 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 349.888.373 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 1.944.937.573 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 3.166.559.449 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 499.824.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 1.800.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 711.620.135 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 1.468.546.706 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 506.810.209 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 989.381.045 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 100.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 45.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 5.805.768.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 8.300.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 3.809.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 6.484.195.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*<br>*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 5.599.688.935 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 6.844.189.051 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 4.884.440.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 6.092.906.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Operasionel Kantor dan/ atau Lapangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 70.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Bagian Umum | | | | | 2.244.240.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Kendaraan Berpenumpang SUV Bagian Umum | | | | | 1.300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Mobil Desa Siaga Desa Air Putih Ulu | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Mobil Desa Beji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya dan Kec. Bayung Lencir | | | | | 320.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Mobil Operasional Yayasan Al Muwahid Desa Tebing Bulang KEc. Sungai Keruh | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Mobil Operasional untuk Yayasan Muhajirin Desa Sungai Medak | | | | | 250.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Mobil untuk Organisasi PAKOI Kec. Bayung Lencir | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 715.248.935 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 751.283.051 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 %<br>12 Bulan | 14.439.498.355 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 16.341.707.880 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 5.225.235.155 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 4.537.931.880 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 9.214.263.200 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 11.803.776.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*<br>*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 90 %<br>100 % | 12.253.295.800 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 13.241.293.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 130 Unit | 5.709.538.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 6.048.460.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMUDIAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 4.663.483.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 4.663.483.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas KDH dan Sarana Penunjangnya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas WKDH dan Sarana Penunjangnya | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas Sekda dan Sarana Penunjangnya | | | | | 25.067.000 | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan Sarana Penunjangnya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas KDH dan Sarana Penunjangnya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas WKDH dan Sarana Penunjangnya | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas Sekda dan Sarana Penunjangnya | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan Sarana Penunjangnya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor Setda - Pagar, Halaman dan Tiang Bendera | | | | | 100.842.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Mess Jakarta dan sarana penunjang lainnya - Mess Jakarta dan Sarana Penunjangnya | | | | | 199.906.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Kantor Perwakilan Pemkab Muba Palembang dan Sarana Penunjangnya - Kantor Perwakilan Pemkab Muba Palembang dan Sarana Penunjangnya | | | | | 199.906.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Rumah Dinas | | | | | 199.185.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas WKDH - Rumah Dinas | | | | | 199.038.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas Sekda - Rumah Dinas | | | | | 149.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas WKDH - Guest House | | | | | 102.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Guest House | | | | | 199.470.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Mess Ajudan | | | | | 152.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Mess Karyawan | | | | | 109.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Kandang Hewan Depan dan Belakang | | | | | 105.399.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Tiang Bendera | | | | | 25.137.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Pendopoan dan Selasar | | | | | 160.377.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Kanstin | | | | | 199.038.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Garasi Bus | | | | | 149.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas KDH - Pagar dan Tembok | | | | | 199.038.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas WKDH - Pendopoan | | | | | 149.940.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas WKDH - Pagar, Halaman, dan Sarana & Prasarana lainnya | | | | | 199.038.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas Sekda - Pagar, Halaman, dan Sarana & Prasarana lainnya | | | | | 49.980.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Gedung 1 | | | | | 199.906.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Gedung 2 | | | | | 100.062.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Gedung 3 | | | | | 151.510.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Gedung 6 | | | | | 102.900.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Gedung 7 | | | | | 151.510.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Gedung 16 | | | | | 50.715.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Op Room | | | | | 175.665.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Rumah Dinas WKDH - Pos Jaga Pol PP | | | | | 50.127.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah - Pos Jaga Pol PP | | | | | 50.715.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 54.042.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 151.510.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 4.080.000 | | | | | | | | | |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 558 Unit | 1.880.274.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 2.529.350.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | - | | | 100 % 12 Bulan | 1.564.188.640 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 1.458.600.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 357.788.640 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 350.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 597.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 500.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang | 8.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 8.600.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 600.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 600.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah* | - | | | 12 Bulan 4 Paket | 9.025.015.593 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 10.850.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.224.999.126 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 6.000.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.325.000.579 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 2.500.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.475.015.888 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 2.350.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah*<br>*Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>B Predikat | 1.766.742.626 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 3.270.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 475.100.072 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 900.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 2 Laporan | 449.927.010 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 750.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 4 Dokumen | 634.270.144 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 1.235.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 5 Dokumen | 207.445.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 385.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan* | - | | | 100 %<br>100 % | 5.083.421.067 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 7.091.532.871 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 25 Laporan | 2.425.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 3.500.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 2.432.343.220 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 3.266.532.871 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 3 Laporan | 226.077.847 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 325.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **25.394.520.066** | | | | | | | - | **20.986.972.900** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah ]** | **Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**<br>**Persentase batas wilayah daerah bermasalah yang terfasilitasi**<br>**Persentase kesepakatan kerjasama dalam negeri yang aktif diimplementasikan**<br>**Persentase perkara yang difasilitasi bantuan hukum**<br>**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan** | **100**<br>**3.04** | **- 100**<br>**91.38** | **100**<br>**3.01** | **100**<br>**3.01** | **25.394.520.066** | - | - | - | | - | - | - | **20.986.972.900** | - |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan*<br>*Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan* | - | | | 100 %<br>25 Dokumen | 1.400.368.692 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 2.884.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 2 Dokumen | 1.119.107.692 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 319.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 2 Dokumen | 150.572.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 315.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 3 Dokumen | 130.689.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 2.250.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu*<br>*Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten*<br>*Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten* | - | | | 200 Pasang<br>100 %<br>845 Orang | 22.733.341.368 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 15.173.972.900 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 40 Dokumen | 19.992.014.668 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 11.280.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Biaya Haji) | | | | | 315.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Biaya Umroh) | | | | | 7.140.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang Ke Masjid di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 1.550.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang Ke Masjid di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang Ke Masjid di Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang Ke Masjid di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang Ke Masjid di Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Hibah Uang Ke Masjid di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 1.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Uang Kepada Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Uang Kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Musi Banyuasin Bagian Kesra | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 83.633.668 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 104.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 39.356.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 2.063.254.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 90.450.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 256.028.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | 17.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 24.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Pendingin | | | | | 8.450.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | 143.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 18.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Taman | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Hotel | | | | | 1.451.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 727.068.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 215.855.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 360.000.000 | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 17 Dokumen | 57.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 410.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 60 Dokumen | 2.683.526.700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 3.483.972.900 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum* | - | | | 100 % 957 Dokumen | 816.410.346 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 2.154.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 665 Dokumen | 162.921.277 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 540.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 177 Kasus | 577.712.446 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 1.600.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 1745 Dokumen | 75.776.623 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 14.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Terfasilitasinya Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Terfasilitasinya Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri* | - | | | 100 % 14 Dokumen | 444.399.660 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 775.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 5 Dokumen | 183.455.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 350.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Belanja IURAN APKASI pada Bagian Kerja Sama | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.993.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 55.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 90.762.000 | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 221.362.960 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 350.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Belanja IURAN Keanggotaan UCLG ASPAC pada Bagian Kerja Sama | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.993.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 14.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 32.660.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri | | | | | 117.309.960 | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* | | | | 6 Laporan | 39.581.700 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 75.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **2.497.924.555** | | | | | | | - | **4.372.025.890** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan ]** | **Indeks Perkembangan Harga**<br>**Persentase BUMD/BLUD berpredikat sehat**<br>**Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**<br>**Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik**<br>**Persentase Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga yang Terpasang** | **100**<br>**1.50**<br>**95** | **100**<br>**1.59**<br>**66.66**<br>**86** | **100**<br>**2.50**<br>**66.66**<br>**88.75** | **100**<br>**2.50**<br>**66.66**<br>**89** | **2.497.924.555** | - | - | - | - | - | - | - | **4.372.025.890** | - |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Monitoring BLUD dan BUMD*<br>*Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Monitoring BLUD dan BUMD*<br>*Terlaksananya Kebijakan Perekonomian* | - | | | 9 Dokumen<br>100 %<br>100 % | 322.408.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 650.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 4 Dokumen | 120.464.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 250.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 4 Laporan | 100.844.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 200.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 4 Dokumen | 101.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 200.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Terlaksananya Administrasi Pembangunan*<br>*Terlaksananya Administrasi Pembangunan Perangkat Daerah*<br>*Terlaksananya Administrasi Pembangunan Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 %<br>31 Dokumen | 641.448.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 1.400.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 390.548.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 800.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 1 Laporan | 188.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 410.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 2 Laporan | 62.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 190.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa*<br>*Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*<br>*Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | - | | | 100 %<br>100 %<br>2156<br>Dokumen | 709.898.555 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 1.412.025.890 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 435<br>Dokumen | 366.497.055 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 818.653.440 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 12 Dokumen | 188.240.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 365.296.250 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Orang | 155.161.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 228.076.200 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | *Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*<br>*Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*<br>*Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam* | - | | | 100 %<br>12 Dokumen<br>100 % | 824.170.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | - | 910.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 2 Dokumen | 49.952.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 60.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 2 Dokumen | 499.874.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 500.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Belanja Iuran Anggota Asosiasi Daerah Penghasil Migas ( ADPM) | | | | | 304.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 27.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 159.629.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.245.000 | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* | | | | 2 Dokumen | 274.344.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUBA | | 350.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **100.380.836.080** | | | | | | | | **143.677.832.917** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **100.380.836.080** | | | | | | | | **143.677.832.917** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **100.380.836.080** | | | | | | | | **143.677.832.917** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **68.391.984.985** | | | | | | | - | **89.563.606.761** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat DPRD ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **90** | **80** | **80** | **80** | **68.391.984.985** | - | - | - | - | - | - | - | **89.563.606.761** | - |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 95 %<br>95 % | 87.900.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 110.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 32.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 60.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 19.308.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 30.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 36.392.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 20.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 95 %<br>95 % | 13.431.444.835 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 15.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 103 Orang/bulan | 13.431.444.835 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 15.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah*<br>*Persentase Pemenuhan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah* | - | | | 95 %<br>95 % | 358.375.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 385.397.529 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 37 Dokumen | 358.375.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 385.397.529 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu* | - | | | 95 %<br>95 % | 384.754.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 100.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 110.514.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 274.240.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 8 Orang | 0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran* | - | | | 95 %<br>95 % | 7.424.201.454 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 14.999.308.987 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 98.089.035 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 241.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 260.166.920 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 1.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 129.855.928 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 1.100.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 249.783.411 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 239.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 201.910.160 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 361.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 45.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 399.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 2.013.308.987 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 47 Laporan | 6.044.796.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 10.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah*<br>*Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 95 %<br>95 % | 100.580.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.150.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 0 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 100.580.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.150.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 95 %<br>95 % | 5.224.434.800 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 6.240.822.222 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 992.962.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.730.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 4.231.472.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 4.510.822.222 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 95 %<br>95 % | 3.185.854.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 3.649.005.992 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 224.050.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 405.168.750 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 25 Unit | 473.040.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.002.410.640 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 14 Unit | 2.343.149.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | Rehab Ruang Kerja Ketua DPRD | | | | | 700.930.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRD | | | | | 350.465.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Ruang Kerja Wakil Ketua II DPRD | | | | | 350.465.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Ruang Kerja Wakil Ketua III DPRD | | | | | 350.465.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Sekretariat | | | | | 246.534.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 321.260.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 19.950.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 2.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 137 Unit | 145.615.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 241.426.602 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | - | | | 95 %<br>95 % | 27.846.778.398 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 29.429.072.031 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 45<br>Orang/Bulan | 26.553.028.398 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 28.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 1.113.750.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.159.072.031 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 45 Orang | 180.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 270.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD* | - | | | 95 % | 10.347.662.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 17.500.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 11 Laporan | 7.827.662.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 14.500.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 2.520.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | **31.988.851.095** | | | | | | | - | **54.114.226.156** | |
| | | **[ 1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan ]** | **Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **90** | **80** | **80** | **80** | **31.988.851.095** | - | - | - | - | - | - | - | **54.114.226.156** | - |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD* | - | | | 95 % 95 % | 2.531.259.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 5.170.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 2.220.851.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 4.600.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 2 Dokumen | 310.408.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 570.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran* | - | | | 95 % 95 % | 7.827.270.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 14.830.500.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1.839.190.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.400.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1.839.190.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.400.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1.154.850.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.315.250.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 1.154.850.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.315.250.000 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1.839.190.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.400.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah* | - | | | 95 %<br>95 % | 1.839.190.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 3.400.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1.839.190.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.400.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD* | - | | | 95 % | 3.795.877.410 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 5.100.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 3 Dokumen | 1.700.526.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.800.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 10 Orang | 720.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 720.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 8 Orang | 420.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 480.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 7 Dokumen | 955.351.410 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.100.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | - | | | 95 % | 3.474.132.685 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 4.063.726.156 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 12 Laporan | 260.125.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 265.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 3 Dokumen | 3.214.007.685 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.798.726.156 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | *Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah* | - | | | 95 % | 1.501.600.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.050.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun* | | | | 12 Dokumen | 1.501.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 2.050.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | - | - | | | - | 11.019.522.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | - | 19.500.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 12 Dokumen | 5.440.618.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 12.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 12 Dokumen | 5.578.904.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin | | 7.500.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **29.014.921.074** | | | | | | | | **28.738.070.750** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **29.014.921.074** | | | | | | | | **28.738.070.750** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **26.077.141.613** | | | | | | | | **25.899.446.491** | |
| 1, | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **21.287.629.395** | | | | | | | **100 %** | **19.932.276.860** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**79.80** | **100**<br>**78.50** | **100**<br>**79.30** | **100**<br>**79.40** | **21.136.786.584** | - | - | - | - | - | - | - | **19.932.276.860** | - |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 100 % | | | 3 Dokumen<br>3 Laporan | 73.399.970 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Perencana dan Pelaporan | 0 % | 98.464.600 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 56.311.850 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Perencana dan Pelaporan | | 80.782.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 17.088.120 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Perencana dan Pelaporan | | 17.682.600 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN* | 100 % | | | 126 Orang | 16.042.730.791 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 13.837.312.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 126 Orang/bulan | 16.042.730.791 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 13.837.312.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah* | 100 % | | | 1 Dokumen | 91.012.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 95.264.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 91.012.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 95.264.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 100 % | | | 1 Paket<br>14 Orang | 349.786.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 352.660.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 127.620.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 122.660.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 13 Orang | 222.166.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 230.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*<br>*Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*<br>*Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan* | 100 % | | | 1 Laporan<br>3 Laporan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1.382.871.607 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 1.136.306.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.984.794 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 30.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 359.551.485 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 59.995.556 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 60.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 249.983.167 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 250.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 209.990.605 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 210.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERJANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 40.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 40.128.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 11.306.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 393.238.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 335.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah paket Mebel yang disediakan*<br>*Jumlah Unit gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan*<br>*Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan* | 100 % | | | 1 Paket<br>1 Unit<br>4 Unit | 2.043.934.368 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 2.057.922.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 1.957.992.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 1.957.922.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 | | | | | 1.953.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 3.712.000 | | | | | | | | | |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 85.942.368 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* | 100 % | | | 3 Laporan<br>1 Laporan | 585.734.660 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 1.635.508.260 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 434.828.260 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 435.508.260 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 150.906.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 1.200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi* | 100 % | | | 1 Unit<br>11 Unit<br>41 Unit | 718.160.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | 0 % | 718.840.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 444.250.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 444.930.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 199.060.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 199.060.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 41 Unit | 74.850.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Bappeda Kab. Muba | | 74.850.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **2.038.285.218** | | | | | | | **100 %** | **2.603.216.381** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ]** | **Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD**<br>**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.038.285.218** | - | - | - | - | - | - | - | **2.603.216.381** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara*<br>*Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br>*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)* | 100 % | | | 48 Berita Acara<br>1 Berita Acara<br>48 Berita Acara<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.439.524.600 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 1.827.160.492 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* | 4 Dokumen | | | 5 Dokumen | 533.838.600 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 Dokumen | 550.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | 48 Berita Acara | | | 96 Berita Acara | 574.130.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 Berita Acara | 300.234.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | 2 Dokumen | | | 4 Dokumen | 331.556.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 Dokumen | 976.926.492 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan*<br>*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*<br>*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | 80 % | | | 1 Buku<br>1 Dokumen<br>10 Orang | 65.342.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 66.528.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 10 Orang | 65.342.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 66.528.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*<br>*Tersedianya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | 90 % | | | 90 %<br>100 % | 440.479.155 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 612.042.750 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 2 Laporan | 154.899.738 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 212.980.894 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | Penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 52.276.590 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.780.148 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 54.720.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 32.188.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 7.335.000 | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 6 Laporan | 285.579.417 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 399.061.856 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | Pemeliharaan SIPP | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 26.556.417 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.850.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Lembur | | | | | 28.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 171.413.000 | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah* | 100 % | | | 3 Dokumen | 92.939.462 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 97.485.139 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 92.939.462 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 Dokumen | 97.485.139 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **2.751.227.000** | | | | | | | **100 %** | **3.363.953.250** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA ]** | **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.751.227.000** | - | - | - | - | - | - | - | **3.363.953.250** | - |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | 100 % | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 1.067.480.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru<br><br>Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 1.068.953.250 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 209.401.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 210.056.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 149.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 149.987.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 299.641.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 300.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 408.758.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 408.910.250 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*<br>*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*<br>*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*<br>*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*<br>*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*<br>*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | 100 % | | | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 596.320.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 625.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 182.684.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 87.240.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 75.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 4 Dokumen | 235.156.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 4 Laporan | 91.240.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*<br>*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*<br>*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* | 100 % | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>100 %<br>100 % | 1.087.427.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | 0 % | 1.670.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | | | | | |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 231.987.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 270.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Konstribusi Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 19.656.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 21.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 152.291.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 28.440.000 | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 77.955.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi RenstraRenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 155.269.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 426.146.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 600.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta Tematik 1 50.000 | | | | | 48.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 53.424.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 106.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 158.222.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 60.300.000 | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi RenstraRenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 196.070.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | SKPD Kab. Musi Banyuasin | | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Iuran LTKL | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 22.680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 100.050.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 23.340.000 | | | | | | | | | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **2.937.779.461** | | | | | | | | **3.438.624.259** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | **1.794.888.416** | | | | | | | **90 %** | **2.145.732.259** | |
| | | **[ 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah ]** | **Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**<br>**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**<br>**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**<br>**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan** | **90** | **90** | **90** | **90** | **1.794.888.416** | - | - | - | - | - | - | - | **2.145.732.259** | - |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengambangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, reformasi Birokrasi* | 100 % | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 773.999.214 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | 0 % | 724.450.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Laporan | 249.999.891 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 250.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0011 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa* | | | | 1 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 150.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan* | | | | 1 Laporan | 523.999.322 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 324.450.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | *Jumlah dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | 100 % | | | 1 Dokumen | 571.204.935 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | 0 % | 271.282.259 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | | | | 1 Dokumen | 271.281.935 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 271.282.259 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja* | | | | 1 Dokumen | 299.923.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 300.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | *Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* | 100 % | | | 1 Dokumen | 299.684.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | 0 % | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 99.922.500 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan* | | | | 1 Dokumen | 99.897.750 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum* | | | | 1 Dokumen | 99.864.250 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi*<br>*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak kekayaan Intelektual* | 100 % | | | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 149.999.767 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | 0 % | 350.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 1 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 200.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 1 Laporan | 149.999.767 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 150.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | **1.142.891.045** | | | | | | | - | **1.292.892.000** | |
| | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | *Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan* | - | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 749.999.178 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | - | 750.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset* | | | | 1 Naskah | 299.999.733 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 350.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.01.0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | | | | 1 Laporan | 199.999.754 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 250.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | | | | 1 Laporan | 249.999.691 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 150.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | *Jumlah Dokumen Hasil Invensi dan Inovasi Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian Kebijakan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Laporan pemantauan dan Evaluasi invensi dan inovasi* | - | | | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 392.891.867 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | - | 542.892.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.02.0012 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi* | | | | 1 Laporan | 392.891.867 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 392.892.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.02.0016 | Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi* | | | | 1 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Stakeholder | | 150.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | **612.995.072.006** | | | | | | | | **608.317.342.526** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **612.995.072.006** | | | | | | | | **608.317.342.526** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **612.995.072.006** | | | | | | | | **608.317.342.526** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **18.402.738.006** | | | | | | | - | **18.553.508.526** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**80.01** | **100**<br>**78.50** | **100**<br>**78.70** | **100**<br>**78.95** | **18.402.738.006** | - | - | - | | - | - | - | **18.553.508.526** | - |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 95.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 95.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 30 Data | 35.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 35.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 69 Orang | 14.975.493.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 15.000.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 125 Orang/bulan | 14.975.493.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 15.000.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | - | | | 1 Dokumen | 124.707.640 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 136.691.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 124.707.640 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 136.691.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | - | | | 2 Paket<br>15 Orang | 272.932.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 195.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 122.930.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 75.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 12 Orang | 150.002.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 120.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | - | | | 1 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>3 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket | 1.227.713.200 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.175.421.366 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 200.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 345.421.366 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 345.421.366 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 175.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 286.611.834 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | - | | | 1 Paket | 120.160.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 125.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 20.160.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | Sewa Kendaraan Roda Empat | | | | | 19.480.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 100.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,- | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 0 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | - | | | 12 Laporan<br>12 Laporan | 803.944.410 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 803.944.410 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 445.444.410 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 445.444.410 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 358.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 358.500.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*<br>*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | - | | | 1 Paket<br>11<br>Kendaraan<br>1 Kendaraan<br>75 Paket | 782.786.756 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.022.451.750 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 45.490.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 45.490.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 439.540.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 439.540.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 199.863.999 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 439.528.990 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 71 Unit | 97.892.760 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 97.892.760 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | **592.654.334.000** | | | | | | | - | **587.825.834.000** | |
| | | **[ 1) Meningkatnya tata kelola anggaran 2) Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3) Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan ]** | **Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**<br>**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**<br>**Persentase laporan keuangan tepat waktu**<br>**Persentase Penurunan SILPA**<br>**Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar** | **100**<br>**30**<br>**40.75**<br>**90**<br>**96** | **100**<br>**30**<br>**41.04**<br>**58.13**<br>**77.62** | **100**<br>**30**<br>**40.47**<br>**65**<br>**91.63** | **100**<br>**30**<br>**40.50**<br>**70**<br>**92** | **592.654.334.000** | - | - | - | - | - | - | - | **587.825.834.000** | - |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*<br>*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*<br>*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*<br>*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*<br>*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perjabaran perubahan APBD* | - | | | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen | 1.000.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | - | 1.045.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 120.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 120.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 120.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 120.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 300.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 285.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 285.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 175.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 220.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*<br>*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | - | | | 7 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.300.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | - | 341.500.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 7 Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 133.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 2 Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 110.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 5 Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 98.500.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas* | | | | 5 Dokumen | 5.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 0 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | Pembayaran Hutang BPJS ASN (2020-2024) | | | | | 5.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*<br>*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | - | | | 32 BLUD<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>24 Laporan<br>2 Dokumen<br>14 Laporan<br>144 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Sistem | 1.100.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | - | 1.185.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 24 Laporan | 71.574.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 71.574.200 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 2 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 0 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 14 Laporan | 170.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 170.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 2 Laporan | 140.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 140.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 170.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 170.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | | | | 2 Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 100.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 90.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 175.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 100.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 144 Orang | 125.925.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 125.925.800 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* | | | | 33 Lembaga | 132.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 132.500.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KEADAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah*<br>*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*<br>*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | - | | | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 584.804.334.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Desa/Kelurahan pada Pemkab Muba dan SKPD Terkait | - | 584.804.334.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Desa/Kelurahan pada Pemkab Muba dan SKPD Terkait | | 100.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 1 Laporan | 579.704.334.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA DESA, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Desa/Kelurahan pada Pemkab Muba dan SKPD Terkait | | 579.704.334.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADDK)/APBD | | | | | 353.900.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Dana Desa APBN | | | | | 225.564.334.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 7.667.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 33.579.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 21.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 13.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 34.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 69.374.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 58.240.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 5.000.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Desa/Kelurahan pada Pemkab Muba dan SKPD Terkait | | 5.000.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | Belanja Tidak Terduga | | | | | 5.000.000.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen<br>144 Orang | 450.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | - | 450.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 300.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 144 Orang | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 150.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | **1.938.000.000** | | | | | | | - | **1.938.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola aset daerah ]** | **Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap** | **10.80** | **10.20** | **10.30** | **10.40** | **1.938.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | **1.938.000.000** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*<br>*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah.*<br>*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*<br>*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Standar Harga yang Disusun* | - | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>80 Orang<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.938.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | - | 1.938.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | | | | | |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 206.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 206.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Data Base Standar Hartga | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 45.756.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 53.264.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 0 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 172.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 172.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Data Base RKBMD | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 44.484.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 20.536.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 110.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 110.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 205.937.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 205.937.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 108.248.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 108.248.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 269.700.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 269.700.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 148.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 148.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 90.260.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 90.260.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 211.899.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 211.899.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 79.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 79.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 2 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 200.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 80 Orang | 136.956.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh SKPD | | 136.956.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH** | | | | | | **46.271.011.924** | | | | | | | | **50.260.000.000** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **46.271.011.924** | | | | | | | | **50.260.000.000** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **46.271.011.924** | | | | | | | | **50.260.000.000** | |
| 1, | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **39.867.639.924** | | | | | | | - | **43.675.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Pendapatan Daerah) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **-100** | **- 65.50**<br>**80.45**<br>**80.85**<br>**80.95** | **-100** | **-100** | **39.867.639.924** | - | - | - | - | - | - | - | **43.675.000.000** | - |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat*<br>*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 44.680.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 90.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 19.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | | 35.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 9.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | | 15.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 3 Data | 16.280.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | | 40.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 36.139.445.150 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 40.000.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 160 Orang/bulan | 36.139.445.150 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | | 40.000.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 135.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 145.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 135.000.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | | 145.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 341.112.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 310.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 253.822.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 210.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 12 Orang | 87.290.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 100.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 1.400.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.230.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 450.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 210.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 320.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 350.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 14 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 55 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 220.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*<br>*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 100.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 150.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 150.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 627.881.244 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 655.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 425.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 450.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 202.881.244 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 205.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*<br>*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 1.079.521.530 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.095.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 100.620.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 105.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 612.380.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 620.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 316.542.030 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 320.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 40 Unit | 49.979.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **6.403.372.000** | | | | | | | - | **6.585.000.000** | |
| | | **[ 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital ]** | **Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **14.05** | **10.57** | **12.23** | **12.53** | **6.403.372.000** | - | - | - | | | - | - | **6.585.000.000** | - |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 6.403.372.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | - | 6.585.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 2 Dokumen | 500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 510.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 8 Dokumen | 327.500.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 370.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 2 Laporan | 509.944.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 470.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 22 Unit | 129.968.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 135.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | | Belanja Alat Komputer | | | | | 72.834.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 114.350 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 17.267.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.316.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 31.436.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 3 Laporan | 776.768.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 910.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 4 Laporan | 296.322.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 310.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | | Belanja Konsultasi Pembuatan Perangkat Lunak/Sofware Komputer (Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)) | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Konsultasi Pembuatan Perangkat Lunak/Sofware Komputer (Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPATDA) | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 152.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.394.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 450.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 143.326.000 | | | | | | | | | |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 270000 Obyek Pajak | 378.121.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 400.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 270000 Dokumen | 845.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 850.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 11 Layanan | 499.786.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 500.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 90 Dokumen | 580.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 590.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 250 Dokumen | 495.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 410.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | | | | 20 Dokumen | 427.263.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 430.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 2 Dokumen | 427.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 430.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 4 Laporan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 150.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 3 Laporan | 110.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat, Wajib Pajak | | 120.000.000 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM** | | | | | | **23.198.478.943** | | | | | | | | **26.374.311.300** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **23.198.478.943** | | | | | | | | **26.374.311.300** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **23.198.478.943** | | | | | | | | **26.374.311.300** | |
| 1, | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **14.362.519.559** | | | | | | | - | **15.909.311.300** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**83.00** | **100**<br>**77.78** | **100**<br>**78.00** | **100**<br>**79.00** | **14.362.519.559** | - | - | - | - | - | - | - | **15.909.311.300** | - |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja* | - | | | 100 % | 39.556.300 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Musi Banyuasin | - | 45.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 13.276.300 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Musi Banyuasin | | 20.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 9.690.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Musi Banyuasin | | 10.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 16.590.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Musi Banyuasin | | 15.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.133.938.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 12.000.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 84 Orang/bulan | 12.133.938.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 12.000.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersediannya jaminan barang milik daerah* | - | | | 100 % | 46.282.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 46.282.500 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 46.282.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 46.282.500 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Kepegawaian* | - | | | 100 % | 213.342.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 640.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 113.150.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 190.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 100.192.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 450.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 959.909.650 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.735.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.009.792 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 80.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 199.838.309 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.003.159 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 90.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 250.011.405 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 350.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 130.046.985 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 45.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 70.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 450.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah* | - | | | 100 % | 99.649.709 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 99.649.709 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 519.551.400 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 688.028.800 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 192.329.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 327.222.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 438.028.800 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah* | - | | | 100 % | 350.290.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | - | 355.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 281.330.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.660.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 25.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 30 Unit | 18.300.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin | | 30.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | **8.835.959.384** | | | | | | | - | **10.465.000.000** | |
| | | **[ 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN ]** | **Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya**<br>**Persentase capaian kinerja ASN**<br>**Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN**<br>**Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi**<br>**persentase pengisian ASN berdasarkan formasi Kebutuhan**<br>**Terisinya jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi dan jabatan fungsional** | **0.34**<br>**75**<br>**85**<br>**90**<br>**95** | **0.40**<br>**60**<br>**70**<br>**75**<br>**83**<br>**88** | **0.38**<br>**62.5**<br>**73**<br>**78**<br>**85**<br>**90** | **0.38**<br>**65**<br>**75**<br>**79**<br>**85**<br>**91** | **8.835.959.384** | - | - | - | | - | - | - | **10.465.000.000** | - |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian* | - | | | 100 % | 757.243.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.125.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | | | | 3 Dokumen | 406.858.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 700.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN* | | | | 2 Laporan | 137.599.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 5 Dokumen | 50.782.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 3 Lembaga | 87.632.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 74.372.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 75.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN* | - | | | 100 % | 910.803.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.150.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 3 Dokumen | 228.314.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 6 Dokumen | 284.758.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 4 Dokumen | 397.731.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 450.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEDUA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN* | - | | | 100 % | 6.423.608.384 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | - | 7.100.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 120 Orang | 1.051.611.526 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.300.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | | | Belanja Kontribusi Assesment Centre Seleksi JPT | | | | | 495.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.463.526 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 139.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 36.850.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 351.398.000 | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 22 Orang | 1.619.847.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.800.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | | | Beasiswa S2/Dokter Spesialis | | | | | 982.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Beasiswa S3 | | | | | 126.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pola Pembibitan PKN STAN | | | | | 379.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.520.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 126.587.000 | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat* | | | | 3 Dokumen | 2.454.375.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 3.500.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | | | Kontribusi Orientasi PPPK | | | | | 2.046.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.260.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 13.960.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 14.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 150.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 213.975.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.780.000 | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan* | | | | 65 Orang | 1.113.483.880 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional* | | | | 2 Dokumen | 184.290.578 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN* | - | | | 100 % | 744.305.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.090.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Dokumen | 134.255.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* | | | | 300 Orang | 88.742.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 100.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 200 Orang | 197.009.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 325.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 53 Laporan | 124.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 180.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 20 Dokumen | 54.230.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 35.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | 5.03.02.2.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN* | | | | 1 Laporan | 145.119.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | **42.099.576.171** | | | | | | | | **44.776.000.000** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **42.099.576.171** | | | | | | | | **44.776.000.000** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **42.099.576.171** | | | | | | | | **44.776.000.000** | |
| 1, | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **34.006.734.402** | | | | | | | - | **35.946.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Inspektorat Daerah ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **34.006.734.402** | - | - | - | - | - | - | - | **35.946.000.000** | - |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja APIP Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja APIP* | - | | | 8 Dokumen<br>100 % | 95.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 116.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 50.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 30.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 35.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 36.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan APIP Terlaksananya Administrasi Keuangan APIP* | - | | | 12 Bulan 100 % | 27.679.028.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 28.000.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 136 Orang/bulan | 27.679.028.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 28.000.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 16 Dokumen 100 % | 88.636.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 90.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 14 Dokumen | 88.636.500 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 90.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Kepegawaian APIP Terlaksananya Administrasi Kepegawaian APIP* | - | | | 78 Orang 100 % | 937.370.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.410.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 145 Paket | 141.810.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 145.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 50 Dokumen | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 65.000.000 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 136 Orang | 735.560.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.200.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Umum APIP Terlaksananya Administrasi Umum APIP* | - | | | 12 Bulan 100 % | 1.674.317.690 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.900.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 40.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 730.102.890 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 800.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 21 Paket | 60.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 70.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 40 Paket | 226.252.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 17 Paket | 200.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 230.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 55.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 55.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 337.962.000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 400.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 3 Paket<br>100 % | 2.232.760.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.500.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 1.632.760.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.700.000.000 | INSPEKTORAT |
| | | | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Kendaraan Roda Empat | | | | | 1.100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Sewa Kendaraan Roda 4 Double Gardan | | | | | 532.080.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 500.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | INSPEKTORAT |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | 499.320.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 12 Bulan<br>100 % | 592.878.212 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 950.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 257.199.012 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 350.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 335.679.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 12 Bulan<br>100 % | 706.744.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 980.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 448.410.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 600.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 197.944.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 29 Unit | 60.390.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 80.000.000 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | **5.586.720.769** | | | | | | | - | **5.930.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah melalui pencegahan, efektivitas tindak lanjut pengawasan dan perbaikan tata kelola yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas KKN ]** | **Opini BPK RI terhadap LKPD**<br>**Perangkat Daerah yang memeroleh nilai SAKIP minimal BB**<br>**Persentase audit kepatuhan terhadap perangkat daerah** | **73**<br>**78**<br>**WTP** | **50**<br>**65**<br>**WDP** | **55**<br>**67**<br>**WTP** | **60**<br>**69**<br>**WTP** | **5.586.720.769** | - | - | - | | - | - | - | **5.930.000.000** | - |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai*<br>*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP Jumlah Unit Pelayanan Publik Kategori Baik* | - | | | 20 Jumlah<br>18 Laporan<br>41 Jumlah<br>0 Jumlah<br>20 Jumlah | 3.904.751.769 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | - | 4.230.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 43 Laporan | 1.235.498.000 | Kab. Musi Banyuasin. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 41 Laporan | 730.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 800.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 2 Laporan | 645.254.000 | Kab. Musi Banyuasin. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 700.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 1 Laporan | 120.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 130.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 75 Laporan | 923.999.769 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.000.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 2 Dokumen | 250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*<br>*Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti* | - | | | 4 Laporan<br>100 % | 1.681.969.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | - | 1.700.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 54 Laporan | 1.681.969.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.700.000.000 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | **2.506.121.000** | | | | | | | - | **2.900.000.000** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan dan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendampingan dan asistensi yang efektif, efisien dan akuntabel ]** | **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**<br>**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**<br>**Perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM** | **3**<br>**3.20**<br>**WBK** | **3**<br>**WBK** | **3**<br>**3.05**<br>**WBK** | **3**<br>**3.10**<br>**WBK** | **2.506.121.000** | - | - | - | | - | - | - | **2.900.000.000** | - |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Jumlah Rekomendasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*<br>*Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP* | - | | | 4 Rekomend asi<br>100 % | 250.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | - | 300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 2 Rekomend asi | 250.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin | | 300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Nilai RB bernilai Baik*<br>*Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level 3* | - | | | 48 Perangkat Daerah<br>90 %<br>80 % | 2.256.121.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | - | 2.600.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 48 perangkat daerah | 375.375.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 400.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 48 perangkat daerah | 609.935.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 700.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 4 Kegiatan | 1.120.811.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 1.300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 48 perangkat daerah | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | | 200.000.000 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN SEKAYU** | | | | | | **11.360.298.912** | | | | | | | | **12.978.100.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **11.360.298.912** | | | | | | | | **12.978.100.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **11.360.298.912** | | | | | | | | **12.978.100.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **10.460.463.708** | | | | | | | - | **11.488.100.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sekayu) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **10.460.463.708** | - | - | - | - | - | - | - | **11.488.100.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*<br>*Persentase Penyusunan Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan*<br>*Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan* | - | | | 4 laporan<br>3 dokumen<br>100 %<br>100 % | 17.799.083 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 8.742.371 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 60.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 9.056.712 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 60.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 9.278.584.214 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 9.000.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 56 Orang/bulan | 9.278.584.214 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 9.000.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya Kapasitas ASN* | - | | | 100 % | 147.980.800 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 195.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 57.550.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 90.430.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 75.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 486.014.831 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 1.340.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.014.051 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 50.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 224.400.905 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 300.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.903.077 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 20.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.703.368 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 25.895.430 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 60.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 30 Laporan | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 210.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 400 Laporan | 99.418.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 460.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 33.388.380 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 325.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 33.388.380 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 325.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 280.627.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 140.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 134.317.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 140.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 146.309.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 0 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Kendaraan Dinas Gedung kantor dan Peralatan Kantor* | - | | | 100 % | 216.089.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | - | 368.100.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 120.760.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 140.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 74.996.200 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 200.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 22 Unit | 20.313.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan Sekayu | | 28.100.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **684.942.605** | | | | | | | - | **1.110.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan* | - | | | 100 % | 609.526.970 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Asn , Non Asn dan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Sekayu | - | 600.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 10 Dokumen | 609.526.970 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh Asn , Non Asn dan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Sekayu | | 600.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | - | | | undefined undefined | 65.908.835 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan dan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan | - | 500.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 65.908.835 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan dan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan | | 500.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | | | Fasilitasi Kegiatan PATEN | | | | | 15.229.311 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 16.909.740 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 5.550.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 10.101.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | 3.139.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Mebel | | | | | 6.636.524 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | 7.010.760 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | | | | | 1.332.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Dokumen Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat* | - | | | 100 % | 9.506.800 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan dan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan | - | 10.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 9.506.800 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan dan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan | | 10.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **24.948.600** | | | | | | | - | **120.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terwujudnya Kondusifitas Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan* | - | | | 100 % undefined undefined undefined undefined | 24.948.600 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan, Forkomincam dan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan | - | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 24.948.600 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan, Forkomincam dan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan | | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **40.000.000** | | | | | | | - | **140.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | - | | | 100 % | 40.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan, Forkomincam dan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan | - | 140.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 400 Orang | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan, Forkomincam dan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan | | 140.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **149.944.000** | | | | | | | - | **120.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa* | - | | | 100 % | 149.944.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Sekayu | - | 120.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 12 Dokumen | 99.964.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Sekayu | | 60.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 10 Laporan | 49.980.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Sekayu | | 60.000.000 | KECAMATAN SEKAYU |
| | | **KELURAHAN SERASAN JAYA** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| 1, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **183.240.300** | | | | | | | - | **250.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 183.240.300 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan | - | 250.000.000 | KELURAHAN SERASAN JAYA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 183.240.300 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan | | 250.000.000 | KELURAHAN SERASAN JAYA |
| | | | Belanja Air Conditioner Kegiatan Lelang Lebak Lebung Kel. Serasan Jaya | | | | | 11.552.325 | | | | | | | | | |
| | | | belanja modal personal komputer dan printer | | | | | 15.217.700 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer Kelurahan Serasan Jaya | | | | | 37.319.865 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 17.164.799 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 9.570.068 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 5.953.598 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.440.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 1.992.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | 12.487.500 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 14.991.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 18.044.100 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | 7.820.172 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 13.687.175 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **700.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan* | - | | | 100 % | 700.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan dan Masyarakat | - | 700.000.000 | KELURAHAN SERASAN JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan dan Masyarakat | | 350.000.000 | KELURAHAN SERASAN JAYA |
| | | | Belanja peningkatan jalan setapak di RW.001 kelurahan serasan jaya | | | | | 245.536.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja peningkatan jalan setapak di RW.001 kelurahan serasan jaya | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 584.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.520.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan dan Masyarakat | | 350.000.000 | KELURAHAN SERASAN JAYA |
| | | **KELURAHAN SOAK BARU** | | | | | | **906.703.774** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **906.703.774** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **906.703.774** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **206.704.007** | | | | | | | - | **250.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 206.704.007 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan | - | 250.000.000 | KELURAHAN SOAK BARU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 206.704.007 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru | PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kelurahan | | 250.000.000 | KELURAHAN SOAK BARU |
| | | | Penyediaan peralatan Komputer Kel.Soak Baru | | | | | 11.933.160 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Proyektor Kelurahan Soak Baru | | | | | 10.439.661 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Komputer dan Unit lainnya Kelurahan Soak Baru | | | | | 12.093.228 | | | | | | | | | |
| | | | Penyedia Pemeliharaan Gedung Kelurahan Soak Baru | | | | | 27.467.111 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 30.006.242 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 19.267.800 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 3.404.592 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 4.284.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 16.350.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 10.087.092 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | 15.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | | | | | 7.352.640 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | 7.821.250 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 22.337.225 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **699.999.767** | | | | | | | - | **700.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 699.999.767 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Masyarakat | - | 700.000.000 | KELURAHAN SOAK BARU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Masyarakat | | 350.000.000 | KELURAHAN SOAK BARU |
| | | | Peningkatan jalan setapak / Lolorong Kedondong JL. LET Munandar KE JL. MerdekaRT 009 Kel.Soak Baru | | | | | 56.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas jalan setapak Samping Rumah Yusup Abunawas RT. 001 Kel.Soak Baru | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas jalan setapak yang Melintas Pinggir Sungai Musi dari Simpit RT 001 s/d 003 Kel.Soak Baru | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas Puskeskel RT 16 Kelurahan Soak Baru | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas jalan setapak RT 004 Kel.Soak Baru | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 3.400.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 349.999.767 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan Masyarakat | | 350.000.000 | KELURAHAN SOAK BARU |
| | | **KELURAHAN BALAI AGUNG** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **183.240.300** | | | | | | | - | **150.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 183.240.300 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan HONORER | - | 150.000.000 | KELURAHAN BALAI AGUNG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 183.240.300 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan HONORER | | 150.000.000 | KELURAHAN BALAI AGUNG |
| | | | Penyediaan Meja Rapat Pejabat Kelurahan Balai Agung | | | | | 13.661.991 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Lemari Arsip Kelurahan Balai Agung | | | | | 14.705.280 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 1.878.120 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANG TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 45.484.859 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.930.578 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 17.425.890 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 3.413.583 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 12.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 3.990.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 18.484.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.040.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 3.385.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | 7.821.250 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 720.342 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 13.687.175 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | 8.487.504 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | 2.524.029 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **700.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan* | - | | | 100 % | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, HONORER DAN MASYARAKAT, POKMAS | - | 700.000.000 | KELURAHAN BALAI AGUNG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sekayu, Balai Agung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, HONORER DAN MASYARAKAT, POKMAS | | 350.000.000 | KELURAHAN BALAI AGUNG |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak Rw. 03 Lk. II Kelurahan Balai Agung | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Rw. 03 Lk. II Kelurahan Balai Agung | | | | | 115.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Rw. 05 Lk. II Kelurahan Balai Agung | | | | | 175.000.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sekayu, Balai Agung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, HONORER DAN MASYARAKAT, POKMAS | | 350.000.000 | KELURAHAN BALAI AGUNG |
| | | **KELURAHAN KAYUARA** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **883.240.300** | | | | | | | | **850.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **183.240.300** | | | | | | | - | **150.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 183.240.300 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan HONORER | - | 150.000.000 | KELURAHAN KAYUARA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Willayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 183.240.300 | Kab. Musi Banyuasin. Sekayu, Kayu Ara | PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN dan HONORER | | 150.000.000 | KELURAHAN KAYUARA |
| | | | Penyediaan Belanja Modal Mebel Kelurahan Kayuara | | | | | 12.387.600 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Belanja Modal Mebel Kelurahan Kayuara | | | | | 14.283.030 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Penyediaan Belanja Modal Komputer Kelurahan Kayuara | | | | | 29.914.167 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 24.669.614 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.716.211 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 5.495.575 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 3.379.628 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 11.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 3.420.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 6.161.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | 6.622.900 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Mebel | | | | | 7.347.518 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 7.020.750 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | | | | | 6.881.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | 5.404.875 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | 7.821.250 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 13.687.175 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya | | | | | 6.327.000 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **700.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terseneggelaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan* | - | | | 4 Desa/Kelurahan 4 Kelurahan | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, HONORER DAN MASYARAKAT, POKMAS | - | 700.000.000 | KELURAHAN KAYUARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, HONORER DAN MASYARAKAT, POKMAS | | 350.000.000 | KELURAHAN KAYUARA |
| | | | Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 001 Kelurahan Kayuara | | | | | 110.355.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 012 Kelurahan Kayuara | | | | | 71.213.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Setapak RT 013 Kelurahan Kayuara | | | | | 48.280.000 | | | | | | | | | |
| | | | Rehab Jalan Setapak dan Pembuatan Parit Area Jalan RT. 001 Kelurahan Kayuara | | | | | 117.432.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.720.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN, HONORER DAN MASYARAKAT, POKMAS | | 350.000.000 | KELURAHAN KAYUARA |
| | | **KECAMATAN LAIS** | | | | | | **5.625.398.859** | | | | | | | | **6.500.591.900** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.625.398.859** | | | | | | | | **6.500.591.900** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.625.398.859** | | | | | | | | **6.500.591.900** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.970.470.859** | | | | | | | - | **5.729.914.900** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lais) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**66.86** | **100**<br>**66.80** | **100**<br>**66.81** | **100**<br>**66.82** | **4.970.470.859** | - | - | - | - | - | - | - | **5.729.914.900** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 90 %<br>95 % | 24.870.810 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 34.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 10.044.315 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 16.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 14.826.495 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 18.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>12 Bulan | 4.126.754.257 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 4.795.769.900 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 46<br>Orang/bulan | 4.126.754.257 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 4.795.769.900 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 80 %<br>97 % | 95.218.780 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 99.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 45.188.780 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 42.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 50.030.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 57.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 333.978.815 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 422.615.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.032.069 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 13.000.000 | KECAMATAN LAIS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 74.544.062 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 98.100.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.266.381 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 21.250.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 39.966.508 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 48.170.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 24.971.795 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 37.790.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 68.760.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 25.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 33.185.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 99.998.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 102.360.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor* | - | | | 80 %<br>99 % | 48.588.599 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 53.180.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 48.588.599 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 53.180.000 | KECAMATAN LAIS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | - | | | 12 Bulan<br>100 % | 128.624.799 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 104.870.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 71.521.599 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 74.870.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 57.103.200 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 30.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah* | - | | | 95 %<br>98 % | 212.434.800 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | - | 220.480.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 123.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 125.000.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 74.904.800 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 77.980.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 14.030.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | PAJAK DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pegawai Kantor Camat Lais | | 17.500.000 | KECAMATAN LAIS |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **554.718.000** | | | | | | | - | **666.840.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 519.148.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah kecamatan lais | - | 624.570.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 519.148.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam wilayah kecamatan lais | | 624.570.000 | KECAMATAN LAIS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan*<br>*Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | - | | | 95 %<br>80 % | 25.580.000 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Lais | - | 25.400.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 25.580.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Lais | | 25.400.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 9.990.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lais | - | 16.870.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 9.990.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lais | | 16.870.000 | KECAMATAN LAIS |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **25.860.000** | | | | | | | - | **26.480.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada* | - | | | 87 %<br>80 % | 25.860.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lais | - | 26.480.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 5 Laporan | 25.860.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lais | | 26.480.000 | KECAMATAN LAIS |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **24.850.000** | | | | | | | - | **21.247.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 24.850.000 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lais | - | 21.247.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 100 Orang | 24.850.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lais | | 21.247.000 | KECAMATAN LAIS |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **49.500.000** | | | | | | | - | **56.110.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*<br>*Persentase Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa* | - | | | 80 %<br>97,2 % | 49.500.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Desa dalam wilayah kecamatan Lais | - | 56.110.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 3 Dokumen | 23.850.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Desa dalam wilayah kecamatan Lais | | 26.460.000 | KECAMATAN LAIS |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 2 Laporan | 25.650.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Desa dalam wilayah kecamatan Lais | | 29.650.000 | KECAMATAN LAIS |
| | | **KECAMATAN BABAT TOMAN** | | | | | | **6.983.019.233** | | | | | | | | **6.560.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.983.019.233** | | | | | | | | **6.560.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.983.019.233** | | | | | | | | **6.560.000.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6.408.029.233** | | | | | | | - | **5.680.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Toman) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70** | **100**<br>**65.30** | **100**<br>**65.50** | **100**<br>**66** | **6.408.029.233** | - | - | - | | | - | - | **5.680.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 50.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 8 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.497.500.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 3.800.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 29 Orang/bulan | 5.497.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 3.800.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 95.086.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 100.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 50.856.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 44.230.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 340.748.471 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 585.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.997.659 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 78.871.494 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 125.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.019.849 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.004.178 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.009.291 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 26.472.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 100.374.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 175.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 50.032.362 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 80.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 50.032.362 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 80.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 183.842.400 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 720.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 75.336.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 120.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 108.506.400 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 600.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 205.820.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 345.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 123.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 175.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 7.320.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **524.990.000** | | | | | | | - | **755.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 505.745.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 700.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 8 Dokumen | 505.745.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 700.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 14.245.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 35.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 14.245.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 35.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 20.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| 3, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **12.770.000** | | | | | | | - | **30.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 12.770.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 30.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 12.770.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **22.515.000** | | | | | | | - | **35.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 22.515.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 35.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 100 Orang | 22.515.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 35.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **14.715.000** | | | | | | | - | **60.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 14.715.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 60.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.225.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 6.490.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | KECAMATAN BABAT TOMAN |
| | | **KELURAHAN BABAT** | | | | | | **849.999.417** | | | | | | | | **1.025.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **849.999.417** | | | | | | | | **1.025.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **849.999.417** | | | | | | | | **1.025.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **149.999.750** | | | | | | | - | **200.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 149.999.750 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 200.000.000 | KELURAHAN BABAT |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 149.999.750 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 200.000.000 | KELURAHAN BABAT |
| | | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | 36.822.696 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | 21.820.269 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 23.201.775 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.683.202 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 5.720.274 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 122.544 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 13.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 4.446.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 4.577.040 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 7.424.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 8.041.950 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **699.999.667** | | | | | | | - | **825.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 699.999.667 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 825.000.000 | KELURAHAN BABAT |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 450.000.000 | KELURAHAN BABAT |
| | | | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kolor | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 349.999.667 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 375.000.000 | KELURAHAN BABAT |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Benih Ikan | | | | | 17.760.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Pakan Ikan | | | | | 36.763.200 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Mesin Pompa | | | | | 65.134.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Terpal | | | | | 112.332.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 9.495.939 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.568.728 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 40.005.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 17.640.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 16.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 17.800.000 | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN MANGUN JAYA** | | | | | | **849.999.750** | | | | | | | | **1.025.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **849.999.750** | | | | | | | | **1.025.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **849.999.750** | | | | | | | | **1.025.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **149.999.750** | | | | | | | - | **200.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 149.999.750 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 200.000.000 | KELURAHAN MANGUN JAYA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Willayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 149.999.750 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 200.000.000 | KELURAHAN MANGUN JAYA |
| | | | Pengadaan Meja Kerja Pejabat | | | | | 28.719.696 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | 21.820.269 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 23.201.775 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.683.202 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 5.842.818 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 13.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 4.446.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 4.577.040 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 7.424.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN UNTUK KEWADAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 8.041.950 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | 8.103.000 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **825.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 700.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 825.000.000 | KELURAHAN MANGUN JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 450.000.000 | KELURAHAN MANGUN JAYA |
| | | | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | 270.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 375.000.000 | KELURAHAN MANGUN JAYA |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kegiatan Pelatihan Las Listrik (Kaca Mata Kerja) | | | | | 1.481.850 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kegiatan Pelatihan Las Listrik (Mesin Las) | | | | | 154.029.150 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kegiatan Pelatihan Las Listrik (Gerinda Listrik) | | | | | 64.135.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kegiatan Pelatihan Las Listrik (Kawat Las) | | | | | 25.274.700 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kegiatan Pelatihan Las Listrik (Sarung Tangan Kerja) | | | | | 2.237.760 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 7.149.510 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.601.230 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 34.650.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 11.340.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 16.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 20.100.000 | | | | | | | | | |
| | | **KECAMATAN KELUANG** | | | | | | **5.916.536.590** | | | | | | | | **5.752.274.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.916.536.590** | | | | | | | | **5.752.274.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.916.536.590** | | | | | | | | **5.752.274.000** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.341.536.590** | | | | | | | - | **1.170.274.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Keluang) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70.01** | **-100** | **-100** | **-100** | **5.341.536.590** | - | - | - | - | - | - | - | **1.170.274.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | - | 27.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 16.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 11.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.418.566.390 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | - | 0 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 4.418.566.390 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 0 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 105.389.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | - | 72.250.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 27 Paket | 55.389.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 28.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 44.250.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 335.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 419.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 11.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 77.000.000 | KECAMATAN KELUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 32.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 52.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 37.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 20 Laporan | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 100.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 50.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | - | 55.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 55.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 222.611.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | - | 417.024.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 54.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 55.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 168.611.200 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 362.024.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 174.970.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | - | 180.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 78.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 80.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 80.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 13 Unit | 21.130.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Seluruh ASN | | 20.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **526.330.000** | | | | | | | - | **530.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 503.203.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | - | 500.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 6 Dokumen | 503.203.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | | 500.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 19.317.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | - | 25.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 19.317.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | | 25.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 3.810.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Keluang | - | 5.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 3.810.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Keluang | | 5.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **0** | | | | | | | - | **4.000.000.000** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 0 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Keluang | - | 4.000.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Keluang | | 4.000.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **9.700.000** | | | | | | | - | **12.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 9.700.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | - | 12.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 2 Laporan | 9.700.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | | 12.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **22.570.000** | | | | | | | - | **15.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 22.570.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | - | 15.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 30 Orang | 22.570.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | | 15.000.000 | KECAMATAN KELUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **16.400.000** | | | | | | | - | **25.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 16.400.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | - | 25.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 3 Dokumen | 8.450.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | | 15.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 14 Laporan | 7.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kec. Keluang dan Forkopimcam | | 10.000.000 | KECAMATAN KELUANG |
| | | **KELURAHAN KELUANG** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **880.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **880.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **880.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **150.000.000** | | | | | | | - | **160.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 150.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 160.000.000 | KELURAHAN KELUANG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 160.000.000 | KELURAHAN KELUANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **720.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Keluang | - | 720.000.000 | KELURAHAN KELUANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Keluang | | 360.000.000 | KELURAHAN KELUANG |
| | | | Pembangunan Jalan Lanjutan | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Keluang | | 360.000.000 | KELURAHAN KELUANG |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kursi Lipat | | | | | 124.882.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Tenda Pleton | | | | | 140.000.000 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 2.454.932 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.051.669 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 34.442.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 13.875.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 5.994.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 25.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KECAMATAN SANGA DESA** | | | | | | **6.301.229.996** | | | | | | | | **7.547.500.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.301.229.996** | | | | | | | | **7.547.500.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.301.229.996** | | | | | | | | **7.547.500.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.726.401.716** | | | | | | | - | **6.030.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sanga Desa) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70** | **100**<br>**64.55** | **100**<br>**65** | **100**<br>**66** | **5.726.401.716** | - | - | - | | - | - | - | **6.030.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.671.827 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 95.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 10.345.059 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 50.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 10.326.771 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 45.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.732.174.517 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 3.700.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 4.732.174.517 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 3.700.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 122.253.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 145.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 50 Paket | 45.668.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 80.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 76.585.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 65.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 340.047.512 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 665.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 9.231.540 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 30.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 44.791.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 100.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 11.581.296 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 40.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 46 Paket | 38.549.028 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 80.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 24.836.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 30.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 50.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 88.220.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 150.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 97.838.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 185.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 35.962.460 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 150.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 35.962.460 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 150.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 260.353.400 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 715.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 47.139.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 70.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Laporan | 213.214.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 645.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 214.939.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 560.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 120.880.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 160.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 71.709.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 350.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 22.350.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 50.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **495.741.280** | | | | | | | - | **1.102.500.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 477.515.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 745.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 477.515.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 745.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 13.226.280 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 350.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 13.226.280 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 350.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 7.500.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 7.500.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **18.627.000** | | | | | | | - | **75.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 18.627.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 75.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 2 Laporan | 18.627.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 75.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **32.380.000** | | | | | | | - | **140.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 32.380.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 140.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 25 Orang | 21.730.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 75.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Laporan | 10.650.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 65.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **28.080.000** | | | | | | | - | **200.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 28.080.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | - | 200.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 2 Dokumen | 12.780.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 65.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 15.300.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sanga Desa | | 135.000.000 | KECAMATAN SANGA DESA |
| | | **KELURAHAN NGULAK I** | | | | | | **849.980.000** | | | | | | | | **925.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **849.980.000** | | | | | | | | **925.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **849.980.000** | | | | | | | | **925.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **149.980.000** | | | | | | | - | **175.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 149.980.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak I | - | 175.000.000 | KELURAHAN NGULAK I |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 149.980.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak I | | 175.000.000 | KELURAHAN NGULAK I |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **750.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak I | - | 750.000.000 | KELURAHAN NGULAK I |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 400.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sanga Desa, Ngulak I | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak I | | 375.000.000 | KELURAHAN NGULAK I |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak di Kelurahan Ngulak.I | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pasang Batu Kali | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 300.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sanga Desa, Ngulak I | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak I | | 375.000.000 | KELURAHAN NGULAK I |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Bersh Ikan | | | | | 75.480.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Pakan Ikan | | | | | 18.381.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Mesin Pompa | | | | | 57.442.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Terpal | | | | | 15.318.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 19.859.884 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.044.175 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 50.533.841 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 16.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 33.940.000 | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN NGULAK** | | | | | | **849.980.000** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **849.980.000** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **849.980.000** | | | | | | | | **950.000.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **149.980.000** | | | | | | | - | **175.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 149.980.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak | - | 175.000.000 | KELURAHAN NGULAK |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 149.980.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sanga Desa, Ngulak | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak | | 175.000.000 | KELURAHAN NGULAK |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **775.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak | - | 775.000.000 | KELURAHAN NGULAK |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin. Sanga Desa, Ngulak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak | | 400.000.000 | KELURAHAN NGULAK |
| | | | Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton | | | | | 350.000.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kelurahan Ngulak | | 375.000.000 | KELURAHAN NGULAK |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Peralatan Mebel (Meja Kerja) | | | | | 124.875.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Peralatan Mebel (Kursi) | | | | | 23.671.583 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Alat Pemadam Kebakaran | | | | | 82.812.917 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 11.449.994 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.099.675 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 38.438.831 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 552.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 23.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 31.500.000 | | | | | | | | | |
| | | **KECAMATAN PLAKAT TINGGI** | | | | | | **5.183.236.462** | | | | | | | | **5.560.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.183.236.462** | | | | | | | | **5.560.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.183.236.462** | | | | | | | | **5.560.000.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.602.906.462** | | | | | | | - | **4.695.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Plakat Tinggi) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**70.01** | **100**<br>**67.45** | **100**<br>**69.40** | **-100** | **4.602.906.462** | - | - | - | - | - | - | - | **4.695.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 18.049.800 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 60.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 8.049.800 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.777.174.560 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 3.000.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 36 Orang/bulan | 3.777.174.560 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 3.000.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 74.950.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 120.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 35 Paket | 24.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 40.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 80.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 336.620.200 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 685.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 40.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 80.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 22 Paket | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 40.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 85.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 85.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 75.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 100.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 355 Laporan | 101.620.200 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 180.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 50.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 100.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 100.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 139.561.902 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 395.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 75.001.536 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 95.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Laporan | 64.560.368 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 300.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 206.550.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 335.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 118.260.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 135.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 170.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 15 Unit | 13.290.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **535.330.000** | | | | | | | - | **745.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 517.224.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 700.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 10 Dokumen | 517.224.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | PEGAWAI DAN MASYAKARAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 700.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 12.776.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 12.776.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.330.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 15.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 5.330.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 15.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.000.000** | | | | | | | - | **30.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 10.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 2 Laporan | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **15.000.000** | | | | | | | - | **30.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 15.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 60 Orang | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **20.000.000** | | | | | | | - | **60.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 20.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | - | 60.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 15 Dokumen | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | MASYARAKAT KECAMATAN PLAKAT TINGGI | | 30.000.000 | KECAMATAN PLAKAT TINGGI |
| | | **KECAMATAN BATANGHARI LEKO** | | | | | | **5.232.357.700** | | | | | | | | **4.482.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.232.357.700** | | | | | | | | **4.482.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.232.357.700** | | | | | | | | **4.482.000.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.557.204.088** | | | | | | | - | **3.622.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Batanghari Leko) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.557.204.088** | - | - | - | - | - | - | - | **3.622.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.032.400 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 114.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 10.032.400 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 65.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 9 Laporan | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 49.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.767.688.100 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 2.112.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 3.767.688.100 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 2.112.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 68.391.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 96.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 18.486.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 43.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 49.905.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 332.738.600 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 635.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.999.900 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 15.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 72.756.900 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 85.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 19.999.500 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 22.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 39.998.300 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 24.975.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 65.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 26.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 106.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 100.009.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 263.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 49.355.388 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 46.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 49.355.388 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 46.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 93.307.600 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 358.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 58.506.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 34.801.600 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 305.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 220.691.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | - | 261.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 123.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 163.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 15.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 74.800.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 57.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 13 Unit | 22.391.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN | | 26.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **507.596.612** | | | | | | | - | **579.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 490.840.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 520.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 8 Dokumen | 490.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 520.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 11.426.612 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 11.426.612 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.330.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 6.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 5.330.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 6.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **100.000.000** | | | | | | | - | **100.000.000** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 100.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 100.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 100.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | | | Penyediaan Sarpras Tempat Ibadah Umat Hindu di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko | | | | | 98.934.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.065.200 | | | | | | | | | |
| 4, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **14.412.000** | | | | | | | - | **53.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 14.412.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 14.412.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| 5, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **25.550.000** | | | | | | | - | **53.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 25.550.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 30 Orang | 25.550.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| 6, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **27.595.000** | | | | | | | - | **75.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 27.595.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 75.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 16 Dokumen | 8.220.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 22.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 16 Laporan | 19.375.000 | Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOPIMCAM DAN MASYARAKAT | | 53.000.000 | KECAMATAN BATANGHARI LEKO |
| | | **KECAMATAN SUNGAI KERUH** | | | | | | **4.722.682.544** | | | | | | | | **4.027.954.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.722.682.544** | | | | | | | | **4.027.954.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.722.682.544** | | | | | | | | **4.027.954.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.147.682.544** | | | | | | | - | **3.727.954.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Keruh) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten**<br>**Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.147.682.544** | - | - | - | | - | - | - | **3.727.954.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evalusai kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 22.714.800 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 30.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 10.257.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 15.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 12.457.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 15.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.386.823.233 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kantor Kecamatan Sungai Keruh | - | 2.700.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 3.386.823.233 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kantor Kecamatan Sungai Keruh | | 2.700.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 71.551.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 102.954.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 22 Paket | 22.196.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 32.954.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 49.355.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 70.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 334.856.774 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 315.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 9.992.750 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 10.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 75.003.300 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 50.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 19.996.550 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 10.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 43 Paket | 39.997.174 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 50.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 40.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 24.994.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 30.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 99.873.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 100.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 49.680.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 50.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 49.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 50.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 75.321.737 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sungai Keruh | - | 255.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 63.321.737 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sungai Keruh | | 80.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 12.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Sungai Keruh | | 175.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*<br>*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 206.735.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 275.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMAJUAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 120.760.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 150.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 74.995.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 100.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 18 Unit | 10.980.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **491.914.000** | | | | | | | - | **220.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan* | - | | | 100 %<br>100 % | 466.416.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 200.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 10 Dokumen | 466.416.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 200.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan PATEN* | - | | | 100 % | 25.498.000 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 25.498.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **20.460.000** | | | | | | | - | **20.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 20.460.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan | - | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 10 Laporan | 20.460.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan | | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **21.466.000** | | | | | | | - | **20.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan* | - | | | 100 % | 21.466.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan | - | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 50 Orang | 21.466.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan | | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **41.160.000** | | | | | | | - | **40.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah* | - | | | 10 Dokumen 100 % | 41.160.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | - | 40.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 10 Dokumen | 20.580.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 10 Laporan | 20.580.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan | | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI KERUH |
| | | **KECAMATAN SUNGAI LILIN** | | | | | | **6.542.533.680** | | | | | | | | **7.572.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.542.533.680** | | | | | | | | **7.572.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.542.533.680** | | | | | | | | **7.572.000.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.948.533.680** | | | | | | | - | **6.827.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Lilin) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **5.948.533.680** | - | - | - | | | - | - | - | **6.827.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.883.550 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 56.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 5.250.300 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 28.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 5.633.250 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 28.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.047.234.700 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 4.800.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 48 Orang/bulan | 5.047.234.700 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 4.800.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 94.045.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 121.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 44.690.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 55.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 49.355.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 66.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 343.393.440 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 740.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.384.731 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 28.243.753 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 130.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.684.648 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 40.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.812.308 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 75.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.318.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 20.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 50.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 44.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 120.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 115.590.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 255.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 48.554.300 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 70.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 48.554.300 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 70.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 192.522.690 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 600.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 90.816.290 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 80.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 101.706.400 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 520.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 211.900.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | - | 440.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 122.260.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 160.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 255.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 14.640.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah | | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **524.670.000** | | | | | | | - | **657.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 514.770.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | - | 620.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 7 Dokumen | 514.770.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 620.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 4.950.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | - | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 4.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 25.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 4.950.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 12.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 4.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 12.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **14.490.000** | | | | | | | - | **22.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 14.490.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | - | 22.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 14.490.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 22.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **19.560.000** | | | | | | | - | **22.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 19.560.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | - | 22.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 40 Orang | 19.560.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 22.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **35.280.000** | | | | | | | - | **44.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 35.280.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | - | 44.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 16.380.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 22.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKO KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 18.900.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Forkopimcam dan Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin | | 22.000.000 | KECAMATAN SUNGAI LILIN |
| | | **KELURAHAN SUNGAI LILIN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **860.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **860.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **860.000.000** | |
| 1, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **150.000.000** | | | | | | | - | **160.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 150.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin | - | 160.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin | | 160.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN |
| | | | Penyediaan Belanja Modal CCTV Kantor Kelurahan | | | | | 12.468.630 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 12.163.402 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.607.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 5.408.919 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 25.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 2.565.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 4.507.204 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 36.920.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | 36.100.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | 6.216.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan | | | | | 543.345 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 1.800.000 | | | | | | | | | |
| 2, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **700.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin | - | 700.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin | | 350.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN |
| | | | Pembuatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01 | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Jalan Lingkungan RT 05 RW 06 | | | | | 78.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan Jalan Lingkungan RT 05 RW 03 | | | | | 192.000.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin | | 350.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN |
| | | | Penyediaan Bantuan Mesin Giling Daging | | | | | 130.203.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Bantuan Gerobak Sampah RW | | | | | 102.040.080 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 27.227.745 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.002.015 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 5.057.160 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.970.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 7.200.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 14.300.000 | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **880.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **880.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **850.000.000** | | | | | | | | **880.000.000** | |
| 1, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **150.000.000** | | | | | | | - | **160.000.000** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 150.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin Jaya | - | 160.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 150.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | 160.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA |
| | | | Belanja Modal AC | | | | | 21.917.615 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Sofa Kantor Lurah Sungai Lilin Jaya | | | | | 18.611.370 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Belanja Modal Meja Kerja | | | | | 12.387.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Laptop | | | | | 15.861.123 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 13.759.560 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 7.560.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | | | | | 3.021.400 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 2.617.410 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 3.719.921 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 36.920.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 5.724.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 5.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **700.000.000** | | | | | | | - | **720.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 700.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin Jaya | - | 720.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | 360.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Lebar 3M RW 01 RT 05 Komplek LDII Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | | | | 140.678.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Plat Dueker RW 03 RT 03 Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | | | | 102.678.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Siring / Drainase RW 02 RT 05 Depan SMA Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | | | | 106.644.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PROKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 350.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kelurahan Sungai Lilin Jaya | | 360.000.000 | KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA |
| | | | Penyediaan Kegiatan Pelatihan dan Praktek Bidang Pertanahan - GPS | | | | | 36.082.992 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Bantuan Bibit Bebek Petelur - Bibit Bebek Ternak | | | | | 66.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Bantuan Bibit Bebek Petelur - Pakan Ternak Bebek | | | | | 83.250.000 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Bantuan Bibit Bebek Petelur - Pakan Ternak Bebek - Jaring/Waring | | | | | 1.332.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 5.057.160 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 31.427.264 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.054.730 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 5.827.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 2.088.354 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 14.760.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 22.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | 35.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 19.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 4.800.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 18.700.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | | | | | 2.220.000 | | | | | | | | | |
| | | **KECAMATAN BAYUNG LENCIR** | | | | | | **6.274.963.761** | | | | | | | | **5.234.100.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.274.963.761** | | | | | | | | **5.234.100.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.274.963.761** | | | | | | | | **5.234.100.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.109.775.217** | | | | | | | - | **4.428.600.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Bayung Lencir) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**69** | **100**<br>**63** | **100**<br>**64** | **100**<br>**65** | **5.109.775.217** | - | - | - | | - | - | - | **4.428.600.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 24.948.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 39.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 9.954.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 17.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 14.994.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 22.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.185.994.918 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 2.900.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEMUDIAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23 Orang/bulan | 4.185.994.918 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 2.900.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 86.284.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 70.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 23 Paket | 42.054.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 24.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 44.230.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 45.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 346.922.093 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 664.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.976.014 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 20.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 75.139.452 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 150.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 19.982.664 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 30.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 39.983.088 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 60.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 24.988.875 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 40.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 90.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 37.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 70.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 99.852.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 200.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 48.123.606 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | - | 50.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 48.123.606 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 232.424.600 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 434.100.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 83.115.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 100.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 149.309.600 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 333.600.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 185.078.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 271.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 85.460.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 150.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 74.998.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 80.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 24.620.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 40.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.122.224.544** | | | | | | | - | **718.500.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 499.177.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 650.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 6 Dokumen | 499.177.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 650.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 618.047.544 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 60.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 618.047.544 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 60.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | | | Bantuan Organisasi PAKOI Kec. Bayung Lencir | | | | | 99.947.175 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan PAK Desa Muara Bahar | | | | | 99.977.700 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Tenda dan Kursi Desa Pulai Gading | | | | | 379.620.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 19.384.263 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 19.118.408 | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 7.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 5.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 7.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| 3, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **9.000.000** | | | | | | | - | **15.500.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 9.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 15.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 9.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 15.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **17.010.000** | | | | | | | - | **25.500.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 17.010.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 25.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 27 Orang | 17.010.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 25.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **16.954.000** | | | | | | | - | **46.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 16.954.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 46.000.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 27 Dokumen | 7.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 15.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 27 Laporan | 9.954.000 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 30.500.000 | KECAMATAN BAYUNG LENCIR |
| | | **KELURAHAN BAYUNG LENCIR** | | | | | | **849.679.906** | | | | | | | | **1.701.500.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **849.679.906** | | | | | | | | **1.701.500.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **849.679.906** | | | | | | | | **1.701.500.000** | |
| 1, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **149.856.600** | | | | | | | - | **100.500.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 149.856.600 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 100.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 149.856.600 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 100.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Laptop | | | | | 13.635.795 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Proyektor | | | | | 16.275.375 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 23.424.885 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 54.015.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 3.078.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 3.407.841 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 26.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 7.593.954 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | 2.025.750 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **699.823.306** | | | | | | | - | **1.601.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 699.823.306 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 1.601.000.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 349.898.400 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 800.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan lebar 3 m, panjang 300 m RT 11 RW 02 | | | | | 174.949.200 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan jalan Lingkungan lebar 3 m, panjang 300 m RT 17 RW 02 | | | | | 174.949.200 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 349.924.906 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 800.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Bibit Ternak (Sapi Jantan dan Betina) | | | | | 333.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 4.134.306 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 510.600 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 4.280.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 4.400.000 | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH** | | | | | | **849.789.011** | | | | | | | | **1.701.500.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **849.789.011** | | | | | | | | **1.701.500.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **849.789.011** | | | | | | | | **1.701.500.000** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **149.858.025** | | | | | | | - | **100.500.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 149.858.025 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 100.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 149.858.025 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 100.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Laptop | | | | | 20.744.790 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Proyektor | | | | | 16.275.375 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 18.510.360 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 54.015.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Air | | | | | 3.078.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 3.447.450 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 26.400.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 5.361.300 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | 2.025.750 | | | | | | | | | |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **699.930.986** | | | | | | | - | **1.601.000.000** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 699.930.986 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | - | 1.601.000.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 349.980.598 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 800.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH |
| | | | Pembangunan taman pendidikan al-quran RT.01 RW.02 | | | | | 99.997.385 | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan/Pemasangan Box Culvert Penghubung antara RT.09 ke RT.10 RW.02 | | | | | 249.983.213 | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 349.950.389 | Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | FORKOFIMCAM DAN MASYARAKAT | | 800.500.000 | KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Sarung tangan | | | | | 2.975.522 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Helm Safety Pemadam Kebakaran | | | | | 12.446.430 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Sepatu Safety Pemadam Kebakaran | | | | | 16.849.800 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Mesin Fire Pump Portable | | | | | 255.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Selang Pemadam Kebakaran | | | | | 13.148.172 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Selang Hisap | | | | | 24.815.160 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KEWANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Nozzle | | | | | 11.488.500 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Safety Masker | | | | | 2.872.680 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 319.125 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 2.835.000 | | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.600.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.300.000 | | | | | | | | | |
| | | **KECAMATAN LALAN** | | | | | | **5.367.613.287** | | | | | | | | **4.558.311.266** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.367.613.287** | | | | | | | | **4.558.311.266** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.367.613.287** | | | | | | | | **4.558.311.266** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.542.613.287** | | | | | | | - | **3.672.391.266** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lalan) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.542.613.287** | - | - | - | | - | - | - | **3.672.391.266** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 40.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.831.469.920 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 2.591.798.099 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 3.831.469.920 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 2.591.798.099 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 85.888.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 70.230.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 24 Paket | 35.888.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.230.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 335.112.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 585.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 10.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 15.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 20.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 34 Paket | 40.112.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 35.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 25.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 120.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 100.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 50.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 75.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 40 Unit | 50.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 75.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 78.233.367 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 173.630.167 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 23.630.167 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 23.630.167 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 54.603.200 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 136.910.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 136.733.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 36.920.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 36.920.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 74.823.000 | KECAMATAN LALAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 24.990.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 24.990.000 | KECAMATAN LALAN |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **776.710.000** | | | | | | | - | **845.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 748.010.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dan Forkopimcam | - | 800.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 19 Dokumen | 748.010.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dan Forkopimcam | | 800.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 23.700.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN LALAN | - | 35.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 23.700.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN LALAN | | 35.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.000.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN LALAN | - | 10.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 5.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN LALAN | | 10.000.000 | KECAMATAN LALAN |
| 3, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **13.050.000** | | | | | | | - | **13.050.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 13.050.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | - | 13.050.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 3 Laporan | 13.050.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat | | 13.050.000 | KECAMATAN LALAN |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **16.660.000** | | | | | | | - | **9.290.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 16.660.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dan Anggota FKUB, FKDM, FPK | - | 9.290.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 27 Orang | 16.660.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat dan Anggota FKUB, FKDM, FPK | | 9.290.000 | KECAMATAN LALAN |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **18.580.000** | | | | | | | - | **18.580.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 18.580.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa | - | 18.580.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 27 Dokumen | 9.290.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa | | 9.290.000 | KECAMATAN LALAN |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 27 Laporan | 9.290.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Desa | | 9.290.000 | KECAMATAN LALAN |
| | | **KECAMATAN TUNGKAL JAYA** | | | | | | **5.880.802.000** | | | | | | | | **7.489.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.880.802.000** | | | | | | | | **7.489.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.880.802.000** | | | | | | | | **7.489.000.000** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.015.802.000** | | | | | | | - | **5.945.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Tungkal Jaya) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah** | **70.01** | **-** | **-** | **-** | **5.015.802.000** | - | - | - | | - | - | - | **5.945.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 11.653.338 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 80.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 5.250.300 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 6.403.038 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.208.621.760 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 3.300.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 4.208.621.760 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 3.300.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 85.541.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 110.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 36.186.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 49.355.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 80.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 369.159.803 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 805.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.510.457 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 25.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 82.478.231 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.529.118 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 35.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 39.219.597 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.019.400 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 40.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 60.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 51.530.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 85.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 100.873.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 53.860.100 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 500.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 300.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 53.860.100 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 200.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 126.416.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 380.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 113.916.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 130.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 250.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 160.550.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 770.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 78.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 150.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 75.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 600.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 18 Unit | 6.710.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 20.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **456.431.000** | | | | | | | - | **634.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan*<br>*Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintaj di tingkat kecamatan* | - | | | 100 %<br>100 % | 428.236.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN TUNGKAL JAYA | - | 600.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 428.236.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | 600.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan*<br>*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN* | - | | | 100 %<br>100 % | 23.095.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN TUNGKAL JAYA | - | 26.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 23.095.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | KECAMATAN TUNGKAL JAYA | | 26.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | | 5.100.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 8.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 10 Laporan | 5.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 8.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **290.000.000** | | | | | | | - | **670.000.000** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 290.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 670.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 290.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 670.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | | | Pengadaan baju seragam Fatayat NU Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Tenda dan Kursi untuk Kegiatan Masyarakat Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mobiler Kantor Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan AC Floor Standing Masjid Al Muhajirin Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mobiler Kantor TPA Mambul Hidayah Rt. 10 Dusun 02 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya | | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **15.000.000** | | | | | | | - | **50.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase penyelenggaraan kegiatan koordinasi penerapan perda* | - | | | 100 %<br>100 % | 15.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 50.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **23.820.000** | | | | | | | - | **50.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 23.820.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 50.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 100 Orang | 23.820.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| 6, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **79.749.000** | | | | | | | - | **140.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 79.749.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 140.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 12 Dokumen | 23.820.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 55.929.000 | Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 90.000.000 | KECAMATAN TUNGKAL JAYA |
| | | **KECAMATAN LAWANG WETAN** | | | | | | **5.347.848.168** | | | | | | | | **6.835.000.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.347.848.168** | | | | | | | | **6.835.000.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.347.848.168** | | | | | | | | **6.835.000.000** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.773.278.168** | | | | | | | - | **6.015.000.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lawang Wetan) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**72.5** | **100**<br>**67.65** | **100**<br>**70** | **100**<br>**70.50** | **4.773.278.168** | - | - | - | | - | - | - | **6.015.000.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan* | - | | | 100 %<br>100 % | 22.431.786 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | - | 100.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 7.898.850 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 60.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 14.532.936 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 40.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.765.984.995 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | - | 4.200.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 3.765.984.995 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 4.200.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Peningkatan Kualitas Kepegawaian* | - | | | 100 %<br>100 % | 83.140.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | - | 115.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 22 Paket | 34.910.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 35.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 48.230.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 80.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 354.170.632 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | - | 695.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 11.717.254 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 20.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 64.849.100 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 150.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.948.384 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 35.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 39.990.144 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 60.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 24.905.750 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 45.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 41.360.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 50.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 25.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 85.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 131.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 250.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | - | | | - | 38.168.030 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | - | 85.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 38.168.030 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 85.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi* | - | | | 100 %<br>100 % | 295.012.725 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | - | 535.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 71.798.325 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 85.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 223.214.400 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 450.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 214.370.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | - | 285.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 118.260.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 150.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 76.720.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 100.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 19.390.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Aparatur Kecamatan Lawang Wetan | | 35.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **499.630.000** | | | | | | | - | **520.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | - | | | 100 % | 462.200.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan dan Masyarakat Kecamatan Lawang Wetan | - | 450.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 462.200.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan dan Masyarakat Kecamatan Lawang Wetan | | 450.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 32.930.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | - | 65.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 32.930.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 65.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 4.500.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | - | 5.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 4.500.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan | | 5.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| 3, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **21.300.000** | | | | | | | - | **50.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda* | - | | | 100 % | 21.300.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Lawang Wetan | - | 50.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 4 Laporan | 21.300.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Lawang Wetan | | 50.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **24.600.000** | | | | | | | - | **50.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 24.600.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 50.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 35 Orang | 24.600.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 50.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **29.040.000** | | | | | | | - | **200.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 29.040.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan dan Aparatur Desa Kecamatan Lawang Wetan | - | 200.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 15 Dokumen | 17.040.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan dan Aparatur Desa Kecamatan Lawang Wetan | | 100.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 12.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Pemerintahan dan Aparatur Desa Kecamatan Lawang Wetan | | 100.000.000 | KECAMATAN LAWANG WETAN |
| | | **KECAMATAN BABAT SUPAT** | | | | | | **4.213.693.626** | | | | | | | | **5.205.000.000** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7 | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | 4.213.693.626 | | | | | | | | 5.205.000.000 | |
| | 7.01 | **KECAMATAN** | | | | | | 4.213.693.626 | | | | | | | | 5.205.000.000 | |
| 1. | 7.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | 3.643.193.626 | | | | | | | - | 4.137.000.000 | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Supat) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100**<br>**80** | **100**<br>**61.75** | **100**<br>**65** | **100**<br>**70** | 3.643.193.626 | - | - | - | | - | - | - | 4.137.000.000 | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 6 Dokumen | 16.180.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan OPD terkait | - | 56.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 7.795.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan OPD terkait | | 36.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 8.385.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan OPD terkait | | 20.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Terselenggaranya Gaji PNS* | - | | | 100 %<br>100 % | 2.764.366.982 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Babat Supat | - | 3.024.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 28<br>Orang/bulan | 2.764.366.982 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Babat Supat | | 3.024.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan mendapatkan PDH Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 69.624.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Babat Supat | - | 70.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 16 Paket | 28.064.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Babat Supat | | 20.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 41.560.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Babat Supat | | 50.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 459.340.582 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | - | 560.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 9.999.841 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 20.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 53.690.270 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 75.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 23.912.952 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 65.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 39 Paket | 50.623.667 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 70.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MASA KEWENANGAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 22.063.851 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 30.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 25.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 72.100.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 75.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 186.950.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat dan ASN Camat Babat Supat | | 200.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 %<br>100 %<br>100 % | 30.049.418 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat | - | 50.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 30.049.418 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat | | 50.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 213.332.644 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat | - | 282.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 111.626.244 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat | | 172.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 101.706.400 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat | | 110.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik* | - | | | 100 % | 90.300.000 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan pihak terkait | - | 95.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 78.840.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan pihak terkait | | 80.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 11.460.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin | PAJAK DAERAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan pihak terkait | | 15.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **523.721.000** | | | | | | | - | **798.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | - | | | 100 % | 488.705.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | - | 670.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 488.705.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | | 670.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | - | | | 100 %<br>100 %<br>8 Laporan | 29.016.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat | - | 120.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 29.016.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat | | 120.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAKS KINERJA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | - | | | 100 % | 6.000.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat | - | 8.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 6.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat | | 8.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **9.742.000** | | | | | | | - | **85.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 9.742.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | - | 85.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 16 Laporan | 9.742.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | | 85.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **14.440.000** | | | | | | | - | **65.000.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelesaian Konflik diwilayah Kecamatan* | - | | | 100 % | 14.440.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan OPD terkait | - | 65.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 40 Orang | 14.440.000 | Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kantor Camat Babat Supat dan OPD terkait | | 65.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **22.597.000** | | | | | | | - | **120.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase jumlah Desa yang dibina* | - | | | 100 % | 22.597.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | - | 120.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 16 Dokumen | 12.196.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | | 60.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 16 Laporan | 10.401.000 | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Babat Supat dan OPD Terkait | | 60.000.000 | KECAMATAN BABAT SUPAT |
| | | **KECAMATAN JIRAK JAYA** | | | | | | **4.440.133.664** | | | | | | | | **6.073.190.000** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.440.133.664** | | | | | | | | **6.073.190.000** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.440.133.664** | | | | | | | | **6.073.190.000** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.887.569.759** | | | | | | | - | **3.935.690.000** | |
| | | **[ Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Jirak Jaya) ]** | **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten**<br>**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel**<br>**Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran**<br>**Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | **100** | **100**<br>**80** | **100**<br>**90** | **100** | **3.887.569.759** | - | - | - | - | - | - | - | **3.935.690.000** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.032.400 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | - | 57.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 10.032.400 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 30.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 15.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | - | | 27.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.991.086.464 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Jirak Jaya | - | 2.200.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 29 Orang/bulan | 2.991.086.464 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Jirak Jaya | | 2.200.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 82.859.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 70.690.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 32.954.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 10.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 49.905.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 60.690.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 342.198.195 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 707.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.066.859 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 22.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 74.661.500 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 180.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.999.500 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 20.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TARGET RENSTRA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 39.916.336 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 75.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 16.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 20.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 40.000.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 50.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 25.328.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 65.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 117.226.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 275.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 211.256.500 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 280.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 162.680.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 80.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 162.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000 | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 48.576.500 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 200.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 107.577.200 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 400.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 37.974.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 50.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 69.603.200 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 350.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 127.560.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 220.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 42.040.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 77.400.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 74.120.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 92.600.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 11.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 50.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **482.413.905** | | | | | | | - | **710.000.000** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 468.787.905 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Jirak Jaya | - | 630.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 8 Dokumen | 468.787.905 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Jirak Jaya | | 630.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 8.226.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 75.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 8.226.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 75.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.400.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 5.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 5.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 5.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **0** | | | | | | | - | **1.250.000.000** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 1.250.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 0 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 1.250.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **15.400.000** | | | | | | | - | **60.000.000** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 15.400.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 60.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 15.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 60.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **22.400.000** | | | | | | | - | **62.500.000** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 22.400.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 62.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 30 Orang | 22.400.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 62.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN TAHUN KERANGKA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **32.350.000** | | | | | | | - | **55.000.000** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 32.350.000 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | - | 55.000.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 12 Dokumen | 15.050.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 27.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 17.300.000 | Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik | Kecamatan Jirak Jaya | | 27.500.000 | KECAMATAN JIRAK JAYA |
| | | | **J U M L A H** | | | | | **3.772.503.641.024** | | | | | | | | | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

***"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi " adalah tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.***

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan demi kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dapat dinilai melalui ketercapaian indikator – indikator kinerja pembangunan.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 merupakan RKPD Tahun keempat pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya, maka dapat dilihat capaian dan realisasi dan indikator kinerja utama pelaksanaan RPD Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | BASELINE TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif | 1. Angka Kemiskinan | % | 14,90 | 14,35 | 12,88 % | 110,24 % |
| | 2. Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,27 | 4,00-4,50 | 4,94 | 109,77% |
| | 3. Indeks Pelayanan Infrastruktu | Indeks | 59,37 | 91,15 | 80,55 | 88,37% |
| Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing | 4. Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 69,17 | 69,17 | 72,27 | 104,48% |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance)* | 5. Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | B | CC | BB | 122,48% |

*Sumber: LKJiP Kab. Muba Tahun 2024, diolah*

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (selfassement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukutannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Indikator Kinerja Utama

## 6.1 INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Proses pembangunan daerah tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan yang acapkali muncul, baik dalam tataran pelaksanaan terlebih pada tahap perencanaan. Guna mengatasi kendala tersebut, maka pembangunan daerah membutuhkan asupan data yang dapat menunjang terciptanya perencanaan yang komprehensif. Perencanaan dengan demikian sangat membutuhkan alat analisis yang mampu memberikan gambaran lengkap mengenai pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya sebagai titik awal perencanaan di masa mendatang. Alat analisis tersebut dapat berupa indikator yang mampu mengukur atau menilai terjadinya perubahan pada suatu daerah yang telah melakukan proses pembangunan. Hasil pengukuran maupun penilaian tersebut sekaligus menjadi acuan dalam penentuan perencanaan pembanggunan daerah di masa mendatang. Indikator tersebut dikenal dengan indikator makro, baik secara sosial maupun ekonomi. Setidaknya terdapat dua fungsi utama dari indikator makro yaitu : (i) menganalisa perkembangan pembangunan sampai keadaan terkini; dan (ii) memprediksi perkembangan keadaan sosial maupun ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Berikut Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.2 berikut ini:

**Tabel 6.2**
**Indikator Makro Pembangunan**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026**

| No | INDIKATOR MAKRO | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,0-5,2 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 12,0-12,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,03 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,07 |
| 5 | Pendapatan Per Kapita (ADHB) | Rp.Ribu | 160,00-167,00 |
| 6 | Rasio Gini | Rasio | 0,280-0,295 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 64,99 |
| 8 | Penurunan Emisi GRK Tahunan (Ton Co2 Eq) | Ton Co2 Eq | 2.012.452,45 |

*Sumber : RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029, SIPD, diolah*

## 6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Pada Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

**Tabel 6.3**
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| 1. | Indeks Pelayanan Infrastruktur | Indeks | 85 | 86,67 | 90 | 93,33 | 93,33 |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 74,02 | 74,7 | 74,9 | 75,3 | 75,59 |
| 3. | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,6 | 3,71 | 3,82 | 3,93 | 4 |
| 5. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.0-5.2 | 5.02-5.28 | 5.05-5.35 | 5.10-5.5 | 5.13-5.58 |
| 6. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 64,69 | 64,94 | 65,2 | 65,45 | 65,7 |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,07 | 73,1 | 73,33 | 73,5 | 74 |
| 8. | Tingkat Kemiskinan | % | 12.0-12.5 | 11.45-12.0 | 10.75-11.45 | 9.98-10.75 | 9.59-9.98 |

*Sumber : RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029, SIPD, diolah*

## 6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Sedangkan IKD Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek daya saing daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat dan aspek pelayanan umum.

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif menjadi dampak yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 6.4. berikut.

**Tabel 6.4**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**
**Tahun 2025-2029**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| I | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Infrastruktur | Indeks | 80,55 | 82,5 | 85 | 86,67 | 90 | 93,33 | 93,33 | |
| 2 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) | % | 72,72 | 72,72 | 72,98 | 73,24 | 73,5 | 73,76 | 74 | |
| 3 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 30,97 | 40,01 | 45,02 | 46,55 | 50,12 | 54,7 | 60,01 | |
| 4 | Indeks Perkembangan Harga | % | 1,59 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| 5 | Persentase Desa Mandiri | % | 44,98 | 50,22 | 54,59 | 58,95 | 63,32 | 67,69 | 72,05 | |
| 6 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | % | 11,92 | 12,56 | 12,86 | 13,15 | 13,45 | 13,74 | 14,04 | |
| 7 | Persentase Rumah Layak Huni | % | 72,72 | 72,72 | 72,98 | 73,24 | 73,5 | 73,6 | 74 | |
| 8 | Rasio Ketergantungan Penduduk | % | 49.76:49.76 | 49.76:49.46 | 49.46:49.08 | 49.08:48.06 | 48.06:48.08 | 48.08:47.56 | 47.56:47.1 | |
| 9 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | | 10,57 | 12,23 | 12,53 | 12,85 | 13,17 | 13,51 | 13,61 | |
| 10 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 3,3 | 3,37 | 3,4 | 3,44 | 3,47 | 3,5 | 3,52 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 11 | Proporsi PDRB Sektor Jasa (ADHB) | % | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,67 | 4,67 | 4,68 | 4,68 | |
| 12 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 69,85 | 70,85 | 71,85 | 72,6 | 73,1 | 73,6 | 74,1 | |
| 13 | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,4 | 6,65 | |
| 14 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar) | Rp | 25.451,72 | 26.000 | 27.000 | 28.500 | 29.500 | 31.000 | 32.000 | |
| 15 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 30,97 | 40,01 | 45,02 | 46,55 | 50,12 | 54,7 | 60,01 | |
| 16 | Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar) | Rp | -5.217,89 | -5.095,5 | -4.975,98 | -4.859,27 | -4.745,29 | -4.633,98 | -4.525,29 | |
| 17 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | % | 0,3045 | 0,3055 | 0,3065 | 0,3075 | 0,3085 | 0,3095 | 0,3105 | |
| 18 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 10,57 | 12,23 | 12,53 | 12,85 | 13,17 | 13,51 | 14,05 | |
| 19 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 11,92 | 12,56 | 12,86 | 13,15 | 13,45 | 13,74 | 14,04 | |
| 20 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | 72,72 | 72,72 | 72,98 | 73,24 | 73,5 | 73,76 | 74 | |
| **II** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | |
| **AA** | **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| 1 | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| **AB** | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 68,17 | 64,44 | 64,69 | 64,94 | 65,2 | 65,45 | 65,7 | |
| 2 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 115,65 | 109,25 | 108,45 | 107,64 | 106,84 | 106,84 | 106,05 | |
| 3 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 94,67 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 1,2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | |
| 5 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 79,48 | 80,97 | 82,04 | 83,11 | 84,18 | 85,26 | 86,33 | |
| 6 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,43 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | |
| 7 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | |
| 8 | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 1.080 | 1.120 | 1.160 | 1.200 | |
| 9 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,174 | 1,128 | 1,085 | 1,042 | 1,006 | 0,969 | 0,934 | |
| 10 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 115,84 | 111,99 | 111,65 | 111,31 | 110,97 | 110,63 | 110,29 | |
| 11 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%) | 4,41 | 4,24 | 4,07 | 3,9 | 3,73 | 3,56 | 3,39 | |
| 12 | Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | Ton CO2 eq | 182.835,8 | 182.835,8 | 2.012.452,45 | 222.491,6 | 2.460.414,98 | 2.688.752,02 | 2.943.543,17 | |
| 13 | Rasio Penduduk | % | 105,4 | 105,2 | 105 | 104,8 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | |
| 14 | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | 45,7 | 46,22 | 46,72 | 47,2 | 47,68 | 48,14 | 48,59 | |
| 15 | Persentase Penanganan sampah | % | 43,1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | |
| 16 | Persentase penanganan sampah skala kabupaten (%) | % | 43,1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | |
| 17 | Kontribusi Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2-e) | TonCO2e | 0 | 1.828.335,8 | 2.012.452,45 | 2.224.591,6 | 2.460.414,98 | 2.688.752,02 | 2.943.543,17 | |
| **III** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,94 | 4.5-5.0 | 5.0-5.2 | 5.02-5.28 | 5.05-5.35 | 5.10-5.5 | 5.13-5.58 | |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 72,27 | 72,67 | 73,07 | 73,1 | 73,33 | 73,5 | 74 | |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | % | 12,88 | 12.70-12.88 | 12.0-12.5 | 11.45-12.0 | 10.75-11.45 | 9.98-10.75 | 9.59-9.98 | |
| 4 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,95 | 7,95 | 8,09 | 8,22 | 8,32 | 8,42 | 8,5 | |
| 5 | PDRB per kapita | Rp. Juta Per Tahun | 133 | 145 | 160 | 175 | 180 | 186 | 191 | |
| 6 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 62,57 | 63,3 | 63,97 | 64,5 | 64,99 | 65,41 | 65,8 | |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,13 | 2,08 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,9 | 1,89 | |
| 8 | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 74,42 | 74,52 | 74,55 | 75,25 | 75,55 | 76 | 76,25 | |
| 9 | Prevalensi Stunting (%) | % | 16,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 10 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,33 | 12,51 | 12,69 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | |
| 11 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,582 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | |
| 12 | Indeks Keluarga Sehat | Angka | 0,33 | 0,35 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,58 | 0,6 | |
| 13 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 74,71 | 74,81 | 76,76 | 78,71 | 80,66 | 82,61 | 84,56 | |
| 14 | Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%) | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| 15 | Persentase benda,bangunan,struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran | % | 1,21 | 4,26 | 7,31 | 10,36 | 13,41 | 16,46 | 19,51 | |
| 16 | Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%) | % | 1,04 | 2,6 | 6,25 | 8,85 | 11,45 | 14,06 | 16,66 | |
| 17 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi | Persentase | 59,53 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,7 | 63,85 | |
| 18 | Tingkat Kemiskinan | (%) | 12,88 | 12,33 | 11,78 | 11,23 | 10,69 | 10,14 | 9,59 | |
| 19 | Rasio Gini | Indeks | 0,314 | 0,290-0,300 | 0,280-0,295 | 0,270-0,295 | 0,270-0,295 | 0,260-0,295 | 0,255-0,295 | |
| 20 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | % | 41,65 | 52,53 | 53,53 | 54,53 | 55,53 | 56,53 | 57,53 | |
| 21 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 63,47 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | |
| 22 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | - | 53,32 | 53,33 | 53,34 | 53,35 | 53,36 | 53,36 | |
| 23 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,32 | |
| 24 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ii) Numerasi | % | 34,56 | 59,53 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,7 | |
| 25 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca | % | 36,15 | 56,24 | 56,8 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | |
| 26 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase | 4 | 10 | 16 | 23 | 29 | 35 | 38 | |
| 27 | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persentase | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 28 | Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 96,89 | 97,23 | 97,56 | 97,9 | 98,24 | 98,58 | 98,92 | |
| 29 | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV | % | 66,95 | 71,71 | 72,46 | 73,21 | 73,96 | 74,71 | 75,46 | |
| 30 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 68,09 | 68,5 | 68,91 | 69,32 | 69,73 | 70,15 | 70,56 | |
| 31 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 56,65 | 59.15-59.15 | 61.65-61.65 | 64.15-64.15 | 66.65-66.65 | 69.15-69.15 | 71.65-71.65 | |
| 32 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 63,92 | 65,02 | 66,12 | 67,22 | 68,32 | 69,42 | 70,52 | |
| 33 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 51,64 | 54,54 | 57,44 | 60,34 | 63,24 | 66,14 | 69,04 | |
| 34 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,67 | 60,17 | 61,67 | 63,17 | 64,67 | 66,17 | 67,67 | |
| 35 | Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 96,89 | 97,23 | 97,56 | 97,9 | 98,24 | 98,58 | 98,92 | |
| 36 | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | 59,37 | 61,87 | 64,37 | 66,87 | 69,37 | 71,87 | 74,37 | |
| 37 | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani | % | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | |
| 38 | Iklim Keamanan SD | Nilai | 75,16 | 76,06 | 76,96 | 77,86 | 78,76 | 79,66 | 80,56 | |
| 39 | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | 55,93 | 58,33 | 60,73 | 63,13 | 65,53 | 67,93 | 70,33 | |
| 40 | Iklim Keamanan SMP | Nilai | 68,69 | 70,19 | 71,69 | 73,19 | 74,69 | 76,19 | 77,69 | |
| 41 | Iklim Kebhinekaan SD | Nilai | 70,62 | 71,79 | 72,69 | 73,62 | 74,62 | 75,62 | 76,62 | |
| 42 | Iklim Kebinekaan SMP | Nilai | 68,7 | 69,7 | 70,7 | 71,7 | 72,7 | 73,7 | 74,7 | |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| **AA** | **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan sampah (Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%) | % | 43,1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | |
| **AB** | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,37 | 3,51 | 3,6 | 3,71 | 3,82 | 3,93 | 4 | |
| 2 | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,57 | 4,6 | 4,63 | 4,66 | 4,69 | 4,72 | 4,77 | |
| 4 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,62 | 3,7 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Indeks Pemerintah Digital | Indeks | - | - | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | |
| 6 | Survey Penilaian Integritas | Nilai | 64,41 | 65,41 | 66,41 | 67,41 | 68,41 | 69,41 | 70,41 | |
| 7 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 86,08 | 86,5 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 87 | 87,01 | |
| 8 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Indeks | 78,2 | 78,98 | 80,23 | 81,58 | 82,9 | 84,23 | 87,25 | |

*Sumber : RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029, SIPD, diolah*

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. IKK digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau program berhasil dicapai. Target capaian Indikator Kinerja Kunci yang menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 6.5. berikut.

**Tabel 6.5**
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci**
**Tahun 2025-2029**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | | Indeks | 68.17 | 64.44 | 64.69 | 64.94 | 65.2 | 65.45 | 65.7 |
| 3. | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | |
| 4. | TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | positif | % | 79.57 | 82.54 | 85.50 | 88.47 | 91.44 | 93.99 | 96.54 |
| 5. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | positif | % | 87.80 | 88.90 | 91.90 | 92.90 | 93.90 | 94.90 | 95.50 |
| 7. | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | |
| 8. | Indeks Pencapaian SPM Kesehatan | komulatif | Indeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| 10. | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | komulatif | % | 94.67 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | positif | % | 61.16 | 62.11 | 63.18 | 65.28 | 67.52 | 68.94 | 70.12 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 12. | Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | positif | % | 84.17 | 84.17 | 85.33 | 86.67 | 88 | 88.67 | 90 |
| 13. | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | komulatif | (%) | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
| 14. | Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (air limbah) yang layak | komulatif | % | 83.67 | 85.20 | 86.42 | 88.15 | 89.62 | 91.05 | 92.70 |
| 15. | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | |
| 16. | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | komulatif | % | 72.72 | 72.72 | 72.98 | 73.24 | 73.5 | 73.76 | 74 |
| 17. | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 18. | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | positif | Persentase | 0.52 | 0.69 | 0.90 | 1.16 | 1.46 | 1.80 | 2.19 |
| 19. | Persentase penanganan tanggap bencana darurat | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Persentase Penanganan Pasca Bencana | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | |
| 22. | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial | negatif | % | 62.02 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
| 23. | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | negatif | % | 95.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | negatif | Persentase | 58.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | |
| 27. | Persentase Sengketa Perusahaan yang diselesaikan | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | positif | % | 69.85 | 70.85 | 71.85 | 72.60 | 73.10 | 73.60 | 74.10 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 29. | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | positif | Orang | 64766 | 64860 | 64885 | 64900 | 64910 | 64930 | 6500 |
| 30. | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | positif | Persentase | 68.04 | 69 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
| 31. | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi | positif | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 32. | Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan | | % | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 33. | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | positif | % | 41.65 | 52.53 | 53.53 | 54.53 | 55.53 | 56.53 | 57.53 |
| 34. | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | |
| 35. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | positif | Indeks | 83.78 | 84.19 | 84.60 | 85.01 | 85.42 | 85.83 | 86.24 |
| 36. | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37. | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | positif | Indeks | 59.86 | 60.36 | 60.86 | 61.36 | 61.86 | 62.36 | 62.86 |
| 38. | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | positif | Indeks | 76.97 | 78.47 | 79.97 | 81.47 | 82.97 | 84.47 | 85.97 |
| 39. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | positif | % | 54.84 | 54.90 | 54.95 | 55.10 | 55.20 | 55.30 | 55.40 |
| 40. | Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | positif | Nilai | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
| 41. | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | |
| 42. | Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 | | % | 43.41:43.41 | 43.50:43.50 | 43.65:43.65 | 43.70:43.70 | 43.75:43.75 | 44.00:44.00 | 44.00:44.00 |
| 43. | Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) | positif | Indeks | - | 42.00 | 42.20 | 42.40 | 42.60 | 42.80 | 43.00 |
| 44. | Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan | positif | % | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45. | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | positif | Persentase | 94.57 | 94.60 | 94.70 | 94.80 | 94.90 | 95.00 | 95.20 |
| 46. | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | negatif | % | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 47. | Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan | positif | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 48. | Skor Pola Pangan Harapan | positif | Nilai | 92.8 | 92.84 | 92.86 | 92.88 | 93 | 93.02 | 93.04 |
| 49. | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | |
| 50. | Indeks Kualitas Air | | Indeks | 58.42 | 65.13 | 65.33 | 65.53 | 65.73 | 65.93 | 66.13 |
| 51. | Indeks Kualitas Lahan | positif | Indeks | 67.51 | 67.93 | 68.00 | 68.07 | 68.14 | 68.21 | 68.28 |
| 52. | Indeks Kualitas Udara | | Indeks | 91.49 | 61.91 | 62.31 | 62.71 | 62.11 | 63.51 | 63.92 |
| 53. | Persentase Pengawasan Izin Usaha Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54. | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55. | Persentase Penanganan sampah | positif | % | 43.1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| 56. | Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57. | Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58. | Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59. | Persentase Luasan RTH yang dikelola | positif | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 60. | 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | |
| 61. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | positif | Indeks | 94.11 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 62. | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63. | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64. | Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan | | % | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 80 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 65. | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | positif | Persentase | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 66. | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67. | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | |
| 68. | Persentase desa yang memiliki Bumdes | positif | % | 0 | 68.32 | 71.43 | 74.53 | 77.64 | 80.74 | 80.74 |
| 69. | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70. | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | komulatif | Persentase | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 71. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73. | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74. | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75. | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | |
| 76. | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja | positif | Indeks | 83.10 | 83.50 | 83.90 | 84.20 | 84.50 | 84.70 | 84.90 |
| 77. | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) | positif | % | 71.60 | 72.00 | 72.10 | 73.50 | 73.60 | 73.70 | 73.80 |
| 78. | Indeks Lansia Berdaya | positif | Indeks | 57.50 | 57.80 | 58.00 | 58.10 | 58.30 | 58.50 | 58.70 |
| 79. | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | negatif | % | 6.89 | 6.85 | 6.83 | 6.80 | 6.77 | 6.75 | 6.72 |
| 80. | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri | positif | Persentase | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 | 80 | 100 |
| 81. | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | negatif | Persentase | 11.70 | 11.35 | 11.00 | 10.57 | 10.53 | 10.25 | 10.00 |
| 82. | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 43.2 | 42.5-42 | 42-41.7 | 41.7-41.3 | 41.3-41 | 41-40.8 | 40.8-40.8 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 83. | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | |
| 84. | Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ | positif | % | 41 | 41 | 53 | 64 | 76 | 88 | 100 |
| 85. | Persentase Transportasi Yang Nyaman dan Laik Jalan | positif | % | 77 | 52 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 86. | Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan | negatif | % | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 |
| 87. | Persentase Sarana Prasarana ASDP dalam kondisi baik | positif | % | 35 | 35 | 47 | 62 | 72 | 83 | 90 |
| 88. | PersentaseTerpeliharanya Sarana Prasarana Bandar Udara | positif | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| 89. | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| 90. | Persentase masyarakat yang menerima informasi publik | positif | % | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 91. | 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | |
| 92. | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | positif | Persentase | 0.0138 | 1.3316 | 1.3416 | 1.3516 | 1.3616 | 1.3716 | 1.3816 |
| 93. | Persentase usaha mikro yang memanfaatkan teknologi digital | positif | % | 0.80 | 1.30 | 2.10 | 2.90 | 3.80 | 5.00 | 6.30 |
| 94. | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro | positif | % | - | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 |
| 95. | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | positif | Persentase | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 10.34 | 11.73 | 13.10 |
| 96. | Persentase Koperasi Aktif | positif | Persentase | 51.43 | 33.35 | 34.18 | 34.82 | 36.93 | 38.86 | 40.76 |
| 97. | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | positif | % | 14.29 | 10.57 | 11.99 | 13.39 | 14.77 | 16.13 | 17.47 |
| 98. | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | positif | Persentase | 28.57 | 18.13 | 19.52 | 20.86 | 22.16 | 23.39 | 24.75 |
| 99. | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | positif | % | 10.58 | 12.32 | 13.92 | 15.35 | 16.61 | 17.69 | 18.60 |
| 100. | Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan | positif | % | 0 | 0.0829 | 0.1216 | 0.1581 | 0.1918 | 0.2228 | 0.2510 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 101. | Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | positif | Persentase | 50.16 | 50.50 | 51.00 | 51.50 | 52.00 | 52.50 | 53.00 |
| 102. | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | |
| 103. | Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha | positif | % | 95.91 | 96.49 | 97.66 | 98.25 | 98.83 | 99.42 | 99.55 |
| 104. | Persentase penerbitan izin dan non izin sesuai SOP | positif | % | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 105. | Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi | positif | % | 102.07 | 102.09 | 102.11 | 102.13 | 102.15 | 102.17 | 102.19 |
| 106. | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin | positif | % | 99.36 | 99.40 | 99.43 | 99.45 | 99.48 | 99.50 | 99.55 |
| 107. | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | positif | % | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 |
| 108. | Persentase Peningkatan Investor yang Berminat Sesuai Ketentuan | positif | % | 15 | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 109. | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha | positif | % | 62 | 62.50 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 110. | 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | |
| 111. | Persentase pemuda yang berwirausaha | positif | % | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.70 |
| 112. | Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga | | % | 18.95 | 18.95 | 19.88 | 20.81 | 21.74 | 22.67 | 23.60 |
| 113. | Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat provinsi | negatif | Peringkat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 114. | Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi | positif | % | 30.60 | 30.60 | 46.35 | 62.10 | 77.85 | 93.60 | 100 |
| 115. | 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | |
| 116. | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi | positif | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 117. | Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data | positif | % | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 118. | 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 119. | Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 120. | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | negatif | % | 0 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 121. | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 122. | Terlestarikannya cagar budaya | positif | % | 34 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 187 |
| 123. | 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | |
| 124. | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | positif | Nilai | 69.81 | 70.51 | 71.21 | 71.93 | 72.64 | 73.37 | 74.10 |
| 125. | 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | |
| 126. | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | positif | Nilai | 81.61 | 83.30 | 84.99 | 86.67 | 88.36 | 90.05 | 91.74 |
| 127. | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 128. | Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) | positif | Ton | 37339.17 | 36489 | 36522 | 36556 | 36589 | 36622 | 36655 |
| 129. | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 130. | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | positif | % | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| 131. | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih | positif | % | 29.5 | 29.5 | 33.9 | 38.3 | 42.7 | 47.1 | 51.5 |
| 132. | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 133. | Jumlah Produksi Padi | positif | Ton | 285366 | 334779 | 336452 | 338134 | 339824 | 341523 | 343230 |
| 134. | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa | positif | Ton | 6513 | 6546 | 6579 | 6612 | 6645 | 6678 | 6678 |
| 135. | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet | positif | Ton | 177670 | 177670 | 179447 | 181241 | 181241 | 183053 | 183053 |
| 136. | Jumlah Produksi Jagung | positif | Ton | 40136 | 41109 | 41314 | 41520 | 41727 | 41935 | 42144 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 137. | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai | positif | Ton | 1955.11 | 1974.66 | 1994.41 | 2014.35 | 2034.50 | 2054.84 | 2075.38 |
| 138. | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit | positif | Ton | 470899 | 475985 | 476366 | 476747 | 477128 | 477509 | 477509 |
| 139. | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Gambir | | Ton | 8.16 | 8.16 | 8.20 | 8.24 | 8.28 | 8.32 | 8.32 |
| 140. | Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) | positif | Ton | 4361 | 4491 | 4626 | 4765 | 4908 | 5055 | 5206 |
| 141. | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | | % | 53.00 | 53.02 | 53.52 | 54.08 | 54.69 | 55.37 | 56.21 |
| 142. | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | | % | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 143. | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | |
| 144. | Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten | negatif | % | 5.85 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5 | 5 |
| 145. | Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | positif | Persentase | 26.02 | 31.02 | 36.02 | 41.02 | 46.02 | 51.02 | 56.02 |
| 146. | Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang | positif | % | 26.25 | 32 | 38 | 48 | 57.5 | 67 | 76 |
| 147. | Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | positif | % | 92.7 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 148. | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | |
| 149. | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | positif | % | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 150. | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | positif | % | 73.49 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 151. | Persentase data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota dalam SIINas terhadap total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota | positif | % | 48.88 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 152. | 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | |
| 153. | Persentase Penyelesaian Lahan Transmigrasi yang Bersertifikat | positif | % | 19.7 | 32.95 | 43.39 | 51.84 | 61.28 | 70.72 | 100 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 154. | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 155. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten | positif | Nilai | 69.07 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
| 156. | Indeks Reformasi Hukum | positif | Indeks | 86.08 | 86.5 | 86.7 | 86.8 | 86.9 | 87 | 87.01 |
| 157. | 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | |
| 158. | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | positif | Indeks | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 159. | Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran | positif | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 160. | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | positif | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 161. | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel | positif | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 162. | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | positif | Persentase | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 163. | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | positif | Persentase | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 164. | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | positif | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 165. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten | positif | Nilai | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 166. | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | positif | Persentase | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 167. | 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | | | | |
| 168. | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | positif | Indeks | 64.41 | 65.41 | 66.41 | 67.41 | 68.41 | 69.41 | 70.41 |
| 169. | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 170. | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 171. | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 172. | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 173. | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 174. | 5.02 - KEUANGAN | | | | | | | | | |
| 175. | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | positif | Nilai | Wajar Dengan Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 176. | Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 177. | Persentase aset daerah yang tertib | positif | % | 99.61 | 99.65 | 99.70 | 99.75 | 99.80 | 99.85 | 99.90 |
| 178. | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | komulatif | % | 10.57 | 12.23 | 12.53 | 12.85 | 13.17 | 13.51 | 14.05 |
| 179. | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | negatif | % | 7.78 | 7.73 | 7.23 | 6.73 | 6.23 | 5.73 | 5.23 |
| 180. | Persentase laporan keuangan tepat waktu | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 181. | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 182. | Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | negatif | % | 4.28 | 3.78 | 3.28 | 2.78 | 2.28 | 1.78 | 1.28 |
| 183. | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | negatif | % | 11.67 | 8.73 | 8.70 | 8.65 | 8.60 | 8.55 | 8.50 |
| 184. | Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) | negatif | % | 61.83 | 41.89 | 41.00 | 40.90 | 40.75 | 40.00 | 39.55 |
| 185. | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 186. | Manajemen Aset | positif | Kategori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 187. | 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | |
| 188. | Persentase capaian kinerja ASN | positif | % | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 189. | 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 190. | Indeks Inovasi Daerah | | Angka | 30.97 | 40.01 | 45.02 | 46.55 | 50.12 | 54.7 | 60.01 |
| 191. | Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan | positif | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 192. | Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti | positif | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 193. | Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan | positif | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 194. | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 195. | Perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM | positif | Predikat | WBK | WBK | WBK | WBK | WBK | WBK | WBK |
| 196. | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | positif | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 197. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | positif | Nilai | 3 | 3.05 | 3.10 | 3.12 | 3.15 | 3.17 | 3.20 |
| 198. | Perangkat Daerah yang memeroleh nilai SAKIP minimal BB | positif | Predikat | 65 | 67 | 69 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| 199. | Persentase audit kepatuhan terhadap perangkat daerah | positif | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 68 | 70 | 73 |
| 200. | Opini BPK RI terhadap LKPD | positif | Predikat | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 201. | 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 202. | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat) | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 203. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 204. | Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 205. | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Supat | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 206. | Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat) | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 207. | 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 208. | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 209. | Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin | positif | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 210. | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211. | Persentase Ormas, LSM dan OKP yang lulus verifikasi | komulatif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 212. | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | komulatif | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029, SIPD, diolah*

# BAB VII
# PENUTUP

# BAB VII
# PENUTUP

***"RKPD Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan secara sistematis dalam upaya pelaksanaan program kegiatan prioritas untuk pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 dengan tema "Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi ekonomi" melalui 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan ."***

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan

sinergitas kinerja pembangunan semua *stakeholders*, maka telah dilaksanakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap tujuan dan sasaran RKPD, penelaahan terhadap arah kebijakan RKPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Pusat, perumusan prioritas pembangunan daerah serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagai dokumen rencana pembangunan tahun 2026 memusatkan pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengarahkan pada pencapaian fokus pembangunan Tahun 2026 yaitu **"Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi"**. Prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar, menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur Kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan Pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia dan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan efektif

berorientasi pada pelayanan publik sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Musi Banyuasin. Aamiin.